RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
dan
BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.

15. Pengendalian ...

15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai data dan informasi pembangunan Daerah serta memberikan arahan tentang perencanaan dan implementasi strategi dan kebijakan daerah selama 5 tahun serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* daerah dalam mewujudkan Manggarai Timur yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

(2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
   a. menjabarkan visi dan misi, program Kepala Daerah sebagai upaya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal;
   b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Pusat;
   c. menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2025-2029;
   d. menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih;
   e. menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati; serta
   f. menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3 ...

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
   c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   e. Bab V Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 06/2025

s

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Manggarai Timur seperti lahan pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan energi terbarukan. Sedangkan potensi sumber daya manusia di Manggarai Timur yakni terdapat beragam masyarakat dari segi suku, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Manggarai Timur yang sadar memiliki berbagai potensi tersebut, terlahir dari kesadaran dan cita-cita untuk mengubah keadaan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pemerataan pembangunan. Adanya keunggulan sumber daya dan cita-cita tersebut menjadi potensi daerah untuk mengembangkan Kabupaten Manggarai Timur yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Perjuangan pembangunan sudah dimulai sejak tahun 1986 namun sempat terhenti sebelum akhirnya kembali menguat pada tahun 2000-an saat wacana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur dimulai. Wacana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur yang terus diperjuangkan berhasil didapatkan pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur. Keberhasilan ini dapat dicapai karena melihat kebutuhan masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan optimisme melingkupi semua elemen yang berjuang untuk membentuk Kabupaten Manggarai Timur.

Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki luas wilayah 238.952 ha dengan jumlah penduduk sekitar 296.174 jiwa pada tahun 2024 dan terdiri dari 12 kecamatan, 159 desa, dan 17 kelurahan, selalu berupaya untuk membangun daerah yang lebih baik. Semangat membangun daerah sudah dimulai sejak kepemimpinan Bupati pertama Kabupaten Manggarai Timur yaitu Frans B. Padju Leok tahun 2007-2009. Walaupun Bupati dan Wakil

Bupati mengalami perubahan setiap lima tahun, pembangunan daerah tetap menjadi fokus utama yang dicapai oleh setiap pemimpin daerah Kabupaten Manggarai Timur. Hingga tahun 2025-2030 yang dipimpin oleh Agas Andreas, SH., M.Hum. selaku Bupati dan Tarsisius Sjukur, S.S. selaku Wakil Bupati, pembangunan daerah Manggarai Timur yang semakin maju ingin dicapai.

Namun demikian, Kabupaten Manggarai Timur juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam pembangunan daerahnya. Beberapa tantangan dan masalah tersebut antara lain adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan; rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik; rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan; serta tingginya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Tantangan dan masalah tersebut harus diatasi dengan merumuskan perencanaan daerah yang mempertimbangkan potensi, permasalahan dan tantangan daerah serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan kelembagaan daerah saat ini dan proyeksi ke depan.

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan tujuan pembangunan global. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus didasarkan pada perencanaan yang matang, komprehensif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut dan melaksanakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan merasa perlu untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top-Down Planning.

Dokumen RPJMD disusun secara berjenjang, dimana dokumen RPJPD dijabarkan dan disusun secara simultan serta terkoordinasi. Sebelum Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 terpilih, Bapperida Kabupaten Manggarai Timur telah berupaya menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 disusun selaras berdasarkan data dan analisis kondisi daerah. Setelah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur yang baru dilantik, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini diselaraskan dengan janji politik yang sudah disampaikan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu dokumen juga disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045 yang sudah disusun dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Setelah mendapatkan review, dokumen rancangan awal RPJMD akan menjadi dokumen Rancangan RPJMD dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 yang disusun ini merupakan pedoman bagi Kepala Daerah dalam pencapaian target pembangunan daerah selama lima tahun kedepan dengan menjabarkan visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 198

LAMPIRAN ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini menjadi landasan awal dalam perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur untuk lima tahun ke depan.

RPJMD ini disusun dengan pendekatan teknokratik, politis, dan partisipatif. Penyusunan dilakukan melalui analisis yang berbasis ilmiah, penggunaan data yang valid dan terverifikasi, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen ini mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan nasional, visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta harapan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman strategis yang adaptif dan responsif terhadap tantangan serta peluang pembangunan yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun dokumen ini tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan—baik dari unsur perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, maupun masyarakat luas—yang telah memberikan masukan, data, dan informasi yang sangat berharga dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah menuju Kabupaten Manggarai Timur yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Kami juga berharap dokumen ini terus disempurnakan dalam tahapan berikutnya sesuai dinamika dan kebutuhan pembangunan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah tercinta ini.

Kabupaten Manggarai Timur, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 10

1.4 Maksud dan Tujuan 11

1.5 Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 15

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 15

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 81
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 119
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 155

2.2 Gambaran Keuangan Daerah 274

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 275
2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024 304
2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 309

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 322

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 322
2.3.2 Isu Strategis Daerah 370

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 410

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 410

3.1.1 Visi dan Misi 410
3.1.2 Tujuan dan Sasaran 425

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 452

3.2.1 Strategi Daerah 452
3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan 515
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 550

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 606

4.1 Program Perangkat Daerah 611

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 662

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU) 662
4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) 666

BAB V PENUTUP 675

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Manggarai Timur 16
Tabel 2. 2 Kondisi Topografi di Kabupaten Manggarai Timur 17
Tabel 2. 3 Kondisi Kelerengan di Kabupaten Manggarai Timur 19
Tabel 2. 4 Formasi Geologi Kabupaten Manggarai Timur 20
Tabel 2. 5 Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai Timur 23
Tabel 2. 6 Mata Air yang Sudah Diintervensi/Terpelihara di Kabupaten Manggarai Timur 24
Tabel 2. 7 Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Manggarai Timur 29
Tabel 2. 8 Tabel 2.8 Daerah Irigasi (D.I.) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 31
Tabel 2. 9 Sebaran Bendung Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 40
Tabel 2. 10 Sebaran Danau di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 43
Tabel 2. 11 Curah Hujan Kabupaten Mangarai Timur 43
Tabel 2. 12Tabel 2.12 Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim 44
Tabel 2. 13 Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Manggarai Timur 46
Tabel 2. 14 Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur 47
Tabel 2. 15 Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Manggarai Timur 48
Tabel 2. 16 Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Manggarai Timur 2023-2029 . 49
Tabel 2. 17 Perhitungan Daya Dukung AirBerdasarkan Sistem Grid Tahun 2024 50
Tabel 2. 18 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045 ... 50
Tabel 2. 19 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Golongan Tarif 52
Tabel 2. 20 Persentase Cakupan Air Minum Bersih Tahun 2020-2024 53
Tabel 2. 21 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun 55
Tabel 2. 22 Skor PPH Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional 57
Tabel 2. 23 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan 59
Tabel 2. 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur 61
Tabel 2. 25 Indeks Kualitas Air Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 62
Tabel 2. 26 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 62
Tabel 2. 27 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 63
Tabel 2. 28 Jumlah Rumah Tangga (RT) Bersanitasi Layak Kabupaten Manggarai Timur 64
Tabel 2. 29 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2020-2024 65
Tabel 2. 30 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 66
Tabel 2. 31Data Kejadian Bencana di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 68
Tabel 2. 32 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 68
Tabel 2. 33 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 71
Tabel 2.34 Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Manggarai Timur .. 72
Tabel 2. 35 Kepadatan Penduduk Manggarai Timur Tahun 2020-2024 73
Tabel 2. 36 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) 83
Tabel 2. 37 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar 86
Tabel 2. 38 Persentase Penduduk Miskin Manggarai Timur, Provininsi NTT dan Nasional 89
Tabel 2. 39 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 90
Tabel 2. 40 Garis Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional 91
Tabel 2. 41 Tingkat Keparahan Kemiskinan 92
Tabel 2. 42 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional ... 92
Tabel 2. 43 PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional 93
Tabel 2. 44 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Timur 95

Tabel 2. 45 Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional 95
Tabel 2. 46 Indeks Pembangunan Manusia 98
Tabel 2. 47 Angka Harapan Hidup (UHH) 99
Tabel 2. 48 Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 101
Tabel 2. 49 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Manggarai Timur 102
Tabel 2. 50 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Manggarai Timur 103
Tabel 2. 51Persentase Kemampuan Literasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022-2024 104
Tabel 2. 52 Persentase Numerasi Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022-2024 104
Tabel 2. 53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 105
Tabel 2. 54 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 108
Tabel 2. 55 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT Tahun 2020-2024 109
Tabel 2. 56 Persentase Pemeluk Agama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 109
Tabel 2. 57 Jumlah Tempat Ibadah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 110
Tabel 2. 58 Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 114
Tabel 2. 59 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 115
Tabel 2. 60 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Manggarai Timur 117
Tabel 2. 61 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Manggarai Timur 118
Tabel 2. 62 Indikator IDSD 2024 pada Pilar Pasar Tenaga Kerja 120
Tabel 2. 63 Indikator IDSD 2024 pada Pilar Sistem Keuangan 121
Tabel 2. 64 Indikator IDSD 2024 pada Pilar Kapabilitas Inovasi 121
Tabel 2. 65 Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 122
Tabel 2. 66 Rasio PDRB Industri Pengolahan 123
Tabel 2. 67 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum 124
Tabel 2. 68 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 128
Tabel 2. 69 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 128
Tabel 2. 70 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Nusa Tenggara Timur 131
Tabel 2. 71 Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Manggarai Timur 132
Tabel 2. 72 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Manggarai Timur 134
Tabel 2. 73 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Manggarai Timur 135
Tabel 2. 74 Kondisi Jalan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2024 137
Tabel 2. 75 Penggunaan listrik di Kabupaten Manggarai Timur 146
Tabel 2. 76 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Manggarai Timur 148
Tabel 2. 77 Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Desa Manggarai Timur 149
Tabel 2. 78 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Timur 151
Tabel 2. 79 Tingkat Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 153
Tabel 2. 80 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran 153
Tabel 2. 81 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Manggarai Timur 155
Tabel 2. 82 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 156
Tabel 2. 83 Indeks Pelayanan Publik Manggarai Timur Tahun 2020-2024 157
Tabel 2. 84 Indeks Integritas Nasional Manggarai Timur Tahun 2024 158
Tabel 2. 85 Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 160
Tabel 2. 86 Capaian Aksi HAM Kabupaten Manggarai Timur 161
Tabel 2. 87 Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Manggarai Timur 162

Tabel 2. 88 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Manggarai Timur 163
Tabel 2. 89 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Manggarai Timur 164
Tabel 2. 90 Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat Kabupaten Manggarai Timur 166
Tabel 2. 91 Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat Kabupaten Manggarai Timur 166
Tabel 2. 92 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD dan SMP/Sederajat 167
Tabel 2. 93 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP/Sederajat 168
Tabel 2. 94 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP/Sederajat 170
Tabel 2. 95 APK, APM, APS PAUD Kabupaten Manggarai Timur 170
Tabel 2. 96 Jenjang Pendidikan dan Sertifikasi Guru PAUD Manggarai Timur 171
Tabel 2. 97 Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi Manggarai Timur 173
Tabel 2. 98 Angka Kematian Ibu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 174
Tabel 2. 99 Jumlah Persalinan Usia Dini Manggarai Timur Tahun 2020-2024 174
Tabel 2. 100 Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 175
Tabel 2. 101 Penyakit Terbanyak Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021-2024 177
Tabel 2. 102 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 179
Tabel 2. 103 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Manggarai Timur Tahun 2024 179
Tabel 2. 104 Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis 184
Tabel 2. 105 Peruntukan Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 185
Tabel 2. 106 Luas Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur 187
Tabel 2. 107 Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur Manggarai Timur 2020-2024 188
Tabel 2. 108 Data besaran backlog perumahan Manggarai Timur Tahun 2024 189
Tabel 2. 109 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Manggarai Timur 190
Tabel 2. 110 Angka Kriminalitas Manggarai Timur Tahun 2020-2024 191
Tabel 2. 111 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Manggarai Timur 192
Tabel 2. 112 Kinerja Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 194
Tabel 2. 113 Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana 195
Tabel 2. 114 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem 197
Tabel 2. 115Garis Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur 198
Tabel 2. 116 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Manggarai Timur 199
Tabel 2. 117 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Manggarai Timur 199
Tabel 2. 118 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Utama 201
Tabel 2. 119 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 202
Tabel 2. 120 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 203
Tabel 2. 121 Indeks Penatagunaan Tanah di Kabupaten Manggarai Timur 206
Tabel 2. 122 Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024 207
Tabel 2. 123 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur 208
Tabel 2. 124 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kecamatan Borong 211
Tabel 2. 125 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk 212
Tabel 2. 126 Uji Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Kabupaten Manggarai Timur 213
Tabel 2. 127 Total Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif 214
Tabel 2. 128 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan 214
Tabel 2. 129 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan 215
Tabel 2. 130 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Manggarai Timur 218
Tabel 2. 131 Data Kinerja Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 219
Tabel 2. 132 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 221
Tabel 2. 133 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Manggarai Timur 222

Tabel 2. 134 Data Kecelakaan Lalu Lintas Manggarai Timur Tahun 2024 223
Tabel 2. 135 Kinerja Komunikasi dan Informatika Manggarai Timur 223
Tabel 2. 136 Capaian Kinerja Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 225
Tabel 2. 137 Perbandingan Omset Per Koperasi Aktif di Provinsi NTT Tahun 2024 226
Tabel 2. 138 Capaian Kinerja Pemerintah dalam Urusan Penanaman Modal 227
Tabel 2. 139 Organisasi Pemuda dan Olahraga 230
Tabel 2. 140 Kinerja Statistik Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 230
Tabel 2. 141 Kinerja Persandian Manggarai Timur 231
Tabel 2. 142 Jumlah Festival Seni Budaya Manggarai Timur 233
Tabel 2. 143 Kinerja Perpustakaan Manggarai Timur 234
Tabel 2. 144 Indeks Literasi Masyarakat Manggarai Timur 235
Tabel 2. 145 Indeks Numerasi Masyarakat Manggarai Timur 236
Tabel 2. 146 Kinerja Pengelolaan Arsip Manggarai Timur 236
Tabel 2. 147 Jumlah Nelayan di Manggarai Timur Tahun 2024 240
Tabel 2. 148 Jumlah Armada Kapal Penangkapan Ikan di Manggarai Timur 241
Tabel 2. 149 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar (Ton) 242
Tabel 2. 150 Kinerja Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 243
Tabel 2. 151 Perbandingan Jumlah Destinasi Wisata di Provinsi NTT Tahun 2023 245
Tabel 2. 152 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 246
Tabel 2. 153 Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Manggarai Timur 246
Tabel 2. 154 Luas Panen Tanaman Pertanian Manggarai Timur 249
Tabel 2. 155 Populasi Ternak di Manggarai Timur Tahun 2020-2024 249
Tabel 2. 156 Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak di Manggarai Timur 250
Tabel 2. 157 Target dan Realisasi Inseminasi Buatan (IB), Bunting Inseminasi Buatan (IB) 251
Tabel 2. 158 Kinerja Urusan Kehutanan di Manggarai Timur 252
Tabel 2. 159 Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Manggarai Timur 253
Tabel 2. 160 Usaha Sektor Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur 254
Tabel 2. 161 Jumlah Usaha Sektor Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur 255
Tabel 2. 162 Indikator Kinerja Perindustrian di Manggarai Timur 257
Tabel 2. 163 Jumlah Komponen Sektor Perindustrian di Manggarai Timur 258
Tabel 2. 164 Kinerja Sekretariat Daerah Manggarai Timur 260
Tabel 2. 165 Kinerja Sekretariat Dewan Manggarai Timur 261
Tabel 2. 166 Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 262
Tabel 2. 167 Kinerja Keuangan Kabupaten Manggarai Timur 264
Tabel 2. 168 Kinerja Kepegawaian Kabupaten Manggarai Timur 266
Tabel 2. 169 Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai Timur 268
Tabel 2. 170 Kinerja Penelitian dan Pengembangan Manggarai Timur 269
Tabel 2. 171 Kinerja Pengawasan Kabupaten Manggarai Timur 271
Tabel 2. 172 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Manggarai Timur 273
Tabel 2. 173 Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 279
Tabel 2. 174 Pertumbuhan Realisasi APBD Manggarai Timur Tahun 2020-2024 281
Tabel 2. 175 Realisasi Pendapatan Daerah Manggarai Timur Tahun 2020-2024 286
Tabel 2. 176 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Manggarai Timur 289
Tabel 2. 177 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 293
Tabel 2. 178 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 296

Tabel 2. 179 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 301
Tabel 2. 180 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 302
Tabel 2. 181 Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 305
Tabel 2. 182 Proyeksi Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2026-2030 310
Tabel 2. 183 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 321
Tabel 2. 184 Permasalahan Makro Kesejahteraan Ekonomi Manggarai Timur 324
Tabel 2. 185 Analisis Permasalahan Sektor Primer 325
Tabel 2. 186 Analisis Permasalahan Sektor Sekunder 330
Tabel 2. 187 Analisis Permasalahan Sektor Tersier 334
Tabel 2. 188 Analisis Permasalahan Makro Kualitas Pembangunan Manusia 337
Tabel 2. 189 Analisis Permasalahan Kualitas Pendidikan 339
Tabel 2. 190 Analisis Permasalahan Derajat Kesehatan Masyarakat Manggarai Timur 342
Tabel 2. 191 Analisis Permasalahan Kualitas Hidup Masyarakat Manggarai Timur 344
Tabel 2. 192 Analisis Permasalahan Kesenjangan Pembangunan Manusia Antargender 347
Tabel 2. 193 Analisis Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 349
Tabel 2. 194 Analisis Permasalahan Kualitas Aksesibilitas Infrastruktur 351
Tabel 2. 195 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup Manggarai Timur 354
Tabel 2. 196 Analisis Permasalahan Tata kelola Pemerintahan 356
Tabel 2. 197 Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 358
Tabel 2. 198 Analisis Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan 360
Tabel 2. 199 Analisis Permasalahan Kualitas Pelayanan Manggarai Timur 362
Tabel 2. 200 Analisis Permasalahan Efektivitas Pemerintahan Manggarai Timur 364
Tabel 2. 201 Analisis Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Manggarai Timur 369
Tabel 2. 202 Isu Strategis Daerah Kabupaten Manggarai Timur 372
Tabel 3. 1 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi NTT serta RPJMN 414
Tabel 3. 2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Manggarai Timur 2025-2045 417
Tabel 3. 3 Target Sasaran Visi RPJPD tahun 2025-2045 Periode I 419
Tabel 3. 4 Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Manggarai Timur untuk Periode I RPJMD Tahun 2025-2029 420
Tabel 3. 5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 427
Tabel 3. 6 Keterkaitan Kata Kunci dalam Visi dengan Sasaran Daerah 433
Tabel 3. 7 Strategi Pembangunan Misi 1 Berdasarkan Sasaran Daerah 453
Tabel 3. 8 Strategi Pembangunan Misi 2 Berdasarkan Sasaran Daerah 466
Tabel 3. 9 Strategi Pembangunan Misi 3 Berdasarkan Sasaran Daerah 480
Tabel 3. 10 Strategi Pembangunan Misi 4 Berdasarkan Sasaran Daerah 493
Tabel 3. 11 Strategi Pembangunan Misi 5 Berdasarkan Sasaran Daerah 500
Tabel 3. 12 Strategi Pembangunan Misi 6 Berdasarkan Sasaran Daerah 504
Tabel 3. 13 Tahapan Pembangunan RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029 515
Tabel 3. 14 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029 518
Tabel 3. 15 Arah Kebijakan Misi 1 521
Tabel 3. 16 Arah Kebijakan Misi 2 528
Tabel 3. 17 Arah Kebijakan Misi 3 532
Tabel 3. 18 Arah Kebijakan Misi 4 538

Tabel 3. 19 Arah Kebijakan Misi 5 541
Tabel 3. 20 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 6 544
Tabel 3. 21 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029..... 554
Tabel 4. 1 Cross Cutting Program Prioritas Daerah 607
Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah..... 592
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur..... 664
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Manggarai Timur..... 667

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya 11
Gambar 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kbaupaten Manggarai Timur 53
Gambar 2. 2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 68
Gambar 2. 3 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai Timur 69
Gambar 2. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 71
Gambar 2. 5Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 74
Gambar 2. 6 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Manggarai Timur 75
Gambar 2. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 76
Gambar 2. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2030 77
Gambar 2. 9 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 77
Gambar 2. 10 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 80
Gambar 2. 11 Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 80
Gambar 2. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional 85
Gambar 2. 13 Prevalensi Stunting Manggarai Timur Tahun 2021-2024 Menurut SSGI 100
Gambar 2. 14 Perbandingan Pilar IDSD 2024 Nasional, Provinsi NTT dan Manggarai Timur 120
Gambar 2. 15 Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur Kabupaten Manggarai Timur 136
Gambar 2. 16 Indeks Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Manggarai Timur 140
Gambar 2. 17 Pendapatan Daerah Manggarai Timur berdasarkan Sumber Pendapatan 284
Gambar 2. 18 Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 292
Gambar 3. 1 Sinkronisasi Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 413
Gambar 3. 2 Program Kerja Unggulan Kepala Daerah 552

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Manggarai Timur seperti lahan pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan energi terbarukan. Sedangkan potensi sumber daya manusia di Manggarai Timur yakni terdapat beragam masyarakat dari segi suku, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Manggarai Timur yang sadar memiliki berbagai potensi tersebut, terlahir dari kesadaran dan cita-cita untuk mengubah keadaan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan pemerataan pembangunan. Adanya keunggulan sumber daya dan cita-cita tersebut menjadi potensi daerah untuk mengembangkan Kabupaten Manggarai Timur yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Perjuangan pembangunan sudah dimulai sejak tahun 1986 namun sempat terhenti sebelum akhirnya kembali menguat pada tahun 2000-an saat wacana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur dimulai. Wacana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur yang terus diperjuangkan berhasil didapatkan pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur. Keberhasilan ini dapat dicapai karena melihat kebutuhan masyarakat yang

didukung oleh pemerintah dan optimisme melingkupi semua elemen yang berjuang untuk membentuk Kabupaten Manggarai Timur.

Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki luas wilayah 238.952 ha dengan jumlah penduduk sekitar 296.174 jiwa pada tahun 2024 dan terdiri dari 12 kecamatan, 159 desa, dan 17 kelurahan, selalu berupaya untuk membangun daerah yang lebih baik. Semangat membangun daerah sudah dimulai sejak kepemimpinan Bupati pertama Kabupaten Manggarai Timur yaitu Frans B. Padju Leok tahun 2007-2009. Walaupun Bupati dan Wakil Bupati mengalami perubahan setiap lima tahun, pembangunan daerah tetap menjadi fokus utama yang dicapai oleh setiap pemimpin daerah Kabupaten Manggarai Timur. Hingga tahun 2025-2030 yang dipimpin oleh Agas Andreas, SH., M.Hum. selaku Bupati dan Tarsisius Sjukur, S.S. selaku Wakil Bupati, pembangunan daerah Manggarai Timur yang semakin maju ingin dicapai.

Namun demikian, Kabupaten Manggarai Timur juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam pembangunan daerahnya. Beberapa tantangan dan masalah tersebut antara lain adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan; rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik; rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan; serta tingginya kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Tantangan dan masalah tersebut harus diatasi dengan merumuskan perencanaan daerah yang mempertimbangkan potensi, permasalahan dan tantangan daerah serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan kelembagaan daerah saat ini dan proyeksi ke depan.

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan tujuan pembangunan global. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus didasarkan

pada perencanaan yang matang, komprehensif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut dan melaksanakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan dalam bidang perencanaan merasa perlu untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis,

pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*.

Dokumen RPJMD disusun secara berjenjang, dimana dokumen RPJPD dijabarkan dan disusun secara simultan serta terkoordinasi. Sebelum Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 terpilih, Bapperida Kabupaten Manggarai Timur telah berupaya menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 disusun selaras berdasarkan data dan analisis kondisi daerah. Setelah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur yang baru dilantik, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini diselaraskan dengan janji politik yang sudah disampaikan kepala daerah Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu dokumen juga disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045 yang sudah disusun dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Setelah mendapatkan review, dokumen rancangan awal RPJMD akan menjadi dokumen Rancangan RPJMD dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 yang disusun ini merupakan pedoman bagi Kepala Daerah dalam pencapaian target pembangunan daerah selama lima tahun kedepan dengan menjabarkan visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); pasal 18 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perizinan lingkungan, pengelolaan mutu air, udara, dan laut, serta pengendalian kerusakan lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

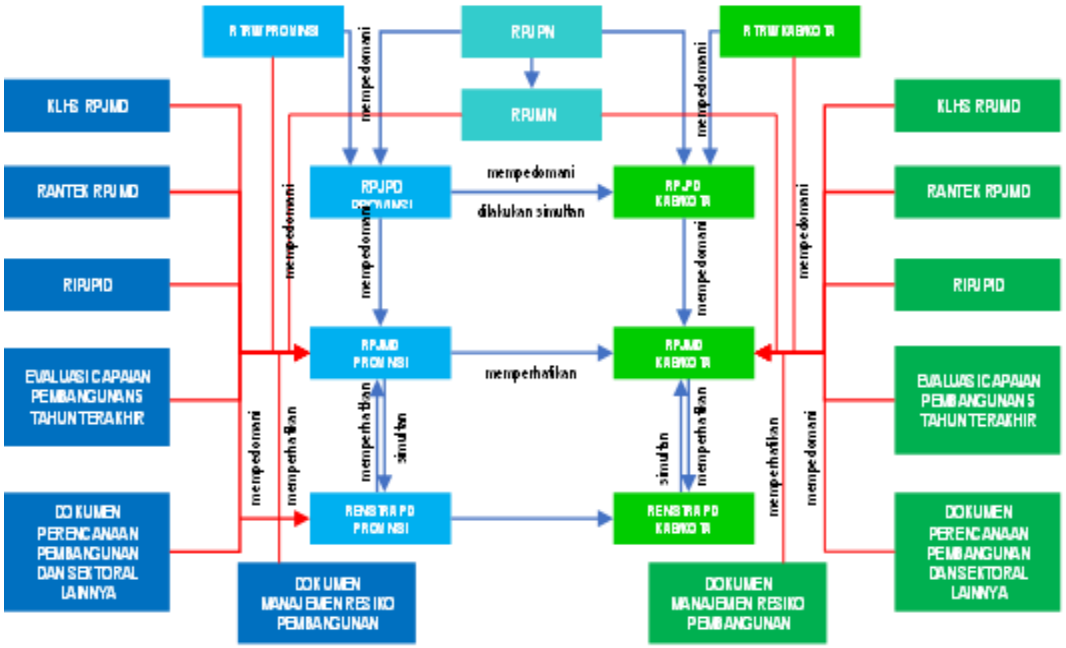
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 78); dan
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045, ((Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 191).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar 1.1 menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1. 1 Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selaras dengan pentingnya keterpaduan dokumen perencanaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029 juga memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat peran strategis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk riset dan inovasi, dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah (PerBRIN no.5 tahun 2023).

Sebagai bagian dari masukan penting dalam penyusunan dokumen RPJMD, RIPJPID turut memperkaya landasan teknokratik yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, pendekatan cross cutting program, digunakan sebagai upaya strategis dalam mengintegrasikan berbagai isu dan program pembangunan secara lintas OPD serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. guna meningkatkan ketepatan sasaran dan capaian program pembangunan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, strategi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029 dirancang sebagai rencana tindakan yang menyeluruh dan terukur, yang mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, lokus, serta program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan strategis.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk menyajikan informasi mengenai data dan informasi

pembangunan daerah serta memberikan arahan tentang perencanaann dan implementasi strategi dan kebijakan daerah selama 5 tahun. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* daerah dalam mewujudkan Manggarai Timur yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi, program Kepala Daerah sebagai upaya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Pusat;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2025-2029;
4. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
5. Menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah; serta
6. Menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
   a) Aspek geografi dan demografi;
   b) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
   c) Aspek Daya Saing Daerah;
   d) Aspek Pelayanan Umum.
2. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:
   a) Permasalahan pembangunan daerah; dan
   b) Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
   a) Visi dan Misi; dan
   b) Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

2. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat;
   a) Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
   b) Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IVPROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
   a) Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b) Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
   a) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b) Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT. Secara astronomis Kabupaten Manggarai Timur terletak antara 08°.14'-09°.00 Lintang Selatan dan 120°.20' - 120°.55'' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif adalah:

- Sebelah Selatan: Laut Sawu
- Sebelah Utara: Laut Flores
- Sebelah Barat: Kabupaten Manggarai
- Sebelah Timur: Kabupaten Ngada

Luas Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 264,293 ha, yang terdiri atas luas wilayah daratan sebesar 251.955 ha dan luas wilayah lautan sebesar 12,438 ha. Sedangkan berdasarkan kajian dan penyelerasan dengan regulasi terbaru dalam penyusunan RTRW Kabupaten Manggarai Timur, Luas wilayah daratan Kabupaten Manggarai Timur adalah 238.952 Ha. Kabupaten Manggarai Timur pada awalnya terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Kecamatan Congkar, maka Kabupaten Manggarai Timur bertambah 3 (tiga) kecamatan baru menjadi 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kelurahan dan 159 (seratus lima puluh sembilan) desa. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Penyesuaian Nama Kecamatan Poco Ranaka Menjadi Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Nama Kecamatan Poco Ranaka Timur Menjadi Kecamatan Lamba Leda Timur, dengan pusat pemerintahan di Borong, Kecamatan Borong.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah Daratan (Ha)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Borong	Borong	17.728	3	15
2	Rana Mese	Golo Mongkok	20.933	-	21
3	Lamba Leda Selatan	Mano	12.190	3	21
4	Lamba Leda Timur	Lawir	10.415	-	18
5	Lamba Leda	Benteng Jawa	12.174		13
6	Sambi Rampas	Pota	28.815	4	6
7	Elar	Lengko Elar	28.057	1	14
8	Elar Selatan	Wukir	22.342	1	13
9	Kota Komba	Wae Lengga	32.755	3	8
10	Congkar	Watu Nggong	8.007	2	8
11	Kota Komba Utara	Rana Mbeling	18.300	-	11
12	Lamba Leda Utara	Dampek	27.237	-	11
Kabupaten Manggarai Timur			238.952	17	159

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

Keadaan topografi dapat digambarkan melalui ketinggian beberapa wilayah. Faktor ketinggian merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah. Secara umum topografi di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 0-250 m, 250-500 m, 500-750 m, 750-1.000 m, 1.000-1.250 m, 1.250-1.500 m, 1.500-1.750 m, 1.750-2.000 m, 2.000-2.250 m dan 2.250-2.500 m. Kabupaten Manggarai Timur didominasi oleh kondisi topografi 250-500 m seluas 59.077,90 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Kondisi Topografi di Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
1	Borong	0-250 m	5.310,82
		250-500 m	2.847,99
		500-750 m	2.847,99
		750-1.000 m	700,58
		1.000-1.250 m	164,03
		1.250-1.500 m	6,81
		1.500-1.750 m	2.956,92
		1.750-2.000 m	1.963,67
		2.000-2.250 m	1.840,49
		Jumlah	17.744,13
2	Congkar	250-500 m	1.750,53
		500-750 m	1.102,78
		750-1.000 m	999,17
		1.000-1.250 m	137,79
		1.250-1.500 m	0,34
		1.500-1.750 m	127,28
		1.750-2.000 m	1.094,29
		2.000-2.250 m	2.801,57
		Jumlah	8.013,75
3	Elar	0-250 m	5.712,54
		250-500 m	1.497,92
		500-750 m	808,26
		750-1.000 m	142,69
		1.000-1.250 m	4,69
		1.250-1.500 m	7.122,34
		1.500-1.750 m	8.664,89
		1.750-2.000 m	4.119,61
		Jumlah	28.072,94
4	Elar Selatan	0-250 m	26,41
		250-500 m	2.689,68
		500-750 m	1.155,00
		750-1.000 m	274,73
		1.000-1.250 m	12,81
		1.250-1.500 m	4.650,63
		1.500-1.750 m	7.072,92
		1.750-2.000 m	6.474,70
		Jumlah	22.356,87
5	Kota Komba	0-250 m	14.066,90
		250-500 m	430,65
		500-750 m	12.046,93
		750-1.000 m	4.882,43

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
		1.000-1.250 m	1.350,62
		Jumlah	32.777,53
6	Kota Komba Utara	0-250 m	0,02
		250-500 m	3.191,14
		500-750 m	1.749,82
		750-1.000 m	844,73
		1.000-1.250 m	144,89
		1.250-1.500 m	0,36
		1.500-1.750 m	2.828,35
		1.750-2.000 m	5.304,17
		2.000-2.250 m	4.249,91
		Jumlah	18.313,38
7	Lamba Leda	0-250 m	586,12
		250-500 m	205,75
		500-750 m	3.093,07
		750-1.000 m	4.798,89
		1.000-1.250 m	3.501,29
		Jumlah	12.185,11
8	Lamba Leda Selatan	250-500 m	2.969,95
		500-750 m	1.837,26
		750-1.000 m	462,43
		1.000-1.250 m	179,81
		1.250-1.500 m	157,08
		1.500-1.750 m	4,82
		1.750-2.000 m	700,19
		2.000-2.250 m	2.305,61
		2.250-2.500	3.584,93
		Jumlah	12.202,08
9	Lamba Leda Timur	250-500 m	1.900,84
		500-750 m	1.976,51
		750-1.000 m	1.538,53
		1.000-1.250 m	305,79
		1.250-1.500 m	10,17
		1.500-1.750 m	106,20
		1.750-2.000 m	1.954,61
		2.000-2.250 m	2.631,07
		Jumlah	10.423,71
10	Lambe Leda Utara	0-250 m	14.783,71
		250-500 m	21,39
		500-750 m	10.765,18
		750-1.000 m	1.304,05
		1.000-1.250 m	380,06

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi	Luas (Ha)
		Jumlah	27.254,38
11	Rana Mese	0-250 m	2.652,50
		250-500 m	2.763,96
		500-750 m	2.350,83
		750-1.000 m	910,57
		1.000-1.250 m	508,88
		1.250-1.500 m	272,71
		1.500-1.750 m	2,38
		1.750-2.000 m	4.472,09
		2.000-2.250 m	3.750,64
		2.250-2.500	3.269,20
		Jumlah	20.953,75
12	Sambi Rampas	0-250 m	12.341,44
		250-500 m	50,14
		500-750 m	10.208,72
		750-1.000 m	4.700,44
		1.000-1.250 m	1.528,40
		Jumlah	28.829,14
Kabupaten Manggarai Timur			**239.951,85**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

Sedangkan kondisi kemiringan lereng pada wilayah Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 0-3 persen, 3-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen, dan >40 persen. Kabupaten Manggarai Timur didominasi kelerengan 3-15 persen seluas 102.144,79 ha. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Kondisi Kelerengan di Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Kelerengan (Ha)				
		0-3%	3-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Borong	1.283,39	7.992,29	5.005,35	2.994,83	453,45
2	Congkar	41,01	2.799,05	3.782,17	1.358,94	32,59
3	Elar	895,86	10.289,55	11.532,12	5.198,38	157,03
4	Elar Selatan	1.048,17	7.423,73	8.664,73	4.960,46	259,79
5	Kota Komba	1.256,77	19.423,41	8.354,07	3.447,46	295,62
6	Kota Komba Utara	189,29	7.226,84	6.521,27	3.794,58	581,41
7	Lamba Leda	92,87	3.687,22	5.284,64	2.981,21	139,17
8	Lamba Leda Selatan	87,39	4.500,09	4.932,42	2.460,87	221,31
9	Lamba Leda Timur	30,26	3.880,67	4.466,39	1.895,50	150,90
10	Lamba Leda Utara	1.492,77	13.019,38	9.062,89	3.561,14	116,67
11	Rana Mese	219,18	9.682,63	6.461,55	3.702,35	887,92
12	Sambi Rampas	1.691,27	12.219,93	10.089,00	4.501,38	327,53

No	Kecamatan	Kelerengan (Ha)				
		0-3%	3-15%	15-25%	25-40%	>40%
Jumlah		8.328,21	102.144,79	84.156,59	40.857,09	3.623,40

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas endapan pantai, formasi kiro, produk batuan gunung api tua, formasi noil toko, formasi waihekang, diorit kuarsa, formasi bari (atambua), formasi laka, batuan gunung api muda serta alluvial dan endapan koastal.

Kabupaten Manggarai Timur didominasi oleh produk batuan gunung api tua seluas 105.341,09 ha diikuti formasi bari (atambua) seluas 60.094,31 ha. Kecamatan dengan komposisi formasi geologi terbanyak yaitu Kecamatan Elar meliputi diorit kuarsa, formasi bari (atambua), formasi kiro, formasi laka, formasi noil toko, formasi waihekang serta produk batuan gunung api tua. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Formasi Geologi Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Borong	Endapan Pantai	3.083,53
		Formasi Kiro	5,30
		Produk Batuan Gunungapi Tua	14.655,30
		Jumlah	17.744,13
2	Congkar	Formasi Kiro	3.544,74
		Formasi Noil Toko	2.292,23
		Formasi Waihekang	1.633,01
		Produk Batuan Gunungapi Tua	543,77
		Jumlah	8.013,75
1	Borong	Endapan Pantai	3.083,53
		Formasi Kiro	5,30
		Produk Batuan Gunungapi Tua	14.655,30
		Jumlah	17.744,13
2	Congkar	Formasi Kiro	3.544,74
		Formasi Noil Toko	2.292,23
		Formasi Waihekang	1.633,01
		Produk Batuan Gunungapi Tua	543,77

No	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
		Jumlah	8.013,75
3	Elar	Diorit Kuarsa	335,61
		Formasi Bari (ATAMBUA)	13.979,75
		Formasi Kiro	6.049,90
		Formasi Laka	2.063,27
		Formasi Noil Toko	4.654,49
		Formasi Waihekang	38,93
		Produk Batuan Gunungapi Tua	950,98
		Jumlah	28.072,94
4	Elar Selatan	Diorit Kuarsa	150,49
		Formasi Bari (ATAMBUA)	1.134,94
		Formasi Kiro	953,91
		Produk Batuan Gunungapi Tua	20.117,53
		Jumlah	22.356,87
5	Kota Komba	Endapan Pantai	2.905,76
		Produk Batuan Gunungapi Tua	29.871,76
		Jumlah	32.777,52
6	Kota Komba Utara	Produk Batuan Gunungapi Tua	18.313,38
7	Lamba Leda	Formasi Bari (ATAMBUA)	5.459,20
		Formasi Kiro	3.332,42
		Formasi Laka	2.535,13
		Formasi Noil Toko	858,37
		Jumlah	12.185,11
8	Lamba Leda Selatan	Batuan Gunungapi Muda	658,93
		Formasi Bari (ATAMBUA)	46,40
		Formasi Kiro	9.352,17
		Formasi Laka	104,27
		Produk Batuan Gunungapi Tua	2.040,31
		Jumlah	12.202,08
9	Lamba Leda Timur	Formasi Bari (ATAMBUA)	1,61
		Formasi Kiro	7.449,75
		Formasi Noil Toko	1.616,21
		Formasi Waihekang	391,43
		Produk Batuan Gunungapi Tua	964,72
		Jumlah	10.423,71
10	Lamba Leda Utara	Aluvial dan Endapan Koastal	353,80
		Formasi Bari (ATAMBUA)	17.374,54
		Formasi Kiro	2.325,94
		Formasi Laka	7.200,10
		Jumlah	27.254,38
11	Rana Mese	Batuan Gunungapi Muda	31,70
		Endapan Pantai	3.038,71

No	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)
		Produk Batuan Gunungapi Tua	17.883,33
		Jumlah	20.953,75
12	Sambi Rampas	Aluvial dan Endapan Koastal	648,76
		Formasi Bari (ATAMBUA)	22.097,87
		Formasi Kiro	550,87
		Formasi Laka	2.165,09
		Formasi Noil Toko	3.366,55
		Jumlah	28.829,14
Jumlah Keseluruhan			239.126,79

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas tanah alluvium, batugamping, sedimen, sedimen berkapur dan vulkanik. Tanah alluvium adalah adalah sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis aluvium. Tanah aluvium biasanya terdapat di tebingan sungai, delta sungai dan daratan yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah aluvium di tepi sungai. Tanah alluvium seluas 21.913,13 ha dan tersebar di Kecamatan Borong, Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kecamatan Rana Mese dan Kecamatan Sambi Rampas.

Batu gamping merupakan batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat terutama dalam bentuk kalsit dan magnesium karbonat. Pembentukan tanah dari batu gamping dipengaruhi oleh kondisi iklim dengan curah hujan yang termasuk ke dalam tipe B atau bulan basah. Proses pelapukan batu gamping membentuk mineral sekunder dan pelapukan lebih lanjut menyebabkan terbentuknya mineral kaolinit. Batu gamping seluas 40.910,18 ha dan tersebar di Kecamatan Congkar, Kecamatan Elar, Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Kecamatan Sambi Rampas.

Tanah sedimen adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang kemudian diendapkan di lokasi lain oleh proses alam, misalnya oleh air, angin, dan lain-lain, biasanya tanah sedimen bersifat lebih homogen, terdiri

atas lapisan yang berganti-ganti. Contohnya adalah tanah lempung pantai yang biasanya diselingi oleh lapisan pasir. Tanah sedimen seluas 29.461,66 ha dan tersebar di Kecamatan Congkar, Kecamatan Elar, Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Kecamatan Sambi Rampas.

Tanah vulkanik adalah jenis tanah yang berasal dari pelapukan material padat maupun material cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat terjadi erupsi. Tanah ini merupakan jenis tanah yang subur karena banyaknya unsur hara yang terkandung di dalamnya. Tanah vulkanik seluas 130.464,75 ha dan tersebar di Kecamatan Borong, Kecamatan Congkar, Kecamatan Elar, Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kecamatan Rana Mese dan Kecamatan Sambi Rampas.

Jenis tanah lainnya yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur yaitu sedimen berkapur seluas 16.360,35 ha dan tersebar di Kecamatan Elar, Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Kecamatan Sambi Rampas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				
		Aluvium	Batu Gamping	Sedimen	Sedimen Berkapur	Volkanik
1	Borong	4.272,92	-	-	-	13.456,38
2	Congkar	-	1.269,70	165,84	-	6.578,21
3	Elar	-	1.438,03	13.795,01	3.213,37	9.626,53
4	Elar Selatan	1.803,16	-	-	-	20.553,71
5	Kota Komba	7.975,90	-	-	-	24.801,43
6	Kota Komba Utara	-	-	-	-	18.313,38
7	Lamba Leda	-	6.122,95	4.764,10	608,43	689,62
8	Lamba Leda Selatan	-	485,95	-	-	11.716,14
9	Lamba Leda Timur	-	1.114,83	-	-	9.308,89
10	Lamba Leda Utara	1.126,23	15.610,21	6.112,52	4.403,88	-
11	Rana Mese	5.583,46	-	-	-	15.370,17
12	Sambi Rampas	1.151,45	14.868,52	4.624,19	8.134,67	50,28
Jumlah		**21.913,13**	**40.910,18**	**29.461,66**	**16.360,35**	**130.464,75**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

b. Hidrologi

1) Mata Air

Mata air adalah sebuah keadaan alami dimana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah yang menjadi sumber air bersih yang berguna untuk keperluan kehidupan manusia. Sumber air yang berasal dari mata air tersebut merupakan air yang sudah layak untuk dikonsumsi karena mengalami purifikasi secara alami (*self purification*). Sumber mata air di Kabupaten Manggarai Timur umumnya dimanfaatkan sebagai sumber 24 kebutuhan air bersih. Mata air di Kabupaten Manggarai Timur berjumlah 193 dan tersebar di 12 kecamatan.

Tabel 2. 6 Mata Air yang Sudah Diintervensi/Terpelihara di Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Mata Air	Jumlah
1	Borong	Wae Kotong	44
		Wae Lale	
		Wae Mulu	
		Wae Pering	
		Wae Teku Purak	
		Wae Buka	
		Wae Repi	
		Wae Lenam	
		Wae Wohang	
		Wae Nengkunek	
		Wae Lemus	
		Wae Ragong	
		Wae Nggorek	
		Wae Muku	
		Wae Comu	
		Wae Macing	
		Wae Coca I	
		Wae Coca II	
		Wae Coca III	
		Wae Jawar	
		Wae Po I	
		Wae Po II	
		Wae Po III	
		Wae Mentelai	
		Wae Mas	
		Wae Ojong	
		Wae Purang	
		Wae Lenek	
		Wae Tanjung	
		Wae Penem	

No	Kecamatan	Mata Air	Jumlah
		Wae Koe	
		Wae Rana	
		Wae Rajung	
		Wae Rende	
		Wae Wodong	
		Wae Nasor	
		Wae Beka	
		Wae Lekot	
		Wae Wakos	
		Wae Tempok	
		Wae Kutas	
		Wae Purus	
		Wae Tala	
		Wae Bane	
2	Congkar	-	-
3	Elar	Wae Nales	19
		Wae Buntang Mundung	
		Wae Mok	
		Wae Pali	
		Belang Ngoa	
		Lok Teong	
		Rana Remos	
		Rengguk	
		Wae Doak	
		Longkok Pada	
		Wae Wuas	
		Wae Wulan	
		Wae Toang	
		Wae Belang	
		Wae Lokon	
		Wae Bonggang	
		Wae Menang	
		Wae Kolong	
		Wae Kuar	
4	Ekar Selatan	Wae Pekot	30
		Wae Pong Bak	
		Wae Pong Meno	
		Wae Dopak	
		Wae Bakit	
		Wae Rani	
		Wae Kawak	
		Wae Sebun	
		Wae Repung	
		Wae Wunuk 1	
		Wae Wunuk 2	
		Wae Tanggon	

No	Kecamatan	Mata Air	Jumlah
		Wae Wea	
		Wae Lur	
		Wae Mata Nguza	
		Wae Mama	
		Wenggol 1	
		Wenggol 2	
		Wae Wuang	
		Wae Pokor	
		Wae wako	
		Wae Wuas	
		Wae Baja	
		Wae Motang	
		Wae rana	
		Wae Mejang	
		Wae Lok	
		Wae Tana Wara	
		Wae Wenggol	
		Wae Elang Uwu	
5	Kota Komba	Wae Wakas	7
		Wae Salok	
		Wae Ngoang	
		Wae Wulan	
		Wae Ratun	
		Wae Kekik	
		Wae Mae	
6	Kota Komba Utara	Wae dase	4
		Wae masing	
		Wae nimbar	
		Wae lerang	
7	Lambe Leda	Wae Wejang Deru	8
		Wae Kilit	
		Wae Ri'i	
		Wae Wejang Jedeng	
		Wae Nderu	
		Wae Kemut	
		Wae Runtung	
		Wae Lebak	
8	Lambe Leda Selatan	Wae Rekep	45
		Wae Cekalikang	
		Wae Rahong	
		Wae Mbeleng	
		Wae Ajo	
		Wae Namut	
		Wae Leong	

No	Kecamatan	Mata Air	Jumlah
		Wae Lingko Sintel	
		Wae Teku	
		Wae Cebu	
		Wae Bul	
		Wae Ntawu	
		Wae Timbu	
		Wae Lus	
		Wae Noi	
		Wae Rame	
		Wae Pering	
		Wae Nder Bolong	
		Wae Kalo	
		Wae Kondo	
		Wae Lengong	
		Adat Kuwu	
		Adat Tanggar	
		Adat Lenang	
		Wejang Ntungal	
		Wejang Pesi	
		Wejang Tokol	
		Wae Lekem	
		Wae Rae	
		wae Nderbolong	
		Wae Kadung	
		wae Uwu	
		Wae Lipang	
		Wae Wejang Deno	
		Wae Labe	
		Wae Nilong	
		Wae Wejang Nero	
		Wae Laka	
		Wae Golo Nderu	
		Wae Keka	
		Wae Rangga	
		Wae Ruma	
		Wae Pong Para	
		Wae Wejang Lalong	
		Wae Lipang Koe	
9	Lamba Leda Timur	Wae Wejang Molas	2
		Wae Wejang Emas	
10	Lamba Leda Utara	Wae wejang tumbuk	5
		Wae wejang luwuk	
		Wae wejang longkotong	
		Wae luwuk	

No	Kecamatan	Mata Air	Jumlah
		Wae tiwu gendang	
11	Rana Mese	Wae Barong	17
		Wae Arah	
		Wae Hidat	
		Wae Mera	
		Wae Kuta	
		Wae Kolang	
		Wae Cincer	
		Wae Nantal	
		Wae Longgo	
		Wae Momang	
		Wae Samba	
		Wae lale	
		Wae Miko	
		Wae Mata	
		Wae wako	
		Wae Buruk	
		Wae Ngeong	
		Wae Barong	
12	Sambi Rampas	Wae ulas	12
		Wae wuas	
		Wae waso	
		Wae Ntek	
		Wae legam	
		Wae rembong	
		Wae munta	
		Wae Belang	
		Wae Kurut	
		Wae Kode	
		Wae pokor	
		Wae Muntung	
Jumlah			193

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

2) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Selain sungai, kita juga mengenal daerah aliran sungai (DAS). Daerah aliran sungai adalah wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oleh topografi berupa punggung bukit atau pegunungan. DAS tak hanya meliputi aliran airnya, namun juga bentang alam di sekitar aliran sungai. DAS juga dikenal dengan sebutan *watershed* atau daerah tangkapan (*catchment area*). Ada garis

batas yang tak terlihat untuk membatasi DAS dan daerah lain. Batas itu biasanya berupa punggung bukit atau pegunungan. Batas DAS biasanya tak sama dengan batas administrasi wilayah. Suatu DAS bisa berada pada satu wilayah maupun beberapa wilayah. Ada DAS yang meliputi beberapa wilayah kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Kabupaten Manggarai Timur terdapat 84 DAS yang tersebar di semua kecamatan. DAS dengan luasan terbesar yaitu DAS Mokel seluas 45.428,13 Ha. DAS dengan luasan terendah yaitu DAS Bacal seluas 0,15 ha.

Tabel 2. 7 Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Alo Bonggibhelo	372,56
2	Alo Dupa	6,27
3	Alo Hala	369,55
4	Alo Tanabana	485,50
5	Alo Tukaika	130,93
6	Alo Waemunde	202,05
7	Alomolo	248,28
8	Ariahima	2.783,82
9	Bacal	0,15
10	Bak Nangalirang	477,58
11	Bakok	15.335,02
12	Bamo	139,44
13	Bondei Waeloko	322,70
14	Buntal	9.924,25
15	Care	487,12
16	Cemara	955,39
17	Cenara 2	159,08
18	Cungacecer	3.684,90
19	Golo Pau	568,13
20	Golo Tananeni 1	82,75
21	Golo Tananeni 2	111,71
22	Golokoe	57,46
23	Kewi	182,58
24	Koe Iteng	4,17
25	Kurung Baja	516,89
26	Laing	13.062,60
27	Laka Mataraja	98,49
28	Laku Toka	9.388,16
29	Lambaleda	584,11
30	Lek Olembo	96,46

No	Nama DAS	Luas (Ha)
31	Leko Lembo	266,19
32	Lowonggiling	1.468,52
33	Luwuk 1	248,05
34	Luwuk 2	267,99
35	Mausui	1.273,36
36	Mbaling	20.724,65
37	Mbaru Jawa	48,68
38	Mese	0,70
39	Mokel	45.428,13
40	Nanga Mbaur	251,60
41	Nangalok	218,54
42	Nasaret	338,96
43	Nawu	11.973,60
44	Ngalor Cembakoe	942,48
45	Ngalu Bendera	74,12
46	Ombo	404,99
47	Orong Golokoe 1	26,05
48	Palacara	293,13
49	Pangnunang	369,23
50	Penerangkat	364,77
51	Pota 1	120,92
52	Rawa	5.108,31
53	Reo Waepesi	20.762,75
54	Rewang	200,36
55	Sarikando	328,56
56	Serise	96,38
57	Tendarai	341,05
58	Togong	22.539,17
59	Tompong	7.700,73
60	Toro Poto 1	161,85
61	Toro Poto 2	187,49
62	Toro Poto 3	135,99
63	Torong Golokoe 2	20,44
64	Tukeng Gopalaza	1.200,04
65	Ture	257,54
66	Turu	336,13
67	Wae Anahima	537,08
68	Wae Bobo	18.291,28
69	Wae Bondel	364,67
70	Wae Lengga	2.327,13
71	Wae Reca	4.235,53
72	Wae Rutung	1.933,04
73	Wae Telage	418,13
74	Wae Waeloko	513,38
75	Waeiri 1	92,45

No	Nama DAS	Luas (Ha)
76	Waeiri 2	34,24
77	Waelaka	173,79
78	Watu Balok	276,31
79	Watuika 1	81,85
80	Watuika 2	90,54
81	Watuika 3	50,26
82	Watuika 4	37,12
83	Weti Lembo	669,61
84	Wole	3.680,83
	Jumlah	**239.951,85**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier.

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi

Tabel 2. 8 Tabel 2.8 Daerah Irigasi (D.I.) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
1	D.I. Wae Mbaling	226	300
2	D.I. Wae Wau	78	92
3	D.I. Bea Lengkorong	10	13
4	D.I. Buntal	811	900
5	D.I. Cunga Telo	10	14
6	D.I. Gorong	5	5
7	D.I. Inahasa	50	56
8	D.I. Kembo	9	Areal DI. Buntal
9	D.I. Lengko Lendong	7	-
10	D.I. Liang Leso	15	26
11	D.I. Lok Nio	7	7

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
12	D.I. Lujan	8	8
13	D.I. Nenu	11	56
14	D.I. Raba Pering	6	6
15	D.I. Sambi Jawa	11	18
16	D.I. Satar Waso	6	6
17	D.I. Tija III	180	192
18	D.I. Tiwu Cebong	3	-
19	D.I. Tiwu Roang	126	200
20	D.I. Tiwu Sengit	480	500
21	D.I. Tolo Moa	3	-
22	D.I. Wae Maras	110	130
23	D.I. Wae Nawu Hilir	50	-
24	D.I. Wae Pateng	5	-
25	D.I. Wae Ara	60	75
26	D.I. Wae Bakok	75	85
27	D.I. Wae Bea Reda	15	23
28	D.I. Wae Bealalang	6	21
29	D.I. Wae Bejan	12	18
30	D.I. Wae Belang	11	23
31	D.I. Wae Belang	15	-
32	D.I. Wae Bentang	60	-
33	D.I. Wae Bobo	150	168
34	D.I. Wae Bobo II	50	17
35	D.I. Wae Boko	20	30
36	D.I. Wae Bola	8	8
37	D.I. Wae Boru	12	17
38	D.I. Wae Bron	35	-
39	D.I. Wae Butang Nggali	30	35
40	D.I. Wae Cacor	5	-
41	D.I. Wae Cebu	65	82
42	D.I. Wae Cegi	5	-
43	D.I. Wae Cepang	5	-
44	D.I. Wae Cieng	28	35
45	D.I. Wae Compang Necak	6	3
46	D.I. Wae Dara	9	25
47	D.I. Wae Dikut	9	-
48	D.I. Wae Dungkang Mimor	3	-
49	D.I. Wae Geleng	10	12
50	D.I. Wae Gelong Pudi	9	-

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
51	D.I. Wae Gerong	11	23
52	D.I. Wae Ghelu	8	-
53	D.I. Wae Gio	14	25
54	D.I. Wae Golo Bubung	8	-
55	D.I. Wae Gurung Pirong	75	80
56	D.I. Wae Gurung Pumbu	825	18
57	D.I. Wae Hidut	5	28
58	D.I. Wae Ikan/Golo Ngorah	80	85
59	D.I. Wae Jabar	7	-
60	D.I. Wae Jaro	10	-
61	D.I. Wae Ka	19	30
62	D.I. Wae Kaja	4	-
63	D.I. Wae Kalang Maghit	8	-
64	D.I. Wae Kalo	83	88
65	D.I. Wae Karas	100	70
66	D.I. Wae Karot	120	125
67	D.I. Wae Keba	150	170
68	D.I. Wae Kembung	50	22
69	D.I. Wae Kempet	100	113
70	D.I. Wae Kemping	130	25
71	D.I. Wae Kempo	100	25
72	D.I. Wae Keram	60	67
73	D.I. Wae Kian Naron	3	17
74	D.I. Wae Koe	240	245
75	D.I. Wae Kokak	25	-
76	D.I. Wae Konca	2	-
77	D.I. Wae Kongkor	17	28
78	D.I. Wae Kram Hulu	68	78
79	D.I. Wae Kutung	5	19
80	D.I. Wae Kuwan	75	85
81	D.I. Wae Laban	30	41
82	D.I. Wae Lait	17	-
83	D.I. Wae Laka	100	117
84	D.I. Wae Laka Cewe	15	329
85	D.I. Wae Lale	22	42
86	D.I. Wae lale	16	-
87	D.I. Wae Lale	15	-
88	D.I. Wae Lalo	125	138
89	D.I. Wae Lamba	80	94

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
90	D.I. Wae Lambe	10	-
91	D.I. Wae lampang	100	111
92	D.I. Wae Lampang	5	5
93	D.I. Wae Lando Pata	12	19
94	D.I. Wae Lantar	5	-
95	D.I. Wae Lareng	100	109
96	D.I. Wae Larik	58	67
97	D.I. Wae Larik	58	-
98	D.I. Wae Lawar	59	68
99	D.I. Wae Lawir	60	70
100	D.I. Wae Lebat	11	-
101	D.I. Wae Legang	3	-
102	D.I. Wae Lelu	27	-
103	D.I. Wae Lema'ar	15	35
104	D.I. Wae Lendeng	7	-
105	D.I. Wae Lenga	15	-
106	D.I. Wae Lenge	60	78
107	D.I. Wae Lengga	100	257
108	D.I. Wae Lengga II	150	-
109	D.I. Wae Lengger	150	157
110	D.I. Wae Lengkar	60	-
111	D.I. Wae Lengkas	4	-
112	D.I. Wae Lengkas I	55	63
113	D.I. Wae Lengkas II	63	-
114	D.I. Wae Lengko Ri'i	9	19
115	D.I. Wae Leras	8	-
116	D.I. Wae Lewur	4	3
117	D.I. Wae Lima Jua	6	-
118	D.I. Wae Lingko Wengger	18	-
119	D.I. Wae Liok	19	27
120	D.I. Wae Lipang II	100	118
121	D.I. Wae Lobak	6	23
122	D.I. Wae Loe	80	87
123	D.I. Wae Loek	15	23
124	D.I. Wae Lokom	18	10
125	D.I. Wae Lolu	15	-
126	D.I. Wae Lombos	8	-
127	D.I. Wae Lur Kanan	9	100
128	D.I. Wae Lur kiri	16	35

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
129	D.I. Wae Lus I	5	-
130	D.I. Wae Lus II	30	-
131	D.I. Wae Maja	90	-
132	D.I. Wae Majang	10	-
133	D.I. Wae Makol II	7	-
134	D.I. Wae Mama I	90	94
135	D.I. Wae Mama II	70	80
136	D.I. Wae Mama III	70	70
137	D.I. Wae Manggo	14	24
138	D.I. Wae Manuk	3	-
139	D.I. Wae Manuk/Neko	5	5
140	D.I. Wae Mao	282	300
141	D.I. Wae Mari	5	-
142	D.I. Wae Masing	20	28
143	D.I. Wae Mata	8	16
144	D.I. Wae Mata Kutung	50	59
145	D.I. Wae Mata Lindang	4	-
146	D.I. Wae Mata Rea	12	17
147	D.I. Wae Matok	38	-
148	D.I. Wae Mawe	9	-
149	D.I. Wae Mbajar	110	115
150	D.I. Wae Mbawu	11	11
151	D.I. Wae Mbong Pau	4	4
152	D.I. Wae Melur	50	150
153	D.I. Wae Mimor	5	22
154	D.I. Wae Moi	3	18
155	D.I. Wae Mokel/Mata Nelu	60	88
156	D.I. Wae Mokel II Kiri Matok	38	46
157	D.I. Wae Mokel Keok	10	18
158	D.I. Wae Mokel Ras	40	47
159	D.I. Wae Mokel/Sawah Gunung	12	24
160	D.I. Wae Molas/Lewurla	25	37
161	D.I. Wae Molot	10	21
162	D.I. Wae Muli	200	210
163	D.I. Wae Mulu	50	58
164	D.I. Wae Munde/Ghora	5	-
165	D.I. Wae Munta Nara	9	-
166	D.I. Wae Mura I	70	147
167	D.I. Wae Mura II	70	-

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
168	D.I. Wae Muting	125	132
169	D.I. Wae Muwur	10	-
170	D.I. Wae Nales	8	-
171	D.I. Wae Nalo	90	97
172	D.I. Wae Nambas	60	100
173	D.I. Wae Nampe	200	218
174	D.I. Wae Nampe Hulu	8	-
175	D.I. Wae Namut	9	23
176	D.I. Wae Namut	9	-
177	D.I. Wae Nanar	15	-
178	D.I. Wae Nandir	50	58
179	D.I. Wae Nara	10	-
180	D.I. Wae Nare	4	-
181	D.I. Wae Naron	10	-
182	D.I. Wae Nasat Nape	8	6
183	D.I. Wae Nawak	4	-
184	D.I. Wae Nawu	17	33
185	D.I. Wae Nawu	10	-
186	D.I. Wae Nderu	60	70
187	D.I. Wae Nderu I	3	-
188	D.I. Wae Nderu II	3	-
189	D.I. Wae Ndiru	3	-
190	D.I. Wae Necak	120	133
191	D.I. Wae Neka I	7	7
192	D.I. Wae Neka II	5	5
193	D.I. Wae Neko	15	26
194	D.I. Wae Nenda	18	28
195	D.I. Wae Nengel	60	68
196	D.I. Wae Nenu	5	-
197	D.I. Wae Ngeles	20	28
198	D.I. Wae Ngere	15	-
199	D.I. Wae Nggelur	110	119
200	D.I. Wae Nggiling	5	-
201	D.I. Wae Nggiwi	20	43
202	D.I. Wae Nggorong	9	-
203	D.I. Wae Nida Koro	56	65
204	D.I. Wae Niki	8	-
205	D.I. Wae Ntawang	10	-
206	D.I. Wae Ntoreng	9	25

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
207	D.I. Wae Ntuang	70	79
208	D.I. Wae Ntung	15	10
209	D.I. Wae Numbang	7	-
210	D.I. Wae Nunung	150	159
211	D.I. Wae Nunur/Wangge	8	21
212	D.I. Wae Paan	7	-
213	D.I. Wae Paci	15	-
214	D.I. Wae Paen/Liang Mareng	10	15
215	D.I. Wae Pake	12	22
216	D.I. Wae Pau	10	16
217	D.I. Wae Paupada	11	-
218	D.I. Wae Pelus	200	216
219	D.I. Wae Penelewing	11	-
220	D.I. Wae Podo	3	-
221	D.I. Wae Podot	13	21
222	D.I. Wae Poeng	10	18
223	D.I. Wae Pogol	15	5
224	D.I. Wae Poja	9	18
225	D.I. Wae Poka	4	-
226	D.I. Wae Pong Lengang	16	25
227	D.I. Wae Pong Pelus/Nimbar	200	214
228	D.I. Wae Ponggo Wenggeng	150	162
229	D.I. Wae Pum	15	25
230	D.I. Wae Pu'u Nio	7	-
231	D.I. Wae Racang I	100	108
232	D.I. Wae Racang II	95	95
233	D.I. Wae Raeng	70	-
234	D.I. Wae Rampot	4	-
235	D.I. Wae Rana Mese	45	60
236	D.I. Wae Rana Rembong	8	61
237	D.I. Wae Rana Wasa	15	-
238	D.I. Wae Ras Atas	10	33
239	D.I. Wae Ratun	14	20
240	D.I. Wae Ratung	15	-
241	D.I. Wae Raun	9	-
242	D.I. Wae Rebak	60	74
243	D.I. Wae Rebos	10	-
244	D.I. Wae Rebus	60	35
245	D.I. Wae Reca	215	227

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
246	D.I. Wae Reca Hulu	15	35
247	D.I. Wae Redung	60	71
248	D.I. Wae Remi I	120	70
249	D.I. Wae Remi II	80	90
250	D.I. Wae Rempang II	25	40
251	D.I. Wae Rencek	15	-
252	D.I. Wae Reno	50	61
253	D.I. Wae Reno	60	71
254	D.I. Wae Reno	150	-
255	D.I. Wae Reno Ulas	25	37
256	D.I. Wae Rentung	5	-
257	D.I. Wae Repi	8	-
258	D.I. Wae Repung	9	-
259	D.I. Wae Resang	10	-
260	D.I. Wae Rewos	2	-
261	D.I. Wae Rina	55	65
262	D.I. Wae Rinam	7	5
263	D.I. Wae Ringa	60	-
264	D.I. Wae Roda	20	29
265	D.I. Wae Rokat	5	-
266	D.I. Wae Rombang	30	39
267	D.I. Wae Rombeng	25	-
268	D.I. Wae Rowa	74	82
269	D.I. Wae Rowak	15	-
270	D.I. Wae Rowong	6	-
271	D.I. Wae Rutung	15	-
272	D.I. Wae Sale	9	-
273	D.I. Wae Sama	14	-
274	D.I. Wae Sangan Kalo	10	20
275	D.I. Wae Satar Teu	12	35
276	D.I. Wae Sati	5	20
277	D.I. Wae sau	6	-
278	D.I. Wae Sele	200	250
279	D.I. Wae Sele	20	-
280	D.I. Wae Sele Bangan	11	-
281	D.I. Wae Sele Pogol	7	52
282	D.I. Wae Selet/Lembur	20	27
283	D.I. Wae Selir	15	23
284	D.I. Wae Sewong Sik	20	28

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
285	D.I. Wae Sisar	10	-
286	D.I. Wae Solong	15	23
287	D.I. Wae Songi	20	26
288	D.I. Wae Songkot	4	-
289	D.I. Wae Sulit	50	55
290	D.I. Wae Tara Welo	7	-
291	D.I. Wae Tawa	11	-
292	D.I. Wae Tawu	9	-
293	D.I. Wae Teber	150	55
294	D.I. Wae Teng	148	-
295	D.I. Wae Teong	10	25
296	D.I. Wae Tetes	6	-
297	D.I. Wae Tiwu Lewe	60	70
298	D.I. Wae Tiwu Molas	12	21
299	D.I. Wae Tiwu Rii	60	69
300	D.I. Wae Tiwu Roekok	9	-
301	D.I. Wae Tua	6	-
302	D.I. Wae Tuan	8	32
303	D.I. Wae Tuke	50	21
304	D.I. Wae Tuke	10	-
305	D.I. Wae Tung	10	25
306	D.I. Wae Ulu Galung	50	71
307	D.I. Wae Ulu Lua	5	-
308	D.I. Wae Waci	100	-
309	D.I. Wae Wa'e	50	-
310	D.I. Wae Wake	6	-
311	D.I. Wae Wako	60	71
312	D.I. Wae Wasang Loak	35	51
313	D.I. Wae Waso	50	64
314	D.I. Wae Watu I Hulu Kana/Sambi	4	-
315	D.I. Wae Watu II Kanan/Dejan	75	125
316	D.I. Wae Watu II Kiri/Mata Manuk	150	171
317	D.I. Wae Watu III Hilir Kanan/Kumpe	60	75
318	D.I. Wae Welak	3	-
319	D.I. Wae Welo	9	-
320	D.I. Wae Welu	10	30
321	D.I. Wae Wentang	6	4
322	D.I. Wae Wina I	10	70
323	D.I. Wae Wina II	30	150

No	Nama D.I	Luas Areal (Ha)	
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)
324	D.I. Wae Wira	150	-
325	D.I. Wae Wira	60	69
326	D.I. Wae Woa	8	21
327	D.I. Wae Woa	9	-
328	D.I. Wae Wonon	80	90
329	D.I. Wae Wuang	75	86
330	D.I. Wae Wuci	4	-
331	D.I. Wae Wul	8	34
332	D.I. Wae Wulang	6	-
333	D.I. Wae Wunis	60	-
334	D.I. Wae Wurak	2	-
335	D.I. Wejang Ratung	10	22
	Total	**14.934**	**14.425**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

3) Bendung

Bendung merupakan bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Bendung dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah. Adanya bendung akan membentuk genangan pada hulu bangunan, selain itu bendung juga dapat berfungsi sebagai penghalang banjir.

Daerah Irigasi (D.I.) yang telah memiliki bangunan utama (bendung) berjumlah 89 unit. Ada daerah irigasi yang memiliki dua bangunan utama (bendung) sehingga jumlah keseluruhan bendung yang tersedia di Kabupaten Manggarai Timur yaitu 91 unit.

Tabel 2. 9 Sebaran Bendung Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023

No	D.I Kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai PermenPU-PERA No. 14 Tahun 2015	Luas D.I (Ha)	Jumlah Bendung (Unit)
1	D.I. Wae Mbaling	226	1
2	D.I. Buntal	811	1
3	D.I. Inahasa	50	1
4	D.I. Satar Waso	6	1
5	D.I. Tija III	180	1

No	D.I Kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai PermenPU-PERA No. 14 Tahun 2015	Luas D.I (Ha)	Jumlah Bendung (Unit)
6	D.I. Tiwu Roang	126	1
7	D.I. Tiwu Sengit	480	1
8	D.I. Wae Ara	60	1
9	D.I. Wae Bakok	75	2
10	D.I. Wae Bea Reda	15	1
11	D.I. Wae Bealalang	6	1
12	D.I. Wae Belang	11	1
13	D.I. Wae Belang	15	1
14	D.I. Wae Bobo	150	1
15	D.I. Wae Cacor	5	1
16	D.I. wae Cebu	65	1
17	D.I. Wae Cepang	5	1
18	D.I. Wae Dara	9	1
19	D.I. Wae Gelong Pudi	9	1
20	D.I. Wae Gerong	11	1
21	D.I. Wae Ghelu	8	1
22	D.I. Wae Golo Bubung	8	1
23	D.I. Wae Gurung Pirong	75	1
24	D.I. Wae Gurung Pumbu	825	1
25	D.I. Wae Ikan/Golo Ngorah	80	1
26	D.I. Wae Ka	19	1
27	D.I. Wae Kalo	83	1
28	D.I. Wae Karas	100	1
29	D.I. Wae Karot	120	1
30	D.I. Wae Keba	150	1
31	D.I. Wae Kembung	50	1
32	D.I. Wae Kempet	100	1
33	D.I. Wae Kempo	100	1
34	D.I. Wae Koe	240	1
35	D.I. Wae Larik	58	1
36	D.I. Wae Lawar	59	1
37	D.I. Wae Lengga	100	1
38	D.I. Wae Lengga II	150	1
39	D.I. Wae Liok	19	1
40	D.I. Wae Loe	80	1
41	D.I. Wae Lokom	18	1
42	D.I. Wae Mama I	90	1
43	D.I. Wae Mama II	70	1
44	D.I. Wae Mao	282	1
45	D.I. Wae Mata Kutung	50	1
46	D.I. Wae Mbajar	110	2
47	D.I. Wae Melur	50	1
48	D.I. Wae Muli	200	1
49	D.I. Wae Muting	125	1
50	D.I. Wae Nambas	60	1
51	D.I. Wae Nampe Hulu	8	1
52	D.I. Wae Nasat Nape	8	1
53	D.I. Wae Nawu	17	1
54	D.I. Wae Necak	120	1
55	D.I. Wae Neka I	7	1

No	D.I Kewenangan Kabupaten/Kota Sesuai PermenPU-PERA No. 14 Tahun 2015	Luas D.I (Ha)	Jumlah Bendung (Unit)
56	D.I. Wae Neka II	5	1
57	D.I. Wae Nenda	18	1
58	D.I. Wae Ngeles	20	1
59	D.I. Wae Ntoreng	9	1
60	D.I. Wae Nunung	150	1
61	D.I. Wae Pelus	200	1
62	D.I. Wae Pong Pelus/ Nimbar	200	1
63	D.I. Wae Ponggo Wenggeng	150	1
64	D.I. Wae Pum	15	1
65	D.I. Wae Racang I	100	1
66	D.I. Wae Racang II	95	1
67	D.I. Wae Rana Mese	45	1
68	D.I. Wae Rana Rembong	8	1
69	D.I. Wae Rebus	60	1
70	D.I. Wae Reca	215	1
71	D.I. Wae Reca Hulu	15	1
72	D.I. Wae Redung	60	1
73	D.I. Wae Remi I	120	1
74	D.I. Wae Remi II	80	1
75	D.I. Wae Reno Ulas	25	1
76	D.I. Wae Rina	55	1
77	D.I. Wae Satar Teu	12	1
78	D.I. Wae Tiwu Lewe	60	1
79	D.I. Wae Tiwu Molas	12	1
80	D.I. Wae Tiwu Rii	60	1
81	D.I. Wae Ulu Galung	50	1
82	D.I. Wae Waso	50	1
83	D.I. Wae Watu II Kanan/Dejan	75	1
84	D.I. Wae Wina I	10	1
85	D.I. Wae Wira	60	1
86	D.I. Wae Wonon	80	1
87	D.I. Wae Wuang	75	1
88	D.I. Wae Wul	8	1
89	D.I. Wae Wunis	60	1
	Jumlah	**8.221**	**91**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

4) Danau

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan darat. Kabupaten Manggarai Timur memiliki 14 danau. Danau dengan luasan terbesar adalah Danau Rana Mese seluas 11,06 ha

Tabel 2. 10 Sebaran Danau di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Danau	Luas (Ha)
1	Borong	Danau Rana Kenti	0,66
2	Elar	Danau Rana Gopang	0,48
		Danau Rana Kulan	4,88
3	Elar Selatan	Danau Rana Ac	1,88
4	Kota Komba	Danau Wae Penda	0,71
5	Lamba Leda	Danau Gologega	0,43
6	Lamba Leda Timur	Danau Rana Laco	0,38
		Danau Rana Rahu	0,08
		Danau Rana Sia	0,18
7	Rana Mese	Danau Kering Rana Ngencung	0,27
		Danau Rana Sawe	0,42
		Danau Ranamese	11,06
8	Sambi Rampas	Danau Ngandong Mbiar	1,40
		Danau Rana Tonjong	4,04
		Jumlah	**26,88**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

5) Klimatologi

Seperti halnya tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Manggarai Timur hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sekitar bulan Juni-September terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret terjadi musim hujan. Curah hujan di Kabupaten Manggarai Timur berkisar 20-50 mm, 50-100 mm serta 100-150 mm. Secara umum didominasi oleh curah hujan 50-100 mm yang terjadi di area seluas 135.636,65 ha.

Tabel 2. 11 Curah Hujan Kabupaten Mangarai Timur

No	Kecamatan	Curah Hujan (Ha)		
		20 - 50 mm	50 - 100 mm	100 - 150 mm
1	Borong	8.317,02	9.427,11	NA
2	Congkar	NA	6.780,19	1.233,56
3	Elar	NA	14.303,84	13.769,10
4	Elar Selatan	NA	21.787,07	569,80
5	Kota Komba	27.495,02	5.282,50	NA
6	Kota Komba Utara	8.218,27	10.095,12	NA
7	Lamba Leda	NA	690,16	11.494,96

No	Kecamatan	Curah Hujan (Ha)		
		20 - 50 mm	50 - 100 mm	100 - 150 mm
8	Lamba Leda Selatan	NA	4.900,26	7.301,82
9	Lamba Leda Timur	NA	6.282,15	4.141,56
10	Lamba Leda Utara	NA	22.920,75	4.333,63
11	Rana Mese	5.715,84	15.234,44	3,46
12	Sambi Rampas	NA	17.933,05	10.896,09
Jumlah		**49.746,15**	**135.636,65**	**53.743,99**

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

6) Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Kemampuan Kabupaten Manggarai Timur dalam mengelola dampak dari perubahan iklim (termasuk keragaman dan iklim ekstrim) sangat ditentukan terutama oleh kondisi sosial ekonomi yang merupakan indikator kapasitas adaptif. Dalam analisis ini, kapasitas adaptif desa direpresentasikan oleh 13 (tiga belas) indikator, yaitu fasilitas listrik, infrastruktur jalan, kelembagaan, industri kecil dan mikro, fasilitas pendidikan, sarana prasarana ekonomi, fasilitas kesehatan, lembaga keuangan, kegiatan pelestarian lingkungan, fasilitas kredit yang diterima warga, kegiatan sosial, jaminan kesehatan, dan komunikasi. Kawasan yang memiliki lebih banyak jumlah kondisi indikator kapasitas adaptif yang bagus, secara relatif memiliki kemampuan adaptif yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

Kabupaten Manggarai Timur memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori rendah, cukup rendah, cukup tinggi dan tinggi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Timur berada pada kerentanan perubahan iklim kelas tinggi dengan luas 126717,54 ha.

Tabel 2. 12Tabel 2.12 Tingkat Adaptif dan Perubahan Iklim

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		Rendah	Cukup Rendah	Cukup Tinggi	Tinggi	
1	Borong		5058.63	234.08	12451.42	17744.13
2	Congkar		3498.40	2047.07	2468.28	8013.75
3	Elar		6833.56	7153.75	14086.96	28074.28

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Jumlah
		Rendah	Cukup Rendah	Cukup Tinggi	Tinggi	
4	Elar Selatan		2569.63	477.69	19309.56	22356.87
5	Kota Komba		12842.13	6327.31	13609.51	32778.95
6	Kota Komba Utara		1767.97	6238.43	10306.99	18313.38
7	Lamba Leda		753.64	2923.51	8507.96	12185.11
8	Lamba Leda Selatan		7700.94	0.61	4500.54	12202.08
9	Lamba Leda Timur	481.55	2684.94	18.93	7238.30	10423.71
10	Lamba Leda Utara		5306.17	9964.37	11992.16	27262.70
11	Rana Mese		4142.05	620.66	16191.04	20953.75
12	Sambi Rampas		8955.65	13826.02	6054.82	28836.49
	Jumlah	**481.55**	**62113.70**	**49832.42**	**126717.54**	**239145.21**

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumberdaya alam, dan kemampuan untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan dipastikan akan menimbulkan permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor dan kekeringan, pencemaran dan lain sebagainya. Konsep dan metode pengukuran daya dukung lingkungan memiliki banyak definisi, namun kesamaannya adalah bahwa daya dukung selalu memperhatikan perbandingan dan keseimbangan antara ketersediaan (*suplly*) dan permintaan (*demand*) dan ke-semuanya disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan

lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan.

a. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Berdasarkan pada tujuan dari perencanaan yang akan dicapai dapat memberikan perlindungan terhadap lahan potensial dan mencegah pembangunan pada kawasan lindung. Analisa ini dilakukan dengan tujuan mengatur peruntukan tanah yang sesuai dalam pelestarian dan menjaga tingkat bahaya erosi, agar tidak melebihi batas ambang. Kriteria tata cara penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II1980. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan peta dengan tiap-tiap variabel seperti keadaan iklim, kondisi tanah, dan kemiringan lereng, maka diperoleh klasifikasi kesesuaian lahan di Kabupaten Manggarai Timur paling sesuai untuk kawasan budidaya sebesar 118.120,97 Ha.

b. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Adapun proyeksi daya dukung lahan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2. 13 Proyeksi Daya Dukung Lahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan					Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Borong	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
2	Rana Mese	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
3	Kota Komba	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
4	Kota Komba Utara	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
5	Elar	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
6	Elar Selatan	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
7	Sambi Rampas	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
8	Congkar	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
9	Lamba Leda Selatan	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
10	Lamba Leda Timur	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan					Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	
11	Lamba Leda	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
12	Lamba Leda Utara	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	SL>DL	Belum Terlampaui
Total		**SL>DL**	**SL>DL**	**SL>DL**	**SL>DL**	**SL>DL**	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPMPD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029

Pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa proyeksi daya dukung lahan Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 – 2029 dijelaskan bahwa SL (Ketersediaan Lahan) > DL (Kebutuhan Lahan) yang artinya surplus/belum terlampaui pada seluruh kecamatan.

Daya dukung lahan pertanian merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan/padi dan atau tanaman pangan yang lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Daya dukung lahan pertanian Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2.14 dapat diketahui bahwa keseluruhan wilayah di Kabupaten Manggarai Timur termasuk dalam lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Hal ini terbukti pada luas daya dukung lahan mengalami penurunan.

Tabel 2. 14 Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan Per Kapaita				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Borong	0,095	0,094	0,094	0,094	0,094
2	Rana Mese	0,116	0,115	0,113	0,112	0,111
3	Kota Komba	0,105	0,104	0,103	0,102	0,101
4	Kota Komba Utara	0,173	0,172	0,171	0,170	0,169
5	Elar	0,149	0,148	0,146	0,145	0,143
6	Elar Selatan	0,140	0,138	0,136	0,134	0,132
7	Sambi Rampas	0,122	0,117	0,112	0,108	0,103
8	Congkar	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
9	Lamba Leda Selatan	0,095	0,095	0,094	0,093	0,092
10	Lamba Leda Timur	0,108	0,107	0,106	0,105	0,105
11	Lamba Leda	0,236	0,230	0,224	0,218	0,213
12	Lamba Leda Utara	0,283	0,282	0,282	0,281	0,281
Total		**0,128**	**0,126**	**0,125**	**0,124**	**0,122**

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Tabel 2. 15 Luas Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Manggarai Timur

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan Pertanian T				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Borong	14,59	14,39	14,19	14,00	13,80
2	Rana Mese	10,22	10,12	10,02	9,92	9,82
3	Kota Komba	15,86	15,71	15,56	15,41	15,26
4	Kota Komba Utara	9,17	9,12	9,06	9,01	8,96
5	Elar	30,97	30,66	30,36	30,06	29,77
6	Elar Selatan	9,16	9,04	8,92	8,80	8,68
7	Sambi Rampas	18,68	17,89	17,14	16,42	15,73
8	Congkar	0,43	0,41	0,40	0,38	0,38
9	Lamba Leda Selatan	9,55	9,47	9,39	9,32	9,24
10	Lamba Leda Timur	43,36	43,04	42,72	42,40	42,08
11	Lamba Leda	15,14	14,76	14,38	14,02	13,66
12	Lamba Leda Utara	13,97	13,95	13,92	13,90	13,87
Total		**18,67**	**18,47**	**18,27**	**18,08**	**17,89**

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Daya dukung lahan mengacu pada kapasitas suatu wilayah untuk menopang populasi dan aktivitas manusia secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem atau menguras sumber daya alam. Untuk Kabupaten Manggarai Timur, proyeksi daya dukung lahan menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Data ini memberikan gambaran mengenai ketersediaan lahan relatif terhadap kebutuhan lahan untuk berbagai aktivitas, seperti permukiman, pertanian, dan infrastruktur. Dengan memahami kondisi daya dukung lahan, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat guna memastikan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan secara optimal dan lestari. Hal ini penting untuk menghindari tekanan berlebih terhadap lahan yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.

Pada Tabel 2.16 menyajikan proyeksi CCR untuk 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2023-2029. Dalam CCR, 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur dinilai dalam beberapa kategori klasifikasi, yaitu; sangat rendah, cukup, baik, hingga sangat baik. Klasifikasi ini membantu membantu dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang

memerlukan perhatian khusus maupun yang berpotensi menjadi model pembangunan berwawasan lingkungan.

*T*abel 2. 16 Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Manggarai Timur 2023-2029

No	Kecamatan	CCR						Keterangan
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Borong	1,464	2,449	1,405	1,386	1,367	1,348	Cukup
2	Rana Mese	1,771	7,569	1,718	1,701	1,684	1,668	Baik
3	Kota Komba	1,607	9,094	1,561	1,546	1,531	1,516	Baik
4	Kota Komba Utara	2,630	20,984	2,584	2,57	2,555	2,54	Sangat Baik
5	Elar	2,284	1,978	2,217	2,195	2,174	2,152	Sangat Baik
6	Elar Selatan	2,151	8,401	2,065	2,037	2,009	1,982	Baik
7	Sambi Rampas	1,999	6,359	1,757	1,684	1,613	1,545	Baik
8	Congkar	0,010	3,327	0,009	0,008	0,008	0,008	Sangat Rendah
9	Lamba Leda Selatan	1,455	3,914	1,419	1,407	1,395	1,384	Cukup
10	Lamba Leda Timur	1,641	5,002	1,605	1,593	1,581	1,569	Baik
11	Lamba Leda	3,720	9,367	3,444	3,356	3,271	3,188	Sangat Baik
12	Lamba Leda Utara	4,257	16,95	4,234	4,226	4,218	4,211	Sangat Baik
Total		**1,958**	**5,802**	**1,896**	**1,876**	**1,856**	**1,836**	**Baik**

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi CCR dari tahun 2023 hingga 2029, Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan rasio rata-rata di atas nilai ambang batas dengan total CCR yang konsisten berada dalam kategori "Baik". Akan tetapi, meski banyak kecamatan berada dalam kategori "Baik" atau "Sangat Baik", tren umum menunjukkan penurunan nilai CCR dari tahun 2025 ke 2029 di hampir semua kecamatan.

c. Daya Dukung Air

Berdasarkan dokumen DDDT-LH Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 dan Dokumen RPPLH Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022, Daya dukung air dihitung berdasarkan sistem Grid skala ragam dengan memperhatikan datum geodetik, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat

grid skala ragam, resolusi grid, dan sistem penomoran grid. Sistem grid skala ragam ini dimanfaatkan untuk data lingkungan Indonesia dengan titik asal (origin) sistem koordinat terletak pada koordinat geodetik (90° BT, 15° LS); titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 144° BT dan 10° LU, sama dengan grid penomoran lembar peta rupa bumi Indonesia (RBI) (BAKOSURTANAL, 2005). Titik asal tersebut terletak pada sudut kiri bawah yang menjadi awal dari nomor grid pada sistem grid skala ragam Indonesia.

Tabel 2. 17 Perhitungan Daya Dukung AirBerdasarkan Sistem Grid Tahun 2024

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (SA)	Kebutuhan Air (DA)	Daya Dukung Air (Ha)		Total
				Terlampaui	Belum Terlampaui	
1	Borong	124.971.045,35	122.448.210,94	8.058,73	9.685,40	17.744,13
2	Congkar	54.201.067,51	40.662.964,43	2.235,00	5.778,76	8.013,75
3	Elar	176.435.474,47	55.797.474,86	2.640,93	25.433,34	28.074,28
4	Elar Selatan	125.857.056,62	77.847.411,73	3.963,61	18.393,26	22.356,87
5	Kota Komba	175.878.007,03	120.070.257,35	12.557,20	20.221,75	32.778,95
6	Kota Komba Utara	101.406.807,78	82.299.216,45	6.089,41	12.223,97	18.313,38
7	Lamba Leda	61.324.161,83	33.866.138,76	3.070,79	9.114,32	12.185,11
8	Lamba Leda Selatan	77.416.049,03	63.548.456,01	4.991,26	7.210,82	12.202,08
9	Lamba Leda Timur	63.578.328,50	58.475.210,32	4.648,55	5.775,17	10.423,71
10	Lamba Leda Utara	125.695.379,79	60.643.607,72	4.078,57	23.184,13	27.262,70
11	Rana Mese	144.671.967,53	103.909.845,14	8.298,18	12.655,57	20.953,75
12	Sambi Rampas	166.357.656,96	72.141.340,14	4.067,14	24.769,35	28.836,49
Kabupaten Manggarai Timur		**1.397.793.002,40**	**891.710.133,84**	**64.699,37**	**174.445,84**	**239.145,21**

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Tabel 2. 18 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air					Ket.
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	Borong	SA>DA	SA>DA	SA<DA	SA<DA	SA<DA	Defisit
2	Congkar	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air					Ket.
		2025	2030	2035	2040	2045	
3	Elar	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
4	Elar Selatan	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA<DA	Surplus
5	Kota Komba	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA<DA	SA<DA	Surplus
6	Kota Komba Utara	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
7	Lamba Leda	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
8	Lamba Leda Selatan	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA<DA	SA<DA	Defisit
9	Lamba Leda Timur	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA<DA	Defisit
10	Lamba Leda Utara	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
11	Rana Mese	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus
12	Sambi Rampas	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	SA>DA	Surplus

Sumber: RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045

4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Kondisi Energi

Ketahanan energi merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Pada tahun 2023, Rasio Elektrifikasi (RE) Kabupaten Manggarai Timur mencapai 86,73 persen. Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten lainnya di NTT, Manggarai Timur merupakan salah satu dengan nilai rendah atau RE berada dibawah 90 persen, sehingga memerlukan bantuan CSR atau BPBL untuk membantu peningkatan RE secara signifikan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Manggarai Timur, jumlah pelanggan listrik menurut golongan tarif pada Tahun 2019-2023 masih didominasi oleh Golongan Rumah Tangga, terutama yang berada di kelompok pengguna tarif R.1 atau rumah tangga kecil dengan penggunaan daya listrik sebesar 1.200 VA sampai 2.220 VA yang jumlahnya pada Tahun 2023 adalah sebanyak 44.054. Sedangkan untuk golongan tarif bisnis B.1 dari tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan jumlah hingga 262 di Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa masih terbatasnya penggunaan listrik untuk kebutuhan produktif berbasis listrik di Kabupaten

Golongan Tarif Tariff Group	2019	2020	2021	2022	2023*	Ket.
Kelompok Sosial						
S.1	-	-	-	-	607	
S.2	796	969	969	375	1	
S.3	1	1	1	-	-	
Kelompok Rumah Tangga						
R.1	63.169	79.664	79.664	30.938	44.054	
R.2	443	986	986	27	893	
R.3	59	67	67	3	36	
Kelompok Bisnis						
B.1	1.287	1.305	1.305	32	262	
B.2	273	288	288	37	110	
B.3	-	-	-	-	-	
Kelompok Industri						
I.1	2	3	3	1	2	
I.2	5	6	6	1	1	
I.3	1	1	1	0	-	
Kelompok Gedung Pemerintah						
P.1	423	483	483	92	188	
P.2	-	-	-	-	-	
P.3	29	30	30	3	10	
T	-	-	-	-	-	
C/M	-	-	-	1	0	
L	40	40	40	1	8	
Jumlah Total	**66.528**	**83.843**	**83.843**	**31.515**	**46.173**	

Sumber: Data diperoleh dari PT PLN (Persero) Sub UPL Borong Kab. Manggarai Timur, 2024

b. Kondisi Air

1) Akses Air Minum Rumah Tangga

Akses air minum rumah tangga merupakan kemampuan yang dimiliki rumah tangga dalam mengakses air minum bersih yang layak dan terjangkau. Ketersediaan air minum yang aman sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan merupakan bagian dari hak dasar atas pelayanan publik.

Berdasarkan data persentase cakupan air minum bersih tingkat Kabupaten/Kota, Manggarai Timur dalam rentang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan peningkatan capaian akses air bersih. pada tahun 2020, cakupan air minum bersih sebesar 57,17 persen. Kemudian baru mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 66,39 persen.

Tabel 2. 20 Persentase Cakupan Air Minum Bersih Tahun 2020-2024

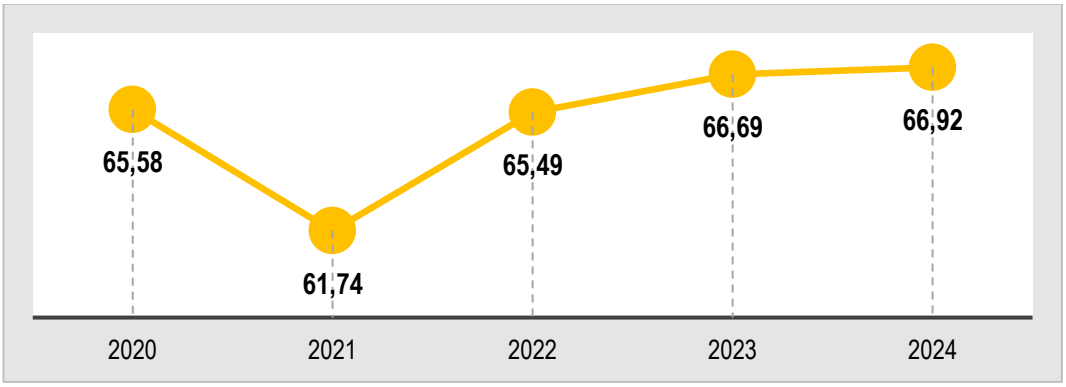
Jenis Data	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Air Minum Bersih Tingkat Kabupaten/Kota	57,17%	56,43%	57,13%	66,39%	66,39%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2025

c. Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (2024), capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan tersaji pada gambar berikut.



Sumber: *Badan Pangan Nasional 2024*

Gambar 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kbaupaten Manggarai Timur

Data dari Badan Pangan Nasional di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020 hingga 2024 mengalami dinamika yang cukup mencerminkan kondisi sosial ekonomi serta efektivitas kebijakan daerah. Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Timur berada pada angka 65,58, namun menurun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 61,74. Penurunan ini terjadi seiring dengan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi rantai distribusi pangan, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor pertanian.

Kondisi mulai membaik pada tahun 2022, ditandai dengan meningkatnya indeks menjadi 65,49, dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2023 sebesar 66,69 hingga mencapai 66,92 pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mengindikasikan adanya pemulihan dan penguatan sektor pangan daerah, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Peningkatan indeks dalam tiga tahun terakhir mencerminkan keberhasilan beberapa program intervensi daerah, seperti penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan, serta dukungan terhadap sistem distribusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Selain membahas Indeks ketahanan pangan, bagian ini juga membahas kondisi pangan dan Skor PPH Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi pangan merupakan suatu keadaan yang mencerminkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi suatu wilayah atau populasi. Kondisi pangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, seperti kebutuhan, produksi, ketersediaan, konsumsi, dan ketahanan pangan. Kondisi pangan yang baik berarti bahwa pangan tersedia dalam jumlah dan mutu yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Data kondisi pangan Kabupaten Manggarai Timur untuk indikator terkait pada tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per Kapita Per Tahun

Tahun	Kebutuhan Pangan (Kg)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (kg)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Kg)	Ketersediaan Pangan (Kg)
2020	40.005.225,81	44.634.197,45	2.362.20	44.636.559,65
2021	40.123.248,42	48.203.099,74	1.388.983,2	49.592.082,94
2022	31.113.258,12	63.198.860,98	1.453.673,6	64.652.533,61
2023	39.925.000,05	49.431.000,00	1.076.880,00	50.498.880,00
2024	47.040.878,57	73.884.559,24	2.810.400,00	76.694.959,00

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Data dari BPS Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam hal kebutuhan, produksi, dan ketersediaan pangan selama periode 2020 hingga 2024. Analisis atas data ini mencerminkan sejauh mana daerah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri maupun dengan dukungan pasokan dari luar daerah.Pada tahun 2020, kebutuhan pangan masyarakat tercatat sebesar 40,0 juta kg, sementara ketersediaan pangan berdasarkan produksi mencapai 44,63 juta kg, yang berarti produksi daerah telah melebihi kebutuhan. Bahkan dengan tambahan dari luar daerah sebesar 2,36 juta kg, total ketersediaan mencapai 44,64 juta kg, menciptakan surplus yang mendukung ketahanan pangan lokal.

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021, di mana produksi meningkat menjadi 48,2 juta kg, dan total ketersediaan pangan mencapai 49,59 juta kg, jauh melebihi kebutuhan sebesar 40,1 juta kg. Hal ini menunjukkan kemampuan produksi daerah yang terus membaik dan relatif stabil, dengan ketergantungan yang kecil terhadap pasokan luar daerah (sekitar 1,38 juta kg). Namun, tahun 2022 menunjukkan anomali. Kebutuhan pangan mengalami penurunan tajam menjadi 31,1 juta kg, yang kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian jumlah penduduk atau perubahan dalam pola konsumsi. Di sisi lain, produksi justru melonjak tinggi mencapai 63,2 juta kg, menghasilkan surplus yang sangat besar. Dengan tambahan pasokan dari luar sekitar 1,45 juta kg, total ketersediaan mencapai 64,65 juta kg. Tahun ini mencerminkan

posisi strategis Manggarai Timur sebagai wilayah dengan potensi swasembada pangan yang kuat.

Pada tahun 2023, kebutuhan pangan meningkat kembali menjadi 39,9 juta kg, namun produksi justru menurun menjadi 49,43 juta kg. Meskipun terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, ketersediaan total tetap lebih tinggi dari kebutuhan, yakni 50,49 juta kg, berkat tambahan pasokan dari luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan produksi masih dapat ditutup dengan pasokan eksternal, meskipun menandakan perlunya perhatian terhadap kestabilan produksi dalam jangka panjang. Tahun 2024 menunjukkan capaian tertinggi dalam hal produksi pangan daerah, yakni sebesar 73,88 juta kg, dengan total ketersediaan mencapai 76,69 juta kg. Ini jauh melampaui kebutuhan sebesar 47,04 juta kg, menandakan bahwa Manggarai Timur tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menyuplai pangan ke luar daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur telah mampu menjaga surplus ketersediaan pangan setiap tahunnya, dengan peningkatan signifikan pada kapasitas produksi lokal. Namun demikian, adanya fluktuasi dalam kebutuhan dan produksi menunjukkan perlunya strategi stabilisasi produksi dan pengelolaan distribusi pangan yang efisien. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah memang terus menurun, tetapi peningkatan kualitas produksi lokal serta diversifikasi komoditas pangan tetap harus menjadi prioritas dalam kebijakan pangan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029.

Selanjutnya, Skor PPH adalah indikator yang mengukur tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan antara kelompok pangan. Skor PPH merupakan parameter untuk mengukur seberapa beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, skor dilihat dari nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Skor PPH berkisar antara 0 sampai 100, dimana 0 berarti konsumsi pangan yang sangat tidak beragam dan tidak seimbang, dan 100 berarti konsumsi pangan yang sangat beragam dan seimbang. Data

kondisi pangan dan skor PPH dari Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan nasional menunjukkan perubahan nilai pada periode 2020-2024 (lihat tabel berikut).

Tabel 2. 22 Skor PPH Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional

Tahun	Kabupaten Manggarai Timur	Provinsi NTT	Nasional
2020	77,6	67,9	86,30
2021	76,5	73,4	87,20
2022	77,5	N/A	N/A
2023	65,5	74,3	94,1
2024	62,8	72,38	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Data di atas menunjukan pada tahun 2020, skor PPH Kabupaten Manggarai Timur sebesar 77,6, relatif lebih tinggi dari Provinsi NTT (67,9) namun masih berada di bawah capaian nasional (86,3). Pada tahun 2021, skor PPH kabupaten menurun menjadi 76,5, sedangkan Provinsi NTT mengalami peningkatan menjadi 73,4, dan nasional naik menjadi 87,2.

Sedangkan pada tahun 2022, Kabupaten Manggarai Timur mencatat sedikit kenaikan ke angka 77,5, namun sayangnya data pembanding dari tingkat provinsi dan nasional tidak tersedia (N/A). Penurunan drastis terjadi pada tahun 2023, di mana skor PPH kabupaten merosot tajam menjadi 65,5, jauh di bawah skor provinsi (74,3) dan nasional (94,1). Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana skor PPH Kabupaten Manggarai Timur menurun lagi menjadi 62,8, sementara Provinsi NTT tetap berada di atasnya dengan 72,38, dan data nasional belum tersedia.

Secara keseluruhan, penurunan skor PPH Kabupaten Manggarai Timur dari 77,6 (2020) menjadi 62,8 (2024) mencerminkan memburuknya keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Ketimpangan yang semakin melebar antara kabupaten dan rata-rata provinsi serta nasional menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan konsumsi pangan bergizi dan beragam. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan intervensi nyata dalam bentuk program perbaikan gizi masyarakat, diversifikasi pangan lokal, penguatan akses pangan bergizi, serta edukasi konsumsi pangan seimbang untuk meningkatkan skor PPH sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Timur.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan atau dalam bahasa Inggris disebut *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah ukuran statistik yang menunjukkan persentase atau proporsi dari suatu populasi tertentu yang secara rutin mengonsumsi makanan dengan asupan energi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup normal, aktif, dan sehat sesuai standar kebutuhan energi minimum berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tinggi badan.

Secara lebih rinci, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan menggambarkan seberapa banyak kasus ketidakcukupan konsumsi pangan terjadi dalam populasi tersebut pada periode waktu tertentu. Seseorang dikatakan mengalami ketidakcukupan pangan jika asupan energi hariannya dari makanan kurang dari yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal dan sehat. PoU mengindikasikan risiko malnutrisi dan merupakan indikator penting dalam menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah atau negara. Dalam sub bab ini akan menjelaskan perbandingan data prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Manggarai Timur, NTT dan Nasional. Data prevalensi ketidakcukupan pangan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik antara Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan tingkat Nasional. Secara umum, tren yang terlihat bervariasi, mengindikasikan faktor-faktor lokal dan regional yang mungkin memengaruhi ketahanan pangan.

Tabel 2. 23 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Manggarai Timur	*13,52*	*10,50*	*13,04*	*12,90*	*13,14*
2	Provinsi Nusa Tenggara Timur	*13,12*	*11,84*	*13,74*	*14,98*	*12,49*
3	Nasional	*8,34*	*8,49*	*10,21*	*8,53*	*8,27*

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan fluktuasi. Dimulai dari 13,52 persen di tahun 2020, angka ini sempat menurun signifikan menjadi 10,50 persen di tahun 2021, menandakan adanya perbaikan dalam ketahanan pangan. Namun, di tahun 2022, angka ini kembali meningkat menjadi 13,04 persen, mendekati level tahun 2020. Di tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 12,90 persen, namun kembali sedikit meningkat menjadi 13,14 persen di tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanganan ketidakcukupan pangan di Manggarai Timur menghadapi tantangan berkelanjutan karena pengelolaan pasca panen yang kurang baik, akibatnya masih cukup banyak kebutuhan pangan didatangkan dari luar daerah.

Provinsi NTT secara keseluruhan menunjukkan tren yang berbeda. Dimulai dari 13,12 persen di tahun 2020, angka ini sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 11,84 persen. Namun, di tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 13,74 persen dan 14,98 persen secara berturut-turut. Puncak prevalensi ketidakcukupan pangan di NTT terjadi di tahun 2023. Namun, di tahun 2024, terjadi penurunan tajam menjadi 12,49 persen. Lonjakan di tahun 2023 dan penurunan di tahun 2024 ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor pendorong di baliknya, seperti dampak cuaca ekstrem, kebijakan pemerintah daerah, atau perubahan kondisi ekonomi.

Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Manggarai Timur dan NTT, serta menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Dimulai dari 8,34 persen di tahun 2020, angka ini sedikit meningkat di tahun 2021 (8,49 persen) dan 2022 (10,21 persen).

Peningkatan di tahun 2022 perlu dicermati, meskipun tidak setinggi di NTT. Namun, di tahun 2023 dan 2024, prevalensi ketidakcukupan pangan Nasional kembali menurun menjadi 8,53 persen dan 8,27 persen. Tren penurunan ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dan efektif dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat Nasional.

Kesimpulan dari data di atas adalah masih terlihat jelas kesenjangan antara tingkat Nasional, Provinsi NTT, dan Kabupaten Manggarai Timur. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Manggarai Timur dan NTT secara konsisten lebih tinggi dari pada rata-rata Nasional. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang disesuaikan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di wilayah-wilayah yang lebih rentan. Provinsi NTT menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dalam prevalensi ketidakcukupan pangan, terutama lonjakan di tahun 2023 dan penurunan drastis di tahun 2024. Hal ini mencerminkan kerentanan yang lebih besar terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi regional.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan air, udara, dan tanah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan vegetasi sebagai indikator. Kualitas lingkungan hidup idealnya ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Untuk tingkat kabupaten/kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKTL (21,9%).

Pada tahun 2020 sampai 2022 nilai IKLH Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan secara bertahap dan termasuk dalam kategori baik. Tahun 2020 nilai IKLH sebesar 72,55, kemudian naik menjadi 77,64 di tahun 2021, dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 68,98. Namun pada tahun 2023,

nilai IKLH mengalami penurunan menjadi 73,23. kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 76,51. Kenaikan dan penurunan IKLH di Manggarai Timur merupakan kontribusi dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 2. 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	70	70	50	61,11
2.	Indeks Kualitas Air	88,31	90,14	90,14	93,75	91,07
3.	Indeks Kualitas Udara	73,02	74,01	60,27	75,19	74,87
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	72,55	77,64	68,98	73,23	76,51

Catatan:
1. Data yang tertera di atas merupakan data dari Aplikasi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
2. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur dengan menggunakan APBN

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

1) Kualitas Air

Kualitas air merupakan ukuran kondisi air yang ditinjau dari aspek fisik, kimia, dan biologi, yang menggambarkan sejauh mana air tersebut dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup, termasuk manusia, di Kabupaten Manggarai Timur, sumber air baku utama masyarakat berasal dari sungai dan sumur. oleh karena itu, pemantauan kualitas air menjadi penting untuk menjamin kesehatan lingkungan dan mencegah penyakit akibat air tercemar (*waterborne disease*).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Timur rutin memantau kualitas air sungai di wilayah Borong menggunakan alat portable multiparameter, mengacu pada baku mutu air kelas II PP Nomor 82 Tahun 2001. Pemantauan ini memungkinkan penggunaan air untuk rekreasi, budidaya ikan air tawar, dan irigasi pertanian. Meskipun pH, suhu, dan TDS umumnya aman, beberapa titik menunjukkan pH tinggi (terlalu basa), diduga akibat aktivitas masyarakat atau proses ilmiah seperti dekomposisi dan fotosintesis. Sungai-sungai yang dipantau merupakan sumber air utama bagi masyarakat.

Tabel 2. 25 Indeks Kualitas Air Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	70	70	70	50	61,11

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan pengukuran indeks kualitas air di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020-2024, terdapat fluktuasi dalam kualitas air. Nilai indeks kualitas air pada tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan stabilitas pada angka 70. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 50. Pada tahun 2024, nilai kualitas air kembali meningkat menjadi 61,11. Berdasarkan evaluasi ini, kualitas air di Kabupaten Manggarai Timur dapat dikategorikan sedang.

2) Kualitas Udara

Kualitas udara ambien merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. penurunan kualitas udara umumnya disebabkan oleh peningkatan aktivitas pembangunan, seperti perluasan kawasan permukiman, pembukaan lahan, dan pertumbuhan kendaraan bermotor, yang berdampak langsung pada meningkatnya emisi pencemaran udara. untuk itu, pemantauan dan pengendalian kualitas udara ambien memiliki arti penting untuk mengetahui kualitas udara sebagai kebutuhan bagi semua makhluk hidup dan sebagai informasi bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur tentang kualitas udara yang ada di lingkungan.

Tabel 2. 26 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	88,31	90,14	90,14	93,75	91,07

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan data pada dokumen KLHS serta pengukuran Indeks Kualitas Udara yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020-2024, terjadi peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023.

Pada tahun 2020, indeks kualitas udara sebesar 88,31. Nilai ini meningkat menjadi 90,14 pada tahun 2021 dan bertahan pada nilai yang sama di tahun 2022. Peningkatan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya di 93,75 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 91,07. Hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat bagus dimana semua parameter masih jauh dibawah nilai ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masuk dalam rentang X>90 dengan kategori SANGAT BAIK.

3) Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan merupakan salah satu bagian dari indikator pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjelaskan terkait sejauh mana vegetasi di suatu wilayah masih mampu menjaga keseimbangan ekosistem, seperti menyerap karbon, mengatur tata air, mencegah erosi, serta mendukung keanekaragaman hayati. tutupan lahan yang baik umumnya mencerminkan keberadaan kawasan hijau yang memadai, baika berupa hutan, semak belukar, maupun vegetasi lainnya.

Berdasarkan perhitungan indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020-2024, terlihat adanya peningkatan dalam kualitas tutupan lahan secara bertahap. Pada tahun 2020, nilai indeks sebesar 73,02 kemudian meningkat menjadi 74,01 pada tahun 2021 dan menurun menjadi 60,27 pada tahun 2022. Selanjutnya, kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 75,19, dan mencapai angka 74,87 pada tahun 2024.

Tabel 2. 27 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73,02	74,01	60,27	75,19	74,87

Sumber: KLHS RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi layak merupakan salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman dan layak tidak hanya berkontribusi terhadap pencegahan penyakit menular, tetapi juga berperan dalam mewujudkan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. oleh sebab itu, peningkatan jumlah rumah tangga (RT) yang memiliki sanitasi layak menjadi penting.

Di Kabupaten Manggarai Timur, terlihat adanya tren peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2020-2025. Pada tahun 2020, tercatat 20.359 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi layak dari total 64.117 rumah tangga. angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah rumah tangga bersanitasi layak mencapai 23.803 pada tahun 2024 dari total 56.681 rumah tangga.

Tabel 2. 28 Jumlah Rumah Tangga (RT) Bersanitasi Layak Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT bersanitasi layak	20.359	21.257	22.075	23.224	23.803
Total RT	**64.117**	**64.117**	**64.117**	**56.681**	**56.681**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2025

b. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup, mencemari tanah, air, dan udara, serta menimbulkan berbagai penyakit.

Berdasarkan data persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Timur pada tabel 2.29, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan

dalam penanganan volu

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Volume Sampah yang tertangani	52,47%	52,47%	52,47%	86,56 %	47,71%
2	Sampah yang terangkut ke TPA	6.570 m³	6.570 m³	6.570 m³	11.680m³	11.680 m³
3	Sampah Rumah Tangga yang terangkut ke TPA	6.570 m³	6.570 m³	6.570 m³	4.977 m³	5,574 m³
4	Sampah yang tidak terangkut ke TPA	7.224 m³	7.224 m³	7.224 m³	11,193 m³	11,193 m³

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur 2025

Pada tabel juga menunjukkan dari segi volume sampah yang berhasil diangkut ke TPA dalam tiga tahun pertama (2020-2022) tercatat stabil pada angka 6.570 m^3 per tahun. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, volume sampah yang diangkut meningkat secara signifikan menjadi 11.680m^3. Hal yang cukup mencolok terlihat dari data sampah rumah tangga yang terangkut ke TPA. Pada tahun 2020 hingga 2022, volume ini sama dengan total volume sampah yang terangkut 6.570 m^3, yang mengindikasikan bahwa seluruh sampah yang berhasil ditangani berasal dari sektor rumah tangga. Namun pada tahun 2023 dan 2024, jumlah sampah rumah tangga yang terangkut justru menurun menjadi 4.997 m^3 dan 5.574 m^3, sementara total sampah yang terangkut meningkat.

Sementara itu, volume sampah yang tidak terangkut ke TPA juga mengalami peningkatan yang signifikan pada dua tahun terakhir. Dari angka

7.224 m^3 pada tahun 2020-2022, melonjak menjadi 11,193 m^3 pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan meskipun ada sampah yang terangkut, namun volume sampah yang tidak ditangani juga bertambah, yang bisa disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi yang meningkat, atau terbatasnya cakupan layanan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah.

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga sangat bergantung pada keterjangkauan dan ketersediaan layanan pengumpulan sampah hingga ke tingkat rumah tangga.

Tabel 2. 30 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	20%	20%	30%	30%	20%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, 2025

Berdasarkan Tabel 2.30, terlihat bahwa capaian proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Manggarai Timur masih tergolong rendah dan fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Manggarai Timur masih berada pada angka 20 persen. Angka ini meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2022 dan tetap stabil pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024, capaian ini kembali menurun ke angka 20 persen.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

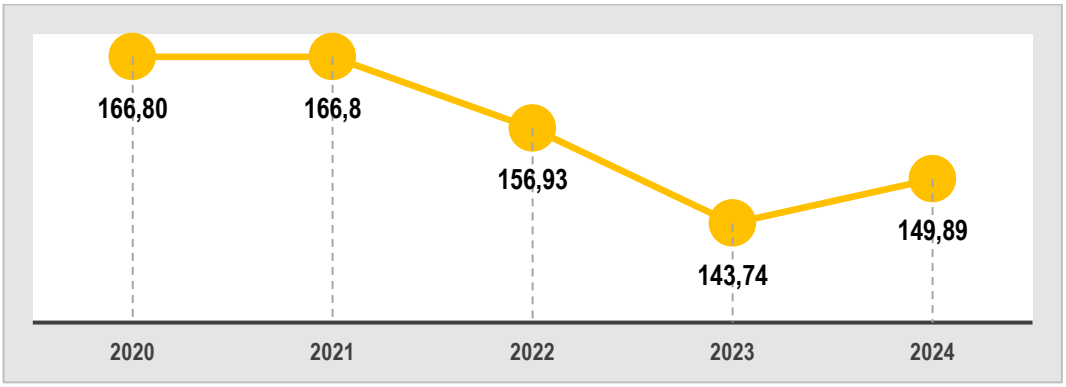
a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersumber dari aktivitas manusia seperti transportasi, industri, limbah, dan perubahan tata guna lahan memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global dan

perubahan iklim. Penurunan intensitas emisi GRK mengacu pada jumlah emisi yang dihasilkan persatuan aktivitas ekonomi yang menggambarkan seberapa efisiensi suatu daerah dalam menghasilkan output ekonomi dengan dampak lingkungan seminimal mungkin. Daerah yang berhasil menurunkan intensitas emisi GRK secara konsisten menunjukkan adanya transformasi menuju pembangunan yang lebih bersih, hijau, dan berketahanan iklim. Namun demikian, saat ini data mengenai penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Manggarai Timur belum tersedia.

b. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator untuk dapat mengetahui mengenai tingkat risiko suatu wilayah terhadap kejadian bencana berdasarkan kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana. Berdasarkan pada tabel 2.18, nilai indeks risiko bencana di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, indeks risiko sebesar 166,80, bertahan di nilai yang sama pada tahun 2021. Indeks risiko bencana menurun pada tahun 2022 menjadi 156,93 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 143,74. Indeks risiko bencana Kabupaten Manggarai Timur meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 149,89. Adanya fluktuasi menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya dalam mengelola risiko dan memperkuat ketahanan bencana, meskipun fluktuasi jenis bencana tetap terjadi.



Ket: Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota dinilai oleh BNPB

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (inaRISK) BNPB, 2024

Gambar 2. 2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Bencana alam yang kerap terjadi di Manggarai Timur setiap tahun yaitu banjir, longsor, dan kebakaran. Pada Tabel 2.19, menunjukkan bahwa jumlah bencana banjir di Manggarai Timur mengalami penurunan signifikan dari tahun 2023 yaitu 30 kejadian menjadi hanya 10 kejadian banjir di tahun 2024. Sedangkan untuk bencana longsor di Manggarai Timur di tahun 2023 terdapat 30 kali, yang mana angka tersebut turun pada tahun 2024 menjadi hanya mengalami longsor sebanyak 12 kali longsor. Kejadian bencana kebakaran di tahun 203 terjadi sebanyak 16 kali meningkat menjadi 20 kebakaran pada tahun 2024 dan angin topan terjadi penurunan dari 5 kali pada tahun 2023 menjadi hanya 3 pada tahun 2024.

Tabel 2. 31Data Kejadian Bencana di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	9	17	10	30	10
Longsor	14	9	52	30	12
Kekeringan	8	0	0	0	3
Kebakaran	29	20	22	16	20
Angin Topan	33	59	2	5	3

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024

c. Indeks Ketahanan Daerah

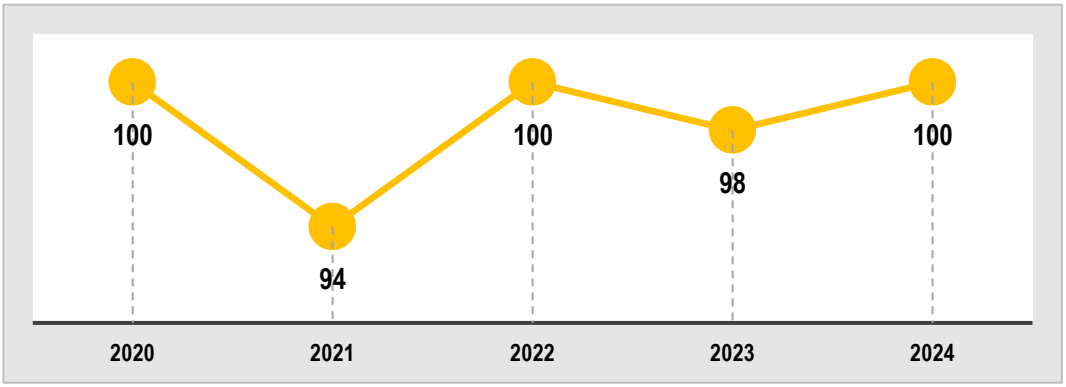
Indeks ketahanan daerah (IKD) menjelaskan mengenai sejauh mana suatu wilayah memiliki kemampuan untuk bertahan, merespon, dan pulih dari dampak kejadian bencana. Untuk mengetahui mengenai indeks ketahanan suatu daerah juga dapat dilihat dari pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana, terutama dalam hal kecepatan respon, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan lembaga penanggulangan bencana.

Daerah Ka

Indikator						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Manggarai Timur	N/A	N/A	0,30	0.40	0,48	0,44
NTT	0,37	N/A	0,32	0,43	0,43	0,50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Indeks Ketahanan Daerah merupakan proksi dari kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai Timur meningkat selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, Nilai IKD Kabupaten Manggarai Timur sebesar 0,32 dengan kategori sedang sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,43 dan menetap pada nilai yang sama di tahun 2023. Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 0,50. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tren yang sama juga terjadi. Pada tahun 2021, IKD NTT berada pada angka 0,32, identik dengan Manggarai Timur. Namun, pada tahun 2022, nilai provinsi meningkat sedikit lebih tinggi menjadi 0,43, dan terus mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 0,50 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur relatif mampu mengikuti bahkan menyamai capaian rata-rata provinsi dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, khususnya pada dua tahun terakhir (2023–2024).



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Gambar 2. 3 Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan Gambar 2.3 terlihat bahwa secara umum pemerintah daerah mampu dalam menjaga tingkat penanganan tanggap darurat yang sangat tinggi. Dalam lima tahun terakhir, persentase penanganan tanggap darurat bencana selalu berada di atas 94 persen, dengan capaian 100 persen

pada tahun 2020, 2022, dan 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 hingga mencapai 94 persen dan 2023 mencapai 98 persen, angka ini tetap menunjukkan tingkat respon yang sangat baik.

7. Demografi

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah tertentu dianggap sebagai sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam proses pembangunan, serta sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, penduduk berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peranan penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Namun demikian, jumlah penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang tidak terkendali dan persebaran yang tidak merata, ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan permasalahan dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan menurun dengan cepat jika pertumbuhan penduduk terus meningkat. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan jika dibarengi dengan kualitas yang tinggi, namun jika kualitasnya rendah maka akan menjadi beban pembangunan.

Data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,37 persen, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,63 persen. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 1,01 persen, dan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2023 sebesar 1,97 persen. Meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 1,94 persen, angka ini tetap menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi dalam laju

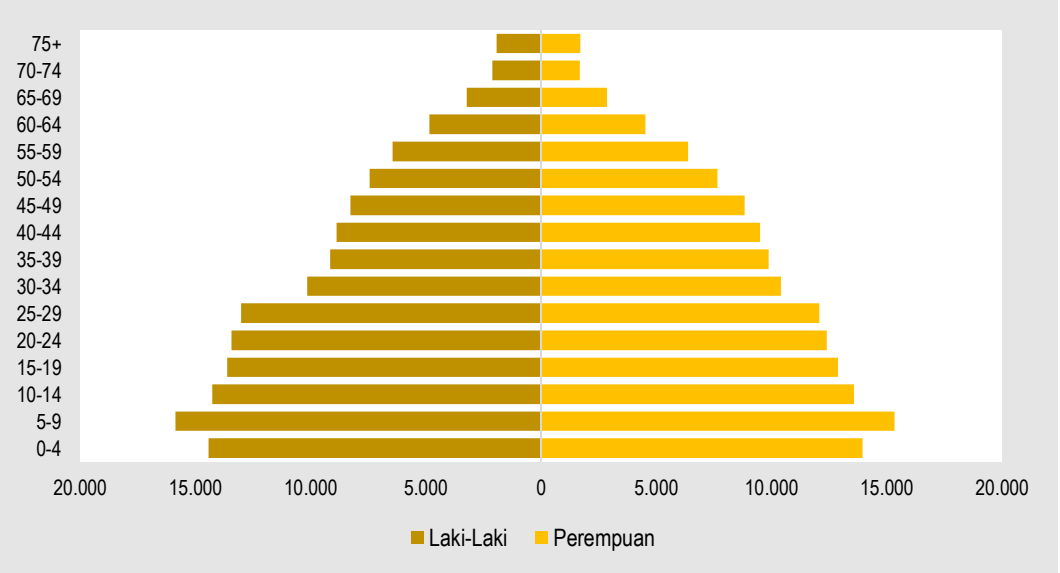
pertumbuhan penduduk ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk.

Tabel 2. 33 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk
2020	1,37
2021	0,63
2022	1,01
2023	1,97
2024	1,94

Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka, 2025

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Struktur penduduk Kabupaten Manggarai Timur memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (anak dan pelajar) dan usia produktif. Pada piramida tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 5-9 dengan komposisi jenis kelamin laki-laki lebih besar dari perempuan sebanyak 15.831 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70+ tahun yaitu sebesar 3.849 jiwa (lihat Gambar 2.4).



Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka, 2025

Gambar 2. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

b. Rasio Penduduk

Berdasarkan data BPS, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 275.603 jiwa pada tahun 2020 menjadi 296.174 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti penurunan jumlah laki-laki dan perempuan. Sementara itu, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang diukur melalui sex ratio menunjukkan angka yang relatif stabil, berkisar antara 102,2 hingga 102,4. Hal ini berarti jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan setiap tahunnya. Tren peningkatan jumlah penduduk ini mencerminkan adanya pertumbuhan populasi yang stabil di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.34
Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2020-2024

Tabel 2.34 Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Manggarai Timur

Tahun	Jenis Kelamin		Total	*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan		
2020	142.994	146.842	275.603	102,3
2021	140.597	137.317	277.914	102,4
2022	141.990	138.742	280.732	102,3
2023	147.041	143.749	290.790	102,3
2024	149.733	146.441	296.174	102,2

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Manggarai Timur menunjukkan tren yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 115 jiwa/km^2, kemudian naik menjadi 124 jiwa/km^2 pada

tahun 2024. Peningkatan kepadatan penduduk Manggarai Timur dengan percepatan signifikan terjadi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan tetapi tetap konsisten dengan tren pertumbuhan. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

Tabel 2. 35 Kepadatan Penduduk Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Kepadatan Penduduk (/km2)
2020	115
2021	115,73
2022	116,9
2023	122
2024	124

Sumber: Bapperida Kabupaten Manggarai Timur, 2025

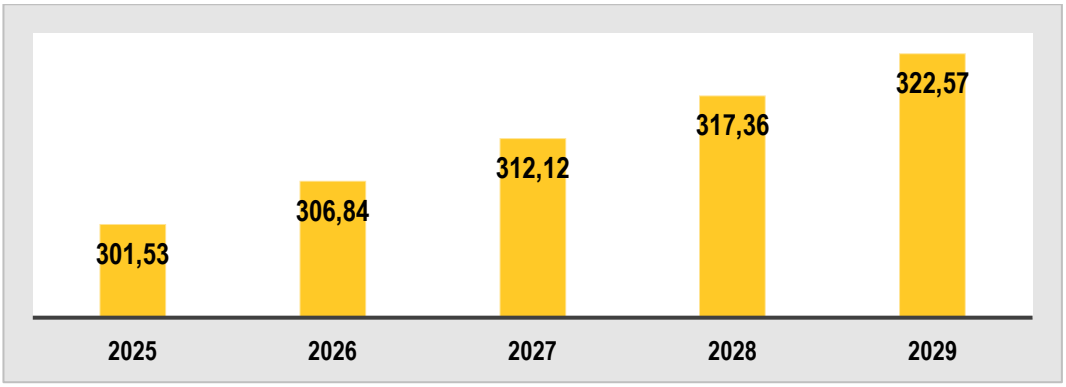
d. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, salah satu yang menjadi fokus dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 adalah sumber daya manusia dan kependudukan. Aspek demografi menjadi hal penting untuk dilihat trennya guna menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani oleh pemerintah daerah. Analisis proyeksi kependudukan meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua yang dijelaskan sebagai berikut.

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk sebagai fenomena yang mencakup pertumbuhan, penurunan, atau stagnasi jumlah penduduk dalam wilayah dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk laju kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan kebijakan kependudukan. Pemerintah daerah biasanya melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan jumlah penduduk untuk merencanakan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal tersebut dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat yang

jumlahnya semakin berkembang, akan seimbang dengan fasilitas yang disediakan. Berdasarkan data proyeksi yang ada, Kabupaten Manggarai Timur diperkirakan akan mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil sekitar 21,04 ribu jiwa selama periode 2025 hingga 2029, dari 301,53 ribu jiwa di 2025 menjadi 322,57 ribu jiwa di 2029. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



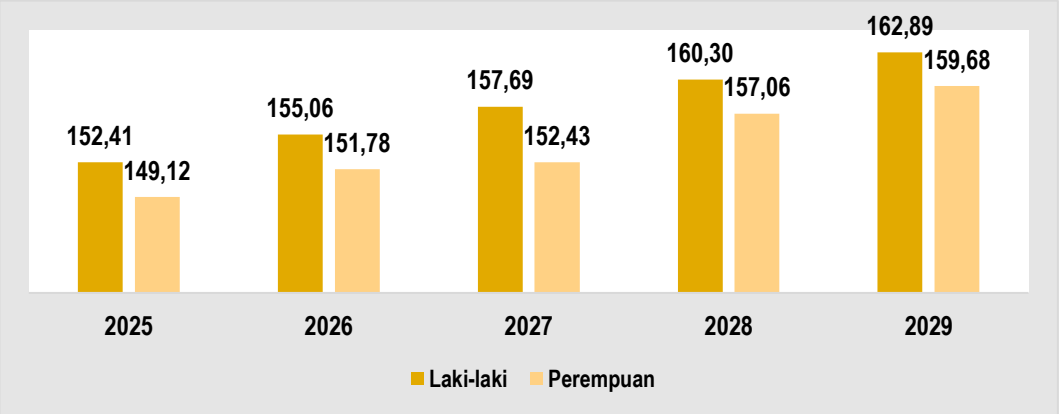
Sumber: BPS NTT 2025

Gambar 2. 5Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 301,53 ribu jiwa. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 306,84 ribu jiwa pada tahun 2026. Pada tahun 2027, proyeksi jumlah penduduk menunjukkan angka 312,12 ribu jiwa. Tren kenaikan berlanjut dengan proyeksi penduduk mencapai 317,36 ribu jiwa pada tahun 2028. Menjelang akhir periode perencanaan di tahun 2029, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur diproyeksikan mencapai 322,57 ribu jiwa. Hal Ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang konsisten, dengan rata-rata penambahan sekitar 4-5 ribu jiwa per tahun. Pertumbuhan penduduk yang stabil ini membawa implikasi penting bagi berbagai sektor pembangunan di Manggarai Timur seperti Kebutuhan Layanan Dasar, Penyediaan Lapangan Kerja, Infrastruktur dan Tata Ruang, Ketahanan Pangan, dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data proyeksi jumlah penduduk juga dianalisis lebih dalam dengan melakukan pilah gender. Metode ini sangat penting guna menentukan

intervensi kebijakan berbasis gender sehingga kebijakan publik dapat tepat sasaran. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada grafik berikut.



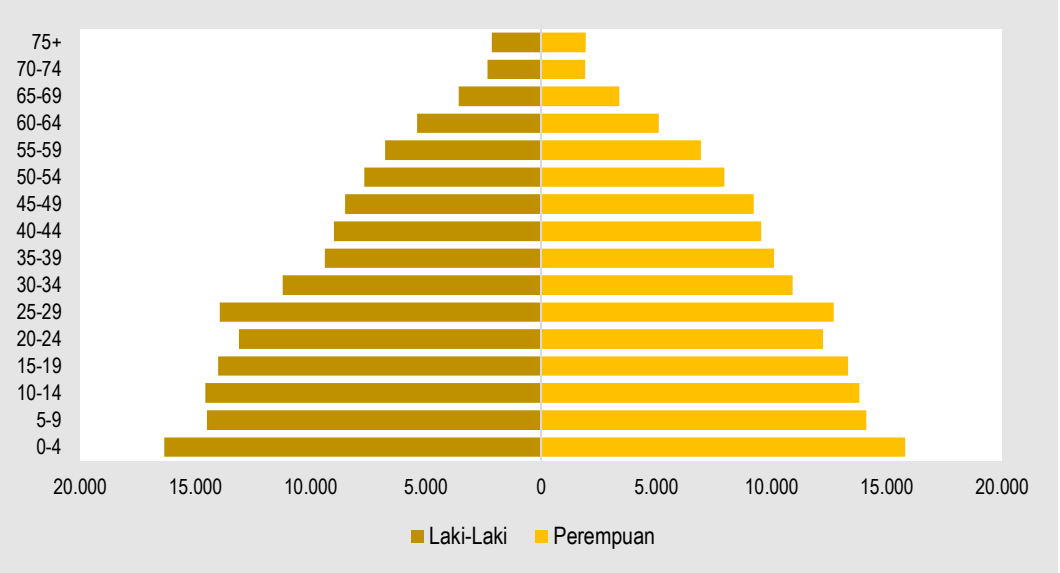
Sumber: BPS NTT 2025

Gambar 2. 6 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Manggarai Timur

Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk merujuk pada pola penyebaran atau lokasi geografis dari populasi dalam suatu wilayah. Distribusi penduduk dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan migrasi, dan faktor-faktor sosial-ekonomi. Distribusi penduduk lazim disajikan menggunakan piramida penduduk guna menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok.

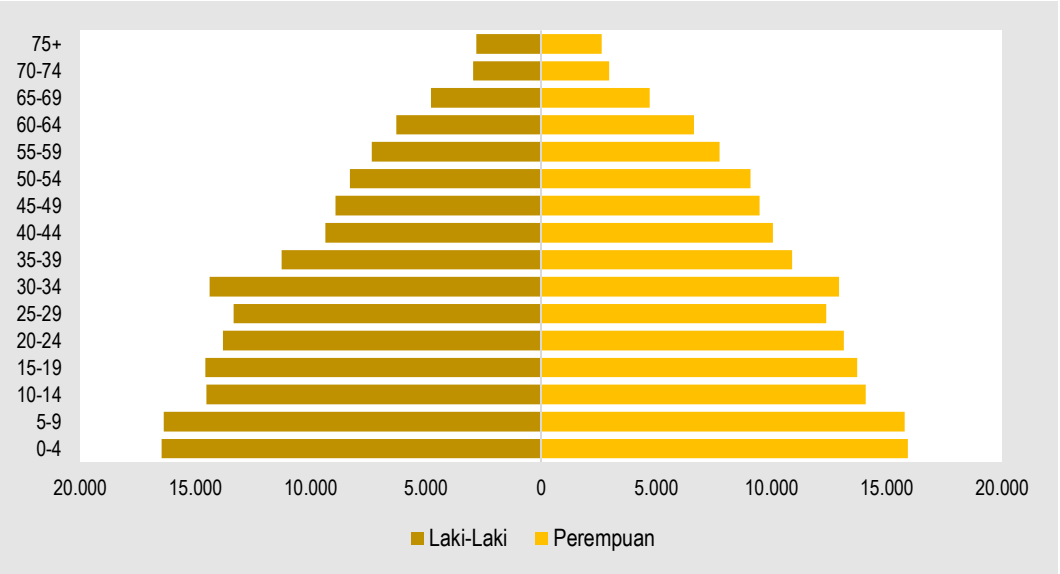
Pada tahun 2025 diproyeksikan distribusi penduduk Kabupaten Manggarai Timur memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan, yang mana masih didominasi pada usia 0-4 tahun. Kemudian kenaikan pada usia 75 ke atas terlihat cukup naik namun masih pada kategori paling sedikit jumlahnya.



Sumber: BPS Manggarai Timur 2023-2045

Gambar 2. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

Proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2030 tampak tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun adanya kenaikan pada rentang usia 5-9 tahun kemudian didominasi oleh usia 0-4 tahun. Secara keseluruhan memang masih tidak jauh berbeda pada rentang 10 tahun ke belakang dan di tahun ini usia produktif antara laki-laki dan perempuan cenderung seimbang.

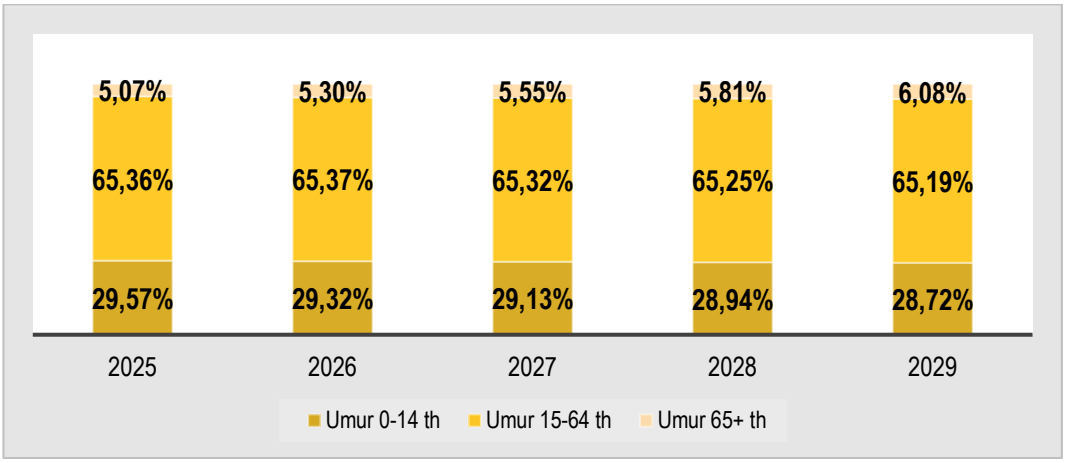


Sumber: BPS Manggarai Timur 2023-2045

Gambar 2. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2030

Bonus Demografi

Bonus demografi merujuk pada periode ketika jumlah penduduk usia produktif dalam rentang usia 15-64 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif seperti anak-anak dan lansia. Kabupaten Manggarai Timur seperti banyak wilayah di Indonesia berpotensi untuk memanfaatkan bonus demografi ini sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kondisi ini menciptakan jendela peluang emas bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan suatu daerah, karena ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah. Gambar dibawah menyajikan proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2025-2029.



Sumber: BPS NTT, 2025 (Diolah)

Gambar 2. 9 Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

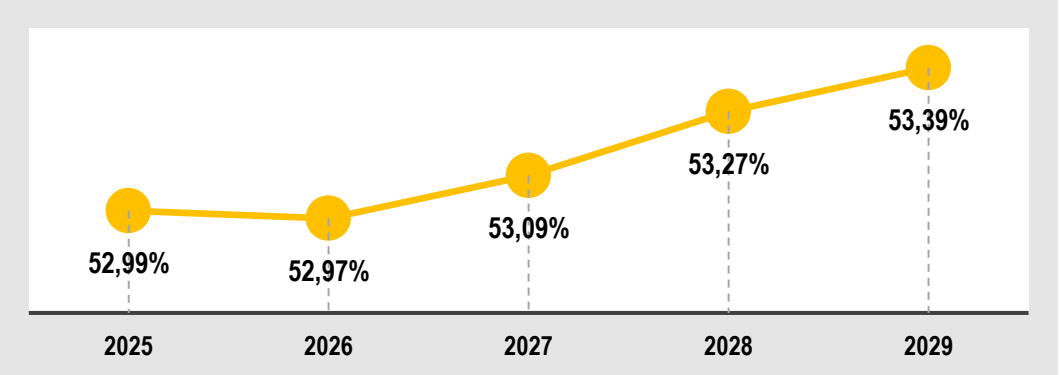
Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur akan berada dalam periode bonus demografi yang optimal selama 2025-2029. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) secara konsisten berada di atas 65 persen, bahkan mencapai puncaknya di 65,37 persen pada tahun 2026. Ini menandakan bahwa beban ketergantungan (jumlah penduduk non-

produktif per penduduk produktif) berada pada titik terendah. Namun, terdapat pula dua tren penting yang perlu diperhatikan, yaitu penurunan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) dari 29,57 persen pada 2025 menjadi 28,72 persen pada 2029. Ini mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana atau perubahan pola fertilitas di masyarakat. Dan sebaliknya, proporsi penduduk usia lanjut menunjukkan peningkatan yang stabil dan konsisten, dari 5,07 persen pada 2025 menjadi 6,08 persen pada 2029. Tren ini merupakan indikasi bahwa Manggarai Timur sedang bergerak menuju struktur penduduk menua (aging population) setelah periode bonus demografi. Jika potensi bonus demografi ini tidak dimanfaatkan secara optimal, dapat berubah menjadi beban demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak memiliki pekerjaan atau keterampilan yang memadai, sehingga justru menghambat pembangunan. Oleh karena itu, periode 2025-2029 adalah waktu krusial bagi Kabupaten Manggarai Timur untuk berinvestasi pada manusianya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan berkelanjutan.

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan yaitu perbandingan komposisi usia non-produktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Semakin rendah rasio ketergantungan semakin ringan beban tersebut yang seringkali diasosiasikan dengan periode bonus demografi.

Berdasarkan data proyeksi rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2025 hingga 2029, Kabupaten Manggarai Timur berada dalam periode bonus demografi yang optimal. Rasio ketergantungan masih relatif rendah dengan rata-rata persentase rasio sekitar 53 persen, yang artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Angka ini secara umum masih tergolong baik dan menunjukkan

adanya potensi besar dari sisi sumber daya manusia usia produktif. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa setelah sedikit penurunan di tahun 2026, rasio ketergantungan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten hingga tahun 2029. Kenaikan ini meskipun bertahap, mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia tua (65+ tahun) mulai tumbuh lebih cepat dibandingkan penurunan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun), atau bahwa pertumbuhan penduduk usia produktif tidak lagi secepat sebelumnya dalam mengimbangi pertambahan kelompok usia dependen. Ini adalah tanda-tanda awal dari berakhirnya periode bonus demografi dan pergeseran menuju struktur penduduk menua. Berikut grafik proyeksi rasio ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029.

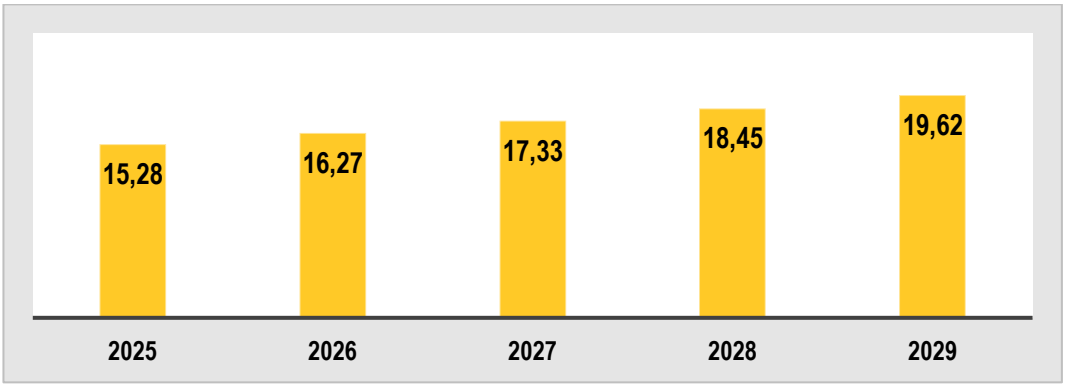


Sumber: BPS NTT, 2025 (Diolah)

Gambar 2. 10 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Penduduk Usia Tua

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (Kominfo, 2020). Ledakan penduduk usia tua dapat ditangkap sebagai sebuah tantangan perekonomian dan kesejahteraan lansia Kabupaten Manggarai Timur dalam lima tahun ke depan apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk usia tua dapat dilihat berdasarkan hasil proyeksi berikut.



Sumber: BPS NTT, 2025 (Diolah)

Gambar 2. 11 Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan data proyeksi yang dilakukan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun ini, Kabupaten Manggarai Timur diproyeksikan mengalami penambahan penduduk tua sekitar 4,34 ribu jiwa (dari 15,28 ribu di 2025 menjadi 19,62 ribu di 2029). Ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan relatif cepat dalam proporsi kelompok usia ini dalam total populasi. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Manggarai Timur diproyeksikan mencapai 15,28 ribu jiwa. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 16,27 ribu jiwa pada tahun 2026. Pada tahun 2027, proyeksi menunjukkan jumlah penduduk tua sebesar 17,33 ribu jiwa. Tren kenaikan yang signifikan berlanjut, dengan proyeksi mencapai 18,45 ribu jiwa pada tahun 2028. Menjelang akhir periode proyeksi, di tahun 2029, jumlah penduduk tua di Kabupaten Manggarai Timur diproyeksikan mencapai 19,62 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tua membawa implikasi signifikan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah seperti Kebutuhan Layanan Kesehatan Spesifik, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan, Lingkungan Ramah Lansia, Peran Keluarga dan Komunitas, serta Pemberdayaan dan Produktivitas Lansia. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lansia di Kabupaten Manggarai Timur dapat hidup sehat, sejahtera, mandiri, dan bermartabat .

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Nilai total PDRB meningkat dari Rp 2.040,01 miliar (2020) menjadi Rp 2.328,88 miliar (2024), dengan total pertumbuhan sekitar 14,15 persen dalam lima tahun atau setara dengan rata-rata sekitar 3,36 persen per tahun, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik.. Struktur perekonomian Manggarai Timur didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan;

Informasi dan Komunikasi; dan Konstruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Timur, dengan kontribusi berkisar antara 45,15 persen hingga 46,50 persen selama periode 2020–2024. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, sektor ini tetap mendominasi, mencerminkan karakteristik daerah yang berbasis ekonomi agraris. Nilai sektor ini meningkat dari Rp 874,39 miliar (2020) menjadi Rp 999,43 miliar (2024), menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, kontribusi persentasenya pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 46,04 persen, dibandingkan dengan puncaknya di 2023 sebesar 46,50 persen.

Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi yang cukup besar setelah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, meskipun cenderung menurun dari 15,50 persen (2020) ke 14,20 (2024), namun berbanding terbalik dengan nilai sektor ini yang meningkat dari 315,76 miliar (2020) menjadi 341,14 miliar (2024). Hal ini mencerminkan peran besar belanja pemerintah dalam mendorong perekonomian lokal. Sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menjadi sektor unggulan ketiga setelah Pertanian, kehutanan dan perikanan dan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib. Kontribusi Lapangan Usaha dan Eceran juga cenderung meningkat dan stabil Pada 2020 kontribusinya sebesar 12,35 persen, meningkat menjadi 14,22 persen pada 2024. Nilai Sektor ini juga meningkat dari 237.30 miliar (2020) menjadi 282,25 miliar (2024). Hal ini menggambarkan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal yang meningkat. Selain sektor unggulan (Kontribusi tertinggi) di Manggarai Timur juga terdapat sektor menengah dan berkembang. Pertama, sektor konstruksi mengalami kenaikan nilai dari Rp. 103,49 miliar (2020) menjadi Rp. 116,36 miliar (2024), akan tetapi kontribusinya sedikit menurun dari 5,73 persen ke 5,46 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya pembangunan infrastruktur meski tidak tumbuh pesat. Sektor menengah dan berkembang kedua adalah Informasi dan komunikasi yang mengalami

pertumbuhan positif dari Rp. 269,41 miliar (2020) ke Rp. 318, 06 miliar (2024), akan tetapi kontribusi sedikit menurun dari 9,50 persen (2020) ke 8,91 persen (2024). Sektor menengah dan berkembang yang ketiga adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami peningkatan nilai yang signifikan dari Rp. 53,86 miliar (2020) menjadi Rp. 66,74 miliar (2024) dengan peningkatan kontribusi dari 2,82 persen (2020) ke 2,99 persen (2024). Selain itu terdapat sektor dengan kontribusi kecil dan stagnan yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur ulang; Jasa Perusahaan dan real estat yang memiliki kontribusi <1 persen secara konsisten dan cenderung lambat serta stagnan sehingga belum menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Kesimpulannya adalah struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Timur masih didominasi oleh sektor primer yang menunjukkan karakteristik daerah yang masih berbasis sumber daya alam atau masih bersifat ekstraktif. Pertanian masih tetap menjadi tulang punggung sehingga perlu didukung inovasi teknologi dan diversifikasi komoditas. Sektor tersier dalam hal ini Jasa, Pemerintahan, dan perdagangan tumbuh dan berkontribusi secara signifikan yang mengarah pada diversifikasi ekonomi meskipun belum merata. Namun Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih sangat kecil, namun berpotensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari hilirisasi dan diversifikasi ekonomi. Manggarai Timur perlu mendorong sektor perdagangan dan informasi komunikasi sebagai sektor yang tumbuh stabil dan menjanjikan. Kemudian perlu memperluas layanan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Tabel 2. 36 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	874.392	45,15	905.097	45,43	940.546	46,01	982.78	46,50	999,43	46,04
2.	Pertambangan dan Penggalian	63.028	2,80	64.759	2,79	66.450	2,75	68,55	2,71	70,68	2,55
3.	Industri Pengolahan	10.566	0,54	10.032	0,54	10.504	0,55	11.05	0,56	11,57	0,57

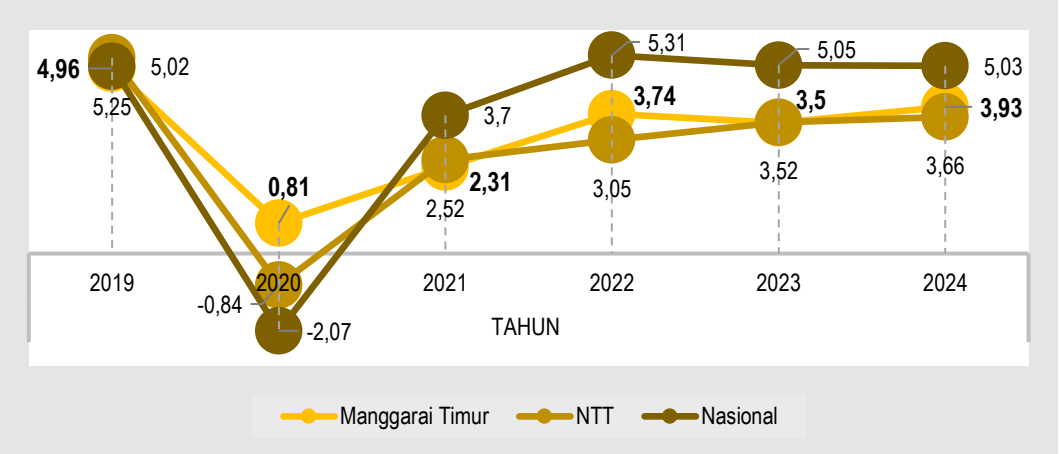
No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	652,5	0,02	655,8	0,02	685,3	0,02	685,3	0,02	0,87	0,03
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	106,2	0,00	113,6	0,00	119,5	0,00	119,5	0,00	0,13	0,00
6.	Konstruksi	103.486	5,73	107.740	5,99	107.362	5,66	112.702	5,67	116,36	5,46
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	237.301	12,35	246.377	12,74	261.248	13,24	273.22	13,85	282,25	14,22
8.	Transportasi dan Pergudangan	14.392	0,66	14.477	0,66	14.795	0,64	15.24	0,65	15,99	0,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.925,1	0,10	2.1017	0,10	2.223,7	0,11	2.223,7	0,11	2,69	0,12
10.	Informasi dan Komunikasi	264.414	9,50	284.537	9,77	303.552	9,93	310.36	9,43	318,06	8,91
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	8.327,9	0,44	8.101,9	0,42	8.289,8	0,40	8.30	0,39	8,71	0,37
12.	Real Estat	28.803	1,25	29.520,7	1,22	30.443	1,20	30.80	1,16	31,48	1,09
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib	315.757	15,50	299.687	14,35	301.757	13,58	303.80	13,15	341,14	14,20
15.	Jasa Pendidikan	52.621	2,83	51.491	2,71	51.449	2,57	52.53	2,52	57,24	2,53
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	53.862	2,82	57.347	3,02	60.516	3,09	62.72	3,04	66,74	2,99
17.	Jasa Lainnya	5.374	0,26	5.154	0,24	5.301	0,24	5.48	0,24	5,54	0,23
	PDRB	2.040.012		2.087.113		2.165.247		2.240.83		2.328,88	

Sumber: BPS Manggarai Timur, 2025

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang juga dialami oleh Provinsi NTT maupun secara nasional. Namun pertumbuhan ekonomi mulai beranjak naik kembali pasca COVID-19 di tahun 2021 dan 2022. Berikut gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2020 adalah 0,81 persen, kemudian pada tahun 2021 adalah 2,31 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,74 persen dari tahun sebelumnya dan puncak pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,93 persen. Namun demikian pada tahun 2023 tercatat masih terjadi kontraksi di beberapa lapangan usaha seperti pada sektor Konstruksi dan Jasa Pendidikan. Nilai PDRB Manggarai Timur tahun 2022 ADHK 2010, mencapai 2,165 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 78 miliar dari 2,087 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut mengakibatkan selama tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,74 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Manggarai Timur

mulai mengalami peningkatan pasca pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,31 persen. Namun pada tahun 2023 Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan kembali ke angka 3,50 persen. Kemudian pada tahun terjadi kenaikan menjadi 3,93 persen.

Melalui hal tersebut, sejatinya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur memiliki kinerja yang masih baik jika dibandingkan dengan Nasional dan tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh struktur perekonomian di Kabupaten Manggarai Timur yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mampu menopang kehidupan masyarakat secara lokal sehingga, meski saat terjadi krisis besar pun di dunia, perekonomian di Kabupaten Manggarai Timur tetap mampu bertahan dengan sumber daya lokal, namun tidak memberikan nilai tambah yang tinggi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa selama periode 2020-2024, sektor andalan ini tidak mampu bertumbuh tinggi dan cenderung stagnan. Hal ini dapat dicermati melalui data sebagai berikut.

Tabel 2. 37 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,39	3,51	3,92	4,50	1,70
2.	Pertambangan dan Penggalian	-12,81	2,75	2,61	3,15	3,09
3.	Industri Pengolahan	-1,54	-5,05	4,56	5,44	4,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	18,51	0,50	4,50	11,29	14,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,17	6,97	5,16	3,55	3,08
6.	Konstruksi	-7,44	4,11	-0,35	4,98	3,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-4,10	3,82	6,04	4,58	3,49
8.	Transportasi dan Pergudangan	-0,92	0,59	2,19	3,02	4,91
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-13,48	4,81	9,71	9,15	11,43
10.	Informasi dan Komunikasi	6,92	5,61	6,68	2,24	2,48
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	-0,60	-2,71	2,32	0,16	4,79

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
12.	Real Estat	-1,16	2,49	3,13	1,18	2,21
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib	4,35	-5,09	0,69	0,68	12,13
15.	Jasa Pendidikan	1,72	-2,15	-0,08	2,10	8,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	4,69	6,47	5,53	3,63	6,42
17.	Jasa Lainnya	-12,87	-4,10	2,86	3,31	1,24
	Produk Domestik Regional Bruto	**0,81**	**2,31**	**3,74**	**3,50**	**3,93**

Sumber: BPS Manggarai Timur, 2025

Pada tahun 2020, sebagian besar sektor mengalami kontraksi akibat dampak pandemi. Sektor yang paling terkontraksi adalah Jasa Lainnya (-12,87 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-13,48 persen), serta Pertambangan dan Penggalian (-12,81 persen). Sektor konstruksi dan perdagangan juga mengalami pertumbuhan negatif. Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti Pengadaan Listrik dan Gas (18,51 persen), Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah (7,17 persen), serta Informasi dan Komunikasi (6,92 persen), yang kemungkinan besar tetap beroperasi atau bahkan meningkat karena perubahan perilaku masyarakat selama pandemi. Secara keseluruhan, PDRB hanya tumbuh sebesar 0,81 persen.

Pada tahun 2021 dan 2022, sebagian besar sektor mulai mengalami pemulihan. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan positif pada sektor Pertanian (3,51 persen), Perdagangan (3,82 persen), dan Konstruksi (4,11 persen). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat rebound signifikan (4,81 persen), menunjukkan mulai pulihnya sektor pariwisata dan perhotelan. Tahun 2022 menunjukkan akselerasi pertumbuhan pada sektor-sektor seperti Industri Pengolahan (4,56 persen) dan Akomodasi dan Makan Minum (9,71 persen). PDRB tahun 2022 tumbuh sebesar 3,74 persen, meningkat dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 cenderung stabil dengan PDRB tumbuh 3,50 persen. Sektor-sektor seperti Industri Pengolahan (5,44 persen) dan Pengadaan Listrik dan Gas (11,29 persen) menunjukkan performa yang kuat. Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga terus tumbuh, mencerminkan aktivitas mobilitas dan konsumsi yang semakin membaik. Sektor jasa pemerintahan mulai pulih (0,68 persen) setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan PDRB sebesar 3,93 persen, tertinggi selama lima tahun terakhir. Sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan (12,13 persen) dan Akomodasi dan Makan Minum (11,43 persen), menandakan peningkatan peran belanja pemerintah dan sektor pariwisata. Jasa Pendidikan juga mencatat pemulihan kuat (8,96 persen). Namun, sektor Pertanian mengalami perlambatan (1,70 persen) setelah tren pertumbuhan yang stabil sebelumnya, yang dapat disebabkan oleh faktor cuaca atau produktivitas.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat 9 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, sedangkan sisanya mengalami kontraksi fluktuatif. Dengan rincian Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib, Jasa pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Kemudian Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari 5 persen Pada tahun 2023 antara lain: Industri Pengolahan sebesar 5,44 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,15 persen, serta Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,29 persen. Sedangkan pada tahun 2024 Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari 5 persen hanya Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan Sosial Wajib 12,13 persen dan Jasa Pendidikan 8,96 persen.

b. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 26,52 persen dan di tahun 2024 sebesar 24,90 persen. Kondisi fluktuatif ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi eksternal seperti inflasi dan pasca pemulihan setelah pandemi COVID-19 yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur jika dibandingkan dengan daerah lain menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020 - 2024 masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, kondisi ini menjadi catatan bagi Kabupaten Manggarai Timur agar dapat menurunkan persentase penduduk miskin melalui berbagai program dan kegiatan.

Tabel 2. 38 Persentase Penduduk Miskin Manggarai Timur, Provininsi NTT dan Nasional

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	26,52	26,5	25,35	25,06	24,90
Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,9	20,99	20,05	19,96	19,48
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: BPS, 2025

Persentase penduduk miskin berdasarkan kecamatan diperoleh berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data P3KE menggambarkan kondisi/peringkat kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar Rp 322.170 pengeluaran/orang/bulan. Berdasarkan data P3KE persentase masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 terendah di Kecamatan Sambi Rampas yaitu sebesar 5,40 persen dan tertinggi di Kecamatan Lambaleda Selatan yaitu sebesar 12,34 persen. Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi agenda wajib Pemerintah

Kabupaten Manggarai Timur dengan menerapkan 3 (tiga) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dan mengurangi beban pengeluaran. Ketiga strategi ini diturunkan dalam berbagai program/kegiatan yang diharapkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 39 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
1	Sambi Rampas	5,40
2	Congkar	5,29
3	Lamba Leda	6,15
4	Lamba Leda Utara	6,53
5	Kota Komba Utara	6,74
6	Elar	6,09
7	Elar Selatan	6,93
8	Lamba Leda Timur	10,74
9	Rana Mese	10,89
10	Kota Komba	11,10
11	Borong	11,83
12	Lamba Leda Selatan	12,34

Sumber: Kemenko PMK, Data P3KE, 2024 (diolah)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2020, garis kemiskinan berada pada angka Rp.344.642 dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp.458.116 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan minimum masyarakat untuk memenuhi standar hidup dasar, baik dari sisi kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat Provinsi NTT dan secara nasional. Garis kemiskinan Provinsi NTT naik dari Rp. 403.005 pada tahun 2020 menjadi Rp.527.275 pada tahun 2024, sedangkan pada tingkat nasional terjadi peningkatan dari Rp.458.947 menjadi Rp.595.242 dalam periode yang sama. Kenaikan ini secara umum mencerminkan pengaruh inflasi, naiknya harga kebutuhan pokok, serta bertambahnya komponen kebutuhan dasar yang dihitung dalam garis kemiskinan.

Namun demikian, secara nominal, garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur masih berada jauh dibawah rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Manggarai Timur hanya sekitar 87 persen dari angka Provinsi NTT dan sekitar 77 persen dari tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup di daerah ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Meskipun demikian, rendahnya garis kemiskinan juga dapat mencerminkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap barang dan jasa, serta rendahnya daya beli masyarakat.

Kenaikan garis kemiskinan juga menandakan bahwa masyarakat membutuhkan pengeluaran yang lebih besar dari tahun ke tahun hanya untuk bertahan di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga, tetapi juga harus memperkuat daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Tabel 2. 40 Garis Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	344,642	373,972	411,670	446,504	458.116
Provinsi Nusa Tenggara Timur	403,005	415,116	460,823	507,203	527,275
Nasional	458,947	486,168	532,547	550,458	595.242

Sumber: Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks - P2*) merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin atau merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2022 sebesar 1,5 poin, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 1,49.

Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Manggarai Timur memberikan sinyal bahwa kerentanan penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur masih perlu diwaspadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur merupakan permasalahan penting yang perlu menjadi prioritas pembangunan.

Tabel 2. 41 Tingkat Keparahan Kemiskinan

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	1,05	1,32	1,5	1,49	1,49
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	1,05	0,93	0,8	0,96
Nasional	0,47	0,42	0,38	0,38	0,32

Sumber: Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan) atau merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 sebesar 5,14 poin turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,57 poin, hal ini menunjukkan kenaikan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 2. 42 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Kabupaten Manggarai Timur	4,5	4,96	5,27	5,57	5,14
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,02	3,96	3,63	3,33	3,57
Nasional	1,26	1,23	1,16	1,53	1,36

Sumber: Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka, 2025

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Namun nilai PDRB per kapita ini merupakan indikator yang sangat kasar jika digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, sehingga perlu juga dibandingkan indikator-indikator yang lain.

Nilai PDRB per kapita Manggarai Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 11,93 juta rupiah. Secara nominal, PDRB per kapita terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 14,4 juta rupiah (lihat Tabel 2.43).

Tabel 2. 43 PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	11,93	12.28	13,00	13,54	14,4
Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,06	20,58	21,72	23,08	24,27
Nasional	57,29	62,25	71,03	75	78,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada Tabel dapat dipahami bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan setiap tahun dari 11,93 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 14,4 juta rupiah pada tahun 2024. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Manggarai Timur memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Namun, dari data tersebut juga dapat ditarik pemahaman bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur masih jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur hanya mencapai sekitar 59 persen dari pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitar 18,3 persen dari pendapatan per kapita Nasional. Ini berarti bahwa terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara Kabupaten Manggarai Timur dengan wilayah lainnya.

Kemudian, pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Pada periode 2020-2024, pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur tumbuh sebesar 20,7 persen, sedangkan pendapatan per kapita Provinsi NTT tumbuh sebesar 21 persen dan pendapatan per kapita Nasional tumbuh sebesar 37, 21 persen. Ini berarti bahwa Kabupaten Manggarai Timur belum mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah lainnya dalam hal kemajuan ekonomi.

Adapun hal-hal yang memengaruhi peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Manggarai Timur adalah terjadinya peningkatan kualitas infrastruktur yang mendorong kinerja sektor pertanian menjadi lebih mudah dalam melakukan mobilitas pasarnya dan meningkatnya produksi pada sektor ini. Sedangkan, hal yang menyebabkan lemahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh inflasi yang berdampak pada indeks harga yang diterima oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan dinamika yang fluktuatif sejak tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2020 berada di angka 2,12 persen, menurun menjadi 1,95 persen (2021) hingga tahun 2022 menurun sebesar 1,89 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 2,51 persen, dan kemudian menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 1,63 persen. Penurunan yang signifikan pada tahun 2024 ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi yang kuat atau keberhasilan program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini selaras dengan partisipasi angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun tidak terlepas dari masih terdapat penduduk yang tidak bekerja (lihat Tabel 2.44).

Tabel 2. 44 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12	1,95	1,89	2,51	1,63

Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka, 2020-2025

e. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antara masyarakat di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1, dimana 0 berarti distribusi pendapatan yang merata dan 1 berarti distribusi pendapatan yang sangat timpang. Indeks gini dapat digunakan untuk membandingkan kondisi ketimpangan pendapatan antara wilayah yang berbeda, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Adapun perbandingan Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2. 45 Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	0,254	0,286	0,276	0,27	N/A

Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,354	0,339	0,340	0,325	0,316
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS, 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki nilai indeks gini yang paling rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki distribusi pendapatan yang paling merata di antara ketiga wilayah tersebut. Namun, Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi nilai indeks gini selama periode 2018-2023. Nilai indeks gini naik dari 0,236 pada tahun 2018 menjadi 0,27 pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 0,254 pada tahun 2020, dan kembali naik menjadi 0,286 pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 0,27 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Manggarai Timur. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Manggarai Timur selama periode tersebut. Peningkatan ini juga lebih tinggi daripada peningkatan nilai Indeks Gini di Provinsi NTT (-0,026 poin) dan nasional (0,004 poin) dalam periode yang sama.

Adapun hal yang menyebabkan kondisi Indeks Gini di Kabupaten Manggarai Timur cenderung lebih baik dari Provinsi NTT dan Nasional adalah struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Sektor pertanian menyumbang sekitar 46,50 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, sektor pertanian ini sangat rentan terhadap bencana alam, perubahan iklim, fluktuasi harga, dan masalah distribusi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan bagi petani dan pekerja sektor pertanian.

Kemudian, terjadinya peningkatan dalam ketimpangan di masyarakat Manggarai Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti dalam

aspek infrastruktur dasar perekonomian yang masih harus ditingkatkan dan pada aspek kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang masih mengalami kekurangan. Adapun kekurangan yang dimaksud seperti rasio guru dengan siswa yang belum mencukupi standar yang dibutuhkan dan jumlah fasilitas kesehatan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur memiliki angka melek huruf yang cukup tinggi, yaitu sekitar 98,01 persen pada tahun 2023. Namun, kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini akhirnya menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah yang memiliki produktivitas dan kompetensi masyarakat dalam menghasilkan pendapatan yang rendah.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuan mereka menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara atau daerah, bukan pertumbuhan ekonomi (UNDP 2022; Hamzah, Risqiani, & Sofilda, 2012). Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia (suatu daerah) berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup masyarakat. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup: 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) pengetahuan (pendidikan), dan 3) standar hidup layak. Ketiga dimensi ini memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Khususnya dimensi pengetahuan, dimensi pengetahuan ini diukur melalui tingkat pendidikan yaitu menggunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) (BPS, 2022).

IPM Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 66,07. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Manggarai Timur meningkat sebesar 1,31 poin. Dengan capaian IPM tersebut maka

Kabupaten Manggarai Timur berada pada kelompok status pembangunan manusia "sedang". Nilai IPM Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun terakhir berada di bawah nilai IPM Provinsi NTT dan nasional. Perubahan indikator pengungkit memang membuat seluruh angka capaian menurun, namun angka nasional dan Provinsi NTT mampu dipulihkan dengan baik dan kembali lagi ke capaian yang baik seperti sebelum adanya perubahan indikator. Di sisi lain, Kabupaten Manggarai Timur juga sudah mampu secara perlahan memulihkan kondisi IPM-nya, meskipun masih di bawah angka nasional dan Provinsi NTT (lihat Tabel 2.46).

Tabel 2. 46 Indeks Pembangunan Manusia

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	60,85	61,37	62,2	65,05	66,07
Provinsi Nusa Tenggara Timur	65,19	65,28	65,9	68,4	69,14
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02

Sumber: BPS, 2025

2. Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,23 persen. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan yang stabil namun lambat, dari 68,04 tahun menjadi 68,49 tahun, dengan rata-rata kenaikan 0,15 per tahun. Peningkatan usia harapan hidup signifikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 72,98 tahun atau sebesar 4,92 persen, angka ini melampaui rata-rata nasional. Semakin tinggi angka harapan hidup di Kabupaten Manggarai Timur menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 47 Angka Harapan Hidup (UHH)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	68,04	68,07	68,29	68,49	72,98
Provinsi Nusa Tenggara Timur	67,01	67,15	67,47	67,77	71,57
Nasional	71,47	71,57	71,85	72,18	72,39

Sumber: BPS, 2024

b. Indeks Keluarga Sehat

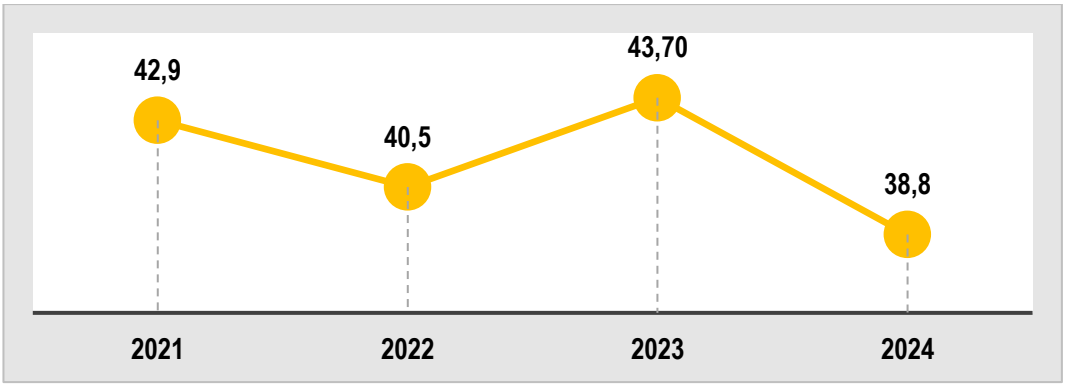
Dalam upaya untuk memantau dan meningkatkan status kesehatan keluarga di Kabupaten Manggarai Timur, Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan alat ukur yang penting. Namun, berdasarkan informasi terkini, data mengenai Indeks Keluarga Sehat (IKS) saat ini tidak tersedia. Kendala ini disebabkan oleh tidak berkembangnya aplikasi IKS sejak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan ketidakmampuan akses terhadap data IKS yang seharusnya terhimpun melalui aplikasi tersebut (Dinas kesehatan Kab. Manggarai Timur, 2025).

IKS idealnya memberikan gambaran komprehensif mengenai status kesehatan sebuah keluarga berdasarkan 12 indikator utama yang mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, hingga akses terhadap sanitasi dan air bersih (Dinas kesehatan Kab. Manggarai Timur, 2025). Ketiadaan data IKS yang terkini menjadi hambatan signifikan dalam memahami kondisi kesehatan keluarga secara menyeluruh di Kabupaten Manggarai Timur.

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, serta memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tren prevalensi stunting di Kabupaten

Manggarai Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 42,9 persen, kemudian angka ini sedikit menurun menjadi 40,5 persen pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 43,7 persen. Peningkatan ini bisa mengindikasikan adanya tantangan dalam keberlanjutan program penanganan gizi atau dampak dari faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, bencana alam, atau perubahan perilaku masyarakat. Selanjutnya tren positif terjadi pada tahun 2024, dimana prevalensi stunting menunjukkan penurunan yang cukup drastis menjadi 38,8 persen. Penurunan ini mungkin mencerminkan efektivitas dari intervensi atau program penanganan stunting yang telah digalakkan secara lebih intensif pada periode tersebut. Meskipun demikian, angka 38,8% masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target nasional dan global. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga balita di Manggarai Timur masih mengalami stunting, yang memerlukan perhatian serius dan upaya berkelanjutan.



Sumber: Bapperida Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Gambar 2. 13 Prevalensi Stunting Manggarai Timur Tahun 2021-2024 Menurut SSGI

d. Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu masalah yang masih terjadi pada Balita di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2020 sebanyak 574 balita mengalami gizi buruk di Kabupaten Manggarai Timur, kemudian menurun

secara signifikan menjadi 257 kasus pada tahun 2021, namun meningkat kembali menjadi 294 kasus pada tahun 2022, dan kembali terjadi penurunan yang signifikan dengan 213 kasus pada tahun 213 dan 74 kasus pada tahun 2024. Masalah kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Manggarai Timur terus menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten. Penyebabnya adalah pola asuh yang salah dalam keluarga, akses air minum layak yang rendah, kurangnya akses sanitasi atau jamban sehat, kemampuan ekonomi keluarga yang rendah, serta kemampuan mengelola pangan lokal untuk makan bergizi yang masih sangat rendah.

Tabel 2. 48 Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk	574	257	294	213	74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dibangun di suatu daerah. Komponen pertama pada aspek pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenis pendidikan yang dijalani.

Kondisi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 sebesar 7,96. Hal ini relevan dengan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah yang terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia yang juga sama-sama mengalami peningkatan. Dengan Rata-rata Lama Sekolah tersebut, maka dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Manggarai Timur yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7 tahun 6 bulan atau setara dengan kelas VII Sekolah

Menengah Pertama. Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka Rata-rata Lama Sekolah. Walaupun kondisi ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya pendidikan wajib selama 12 tahun bagi penduduk Manggarai Timur dan angka Rata-rata Lama Sekolah masih dibawah angka Provinsi dan Nasional.

Tabel 2. 49 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	7,08	7,35	7,42	7,7	7,96
Provinsi Nusa Tenggara Timur	7,63	7,69	7,7	7,82	8,02
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,775	8,86

Sumber: BPS, 2024

b. Harapan Lama Sekolah

Indikator kedua pada aspek pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS adalah ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Angka HLS menunjukkan peluang bagi anak usia 7 tahun ke atas untuk mendapatkan seluruh jenis pendidikan pada suatu waktu tertentu.

Kondisi harapan masyarakat dalam bersekolah ditunjukkan dari perhitungan harapan lama sekolah masyarakat. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 11,99 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata anak di Manggarai Timur diharapkan menamatkan pendidikan mereka hampir setara dengan jenjang SMA. Pada tahun 2021, HLS meningkat menjadi 12,26 tahun, kemudian menjadi 12,3 tahun pada tahun 2022, dan mencapai 12,59 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya dan keberhasilan dalam meningkatkan akses dan partisipasi

pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2024, angka Harapan Lama Sekolah telah mencapai 12,66 tahun yang artinya, di Kabupaten Manggarai Timur anak usia 7 tahun memiliki harapan menamatkan pendidikan mereka hingga kelas 12 SMA atau sederajat.

Tabel 2. 50 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	11,99	12,26	12,3	12,59	12,66
Provinsi Nusa Tenggara Timur	13,18	13,2	13,21	13,22	13,23
Nasional	12,98	13,08	13,1	13,16	13,21

Sumber: BPS, 2024

c. Angka Literasi/Numerasi

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dalam perpustakaan modern dewasa ini selain tersedia buku-buku tercetak, juga tersedia buku-buku dalam perpustakaan digital. Perpustakaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat baca dan tulis, mengenalkan teknologi informasi, sebagai akses informasi secara mandiri, dan memupuk bakat dan minat baca. Sehingga dapat berdampak pada kemampuan literasi masyarakat.

Kondisi literasi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur masih berada pada kategori rendah. Dimana indeks literasi masyarakat pada jenjang SD di tahun 2022 sebesar 44,39 persen sedangkan pada tahun 2023 sebesar 47,52 persen, dan meningkat menjadi 54,89 persen pada tahun 2024. Pada jenjang SMP tingkat literasi masyarakat hanya sebesar 27,19 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 33,22 persen pada tahun 2023, dan meningkat kembali tahun 2024 menjadi 42,7 persen. Walaupun mengalami peningkatan namun tingkat literasi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur masih sangat rendah,

sehingga masih banyak masyarakat mengalami permasalahan baca dan menulis.

Tabel 2. 51Persentase Kemampuan Literasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022-2024

Jenjang	Tahun		
	2022	2023	2024
SD	44,39	47,52	54,89
SMP	27,19	33,22	42,7

Sumber: Rapor Pendidikan. 2025

Literasi juga diiringi dengan kemampuan numerasi. Dimana kondisi numerasi Kabupaten Manggarai Timur juga serupa dengan kemampuan literasi masyarakat. Pada tahun 2022 Indeks Numerasi masyarakat sebesar 29,53 meningkat menjadi 36,75 tahun 2023 dan 49,96 tahun 2024 pada tingkat SD, sedangkan pada tingkat SMP di tahun 2022 sebesar 20,62, meningkat menjadi 23,03 tahun 2023 dan 38,96 tahun 2024. Kondisi ini masih berada pada kategori rendah.

Tabel 2. 52 Persentase Numerasi Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022-2024

Jenjang	Tahun		
	2022	2023	2024
SD	29,53	36,75	49,96
SMP	20,62	23,02	38,96

Sumber: Rapor Pendidikan. 2025

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur meskipun baru tersedia data untuk tahun 2023 dan 2024, namun dapat dilihat bahwa literasi masyarakat mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 0,101 meningkat menjadi 0,104 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan meskipun masih dalam skala sangat kecil. Angka literasi masyarakat

ini masih jauh dari ideal (standar nasional >0,5), yang menunjukkan bahwa pembangunan literasi masih menjadi tantangan besar.

Terkait urusan perpustakaan sebagai pendukung peningkatan literasi masyarakat, ditunjukkan dari Ketersediaan Tenaga Perpustakaan dengan nilai 0,148 pada tahun 2024, meningkat dari nilai 0,140 tahun 2023, yang menunjukkan upaya Pemerintah Daerah dalam penambahan SDM perpustakaan. Jumlah kunjungan ke perpustakaan meningkat dari 0,029 tahun 2023 menjadi 0,040 tahun 2024, namun angka ini masih sangat rendah. Hal ini mencerminkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca. Perpustakaan sesuai Standar Nasional tercatat dengan nilai 0, angka ini mengindikasikan bahwa belum ada satupun perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) literasi masih sangat rendah yaitu sebesar 0,005 tahun 2023 dan 0,001 tahun 2024. Ini menunjukkan program literasi belum menyentuh masyarakat secara masif. Kemudian Anggota Perpustakaan juga masih sangat rendah pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 0,012.

Peningkatan literasi dilakukan dengan kegiatan pemasyarakatan gemar membaca, kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial (menjadikan informasi menjadi potensi untuk mengembangkan potensi masyarakat/literasi perpustakaan). Survei dari Perpusnas tahun 2024 sudah memiliki nilai 60 perpustakaan yang dibina sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan).

Tabel 2. 53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	NA	0,101	0,104
1. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	NA	NA	NA	0,140	0,148
2. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	NA	NA	NA	0,029	0,040
3. Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	NA	NA	NA	0	0

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
4. Keterlibatan Masyarakat dalam KIE	NA	NA	NA	0,005	0,001
5. Anggota Perpustakaan	NA	NA	NA	0,012	0,012

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Manggarai Timur, 2025

e. Indeks Literasi Digital

Dalam era digital yang semakin pesat, pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk media sosial, secara cerdas, bijak, aman, dan bertanggung jawab menjadi krusial. Konsep ini dikenal sebagai literasi digital. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Manggarai Timur belum melakukan survei secara khusus untuk mengukur tingkat pemanfaatan dan penggunaan media sosial di kalangan masyarakatnya (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025). Akibatnya, Indeks Literasi Digital (ILD) untuk Kabupaten Manggarai Timur saat ini belum tersedia.

Ketiadaan data ILD yang spesifik menjadi tantangan dalam memahami lanskap literasi digital di wilayah ini. Tanpa pengukuran yang sistematis, sulit untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi digital, kemampuan mereka dalam mengevaluasi konten, kesadaran akan keamanan siber, serta etika dan norma dalam berinteraksi di ruang digital, khususnya di platform media sosial. Meskipun belum ada survei formal, dapat diasumsikan bahwa di era digitalisasi saat ini masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, terutama generasi muda, juga aktif menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, berinteraksi sosial, dan berbagai keperluan lainnya. Namun, tanpa data yang terukur, sulit untuk mengetahui tingkat literasi digital mereka, termasuk potensi risiko yang mungkin dihadapi terkait penyebaran hoaks, cyberbullying, penipuan online, dan isu-isu privasi.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyasar kepada masyarakat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS sendiri merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.

Dalam upaya mengurangi PMKS pemerintah daerah berupaya memberi bantuan dan menangani masalah kesejahteraan sosial, tergambar persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial ini mengalami kenaikan yang signifikan di awal namun menurun hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 sebesar 30,74 persen PMKS yang memperoleh bantuan sosial, naik menjadi 83,55 persen tahun 2021, kemudian tahun 2022 menurun menjadi 83,31 dan tahun 2023 sebesar 80,67 sampai pada tahun 2024 sebesar 80,67 persen. Sedangkan Persentase PMKS yang tertangani mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 2,08 persen PMKS yang tertangani, kemudian terjadi kenaikan yang signifikan tahun 2021 sebesar 42,22 persen dan tahun 2022 sebesar 72,21 persen, tahun 2023 menurun menjadi 63,38 persen dan naik kembali tahun 2024 menjadi 64,34 persen. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah daerah dalam upaya menurunkan PMKS di Kabupaten Manggarai Timur.

Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) atau jumlah PPKS yang dientaskan mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2020 turun signifikan sebesar 120 persen, kemudian tahun 2021 menjadi 40,10 persen dan tahun 2022 sebesar 40,20 persen, penurunan terkecil terjadi

tahun 2023 hanya sebesar 11,08 persen, dan pada tahun 2024 penurunan PPKS sebesar 46,27 persen. Untuk persentase kepemilikan KIS mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023, dimulai pada tahun 2020 sebesar 70,99 persen, naik menjadi 77,77 persen tahun 2021, 95,25 persen tahun 2022 dan 98 persen tahun 2023, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 97,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur yang relatif sukses. Persentase Keluarga Penerima PKH pada tahun 2020 sebesar 65,39 persen, naik menjadi 69,03 persen tahun 2021, kemudian menurun di tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 51,79 persen dan 49 persen, naik kembali menjadi 52,04 persen pada tahun 2024. Persentase Keluarga Penerima BPNT mengalami angka yang fluktuatif dengan signifikan, dimana angka awal tahun 2020 yaitu sebesar 9,89 persen turun menjadi 6,37 persen tahun 2021, kemudian naik dengan signifikan ke angka 55,53 persen tahun 2022 dan turun kembali dengan signifikan tahun 2023 sebesar 20 persen dan tahun 2024 sebesar 5,92 persen.

Tabel 2. 54 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30,74	83,55	83,31	80,68	80,67
2.	Persentase PMKS yang tertangani	2,08	42,22	72,21	63,38	64,34
3.	Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) (Jumlah PPKS yang dientaskan)	120	40,10	40,20	11,08	46,27
4.	Persentase Kepemilikan KIS	70,99	77,77	95,25	98	97,41
5.	Persentase Keluarga Penerima PKH	65,39	69,03	51,79	49	52,04
6.	Persentase Keluarga Penerima BPNT	9,89	6,37	55,53	20	5,92

Sumber: Dinas Sosial Kab. Manggarai Timur, 2025

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan tingkat toleransi dan keharmonisan antarumat beragamanya. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur relasi sosial lintas keyakinan, menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Berdasarkan data dari Balitbangdiklat Kementerian Agama (2025), IKUB NTT meningkat secara konsisten dari angka 74,74 pada tahun 2021 menjadi 84,25 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan penguatan kohesi sosial, stabilitas hubungan antarumat beragama, serta keberhasilan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara harmoni keberagaman.

Tabel 2. 55 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	74.74	83.93	83.93	84.25

Sumber: Balitbangdiklat Kementrian Agama, 2025

Peningkatan indeks ini dapat dikaji lebih mendalam dengan melihat situasi keagamaan di Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu kabupaten di NTT yang memiliki struktur pemeluk agama yang cukup homogen. Berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi NTT (2024), mayoritas masyarakat Kabupaten Manggarai Timur secara konsisten memeluk agama Katolik, dengan persentase mencapai 92,8 persen pada tahun 2023. Stabilitas ini selaras dengan data tempat ibadah yang didominasi oleh Gereja Katolik.

Tabel 2. 56 Persentase Pemeluk Agama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Pemeluk Agama						
	Islam	Kristen Katolik	Kristen Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	6,82	92,82	0,33	0,03	-	-	100
2022	6,84	92,81	0,32	0,03	-	-	100
2021	6,84	92,87	0,26	0,03	-	-	100

Tahun	Persentase Pemeluk Agama						
	Islam	Kristen Katolik	Kristen Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
2020	7,59	91,99	0,38	0,03	-	-	100

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 2024

Terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Manggarai Timur secara konsisten menganut agama Kristen Katolik. Pada tahun 2023, persentase pemeluk Katolik tercatat sebesar 92,82 persen, yang menunjukkan kestabilan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 92,81 persen (2022), 92,87 persen (2021), dan 91,99 persen (2020). Stabilitas ini menunjukkan bahwa agama Katolik menjadi kepercayaan utama yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Pemeluk agama Islam menempati posisi kedua dengan tren menurun dari 7,59 persen pada tahun 2020 menjadi 6,82 persen pada tahun 2023. Meski demikian, Islam tetap menjadi agama dengan penganut terbanyak kedua di wilayah ini. Adapun Kristen Protestan menunjukkan fluktuasi yang cukup ringan, dari 0,38 persen (2020), turun ke 0,26 persen (2021), dan naik kembali menjadi 0,33 persen (2023). Sementara itu, pemeluk Hindu dan Budha tetap berada pada angka yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,03 persen setiap tahunnya, tanpa menunjukkan perubahan. Tidak ada data tercatat untuk kategori "lainnya" selama periode tersebut, menandakan homogenitas yang tinggi dalam struktur keagamaan lokal.

Tabel 2. 57 Jumlah Tempat Ibadah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah (Unit)			
	2020	2021	2022	2023
Masjid	10	35	36	36
Gereja Protestan	8	7	5	6
Gereja Katolik	234	350	350	350
Pura	-	-	-	-
Vihara	-	-	-	-

Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah (Unit)			
	2020	2021	2022	2023
Klenteng	-	-	-	-
Jumlah	**252**	**392**	**391**	**392**

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 2024

Perubahan dalam jumlah tempat ibadah menunjukkan upaya nyata dari pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan ruang-ruang ibadah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan umat beragama. Pada tahun 2020, total jumlah tempat ibadah tercatat sebanyak 252 unit. Angka ini mengalami lonjakan drastis menjadi 392 unit pada tahun 2021, yang menandai fase pengembangan infrastruktur keagamaan paling signifikan dalam periode tersebut. Meskipun sempat turun sedikit menjadi 391 unit di tahun 2022, jumlahnya kembali naik menjadi 392 unit pada 2023, menyamai angka tertinggi sebelumnya.

Jenis tempat ibadah yang paling dominan adalah Gereja Katolik, dengan jumlah 234 unit pada 2020 yang kemudian melonjak menjadi 350 unit pada 2021, dan jumlah ini tetap stabil hingga 2023. Tren ini sejalan dengan dominasi persentase pemeluk Katolik dalam komposisi penduduk, mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan fasilitas ibadah. Jumlah masjid juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya 10 unit pada tahun 2020 menjadi 35 unit di tahun 2021, lalu naik sedikit menjadi 36 unit dan bertahan di angka tersebut selama dua tahun berikutnya. Pertumbuhan jumlah masjid ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap keberadaan minoritas Muslim dan upaya untuk meningkatkan inklusivitas dalam pembangunan keagamaan. Sementara itu, Gereja Protestan menunjukkan penurunan dari 8 unit pada 2020 menjadi 5 unit pada 2022, sebelum naik kembali menjadi 6 unit pada 2023. Adanya fluktuasi ini bisa jadi mencerminkan dinamika internal komunitas Protestan atau perubahan dalam struktur kepemilikan dan penggunaan tempat ibadah. Adapun Pura, Vihara, dan Klenteng tidak tercatat selama periode 2020–2023. Hal ini selaras dengan data pemeluk agama Hindu dan Budha yang sangat kecil secara persentase,

serta tidak adanya data pemeluk agama Konghucu maupun kepercayaan lainnya.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini belum memiliki perhitungan resmi Indeks Perlindungan Anak (IPA), sehingga belum dapat mengukur capaian perlindungan anak secara komprehensif. Ketiadaan data historis dan metodologi penghitungan IPA yang spesifik untuk tingkat kabupaten menjadi tantangan dalam memetakan secara utuh kondisi perlindungan anak di wilayah ini.

Data yang tersedia saat ini masih terbatas, dengan catatan terdapat 14 kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani oleh pihak berwenang di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 (DPPKBPPPA, 2025). Angka ini, meskipun memberikan gambaran awal mengenai adanya permasalahan kekerasan terhadap anak, kemungkinan besar belum mencerminkan keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor seperti keengganan korban atau keluarga untuk melapor, keterbatasan akses informasi, dan kurang optimalnya sistem pelaporan dapat menyebabkan angka kasus yang terdeteksi menjadi lebih rendah dari realitas yang sebenarnya.

Mengingat keterbatasan data IPA secara langsung, maka untuk penyusunan rencana pembangunan dan sebagai langkah awal pemahaman, Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) akan digunakan sebagai proksi indikator untuk menggambarkan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Timur. Skor KLA merupakan penilaian terhadap berbagai indikator yang mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan hak-hak anak, termasuk aspek perlindungan. Meskipun Skor KLA memiliki fokus yang lebih luas dari sekadar perlindungan, elemen-elemen di dalamnya seperti kelembagaan perlindungan anak, klaster kesehatan dan kesejahteraan,

klaster pendidikan, klaster pengasuhan alternatif, serta partisipasi anak memiliki korelasi yang signifikan dengan kondisi perlindungan anak.

Berdasarkan data dari DPPKBPPPA (2025), Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Manggarai Timur mencatatkan skor KLA yang relatif rendah, yaitu 60, kemudian terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2022 menjadi 286 dan terus meningkat di tahun 2023 dengan skor KLA mencapai 365. Pada tahun 2024, skor KLA Kabupaten Manggarai Timur kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 563,4, ini merupakan hasil perhitungan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (DPPKBPPPA, 2025). Skor ini merupakan hasil penilaian terhadap berbagai indikator yang mencerminkan pemenuhan hak-hak anak dalam lima klaster utama KLA: Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus. Hasil skor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan berbagai upaya dan memiliki beberapa kebijakan serta program yang mendukung terwujudnya KLA. Namun, skor ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek pemenuhan hak anak. Evaluasi mandiri ini menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.

Lebih lanjut, pada bulan Juni tahun 2025, Kabupaten Manggarai Timur dijadwalkan untuk mengikuti evaluasi KLA secara eksternal. Evaluasi ini akan dilakukan oleh tim independen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) atau tim yang ditunjuk. Hasil dari evaluasi eksternal ini akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan objektif mengenai tingkat kelayakan Kabupaten Manggarai Timur sebagai KLA.

Tabel 2. 58 Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	60	60	286	365	563,4

Sumber: DPPKBPPPA, 2025

b. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki data resmi terkait Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) per tahun 2025, sebagaimana disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA).

Ketiadaan data IPKK secara langsung menimbulkan tantangan dalam memetakan secara akurat kondisi kualitas keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. IPKK idealnya mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi kualitas hidup keluarga, seperti ketahanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial budaya, serta ketahanan psikologis dan harmonisasi keluarga. Tanpa data yang terstruktur, sulit untuk mengidentifikasi area prioritas intervensi dan mengukur dampak dari berbagai program pemberdayaan keluarga.

Menyikapi keterbatasan data IPKK, maka untuk penyusunan rencana pembangunan daerah dan sebagai langkah awal dalam memahami dinamika kualitas keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) akan digunakan sebagai proksi indikator. iBangga merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan untuk mengevaluasi delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta lingkungan. Meskipun iBangga memiliki fokus pada fungsi-fungsi keluarga, dimensi-dimensi yang diukurnya memiliki korelasi yang kuat dengan konsep kualitas keluarga yang lebih luas. iBangga mengukur kualitas keluarga berdasarkan tiga dimensi utama (Peraturan BKKBN RI Nomor 3 Tahun 2022):

1. Ketenteraman (kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga).
2. Kemandirian (pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online/daring).
3. Kebahagiaan (interaksi keluarga, dan interaksi sosial)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, skor iBangga Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 46,59. Skor ini menunjukkan tingkat pembangunan keluarga yang perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di angka 56,8 pada tahun yang sama, serta rata-rata nasional yang mencapai 64,3. Selanjutnya, iBangga Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 skor meningkat menjadi 52,68, berlanjut pada tahun 2023 dengan skor mencapai 57,17 mendekati rata-rata NTT pada tahun 2023 (58,1), terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana iBangga Kabupaten Manggarai Timur mencapai skor 59,4. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam berbagai fungsi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur, seperti fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta lingkungan.

Tabel 2.59
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tabel 2. 59 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	NA	46,59	52,68	57,17	59,4

Provinsi Nusa Tenggara Timur	55,2	56,8	57,5	58,1	NA
Nasional	63,5	64,3	65	65,7	NA

Sumber: BPS, BKKBN, DPPKBPPPA, 2025

c. Indeks Ketimpangan Gender

Dalam upaya untuk memahami dan mengatasi isu ketimpangan gender di Kabupaten Manggarai Timur, ketersediaan data yang spesifik dan terukur menjadi fondasi penting. Namun, berdasarkan informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Timur (DPPKBPPPA, 2025), data mengenai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tingkat kabupaten saat ini tidak tersedia. Untuk menganalisis kesenjangan gender, digunakan proksi data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di masyarakat adalah dengan memfokuskan pembangunan pada aspek gender. Pembangunan antara laki-laki dan perempuan tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi Kesehatan (Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan), pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah laki-laki dan perempuan) dan ekonomi (perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan). Berdasarkan data BPS Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2023, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2018 senilai 90,80 sedangkan tahun 2022 menjadi 98,60 dan tahun 2023 menjadi 91,51 persen. IPG Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, yang menimbulkan nilai IPG Kabupaten Manggarai Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTT dan

nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Manggarai Timur. Dengan capaian yang belum mencapai 100 persen menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antargender di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 60 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	90,5	90,52	98,6	91,41	91,97
Provinsi Nusa Tenggara Timur	92,73	92,63	92,96	93,98	93,77
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perempuan di Kabupaten Manggarai Timur yang belum mandiri juga dipengaruhi oleh rendahnya pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Hasil DKT menunjukkan pemberdayaan yang rendah disebabkan oleh rendahnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Manggarai Timur, baik dari sisi pemahaman atas politik hingga keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Selain itu perempuan yang tidak diberdayakan juga mengakibatkan untuk tidak dapat memiliki keandalan untuk dapat mandiri secara ekonomi dan berpenghasilan sebagai pekerja profesional (DKT, 29 Juli 2024).

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Manggarai Timur meskipun berfluktuatif namun masih rendah. Dari tahun 2020-2024 angka IDG Kabupaten Manggarai Timur sebesar 51,91 persen (2020) kemudian sedikit menurun menjadi 51,16 persen (2021), meningkat menjadi 53,02 persen di tahun 2022, terus meningkat menjadi 53,62 persen (2023), dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 53,16 persen. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IDG provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 78,26 dan 77,62 persen. Nilai IDG Kabupaten Manggarai Timur masih jauh di bawah.

Tabel 2. 61 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	51,91	51,16	53,02	53,62	53,16
Provinsi Nusa Tenggara Timur	74,53	74,53	75,22	75,10	78,26
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: BPS, 2025

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Dalam upaya untuk memahami dan mengukur tingkat pembangunan pemuda di Kabupaten Manggarai Timur, ketersediaan data yang komprehensif dan terstruktur menjadi krusial. Namun, hingga saat ini, data spesifik mengenai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk tingkat kabupaten tidak tersedia. Ketiadaan data IPP secara langsung menjadi kendala dalam memetakan secara utuh kondisi pemuda di Kabupaten Manggarai Timur. IPP idealnya mencakup berbagai dimensi penting terkait perkembangan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta perkawinan dan keluarga. Tanpa data yang terukur pada dimensi-dimensi ini, sulit untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan spesifik pemuda di wilayah ini.

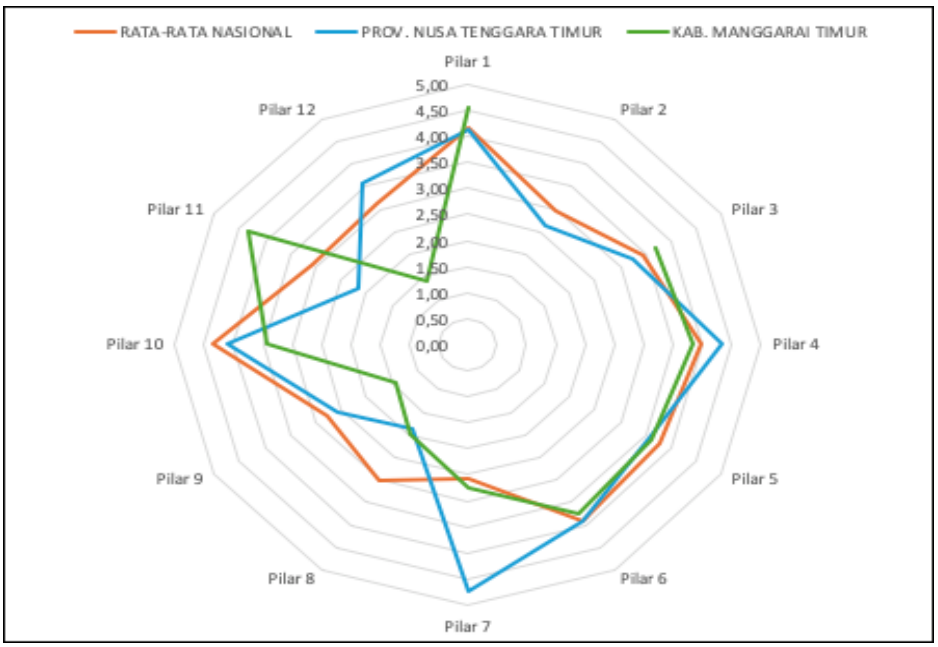
Menyikapi keterbatasan data IPP, maka untuk memberikan gambaran awal dan sebagai dasar analisis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, Persentase pemuda yang berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan akan digunakan sebagai proksi indikator. Penggunaan proksi indikator ini didasarkan pada asumsi bahwa tingginya tingkat prestasi dan partisipasi aktif pemuda berkorelasi positif dengan tingkat pembangunan pemuda secara keseluruhan. Indikator proksi ini berfokus pada dua aspek penting dari pembangunan pemuda, yaitu Persentase pemuda yang berprestasi yang menggambarkan sejauh mana potensi dan bakat pemuda di berbagai bidang (akademik, olahraga, seni, kewirausahaan, dll.) dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan diakui. Tingginya persentase pemuda

berprestasi dapat menjadi indikasi lingkungan yang mendukung pengembangan diri dan pencapaian potensi pemuda. Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan untuk mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan di tingkat lokal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Keterlibatan aktif pemuda menunjukkan adanya ruang partisipasi dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai agen perubahan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Indeks Daya Saing Daerah

Kabupaten Manggarai Timur, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi berbagai tantangan struktural dalam meningkatkan daya saing daerahnya. Dari hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan skor N/A yang artinya adanya skor di level indikator, pilar, dan indeks tidak dapat dihitung apabila terdapat data yang kosong.



Keterangan

Pilar 1 : Institusi **Pilar 2 : Infrastruktur** **Pilar 3 : Adopsi TIK** **Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro**	**Pilar 5 : Kesehatan** **Pilar 6 : Keterampilan** **Pilar 7 : pasar produk** **Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja**	**Pilar 9 : Sistem Keuangan** **Pilar 10 : Ukuran Pasar** **Pilar 11 : Dinamisme Bisnis** **Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi**

Gambar 2. 14 Perbandingan Pilar IDSD 2024 Nasional, Provinsi NTT dan Manggarai Timur

Dari hasil pemetaan Indeks Daya Saing tahun 2024 oleh BRIN berdasarkan 12 pilar, pada pilar 2: Infrastruktur mendapatkan skor N/A dikarenakan adanya salah satu indikator yang tidak dapat dihitung karena datannya kosong. Berikutnya terdapat 2 pilar yang yang berada diatas rata-rata nasional dan Provinsi NTT yaitu pilar 1: Institusi dengan skor 4,56 dan Pilar 11: Dinamisme Bisnis dengan skor 4,33. Sementara skor yang lebih tinggi dari Provinsi terdapat 2 pilar yaitu pilar 3: Adoksi TIK (3,69) dan Pilar 5: Kesehatan (3,63), sedangkan indeks pilar yang berada dibawah rata-rata nasional dan provinsi yaitu pada pilar 4 Stabilitas ekonomi Makro (3,84), pilar 6; Keterampilan (3,75), pilar 7: Pasar Produk (2,76), pilar 8: Pasar Tenaga Kerja (1,97), Pilar 9 Sistem Keuangan (1,44), pilar 10: Ukuran Pasar (3,44) dan pilar 12: Kapabilitas Inovasi (1,41).

Dari gambaran di atas terdapat 3 pilar yang menjadi fokus berada dibawah skor 2,5 yang diasumsikan sebagai nilai tengah atau kategori cukup yaitu pilar 8: Pasar Tenaga Kerja (1,97), Pilar 9 Sistem Keuangan (1,44), dan pilar 12: Kapabilitas Inovasi (1,41).

Bila dilihat lebih dalam pada indikator dari tiap pilar yang lemah, pada pilar 8 Ukuran pasar tenaga kerja terdapat 3 indikator seperti digambarkan pada tabel 2.62 dibawah ini.

Tabel 2. 62 Indikator IDSD 2024 pada Pilar Pasar Tenaga Kerja

Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	Upah Pekerja	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki	Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja
1,07	1,71	3,13	1,97

Sumber: IDSD 2024 BRIN

Pada tabel 2.62 diatas dapat tergambarkan bahwa indikator yang memiliki skor yang masih rendah yaitu indikator Kebijakan Pasar Tenaga kerja Aktf (1,07) dan indikator Upah Pekerja (1,71).

Untuk pilar 9 sistem keuangan terdapat 3 indikator yang menjadi pendukung dari pilar seperti digambarkan pada tabel 2.63 dibawah ini.

Tabel 2. 63 Indikator IDSD 2024 pada Pilar Sistem Keuangan

Persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku (Persen)	Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB	Indeks Pilar Sistem Keuangan
2,22	1,83	0,27	1,44

Sumber: IDSD 2024 BRIN

Dari tabel diatas indikator yang memiliki yang masih berada skor 2,5, ketiga indikator masih lemah yaitu Persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku (Persen) (2,22), Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah) (1,83) dan Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB (0,27). Selanjutnya untuk pilar 12 Kapabilitas Inovasi, terdapat 7 indikator yang dilihat pada pilar tersebut seperti ditampilkan pada tabel 2.64 dibawah ini.

Tabel 2. 64 Indikator IDSD 2024 pada Pilar Kapabilitas Inovasi

Keanekaragaman Tenaga Kerja	Pengembangan Klaster	Publikasi Ilmiah	Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)	Belanja Riset	Indeks Keunggulan Lembaga Riset	Aplikasi Merek Dagang	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi
4,77	4,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,41

Sumber: IDSD 2024 BRIN

Tabel 2.64 menunjukkan terdapat 2 indikator yang memiliki skor yang baik yaitu indikator Keanekaragaman Tenaga Kerja dengan skor 4,77, dan indikator Pengembangan Klaster, sementara 5 indikator mendapatkan skor yang lemah yaitu indikator Publikasi Ilmiah (0,00), indikator Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI) (0,00), Indikator Belanja Riset (1,12), indikator Indeks Keunggulan Lembaga Riset (0,00) dan indikator Aplikasi Merek Dagang (0,00).

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan/Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu kabupaten, provinsi, atau negara. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan senilai 40 persen artinya dari 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia non-produktif. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Manggarai Timur mengalami angka rasio yang fluktuatif sejak tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi 39,44 persen, kemudian angka rasio naik menjadi 53,48 persen tahun 2022, kembali menurun tahun 2023 dan 2024 sebesar 53,20 persen dan 53,07 persen.

Tabel 2.62
Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Tabel 2. 65 Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Thn	NA	NA	85.696	87.497	88.326
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	NA	NA	12.130	13.523	14.363
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 & 2)	NA	NA	97.826	100.980	102.689
4	Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64	196.862	199.314	182.906	189.810	193.485
5	Rasio Ketergantungan (%)	40,00	39,44	53,48	53,20	53,07

Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka, 2020-2025

2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merujuk pada proporsi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berasal dari sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian suatu wilayah. Pada poin ini akan menampilkan perbandingan Rasio PDRB Industri pengolahan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional guna melihat pergerakan pertumbuhan Rasio PDRB Industri Pengolahan.

Tabel 2. 66 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	0,58	0,54	0,54	0,55	0,56
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,28	1,18	1,21	1,31	1,4
Nasional	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.63 dapat dipahami bahwa Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan setiap tahun setelah tahun 2020 penurunan dari 0,58 persen menjadi 0,54 persen mungkin terjadi karena adanya masa pemulihan pasca Covid 19. Pada tahun 2021 dan 2022 tercatat Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Timur 0,54 persen, kemudian naik pada tahun 2023 menjadi 0,55 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,56. Meskipun kenaikannya relatif kecil sekitar 0,51 persen akan tetapi hal ini dapat memberikan peluang bahwasanya Kabupaten Manggarai Timur memiliki kemungkinan untuk terus meningkatkan angka Rasio PDRB Industri Pengolahannya.

Namun, dari data tersebut juga dapat ditarik pemahaman bahwa Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Timur masih jauh di bawah rata-rata Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Kemudian, pertumbuhan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Timur lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan

Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Pada periode 2021-2024, Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Manggarai Timur tumbuh sebesar 3,70 persen, sedangkan Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi NTT tumbuh sebesar 18,64 persen. Ini berarti bahwa Kabupaten Manggarai Timur belum mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah lainnya dalam hal Rasio PDRB Industri Pengolahan.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan dan Minum menunjukkan perbedaan mencolok antara tingkat Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan tingkat Nasional. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2.64 sebagai berikut:

Tabel 2. 67 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	0,12	0,1	0,1	0,11	0,11
Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,56	0,55	0,62	0,66	0,71
Nasional	2,55	2,43	2,41	2,52	2,64

Sumber: BPS, 2025

Dari data di atas menunjukan pada tingkat nasional, sektor Akomodasi, Makan dan Minum secara konsisten memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, dengan rasio yang bergerak dari 2,55 persen pada tahun 2020 menjadi 2,64 persen pada tahun 2024. Walaupun sempat mengalami sedikit penurunan pada 2021 dan 2022 (masing-masing 2,43 persen dan 2,41 persen), sektor ini kembali meningkat pada 2023 dan 2024, mencerminkan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan kebangkitan sektor pariwisata serta jasa pelayanan makanan.

Sementara itu, di Provinsi NTT, rasio sektor Akomodasi, Makan dan Minum juga menunjukkan tren meningkat dari 0,56 persen pada 2020 menjadi

0,71 persen pada 2024. Ini menunjukkan bahwa sektor ini mulai berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian provinsi, meskipun masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kenaikan yang stabil ini bisa menjadi indikasi bahwa sektor pariwisata dan konsumsi lokal di NTT mulai tumbuh, namun belum sepenuhnya optimal dibandingkan skala nasional.

Sebaliknya, di Kabupaten Manggarai Timur, kontribusi sektor Akomodasi, Makan dan Minum terhadap PDRB relatif stagnan dan sangat rendah. Rasio sektor ini hanya bergerak di kisaran 0,10 hingga 0,11 persen selama lima tahun, tanpa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi, makan dan minum belum menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan Provinsi NTT, kontribusi sektor Akomodasi, Makan dan Minum di Kabupaten Manggarai Timur hanya sekitar 15 persen dari rasio provinsi tersebut. Sementara jika dibandingkan dengan tingkat nasional, kontribusinya bahkan hanya sekitar 4 persen hingga 5 persen dari rasio nasional.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Manggarai Timur masih memiliki potensi besar yang belum tergarap dalam sektor akomodasi, makan dan minum. Dibutuhkan strategi pengembangan yang lebih terfokus, terutama mengingat tren positif yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional. Rendahnya rasio ini juga bisa menjadi indikator kurang berkembangnya sektor pariwisata, infrastruktur pendukung, atau tingkat konsumsi masyarakat lokal dalam sektor terkait.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan kreativitas, ide, dan pengetahuan sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi melalui produk dan layanan yang inovatif dan bernilai seni atau budaya. Secara lebih rinci, ekonomi kreatif melibatkan industri yang mengandalkan keterampilan khusus dan bakat individu dalam bidang seperti seni, desain, musik, film, mode, arsitektur, kerajinan, dan

teknologi, yang menghasilkan produk atau jasa dengan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan produk konvensional.

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Manggarai Timur relatif belum menjadi sektor utama yang dominan dalam perekonomian daerah, meskipun ada upaya pengembangan melalui industri kreatif seperti tenun songke yang berkontribusi pada pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu data proporsi ekonomi kreatif di Manggarai Timur belum tersedia.

d. Rasio Kewirausahaan

Data rasio kewirausahaan Manggarai Timur belum tersedia secara eksplisit dalam sumber yang ada, baik di BPS maupun pada perangkat daerah yang terkait. Data ini setidaknya dapat didekati dengan usaha industri mikro dan kecil. Pada tahun 2021-2022, Manggarai Timur memiliki sekitar 3.250 perusahaan industri mikro dan kecil.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Manggarai Timur termasuk salah satu daerah dengan jumlah perusahaan mikro dan kecil yang cukup signifikan, misalnya dibandingkan dengan Sabu Raijua yang memiliki 1.282 perusahaan, dan kabupaten lain yang jumlahnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan tingkat kewirausahaan di Manggarai Timur relatif lebih tinggi dibanding beberapa kabupaten lain di NTT.

Selain itu, keberadaan koperasi yang aktif dan berkembang pesat di Manggarai Timur juga menjadi indikator kuat dari kewirausahaan yang tumbuh di daerah ini. Pada tahun 2016, tercatat 88 koperasi aktif yang tersebar di sembilan kecamatan dengan modal mencapai 178 miliar rupiah dan ribuan anggota. Pada tahun 2024 tercatat omset per koperasi aktif sebesar Rp. 199.332 Juta. Koperasi ini berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan kewirausahaan.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja sebagai faktor produksi mengacu pada jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan produksi di berbagai sektor ekonomi. Namun, rasio lapangan kerja terhadap jumlah penduduk belum dapat dijadikan kriteria untuk mengukur keberhasilan isu ketenagakerjaan. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang melakukan investasi pada kegiatan ekonomi, kualitas angkatan kerja juga akan memengaruhi output.

Salah satu indikator struktur angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator betapa mudahnya angkatan kerja mendapatkan pekerjaan. Angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa lebih sedikit kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja, begitu pula sebaliknya.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2020 sebanyak 133.3276 meningkat menjadi 163,333 tahun 2021 dan 163.357 tahun 2022, kemudian terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 151.641, dan meningkat kembali sebesar 163.892 pada tahun 2024. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) di Kabupaten Manggarai Timur diketahui juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 TPAK sebesar 79,43 persen meningkat menjadi 81,95 (2021) dan 82,22 (2022), mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 76,52, dan mengalami peningkatan sebesar 79,29 pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya terjadi perubahan pada jumlah penduduk angkatan kerja beriringan dengan partisipasi angkatan kerja.

Tabel 2. 68 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkatan Kerja	133.276	163,333	163.357	151.641	163.892
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79,43	81,95	82,22	76,52	79,29

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur, 2025

f. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan. Penilaian indeks inovasi ini tidak hanya menyoroti banyaknya jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi juga menilai kualitas dan tahapan implementasi inovasi tersebut. Semakin banyak inovasi yang berhasil diterapkan secara nyata, semakin tinggi pula nilai indeks yang diperoleh, yang mencerminkan kematangan dan efektivitas upaya inovatif di suatu daerah.

Tabel 2. 69 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	N/A	48,02	5,4	7,5	11,8
Kategori	N/A	Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Di Kabupaten Manggarai Timur, pengukuran Indeks Inovasi Daerah secara konsisten tercatat sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut, indeks berada di angka 48,02 dan dikategorikan sebagai inovatif. Namun, skor tersebut mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya: hanya 5,4 pada tahun 2022, 7,5 pada 2023, dan 11,8 pada 2024, yang secara berurutan mengklasifikasikan daerah ini dalam kategori kurang inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas inovasi belum mampu menembus tahap

implementasi, sehingga berdampak pada rendahnya skor indeks inovasi secara keseluruhan.

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau Indonesia adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana perekonomian suatu wilayah berkembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Indeks ini mencerminkan upaya transisi menuju model ekonomi yang rendah karbon, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Melalui pengukuran aspek-aspek seperti emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, laju deforestasi, dan inovasi teknologi hijau, IEHI bertujuan untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah selaras dengan perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Namun, hingga saat ini Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki pengukuran resmi terkait Indeks Ekonomi Hijau. Secara umum, struktur ekonomi daerah ini masih didominasi oleh sistem subsistem, dengan ketergantungan tinggi pada sektor primer. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 46,04 persen, sementara sektor industri pengolahan masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,56 persen. Mata pencaharian masyarakat Manggarai Timur sebagian besar adalah petani dengan sistem lahan perkebunan "Taman Surga" dimana dalam satu lahan diisi oleh berbagai macam jenis tumbuhan seperti cokelat, kopi, bawang merah dll. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi dan diversifikasi ekonomi masih belum berkembang secara signifikan.

Dari sisi lingkungan, tingkat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia di wilayah ini cenderung rendah. Kerusakan lingkungan lebih sering dipicu oleh faktor alam, seperti tanah longsor, yang kerap terjadi di wilayah-wilayah perbukitan. Selain itu, Manggarai Timur masih memiliki kawasan

hutan yang cukup luas, yang merupakan potensi ekologis penting dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau di masa depan.

b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada konservasi ekosistem laut. Indeks ini menggabungkan dimensi produktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan perlindungan terhadap sumber daya pesisir dan laut. Melalui IEBI, pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya dinilai dari kontribusi ekonominya, tetapi juga dari aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Akan tetapi hingga saat ini, Manggarai Timur belum memiliki pengukuran resmi terkait Indeks Ekonomi Biru. Padahal, indeks ini penting untuk menilai sejauh mana wilayah pesisir dan sumber daya kelautan dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut. Ketiadaan indeks ini di Manggarai Timur menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan belum menjadi fokus utama dalam perencanaan ekonomi daerah dalam kepemimpinan sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat struktur ekonomi Manggarai Timur masih sangat bergantung pada sektor pertanian darat dan kehutanan, sementara pemanfaatan potensi laut dan pesisir masih relatif terbatas.

Selain itu, infrastruktur data kelautan dan perikanan berkelanjutan di daerah ini juga masih minim. Belum tersedia sistem pemantauan yang komprehensif mengenai kegiatan penangkapan ikan, ekosistem pesisir, atau dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi di wilayah laut. Di sisi lain, rendahnya investasi dan inovasi teknologi dalam sektor kelautan juga menjadi penghambat dalam mengembangkan ekonomi biru yang berbasis pada konservasi, efisiensi, dan nilai tambah.

Belum adanya Indeks Ekonomi Biru di Manggarai Timur mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap sektor pesisir sebagai bagian dari strategi

pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan laut tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai pilar pertumbuhan ekonomi masa depan, perlu dipadukan dengan perlindungan lingkungan agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga.

c. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, air, dan biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi daerah. Pemanfaatan EBT dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, mendorong efisiensi energi, serta mendukung target penurunan emisi karbon sebagaimana selaras dengan komitmen pembangunan rendah karbon nasional. Akan tetapi, belum dilakukan perhitungan terkait aspek ini di Kabupaten Manggarai Timur.

4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan yang inklusif, efisien, dan adaptif di era digital. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tren perkembangan transformasi digital menunjukkan arah yang positif dalam dua tahun terakhir. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek infrastruktur, aksesibilitas, serta kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital.

Tabel 2. 70 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Indeks Pembangunan TIK
2022	5.13
2023	5.33

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

Peningkatan nilai indeks dari 5,13 pada tahun 2022 menjadi 5,33 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Provinsi NTT mulai mengalami penguatan

dalam ekosistem TIK, termasuk dalam hal pengembangan jaringan, perluasan cakupan internet, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Capaian ini sekaligus mengindikasikan adanya komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong agenda digitalisasi secara lebih merata di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan dan kepulauan. Salah satu representasi nyata dari capaian provinsi ini dapat dilihat pada tingkat penggunaan TIK di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 71 Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Manggarai Timur

Persentase Pengguna Teknologi Informasi yang Berusia 5 Tahun Ke Atas	Tahun 2023
Mengakses Teknologi Informasi	75,13
Menggunakan Teknologi Informasi	39,05

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Berdasarkan data tahun 2023, sebanyak 75,13 persen penduduk Kabupaten Manggarai Timur yang berusia 5 tahun ke atas tercatat telah memiliki akses terhadap teknologi informasi. Namun demikian, hanya 39,05 persen dari populasi tersebut yang benar-benar menggunakan teknologi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Gap antara akses dan penggunaan ini mencerminkan adanya tantangan struktural maupun kultural, terutama dalam hal penguasaan keterampilan digital, literasi TIK, serta motivasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan produktif, pendidikan, dan pelayanan publik.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses pengurangan hambatan perdagangan dan kerja sama ekonomi antar negara. Integrasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, stabilitas, dan kerja sama ekonomi. Konsep integrasi ini diukur dari beberapa aspek berikut:

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat investasi fisik dalam suatu wilayah, seperti pembangunan infrastruktur, mesin, peralatan, bangunan, dan aset tetap lainnya. Selama periode 2020 hingga 2024, PMTB di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar Rp1.194,61 miliar dan meningkat menjadi Rp1.518,76 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya aktivitas pembangunan dan investasi yang terus berlangsung di wilayah tersebut, meskipun kontribusinya terhadap total PMTB Provinsi NTT dan nasional masih tergolong kecil.

Secara persentase, laju pertumbuhan PMTB di Manggarai Timur mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2023, masing-masing sebesar 7,96 persen dan 7,92 persen. Hal ini mungkin mencerminkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur atau pelaksanaan program investasi tertentu pada tahun-tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan melambat menjadi 3,13 persen, yang bisa menjadi indikasi adanya penurunan laju investasi baru atau selesainya sejumlah proyek besar yang sebelumnya mendorong pertumbuhan.

Di tingkat provinsi, PMTB NTT juga mengalami pertumbuhan yang positif dari Rp47.586 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp60.690,40 miliar pada tahun 2024. Sama halnya dengan kabupaten, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 9,01 persen, sementara pada tahun 2024 laju pertumbuhannya menurun menjadi 2,95 persen. Fenomena ini mengindikasikan pola yang serupa antara kabupaten dan provinsi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika fiskal, program pembangunan daerah, dan realisasi belanja modal yang bersifat sementara.

Sementara itu, pada tingkat nasional, PMTB meningkat dari Rp4.897 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6.452 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan PMTB nasional relatif lebih stabil dibandingkan kabupaten dan

provinsi, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan berkisar antara 5,95 persen hingga 8,97 persen. Hal ini mencerminkan bahwa investasi fisik secara nasional tetap tumbuh dengan kuat, didukung oleh program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan infrastruktur strategis, dan investasi sektor swasta.

Kontribusi PMTB Kabupaten Manggarai Timur terhadap PMTB Provinsi NTT secara umum masih kecil, berada di kisaran 2,5 persen selama lima tahun terakhir. Sementara terhadap PMTB nasional, kontribusinya sangat minim, hanya sekitar 0,024 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investasi di tingkat kabupaten terus tumbuh, skala ekonominya masih terbatas dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi yang lebih luas. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang lebih agresif dalam mendorong investasi produktif, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, serta peningkatan kapasitas daerah dalam menyerap dan mengelola investasi tersebut secara efisien.

Tabel 2. 72 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Manggarai Timur

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	1.194,61	1.289,65	1.364,67	1.472,68	1.518,76
Provinsi Nusa Tenggara Timur	47.586,00	51.731,35	54.077,74	58.950,39	60.690,40
Nasional	4.897.049,7	5.227.853,9	5.697.279,2	6.090.676,7	6.452.530,7

Sumber: BPS, 2025

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan angka yang menunjukkan seberapa kuat daya saing barang dan jasa dari sebuah daerah. Namun demikian tidak tersedia data ekspor, sebagai proxy digunakan data net ekspor yang tersedia dalam publikasi BPS.

Berdasarkan data net ekspor barang dan jasa tahun 2020 hingga 2024, terlihat perbedaan tren yang signifikan antara tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Di tingkat nasional, nilai net ekspor menunjukkan tren yang relatif

positif dan meningkat, sedangkan di tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Timur, justru tercatat nilai net ekspor negatif secara konsisten selama lima tahun berturut-turut.

Tabel 2. 73 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Manggarai Timur

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	-1.450,40	-1.550,74	-1.559,83	-1.588,52	-1.570,66
Provinsi Nusa Tenggara Timur	-47.841,51	-48.922,94	-48.307,26	-50.080,64	-51.507,33
Nasional	2.676.513,5	3.635.835,4	4.799.743,0	4.544.889,6	.911.155,7

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data di atas terlihat nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten Manggarai Timur, selalu berada pada angka negatif, dimulai dari -1.450,40 miliar rupiah pada tahun 2020, dan sedikit menurun hingga mencapai -1.570,66 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kontribusi sektor ekspor terhadap perekonomian daerah masih mengalami defisit, atau lebih banyak ketergantungan pada barang dan jasa dari luar daerah.

Hal serupa juga terjadi di tingkat Provinsi NTT, dimana net nilai ekspor tetap negatif sepanjang periode yang sama. Nilai net ekspor tercatat sebesar -47.841,51 miliar rupiah pada tahun 2020 dan terus menurun hingga mencapai -51.507,33 miliar rupiah pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa secara umum, Provinsi NTT mengalami tantangan struktural dalam pengembangan sektor ekspor.

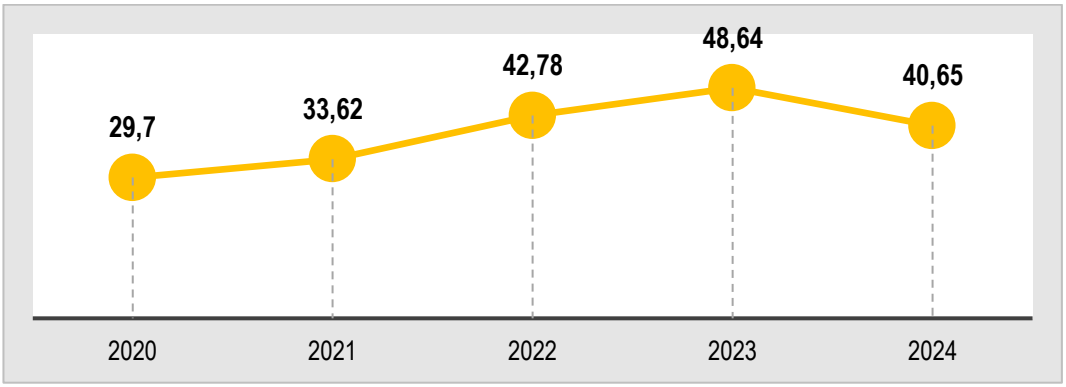
Berbeda dengan daerah, pada tingkat nasional, nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan signifikan. Dari Rp2.676.513,5 miliar pada tahun 2020, naik drastis menjadi Rp4.911.155,7 miliar pada tahun 2024. Hal ini menandakan pertumbuhan kinerja ekspor nasional yang cukup kuat, meskipun sempat terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023.

Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara pusat dan daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia. Ketertinggalan dalam kemampuan produksi dan penetrasi pasar ekspor di daerah seperti Kabupaten Manggarai Timur menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur ekonomi, penguatan kapasitas produksi lokal, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan potensi ekspor daerah.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kualitas Infrastruktur

Kondisi kualitas infrastruktur di Manggarai Timur mengalami peningkatan walaupun masih cenderung belum berkualitas baik. Pada tahun 2018 Indeks Kualitas Infrastruktur hanya bernilai 26, yang kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 26,12. Pada tahun 2020 Indeks Kualitas Infrastruktur meningkat lagi menjadi 29,70, tahun 2021 meningkat menjadi 33,62, tahun 2022 menjadi 42,78, dan akhirnya di tahun 2023 menjadi 48,64. Akan tetapi, pada tahun 2024 Indeks kualitas infrastruktur Manggarai Timur turun menjadi 44,48.



Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kab. Manggarai Timur, 2024

Gambar 2. 15 Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur Kabupaten Manggarai Timur

Kondisi infrastruktur wilayah di Manggarai Timur dijabarkan berdasar pada beberapa indikator seperti jalan, angkutan umum, bandara, dermaga, terminal, RTRW, luas wilayah produktif, dan berbagai fasilitas wilayah lainnya.

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator tersebut dengan berdasar pada data yang telah tersaji pada bagian sebelumnya.

1) Kondisi Jalan

Kondisi permukaan jalan juga menjadi faktor penting dalam kategorisasi, yang mencakup kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Secara umum Kondisi Jalan yang baik di Manggarai Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74 Kondisi Jalan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2024

Uraian	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik	Persen	38.29	47.75	52.06	31.89	42.34	46.08	47.06
Jalan Kondisi Baik	Km	490.55	611.78	667.01	408.61	542.45	590.37	602.97
Jalan Kondisi Sedang	Km	220.13	167.79	36.30	244.95	244.95	244.95	244.95
Jalan Kondisi Rusak Berat	Km	292.24	310.25	565.38	477.13	354.35	306.43	293.83
Jalan Kondisi Rusak Ringan	Km	278.37	7.40	12.60	150.60	139.54	139.54	139.54

Sumber: Dinas PUPR, 2025

2) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah kendaraan di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,27 persen per tahun, namun demikian panjang jalan di Kabupaten Manggarai Timur dalam lima tahun terakhir di tahun 2024 berkurang agar pembangunan menjadi efisien menjadi 904.53 km. Hal ini tentunya berimplikasi pada penurunan rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan. Pada tahun 2024 rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan adalah 45,65 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 34,81 dan tahun 2022 sebesar 45,50.

3) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang, barang dan jasa diperlukan adanya terminal. Pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Manggarai Timur merupakan terminal penumpang tipe C. sampai pada keadaan tahun 2024 telah dibangun 3 unit terminal penumpang tipe C di Kabupaten Manggarai Timur. Ketiga terminal tersebut adalah Terminal Borong dibangun pada tahun 2007, Terminal Kembur dibangun tahun 2013 dan Terminal Wae Lengga dibangun tahun 2012. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah, maka ke depan diharapkan dibangun tambahan terminal penumpang di simpul-simpul transportasi antara lain di Paan Leleng, Mano, Watunggong, Pota, Elar, dan Benteng Jawa.

4) Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Pelabuhan

Pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur merupakan pelabuhan pengumpan dan terminal khusus. Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal) adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Pelabuhan dimaksud merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Pelabuhan pengumpan yang ada di Manggarai Timur meliputi: Pelabuhan Wae Wole di Kecamatan Kota Komba; Pelabuhan Borong di Kecamatan Borong; Pelabuhan Pota di Kecamatan Sambi Rampas; dan Pelabuhan Nanga Baras di Kecamatan Sambi Rampas. Sedangkan untuk terminal khusus terdapat di Wae Wole di Kecamatan Kota Komba. Sedangkan alur pelayaran yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur meliputi: Wae Wole – Bima – Benoa/Denpasar; Wae Wole – Labuan Bajo – Makassar; Wae Kelambu – Reo – Labuan Bajo –

Makassar; Wae Kelambu – Reo – Labuan Bajo – Bima – Benoa/Denpasar – Surabaya; Borong – Bima – Benoa/Denpasar; Borong – Labuan Bajo– Makasar; Wae Kelambu – Makassar; Wae Wole – Tenau/Kupang; Wae Wole – Waingapu/Sumba Timur; dan Borong – Waingapu/Sumba Timur. Tatanan Kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

Bandar Udara

Bandar udara di Kabupaten Manggarai Timur belum ada, tetapi masih berada dalam tahap perencanaan. Berdasarkan RTRW No 6 tahun 2012, rencana lokasi bandar udara di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tanjung Bendera Desa Bamo Kecamatan Kota Komba, dengan azimuth runway 178’ 40’9.435” – 358’ 40’ 9.435.

Terminal

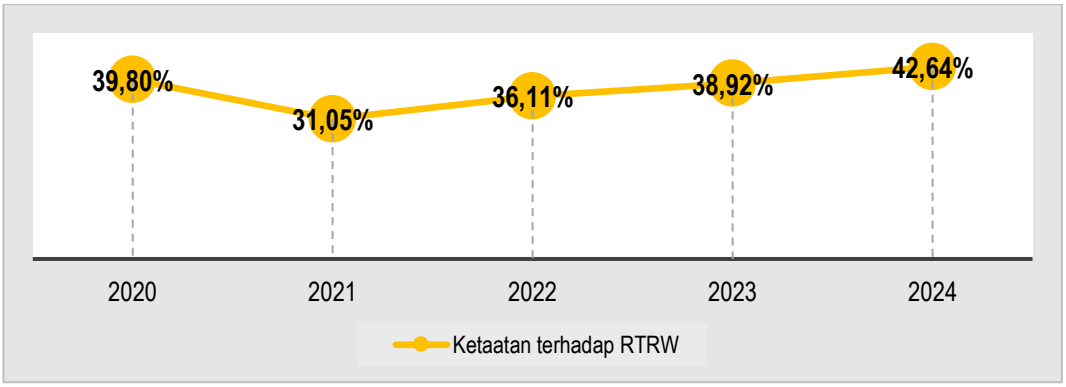
Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang, barang dan jasa diperlukan adanya terminal. Pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Manggarai Timur merupakan Terminal Penumpang Tipe C. Keadaan tahun 2024 telah dibangun 3 unit terminal penumpang tipe C di Kabupaten Manggarai Timur. Ketiga terminal tersebut yaitu Terminal Borong dibangun pada tahun 2007, Terminal Kembur dibangun tahun 2013 dan Terminal Wae Lengga dibangun tahun 2012. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah, maka ke depan diharapkan dibangun tambahan terminal penumpang di simpul-simpul transportasi antara lain di Paan Leleng, Mano, Watu Nggong, Pota, Elar, dan Benteng Jawa.

4) Ketaatan terhadap RTRW

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031. Namun dengan berbagai perkembangan yang ada, kondisi pada bidang penataan

ruang yang ditemui sampai saat ini masih belum optimal, khususnya dalam tataran pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih belum semua RTR pada tiap tingkatan selesai disusun dan masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pembangunan saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Gambar 2.15
Indeks Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kab. Manggarai Timur, 2025

Gambar 2. 16 Indeks Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Manggarai Timur

5) Luas wilayah produktif

Wilayah produktif di Kabupaten Manggarai Timur dimanfaatkan sebagai kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pariwisata. Untuk kawasan tanaman pangan, luas terbesar berada di Kecamatan Kota Komba, yaitu 331.9269 ha, dan terkecil 6,1865 di Kecamatan Elar. Sementara kawasan hortikultura terluas terdapat di Kecamatan Kota Komba sebesar 36,218.65 ha dan terkecil 6,299.79 ha di Kecamatan Lamba Leda Timur. Kemudian kawasan perkebunan terluas terdapat di Kecamatan Kota Komba juga, yaitu 2,534.07 ha, dan terkecil 137.4145 ha di Kecamatan Lamba Leda Timur. Untuk kawasan

pariwisata terluas terdapat di Kecamatan Borong, yaitu sebesar 14.1212 ha dan terkecil 9.64 ha di Kecamatan Sambi Rampas.

6) Luas wilayah industri

Kawasan peruntukan industri berdasarkan Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2012 terdiri atas 3 kawasan: (1) kawasan peruntukan industri besar; (2) kawasan peruntukan industri sedang; dan (3) kawasan peruntukan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada poin (1) terdapat di kawasan Pelabuhan Waewole Kecamatan Kota Komba dan kawasan Nanga Lanang Kecamatan Rana Mese. Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada poin (2) terdapat di kawasan Buntal Kecamatan Elar, kawasan Pota Kecamatan Sambi Rampas dan kawasan Dampek Kecamatan Lamba Leda Utara, dan kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada poin (3) terdapat di seluruh kecamatan di daerah sesuai dengan potensi dan jenis kerajinan tangan yang diproduksi.

7) Luas wilayah kebanjiran

Banjir ini disebabkan pula oleh kemampuan drainase dan sungai beserta anak- anak sungainya yang tidak mampu menampung hujan dengan intensitas tinggi ditambah meningkatnya degradasi lingkungan di Manggarai Timur. Air hujan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur biasanya mengalir sebagai aliran permukaan (*run off*) dan menggerus permukaan. Pada tahun 2016-2018 wilayah kebanjiran hampir semua kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur Sementara tahun 2019-2020 belum ada data yang menjelaskan luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Manggarai Timur

8) Luas wilayah kekeringan

Menurut *International Glossary of Hidrology* (WMO 1974, dalam Pramudia, 2002), pengertian kekeringan adalah suatu keadaan tanpa hujan

berkepanjangan atau masa kering di bawah normal yang cukup lama sehingga mengakibatkan keseimbangan hidrologi terganggu secara serius. Secara tipologi kekeringan didefinisikan sebagai berikut.

Kekeringan Meteorologis

Kekeringan meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Kekeringan meteorologis biasanya didefinisikan sebagai kurangnya curah hujan selama periode waktu yang telah ditentukan. Ambang batas yang dipilih, seperti 50 persen dari curah hujan normal selama jangka waktu enam bulan akan bervariasi menurut lokasi sesuai dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi (SAARC, 2010). Data yang diperlukan untuk menilai kekeringan meteorologi adalah informasi curah hujan harian, suhu, kelembaban, kecepatan dan tekanan angin serta penguapan.

Kekeringan Hidrologis

Kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan hidrologis biasanya didefinisikan oleh kekurangan pada permukaan dan persediaan air bawah permukaan relatif terhadap kondisi rata-rata pada berbagai titik dalam waktu semusim. Seperti kekeringan pertanian, tidak ada hubungan langsung antara jumlah curah hujan dengan status air permukaan dan persediaan air bawah permukaan di danau, waduk, akuifer, dan sungai karena komponen sistem hidrologi digunakan untuk beberapa tujuan, seperti irigasi, rekreasi, pariwisata, pengendalian banjir, transportasi, produksi listrik tenaga air, air pasokan dalam daerah, perlindungan spesies terancam punah, dan manajemen lingkungan, ekosistem, dan pelestarian. Ada juga waktu kesenjangan yang cukup besar antara penyimpangan dari curah hujan dan titik dimana kekurangan-kekurangan ini menjadi jelas dalam komponen permukaan dan bawah permukaan dari sistem hidrologi (SAARC, 2010).

Kekeringan Pertanian

Kekeringan pertanian berhubungan dengan kekurangan kandungan air tanah di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu yang memengaruhi penurunan produksi pertanian. Kekeringan pertanian didefinisikan sebagai kurangnya ketersediaan air tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan makanan ternak dari curah hujan normal selama beberapa periode waktu tertentu. Hubungan antara curah hujan dan infiltrasi air hujan ke dalam tanah seringkali tidak berlangsung. Tingkat infiltrasi bervariasi tergantung pada kondisi kelembaban, kemiringan, jenis tanah, dan intensitas dari peristiwa presipitasi. Karakteristik tanah juga berbeda. Sebagai contoh, beberapa tanah memiliki kapasitas menyimpan air lebih tinggi, yang membuat mereka kurang rentan terhadap kekeringan (SAARC, 2010).

Kekeringan Sosial Ekonomi

Kekeringan sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditas ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteologi, hidrologi dan pertanian. Kekeringan sosial ekonomi berbeda nyata dari kekeringan yang lain karena mencerminkan hubungan antara penawaran dan permintaan untuk beberapa komoditas atau ekonomi yang baik (seperti air, pakan ternak, atau pembangkit listrik tenaga air) yang tergantung pada curah hujan. Pasokan bervariasi setiap tahun sebagai fungsi dari ketersediaan air. Permintaan juga naik turun dan sering dikaitkan dengan suatu kecenderungan yang positif akibat peningkatan populasi, pengembangan dan faktor lainnya (SAARC, 2010). Dampak kekeringan bisa ekonomi, lingkungan atau sosial. Kekeringan menghasilkan dampak yang kompleks mencakup banyak sektor ekonomi baik luar daerah yang mengalami kekeringan. Kompleksitas ini ada karena air merupakan bagian integral dari kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan menyediakan layanan. Dampak kekeringan sering disebut bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung termasuk tanaman berkurang, lahan tidur, dan produktivitas hutan,

meningkatkan bahaya kebakaran, ketinggian air berkurang, tingkat kematian satwa liar, dan kerusakan satwa liar dan habitat ikan. Penginderaan jauh dan teknologi GIS memberikan kontribusi signifikan untuk manajemen kekeringan (Jeyaseelan, 2003).

Dari definisi tersebut kekeringan yang melanda Kabupaten Manggarai Timur tidak sampai pada kekeringan sosial ekonomi. Pada tahun 2016-2018 Kabupaten Manggarai Timur terdapat wilayah kekeringan dengan jumlah luas wilayah kekeringan terbanyak ada pada tahun 2018 sebanyak 11 titik. Sementara pada tahun 2019-2023 belum ada informasi atau data yang menjelaskan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki wilayah kekeringan.

9) Luas wilayah perkotaan

Luas wilayah perkotaan di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Borong, Rana Mese, Kota Komba, Elar, Elar Selatan, Sambi Rampas, Lamba Leda Selatan, Lamba Leda Timur, Lamba leda, Congkar, Kota Komba Utara dan Lamba Leda Utara dengan jumlah total luas 2401,39 area (km3/sq.km).

10) Jenis dan jumlah bank dan cabang

Bank-bank di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas bank BUMN dan juga bank daerah. Bank-bank tersebut memiliki andil dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Manggarai Timur karena bank-bank tersebut menyediakan kredit, terutama Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Rakyat. Berdasarkan data BPS, jumlah bank-bank di Kabupaten Manggarai Timur, terdiri atas 4 kantor BRI, 1 kantor BNI, dan 9 kantor BPD (Bank Pembangunan Daerah/Bank NTT). Bank-bank tersebut sudah memiliki cabang di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.

11) Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, asuransi dikenal sebagai alternatif investasi yang cukup baik dan meminimalisir risiko atas kejadian tak terduga. Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risikonya. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini digunakan perusahaan asuransi mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing.

12) Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Ketersediaan restoran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke NTT, baik penduduk nasional maupun mancanegara. Secara keseluruhan, jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan kecamatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 jumlah rumah makan/restoran hanya terdapat 29 unit, yang kemudian bertambah di tahun 2019 menjadi 36 unit, tahun 2020 37 unit, dan tahun 2021 mencapai 53 unit. Namun di tahun 2022 dan 2023 jumlah rumah makan/ restoran di Manggarai Timur tetap berjumlah 53 unit. Namun jumlah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada.

13) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2018 hingga 2023 tidak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah hotel yang tersedia adalah 10 unit, namun turun di tahun 2020 menjadi tersisa 8 hotel. Sedangkan di tahun 2021 hingga 2023 jumlah hotel di Manggarai Timur hanya tersedia 9 unit. Disisi lain jumlah akomodasi kamar di Manggarai Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023. Tahun 2018 jumlah kamar tidak mencapai angka 100,

namun dari tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 105 kamar, tahun 2021 menjadi 123 kamar, tahun 2022 terdapat 118 kamar, dan tahun 2023 terdapat 126 kamar.

14) Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat Manggarai Timur.

15) Rasio ketersediaan daya listrik

Penyediaan tenaga/daya listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan tenaga/daya listrik sesuai data dari PLN pada akhir tahun 2023 mencapai 101.757.894 Kwh, nilai ini terus mengalami pertumbuhan dari bulan ke bulan pada tahun 2023 yang memberikan gambaran akan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 75 Penggunaan listrik di Kabupaten Manggarai Timur

Bulan	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
Januari	45.221.250	8.447.704	7.207.693	105,802	1.134.209
Februari	45.659.100	16.246.713	13.945.829	211,928	2.088.957
Maret	46.476.750	24.808.074	21.382.237	318,809	3.107.028
April	47.198.200	33.109.104	28.655.926	425,691	4.027.487
Mei	47.678.300	41.652.144	36.226.456	534,322	4.891.366
Juni	48.026.500	50.044.454	43.741.420	644,035	5.658.998
Juli	48.280.000	58.656.182	51.293.070	754,681	6.608.431
Agustus	48.606.150	67.341.920	59.163.562	866,134	7.312.223
September	49.132.850	75.808.053	66.820.810	978,028	8.009.215
Oktober	49.610.300	84.564.442	74.777.447	1.091.030	8.695.965
November	49.950.400	92.977.986	82.786.126	1.205.157	8.986.703
Desember	50.343.600	101.757.894	91.100.363	1.319.284	9.338.246
Total Pertumbuhan	5.122.350	101.757.894	91.100.363	1.319.284	9.338.246
Rata-Rata Bulanan	426,863	8.479.824	7.591.697	109,94	778,187

Sumber: PT. PLN (Persero) UPL Ruteng

16) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Listrik di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas listrik PLN dan listrik non-PLN. Sampai dengan tahun 2019 total pelanggan listrik di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66.528 pelanggan, yang terdiri atas 13,509 pelanggan listrik PLN; 116 pelanggan listrik sehen; 3,740 pelanggan listrik EBTB. Jika dibandingkan antara jumlah KK di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 91,917 KK dengan jumlah pelanggan listrik, maka rasio elektrifikasi Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022 adalah 73,03 persen. Hal itu berarti bahwa sampai dengan tahun 2022 terdapat 26,97 persen atau sebanyak 25,300 KK yang belum memiliki penerangan listrik. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 hanya mencapai 69,22 persen.

17) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon seluler

Pelaksanaan program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kepemilikan telepon seluler dan akses internet dalam bidang pemanfaatan teknologi

informasi, serta program untuk peningkatan kesejahteraan lainnya. Persentase Jumlah penduduk usia 5 tahun keatas di Kabupaten Manggarai Timur yang menggunakan internet melalui HP/Ponsel pada tahun 2021-2023 telah mencapai rata rata 99 persen.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan salah satu bagian dari meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung capaian pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Berdasarkan data rumah tangga dengan akses hunian layak Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak menunjukkan adanya tren yang relatif stabil, dari tahun 2020 hingga 2022 yaitu sebanyak 51,566 unit pada tahun 2020 dan meningkat sedikit menjadi 51.776 pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 42.718 unit, nilai tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2024.

Tabel 2. 76 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Rumah dengan akses hunian layak	51.566	51.776	51.776	42.718	42.718
2	Persentase Rumah dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	80,42%	80,75%	80,75%	75,37%	75,37%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kab. Manggarai Timur, 2025

Dari sisi persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, capaian tahun 2020 hingga 2022 berada pada kisaran 80,42 persen hingga 80,75 persen. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2023 menjadi 75,37 persen, dan stagnan di angka yang sama pada tahun 2024. Penurunan baik dari sisi jumlah unit rumah maupun persentase ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemenuhan hunian layak, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis dalam pembangunan, keterbatasan lahan, serta

dampak ekonomi yang mungkin disebabkan oleh pandemi atau tekanan fiskal lainnya.

c. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa yang termasuk kategori desa mandiri terhadap total jumlah desa dalam wilayah tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Berikut adalah Tabel Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Desa Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 yang dapat digunakan untuk melihat persentase Desa Mandiri di Manggarai Timur.

Tabel 2. 77 Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Desa Manggarai Timur

No	Klasifikasi Desa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Mandiri	0	0	0	0	0
2.	Desa Maju	4	7	7	10	12
3.	Desa Berkembang	72	87	102	121	128
4.	Desa Tertinggal	83	65	50	28	19
5.	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah Desa		159	159	159	159	159

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Manggarai Timur, IDM 2025

Data klasifikasi desa dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan dalam status pembangunan desa. Dari total 159 desa, tidak ada desa yang dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal maupun desa mandiri sepanjang lima tahun tersebut. Namun demikian, terdapat pergeseran yang jelas dari kategori desa tertinggal ke arah desa berkembang dan desa maju.

Berdasarkan klasifikasi desa yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai Timur, jumlah keseluruhan desa di wilayah ini konsisten sebesar 159 unit sepanjang periode 2020 hingga 2024. Dari total tersebut, Desa Mandiri tercatat 0 unit pada setiap

tahun pengamatan, sehingga persentase Desa Mandiri di Kabupaten Manggarai Timur adalah 0 persen dari tahun 2020 hingga 2024.

Pada tahun 2020, sebagian besar desa berada dalam kategori desa tertinggal, yaitu sebanyak 83 desa atau sekitar 52 persen dari total desa yang ada. Namun angka ini terus menurun secara signifikan hingga menjadi 19 desa saja pada tahun 2024, atau sekitar 12 persen dari total desa. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan status pembangunan desa secara bertahap dan berkelanjutan.

Sebaliknya, jumlah desa berkembang mengalami peningkatan dari 72 desa pada tahun 2020 menjadi 128 desa pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa mayoritas desa yang sebelumnya tertinggal berhasil naik kelas menjadi desa berkembang. Pertumbuhan jumlah desa berkembang ini juga menunjukkan adanya dampak dari program pembangunan desa, intervensi pemerintah, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam memenuhi indikator pembangunan.

Lebih lanjut, desa maju juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya 4 desa pada tahun 2020 menjadi 12 desa pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya tidak sebesar desa berkembang, pertumbuhan ini tetap menunjukkan bahwa ada desa-desa yang terus mengalami peningkatan kualitas dalam aspek ekonomi, sosial, dan layanan dasar.

Namun, satu hal yang mencolok dari data ini adalah tidak adanya desa mandiri hingga tahun 2024. Artinya, meskipun terjadi kemajuan, belum ada satupun desa yang mampu mencapai status tertinggi dalam klasifikasi pembangunan desa. Hal ini bisa menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan indikator desa mandiri, seperti kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan desa yang optimal, dan kualitas hidup masyarakat yang sangat baik.

7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana kemandirian fiskal suatu daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi wilayah tersebut. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki rasio yang relatif rendah dan berfluktuasi, serta secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi NTT maupun nasional.

Tabel 2. 78 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Timur

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	0,0038	0,0036	0,0038	0,0047	0,0033
Provinsi NTT	0,0087	0,0084	0,0092	0,0085	0,0100
Nasional	0,0116	0,0117	0,0122	0,0114	0,0113

Sumber: BPS, 2025 (Diolah)

Pada tahun 2020, rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 0,0038 persen, lalu sedikit menurun menjadi 0,0036 persen pada tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerimaan pajak daerah di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Pada tahun 2022, rasio kembali ke angka 0,0038 persen, dan sempat mengalami peningkatan tertinggi menjadi 0,0047 persen pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 rasio kembali turun signifikan menjadi 0,0033 persen, mengindikasikan penurunan efektivitas pemungutan pajak daerah atau meningkatnya PDRB tanpa diiringi pertumbuhan signifikan dari pendapatan pajak.

Jika dibandingkan, rasio pajak Provinsi NTT berkisar antara 0,0084 persen hingga 0,0100 persen, sementara rasio nasional jauh lebih tinggi, stabil di atas 0,0113 persen. Perbandingan ini mempertegas bahwa kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai Timur masih sangat kecil dan memerlukan perhatian serius.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih lemah, dan penguatan sistem perpajakan daerah, termasuk perluasan basis pajak dan perbaikan sistem pemungutan, perlu menjadi prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029. Tanpa peningkatan rasio pajak daerah yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada transfer pusat akan tetap tinggi, sehingga membatasi kemandirian fiskal daerah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perpajakan daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kapasitas aparatur perpajakan, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

b. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kondisi dimana suatu barang dan jasa mengalami kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi dapat diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang merupakan rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Tingkat inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti permintaan dan penawaran, kebijakan moneter dan fiskal, kurs mata uang, biaya produksi, dan lain-lain. Adapun data kondisi inflasi di Kabupaten Manggarai Timur tidak tersedia. Untuk itu maka inflasi Manggarai Timur dideteksi dengan nilai inflasi kabupaten terdekat yakni Kabupaten Sikka. Berikut adalah data inflasi kabupaten Sikka selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 79 Tingkat Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)
2020	2,24
2021	0,39
2022	4,94
2023	3,29
2024	2,70

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan data inflasi dapat dipahami bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, inflasi mencapai 1,84 persen, kemudian pada tahun 2020, naik 0,4 persen. Pada tahun 2021, inflasi kembali turun menjadi 0,39 persen, namun pada tahun 2022, inflasi melonjak menjadi 4,94 persen dan turun pada tahun 2023 sebesar 3,29 persen dan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 2,70 persen. Lonjakan inflasi pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2019. Untuk menganalisis penyebab dan dampak dari fluktuasi inflasi, dapat dilakukan analisis dari data indeks harga konsumen menurut kelompok pengeluaran. Data ini akan menunjukkan perubahan harga rata-rata dari berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di Manggarai Timur.

Tabel 2. 80 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran

No	Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	36.00	18,30	18,65	21.3	20,61
2.	Umbi-umbian	1.32	1,04	1,22	1.23	0,68
3.	Ikan	5.69	5,16	5,23	4.20	4,57
4.	Daging	2.60	3,39	1,64	1.67	3,02
5.	Telur dan Susu	2.97	2,23	2,14	2.05	1,62
6.	Sayur-sayuran	8.21	5,61	5,31	5.95	4,62
7.	Kacang-kacangan	0.93	0,98	1,06	0.90	0,73
8.	Buah-buahan	2.93	1,89	2,17	1.55	2,10
9.	Minyak dan Lemak	1.96	1,32	1,46	1.55	1,43
10.	Bahan Minuman	3.93	2,49	2,56	2.79	2,62
11.	Bumbu-bumbuan	1.17	0,81	0,82	0.90	0,86
12.	Konsumsi lainnya	1.15	0,87	0,71	0.81	0,75
13.	Makanan Minuman Jadi	21.49	11,18	11,81	10.01	8,76
14.	Rokok dan Tembakau	9.65	6,71	8,98	7.52	9,43

No	Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total Makanan		67.86	61,97	63,75	62.43	61,80
1.	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	57.25	20,80	19,63	21.16	23,66
2.	Aneka Barang dan Jasa	20.26	6,66	5,89	6.13	6,32
3.	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	6.35	2,28	1,81	1.69	1,51
4.	Barang Tahan Lama	7.37	3,79	3,36	3.86	2,36
5.	Pajak Pungutan dan Asuransi	6.54	3,11	4,04	3.85	3,47
6.	Keperluan Pesta dan Upacara	2.23	1,38	1,50	0.87	0,89
Total Bukan Makanan		32.14	38,03	36,25	37.57	38,20

Sumber: Indeks Kesejahteraan Rakyat Manggarai Timur, 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kelompok pengeluaran yang paling berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Manggarai Timur adalah makanan. Kelompok ini memiliki bobot tertinggi dalam perhitungan IHK, yaitu sekitar 62 persen. Selain itu, kelompok ini juga mengalami kenaikan harga yang signifikan pada tahun 2022, yaitu sebesar 1,78 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Namun turun tipis pada tahun 2023 yaitu di angka 62,43 persen. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan 0,63 persen. Penurunan tipis harga makanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Kekurangan pasokan pangan. Kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Namun, sektor ini sering mengalami kekurangan pasokan pangan lokal akibat dari bencana alam ataupun gangguan hama.
2) Peningkatan permintaan. Kabupaten Manggarai Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 300 ribu jiwa dan dengan rata-rata konsumsi pangan yang jauh lebih tinggi dari nasional dan provinsi. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi pangan lokal yang signifikan.
3) Biaya transportasi. Kabupaten Manggarai Timur merupakan daerah yang terletak di Pulau Flores, dan jaraknya cukup jauh dari pusat-pusat

perekonomian di Provinsi NTT dan pusat ekonomi di Indonesia. Sehingga untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dari luar daerah atau luar pulau, masyarakat harus membayar biaya transportasi yang tinggi. Biaya transportasi ini dapat meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif tol laut, atau pajak impor. Biaya transportasi ini kemudian ditambahkan ke harga barang-barang tersebut, sehingga meningkatkan IHK.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Untuk memantau sejauh mana kemajuan di bidang ini, Indeks Reformasi Hukum menjadi instrumen evaluatif yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan regulasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan hukum, serta penguatan kelembagaan hukum. Evaluasi ini penting tidak hanya sebagai indikator kinerja, tetapi juga sebagai arah kebijakan dalam penguatan sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Tabel berikut menyajikan capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 81 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Manggarai Timur

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	45,14	51,10	76,26
Kategori	N/A	N/A	C	CC	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Hukum, 2025

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Manggarai Timur mulai mendapatkan penilaian resmi atas capaian reformasi hukumnya pada tahun 2022, dengan skor awal sebesar 45,14 yang dikategorikan pada kategori C.

Skor ini mencerminkan bahwa reformasi hukum saat itu masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan secara sistemik. Pada tahun 2023, capaian meningkat menjadi 51,10 (kategori CC), yang menandakan adanya perbaikan awal, khususnya dalam penataan regulasi dan penyediaan pelayanan hukum kepada masyarakat. Perkembangan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2024, dimana nilai indeks melonjak tajam menjadi 76,26 dan mencapai kategori BB. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan substansial yang kemungkinan besar didorong oleh upaya perbaikan dalam penyusunan produk hukum daerah, penyederhanaan regulasi, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, serta penguatan institusi hukum daerah.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam konteks reformasi birokrasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi elemen strategis dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nilai SPBE mengukur tingkat kematangan instansi pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan publik dan manajemen administrasi pemerintahan. Evaluasi terhadap indikator ini menjadi cerminan dari kesiapan digital dan kualitas pelayanan berbasis elektronik yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tabel berikut menyajikan perkembangan nilai SPBE Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 82 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,53	1,15	2,46	2,62	2,64

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai SPBE Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,53. Namun mengalami penurunan

pada tahun 2021 menjadi 1,15, yang menandakan adanya hambatan dalam konsistensi implementasi sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan tantangan internal seperti keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas SDM, maupun aspek koordinasi kelembagaan. Meski sempat mengalami kemunduran, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dalam capaian SPBE yang mencapai angka 2,46, menunjukkan adanya intervensi kebijakan dan perbaikan sistem yang mulai efektif. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan kenaikan nilai menjadi 2,62, dan sedikit meningkat lagi menjadi 2,64 pada tahun 2024. Walaupun peningkatannya relatif kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya konsistensi dan kesinambungan dalam upaya digitalisasi pemerintahan.

c. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan representasi langsung dari kualitas birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi instrumen evaluatif yang penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada warga. Nilai IPP tidak hanya mencerminkan persepsi dan kepuasan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kematangan sistem dan budaya pelayanan dalam lingkup pemerintahan daerah. Tabel berikut menyajikan perkembangan capaian IPP Kabupaten Manggarai Timur selama periode lima tahun terakhir:

Tabel 2. 83 Indeks Pelayanan Publik Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,83	3,04	3,42	3,16	3,82
Kategori	C (Cukup)	B- (Baik Dengan Catatan)	B (Baik)	B- (Baik Dengan Catatan)	B (Baik)

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, 2025

Berdasarkan data tersebut, nilai IPP Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IPP berada pada angka 2,83 dengan kategori C atau Cukup, yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang masih perlu banyak perbaikan, baik dari sisi prosedur, waktu layanan, maupun responsivitas. Peningkatan terjadi pada tahun 2021 dengan capaian 3,04 dan kategori B–, menandakan adanya perbaikan awal yang relevan dengan evaluasi kinerja pelayanan. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 3,42 (kategori B), menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek pelayanan, termasuk peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 3,16 (kategori B–), yang bisa menjadi refleksi dari tantangan operasional atau ketidakkonsistenan dalam penerapan standar pelayanan di sejumlah unit kerja. Meski demikian, perbaikan kembali terlihat di tahun 2024 dengan kenaikan nilai menjadi 3,82, mengukuhkan kembali kategori B dan mencerminkan adanya pemulihan serta penguatan tata kelola pelayanan publik secara lebih menyeluruh.

d. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator yang mencerminkan tingkat penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini mencakup aspek-aspek seperti pengendalian gratifikasi, penguatan sistem pelaporan, serta budaya antikorupsi dalam birokrasi publik. Berikut adalah kondisi Integritas di Kabupaten Manggarai Timur:

Tabel 2. 84 Indeks Integritas Nasional Manggarai Timur Tahun 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	N/A	65,44	66,48	64,45	66,22

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Berdasarkan data Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020–2024, pengukuran baru tersedia mulai tahun 2021. Pada tahun tersebut, nilai indeks tercatat sebesar 65,44 dan mengalami peningkatan tipis menjadi 66,48 pada 2022. Namun, terjadi penurunan kembali pada 2023 menjadi 64,45, sebelum meningkat lagi menjadi 66,22 pada tahun 2024. Meskipun fluktuatif, nilai indeks secara keseluruhan masih berada di bawah ambang batas yang menunjukkan tingkat integritas ideal, sehingga masuk dalam kategori "rentan".

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas pengawasan internal, pembinaan etika aparatur, dan implementasi kebijakan antikorupsi yang lebih kuat, guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam konteks ini, indikator tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat (K3) serta persentase penegakan peraturan daerah (Perda) menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Tabel berikut menyajikan capaian dua indikator tersebut di Kabupaten Manggarai Timur selama periode lima tahun terakhir:

Tabel 2.81
Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tabel 2. 85 Persentase Penegakan Perda dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan Perda	93,02	95,35	95,35	99	98

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Berdasarkan data tersebut, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 secara konsisten berada pada angka 100 persen selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur berhasil ditangani secara tuntas tanpa sisa kasus yang tertunda, mencerminkan efektivitas operasional Satpol PP serta sistem pelaporan dan tindak lanjut yang berjalan optimal. Capaian ini juga menandakan adanya respons cepat dan sigap dari aparat dalam menegakkan ketertiban umum di masyarakat.

Sementara itu, persentase penegakan Perda juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tren yang terus meningkat. Dimulai dari 93,02 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 95,35 persen pada tahun 2021 dan tetap stabil di angka tersebut pada 2022. Lompatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 99%, mendekati tingkat penegakan yang ideal. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 98%, angka tersebut masih mencerminkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam implementasi regulasi daerah.

b. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu indikator yang merefleksikan tingkat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil warga negara, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik. Salah satu bentuk konkret dari kebebasan tersebut adalah pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan secara terbuka dan damai oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Data ini penting untuk menilai bagaimana dinamika sosial

berlangsung serta sejauh mana negara menjamin ruang partisipatif tanpa intimidasi atau pembatasan yang berlebihan.

Tabel 2. 86 Capaian Aksi HAM Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	N/A	N/A	1	2	2
2	Jumlah Peserta	N/A	N/A	200	30	30

Sumber: Kepolisian Resor Manggarai Timur, 2025

Di Kabupaten Manggarai Timur, data aksi HAM mulai tersedia sejak tahun 2022. Pada tahun tersebut, tercatat satu aksi demonstrasi dengan jumlah peserta mencapai 200 orang. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah demonstrasi meningkat menjadi dua kegiatan per tahun, namun dengan jumlah peserta yang lebih sedikit, yakni masing-masing sebanyak 30 orang. Meskipun secara kuantitatif terjadi peningkatan jumlah aksi, penurunan jumlah peserta dapat mengindikasikan beragam faktor, seperti perubahan isu yang diangkat, efektivitas penyaluran aspirasi melalui forum lain, atau bahkan menurunnya antusiasme masyarakat dalam mengekspresikan pendapat secara kolektif. Data ini dapat menjadi masukan penting dalam evaluasi capaian aksi HAM di tingkat lokal.

c. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas kehidupan demokratis di suatu wilayah, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola demokrasi yang partisipatif dan inklusif.

Tabel 2. 87 Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	35	99,95	N/A	N/A	69,72

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 2025

Di Kabupaten Manggarai Timur, data IDI menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks tercatat rendah, yakni sebesar 35. Namun, pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan capaian indeks sebesar 99,95, yang mencerminkan kondisi demokrasi yang sangat baik. Sayangnya, tidak tersedia data pada tahun 2022 dan 2023, sehingga tren perkembangan tidak dapat dipantau secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, IDI kembali mengalami penurunan menjadi 69,72. Penurunan ini tetap mencerminkan kondisi demokrasi yang relatif baik, namun menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan capaian demokrasi yang ideal, baik dari sisi kebebasan sipil, pelaksanaan hak-hak politik, maupun penguatan lembaga demokrasi di daerah.

d. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan indikator yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungannya, baik dari ancaman kriminalitas maupun gangguan sosial lainnya. Walaupun belum ada data pengukurannya di Kabupaten Manggarai Timur, pencapaian rasa aman tercermin efektivitas peran pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menciptakan ruang publik yang aman dan harmonis. Upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat sistem keamanan lingkungan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban menjadi elemen kunci dalam mendorong peningkatan rasa aman di daerah ini.

e. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban mengukur tingkat keteraturan sosial dan keberfungsian mekanisme penanganan gangguan ketertiban umum di masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dinamika sosial secara damai, mencegah konflik, serta menindak pelanggaran ketertiban dengan cepat dan tepat. Di Kabupaten Manggarai Timur, walaupun belum dilakukan pengukuran barometer keberhasilan terlihat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi kehidupan bermasyarakat. Peningkatan ini sangat bergantung pada sinergi antar instansi, peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, serta keberlanjutan program pembinaan ketahanan sosial di tingkat lokal.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inovasi, efisiensi birokrasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penilaian terhadap IDSD biasanya melibatkan dimensi ekonomi, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas teknologi yang digunakan dalam pembangunan daerah. Tabel berikut menyajikan nilai IDSD Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 88 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	N/A	2,65	N/A

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kabupaten Manggarai Timur baru memperoleh nilai IDSD pada tahun 2023, yakni sebesar 2,65. Nilai ini mencerminkan tahap awal pelaksanaan pengukuran daya saing daerah, dan berfungsi sebagai baseline untuk evaluasi serta perencanaan

kebijakan pembangunan di masa mendatang. Adapun ketiadaan data pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2022) dan tahun 2024 disebabkan oleh belum tersedianya indikator pembentuknya yang masih belum di ukur seperti institusi dan infrastruktur.

b. Indeks Kapabilitas Inovasi

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, pengukuran terhadap kapabilitas inovasi menjadi penting untuk dilakukan. Indeks Kapabilitas Inovasi digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan daerah dalam menghasilkan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pemberian layanan publik. Indikator ini menjadi representasi dari komitmen dan kapasitas institusional untuk mendorong perubahan yang berbasis pada gagasan baru, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi dan pengetahuan lokal Tabel berikut menyajikan perkembangan nilai Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Manggarai Timur dalam lima tahun terakhir:

Tabel 2. 89 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kapabilitas Inovasi	N/A	N/A	0,09	0,91	1,41

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pengukuran Indeks Kapabilitas Inovasi di Kabupaten Manggarai Timur baru mulai dilakukan pada tahun 2022, dengan nilai awal sebesar 0,09. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 0,91, dan kembali meningkat menjadi 1,41 pada tahun 2024. Ketiadaan data pada tahun 2020 dan 2021 dapat mengindikasikan belum adanya sistem pengukuran atau belum dimulainya inisiatif formal dalam bidang inovasi publik pada periode tersebut. Namun demikian, tren positif selama tiga tahun terakhir mencerminkan

adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam membangun fondasi inovasi yang lebih solid. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kapasitas kelembagaan, pembelajaran organisasi, serta adanya dorongan dari berbagai aktor untuk berinovasi dalam rangka menjawab tantangan-tantangan pembangunan lokal.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1) Urusan Pendidikan

Pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan. Warga negara Indonesia akan memperoleh keterampilan seiring dengan pembangunan manusia melalui pemerataan, akses, dan peningkatan kualitas pendidikan (Indikator Kesejahteraan, 2015). Oleh karena itu, pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan menjadi fokus pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini (termasuk nonformal) dan pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK serta pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Situasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk secara mandiri memahami permasalahan, kebutuhan, dan lebih bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan untuk kemajuan daerahnya masing-masing dan memberikan layanan pendidikan kepada masyarakatnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Harapan penduduk dalam rangka melanjutkan pendidikan juga dapat dilihat dari angka partisipasi penduduk. Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Perhitungan atas

APK bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2022).

APK pada jenjang SD di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung bersifat fluktuatif, ini terlihat pada tahun 2020 sebesar 120,73 persen, kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 117,7 persen, kembali meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 121,68 persen, dan menurun kembali sampai tahun 2024 sebesar 110,21 persen. Angka yang fluktuatif dan melebihi 100 persen menunjukan bahwa banyak penduduk yang sekolah SD di Kabupaten Manggarai Timur belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya.

Tabel 2. 90 Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	120,73	117,7	121,68	115,31	110,21
Provinsi Nusa Tenggara Timur	113,40	113,55	113	111,35	110,58
Nasional	106,32	106,2	106,27	105,28	104,82

Sumber: BPS, 2020-2025

Kemudian pada jenjang SMP pada tahun 2020 sebesar 92,06 persen kemudian terjadi kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 menjadi 104,91 persen, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar 92,86 persen. Kondisi fluktuatif yang terjadi ini menggambarkan sisi positif pada partisipasi sekolah karena semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia sekolah.

Tabel 2. 91 Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	92,06	94,7	104,13	104,91	92,86

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Nusa Tenggara Timur	89,85	90,78	90,00	90,41	91,73
Nasional	91,54	92,8	92,11	91,25	92,21

Sumber: BPS, 2020-2025

Selain APK, APM menjadi indikator pendukung pendidikan sebagai perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020-2024 pada jenjang SD bersifat fluktuatif dimana terlihat pada tahun 2020 sebesar 98,9 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan tahun 2021 sebesar 98,09 persen, mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 99,68 persen, dan menurun kembali padai tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 99,32 persen dan 99,26 persen. Kemudian untuk APM jenjang SMP tergambar bahwa pada tahun 2020 sebesar 70,88 persen kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 sebesar 70,00 persen, dan terjadi kenaikan sampai pada tahun 2023 menjadi 85,78 persen. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 83,14 persen. Kondisi fluktuatif pada APM SMP ini menggambarkan bahwa kondisi ketepatan umur usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP masih perlu peningkatan, sehingga anak usia sekolah bersekolah sesuai dengan umur yang ditetapkan.

Tabel 2. 92 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD dan SMP/Sederajat

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	98,9	98,09	99,68	99,32	99,26
SMP/MTS	70,88	70,00	70,58	85,78	83,14

Sumber: BPS, 2020-2024

Pendidikan memiliki peran penting dalam suatu negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan tata perilaku lainnya untuk menunjang keberhasilan hidup. Salah satu indikator pendidikan disuatu wilayah adalah tingkat partisipasi sekolah atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Untuk Kabupaten Manggarai Timur APS pada satuan pendidikan SD mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 yaitu 99,03 persen (2020), 99,17 persen (2021), 99,68 persen (2022), 99,85 persen (2023) kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 99,84 persen. APS SD Kabupaten Manggarai Timur tergolong tinggi, ini ditunjang oleh ketersediaan SD (swasta dan negeri) sebanyak 330 SD, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin baik dan layak, ketersediaan guru, serta pembiayaan melalui KIP dan BOS yang membuka akses pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian untuk APS SMP mengalami fluktuatif tetapi bersifat positif dimana terlihat pada tahun 2020 berada pada angka 98,95 persen, mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 sebesar 98,66 persen dan 97,41 persen, meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 97,69 persen, dan sedikit menurun pada tahun 2024 sebesar 97,68 persen. Walaupun akses Pendidikan untuk SPM telah dibuka, diperbanyak dan diperbaiki, tetapi kondisi fluktuatif yang terjadi disebabkan karena ada beberapa penduduk usia sekolah SMP yang memilih bersekolah di daerah lain, sehingga hal ini yang memengaruhi kondisi fluktuatif untuk APS jenjang SMP.

Tabel 2. 93 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP/Sederajat

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	99,03	99,17	99,68	99,85	99,84
SMP/MTS	98,95	98,66	97,41	97,69	97,68

Sumber: BPS, 2020-2024 (diolah)

Selain itu masyarakat yang putus sekolah tidak terlepas dari rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anaknya sehingga menimbulkan tingginya permintaan akan pekerja usia anak, di sisi lain jumlah anak dalam keluarga masih cukup tinggi di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga orang tua dengan ekonomi yang kurang mampu, lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, dikarenakan untuk membantu mereka bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi alasan anak menjadi putus sekolah (Hasil DKT, 29 Juli 2024).

Kondisi tren rasio murid terhadap guru merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. Rasio ketersediaan guru murid dilakukan untuk mengukur jumlah ideal murid per guru supaya tercapai efektivitas pengajaran, serta mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Untuk Kabupaten Manggarai Timur rasio guru ASN pada jenjang pendidikan SD terhadap murid pada tahun 2020 sebesar 1:34 kemudian rasio meningkat sampai pada tahun 2022 menjadi 1:39. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 1:35. Selanjutnya pada jenjang SMP rasio guru ASN terhadap murid pada tahun 2020 sebesar 1:75 kemudian membaik sampai pada tahun 2023 sebesar 1:39. Kondisi penurunan yang terjadi bersifat positif karena ketersediaan guru setiap tahun semakin banyak walaupun belum mencapai kondisi ideal dimana untuk SD 1:20 dan SMP 1:20. Kondisi ini timbul akibat persebaran guru yang tidak merata khususnya pada daerah-daerah terpencil di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 94 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP/Sederajat

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Guru SD	1:34	1:37	1:39	1:35	NA
Rasio Guru SMP	1:75	1:59	1:56	1:39	NA

Sumber: Kemendikbud, Neraca Pendidikan, 2020-2024 (diolah)

Tidak hanya partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan SD dan SMP yang tidak merata, namun kondisi partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD) juga rendah di Kabupaten Manggarai Timur. Hal tersebut ditunjukkan dari APK, APM, dan APS PAUD yang masih rendah dibandingkan dengan APK, APM, dan APS SD dan SMP sederajat. APK PAUD di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 hanya sebesar 24,18 persen, dan APM PAUD tahun 2024 sebesar 27,49 persen, sedangkan APS PAUD tahun 2024 sebesar 71,45 persen.

Tabel 2. 95 APK, APM, APS PAUD Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
APK	17,17	16,97	22,21	24,18	NA
APM	NA	NA	17,65	31,81	27,49
APS	NA	NA	NA	69,76	71,45

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manggarai Timur, 2024 (diolah)

Pada jenjang PAUD masih ditemukan kuantitas dan kompetensi guru yang masih minim di Kabupaten Manggarai Timur. Hal tersebut ditunjukkan dari persentase guru PAUD yang tersertifikasi pada tahun 2020 sebesar 1,5 persen, menurun pada tahun 2021 sebesar 0,4 persen, kemudian meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2024 menjadi 9,52 persen guru PAUD tersertifikasi. Dari sisi jenjang pendidikan 32,32 persen guru PAUD yang memiliki jenjang pendidikan kurang dari atau sama dengan D4/S1, sedangkan guru PAUD yang memiliki riwayat pendidikan lebih tinggi dari D4/S1 sejumlah 67,68 persen.

Tabel 2. 96 Jenjang Pendidikan dan Sertifikasi Guru PAUD Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<D4/S1	42	47,7	50.76	33,4	32,32
>D4/S1	58	52,3	49,24	66,6	67,68
Guru PAUD Tersertifikasi	1,5	0,4	5,66	8,54	9,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manggarai Timur, 2024 (diolah)

2) Urusan Kesehatan

Pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakatnya. Baik kondisi kesehatan masyarakat, yang berimplikasi dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Menciptakan masyarakat yang sehat memerlukan upaya-upaya yang holistik, yang dilakukan pemerintah pada saat ini lebih ditekankan kepada upaya promotif dan preventif, serta mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat yang sehat dapat diartikan masyarakat yang bebas dari penyakit, dengan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, serta tercapainya kesejahteraan fisik, sosial, dan mental masyarakat itu sendiri. Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dimulai dari perencanaan yang tepat, dengan mempertimbangkan empat faktor yang memengaruhi yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan keturunan/genetik. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat juga sangat penting. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat melalui parameter seperti Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan angka morbiditas beberapa penyakit.

Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kelahiran atau Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate - TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya. TFR digunakan untuk membandingkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi antardaerah, menunjukkan keberhasilan Program Keluarga Berencana, membantu perencana proyek pembangunan meningkatkan rata-rata usia menikah, dan meningkatkan pelayanan kesehatan terkait detak jantung. Angka Kelahiran di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar 3,39 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 2,8 persen, meningkat kembali tahun 2022 sebesar 3,34 persen, dan menurun pada tahun 2023 menjadi 3,01 persen. Pada tahun 2024, angka kelahiran bayi di Kabupaten Manggarai Timur kembali menurun menjadi 2,86 persen .

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan jumlah kematian bayi di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan status sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian dihitung. Salah satu capaian bidang kesehatan adalah penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Manggarai Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020, angka kematian bayi di Manggarai Timur sebesar 7,5/1000 kelahiran hidup, terus meningkat sampai tahun 2024 terdapat sebanyak 12,20/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak meratanya distribusi SDM Kesehatan (dokter), angka kejadian 4T (Terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu tua, terlalu cepat) dan isu 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai tempat rujukan, terlambat mendapatkan pelayanan). Angka tersebut cukup tinggi menunjukkan bahwa kualitas kesehatan bayi di Kabupaten Manggarai Timur masih buruk.

Tabel 2. 97 Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Bayi	3,39	2,8	3,34	3,01	2,86
Angka Kematian Bayi	7,5	8,5	8,7	11,4	12,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah ibu atau wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu waktu melahirkan dan masa nifas. Angka kematian ibu di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020 sebesar 205,7/100.000 kelahiran hidup. Tahun 2021 sebesar 187,5/100.000 kelahiran hidup. Terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 383,2/100.000 kelahiran hidup dengan 21 kasus kematian ibu. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 212,6/ 100.000 dan 196,8/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 98 Angka Kematian Ibu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKI (Per 100.000 KH)	205,7	187,5	383,2	212,6	196,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

Tingginya angka kesakitan ibu, kematian ibu dan bayi juga timbul dari adanya kondisi dimana masih tingginya kasus kehamilan usia dini, dimana pada tahun pada tahun 2020 sebanyak 336 persalinan usia 15-19 tahun, tahun 2021 sebanyak 307 persalinan, kemudian angka persalinan usia 15-19 tahun terus meningkat hingga tahun 2024 sebanyak 374 persalinan.

Tabel 2. 99 Jumlah Persalinan Usia Dini Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persalinan Usia 15-19 Tahun	336	307	319	360	374
Total Persalinan	5.581	5.955	5.534	5.231	5.080

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dalam upaya pengendalian penyakit menular, Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan data layanan kesehatan dasar, cakupan pelayanan kesehatan untuk orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS meningkat dari 49 persen pada tahun 2019 menjadi 73 persen pada tahun 2024. Demikian pula, pelayanan kesehatan untuk orang terduga tuberkulosis tetap tinggi, dengan cakupan 100 persen pada tahun 2019-2021, meskipun sempat menurun menjadi 90 persen pada 2022 dan 80 persen pada 2023, namun kembali naik menjadi 90 persen pada 2024. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam deteksi dini dan penanganan penyakit menular, meski masih perlu upaya untuk menjaga konsistensi cakupan layanan, khususnya pada tuberkulosis.

Tren peningkatan juga terlihat pada layanan kesehatan untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi meningkat tajam dari 6 persen pada 2019 menjadi 100 persen pada 2024. Hal serupa terjadi pada pelayanan penderita diabetes melitus, yang naik dari 6 persen pada 2019 menjadi 100 persen pada 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perhatian lebih terhadap deteksi, pemantauan, dan pengelolaan penyakit tidak menular di tingkat layanan dasar. Selain itu, persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar juga meningkat dari 14 persen pada 2019 menjadi 100 persen pada 2024.

Secara umum, Kabupaten Manggarai Timur berhasil meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar baik untuk penyakit menular maupun tidak menular dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut terlihat adanya peningkatan cakupan layanan kesehatan untuk penyakit tidak menular seperti pada usia produktif, usia lanjut, hipertensi, dan diabetes melitus selama periode 2019-2024. Namun, penurunan pada tahun 2024 untuk beberapa indikator (usia produktif dan diabetes) perlu menjadi perhatian. Untuk penyakit menular, cakupan pelayanan pada orang terduga tuberkulosis cenderung tinggi meskipun ada penurunan di dua tahun terakhir, sementara cakupan pada orang dengan risiko HIV menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan akses layanan yang stabil dan optimal. Melalui peningkatan layanan kesehatan dasar ini, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2. 100 Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71	75	65	47	55
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79	86	80	78	69

No.	Jenis Layanan Dasar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	83	95	96	84	72
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	81	95	88	92	74
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	72	92	95	53	100
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	26	32	61	99	71
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	28	35	55	86	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21	39	49	88	85
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34	76	98	86	68
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	54	94	120	88
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	90	80
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	49	100	67	79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2019-2024

Status kesehatan juga merupakan aspek penting yang memengaruhi kebugaran jasmani penduduk, dan status kesehatan terutama diukur dari Angka Kesakitan. Warga yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan maka semakin rendah pula derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan maka semakin tinggi derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Kondisi Angka Kesakitan Kabupaten Manggarai Timur ditunjukkan dari tingginya penyakit menular dan tidak menular sejak tahun 2021-2024.

Tabel 2. 101 Penyakit Terbanyak Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021-2024

No.	Nama Penyakit Terbanyak	Jumlah Kasus			
		2021	2022	2023	2024
1.	ISPA	2549	2854	5120	3801
2.	Gastritis	2419	1179	3136	3634
3.	Polimialgia Reumatik	1228	1312	-	-
4.	Hipertensi Esensial	1502	426	3180	4759
5.	Myalgia	1198	950	4308	3597
6.	Artritis Reumatoid	524	668	1596	2171
7.	Darmatis Contak Alergi	449	-	1095	1390
8.	Influenza	345	-	2239	2391
9.	Diare Tanpa Dehidrasi	330	-	-	182
10.	Common Cold	269	-	1094	948
11.	Demam Tifoid Probable	251	-	-	-
12.	Pneumonia Berat	223	-	-	-
13.	Asma Bronkial	166	-	979	227
14.	Kanker Serviks	118	-	-	-
15.	Diabetes Mellitus Tipe 2	109	-	-	471
16.	Dermatitis Atopik	-	806	-	-
17.	Furkel Pada Hidung	-	662	-	-
18.	Anemia Defisiensi Besi	-	476	-	-
19.	Colik Abdomen	-	410	-	-
20.	Rhinofaringitis Acute	-	348	-	-
21.	Gagal Jantung Kronik	-	159	-	-
22.	Hypospadia	-	48	-	-
23.	Kanker Paru-Paru	-	22	-	-
24.	Skabies	-	-	696	535
25.	Osteoartritis	-	-	650	-
26.	Infeksi Saluran Kemih	-	-	639	930
27.	Faringitis Akut	-	-	395	-
28.	Pneumonia	-	-	147	-
29.	Intoleransi Makanan	-	-	126	-
30.	Febris	-	-	-	529
31.	Demam Tifoid	-	-	-	350

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2021-2024

Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Manggarai Timur disebabkan oleh beberapa faktor yakni rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat (PHBS). Nilai PHBS Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2022 hanya sebesar 65,87 persen (Hasil DKT 18 September 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Kabupaten Manggarai Timur masih jauh dari perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Sehingga menimbulkan tinggi penyakit menular yakni ISPA sebanyak 3.801 pada tahun

2024, namun angka ini menurun dari 5.120 pada tahun 2023. Sedangkan penyakit tidak menular tertinggi pada tahun 2024 yakni Hipertensi sebanyak 4.759 yang meningkat dari 3.180 pada tahun sebelumnya.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan untuk mewujudkan cakupan semesta (*Universal Health Coverage*/UHC), memastikan seluruh penduduk Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif tanpa terbebani biaya. Cakupan kepesertaan JKN yang tinggi menjadi indikator krusial dalam mengukur aksesibilitas dan kualitas kesehatan keluarga di suatu daerah.

Berdasarkan data cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Manggarai Timur, menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 cakupan kepesertaan JKN tercatat sebesar 66 persen, yang menunjukkan bahwa masih ada sepertiga lebih penduduk yang belum terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan. Terjadi lonjakan signifikan di tahun 2021, di mana cakupan kepesertaan melonjak drastis hingga mencapai 93 persen, dan pada tahun 2022 cakupan JKN bahkan melampaui 100 persen, yaitu mencapai 102 persen. Peningkatan ini kemungkinan besar didorong oleh intensifikasi program pendaftaran dan subsidi dari pemerintah daerah atau pusat. Sedangkan capaian di atas 100 persen, umumnya mengindikasikan adanya data anomali atau perbedaan dalam data basis penduduk antara data kepesertaan JKN dengan data proyeksi penduduk. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya peserta yang terdaftar ganda, belum mutasi data penduduk, atau perbedaan metodologi perhitungan basis penduduk. Namun di tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam, di mana cakupan kembali ke angka 76 persen, dan pada tahun 2024 cakupan kepesertaan JKN menunjukkan tren peningkatan kembali menjadi 85 persen. Meskipun ada kenaikan dari tahun sebelumnya, angka ini masih berada di bawah capaian tahun 2021 dan 2022,

serta menunjukkan bahwa sekitar 15 persen penduduk Manggarai Timur masih belum menjadi peserta JKN.

Tabel 2. 102 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	66	93	102	76	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

Sarana Kesehatan dan Paramedis

Arah pembangunan kesehatan adalah meningkatkan mutu, cakupan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyediaan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan sangatlah penting. Sebagaimana kita ketahui bersama, pekerjaan kesehatan hanya dapat diwujudkan pada platform pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan. jaringan pelayanan puskesmas terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan data yang tersedia, secara garis besar tenaga medis di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 memiliki total 28 dokter, 6 orang ASN dan 22 orang non ASN, yang bertugas di seluruh puskesmas yang berada di Kabupaten Manggarai Timur. Dokter-dokter ini terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis. Jumlah dokter gigi yang tercatat adalah 12 orang, dengan rincian dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Perawat merupakan tenaga kesehatan terbanyak dengan total 764 orang, dengan rincian status pegawai 465 orang ASN dan 299 orang non ASN. Bidan berjumlah 389 orang dan semua merupakan pegawai non ASN. Para bidan

memiliki peran kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tenaga kesehatan masyarakat berjumlah 142 orang, yang fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Sedangkan, tenaga kesehatan lingkungan berjumlah 52 orang, bertugas memastikan lingkungan yang sehat dan mendukung upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Terdapat 69 tenaga gizi yang berperan dalam penyediaan konsultasi gizi, pemantauan status gizi masyarakat, dan program intervensi gizi. Tenaga ahli teknologi laboratorium medik di Kabupaten Manggarai Timur berjumlah 72 orang dan bertanggung jawab atas pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosis dan pengobatan. Tenaga teknis kefarmasian berjumlah 55 orang, bertugas untuk membantu dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan. Apoteker berjumlah 12 orang, bertugas memastikan penggunaan obat yang tepat dan aman bagi pasien.

Tabel 2. 103 Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Manggarai Timur Tahun 2024

Puskesmas	Dokter		Dokter Gigi		Perawat		Bidan		Kesehatan Masyarakat		Kesehatan Lingkungan		Gizi		Ahli Teknologi Lab. Medik		Tenaga Teknis Kefarmasian		Apoteker	
	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN
Lebi	0	0	0	0	11	7	0	11	2	7	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
Borong	2	2	1	0	31	15	0	26	1	3	2	1	1	2	6	1	2	1	3	0
Tilir	0	1	0	0	12	4	0	11	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1	0	0
Sita	0	1	0	1	20	18	0	19	2	3	1	1	2	0	1	1	1	1	0	0
Lalang	0	1	0	0	15	10	0	12	0	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Kisol	0	1	0	0	17	19	0	12	2	4	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1
Mukun	0	1	0	0	17	17	0	14	3	8	1	1	1	2	1	2	0	2	0	0
Wae Lengga	0	0	0	0	17	8	0	12	1	1	2	0	3	1	2	1	1	2	1	0
Mok	0	0	0	0	15	7	0	11	1	3	2	0	2	1	1	1	0	2	0	0
Ketang	0	1	0	0	12	20	0	13	3	3	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0
Wukir	0	0	0	1	12	2	0	12	1	2	1	1	3	1	1	1	1	2	0	0
Elar	0	1	0	0	15	8	0	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Mamba	0	1	0	0	12	8	0	5	2	1	1	2	1	0	1	1	1	1	0	0

Puskesmas	Dokter		Dokter Gigi		Perawat		Bidan		Kesehatan Masyarakat		Kesehatan Lingkungan		Gizi		Ahli Teknologi Lab. Medik		Tenaga Teknis Kefarmasian		Apoteker	
	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN
Lempang Paji	0	1	0	0	13	5	0	12	2	5	1	0	1	2	1	1	0	1	0	0
Lengko Ajang	1	1	0	1	14	2	0	11	1	2	2	1	1	0	1	1	2	2	0	0
Pota	0	1	0	1	18	19	0	15	1	6	0	2	2	0	1	1	1	1	0	0
Watu Nggong	0	0	0	0	19	11	0	16	2	3	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1
Mano	1	0	0	1	32	21	0	25	1	2	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0
Lawir	0	1	0	1	21	7	0	18	1	2	2	0	1	2	1	1	1	3	1	0
Beamuring	0	1	0	0	14	10	0	9	1	3	2	0	3	0	1	1	1	1	0	0
Colol	0	0	0	1	13	7	0	15	1	3	1	0	1	2	1	1	1	1	0	0
Benteng Jawa	0	1	0	1	15	9	0	16	1	4	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0
Dampek	0	1	0	1	20	17	0	15	1	2	0	3	2	2	1	1	2	0	0	0
Weleng	0	1	0	0	11	8	0	8	2	6	1	0	2	1	1	0	0	0	1	0
Mombok	0	1	0	1	11	9	0	10	2	3	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0
Wae Nenda	0	1	0	0	10	6	0	11	1	3	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0

Puskesmas	Dokter		Dokter Gigi		Perawat		Bidan		Kesehatan Masyarakat		Kesehatan Lingkungan		Gizi		Ahli Teknologi Lab. Medik		Tenaga Teknis Kefarmasian		Apoteker	
	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN	ASN	Non-ASN
Lenang	0	1	0	1	13	5	0	10	1	2	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0
Runus	0	1	0	0	15	5	0	10	0	3	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0
Peot	2	1	0	0	20	15	0	20	3	7	2	3	1	0	2	3	1	1	2	0
Jumlah	**6**	**22**	**1**	**11**	**465**	**299**	**0**	**389**	**42**	**99**	**31**	**21**	**45**	**24**	**34**	**28**	**23**	**32**	**10**	**2**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk keluarga berencana, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare.

Berdasarkan data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2020 sebesar 23,19. Hal ini menunjukkan dari 1000 balita terdapat 23,19 atau 23 posyandu. Rasio posyandu per satuan balita terjadi penurunan tahun 2021 dengan rasio 22,80 per 1000 balita. Tren peningkatan rasio posyandu per satuan balita terjadi tahun 2022 sampai tahun 2024 menjadi 24,81 per 1000 balita. Rasio ideal posyandu per satuan balita menurut Kementerian Kesehatan adalah 1:1000. Dengan demikian, kecenderungan arah perkembangan cakupan ini sejak tahun 2020 senantiasa masih berada dalam tuntutan ideal.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas berbanding 1.000 penduduk. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, bahwa fungsi puskesmas pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 pustu untuk melayani 2 sampai 3 kelurahan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, pada tahun 2020 rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah 1:1.575. Meningkat signifikan menjadi 1:3.861 pada tahun 2021. Tahun 2022 hingga tahun 2024 rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Manggarai Timur mengalami penurunan menjadi 1:2904. Hal ini disebabkan oleh keadaan topografi di Kabupaten Manggarai Timur berada di atas 100 meter dpl dan kondisi tanah yang bergunung-gunung yang menyebabkan akses ke sarana kesehatan sangat jauh.

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Rumah sakit di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1 unit yang mulai beroperasi pada tahun 2022. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 0,0035, dan pada tahun 2022 mencapai 0,0036, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 0,0069 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 0,0068.

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Selain sarana penunjang kesehatan, tenaga medis menjadi salah satu pendukung layanan kesehatan yang ada di suatu daerah. Untuk menghitung jumlah dan rasio tenaga medis maka dihitung berdasarkan akumulasi dari jumlah tenaga yang ada di puskesmas serta tenaga yang bekerja di rumah sakit. Yang termasuk tenaga medis adalah dokter umum, dokter gigi, dr/drg spesialis. Secara keseluruhan kondisi ketersediaan paramedis di Manggarai Timur pada tahun 2020 mencapai 4,03 persen, terjadi peningkatan menjadi

6,44 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024, rasio tenaga medis menurun menjadi 5,54 persen.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Menurut World Health Organization, kondisi ideal tenaga kesehatan dokter dalam memberikan pelayanan adalah 1:2.500 penduduk. Artinya 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk. Pada tahun 2020 rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Manggarai Timur mencapai 0,009 atau 1 dokter melayani 9.000 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan menjadi 0,18 tahun 2023 atau 1 dokter melayani 1.800 penduduk. Sedangkan pada tahun 2024 rasio dokter per satuan penduduk sebanyak 0,13 artinya 1 orang dokter melayani 1.300 penduduk.

Rasio Cakupan Desa UCI

Desa UCI (*Universal Child Immunization*) adalah desa/kelurahan dimana 80 persen jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2020, rasio cakupan desa UCI sebesar 81,82 persen atau 144 desa UCI dari total 176 desa/kelurahan. Rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 89,77 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 88,64 persen dan 85,8 persen.

Tabel 2. 104 Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis

Bidang/Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	23,19	22,80	22,95	24,15	24,81
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	1:1.575	1:3861	1:3540	1:3396	1:2904
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,003	0,004	0,004	0,002	0,006
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4,03	4,87	6,44	5,57	5,54
Rasio Cakupan Desa UCI	81,82	89,77	88,64	85,8	NA
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,09	0,16	0,16	0,18	0,13

Bidang/Urusan/ Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	NA	0,02	0,02	0,02	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber-HPL/HGB. Berikut adalah data persentase ruang terbuka hijau yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 105 Peruntukan Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Perda RTRW	1	1	1	1	1
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Tata Ruang	39,8	31,05	36,11	38,92	42,64
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Per HPL/HGB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Ruang Terbuka Hijau	20,64%	20,64%	20,64%	20,64%	20,64%
Persentase Ruang Publik yg Berubah Peruntukannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Secara umum Kabupaten Manggarai Timur memiliki dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Diketahui pula rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB di Kabupaten Manggarai Timur

sebesar 20,64 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Namun persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase pemanfaatan ruang mencapai 39,8 persen, kemudian turun di tahun 2021 menjadi 31,05 persen, yang kemudian di tahun 2022 kembali naik menjadi 36,11 persen, dan di tahun 2023 meningkat perlahan menjadi 38,92 persen. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 42,64. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu merupakan agenda prioritas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, dengan: a) melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; b) menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah; c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan sebagai rumah

yang sehat serta semakin merata dan menjangkau bagi yang berpenghasilan rendah.

Kabupaten Manggarai Timur memiliki luas kawasan permukiman sebesar 12.920,74 Ha, dengan luas permukiman terbesar berada di Kecamatan Borong sebesar 4556,65 ha (Tabel 2.106). Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berusaha agar masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni melalui berbagai kebijakan dan program, serta pembiayaan di bidang perumahan dan permukiman.

Tabel 2. 106 Luas Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Timur

No.	Nama Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Borong	4556.65
2.	Kota Komba	1140.45
3.	Ranamese	543.53
4.	Kota Komba Utara	435.67
5.	Congkar	395.53
6.	Lambaleda Selatan	1278.44
7.	Lambaleda Timur	498.67
8.	Lambaleda Utara	421.1
9.	Lambaleda	421.1
10.	Sambirampas	1878.87
11.	Elar	662.83
12.	Elar Selatan	687.9
	Luas Wilayah	12.920,74

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, 2023

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah berupaya memanfaatkan 12.701,59 ha dari 12.920,74 ha luas area permukiman untuk membangun permukiman layak huni. Pada tahun 2020 terdapat 60.543 unit rumah di Kabupaten Manggarai Timur. Dari jumlah tersebut sebanyak 79,30 persen unit rumah layak huni di tahun 2018 (Tabel 2.85). Dengan kata lain sebanyak 44.625 unit rumah di Kabupaten Manggarai Timur sudah layak huni. Jumlah tersebut semakin bertambah seiring meningkatnya persentase rumah layak huni di Kabupaten Manggarai Timur setiap tahun. Tahun 2020 persentase rumah layak huni meningkat menjadi 80,42 persen, sedangkan tahun 2021

dan 2022 persentase tetap di angka 80,75 persen, kemudian di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,81 persen, dan tetap 80,81 pada tahun 2024.

Kenaikan persentase rumah layak huni di Kabupaten Manggarai Timur, juga didukung dengan semakin meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih dan bersanitasi. Pada Tabel 2.103 dapat dilihat jumlah rumah tangga pengguna air bersih tahun 2020 di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 18.829 rumah tangga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan secara perlahan hingga di tahun 2024 terdapat 23.579 rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih. Begitu pula untuk jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2020 hanya 20.359 rumah tangga. Kemudian bertambah setiap tahunnya hingga di tahun 2024 terdapat sebanyak 23.803 rumah tangga yang sudah bersanitasi.

Tabel 2. 107 Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur Manggarai Timur 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Layak Huni	80.42	80.75	80.75	80,81	80,81
2	Luas Kawasan Permukiman Layak Huni	12.701,59	12.701,59	12.701,59	12.701,59	12.701,59
3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	18.829	19.560	20.368	23.005	23.579
4	Rumah Tinggal Bersanitasi	20.359	21.257	22.075	23.224	23.803

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Manggarai Timur, 2025

Berdasarkan data Besaran *backlog* perumahan, jumlah rumah tangga di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 3.880 unit, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 7.983 dan total penghuni atau jiwa sebanyak 25.358. Sementara itu, *backlog* perumahan tercatat sebesar 4.033 kepala keluarga (KK). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak kebutuhan rumah dibandingkan dengan jumlah rumah yang tersedia, mengindikasikan bahwa sebagian kepala keluarga belum memiliki rumah yang layak atau bahkan belum memiliki rumah sama sekali. Angka *backlog* sebesar 4.033 KK

menandakan bahwa sekitar 50,5 persen dari total kepala keluarga di Manggarai Timur menghadapi kekurangan tempat tinggal yang layak.

Tabel 2. 108 Data besaran backlog perumahan Manggarai Timur Tahun 2024

Kab/Kota	Rumah Tangga	Kepala Keluarga	Penghuni (Jiwa)	Backlog (Kk)
Manggarai Timur	3.880	7.983	25.358	4.033

Sumber: e-RTLH, 2024

5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dikategorikan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sejajar dengan urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta sosial. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota mencakup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, seluruh tingkatan pemerintahan—pusat, provinsi, dan kabupaten/kota—diwajibkan untuk menyelenggarakan urusan ini secara konsisten dan terukur guna menjamin stabilitas sosial, kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat. Untuk menilai capaian agregat dari pelaksanaan urusan ini, digunakan indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Tabel 2. 109 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	97,78	97,67	100	99	99,33

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 2025

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Pada tahun 2020, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berada pada angka 97,78 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 97,67 pada tahun 2021. Namun demikian, capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai skor sempurna sebesar 100. Meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 99, capaian tersebut kembali membaik menjadi 99,33 di tahun 2024. Secara umum, tren tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang kuat dalam menjaga stabilitas sosial serta menjamin perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Kinerja yang baik ini tentu tidak lepas dari sistem penyelenggaraan yang tersusun dalam kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dibagi ke dalam tiga sub-urusan utama yang saling terkait, yaitu sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub-urusan kebakaran, dan sub-urusan bencana.

a) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebagai bagian dari upaya konkret di lapangan, indikator kriminalitas menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum. Kriminalitas, atau tindak kejahatan,

merupakan tindakan yang melanggar hukum, norma, dan nilai sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Fenomena ini kerap muncul sebagai dampak dari berbagai faktor struktural maupun individual, seperti tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan lingkungan, serta rendahnya kesadaran hukum. Dalam konteks sosial kontemporer, tindak kejahatan bahkan semakin mengkhawatirkan karena terjadi dengan tingkat keberanian dan kekerasan yang tinggi, dimana pelaku tidak lagi mempertimbangkan dampak hukum maupun sosial dari tindakannya, bahkan tidak segan untuk melukai atau menghilangkan nyawa korbannya.

Tabel 2. 110 Angka Kriminalitas Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Jenis Kriminal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Narkoba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Kasus Pembunuhan	N/A	1	1	1	N/A
Jumlah Kejahatan Seksual	2	1	10	0	N/A
Jumlah Kasus Penganiayaan	29	0	38	37	N/A
Jumlah Kasus Pencurian	11	5	20	20	N/A
Jumlah Kasus Penipuan	4	0	4	6	N/A
Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	N/A
Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	46	7	72	N/A	N/A
Jumlah Penduduk	275.603	277.914	280.732	290.790	N/A
Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,017	0,003	0,003	N/A	N/A

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Timur pada periode 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren kasus penganiayaan dan pencurian sebagai yang paling dominan. Pada tahun 2020, tercatat total 46 kasus kriminal, terdiri antara lain dari 29 kasus penganiayaan dan 11 kasus pencurian. Jumlah ini menurun drastis

menjadi hanya 7 kasus pada tahun 2021, namun melonjak kembali pada tahun 2022 dengan 72 kasus, didominasi oleh penganiayaan (38 kasus) dan pencurian (20 kasus). Tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan, di mana jumlah kasus penganiayaan menurun menjadi 37, dan pencurian tetap di angka 20. Meskipun data tahun 2024 belum tersedia secara lengkap, dinamika ini menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang bersifat fisik dan aset tetap menjadi tantangan utama dalam menjaga ketertiban umum di wilayah ini. Selain itu, meskipun angka kejahatan seksual sempat meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2022, tren tersebut berhasil ditekan hingga nol kasus pada tahun 2023, yang menjadi catatan positif bagi perlindungan kelompok rentan. Namun, perlu dicatat bahwa angka kriminalitas hanya merupakan salah satu indikator dari kondisi objektif keamanan wilayah dan harus dilihat bersamaan dengan indikator layanan perlindungan masyarakat lainnya.

Tabel 2. 111 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	2,90	2,88	2,85	0,66	N/A
2.	Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	42,05	41,70	41,28	1138	N/A
3.	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/ Kelurahan	0	0	0	0	0
4.	Cakupan Pelayanan Pol PP	63.89	63.84	65.00	64.67	64.67

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Dalam hal kinerja pelayanan umum perlindungan masyarakat, data selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil namun masih menyisakan beberapa catatan penting. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2022, yakni di kisaran 2,85–2,90, namun mengalami penurunan tajam menjadi 0,66 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya kemungkinan pengurangan jumlah personel aktif atau perubahan dalam metode pencatatan. Hal serupa terjadi pada indikator jumlah Linmas per 10.000 penduduk yang

awalnya konsisten di angka 41 pada periode 2020–2022, namun melonjak secara tidak rasional menjadi 1.138 pada tahun 2023. Angka ini perlu diverifikasi lebih lanjut karena diduga kuat merupakan kesalahan input atau anomali data.

Sementara itu, rasio pos siskamling per desa/kelurahan selama lima tahun tetap berada di angka nol. Ketiadaan pos siskamling menunjukkan belum adanya sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat yang dibentuk secara formal dan terintegrasi dengan struktur pemerintahan lokal. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam membangun ketahanan sosial yang bersifat partisipatif dan preventif. Pada aspek cakupan pelayanan Satpol PP, persentase berada di kisaran 63,84 persen hingga 65,00 persen sepanjang periode evaluasi. Artinya, sekitar sepertiga wilayah administratif Kabupaten Manggarai Timur masih belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan perlindungan masyarakat.

b) Urusan Kebakaran

Sub-urusan kebakaran merupakan bagian integral dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sub-urusan ini meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan dalam situasi kebakaran maupun non-kebakaran, yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan aset masyarakat dari risiko kebakaran. Dalam pelaksanaannya, respons cepat terhadap kejadian kebakaran menjadi salah satu indikator utama untuk menilai efektivitas sistem layanan kebakaran daerah. Berdasarkan data selama lima tahun terakhir, respon cepat penanganan kebakaran di Kabupaten Manggarai Timur tercatat stabil pada angka 30 menit sejak tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 112 Kinerja Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Respon Cepat Penanganan Kebakaran (Menit)	30	30	30	30	30

Sumber: Damkar Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Stabilitas angka respon cepat penanganan kebakaran di angka 30 menit menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki sistem operasional yang relatif terjaga dalam hal kecepatan tanggap. Namun demikian, tidak adanya peningkatan atau percepatan waktu tanggap selama lima tahun terakhir juga mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efisiensi layanan serta peluang penguatan pada sisi sumber daya, infrastruktur, dan koordinasi lapangan. Dalam konteks standar pelayanan minimal (SPM), waktu respon ini masih dapat dianggap memadai, tetapi untuk mencapai pelayanan publik yang unggul dan adaptif terhadap dinamika risiko kebakaran di wilayah kabupaten, diperlukan upaya inovatif seperti sistem peringatan dini, peningkatan armada dan pos jaga, pelatihan personil, serta edukasi masyarakat dalam pencegahan dini.

c) Urusan Bencana

Sub-urusan bencana merupakan salah satu bagian strategis dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks daerah rawan bencana seperti Kabupaten Manggarai Timur, sub-urusan ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Penilaian atas kinerja penanggulangan bencana tidak hanya dilihat dari respons ketika bencana terjadi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menurunkan tingkat risiko bencana secara sistemik dan berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan capaian kinerja

Kabupaten Manggarai Timur dalam aspek penanggulangan bencana selama periode 2020 hingga 2024, ditinjau melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana:

Tabel 2. 113 Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Risiko Bencana	165.80	166.80	156.93	143.74	149.89
2.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	94	100	98	100
3.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.113, kinerja pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Indeks Risiko Bencana (IRB) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan sejak mencapai angka tertinggi sebesar 166,80 pada tahun 2021, menjadi 156,93 pada 2022 dan terus menurun hingga 143,74 pada 2023. Meski terdapat sedikit kenaikan menjadi 149,89 pada 2024, tren tersebut tetap mencerminkan adanya perbaikan dalam hal mitigasi risiko dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta kapasitas kelembagaan daerah.

Capaian penanganan tanggap darurat bencana juga menunjukkan performa yang sangat baik, dengan capaian 100 persen pada tiga tahun (2020, 2022, dan 2024), dan 94 persen serta 98 persen masing-masing pada 2021 dan 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem tanggap darurat telah dilaksanakan dengan responsivitas yang tinggi dan cakupan penanganan yang luas. Keberhasilan ini perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang

sistematis dan terintegrasi, terutama pada aspek perencanaan kontinjensi dan penyediaan logistik.

Selain itu, cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana tercatat stabil di angka 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai terkait potensi bencana. Di sisi lain, indikator penanganan pasca bencana juga menunjukkan hasil yang maksimal, dengan capaian 100 persen sepanjang periode 2020–2024. Konsistensi capaian ini mencerminkan upaya serius dalam pemulihan pasca bencana, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam manajemen bencana, meskipun tantangan tetap ada pada keberlanjutan program, penguatan kapasitas teknis BPBD baik dari segi SDM, sarana dan prasarana penunjang.

6) Urusan Sosial

Persentase penduduk miskin berdasarkan kecamatan diperoleh berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data P3KE menggambarkan kondisi/peringkat kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh BPS yaitu sebesar Rp535.547 pengeluaran/orang/bulan. Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi tercatat di Kecamatan Rana Mese dengan 14,81 persen penduduknya berada dalam kategori miskin ekstrem. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir satu dari tujuh penduduk di Rana Mese menghadapi kondisi kemiskinan yang paling parah. Di sisi lain, beberapa kecamatan menunjukkan persentase penduduk miskin ekstrem yang relatif lebih rendah yaitu Kecamatan Congkar mencatat angka 3,98 persen, Elar sebesar 3,69 persen, dan Sambi Rampas dengan 4,19 persen. Distribusi persentase penduduk miskin ekstrem yang bervariasi antar kecamatan di

Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 mengindikasikan adanya faktor-faktor lokal yang memengaruhi tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi agenda wajib Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan menerapkan 3 (tiga) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dan mengurangi beban pengeluaran. Ketiga strategi ini diturunkan dalam berbagai program/kegiatan yang diharapkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 114 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem

No	Kecamatan	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
1	Sambi Rampas	4,19
2	Congkar	3,98
3	Lamba Leda	5,36
4	Lamba Leda Utara	7,35
5	Kota Komba Utara	7,6
6	Elar	3,69
7	Elar Selatan	7,37
8	Lamba Leda Timur	9,43
9	Rana Mese	14,81
10	Kota Komba	14,3
11	Borong	11,96
12	Lamba Leda Selatan	9,9
	Manggarai Timur	**3,98**

Sumber: Bapperida, 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur merupakan berada di bawah jika dibandingkan garis kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2024, yaitu sebesar Rp 527.275 per kapita per bulan atau lebih rendah 21,4 persen dari garis kemiskinan Indonesia. Tingginya garis kemiskinan di suatu daerah juga mengisyaratkan bahwa harga kebutuhan pokok di daerah tersebut lebih mahal dibandingkan daerah lain yang garis kemiskinannya lebih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya garis kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya dan Kabupaten Manggarai Timur khususnya, antara lain disebabkan

harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah.

Tabel 2. 115Garis Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	344.642	373.972	411.670	446.504	458.116
Provinsi Nusa Tenggara Timur	403.005	415.116	490.909	507.203	527.275
Nasional	458.947	472.525	537.547	550.458	582.932

Sumber: BPS, Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* - P2) merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin atau merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2020 sebesar 1,05 poin, meningkat menjadi 1,32 poin tahun 2021, meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 1,5 poin, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 1,49 poin. Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Manggarai Timur memberikan sinyal bahwa kerentanan penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur masih perlu diwaspadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur merupakan permasalahan penting yang perlu menjadi prioritas pembangunan.

Tabel 2. 116 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	1,05	1,32	1,5	1,49	1,49
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	1,05	0,93	0,8	0,85
Nasional	0,47	0,42	0,38	0,38	0,33

Sumber: BPS, Manggarai Timur dalam Angka, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan) atau merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 sebesar 5,14 poin menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,57 poin (tahun 2023). Hal ini menunjukkan penurunan kemampuan masyarakat miskin dalam memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 2. 117 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Manggarai Timur	4,56	4,74	4,5	4,96	5,27	5,57	5,14
Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,91	4,15	4,02	3,96	3,63	3,33	3,41

Wilayah	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,08	1,02	1,26	1,23	1,16	1,53	1,41

Sumber: Manggarai Timur dalam Angka, 2025

7) Urusan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi karena berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menunjukkan lapangan pekerjaan yang menjadi tumpuan pergerakan ekonomi pada suatu daerah. Status pekerjaan secara umum terbagi menjadi dua jenis yakni pekerja formal dan informal. Pekerjaan formal meliputi status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Selain itu merupakan pekerjaan informal.

Jumlah penduduk yang tercatat bekerja di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren yang fluktuatif yang signifikan namun menunjukkan pertumbuhan positif angkatan kerja yang bekerja dengan peningkatan 22,9 persen dalam 5 tahun yaitu dari 133.276 pada tahun 2020 menjadi 163.892 tahun 2024. Peningkatan tertinggi angkatan kerja yang bekerja terjadi pada tahun 2021-2022 yakni sekitar 163.000 pekerja, sedangkan penurunan drastis terjadi pada tahun 2023 yakni sebanyak 151.641 pekerja. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika sektor ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur. Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah dengan rata-rata 1,7 persen dari total angkatan kerja, tetapi menunjukkan peningkatan sebesar 34,5 persen pada tahun 2023 atau 3.810 orang seiring penurunan jumlah pekerja, dan penurunan signifikan sebesar 30 persen pada tahun 2024 atau 2.666 orang. Penurunan angka pengangguran terbuka pada tahun 2024 merupakan perkembangan positif, namun fluktuasi yang terjadi selama periode 2020-2024 mengindikasikan adanya kerentanan pasar tenaga kerja terhadap guncangan ekonomi.

Tabel 2. 118 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bekerja	133.276	163.333	163.357	151.641	163.892
2	Pengangguran Terbuka	2.831	3.184	3.093	3.810	2.666

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting mengenai kualitas sumber daya manusia dan potensi pasar tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur. Kelompok angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD) secara konsisten mendominasi jumlah keseluruhan angkatan kerja selama periode 2020-2024. Meskipun terjadi penurunan bertahap dari 100.548 pada tahun 2020 menjadi 94.728 pada tahun 2024, jumlah ini tetap merupakan proporsi terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah. Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SMP menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan dari 24.727 pada tahun 2020 menjadi 23.828 pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 sebesar 19.186 dan tahun 2023 sebesar 14.267. Namun pada tahun 2024, terjadi lonjakan kembali menjadi 23.512. Kelompok angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SMA menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, jumlahnya meningkat dari 21.170 pada tahun 2020 menjadi 34.466 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah lulusan SMA yang memasuki pasar kerja. Sementara itu, jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi Perguruan Tinggi juga menunjukkan tren peningkatan secara umum, meskipun dengan sedikit penurunan pada tahun 2024. Jumlahnya meningkat dari 14.451 pada tahun 2020 menjadi 23.007 pada tahun 2023, sebelum kemudian menurun menjadi

21.107 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Tabel 2. 119 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah Dasar	100.548	98.770	96.479	95.015	94.728
2	Sekolah Menengah Pertama	24.727	23.828	19.186	14.267	23.512
3	Sekolah Menengah Atas	21.170	26.099	31.118	31.603	34.466
4	Perguruan Tinggi (S1/S2/S3)	14.451	14.636	19.727	23.007	21.107
5	Jumlah Angkatan Kerja	160.896	163.333	166.510	163.893	173.813

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Timur, 2025

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kemiskinan, pernikahan dini, kriminalitas hingga kekerasan pada anak dan kekerasan berbasis gender merupakan beberapa hambatan bagi perempuan dan anak untuk dapat memiliki kebebasan dalam berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan masih terdapat kasus kekerasan pada perempuan dan anak yakni sebanyak 21 kasus pada tahun 2021, terdapat 7 kasus pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebanyak 8 kasus. Kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat tajam menjadi 22 kasus di tahun 2024. Sedangkan rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2021 senilai 0,0037. Rasio ini terus menurun hingga tahun 2024 dengan nilai 0,006. Hal ini menunjukkan walaupun masih terdapat kasus kekerasan namun masih dapat tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 120 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	NA	0,0037	0,0006	0,006	0,006
2	Jumlah Kasus Kekerasan	NA	12	7	8	22

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2024

9) Urusan Pangan

Manggarai Timur sejauh ini berhasil membangun fondasi kedaulatan pangan yang kokoh dari sisi produksi. Pada tahun 2024, total produksi gabah kering (padi sawah) mencapai 102.076,5 ton, atau setara dengan 220 kg per kapita per tahun. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat setempat, yang hanya berkisar 146 kg per tahun. Secara kuantitatif, surplus produksi ini menandakan bahwa Manggarai Timur secara teoritis mampu memenuhi—atau bahkan mengekspor—kebutuhan beras penduduknya.

Namun, capaian produksi yang melimpah belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan menjemput kualitas dan kontinuitas pasokan. Sistem pengelolaan pasca panen masih menghadapi kendala signifikan, mulai dari fasilitas pengeringan yang terbatas, kurangnya sarana penyimpanan aman seperti silo atau gudang terkontrol, hingga minimnya pelatihan bagi petani tentang teknik penanganan gabah. Akibatnya, terjadi tingkat kehilangan hasil panen (*post-harvest loss*) yang masih cukup tinggi, sehingga sebagian surplus produksi gagal menjadi stok beras berkualitas untuk cadangan lokal.

Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi indikator penting dalam

menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi di daerah. Dalam konteks Kabupaten Manggarai Timur, capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) selama periode 2020–2024 mencerminkan dinamika kondisi sosial ekonomi serta efektivitas kebijakan pembangunan sektor pangan.

Pada tahun 2020, nilai IKP Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 65,58, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 61,74, yang terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pandemi memberikan tekanan terhadap rantai pasok pangan, daya beli masyarakat, serta produktivitas sektor pertanian, sehingga berpengaruh langsung pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Seiring dengan pemulihan ekonomi dan intervensi pemerintah daerah, IKP menunjukkan tren positif pada tahun-tahun berikutnya: meningkat menjadi 65,49 pada tahun 2022, 66,69 pada tahun 2023, dan 66,92 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas petani, penguatan produksi pangan lokal, dan perbaikan distribusi pangan yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi.

Selain IKP, kebutuhan dan konsumsi pangan juga mengalami perubahan. Selama periode 2020–2024, Kabupaten Manggarai Timur secara umum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan produksi lokal yang terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi pangan sudah melebihi kebutuhan, dengan sedikit tambahan dari luar daerah. Tahun 2022 menjadi titik tertinggi surplus pangan, ketika produksi mencapai lebih dari 63 juta kg, sementara kebutuhan menurun menjadi 31 juta kg, mencerminkan perubahan pola konsumsi atau jumlah penduduk. Meski pada tahun 2023 produksi menurun, kebutuhan tetap dapat dipenuhi. Tahun 2024 mencatat produksi tertinggi sebesar 73,88 juta kg, dengan total ketersediaan mencapai 76,69 juta kg, jauh melampaui kebutuhan sebesar 47 juta kg.

Dari sisi keragaman pangan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Manggarai Timur tahun 2024 hanya mencapai 67. Angka ini mencerminkan rendahnya diversifikasi pola makan masyarakat, yang masih sangat tergantung pada

beras sebagai sumber kalori utama. Ketergantungan ini membuat konsumen rentan terhadap lonjakan harga beras dan gangguan pasokan, serta membatasi asupan gizi optimal dari sumber pangan lain seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, dan protein hewani.

Di tingkat desa, ketimpangan akses pangan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Sebanyak 45 desa—atau sekitar 26 persen dari total 159 desa di Manggarai Timur—masih dikategorikan rawan pangan. Desa-desa ini, yang tersebar di kawasan pegunungan dan pulaunya, kerap menghadapi kendala logistik dan keterbatasan infrastruktur, sehingga ketersediaan pangan berkualitas dan terjangkau belum merata. Selain masalah kuantitas dan distribusi, aspek keamanan pangan pun menuntut perhatian serius. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa 20 persen sampel pangan di pasar-pasar lokal masih mengandung residu pestisida melebihi batas aman. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap produk lokal.

Secara keseluruhan, meski Manggarai Timur memiliki kelebihan produksi yang kuat, tantangan hilirisasi pasca panen, diversifikasi pangan yang rendah, ketimpangan akses antar-desa, dan isu keamanan pangan menegaskan bahwa kedaulatan pangan sejati tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan. Upaya ke depan perlu difokuskan pada peningkatan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan, pelatihan teknik pasca panen, program diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan pestisida—semuanya demi mewujudkan sistem pangan yang mandiri, sehat, dan inklusif di Manggarai Timur.

10) Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Kabupaten Manggarai Timur difokuskan pada upaya menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan pertanahan

yang tertib dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah, penyelesaian konflik agraria, serta peningkatan kepastian hukum atas hak atas tanah. Tingkat keteraturan administrasi pertanahan diukur melalui Indeks Tertib Administrasi Pertanahan, yang mencerminkan kualitas tata kelola, pendataan, dan pelayanan pertanahan di wilayah ini.

Tabel 2. 121 Indeks Penatagunaan Tanah di Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penatagunaan Tanah	N/A	35	47,7	37,33	47,5

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Di Kabupaten Manggarai Timur, data indeks ini mulai tersedia sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut, indeks tercatat sebesar 35, lalu meningkat signifikan menjadi 47,7 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 37,33, yang kemudian kembali naik menjadi 47,5 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa upaya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang, serta penegakan hukum pertanahan yang lebih tegas untuk menjaga keberlanjutan dan keteraturan pemanfaatan lahan di daerah ini.

Pertanahan dalam suatu wilayah yang isinya mengacu pada area atau kawasan tertentu di wilayah yang memiliki dokumentasi resmi berupa sertifikat sebagai bukti legal atas kepemilikan atau hak atas tanah yang mencakup informasi terkait luas dan batas-batas tertentu dari tanah tersebut. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pihak yang tercatat dalam dokumen tersebut memiliki hak sah untuk memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sertifikat ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah Manggarai Timur.

Tabel 2. 122 Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	4,1	4,4	5,1	5.18	N/A
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100	100	100	37,5	100
3.	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100
4.	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Kinerja pertanahan di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi di beberapa indikator utama. Dari sisi persentase luas lahan bersertifikat, terjadi peningkatan bertahap dari 4,1 persen pada tahun 2020 menjadi 5,18 persen pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat legalisasi aset tanah, meskipun data untuk tahun 2024 belum tersedia.

Pada indikator penyelesaian kasus tanah negara, capaian menunjukkan konsistensi penuh di angka 100 persen dari tahun 2020 hingga 2022, namun menurun drastis menjadi 37,5 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya hambatan dalam penyelesaian kasus yang dapat berkaitan dengan kompleksitas sengketa atau keterbatasan kapasitas penyelesaian di tingkat daerah, sebelum kembali pulih ke 100 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, penyelesaian izin lokasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan konsistensi di angka 100 persen sepanjang lima tahun terakhir, yang mengindikasikan efisiensi dan kepastian dalam pelayanan perizinan terkait pemanfaatan tanah. Selain itu, pada tahun 2024 mulai tercatat

indikator baru yaitu persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, yang berhasil diselesaikan secara penuh (100 persen), mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, yaitu sebagai fondasi keberlanjutan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari risiko bencana ekologis dan pencemaran. Berdasarkan data kinerja lingkungan hidup pada Tabel 2.119, capaian Indikator kinerja utama dapat dilihat dari indeks lingkungan hidup, persentase pengelolaan lingkungan hidup dan PAD sektoral. Indeks Lingkungan Hidup mengalami peningkatan yang signifikan dari 29,49 pada tahun 2020 menjadi 144,84 pada tahun 2024. meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2021 sampai 2023, peningkatan signifikan pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan substansial dalam lingkungan secara umum. Namun demikian, persentase pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan adanya peningkatan dari 69,58 persen pada tahun 2022 menjadi 71,00 persen pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 belum dilakukan penghitungan. Sedangkan pada PAD daerah, urusan lingkungan hidup terus menurun pada tahun 2024 hanya mencapai Rp37.433.000.

Tabel 2. 123 Kinerja Lingk

No	Indikator kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
1	Indeks Lingkungan Hidup	indeks	29,49	76,85	78,08	78,56	144,84
2	Persentase Pengelolaan	%	26,16	71,5	69,58 %	71,00%	0

No	Indikator kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Lingkungan Hidup						
3	PAD Sektoral	Rp	65.614.000	87.600.500	107.597.500	78.757.500	37.433.500
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM							
4	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan	%	0	0	100%	100%	100%
5	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	%	0	0	100%	100%	0
6	Persentase Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang Dikelola	%	0	0	70%	70%	100%
7	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	%	0	0	0%	0%	52,48%
8	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH yang Diakui Keberadaannya	%	0	0	0	13,79%	0%
9	Persentase lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan	%	0	0	0	66,67%	0,00%

No	Indikator kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	kapasitas dan kompetensinya						
10	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	0	0	0	9%	0%
11	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur	%	0	55%	100%	52%	0%
12	Persentase Sengketa Lingkungan Hidup Yang Tertangani	%	100%	100%	100%	100%	0
13	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manggarai Timur	%	1%	1%	1,89%	5,70 %	61,79

Melihat dari sisi pengelolaan sampah, Kabupaten Manggarai Timur baru melakukan penanganan yang terpusat di Borong sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Timur dan sekitarnya, mengingat kepadatan penduduk dan tingkat aktivitas masyarakatnya sangat tinggi sehingga potensi menghasilkan sampah juga sangat tinggi. Di samping itu ketersediaan sumber daya juga turut memengaruhi pengelolaan sampah yang belum menjangkau semua wilayah di Kabupaten Manggarai Timur.

Jumlah sampah perkotaan di Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, hingga di tahun 2024 jumlah sampah mencapai 3.854,4 ton. Banyaknya sampah di Kabupaten Manggarai Timur, tidak menjadi masalah berat karena penanganan sampah selama tahun 2020-2024 setiap harinya semakin membaik. Dari jumlah sampah tersebut, persentase volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 47,71 persen sedangkan sampah yang dikelola RT sebanyak 52,29 persen.

Tabel 2. 124 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kecamatan Borong

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	3.372,6	3.372,6	3.372,6	1.460	1.839
2	Jumlah Volume produksi sampah (ton)	6.224,42	6.334,94	6.457,58	3.854,4	3.854
3	Persentase tidak tertangani	45,82	46,76	47,77	4,22	52,29
4	Persentase tertangani	54,18	53,24	52,23	95,78	47,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Tahap pertama operasional penanganan sampah adalah pewadahan pada tingkat sumber timbulan (masyarakat). Pewadahan dimaksudkan untuk mencegah sampah berserakan dan mempermudah proses pengumpulan. Berdasarkan observasi langsung terlihat bahwa pada umumnya masyarakat di perumahan/permukiman lebih memilih membakar sampah, sedangkan sampah organik khususnya sampah sisa makanan dan sayuran diberikan pada hewan ternak. Tempat pewadahan organik dan anorganik berupa tong sampah sudah tersedia namun belum adanya edukasi kepada masyarakat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan dan masih mencampur sampah organik dan anorganik. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan dengan menggunakan dump truck dan kendaraan roda tiga untuk dipindahkan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS di Kabupaten Manggarai Timur berjumlah 3 unit yang berlokasi di Kecamatan Borong. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Timur berakhir di

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mbo Lopi yang berlokasi di Kelurahan Tanah Rata Kecamatan Kota Komba. TPA ini dibangun sejak tahun 2016 dan beroperasi sejak tahun 2017. Sistem yang digunakan yaitu Controlle Land Fill. Luas area TPA Mbo Lopi yaitu 5,6 ha dengan luas unit pengolahan sampah adalah 2 ha. Kapasitas TPA Mbo Lopi yaitu 100.000 m2.

Sumber dan jenis sampah yang diolah di Kabupaten Manggarai Timur dilakukan menurut sumbernya terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sedangkan menurut jenisnya terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Sumber sampah di Kecamatan Borong sebagian besar bersumber dari rumah tangga atau rumah warga, pertokoan dan kios, sekolah, kantor, pasar, hotel, rumah makan, puskesmas, terminal, bengkel kayu dan bengkel besi.

Volume sampah yang masih besar diakibatkan oleh meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, tidak diimbangi dengan jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) oleh pemerintah. Rasio TPS terhadap jumlah penduduk di Kecamatan Borong ditampilkan dalam Tabel 2.125. Rasio tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap jumlah penduduk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang fluktuatif dari 0,73 menjadi 0,96, namun di tahun 2022 hingga 2024 nilai rasio tidak mengalami kenaikan atau bersifat tetap. Meskipun jumlah buangan meningkat setiap tahun, namun dari tahun 2020 sampai dengan 2024 hanya tersedia terdapat 12 TPS dan pada tahun 2022 terdapat penambahan 4 TPS baru.

Tabel 2. 125 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPS	12	12	12	12	12
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	31,68	31,68	39,6	39,6	39,6

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Jumlah Penduduk	42.633	43.390	44.230	44.230	44.230
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,74	0,73	0,96	0,96	0,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Kegiatan pengukuran kualitas lingkungan dilakukan untuk memperoleh nilai indeks dari kinerja yang dilakukan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tabel 2.122 menyajikan uji pencemaran air, tanah dan udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur dalam kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan Tabel 2.122 dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan titik uji pencemaran udara yakni hanya 4 titik. Sedangkan untuk titik uji pencemaran air mengalami penurunan menjadi hanya 3 titik sampel pada tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya jumlah titik sampel uji pencemaran air dari tahun 2020-2022 berjumlah 9 titik sampel.

Tabel 2. 126 Uji Pencemaran Air, Tanah, dan Udara Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Uji Pencemaran Air	9 Titik	9 Titik	9 Titik	3 Titik	3 Titik
2	Uji Pencemaran Tanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Uji Pencemaran Udara	4 Titik	4 Titik	4 Titik	4 Titik	4 Titik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Lebih lanjut, total rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan 5 tahun terakhir mencapai 10.183 hektar. Dari jumlah total luasan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif yang dilakukan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 6.515 hektar di tahun 2019 dan 1.816 hektar tahun 2021, jumlah rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur hanya sebanyak 455 hektar tahun 2019 dan sebanyak 75 hektar tahun 2021. Akan tetapi, berbeda dengan perhitungan yang hanya sekali tidak dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur,

perhitungan terkait rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif Manggarai Timur hanya dilakukan pada tahun 2019 dan 2021, pada 2020, 2022, dan 2023 tidak dilakukan perhitungan sehingga tidak ada data terbaru yang tersedia. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 127 Total Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Manggarai Timur	455	-	75	-	-
Nusa Tenggara Timur	6.515	-	1.816	1.445	407

Sumber: DLHK Provinsi NTT, 2024

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan untuk mewujudkan layanan yang efektif dan efisien, guna memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Pelayanan yang berkualitas dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta dokumen identitas lainnya menjadi dasar dalam mendukung berbagai sektor pembangunan dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat. Capaian kualitas layanan ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang mencerminkan persepsi publik terhadap kemudahan akses, kecepatan layanan, dan keandalan sistem administrasi yang diterapkan.

Tabel 2. 128 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	N/A	82,19	83,02	83,02	81,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 82,19 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 83,02 pada tahun 2022, yang kemudian tetap pada angka yang sama di tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 81,92. Meskipun terjadi fluktuasi, capaian IKM yang secara konsisten berada di atas angka 80 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa cukup puas terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan yang diberikan. Namun demikian, penurunan di tahun terakhir menjadi catatan penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan agar kepuasan masyarakat dapat kembali ditingkatkan.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, tertib, dan berbasis data. Dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai identitas hukum warga negara, tetapi juga menjadi pintu akses terhadap berbagai layanan dasar publik. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kependudukan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas institusi daerah dalam menjamin hak-hak sipil warganya. Kabupaten Manggarai Timur, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terus berupaya meningkatkan capaian layanan melalui sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembaruan data, dan pelayanan prima. Evaluasi capaian indikator pelayanan kependudukan selama lima tahun terakhir menjadi dasar penting dalam menilai keberhasilan kebijakan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki ke depan.

Tabel 2. 129 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Penduduk Ber KTP	0,89	0,95	0,95	0,99	0,99
2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,77	0,95	0,91	0,92	1,00
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,23	0,44	0,46	0,68	0,64
4.	Kepemilikan KTP	160.451	189.847	192.242	197.566	212.652
5.	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	76,59%	95,32%	90,60%	92,13%	100%
6.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96,44%	81,19%	83,15%	70,48%	96,44%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja pelayanan kependudukan menunjukkan perkembangan yang umumnya positif. Rasio penduduk ber-KTP meningkat dari 0,89 pada tahun 2020 menjadi 0,99 pada tahun 2023 dan tetap stabil di 2024. Secara absolut, jumlah pemilik KTP bertambah dari 160.451 jiwa pada 2020 menjadi 212.652 jiwa pada 2024. Peningkatan serupa juga terjadi pada rasio bayi berakte kelahiran yang mencapai 100 persen di tahun 2024, sebuah pencapaian penting dalam pemenuhan hak sipil anak sejak dini. Rasio pasangan yang memiliki akta nikah meningkat dari 0,23 pada 2020 menjadi 0,68 pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 0,64 pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam legalitas pernikahan, namun juga menunjukkan perlunya penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Capaian kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk meningkat signifikan dari 76,59 persen pada 2020 menjadi 100 persen pada 2024, menunjukkan efektivitas program jemput bola atau layanan akta kelahiran di daerah-daerah terpencil.

Seluruh tahun dalam periode evaluasi menunjukkan keberadaan database kependudukan skala kabupaten dan penerapan sistem KTP Nasional berbasis NIK. Ini mencerminkan keberlanjutan sistem administrasi yang terstandar dan menjadi dasar integrasi data di berbagai sektor layanan publik. Namun demikian, indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan mengalami fluktuasi. Setelah mencatat angka tinggi pada 2020 (96,44 persen), angka ini menurun tajam hingga 70,48 persen pada 2023, sebelum kembali membaik ke 96,44 persen di 2024. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian data antara pencatatan dan dokumen fisik yang dimiliki warga atau keterbatasan akses layanan pada masa tertentu.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembentukan kelompok binaan, penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penyuluhan, bantuan modal usaha, fasilitasi akses pelayanan publik, dan lain-lain. Sebagai kabupaten yang relatif baru, Kabupaten Manggarai Timur memiliki tantangan dan potensi dalam pembangunan, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dari data pada Tabel Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Desa Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 di bagian sub bab persentase desa mandiri dapat dilihat bahwa klasifikasi desa dilakukan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat desa dari aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Ada lima kategori klasifikasi desa, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.

Dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Manggarai Timur mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan desa. Jumlah total desa tetap sebanyak 159 desa, namun terjadi pergeseran positif dalam klasifikasi desa, dari kategori tertinggal menuju kategori berkembang dan maju. Pada tahun 2020, mayoritas desa berada dalam kategori desa tertinggal (83 desa), sementara desa berkembang hanya berjumlah 72, dan desa maju masih sangat sedikit yaitu 4 desa. Tidak ada desa yang masuk kategori mandiri maupun sangat tertinggal. Seiring berjalannya waktu, proporsi desa tertinggal menurun drastis menjadi hanya 19 desa pada tahun 2024, sedangkan jumlah desa berkembang meningkat menjadi 128 desa. Jumlah desa maju juga meningkat konsisten, dari 4 desa pada 2020 menjadi 12 desa pada 2024. Ini menunjukkan arah pembangunan desa yang semakin inklusif dan berhasil mendorong kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat desa. Tidak adanya desa yang tergolong sangat tertinggal selama lima tahun terakhir juga menjadi indikator positif bahwa intervensi program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dasar berjalan dengan baik.

Selain klasifikasi status Desa, capaian pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator lainnya seperti Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Jumlah LSM, LPM Berprestasi, PKK aktif dan Posyandu aktif. Capaian pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2. 130 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Manggarai Timur

No	Pemberdayaan Masyarakat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0	0	0	0	0
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	9	9	9	9	12
3	Jumlah LSM	1	3	6	6	0
4	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
5	PKK Aktif	186	186	189	171	189

No	Pemberdayaan Masyarakat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Posyandu Aktif	561	587	587	594	598

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Dari data pada Tabel 2.126 dapat disimpulkan bahwa capaian pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan yang cukup baik selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah LSM, PKK aktif, dan posyandu aktif, yang menunjukkan tingkat kerjasama, pemberdayaan perempuan dan anak-anak, serta kesadaran kesehatan masyarakat desa di kabupaten ini. Namun demikian, tidak ada jumlah kelompok binaan LPM dan LPM Berprestasi, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan partisipasi, kemandirian, profesionalisme, dan akuntabilitas masyarakat desa dalam pembangunan.

Tabel 2. 131 Data Kinerja Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Borong	18	18	18	18	18
Rana Mase	21	21	21	21	21
Kota Komba	11	11	11	11	11
Kota Komba Utara	11	11	11	11	11
Elar	15	15	15	15	15
Elar Selatan	14	14	14	14	14
Sambi Rampas	9	9	9	9	9
Congkar	11	11	11	11	11
Lamba Leda Selatan	24	24	24	24	24
Lamba Leda Timur	18	18	18	18	18
Lamba Leda	13	13	13	13	13
Lamba Leda Utara	11	11	11	11	11
	176	176	176	176	176

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur, 2024

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam pembangunan, penduduk berperan sebagai objek dan subjek. Ketika mereka dikelola dengan baik, mereka menjadi modal pembangunan yang esensial untuk pembangunan yang maju dan terus berkembang.

Penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Perubahan variabel-variabel kependudukan, seperti fertilitas atau kelahiran, dipicu oleh pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Namun, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel kependudukan, seperti usia perkawinan.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang beragam dalam upaya mengelola pertumbuhan penduduk dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan dimana pada tahun 2020 angka LPP negatif -0,04 persen, kemudian LPP terus meningkat menjadi positif mencapai 0,008 persen pada tahun 2021, 0,010 persen pada tahun 2022, 0,0197 persen pada tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 1,94 persen pada tahun 2024. *Total Fertility Rate* (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan fluktuasi namun cenderung menurun dalam jangka panjang. Pada tahun 2020, TFR tercatat sebesar 3,39, kemudian menurun menjadi 2,80 pada tahun 2021, meningkat kembali menjadi 3,34 pada tahun 2022, menurun lagi menjadi 3,01 pada tahun 2023, dan mencapai angka terendah dalam periode ini yaitu 2,86 pada tahun 2024. Penurunan TFR secara umum mengindikasikan adanya keberhasilan program KB dalam menekan angka kelahiran. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Manggarai Timur cenderung stabil di angka 3-4 anak selama periode 2020-2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun TFR mengalami fluktuasi, pola jumlah anak dalam keluarga relatif tidak banyak berubah. Persentase akseptor KB di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren yang menurun secara keseluruhan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase akseptor KB mencapai 77,52 persen, menurun menjadi 74,31 persen pada tahun 2021, kemudian turun lebih signifikan menjadi 68,74 persen pada tahun 2022, dan meningkat kembali

menjadi 79,24 persen pada tahun 2023, namun kembali menurun tajam menjadi 67,19 persen pada tahun 2024. Sedangkan, cakupan KB aktif yang mengukur proporsi pasangan usia subur yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi, menunjukkan tren yang serupa dengan persentase akseptor KB. Pada tahun 2020, cakupan KB aktif tercatat sebesar 77,52 persen, menurun menjadi 75 persen pada tahun 2021, turun lagi menjadi 68,74 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 79,24 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun signifikan menjadi 66,93 persen pada tahun 2024. Penurunan cakupan KB aktif yang signifikan pada tahun 2024 sejalan dengan penurunan persentase akseptor KB dan mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif pasangan usia subur dalam program KB.

Tabel 2. 132 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	-0,04	0,008	0,010	0,0197	1,94
2.	*Total Fertility Rate* (TFR)	3,39	2,80	3,34	3,01	2,86
3.	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	3-4	2-3	3-4	3-4	3-4
4.	Persentase Akseptor KB	77,52	74,31	68,74	79,24	67,19
5.	Cakupan KB Aktif	77,52	75	68,74	79,24	66,9.3

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2020-2024

15) Urusan Perhubungan

Capaian kinerja perhubungan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja yakni Indeks Konektivitas Antar-Kecamatan (Pulau), Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum), Jumlah Izin Trayek, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Persentase Layanan Angkutan Umum, Tingkat Ketersediaan Rambu, dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.133 Capaian Kinerja

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Konektivitas Antar Kecamatan (Pulau)	15,66	11,75	11,75	11,75	11,75
2	Rasio Konektivitas	42,55	44,82	48,79	49,92	50,49
3	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum)	24.824	10.884	18.232	8.000	11200
4	Jumlah Izin Trayek	82	82	82	82	82
5	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	0	0	0	0	N/A
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	0	0	0	N/A
7	Persentase Layanan Angkutan Umum	5,41	5,35	5,30	5,26	5,25
8	Tingkat Ketersediaan Rambu	64	76	76	76	76
9	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	45,11	45,34	45,5	45,65	45,73

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Berdasarkan data Indeks Konektivitas Antarkecamatan (pulau), pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami penurunan dan bernilai tetap di tahun 2024. Pada kondisi akhir (tahun 2021 dan 2024) menunjukkan angka 11,75 persen artinya belum maksimalnya perencanaan pengembangan regional, transportasi, ekonomi, dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Kondisi tersebut juga didukung dengan data rasio konektivitas Kabupaten Manggarai Timur yang masih rendah walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 rasio konektivitas Manggarai Timur hanya mencapai 43,55, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 44,82, tahun 2022 menjadi 48,79, di tahun 2023 menjadi 49,92, dan di tahun 2024 menjadi 50,49.

Selain itu terdapat data data kecelakaan tahun 2024 yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data pada Tabel 2.130 data kecelakaan Manggarai Timur berjumlah 55 dari total laka NTT berjumlah 1593, yang mana dari 414 orang di NTT tewas akibat kecelakaan, terdapat sebanyak 8 orang dari Manggarai

Timur. Pada aspek korban luka berat, NTT mencatatkan 620 orang, sementara Manggarai Timur menyumbang 10 korban. Untuk korban luka ringan, NTT mencatat 1.867 kasus, sedangkan Manggarai Timur menyumbang 84 kasus. Secara keseluruhan, jumlah total korban kecelakaan (meninggal, luka berat, dan luka ringan) di NTT adalah 2.901 orang, dan dari jumlah tersebut, 102 orang berasal dari Manggarai Timur.

Tabel 2. 134 Data Kecelakaan Lalu Lintas Manggarai Timur Tahun 2024

Polres	Jumlah Laka	Mati	Luka Berat	Luka Ringan	Total Korban
Nusa Tenggara Timur	1593	414	620	1867	2901
Manggarai Timur	55	8	10	84	102

Sumber: Kepolisian Daerah NTT, 2024

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Manggarai Timur memiliki peran strategis dalam mendukung visi transformasi pelayanan publik berbasis digital. Tujuan utama dari penguatan urusan ini adalah terwujudnya transformasi pelayanan publik berbasis digital yang mampu meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan transparansi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintahan bukan hanya ditandai oleh penerapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Tabel 2. 135 Kinerja Komunikasi dan Informatika Manggarai Timur

	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1,53	1,15	2,46	2,62	2,64
2	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan	22,22	22,22	22,22	22,22	N/A
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	63	83	83	89	N/A
4	Persentase Penduduk yang Menggunakan Telepon/HP	30,66	42,07	43,65	43,65	N/A
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	14,93	27,51	0,00	27,51	N/A
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	N/A	N/A	N/A	13	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Manggarai Timur, 2025

Sejumlah indikator kinerja menunjukkan capaian yang beragam. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mengalami peningkatan signifikan dari 1,53 pada tahun 2020 menjadi 2,64 pada tahun 2024, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan penguatan tata kelola pemerintahan digital yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Namun, Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan masih stagnan pada angka 22,22 persen sepanjang 2020 hingga 2023, yang menunjukkan perlunya intervensi untuk memperluas peran masyarakat sebagai simpul informasi di tingkat lokal.

Di sisi infrastruktur, cakupan layanan telekomunikasi meningkat dari 63 persen pada tahun 2020 menjadi 89 persen pada 2023, mengindikasikan perluasan akses jaringan di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Penggunaan telepon/HP oleh penduduk juga menunjukkan tren naik dari 30,66 persen pada 2020 menjadi 43,65 persen sejak tahun 2022, meskipun stagnan di tahun berikutnya.

Sementara itu, akses rumah tangga terhadap internet mengalami fluktuasi. Setelah meningkat dari 14,93 persen (2020) ke 27,51 persen (2021), data menunjukkan anomali dengan nilai 0 persen pada 2022, kemungkinan karena ketidak catatan atau kendala pengumpulan data, sebelum kembali ke angka 27,51 persen pada 2023. Kepemilikan komputer pribadi baru mulai tercatat pada tahun 2023, dengan angka sebesar 13 persen, menandakan bahwa pemanfaatan perangkat teknologi masih terbatas pada sebagian kecil rumah tangga.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, khususnya di daerah-daerah. Koperasi dan UKM dapat memberikan lapangan kerja, pendapatan, dan pelayanan bagi anggota dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan koperasi dan UKM di daerah. Salah satu indikator untuk mengukur capaian kinerja koperasi dan UKM adalah persentase koperasi aktif dan omset per koperasi aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha secara berkelanjutan, memiliki administrasi yang tertib, dan melaksanakan rapat anggota tahunan. Omset per koperasi aktif adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh koperasi aktif dalam satu tahun. Adapun capaian Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2. 136 Capaian Kinerja Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Koperasi Aktif	43%	45%	71,43%	71,11%	51%
2	Omset Per Koperasi Aktif (Ribu Rupiah)	105.261	111.130	180.048	180.048	199.332.
3	Jumlah UKM Non-BPR/LKM UKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah BPR/LKM	30	30	30	30	30
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menggunakan Layanan BPR/LKM UKM	86%	75%	67%	67 %	67 %
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas	2 UMKM	6 UMKM	16 UMKM	20 UMKM	N/A
7	Pertumbuhan Usaha Mikro	1,31%	0,,20%	9,28%	17,1%	4,86%

Sumber: Dinas Perindag, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dalam lima tahun

terakhir. Pada tahun 2018, persentase koperasi aktif mencapai 27 persen, namun turun drastis menjadi 16 persen pada tahun 2019. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya modal, bimbingan, dan pengawasan dari pemerintah daerah, serta persaingan dengan usaha lain. Namun, pada tahun 2020, persentase koperasi aktif meningkat menjadi 43 persen, kemudian naik lagi menjadi 45 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan dan penguatan koperasi di Kabupaten Manggarai Timur, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak negatif pada sektor ekonomi.

Pada tahun 2023, persentase koperasi aktif mencapai angka tertinggi yaitu 71,11 persen, yang menunjukkan bahwa hampir tiga perempat dari total koperasi di Kabupaten Manggarai Timur berstatus aktif. Sementara itu, omset per koperasi aktif di Kabupaten Manggarai Timur juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, omset per koperasi aktif sebesar Rp79.292 juta, kemudian naik sedikit menjadi Rp80.263 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020, omset per koperasi aktif melonjak menjadi Rp105.261 juta, kemudian naik lagi menjadi Rp111.130 juta pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kabupaten Manggarai Timur memiliki capaian kinerja koperasi dan UKM yang cukup baik. Berikut ini adalah tabel perbandingan omset per koperasi aktif di daerah sekitar pada tahun 2020 (lihat Tabel 2.133).

Tabel 2. 137 Perbandingan Omset Per Koperasi Aktif di Provinsi NTT Tahun 2024

Kabupaten	Omset Per Koperasi Aktif
Manggarai Timur	Rp. 199.332.234
Manggarai	Rp78.000.000.000
Manggarai Barat	Rp65.000.000.000
Ngada	Rp60.000.000.000
Ende	Rp150.000.000.000
Flores Timur	Rp130.000.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2020, persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai Timur (43 persen) lebih tinggi daripada Kabupaten Manggarai (37 persen), Kabupaten Manggarai Barat (36 persen), dan Kabupaten Ngada (32 persen). Namun, persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai Timur masih lebih rendah dari Kabupaten Ende (51 persen) dan Kabupaten Flores Timur (49 persen). Sedangkan untuk omset per koperasi aktif, Kabupaten Manggarai Timur memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada. Namun, omset per koperasi aktif di Kabupaten Manggarai Timur masih lebih rendah daripada Kabupaten Ende dan Kabupaten Flores Timur.

18) Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merujuk pada segala kegiatan yang terkait dengan investasi atau penanaman modal di Wilayah Manggarai Timur baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, dalam bentuk uang, sumber daya, teknologi atau aset lainnya untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Ada dua jenis utama Penanaman Modal yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Urusan penanaman modal melibatkan aspek seperti perizinan, kebijakan pemerintah, regulasi dan prosedur lainnya untuk meningkatkan iklim investasi di dalam wilayah Manggarai Timur. Pemerintah senantiasa memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat bagi ekonomi daerah Manggarai Timur. Berikut data capaian kinerja (sasaran dan output) pemerintah dalam urusan penanaman modal selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 138 Capaian Kinerja Pemerintah dalam Urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	7,2%	-25,8%	-9,41%	59,41%	-18,77%

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Total Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	97 Milyar Rupiah	72 Milyar Rupiah	65 Milyar Rupiah	104 Milyar Rupiah	85 Milyar Rupiah
1.2	Jumlah Investor PMA dan PMDN	80 investor	297 investor	407 investor	1.093 investor	1.633 investor
1.3	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada Kegiatan Investasi di Kabupaten Manggarai Timur	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Jumlah Investor yang Menyatakan Minat Dalam Promosi	0 investor	3 investor	2 investor	2 investor	1 investor
2.	**IKM DPMPTSP**	**90**	**87**	**80**	**87**	**85**
2.1	Rata-Rata Lama Proses Perizinan	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	1 Hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai investasi di Manggarai Timur sangat fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, ketidakstabilan ekonomi seperti adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020-2022 yang menekan pertumbuhan ekonomi sehingga menurunkan minat untuk berinvestasi. Kedua, Regulasi dan Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Manggarai Timur. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait memang telah menyusun RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) namun dokumen ini masih perlu didukung oleh dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang hingga saat ini masih dalam tahap revisi. Ketiga, keterbatasan infrastruktur seperti transportasi serta teknologi yang menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi investasi. Keempat, Kesiapan Sumber daya manusia (SDM) seperti ketersediaan tenaga kerja terampil yang dapat meningkatkan produktivitas

dan inovasi dalam bekerja sehingga dapat menarik investor yang membutuhkan SDM berkualitas. Namun ada juga faktor pendukung investasi di Manggarai Timur antara lain ketersediaan sumber daya alam. Hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Nusa Cendana menunjukkan bahwa Manggarai Timur merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Selain itu, pemerintah Manggarai Timur juga senantiasa memberikan dukungan dalam hal kemudahan perizinan berusaha dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. Sejak tahun 2020, pemerintah juga telah membentuk MPP (Mall Pelayanan Publik) yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu lokasi sehingga meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam definisi tersebut, maka karakteristik penduduk di Manggarai Timur didominasi oleh pemuda dengan usia angkatan kerja. Penduduk usia angkatan kerja tersebut seharusnya menjadi potensi bagi kemajuan Kabupaten Manggarai Timur, namun upaya optimal untuk pemberdayaan pemuda ini belum cukup dilakukan.

Dari sisi tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda yang peningkatannya belum terlihat signifikan sejak tahun 2021-2024 yakni pada tahun 2021 sebanyak 1,73 persen, meningkat menjadi 2,24 persen pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Dari sisi kewirausahaan, persentase wirausaha muda pada tahun 2021 hanya 0,11 persen menjadi 0,15 persen pada tahun 2022 hingga tahun 2024 dari total wirausaha di Kabupaten Manggarai Timur. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemuda yang berwirausaha di

Kabupaten Manggarai Timur namun masih dalam jumlah yang sedikit dan belum ada peningkatan lagi. Dari sisi keolahragaan jumlah organisasi olahraga masih stagnan sejak tahun 2020 yakni 13 organisasi. Sedangkan prestasi olahraga Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan yakni dari 3 prestasi menurun menjadi 1 prestasi olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan pemberdayaan pemuda belum terlaksana dengan optimal.

Tabel 2. 139 Organisasi Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	NA	1,73	2,42	2,42	2,42
3.	Persentase Wirausaha Muda Terhadap Total Wirausaha	NA	0,11	0,15	0,15	0,15
4.	Jumlah Organisasi Olahraga	13	13	13	13	13
5.	Jumlah Prestasi Olahraga	3	3	1	1	1

Sumber: Dinas PPO Kab. Manggarai Timur, 2025

20) Urusan Statistik

Urusan pelayanan statistik di Kabupaten Manggarai Timur difokuskan pada penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan statistik yang berkualitas sangat penting untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan berjalan secara tepat sasaran dan berbasis bukti. Tingkat kemajuan dalam penyelenggaraan statistik daerah ini diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang mencerminkan kapasitas dan kualitas tata kelola statistik sektoral oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. 140 Kinerja Statistik Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	N/A	N/A	N/A	2,06	2,63

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, 2025

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan tata kelola statistik di suatu daerah. Di Kabupaten Manggarai Timur, pengukuran IPS mulai dilakukan pada tahun 2023 setelah sebelumnya tidak tersedia data pada tahun 2020 hingga 2022. Pada pengukuran perdananya di tahun 2023, IPS mencatat nilai sebesar 2,06, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 2,63 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan data dan informasi statistik, baik dari segi perencanaan, produksi, diseminasi, maupun pemanfaatan data statistik sektoral.

21) Urusan Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Manggarai Timur berperan penting dalam memastikan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan menjaga kerahasiaan data strategis. Penguatan sistem keamanan informasi dilakukan melalui pengelolaan teknologi enkripsi, pengawasan sistem komunikasi internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Tingkat keberhasilan upaya ini diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada aspek keamanan, yang mencerminkan efektivitas perlindungan informasi digital dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola risiko keamanan siber.

Tabel 2. 141 Kinerja Persandian Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada aspek keamanan	1	1	1	1	1
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	3	3	3	3	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, 2025

Tabel 2.141 menunjukkan bahwa Indeks SPBE pada aspek keamanan di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2020 hingga 2024 masih berada di level 1. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan keamanan informasi dalam pemerintahan berbasis elektronik masih perlu ditingkatkan. Beberapa mekanisme penting, seperti audit keamanan, pengujian kerentanan, pengendalian akses, dan perlindungan infrastruktur digital, tampaknya belum berjalan secara maksimal.

Nilai rendah juga terlihat pada beberapa indikator pendukung, seperti tingkat kematangan manajemen keamanan informasi, kebijakan internal, dan audit TIK. Ini mengindikasikan bahwa aspek keamanan belum menjadi perhatian utama, baik dari sisi aturan, pelaksanaan, maupun pengawasannya

Selain itu, penggunaan sistem sandi dalam komunikasi resmi oleh perangkat daerah juga mengalami penurunan. Dari tahun 2020 hingga 2023, ada tiga perangkat daerah yang menggunakannya. Namun pada tahun 2024, belum ada perangkat daerah yang tercatat menggunakan sistem tersebut.

22) Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Sub Urusan Budaya menjadi urusan konkuren pemerintah pusat, daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan amanat UU ini. Untuk indikator kebudayaan dimulai dari Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, dimana pada tahun 2020 hingga 2022 tidak ada festival yang dilaksanakan disebabkan kondisi COVID-19 yang melarang diadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024 diselenggarakan 1 festival seni dan budaya. Presentasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan untuk dimulai pada tahun 2020 yaitu sebesar 15 persen sampai pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 hingga 2024 menurun menjadi 10 persen, hal ini disebabkan kondisi COVID-

19 yang memengaruhi kondisi keuangan daerah sehingga pelaksanaan indikator ini menjadi lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk indikator Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 20 cagar budaya dan kondisi ini bersifat konsisten. Untuk indikator Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dimulai sejak tahun 2020 yaitu sebanyak 3 cagar budaya selanjutnya sampai tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 sampai 2024 menurun menjadi 2 cagar budaya, kondisi keuangan pasca COVID-19 masih menjadi kendala dalam menjawab indikator ini.

Tabel 2. 142 Jumlah Festival Seni Budaya Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	0	0	1	1
2.	Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	15	15	10	10	10
3.	Jumlah Cagar Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	20	20	20	20	20
4.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	3	3	2	2	2

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

23) Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Timur memiliki tujuan utama meningkatkan literasi masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Perpustakaan bukan sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat yang mendukung pencapaian kualitas pendidikan dan budaya baca di masyarakat. Oleh karena itu, indikator kinerja pada urusan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana peran

perpustakaan daerah dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan.

Tabel 2. 143 Kinerja Perpustakaan Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pengelolaan Perpustakaan	167	173	0,18	N/A	N/A
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	72,04
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	10.218	4.946	6.064	N/A	N/A
4	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	1,86	1,86	1,86	N/A	N/A
5	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	7.117	8.276	8.276	N/A	N/A
6	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	2	2	2	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Data kinerja urusan perpustakaan menunjukkan capaian yang bervariasi. Indeks Pengelolaan Perpustakaan tercatat sebesar 167 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 173 pada tahun 2021, sebelum berubah metode pengukuran menjadi skala desimal dengan nilai 0,18 pada tahun 2022, yang kemungkinan mencerminkan penerapan indikator baru yang lebih terstandar secara nasional. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mulai tersedia pada tahun 2024 dengan capaian 72,04, menunjukkan tingkat minat baca masyarakat yang tergolong sedang dan perlu terus didorong melalui berbagai program literasi.

Dari sisi aktivitas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami penurunan tajam dari 10.218 pengunjung pada tahun 2020 menjadi 4.946 di tahun 2021, sebelum kembali meningkat menjadi 6.064 pada 2022. Tren ini dapat dipengaruhi oleh dampak pandemi dan adaptasi terhadap layanan digital. Rasio perpustakaan per satuan penduduk berada di angka 1,86 selama tiga tahun berturut-turut (2020–2022), menunjukkan keberadaan infrastruktur perpustakaan yang relatif konstan namun belum mencerminkan perluasan signifikan

Selanjutnya, jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan dari 7.117 judul pada tahun 2020 menjadi 8.276 judul pada 2021, dan stagnan pada tahun berikutnya. Ini menunjukkan perlunya pembaharuan dan diversifikasi koleksi untuk mengikuti kebutuhan bacaan masyarakat. Sementara itu, persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat tercatat sebesar 2 persen selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat, pengukuran Indeks Literasi dan Numerasi berdasarkan jenjang pendidikan memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait kemampuan dasar baca, tulis, dan berhitung masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Data ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas layanan perpustakaan dan sistem pendidikan dasar dalam membentuk fondasi literasi yang kuat.

Tabel 2. 144 Indeks Literasi Masyarakat Manggarai Timur

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	N/A	N/A	44,39	47,52	N/A
SMP	N/A	N/A	27,19	33,22	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Berdasarkan data Indeks Literasi Masyarakat, pada jenjang SD tercatat peningkatan dari 44,39 pada tahun 2022 menjadi 47,52 pada tahun 2023. Begitu pula pada jenjang SMP, indeks naik dari 27,19 menjadi 33,22 pada periode yang sama. Meskipun tren ini menunjukkan perbaikan, capaian tersebut masih berada pada kategori rendah, khususnya di jenjang SMP, yang mengindikasikan bahwa kebiasaan membaca dan keterampilan literasi di kalangan pelajar masih perlu ditingkatkan secara signifikan melalui intervensi kurikulum dan penguatan program literasi berbasis komunitas.

Tabel 2. 145 Indeks Numerasi Masyarakat Manggarai Timur

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	N/A	N/A	29,53	36,75	N/A
SMP	N/A	N/A	20,62	23,02	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Hal serupa juga tercermin dalam Indeks Numerasi Masyarakat. Di tingkat SD, indeks numerasi meningkat dari 29,53 pada tahun 2022 menjadi 36,75 pada tahun 2023. Pada jenjang SMP, angka ini naik dari 20,62 menjadi 23,02. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kemampuan dasar berhitung, namun nilai yang masih rendah menandakan bahwa literasi numerik belum sepenuhnya merata di kalangan pelajar.

24) Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan di Kabupaten Manggarai Timur difokuskan pada upaya peningkatan tata kelola arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan kaidah manajemen arsip. Pengelolaan arsip yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat pencapaian dalam urusan ini diukur melalui Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, yang mencerminkan kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip oleh perangkat daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Tabel 2. 146 Kinerja Pengelolaan Arsip Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE (terkait keamanan)	1	1	1	1	1
2	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi	3	3	3	3	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Kinerja pengelolaan arsip di Kabupaten Manggarai Timur mulai tercatat secara terukur sejak tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2020 hingga 2022, belum tersedia data mengenai persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, yang mengindikasikan bahwa aspek ini belum menjadi fokus utama atau belum dilakukan pengukuran secara sistematis. Namun pada tahun 2023, mulai terlihat adanya kemajuan dengan 1,59 persen perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar baku. Capaian ini mengalami peningkatan menjadi 1,67 persen pada tahun 2024, meskipun masih dalam angka yang relatif rendah.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Manggarai Timur, memegang peranan penting dalam memacu percepatan pembangunan serta menopang terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat Manggarai Timur. Permintaan dan kebutuhan konsumsi ikan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perubahan selera konsumsi masyarakat ke arah protein hewani yang lebih sehat. Kebutuhan akan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan hal yang sangat penting saat ini.

Sektor kelautan dan perikanan diyakini dapat menjadi sektor industri yang kuat dan berintegrasi secara vertikal maupun horizontal untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memadai dan didukung oleh teknologi yang sesuai benar-benar dilakukan. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Kondisi umum sektor kelautan dan Perikanan di Kabupaten Manggarai Timur akan adalah sebagai berikut:

a) Potensi

- Panjang garis Pantai : ± 251 Km^2
- Luas Wilayah Penangkapan Ikan laut : ± 1.807,2 Km^2
- Luas Wilayah Potensi Budidaya Air Tawar: ± 500 Km^2
- Potensi Produksi Perikanan Tangkap : 12.270,2 Ton/Tahun
- Potensi Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar: 1000 Ton/Tahun

Manggarai Timur menyimpan potensi perikanan yang sangat besar, terlihat dari panjang garis pantai yang mencapai sekitar 251 km dan luasan zona penangkapan ikan laut seluas ± 1.807,2 km^2. Dengan cakupan wilayah perairan yang demikian luas, secara teoritis daerah ini mampu mendukung produksi tangkap hingga 12.270,2 ton per tahun. Di sisi lain, potensi budidaya air tawar pada lahan seluas ± 500 km^2 memperkirakan kapasitas tambahan sebanyak 1.000 ton per tahun.

Jika kita bandingkan dengan realisasi produksi tahun 2024, sekitar 4.674 ton untuk perikanan tangkap dan total 4.858,9 ton bila ditambah budidaya air tawar—tampak bahwa baru sekitar 38 persen dari potensi tangkap yang tergarap, serta masih jauh dibawah kapasitas budidaya air tawar. Hal ini menunjukkan adanya "celah pemanfaatan" yang signifikan antara potensi sumber daya dan output aktual. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya realisasi ini meliputi keterbatasan armada dan teknologi tangkap, infrastruktur pasca panen yang kurang memadai, serta tata kelola zonasi yang belum optimal.

b) Jumlah Nelayan di Kabupaten Manggarai Timur

Analisis data jumlah nelayan di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa sektor perikanan masih sangat dipenuhi oleh nelayan penuh (*full-time*), yang berjumlah 14.607 orang atau sekitar 93 persen dari total nelayan di wilayah ini. Dua kecamatan pesisir, Lamba Leda Utara dan

Borong, mendominasi komposisi nelayan penuh, masing-masing menyumbang sekitar 30 persen dari seluruh nelayan penuh kabupaten, diikuti oleh Sambi Rampas (26 persen). Sebaliknya, Rana Mese dan Elar berada di urutan terbawah dengan proporsi yang relatif kecil, yaitu masing-masing 1,4 persen dan 2,8 persen, menandakan potensi perikanan laut atau sungai yang masih terbatas di wilayah-wilayah tersebut.

Sementara itu, nelayan sambilan (*part-timer*) mengisi 1.070 posisi atau 7 persen dari total, dengan Lamba Leda Utara juga memuncaki jumlah nelayan sambilan (35 persen), disusul Kota Komba (22 persen) dan Rana Mese (17 persen). Pola ini menggambarkan adanya dualisme mata pencaharian masyarakat setempat sering kali harus mengandalkan sumber pendapatan lain, lalu kembali menangkap ikan sebagai pekerjaan sampingan. Proporsi nelayan sambilan yang tinggi di beberapa kecamatan mengindikasikan kurangnya infrastruktur dan kesempatan untuk mengembangkan perikanan sebagai mata pencaharian utama secara berkelanjutan.

Ketimpangan distribusi nelayan antar-kecamatan dan tingginya dominasi nelayan penuh di beberapa titik memunculkan sejumlah tantangan dan peluang. Di kecamatan dengan konsentrasi nelayan besar Borong, Lamba Leda Utara, dan Sambi Rampas diperlukan peningkatan fasilitas pasca tangkap seperti cold storage, dermaga, dan ice plant agar hasil tangkapan dapat diolah dan dipasarkan dengan nilai tambah lebih tinggi. Sementara di Rana Mese dan Elar, kajian potensi perlu difokuskan pada pengembangan budidaya perikanan air tawar atau marikultur, sesuai karakteristik geografis. Di sisi lain, program pemberdayaan nelayan sambilan meliputi pelatihan teknik penanganan hasil tangkap, akses modal mikro, serta branding produk laut lokal dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerentanan ekonomi.

Dengan strategi terarah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kecamatan, Kabupaten Manggarai Timur berpeluang mengoptimalkan potensi sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi maritim daerah.

Tabel 2. 147 Jumlah Nelayan di Manggarai Timur Tahun 2024

Kecamatan	Nelayan Penuh/ *Full Time Fisherman*	Nelayan Sambilan/ *Part-Timer Fisherman*
Borong	4444	88
Rana Mese	209	181
Kota Komba	1221	231
Elar	412	55
Sambi Rampas	3850	141
Lamba Leda Utara	4471	374
Grand Total Manggarai Timur	14.607	1070

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2024

c) Jumlah Armada Kapal Penangkapan Ikan di Kabupaten Manggarai

Analisis data armada kapal penangkapan ikan menunjukkan bahwa total keseluruhan kapal di Kabupaten Manggarai Timur hampir seimbang antara perahu tanpa motor (197 unit) dan perahu bermotor tempel (194 unit). Jika kita kaitkan dengan komposisi nelayan penuh dan sambilan sebelumnya, maka Kecamatan Sambi Rampas dan Lamba Leda Utara sama-sama menempati posisi teratas dari segi jumlah armada: Sambi Rampas memiliki 55 perahu tanpa motor dan 56 perahu bermotor, sedangkan Lamba Leda Utara memiliki 43 perahu tanpa motor dan 57 perahu bermotor. Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah nelayan penuh di kedua kecamatan tersebut (3.850 nelayan penuh di Sambi Rampas dan 4.471 di Lamba Leda Utara). Proporsi kapal bermotor yang hampir sama banyaknya dengan perahu tanpa motor di kedua kecamatan ini menunjukkan bahwa banyak nelayan memiliki akses ke teknologi penangkapan yang lebih efisien, mendukung kapasitas penangkapan yang lebih besar. Kemudian jika dilihat dari data, Kecamatan Borong memiliki nelayan penuh hampir sama banyaknya dengan Lamba Leda Utara (4.444 nelayan penuh) namun Kecamatan Borong memiliki armada yang relatif terbatas, yaitu hanya 37 perahu tanpa motor dan 7 perahu bermotor. Rasio nelayan per kapal di Borong jauh lebih tinggi, menandakan potensi kelebihan beban kerja dan persaingan di laut. Sebaliknya, di Kota Komba, jumlah perahu bermotor (29 unit) hampir menandingi nelayan penuh (1.221 orang),

menunjukkan kecenderungan modernisasi yang lebih cepat meski nelayan sambilan juga signifikan.

Dua kecamatan dengan nelayan penuh paling sedikit Kecamatan Rana Mese (209 nelayan penuh) dan Elar (412 nelayan penuh) namun ternyata 2 Kecamatan ini memiliki armada bermotor yang relatif memadai (17 unit di Rana Mese, 28 unit di Elar) dibanding jumlah nelayan tanpa motor (12 dan 25 unit). Ini bisa berarti dua hal: nelayan di sana lebih mampu berinvestasi pada kapal bermotor, atau armada tersebut dipakai secara kolektif oleh kelompok kecil sehingga efektivitasnya lebih tinggi. Namun sebagian nelayan masih tergantung pada perahu tanpa motor, yang membatasi jangkauan operasi dan produktivitas mereka.

Ketersediaan armada bermotor yang hampir merata di kecamatan-kecamatan pesisir perlu diseimbangkan dengan distribusi nelayan agar tidak terjadi over kapasitas (seperti di Borong) dan underutilisasi (seperti di beberapa desa satelit di Rana Mese). Kebijakan peremajaan perahu tanpa motor menjadi bermotor, pelatihan pemeliharaan mesin, dan dukungan akses kredit mikro dapat meningkatkan efisiensi kegiatan penangkapan. Selain itu, pembangunan fasilitas perbaikan dan penyediaan suku cadang tersebar di area high-density perahu akan mengurangi waktu henti (*downtime*) armada, menjamin kontinuitas tangkapan, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan nelayan penuh maupun sambilan di seluruh Manggarai Timur.

Tabel 2. 148 Jumlah Armada Kapal Penangkapan Ikan di Manggarai Timur

Kecamatan	Perahu tanpa motor / *Nonpowered Boat*	Perahu Motor Tempel/ *Outboard Motorboat*
Borong	37	7
Rana Mese	12	17
Kota Komba	25	29
Elar	25	28
Sambi Rampas	55	56
Lamba Leda Utara	43	57
Grand Total Manggarai Timur	197	194

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Data produksi perikanan tangkap dan budidaya air tawar di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, total output tercatat sebesar 4.311,46 ton, dan meningkat menjadi 4.858,89 ton pada 2024. Dengan demikian, dalam lima tahun tersebut terjadi penambahan produksi sekitar 547 ton, atau rata-rata peningkatan absolut sekitar 109 ton per tahun.

Tingkat pertumbuhan tahunan relatif stabil, dengan laju rata-rata pertumbuhan sekitar 4 persen per tahun. Meskipun laju pertumbuhan stabil di kisaran 3–4 persen, tantangan seperti kehilangan hasil panen laut (*post-harvest loss*), keterbatasan fasilitas penangkapan dan penyimpanan dingin, serta akses pasar masih menjadi hambatan optimalisasi produksi. Fluktuasi laju pertumbuhan ini mencerminkan respon sektor perikanan terhadap berbagai faktor, antara lain ketersediaan armada (perahu bermotor dan non-motor), kapasitas nelayan penuh maupun sambilan, cuaca, dan investasi pada infrastruktur pasca tangkap.

Tabel 2. 149 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar (Ton)

Tahun	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar (Ton)	Rata-rata Pertumbuhan Perikanan (%)
2020	4.311,46	4,01
2021	4.456,13	4,30
2022	4.520,13	3,22
2023	4.674,40	4,04
2024	4.858,89	4,41

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

26) Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pariwisata juga dapat mempromosikan budaya, alam, dan keunikan daerah tersebut kepada wisatawan baik lokal maupun asing. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan partisipatif.

Data Kinerja Pariwisata dari Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan perkembangan pariwisata di kabupaten ini dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Data ini mencakup jumlah kunjungan wisata, lama kunjungan wisata, jumlah destinasi wisata, dan jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata. Berikut ini adalah analisis data tersebut secara lebih rinci.

Tabel 2. 150 Kinerja Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	14.318	14.160	14.972	10.590	6.753
2.	Lama Kunjungan Wisata	N/A	2	2	2	2
3.	Jumlah Destinasi Wisata	2	2	2	8	8
4.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengelola Objek Wisata	11	11	21	21	21

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa secara umum kinerja pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur masih perlu ditingkatkan. Jumlah kunjungan wisata masih rendah dan tidak stabil. Lama kunjungan wisata juga masih singkat. Jumlah destinasi wisata masih sedikit dan tidak variatif. Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata baru mulai meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Terlihat dalam data bahwa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisata sebanyak 14.895 orang, kemudian meningkat menjadi 15.613 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisata menurun menjadi 14.318 orang, kemudian sedikit turun lagi menjadi 14.160 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisata kembali naik menjadi 14.972 orang. Selama dua tahun terakhir kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan, yakni 10.590 pada tahun 2023 dan 6.753 pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan munculnya

beberapa destinasi baru di sekitar wilayah Borong yang jumlah kunjungannya belum terdata dengan baik.

Selanjutnya, lama kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur hanya tersedia untuk tahun 2021 dan 2022. Data ini menunjukkan rata-rata berapa hari wisatawan menginap di kabupaten ini. Pada tahun 2021, lama kunjungan wisata adalah dua hari, yang artinya setiap wisatawan menginap selama dua hari di kabupaten ini. Pada tahun 2022 hingga 2024, lama kunjungan wisata juga dua hari.

Kemudian, jumlah destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Timur juga mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, hanya ada satu destinasi wisata yang ditawarkan oleh kabupaten ini, yaitu Pantai Cepiwatu yang terletak di kecamatan Borong dan dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2019, ada penambahan satu destinasi wisata baru, yaitu Danau Rana Tonjong, di Pota, Kecamatan Sambi Rampas. Sedangkan pada tahun 2020, tidak ada penambahan destinasi wisata baru, sehingga jumlahnya tetap dua destinasi wisata. Hal ini berlanjut hingga tahun 2021 dan 2022. Sejak tahun 2023, sesuai dengan tren kunjungan yang meningkat di beberapa lokasi daya tarik baru, terdapat penambahan beberapa destinasi wisata, yakni Teluk Nanga Lok dan Pantai Watu Pajung di Pota, Padang Mausui di Waelengga dan Ketiga desa wisata unggulan Manggarai Timur, yakni Colol, Golo Loni dan Compang Ndejing.

Terakhir, jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata di Kabupaten Manggarai Timur baru tersedia untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Data ini menunjukkan berapa banyak kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata di kabupaten ini. Pada tahun 2020, ada 11 kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata, yaitu lima kelompok di Danau Rana Mese dan enam kelompok di Air Terjun Cunca Rami. Pada tahun 2021, jumlahnya tetap 11 kelompok masyarakat. Pada tahun 2022, ada

penambahan 10 kelompok masyarakat baru, sehingga jumlahnya menjadi 21 kelompok masyarakat.

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kabupaten Manggarai Timur memiliki kinerja pariwisata yang lebih rendah. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur (15.613 orang) lebih rendah daripada Kabupaten Manggarai (18.000 orang), Kabupaten Manggarai Barat (25.000 orang), dan Kabupaten Ngada (20.000 orang). Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur juga jauh lebih rendah daripada Kabupaten Ende (100.000 orang) dan Kabupaten Flores Timur (80.000 orang).

Sedangkan untuk jumlah destinasi wisata, Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada daerah sekitar. Hal ini dapat dilihat melalui data jumlah destinasi wisata di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 2. 151 Perbandingan Jumlah Destinasi Wisata di Provinsi NTT Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Destinasi Wisata
Manggarai Timur	8
Manggarai	12
Manggarai Barat	11
Ngada	12
Ende	13
Flores Timur	N/A

Sumber: Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, 2024

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur masih perlu ditingkatkan. Jumlah kunjungan wisata masih rendah dan tidak stabil. Lama kunjungan wisata juga masih singkat. Jumlah destinasi wisata masih sedikit dan tidak variatif. Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata baru mulai meningkat pada tahun terakhir

27) Urusan Pertanian

Pertanian adalah salah satu sektor yang penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Namun, sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti lahan yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai, perubahan iklim, hama dan penyakit, serta rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Untuk mengetahui kinerja pertanian di Kabupaten Manggarai Timur, dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pertumbuhan sektor pertanian dan subsektornya, luas panen tanaman pertanian, populasi ternak, produksi daging, dan capaian inseminasi buatan. Data-data ini dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Manggarai Timur selama periode tahun 2018-2024.

Tabel 2. 152 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	45.15	45.43	46.01	46.50	46.04

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat sejak periode tahun 2020-2024 yang menandakan bahwa adanya peningkatan harga komoditas komoditas sektor pertanian secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan perekonomian Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 153 Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Manggarai Timur

No	Sektor / Subsektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian	21,04	-1,19	1,33	1,4	16,5

No	Sektor / Subsektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Pertumbuhan Produksi Perkebunan	8,71	-0,61	9,96	14,04	14,04
3.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Terhadap PDRB	36,64	-19,18	-10,01	-14,84	12,22
4.	Pertumbuhan Produksi Hortikultura	17,78	16,21	4,05	5,14	22,2
5	Pertumbuhan Produksi Daging Ternak Besar	2,04	7,09	147,71	-364,89	402,52
6	Pertumbuhan Produksi Daging Ternak Kecil	6,59	20,55	-151,43	-318,87	-86,58
7	Pertumbuhan Produksi Daging Unggas	14,75	11,33	74,85	-145,98	-1213,36

Keterangan: Data Pertumbuhan Produksi Perkebunan masih menggunakan data proyeksi tahun 2023 karena data ATAP BUN 2024 belum tersedia
Sumber: Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Pertumbuhan sektor pertanian yang dimaksud adalah rata- rata pertumbuhan produksi komoditi tanaman pangan, komoditi hortikultura dan komoditi perkebunan. Berdasarkan data dalam tabel di atas pertumbuhan produksi Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi yang cukup tinggi selama periode tahun 2018-2024. Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan sektor pertanian mencapai angka positif yang cukup tinggi, yaitu 67,15 persen dan 64,56 persen. Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan sektor pertanian menurun drastis menjadi 21,04 persen dan -1,19 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi tanaman pangan akibat dampak pandemi COVID-19 dan bencana alam yang melanda kabupaten ini. Pada tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian kembali meningkat menjadi 1,3 persen seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi dan lingkungan.

Pertumbuhan produksi perkebunan Kabupaten Manggarai Timur juga mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, produksi perkebunan mencatatkan angka tertinggi yaitu 138,56 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap

komoditas perkebunan seperti kopi, coklat, kemiri, kelapa sawit, dan lain-lain. Namun, pada tahun 2019, produksi perkebunan menurun menjadi -4,66 persen akibat adanya serangan hama dan penyakit serta cuaca ekstrem yang merusak tanaman. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi perkebunan kembali naik menjadi 8,71 persen dan -0,61 persen. Pada tahun 2022, produksi perkebunan mencapai angka tertinggi kedua yaitu 9,96 persen.

Pertumbuhan produksi tanaman pangan Kabupaten Manggarai Timur sangat bervariasi selama periode tahun 2018-2024. Pada tahun 2018 dan 2019, produksi tanaman pangan relatif rendah, yaitu 2,71 persen dan 1,35 persen. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti lahan yang sempit, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta rendahnya adopsi teknologi dan inovasi pertanian. Pada tahun 2020, produksi tanaman pangan melonjak menjadi 36,64 persen. Hal ini dikarenakan oleh adanya program bantuan pemerintah berupa pupuk, benih, alat pertanian, dan lain-lain yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, produksi tanaman pangan kembali anjlok menjadi -19,18 persen dan -10,01 persen. Hal ini dipicu oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menghancurkan lahan pertanian dan hasil panen.

Pertumbuhan produksi hortikultura Kabupaten Manggarai Timur cenderung positif selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, produksi hortikultura mencapai 60,18 persen. Hal ini didukung oleh adanya potensi sumber daya alam yang cocok untuk mengembangkan tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman obat. Pada tahun 2019, produksi hortikultura mencatatkan angka tertinggi yaitu 197 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan pasar terhadap produk hortikultura yang berkualitas dan sehat. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi hortikultura masih tinggi, yaitu 17,78 persen dan 16,21 persen. Pada tahun 2022, produksi hortikultura menurun menjadi 4,05 persen.

Adapun salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan sektor pertanian dan kinerja pertumbuhan produksinya adalah luas lahan yang dimanfaatkan juga mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui data berikut.

Tabel 2. 154 Luas Panen Tanaman Pertanian Manggarai Timur

No	Sektor / Subsektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tanaman Pangan	33.456	30.657	26.947	23.571,37	27.446,64
2	Tanaman Perkebunan	23.768	27.009	29.893	36.214	36.214
3.	Tanaman Hortikultura	4.344,83	3.851,89	2.827,10	2.571,37	2.997,92

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Manggarai Timur, 2025

Kemudian, tentang pertumbuhan produksi daging ternak besar cenderung meningkat selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, produksi daging ternak besar mencapai 4,62 persen. Hal ini dipengaruhi oleh adanya program inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas genetik dan produktivitas ternak. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi daging ternak besar naik menjadi 2,04 persen dan 7,09 persen. Pada tahun 2022, produksi daging ternak besar mencapai angka tertinggi yaitu 8,8 persen dan terus meningkat 18,21 persen pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan data populasi ternak sebagai berikut.

Tabel 2. 155 Populasi Ternak di Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ternak Besar	25.513	26.131	26.705	23.364	20.066
	a. Sapi	13.891	14.711	15.671	14.617	13.150
	b. Kerbau	8.621	8.681	8.427	7.312	5.736
	c. Kuda	3.001	2.739	2.607	1.435	1.180
2.	Ternak Kecil	110.221	117.743	126.297	127.635	118.711
	a. Babi	79.700	79.000	85.430	83.017	70.350
	b. Kambing	30.521	38.743	40.867	44.618	48.361
	c. Domba	0	0	0	0	0

No.	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Ternak Unggas	831.400	868.283	937.393	1.086.136	1.053.592
	a. Ayam Ras	14.700	39.000	57.878	140.561	124.847
	b. Ayam Kampung	791.440	816.440	864.607	930.017	908.912
	c. Itik/Bebek	25.260	12.843	14.908	15.558	19.834

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Selanjutnya, pertumbuhan produksi daging ayam Kabupaten Manggarai Timur juga cenderung meningkat selama periode tahun 2019-2022. Pada tahun 2019, produksi daging ayam mencapai 6,29 persen. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam yang dianggap lebih murah dan mudah didapat dibandingkan dengan daging ternak besar. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi daging ayam naik menjadi 10,04 persen dan 54,53 persen. Pada tahun 2022, produksi daging ayam menurun menjadi -31,29 persen. Hal ini sesuai dengan data sebagai berikut.

Tabel 2. 156 Produ

No.	Jenis Ternak					
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ternak Besar	280.881	300.795	327.260	386.868	487.874
	a. Sapi	140.900	161.501	171.896	175.487	219.807
	b. Kerbau	113.400	116.865	137.340	160.650	252.473
	c. Kuda	26.581	22.429	18.024	50.731	15.594
2.	Ternak Kecil	431.268	519.901	560.304	641.955	704.507
	a. Babi	347.517	434.555	477.274	545.775	618.352
	b. Kambing	83.747	85.364	83.030	96.181	86.155
	c. Domba	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Ternak Unggas	208.701	232.343	252.409	258.528	809.357
	a. Ayam Ras	33.501	41.574	86.940	78.243	448.923
	b. Ayam Kampung	145.653	170.503	153.492	166.534	342.478
	c. Itik	29.547	20.266	11.977	14.114	17.956

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Fluktuasi dalam populasi ternak dan produksi dagingnya sangat berkaitan dengan kinerja daerah dalam memberikan bantuan pada sektor

peternakan ini. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian bantuan inseminasi buatan terhadap hewan ternak. Adapun target dan realisasinya pada tahun 2024, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 157 Target dan Realisasi Inseminasi Buatan (IB), Bunting Inseminasi Buatan (IB)

No	Kecamatan	Akseptor (Ekor)			Bunting IB (Ekor)			Lahir IB (Ekor)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Borong	95	118	124,21	76	71	93,42	76	56	73,68
2	Rana Mese	120	136	113,33	96	63	65,63	96	50	62,5
3	Kota Komba	40	36	90,00	32	16	50,00	32	12	37,5
4	Sambi Rampas	50	54	108,00	40	25	62,50	40	20	50,00
5	Lamba Leda Utara	75	38	50,67	44	16	36,36	44	12	27,27
6	Lamba Leda Selatan	20	13	65,00	16	1	6,25	16	1	6,25
Jumlah		**400**	**395**	**98,75**	**304**	**192**	**63,16**	**304**	**151**	**49,67**

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur, 2025

28) Urusan Kehutanan

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem keberlanjutan sumber daya alam, dan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Manggarai Timur, urusan kehutanan menjadi salah satu bagian penting terutama dalam menjaga kawasan lindung dan mengendalikan kerusakan hutan. Berdasarkan data pada tabel, capaian kinerja kehutanan menunjukkan adanya tren penurunan pada persentase luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi, dari 0,35 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,058 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan lemahnya kesinambungan program rehabilitasi, dengan indikasi minimnya pelaksanaan pada tahun-tahun terakhir. Sementara itu, persentase kerusakan kawasan hutan mengalami fluktuasi yang cukup ekstrim. Setelah mengalami penurunan drastis dari 0,52 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,02 pada tahun 2021 dan 2022, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai kerusakan masing-masing sebesar 2,62 persen dan 2,55 persen.

Tabel 2. 158 Kinerja Urusan Kehutanan di Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	0,35	0,21	N/A	0,09	0,058
2.	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,52	0,02	0,02	2,62	2,55
3.	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	67,36	67,36	67,36	66,29	66,29

Sumber: UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Di sisi lain, rasio luas kawasan hutan lindung terhadap total kawasan luas hutan stabil pada angka 67,36 persen selama tiga tahun pertama, namun mengalami penurunan menjadi 66,29 persen pada tahun 2023 dan bertahan pada angka yang sama di tahun 2024. Adanya penurunan rasio menunjukkan kemungkinan dilakukannya alih fungsi kawasan lindung.

29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi listrik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah. Berdasarkan persentase rumah tangga pengguna listrik, terjadi peningkatan yang signifikan dalam periode tahun 2020 hingga 2024. Dari hanya 31,38 persen pada tahun 2020 menjadi 89,01 persen pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah keluarga yang menggunakan listrik dari jaringan PLN, yang naik dari 31,38 persen pada tahun 2020 menjadi 75,46 persen pada tahun 2024. Selain itu, jumlah rumah tangga pengguna listrik non-PLN juga menunjukkan peningkatan pada awal periode, meskipun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir yaitu dari 32,89 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 13,54 persen pada tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beralihnya sebagian rumah tangga dari listrik non-PLN ke jaringan PLN yang lebih stabil dan permanen.

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	31,38	56,31	62,62	69,22	89,01
2.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	NA	NA	NA	N/A	N/A
3.	Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN	31, 38%	56,31%	62,62%	69,22 %	75,46%
4.	Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non-PLN	23,93	32,89	31,09	20,67	13,54
5.	Jumlah Keluarga Belum Berlistrik	24, 53	36,14	10,80	6,29	10,99
6.	Desa yang Menggunakan Listrik PLN	NA	116	132	158	158
7.	Desa yang Menggunakan Listrik Non-PLN	NA	44	44	0	0
8.	Desa Belum Berlistrik	NA	16	0	0	18
9.	Persentase Pertambangan Tanpa Izin	NA	NA	NA	N/A	N/A

Dengan rincian:
- Jumlah Rumah Tangga: 71.902
- Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN: 54.261
- Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik Non-PLN: 9.737
- Jumlah Rumah tangga Berlistrik Total (PLN+Non-PLN): 63.998
- Jumlah Rumah Tangga belum Berlistrik: 7.904

Sumber: UPTD Dinas ESDM Wilayah Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat, 2025

Jumlah keluarga yang belum berlistrik pun berhasil ditekan secara signifikan dari 24,53 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 10,99 persen pada tahun 2024. Keberhasilan ini turut tercermin dalam jumlah desa yang menggunakan listrik PLN, yang meningkat dari 116 desa pada tahun 2021 menjadi 158 desa pada tahun 2023 dan 2024. Menariknya, penggunaan listrik non-PLN di desa juga menurun drastis, dari 44 desa pada tahun 2021 dan 2022 menjadi nol desa pada tahun 2023 dan 2024, mengindikasikan transisi menyeluruh ke sumber listrik yang lebih andal. Namun, pada tahun 2024 tercatat kembali sebanyak 18 desa belum berlistrik, yang menunjukkan adanya potensi daerah-daerah terpencil atau tertinggal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur kelistrikan.

Dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 71.902, jumlah rumah tangga berlistrik hingga tahun 2024 telah mencapai 63.998, yang terdiri dari 54.261 rumah tangga pengguna listrik PLN dan 9.737 rumah tangga pengguna listrik non-PLN. Ini berarti masih terdapat 7.904 rumah tangga atau sekitar 11 persen yang belum mendapatkan akses listrik, yang umumnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau oleh jaringan distribusi.

30) Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat memfasilitasi aliran barang dan jasa di pasar. Data Kinerja perdagangan dari Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan perkembangan sector perdagangan di kabupaten ini dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Data ini mencakup Jenis sektor usaha perdagangan yang tumbuh di Kabupaten Manggarai Timur. Berikut ini adalah data usaha sektor perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 160 Usaha Sektor Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur

Indikator Kinerja	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	3,82%	6,04%	4,58%	3,49%

Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025

Sektor perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan dinamika pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 3,82 persen, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan lonjakan hingga 6,04 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta kemungkinan efek positif dari meningkatnya aktivitas konsumsi dan perdagangan lokal saat pembatasan sosial mulai dilonggarkan.

Namun, peningkatan positif tersebut tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor perdagangan melambat menjadi 4,58 persen, yang menandai adanya penurunan daya dorong dari tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pada aktivitas perdagangan skala kecil, lemahnya integrasi pasar, atau terbatasnya nilai tambah dari produk lokal yang diperdagangkan.

Kemudian, pada tahun 2024, pertumbuhan kembali menurun menjadi 3,49 persen, yang merupakan angka terendah dalam empat tahun terakhir. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural di sektor perdagangan, seperti keterbatasan infrastruktur distribusi, minimnya inovasi hilirisasi produk lokal, serta masih rendahnya kontribusi digitalisasi dan *e-commerce* terhadap pelaku usaha lokal.

Secara umum, meskipun sektor perdagangan sempat menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan pada 2022, tren dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlambatan yang perlu diwaspadai. Hal ini menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk mendorong transformasi sektor perdagangan, seperti penguatan ekosistem UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan pengembangan konektivitas logistik serta digital.

Tabel 2. 161 Jumlah Usaha Sektor Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Sektor Perdagangan	7 Sektor	7 Sektor	8 Sektor	8 Sektor
Jenis sektor usaha	Usaha Sektor 1. Komoditi : Pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan. 2. Usaha Perdagangan.3	Usaha Sektor 1. Komoditi : Pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan. 2. Usaha Perdagangan.3	Usaha Sektor 1. Komoditi : Pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan. 2. Usaha Perdagangan.3	Usaha Sektor 1. Komoditi : Pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan. 2. Usaha Perdagangan.3

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Sektor Perdagangan	7 Sektor	7 Sektor	8 Sektor	8 Sektor
	Usaha Sektor Kuliner. 4 Usaha Sektor Jasa/Layanan. 5. Usaha Sektor Transportasi. 6. Usaha Sektor Pariwisata. 7 usaha sektor perindustrian	Usaha Sektor Kuliner. 4 Usaha Sektor Jasa/Layanan. 5. Usaha Sektor Transportasi. 6. Usaha Sektor Pariwisata. 7. usaha sektor perindustrian	Usaha Sektor Kuliner. 4 Usaha Sektor Jasa/Layanan. 5. Usaha Sektor Transportasi. 6. Usaha Sektor Pariwisata. 7. usaha sektor perindustrian. 8 usaha sektor real estate	Usaha Sektor Kuliner. 4 Usaha Sektor Jasa/Layanan. 5. Usaha Sektor Transportasi. 6. Usaha Sektor Pariwisata. 7. usaha sektor perindustrian. 8 usaha sektor real estate

Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

Berdasarkan data bahwa jumlah usaha sektor perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur tidak banyak mengalami perubahan . Sampai dengan Tahun 2024 jumlah usaha yang bergerak dibidang perdagangan sebanyak 9 sektor antara lain: Usaha Sektor 1. Komoditi: Pertanian, Perkebunan, perikanan, peternakan. 2. Usaha Tekstil 3 Usaha Sektor Kuliner. 4 Usaha Sektor Jasa/Layanan. 5. Usaha Sektor Transportasi. 6. Usaha Sektor Pariwisata. 7. usaha sektor perindustrian. 8 usaha sektor real estate. Sedangkan faktor yang memengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur adalah: Meningkatnya penjualan, Besaran Keuntungan, dan Ketersediaan SDA (hasil bumi).

31) Urusan Perindustrian

Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengan jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Untuk mengetahui kinerja perindustrian di Kabupaten Manggarai Timur, dapat dilihat dari indikator

antara lain Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB. Data-data ini dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Manggarai Timur selama periode tahun 2020- 2024.

Tabel 2. 162 Indikator Kinerja Perindustrian di Manggarai Timur

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	-1,54	-5,05%	4,56%	5,52%	4,59%

Sumber: Dinas Perindustrian, 2025

Data pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan pola perkembangan yang cukup signifikan dan menggambarkan proses pemulihan ekonomi yang dinamis pasca krisis. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen, yang kemudian memburuk menjadi -5,05 persen pada tahun 2021. Penurunan tajam ini sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas produksi, distribusi, serta daya beli masyarakat. Selain itu, rendahnya kapasitas industrialisasi lokal dan ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian tanpa nilai tambah, turut memperparah kondisi industri pada periode tersebut.

Namun, situasi mulai berubah pada tahun 2022, di mana sektor ini berhasil mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,56 persen. Pemulihan ini menandai awal dari pergeseran menuju pemulihan struktural, dengan indikasi mulai berfungsinya kembali sentra-sentra produksi kecil dan menengah, serta meningkatnya dorongan terhadap hilirisasi produk lokal. Tren positif ini berlanjut pada 2023, dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 5,52 persen, menjadi pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan awal dari berbagai inisiatif industrialisasi berbasis sumber daya alam unggulan seperti kopi, porang, bawang merah, dan cengkeh. Kinerja ini juga dapat dikaitkan dengan

meningkatnya keterlibatan pelaku usaha lokal, koperasi, dan BUMDes dalam pengolahan hasil pertanian, serta dukungan lembaga seperti perguruan tinggi dan LSM dalam penguatan kapasitas teknis. Namun pada tahun 2024, laju pertumbuhan kembali melambat menjadi 4,59 persen. Meski tetap berada di zona positif, penurunan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatasi kendala struktural seperti keterbatasan infrastruktur pengolahan, rendahnya investasi industri, serta belum optimalnya sinergi kelembagaan dalam mendukung rantai nilai industri pengolahan.

Secara keseluruhan, kinerja sektor industri pengolahan di Manggarai Timur mencerminkan proses pemulihan yang menjanjikan namun masih rapuh. Dari kondisi kontraktif di awal pandemi menuju tren pertumbuhan positif, sektor ini membutuhkan intervensi yang lebih strategis dan konsisten, seperti pengembangan kawasan industri kecil, penyediaan infrastruktur pendukung (seperti *cold storage* dan rumah produksi), serta peningkatan kapasitas SDM dan literasi kewirausahaan masyarakat. Ke depan, keberhasilan sektor ini akan sangat menentukan arah pembangunan ekonomi berkelanjutan di Manggarai Timur.

Tabel 2. 163 Jumlah Komponen Sektor Perindustrian di Manggarai Timur

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Sektor Perindustrian Kecil	7 Sektor	7 Sektor	7 Sektor	7 Sektor
Jenis sektor usaha	1. Pengolahan makanan 2. kerajinan/kriya 3. Logam 4. Tekstil 5. Otomotif/ perbengkelan 6. Pengolahan hasil pertanian 7. Souvenir	1. Pengolahan makanan 2. kerajinan/kriya 3. Logam 4. Tekstil 5. Otomotif/ perbengkelan 6. Pengolahan hasil pertanian 7. Souvenir	1. Pengolahan makanan 2. kerajinan/kriya 3. Logam 4. Tekstil 5. Otomotif/ perbengkelan 6. Pengolahan hasil pertanian 7. Souvenir	1. Pengolahan makanan 2. kerajinan/kriya 3. Logam 4. Tekstil 5. Otomotif/ perbengkelan 6. Pengolahan hasil pertanian 7. Souvenir

Sumber: Dinas Perindustrian, 2025

Jumlah komponen sektor perindustrian di Kab. Manggarai Timur Tahun 2021-2024 cenderung stagnan yaitu hanya berjumlah 7 sektor, dengan jenis sektor usaha pengolahan makanan, kerajinan/kriya, logam, tekstil, otomotif/perbengkelan, pengolahan hasil pertanian, souvenir. hal ini menunjukkan diversifikasi jenis usaha di kabupaten manggarai timur tidak berkembang.

32) Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan untuk mewujudkan pengembangan wilayah baru yang produktif dan berkelanjutan melalui penataan permukiman transmigrasi yang terpadu dengan potensi lokal. Program ini bertujuan mendorong pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran. Keberhasilan pelaksanaannya diukur melalui Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di kawasan transmigrasi sebagai hasil dari integrasi pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut.

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Elar (Kecamatan Elar dan Elar Selatan) Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di wilayah lainnya. Agar program ini berjalan lancar, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi penduduk yang berminat untuk bertransmigrasi. Namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan kegiatan transmigrasi di wilayah yang sudah ditetapkan yakni Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Elar dan RKT Elar Selatan. Hal ini disebabkan oleh karena belum ada Surat Keputusan Penetapan Kawasan Transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi.

33) Urusan Sekretariat Daerah

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Manggarai Timur tercermin melalui peningkatan berbagai indikator reformasi birokrasi yang menjadi pondasi dalam memperbaiki kualitas administrasi publik. Tujuan ini tidak hanya menekankan pada peningkatan kinerja, tetapi juga pada terciptanya sistem pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. 164 Kinerja Sekretariat Daerah Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	45,14	51,10	60,27
2	Indeks Kematangan Organisasi	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
3	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	45,14	51,10	76,26
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	N/A	N/A	N/A	1/9	5/9

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tren positif sejak pertama kali dicatat pada tahun 2022. Indeks ini meningkat dari 45,14 pada tahun 2022 menjadi 51,10 pada 2023, dan melonjak menjadi 60,27 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek birokrasi seperti perencanaan kinerja, pengawasan, akuntabilitas, serta penguatan sistem merit.

Namun, Indeks Kematangan Organisasi justru stagnan di angka 39,25 selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), menandakan belum adanya perubahan signifikan dalam struktur dan kapasitas kelembagaan birokrasi. Hal ini menjadi catatan penting bahwa meskipun reformasi berjalan, peningkatan daya dukung organisasi belum berjalan secara paralel.

Sementara itu, Indeks Reformasi Hukum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dimulai dari skor yang sama dengan indeks reformasi birokrasi (45,14) pada 2022, indeks ini meningkat menjadi 51,10 pada 2023 dan melonjak tajam menjadi 76,26 pada 2024. Ini menandakan adanya perbaikan

dalam sistem dan proses hukum di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk dalam aspek regulasi, pengawasan, dan kepastian hukum.

Adapun Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga menunjukkan progres. Jika pada 2023 hanya berada pada level 1 dari 9 (sangat awal), maka pada 2024 meningkat menjadi level 5 dari 9, yang menandakan UKPBJ mulai memasuki fase penguatan fungsi strategis dalam mendukung efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Timur telah mengalami kemajuan yang konsisten, khususnya dalam hal sistem hukum dan birokrasi inti. Namun, masih diperlukan dorongan lebih besar untuk memperkuat kelembagaan dan optimalisasi unit-unit pendukung agar tujuan tata kelola yang efektif dan efisien dapat tercapai secara menyeluruh.

34) Urusan Sekretariat DPRD

Unsur Sekretariat DPRD memiliki peran krusial dalam menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara optimal. Dengan tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sekretariat berperan sebagai fasilitator utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Dukungan administratif dan teknis yang efektif dari sekretariat menjadi kunci untuk memastikan bahwa lembaga legislatif daerah mampu bekerja secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 165 Kinerja Sekretariat Dewan Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Kinerja	100	100	100	100	100
2	Persentase Capaian Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	N/A	90,23	85,06	93,4	97,88

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase tingkat ketepatan waktu kinerja berada pada angka 100 persen selama lima tahun berturut-turut, menandakan bahwa seluruh dukungan administratif, baik dalam penyusunan jadwal kegiatan, penyampaian dokumen, maupun pelaksanaan agenda DPRD, telah dilaksanakan secara tepat waktu dan konsisten.

Sementara itu, persentase capaian fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan juga menunjukkan tren yang positif. Dimulai dari 90,23 persen pada tahun 2021, capaian sempat menurun menjadi 85,06 persen pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 93,4 persen di tahun 2023 dan mencapai 97,88 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan penguatan peran DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama, yang tentunya tidak terlepas dari kualitas dukungan kelembagaan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah menjalankan perannya secara efektif dan menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan kerja DPRD dalam menjalankan fungsinya secara maksimal di Kabupaten Manggarai Timur.

35) Unsur Perencanaan

Unsur Perencanaan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Tujuan ini diarahkan agar seluruh proses perencanaan di Kabupaten Manggarai Timur berjalan sistematis, terintegrasi, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal antar level pemerintahan maupun horizontal antar perangkat daerah. Perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. 166 Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	17.81	20.39	20.7	20.63	20.83
2	Pengukuran Kinerja	12.4	14.82	15.3	15.28	15.41
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	83.8	97.5	97.1	90.3
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100	98.51	97.26	95
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100	100	100	100	100
6	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	97,9	100	100	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Selama periode 2020–2024, sejumlah indikator utama menunjukkan pencapaian yang relatif stabil, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Indikator perencanaan kinerja mengalami peningkatan dari 17,81 pada tahun 2020 menjadi 20,83 pada tahun 2024, menunjukkan penguatan kapasitas perencanaan di perangkat daerah. Begitu pula pengukuran kinerja, yang naik dari 12,4 menjadi 15,41 dalam lima tahun terakhir. Keduanya mencerminkan kemajuan dalam penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja dalam siklus perencanaan pembangunan.

Dari sisi keselarasan dokumen, persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD sempat mengalami fluktuasi, yakni dari 100 persen pada 2020, turun ke 83,8 persen di 2021, lalu kembali meningkat di 2022 dan 2023, sebelum menurun kembali menjadi 90,3 persen pada 2024. Sementara itu, keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah juga menunjukkan tren menurun dari 100 persen di tahun 2020–2021 menjadi 95 persen pada tahun 2024. Meski masih dalam kategori tinggi, fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan menengah.

Di sisi lain, keselarasan RKPD dengan Renja PD, konsistensi program RKPD ke dalam APBD, dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

seluruhnya menunjukkan kinerja yang konsisten dan sempurna, yakni mencapai 100 persen pada hampir seluruh tahun pengukuran. Hal ini mencerminkan bahwa secara teknis, proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan telah memenuhi standar keselarasan dan konsistensi substansi dengan dokumen rencana jangka menengah maupun tata ruang wilayah.

Secara umum, kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur telah menunjukkan kemajuan yang baik, terutama dalam konsistensi antar dokumen dan manajemen kinerja. Namun, peningkatan keselarasan dokumen strategis serta penguatan aspek pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan masih perlu mendapat perhatian lebih untuk memastikan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

36) Unsur Keuangan

Unsur Keuangan merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Tujuan utama dari unsur ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, yang tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran serta optimalisasi potensi keuangan daerah.

Tabel 2. 167 Kinerja Keuangan Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	102,06	87,35	67,55	101,72	99,16
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5,18	8,36	2,27	12,29	-0,07
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4,58	4,00	3,12	3,90	3,37
5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,10	4,40	3,46	4,11	3,52
6	Persentase SILPA terhadap APBD	3,90	1,88	4,53	7,48	N/A
7	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	87,9	66,5	55,6	76	N/A
8	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	6,9	7,0	5,2	10	N/A

Sumber: Badan Perencanaan, 2025

Salah satu indikator utama, yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan, menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian ini mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum serta penguatan sistem pengendalian intern.

Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar mengalami fluktuasi cukup tajam, dari 102,06 persen pada tahun 2020 turun ke titik terendah 67,55 persen di tahun 2022, sebelum kembali meningkat ke 99,16 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, persentase penambahan nilai aset tetap menunjukkan tren yang tidak stabil. Setelah mencapai angka tertinggi 12,29 persen pada 2023, nilai ini justru menjadi negatif (-0,07 persen) pada 2024, yang mengindikasikan penurunan nilai aset atau minimnya investasi pada aset baru. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan aset daerah.

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih sangat rendah, hanya berkisar antara 3,12 persen hingga 4,58 persen sepanjang periode 2020–2024. Hal ini turut memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah yang berada pada tingkat sangat rendah, turun dari 5,10 persen (2020) menjadi 3,52 persen (2024). Kondisi ini menunjukkan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap transfer dana dari pusat.

Dari aspek efisiensi, rasio efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan dari 87,9 persen pada tahun 2020 menjadi 55,6 persen di 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 76 persen pada 2023. Rasio efektivitas keuangan daerah juga mengalami fluktuasi, namun menunjukkan tren membaik dengan capaian tertinggi 10 persen pada 2023.

Terakhir, persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap APBD meningkat dari 3,90 persen pada 2020 menjadi 7,48 persen pada 2023. Peningkatan SILPA dapat mencerminkan efisiensi anggaran, tetapi juga bisa mengindikasikan adanya penundaan belanja atau kurang optimalnya pelaksanaan program prioritas.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Manggarai Timur berhasil menjaga opini WTP dari BPK, masih diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi aset, serta pelaksanaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran agar tujuan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berdaya guna dapat tercapai secara menyeluruh.

37) Unsur Kepegawaian

Unsur Kepegawaian merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah yang berfungsi untuk menjamin pengelolaan sumber daya aparatur secara profesional dan berkelanjutan. Tujuan dari unsur ini adalah terwujudnya profesionalitas ASN yang ditandai oleh kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas secara kompeten, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi. Profesionalitas ASN menjadi pondasi dalam membangun birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Tabel 2. 168 Kinerja Kepegawaian Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	45,49	48,99	59,35	58,43	76,3
2	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	108	145,1	101,14	138,28	86,14
3	Nilai NSPK	63	70,07	70,61	70,62	N/A
4	Sistem Merit	N/A	N/A	174,5	210	N/A
5	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,27	0,46	0,22	178	93

Sumber: BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Selama periode 2020–2024, Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren meningkat signifikan, dari 45,49 pada tahun 2020 menjadi 76,3 pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional. Namun, persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada 2021 sebesar 145,1 persen dan penurunan menjadi 86,14 persen pada 2024. Fluktuasi ini menandakan adanya tantangan dalam konsistensi penerapan sistem evaluasi kinerja ASN.

Capaian nilai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) relatif stabil pada angka 70 dari tahun 2021 hingga 2023, yang mengindikasikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dalam pengelolaan kepegawaian. Selain itu, penerapan sistem merit, yang mulai tercatat sejak 2022, menunjukkan peningkatan dari 174,5 menjadi 210 pada tahun 2023. Hal ini merupakan kemajuan penting dalam membangun sistem pengelolaan ASN yang adil, objektif, dan berbasis kompetensi.

Namun demikian, indikator persentase pelanggaran pegawai menunjukkan anomali yang perlu menjadi perhatian serius. Setelah menurun dari 0,46 persen pada tahun 2021 menjadi 0,22 persen di 2022, terjadi lonjakan drastis menjadi 178 persen pada tahun 2023 dan 93 persen pada 2024. Kenaikan ekstrem ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan metode pencatatan atau cakupan pengukuran, namun tetap menjadi sinyal penting perlunya penguatan sistem pengawasan, pembinaan disiplin, serta penegakan etika profesi di lingkungan ASN.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek profesionalisme dan sistem merit, keberhasilan reformasi kepegawaian di Kabupaten Manggarai Timur akan sangat bergantung pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan penurunan pelanggaran disiplin sebagai bagian dari penguatan budaya kerja yang sehat dan berintegritas.

38) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Pendidikan dan Pelatihan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang profesional. Tujuan dari unsur ini adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN agar mampu menjalankan tugas secara optimal dan adaptif terhadap perkembangan tuntutan pelayanan publik. Pendidikan dan pelatihan menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kapasitas kompetensi ASN, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun sosial kultural.

Tabel 2. 169 Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	8,64	8,80	8,77	8,63	26,34
2	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	100	100	21,28	100	25,84
3	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis	61,52	58,1	55,31	41,95	41,28

Sumber: BKPSDM Kabupaten Manggarai Timur, 2025

Selama periode 2020–2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada tahun 2020–2023 nilai indeks ini berada di kisaran stabil antara 8,63 hingga 8,80, maka pada tahun 2024 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 26,34. Kenaikan ini dapat mencerminkan adanya perubahan pendekatan atau peningkatan pelaksanaan pelatihan yang lebih masif dan terukur di tahun tersebut.

Namun demikian, persentase jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah konsisten berada di angka 100 persen pada tahun 2020 dan 2021, capaian ini turun drastis menjadi 21,28 persen pada 2022, kembali naik menjadi 100 persen di 2023, dan kembali menurun menjadi 25,84 persen di 2024. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan program sertifikasi kompetensi serta kebutuhan untuk memperkuat manajemen dan pemantauan pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional.

Sementara itu, persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi teknis mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 61,52 persen pada

tahun 2020 menjadi hanya 41,28 persen pada 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun pelatihan dan sertifikasi telah dilakukan, pemerataan penguasaan kompetensi teknis belum sepenuhnya tercapai di seluruh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat capaian positif dalam indeks kompetensi ASN, tantangan nyata masih dihadapi terutama dalam aspek keterpenuhan standar kompetensi teknis dan keberlanjutan sertifikasi jabatan fungsional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelatihan yang lebih terarah, berbasis kebutuhan jabatan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten guna menjamin peningkatan kompetensi ASN secara menyeluruh dan berkelanjutan.

39) Unsur Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan strategis dalam menyediakan dasar ilmiah dan inovatif bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah. Tujuan dari unsur ini adalah meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat disusun secara berbasis data, berbasis bukti (*evidence-based*) dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Tabel 2. 170 Kinerja Penelitian dan Pengembangan Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kapabilitas Inovasi	N/A	N/A	0,09	0,91	1,41
2	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	0	0	0	0	0
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	7,5	7,5	7,5	7,5	N/A
5	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	0	55	55	55	N/A

Sumber: Bapperida, 2025

Capaian kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Kabupaten Manggarai Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan

adanya kemajuan di beberapa aspek, meskipun tantangan masih cukup besar dalam hal pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan. Indeks Kapabilitas Inovasi, yang baru mulai diukur pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan dari 0,09 menjadi 0,91 pada 2023, dan naik lagi menjadi 1,41 pada 2024. Meskipun nilainya masih relatif rendah, tren ini mengindikasikan adanya upaya awal yang positif dalam membangun kapasitas inovasi di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, persentase implementasi rencana kelitbangan menunjukkan kinerja sempurna, yakni 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Ini menandakan bahwa rencana kegiatan penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan sesuai rencana. Namun, hal ini belum dibarengi dengan hasil yang maksimal, mengingat persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tetap berada di angka 0 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan riset dan pemanfaatannya dalam proses pengambilan kebijakan atau inovasi program.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah juga stagnan di angka 7,5 persen selama empat tahun terakhir, tanpa adanya data terbaru di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis inovasi masih terbatas dan belum menyebar secara merata di seluruh sektor. Dari sisi fasilitasi, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi meningkat dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 55 persen mulai tahun 2021 hingga 2023. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk mendorong adopsi inovasi lintas perangkat daerah, meskipun belum terlihat peningkatan lebih lanjut setelahnya.

Secara umum, meskipun ada kemajuan pada aspek perencanaan dan fasilitasi inovasi, keberhasilan Unsur Litbang masih menghadapi tantangan besar pada sisi hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset. Ke depan, integrasi antara hasil kelitbangan dan proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah perlu diperkuat agar riset benar-benar berperan strategis dalam menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

40) Unsur Pengawasan

Unsur Pengawasan merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan. Melalui penguatan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Tabel 2. 171 Kinerja Pengawasan Kabupaten Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	54,10	60,01	60,85	60,82	61,31
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	2,14	2,23	2,31	2,82
3	Pelaporan Kinerja	9,54	10,08	10,05	10,01	10,13
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,35	14,72	14,80	14,86	14,94
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2,14	2,53	3
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan	94%	79,58%	93,17%	86%	84,41%
7	Jumlah Temuan BPK (Rp)	1.142.423. 565,54	915.649. 805,01	774.222. 500,45	699.766. 935,19	1.965.432. 146,34

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Selama periode 2020–2024, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus meningkat dari 54,10 pada tahun 2020 menjadi 61,31 pada 2024. Peningkatan ini menjadi indikator awal bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program mulai mengarah pada prinsip tata kelola yang lebih akuntabel. Selanjutnya, maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan peningkatan konsisten, dari skor 2,14 pada 2021 menjadi 2,82

pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya penguatan sistem pengendalian yang mulai terintegrasi dalam manajemen risiko, pengendalian kegiatan, dan pemantauan internal secara lebih sistematis. Pelaporan kinerja juga mengalami perbaikan, meskipun secara angka tergolong stabil pada kisaran 9,54 hingga 10,13. Hal serupa terlihat pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yang menunjukkan tren peningkatan dari 14,35 pada tahun 2020 menjadi 14,94 pada 2024. Stabilitas kedua indikator ini menandakan adanya kesinambungan dalam proses pelaporan dan evaluasi sebagai bagian dari pengawasan kinerja internal.

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga mengalami peningkatan dari level kapabilitas 2 pada tahun 2020–2021 menjadi level 3 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pengawasan internal daerah dalam melakukan audit, reviu, monitoring, dan evaluasi secara lebih profesional dan berbasis risiko. Namun demikian, persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan masih fluktuatif. Setelah sempat berada pada 93,17 persen di 2022, angkanya menurun menjadi 84,41 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam menyelesaikan temuan-temuan audit secara cepat dan tuntas.

Sementara itu, jumlah temuan BPK dalam rupiah mengalami penurunan dari Rp1,1 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp 699 juta pada tahun 2023, namun kembali melonjak tajam menjadi hampir Rp2 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini perlu dicermati secara serius, karena dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau lemahnya kontrol internal pada beberapa unit kerja.

Secara keseluruhan, meskipun indikator sistem pengawasan internal menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, tantangan masih perlu dihadapi terutama dalam menurunkan jumlah temuan dan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut audit. Ke depan, penguatan SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, serta penegakan tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan harus menjadi fokus untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin akuntabel dan berkinerja baik.

41) Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum memegang peran penting dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai dasar bangsa. Tujuan utama dari unsur ini adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penguatan ideologi, pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta penyelesaian konflik sosial menjadi bagian integral dalam menciptakan kehidupan demokratis yang inklusif, adil, dan damai.

Tabel 2. 172 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Manggarai Timur

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Demokrasi Indonesia	35	99,95	N/A	N/A	69,72
2	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100
3	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	N/A	N/A	N/A	N/A	100
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	100
6	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 2025

Selama periode 2020–2024, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Setelah mencatat skor rendah sebesar 35 pada tahun 2020, IDI melonjak drastis menjadi 99,95 pada tahun 2021, mencerminkan iklim demokrasi yang sangat baik. Namun, data untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia, dan pada tahun 2024, IDI tercatat menurun menjadi 69,72. Meskipun skor tersebut masih berada dalam kategori moderat, penurunan dari capaian sebelumnya mengindikasikan adanya dinamika dan tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Capaian indikator lainnya menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif mencapai 100 persen secara konsisten selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), mencerminkan tingginya partisipasi warga dalam kehidupan berorganisasi. Sementara itu, pada tahun 2024, sejumlah indikator lain seperti cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pendidikan politik pada kader partai politik, pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penyelesaian konflik sosial juga mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ideologis, menjaga stabilitas sosial, serta membangun ketahanan masyarakat berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam aspek demokrasi formal seperti IDI, indikator-indikator lain dalam unsur pemerintahan umum menunjukkan kinerja yang solid. Ke depan, tantangan terletak pada menjaga konsistensi kualitas demokrasi substantif di daerah, termasuk mendorong partisipasi politik yang sehat, memperkuat institusi masyarakat sipil, serta memastikan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan HAM dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk menggerakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai bidang-bidang pembangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program*).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang juga menjadi tolok ukur dalam menghitung kinerja keuangan daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Oleh karena itu, supaya penjelasan kinerja pengelolaan Keuangan daerah lima tahun lalu dapat disinkronisasi dengan proyeksi tahun 2026-2030 mendatang, maka analisis kinerja pelaksanaan APBD untuk tahun 2020-2024 dikonversikan dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Tabel 2. 173 Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	PENDAPATAN					
	A Pendapatan Asli Daerah	49.870.019.418,00	47.138.221.466,00	36.911.247.111,00	56.756.055.406,00	41.465.254.859,39
	B Pendapatan Transfer	932.963.742.121,00	1.004.267.360.435,00	956.356.610.234,00	1.155.931.597.607,00	1.176.550.133.976,00
	C Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.959.387.097,00	55.892.916.499,00	70.280.794.784,00	13.712.572.180,00	13.984.572.592,20
	JUMLAH PENDAPATAN	1.040.793.148.636,00	1.107.298.498.400,00	1.063.548.652.129,00	1.226.400.225.193,00	1.231.999.961.427,59
2	BELANJA					
	A Belanja Operasi	590.752.218.030,18	603.900.139.500,00	622.219.433.975,00	643.448.064.793,58	758.954.688.587,56
	B Belanja Modal	180.154.629.304,00	243.476.296.368,00	185.556.429.256,00	359.359.367.995,00	234.241.680.749,00
	C Belanja Tak Terduga	5.269.810.124,00	14.135.379.712,00	2.950.657.010,00	367.796.702,00	653.200.277,00
	D Belanja Transfer	247.175.196.650,00	250.668.599.887,00	221.441.299.122,00	211.654.506.329,00	216.425.825.580,00
	JUMLAH BELANJA	1.023.351.854.108,00	1.112.180.415.467,00	1.032.167.819.363,00	1.214.829.735.819,00	1.210.275.395.193,56
	SURPLUS/DEFISIT	15.163.796.658,60	-20.351.951.551,00	25.036.182.628,00	2.281.778.105,28	21.724.566.234,03
3	PEMBIAYAAN					
	A Penerimaan Pembiayaan	36.936.074.086,30	41.925.255.408,00	24.102.772.301,00	147.868.027.983,29	94.979.964.388,57

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	B Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	12.500.000.000,00	2.520.000.000,00	55.169.841.700,00	47.516.354.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.717.238.749,30	29.425.255.407,90	21.582.772.300,70	92.698.186.283,30	47.463.610.388,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	41.881.035.407,90	21.573.303.856,66	49.138.954.928,29	94.979.964.388,57	69.188.176.622,60

* Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Tabel 2. 174 Pertumbuhan Realisasi APBD Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata -Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN					
	A Pendapatan Asli Daerah	-5,48%	-21,70%	53,76%	-5,18%	5,35%
	B Pendapatan Transfer	7,64%	-4,77%	20,87%	1,78%	6,38%
	C Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-3,57%	25,74%	-80,49%	1,98%	-14,08%
	JUMLAH PENDAPATAN	6,39%	-3,95%	15,31%	1,46%	4,80%
2	BELANJA					
	A Belanja Operasi	2,23%	3,03%	3,41%	17,95%	6,66%
	B Belanja Modal	35,15%	-23,79%	93,67%	-34,82%	17,55%
	C Belanja Tak Terduga	168,23%	-79,13%	-87,54%	77,60%	19,79%
	D Belanja Transfer	1,41%	-11,66%	-4,42%	2,25%	-3,10%
	JUMLAH BELANJA	8,68%	-7,19%	17,70%	-0,37%	4,70%
	SURPLUS/DEFISIT	-234,21%	-223,02%	-90,89%	852,09%	75,99%
3	PEMBIAYAAN					
	A Penerimaan Pembiayaan	13,51%	-42,51%	513,49%	-35,77%	112,18%
	B Pengeluaran Pembiayaan	25,00%	-79,84%	2089,28%	-13,87%	505,14%

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata -Rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN NETTO	10,14%	-26,65%	329,50%	-48,80%	66,05%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	-48,49%	127,78%	93,29%	-27,15%	36,36%

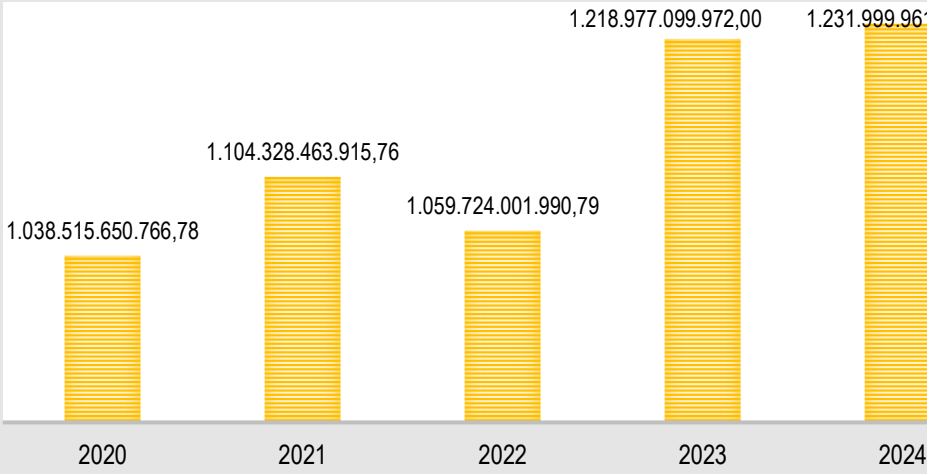
* Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 4,80 persen. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19, pendapatan Kabupaten Manggarai Timur sempat mengalami penurunan menjadi Rp 1.040.793.148.636,00. Pendapatan kembali meningkat seiring mulai pulihnya perekonomian nasional menjadi Rp 1.231.999.961.427,59 pada tahun 2024. Adapun perkembangan pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024 dapat terlihat sebagaimana dalam gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020-2024

Gambar 2. 17 Pendapatan Daerah Manggarai Timur berdasarkan Sumber Pendapatan

Data pada gambar di atas memberikan gambaran mengenai pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan tahun 2020- 2024. Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menyumbang lebih dari 90 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38 persen. Dalam kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan masih merupakan sumber pendapatan terbesar daerah mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp 971.000.877.066,00 dan memiliki rata-rata pertumbuhan 8,53 persen. Angka ini mencerminkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dari Dana Perimbangan tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi (46,98 persen), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) (31,42 persen), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (0,41 persen).

Komponen Pendapatan Asli Daerah, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,35 persen dari Rp 47.552.521.549,00 menjadi Rp 41.465.254.859,39 dengan pertumbuhan tertinggi didapat dari pajak daerah dengan nilai mencapai Rp 15.055.200.365,00 di tahun 2024. Sementara

komponen lain yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah yaitu Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 18.541.639.098,39 dan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,38 persen.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 175 Realisasi Pendapatan Daerah Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	**1.038.475.650.767,00**	**1.104.328.463.916,00**	**1.059.724.001.990,79**	**1.217.111.513.924,73**	**1.231.999.961.427,59**	**4,59%**
Pendapatan Asli Daerah	**47.552.521.549,00**	**44.168.186.982,00**	**33.086.596.972,79**	**47.467.344.137,73**	**41.465.254.859,39**	**-0,35%**
Pajak Daerah	12.490.746.249,00	12.312.478.128,00	13.741.199.604,00	18.996.984.197,00	15.055.200.365,00	6,92%
Retribusi Daerah	2.868.218.118,00	2.647.973.407,00	3.614.472.973,50	2.826.406.463,20	3.213.542.363,00	5,18%
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	10.437.225.306,00	10.261.866.180,00	6.335.890.845,00	10.065.795.251,00	4.654.873.033,00	-8,71%
Lain-lain PAD yang Sah	21.756.331.876,00	18.945.869.267,00	9.395.033.550,29	15.578.158.226,53	18.541.639.098,39	5,38%
Pendapatan Transfer	**932.963.742.121,00**	**1.004.267.360.435,00**	**956.356.610.234,00**	**1.155.931.597.607,00**	**1.176.550.133.976,00**	**6,38%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.630.711.362,00	986.170.179.982,00	932.677.707.281,00	1.128.981.867.375,00	1.147.208.363.066,00	6,26%
Dana Perimbangan	709.666.370.362,00	756.534.510.982,00	760.725.506.281,00	944.063.803.875,00	971.000.877.066,00	8,53%
Dana Bagi	7.258.352.609,00	12.294.873.987,00	10.650.854.678,00	5.725.093.036,00	5.077.431.000,00	-0,39%

Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak						
Dana Alokasi Umum	488.307.791.000,00	486.677.418.000,00	478.716.850.148,00	522.531.134.657,00	578.835.877.278,00	4,49%
Dana Alokasi Khusus	214.100.226.753,00	257.562.218.995,00	271.357.801.455,00	415.807.576.182,00	387.087.568.788,00	18,00%
Dana Insentif Daerah	8.667.246.000,00	33.338.574.000,00	1.938.300.000,00	27.470.913.000,00	19.587.672.000,00	369,76%
Dana Desa	196.297.095.000,00	196.297.095.000,00	170.013.901.000,00	157.447.150.500,00	156.619.814.000,00	-5,33%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.333.030.759,00	18.097.180.453,00	23.678.902.953,00	26.949.730.232,00	29.341.770.910,00	13,06%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**57.959.387.097,00**	**55.892.916.499,00**	**70.280.794.784,00**	**13.712.572.180,00**	**13.984.572.592,20**	**-14,08%**
Hibah	57.959.387.097,00	55.892.916.499,00	15.822.508.638,00	70.180.000,00	32.000.000,00	-57,30%
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	0,00	54.458.286.146,00	13.642.392.180,00	13.952.572.592,20	-18,17%

Uraian	Realisasi APBD					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Perundang-undangan						
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

* Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Tabel 2. 176 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Manggarai Timur

No	Sumber Pendapatam	Pertumbuhan (%)				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-rata Pertumbuhan
1	**PENDAPATAN**	**6,34%**	**-4,04%**	**14,85%**	**1,22%**	**4,59%**
	Pendapatan Asli Daerah	-7,12%	-25,09%	43,46%	-12,64%	-0,35%
	Pajak Daerah	-1,43%	11,60%	38,25%	-20,75%	6,92%
	Retribusi Daerah	-7,68%	36,50%	-21,80%	13,70%	5,18%
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	-1,68%	-38,26%	58,87%	-53,76%	-8,71%
2	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**-12,92%**	**-50,41%**	**65,81%**	**19,02%**	**5,38%**
	Pendapatan Transfer	7,64%	-4,77%	20,87%	1,78%	6,38%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7,82%	-5,42%	21,05%	1,61%	6,26%
	Dana Perimbangan	6,60%	0,55%	24,10%	2,85%	8,53%
3	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**69,39%**	**-13,37%**	**-46,25%**	**-11,31%**	**-0,39%**
	Dana Alokasi Umum	-0,33%	-1,64%	9,15%	10,78%	4,49%
	Dana Alokasi Khusus	20,30%	5,36%	53,23%	-6,91%	18,00%
	Dana Insentif Daerah	284,65%	-94,19%	1317,27%	-28,70%	369,76%
	Dana Desa	0,00%	-13,39%	-7,39%	-0,53%	-5,33%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-1,29%	30,84%	13,81%	8,88%	13,06%
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**-3,57%**	**25,74%**	**-80,49%**	**1,98%**	**-14,08%**

No	Sumber Pendapatam	Pertumbuhan (%)				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-rata Pertumbuhan
	Hibah	-3,57%	-71,69%	-99,56%	-54,40%	-57,30%
	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	0,00%	-74,95%	2,27%	-18,17%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024 (data diolah)

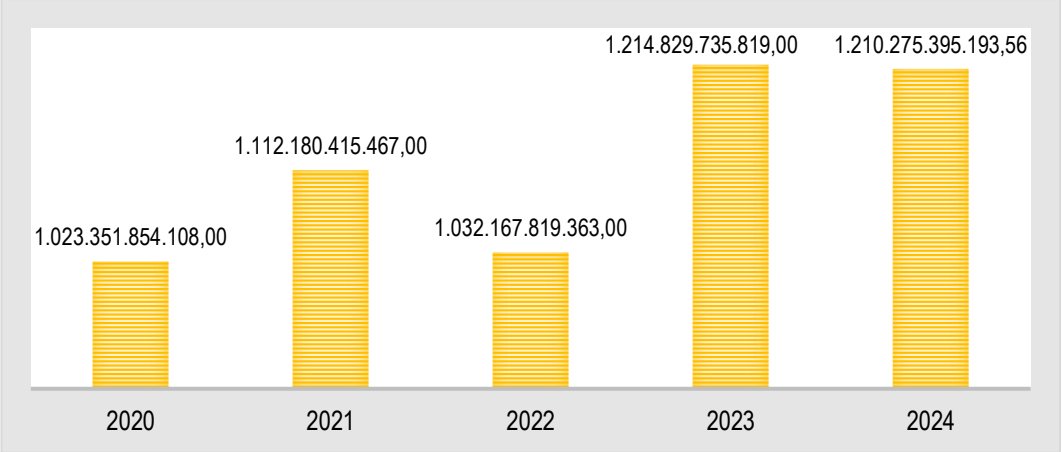
Pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan dua realitas kunci yaitu ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat dan upaya pemulihan PAD yang belum maksimal. Dana Perimbangan tetap menjadi penyangga utama dengan pertumbuhan 8,53 persen, didominasi oleh DAU yang berkontribusi 46,98 persen. Namun, pertumbuhan DAU yang hanya 4,49 persen lebih rendah dari rata-rata historis menunjukkan adanya tekanan pada anggaran daerah. Sementara itu, komponen PAD seperti pajak daerah (6,92 persen) dan retribusi (5,18 persen) memang tumbuh positif, tetapi kontribusinya terhadap total pendapatan masih minim sehingga mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal lokal. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil yang stagnan (-0,39 persen) dan hibah yang turun drastis (-14,09 persen) mempertegas kerentanan daerah terhadap perubahan kebijakan pusat. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal, baik melalui optimalisasi PAD maupun penguatan tata kelola keuangan daerah agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada transfer pusat yang fluktuatif.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten sesuai dengan arahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum

daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Lebih lanjut, analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut merupakan gambaran dari Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2.17
Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024 (data diolah)

Gambar 2. 18 Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, Realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2020-2024 memiliki tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari Rp 1.023.351.854.108,00 di tahun 2020 yang kemudian naik hingga 1.214.829.735.819,00 di tahun 2023 dan menurun di tahun 2024 menjadi Rp 1.210.275.395.193,56. Fluktuasi ini berhubungan dengan komponen penyusun dari Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Bagi Hasil dan

Belanja Bantuan Keuangan. Berikut rincian dari komponen-komponen tersebut.

Tabel 2. 177 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024*	
Belanja Daerah	**1.023.351.854.108,00**	**1.112.180.415.467,00**	**1.032.167.819.363,00**	**1.214.829.735.819,45**	**1.210.275.395.193,56**	**4,70%**
Belanja Operasi	**590.752.218.030,00**	**603.900.139.500,00**	**622.219.433.975,00**	**643.448.064.793,00**	**758.954.688.587,56**	**6,66%**
Belanja Pegawai	318.253.145.749,00	335.980.100.693,00	349.048.166.411,00	357.673.767.875,00	429.193.586.037,00	7,98%
Belanja Barang dan Jasa	243.427.904.247,00	255.361.091.607,00	263.305.221.112,00	250.174.150.039,00	266.584.651.960,74	2,40%
Belanja Bunga	0,00	0,00	539.912.250,00	2.675.666.416,00	1.256.013.228,82	85,63%
Belanja Hibah	6.853.218.034,00	6.779.047.200,00	8.422.534.202,00	19.960.286.802,00	61.920.437.361,00	92,59%
Belanja Bantuan Sosial	22.217.950.000,00	5.779.900.000,00	903.600.000,00	12.964.193.661,00	0,00	269,09%
Belanja Modal	**180.154.629.304,00**	**243.476.296.368,00**	**185.556.429.256,00**	**359.359.367.995,00**	**234.241.680.749,00**	**17,55%**
Belanja Modal Tanah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00%
Belanja	55.321.186.462,00	53.387.550.102,00	42.057.552.905,00	57.499.818.824,00	55.800.276.096,00	2,26%

Uraian	Tahun					Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024*	
Modal Peralatan dan Mesin						
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.224.161.270,00	56.017.310.376,00	40.443.065.521,00	79.522.079.374,00	84.562.513.574,00	24,09%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.066.387.566,00	128.140.250.090,00	94.801.317.882,00	213.233.845.685,00	86.216.452.076,00	30,56%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.517.894.006,00	5.931.185.800,00	4.782.553.628,00	6.627.338.997,00	6.453.439.003,00	-3,45%
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	3.471.939.320,00	2.476.285.115,00	1.209.000.000,00	-19,96%
Belanja Tak Terduga	**5.269.810.124,00**	**14.135.379.712,00**	**2.950.657.010,00**	**367.796.702,00**	**653.200.277,00**	**19,79%**
Belanja Tidak Terduga	5.269.810.124,00	14.135.379.712,00	2.950.657.010,00	367.796.702,00	653.200.277,00	19,79%
Belanja Transfer	**247.175.196.650,00**	**250.668.599.887,00**	**221.441.299.122,00**	**211.654.506.329,00**	**216.425.825.580,00**	**-3,10%**

Uraian	Tahun					Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024*	
Belanja Bagi Hasil	**1.875.203.517,00**	**3.259.498.750,00**	**1.315.015.942,00**	**1.150.637.539,00**	760.191.167,00	**-8,07%**
Belanja Bagi Hasil	1.649.040.702,00	2.821.488.408,00	1.315.015.942,00	1.150.637.539,00	760.191.167,00	-7,18%
Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	226.162.815,00	438.010.342,00	0,00	0,00	0,00	-1,58%
Belanja Bantuan Keuangan	**245.299.993.133,00**	**247.409.101.137,00**	**220.126.283.180,00**	**210.503.868.790,00**	**215.665.634.413,00**	**-3,02%**
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	244.740.455.933,00	247.409.101.137,00	0,00	0,00	215.665.634.413,00	-24,73%
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	559.537.200,00		220.126.283.180,00	210.503.868.790,00	0,00	-51,09%

* Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024

Tabel 2. 178 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan (%)				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-Rata
Belanja Daerah	8,68%	-7,19%	17,70%	-0,37%	**4,70%**
Belanja Operasi	2,23%	3,03%	3,41%	17,95%	**6,66%**
Belanja Pegawai	5,57%	3,89%	2,47%	20,00%	**7,98%**
Belanja Barang dan Jasa	4,90%	3,11%	-4,99%	6,56%	**2,40%**
Belanja Bunga	0,00%	0,00%	395,57%	-53,06%	**85,63%**
Belanja Hibah	-1,08%	24,24%	136,99%	210,22%	**92,59%**
Belanja Bantuan Sosial	-73,99%	-84,37%	1334,73%	-100,00%	**269,09%**
Belanja Modal	35,15%	-23,79%	93,67%	-34,82%	**17,55%**
Belanja Modal Tanah	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**-25,00%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-3,50%	-21,22%	36,72%	-2,96%	**2,26%**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,19%	-27,80%	96,63%	6,34%	**24,09%**
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82,88%	-26,02%	124,93%	-59,57%	**30,56%**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-30,37%	-19,37%	38,57%	-2,62%	**-3,45%**
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00%	0,00%	-28,68%	-51,18%	**-19,96%**
Belanja Tak Terduga	168,23%	-79,13%	-87,54%	77,60%	**19,79%**
Belanja Tidak Terduga	168,23%	-79,13%	-87,54%	77,60%	**19,79%**
Transfer	1,41%	-11,66%	-4,42%	2,25%	**-3,10%**
Belanja Bagi Hasil	73,82%	-59,66%	-12,50%	-33,93%	**-8,07%**
Belanja Bagi Hasil	71,10%	-53,39%	-12,50%	-33,93%	**-7,18%**
Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	93,67%	-100,00%	0,00%	0,00%	**-1,58%**

Uraian	Pertumbuhan (%)				
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-Rata
Belanja Bantuan Keuangan	0,86%	-11,03%	-4,37%	2,45%	**-3,02%**
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1,09%	-100,00%	0,00%	0,00%	**-24,73%**
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100,00%	0,00%	-4,37%	-100,00%	**-51,09%**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024 (data diolah)

Belanja Operasi menjadi komponen belanja yang memiliki proporsi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dengan nilai mencapai Rp 590.752.218.030,00 pada tahun 2020 hingga Rp 758.954.688.587,56 pada tahun 2024 serta memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66 persen. Belanja Pegawai memiliki proporsi tertinggi dengan nilai Rp 429.193.586.037,00 di tahun 2024 dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 20 persen dari tahun 2023 ke 2024. Hal ini diakibatkan adanya penambahan pada penyediaan gaji ASN setelah rekrutmen nasional CPNS dan PPPK di tahun 2024. Di sisi lain, Belanja Barang dan Jasa menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata 2,40 persen per tahun. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan yang mencolok menjadi Rp 461.950.860,74 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 574.150.939.000,00. Belanja Bunga dan Hibah menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Belanja Hibah, misalnya, menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, mencapai rata-rata 92,90 persen, terutama pada tahun 2024 yang mencapai Rp 61.920.437.361,00 dari Rp 19.960.286.802,00 di tahun 2023.

Belanja Modal menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,55 persen per tahun, dari Rp 180.154.629.304,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 234.241.680.749,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini sangat positif karena mengindikasikan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset produktif. Belanja Gedung dan Bangunan menunjukkan pertumbuhan rata-rata 24,09 persen, dari Rp 46.224.161.270,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 84.562.513.574,00 pada tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan fasilitas publik. Sedangkan sub komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata 30,56 persen, dari Rp 70.066.387.566,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 86.216.452.076,00 pada tahun 2024.

Belanja Tak Terduga menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 19,79 persen per tahun. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 nilainya relatif tinggi,

penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023 hingga mencapai Rp 367.796.702,00 menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan terkendali dalam manajemen risiko fiskal daerah. Namun, kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi Rp 653.200.277,00. Belanja Transfer secara keseluruhan menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 3,10 persen per tahun. Tren ini mengindikasikan adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah daerah ke entitas lain, yang memerlukan evaluasi dampak terhadap penerima transfer. Selanjutnya pada Belanja Bagi Hasil menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 7,18 persen, dari Rp 1.649.040.702,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 760.191.167,00 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh fluktuasi penerimaan bagi hasil atau perubahan kebijakan pembagian pendapatan. Terakhir, Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 1,50 persen. Komponen Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa juga mengalami penurunan rata-rata 3,02 persen, berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal desa. Yang paling mencolok adalah Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif yang sangat signifikan sebesar 51,09 persen, dan mencapai nilai Rp 0,00 pada tahun 2024, yang mengindikasikan penghentian alokasi atau perubahan klasifikasi belanja.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Tabel 2. 179 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI APBD					Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024*	
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	36.717.238.749,00	41.925.255.408,00	24.102.772.301,00	147.868.027.983,00	94.979.964.388,57	112,35%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.591.487.086,00	41.925.255.408,00	21.582.772.301,00	49.181.832.283,00	94.979.964.389,00	46,76%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	2.520.000.000,00	98.686.195.700,00	0,00	929,03%
Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	125.751.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00%
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	12.500.000.000,00	2.520.000.000,00	55.169.841.700,00	47.516.354.000,00	505,14%
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	-43,75%
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	2.520.000.000,00	51.169.841.700,00	47.516.354.000,00	480,85%
Pembiayaan Netto	26.717.238.749,30	29.425.255.407,90	21.582.772.300,70	92.698.186.283,30	47.463.610.388,57	66,05%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	41.881.035.408,00	21.573.303.857,00	49.138.954.928,00	94.979.964.389,00	69.188.176.622,60	36,36%

* Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Tabel 2. 180 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

URAIAN	PERTUMBUHAN (%)				Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	14,18%	-42,51%	513,49%	-35,77%	112,35%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14,58%	-48,52%	127,88%	93,12%	46,76%
Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penerimaan pinjaman daerah	0,00%	0,00%	3816,12%	-100,00%	929,03%
Penerimaan Kembali Piutang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-25,00%
Pengeluaran Pembiayaan	25,00%	-79,84%	2089,28%	-13,87%	505,14%
Penyertaan Modal Daerah	25,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-43,75%
Pembayaran Pokok Utang	0,00%	0,00%	1930,55%	-7,14%	480,85%
Pembiayaan Netto	10,14%	-26,65%	329,50%	-48,80%	66,05%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-48,49%	127,78%	93,29%	-27,15%	36,36%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur (2024)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam pengelolaan pembiayaan daerah selama periode 2020-2024. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan, komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mendominasi pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 36.591.487.086,00 dan Rp 41.925.255.408,00, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 46,76 persen. Namun, pada tahun 2022, terjadi perubahan drastis dengan munculnya Penerimaan Pinjaman Daerah yang sangat besar, mencapai Rp 2.520.000.000,00, dan melonjak lebih tinggi lagi pada tahun 2023 menjadi Rp 98.686.195.700,00, sebelum akhirnya kembali tidak tercatat pada data sementara tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan strategis daerah dalam memanfaatkan sumber pembiayaan eksternal untuk tujuan tertentu pada tahun-tahun tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan Penerimaan Pinjaman Daerah yang sangat tinggi, mencapai 929,03 persen. Sementara itu, komponen penerimaan lainnya seperti Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen menunjukkan penurunan yang signifikan, dari Rp 125.751.663,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 0,00 pada tahun-tahun berikutnya, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar minus 25,00 persen. Secara keseluruhan, Penerimaan Pembiayaan menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 112,35 persen.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah terlihat signifikan pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan Rp 12.500.000.000,00, namun kemudian tidak tercatat lagi, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar minus 43,75 persen. Sebaliknya, pembayaran pokok utang baru muncul dalam jumlah besar pada tahun 2022 sebesar Rp 2.520.000.000,00 dan meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi Rp 51.169.841.700,00, serta tercatat cukup tinggi pada data sementara tahun 2024 sebesar Rp 47.516.354.000,00, dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat signifikan, mencapai 480,85 persen. Secara keseluruhan, Pengeluaran Pembiayaan menunjukkan rata-rata

pertumbuhan yang sangat tinggi pula, yaitu sebesar 505,14 persen. Pembiayaan Netto menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 92.698.186.283,30 yang didorong oleh tingginya penerimaan pinjaman daerah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 66,05 persen. Terakhir, Sisa Lebih Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) juga mengalami dinamika, dengan nilai tertinggi pada data sementara tahun 2024 sebesar Rp 69.188.176.622,60, mengindikasikan adanya potensi akumulasi dana yang cukup besar di akhir periode tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,36 persen.

2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar). Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2020 -2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 181 Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	Nilai (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	**Asset**					
	Asset lancar	56.753.248.620,41	42.371.600.130,89	79.777.823.887,77	125.976.864.309,89	94.429.758.379,90
	Kas di Kas Daerah	35.206.251.257,71	20.478.636.473,90	47.603.453.530,12	83.318.769.144,28	58.227.112.260,11
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	79.683.463,57	3.262.100,00	71.975.793,51	37.060.998,43
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kas di BLUD	146.141.893,00	48.702.638,00	488.480.291,70	2.188.128.900,22	2.772.276.792,04
	Kas di Bendahara BOS	4.972.611.992,84	979.578.976,60	403.693.373,00	127.197.739,00	135.927.632,00
	Kas di Bendahara FKTP	1.848.448.878,19	236.562.831,19	639.534.633,47	1.203.692.417,56	1.401.194.027,02
	Kas Lainnya	0,00	0,00	167.745.926,00	27.387.225,00	11.971.889,87
	Piutang Pajak Daerah	0,00	6.954.579.159,83	8.232.485.191,83	9.816.556.196,03	10.722.297.313,88
	Piutang Retribusi	0,00	667.483.306,00	721.745.806,00	753.097.806,00	7.048.698.060,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.484.028.097,03	4.696.155.159,00	4.468.290.566,00	7.213.609.407,00	5.401.878.828,00
	Piutang Transfer Daerah Lainnya	0,00	0,00	6.754.409.140,00	5.099.206.213,00	0,00
	Penyisihan Piutang	-5.297.167.422,83	-6.971.148.164,08	-8.711.477.386,83	-10.650.280.863,73	-11.172.989.115,50
	Beban Dibayar Dimuka	7.375.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	45.000.000,00
	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan	6.385.558.924,47	15.194.116.286,88	18.998.700.716,48	18.729.823.938,02	19.528.553.035,05

No	Uraian	Nilai (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	Asset tetap	1.568.195.126.894,75	1.699.431.760.925,03	1.738.015.631.491,70	1.951.237.181.075,72	1.949.811.769.982,43
	Tanah	151.317.732.846,79	152.230.273.044,49	153.173.804.836,27	168.659.725.353,27	163.615.896.903,08
	Peralatan dan mesin	282.770.018.498,89	327.373.711.579,53	362.974.077.861,37	418.297.951.557,74	469.673.385.032,99
	Gedung dan bangunan	583.818.595.075,09	625.116.914.759,91	686.296.426.652,96	754.370.548.057,99	853.565.564.875,82
	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.372.111.732.235,67	1.535.085.180.357,67	1.623.788.206.158,89	1.850.307.027.998,23	1.802.850.143.188,65
	Aset tetap lainnya	21.444.566.127,60	25.370.623.832,60	27.484.182.146,72	31.088.084.649,78	34.947.502.376,64
	Konstruksi dalam pengerjaan	17.646.884.993,13	34.299.931.127,13	28.142.809.014,13	35.661.291.801,56	19.616.331.166,64
	Akumulasi Penyusutan	-860.914.402.882,42	-1.000.044.873.776,30	-1.143.843.875.177,50	-1.307.147.448.342,85	-1.394.457.053.561,39
	Asset lainnya	14.180.796.613,73	13.747.678.292,04	16.644.078.588,36	17.634.306.202,93	85.251.970.222,65
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	242.060.419,73	48.341.640,69	48.341.640,69
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	292.689.466,89	537.624.386,89	537.624.386,89	0,00	0,00
	Aset Tidat Berwujud Lainnya	21.595.496.672,43	23.289.025.113,43	26.946.524.033,43	29.704.769.148,43	31.527.629.987,43
	Aset Lain-lain	28.034.896.080,45	4.757.496.272,97	6.363.528.061,60	7.223.546.078,40	194.039.319.696,34
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-12.844.323.804,51	-14.789.134.735,25	-17.385.215.444,29	-19.892.304.664,67	-22.466.395.411,17
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-22.876.849.301,53	-47.332.746,00	-60.442.869,00	0,00	-118.078.660.690,64
	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak	-21.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Nilai (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	Ketiga					
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	1.087.030.036,00	549.954.000,00	181.735.000,00
	Jumlah Asset Daerah	1.723.211.992.128,89	1.852.133.859.347,96	1.931.020.353.967,83	2.195.895.242.983,43	2.230.514.060.389,98
2	**Kewajiban**					
	Kewajiban jangka pendek	12.706.882.674,00	188.580.679.219,00	11.766.130.316,00	503.842.381.585,00	6.636.500.792,55
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.924.186.138,00	2.498.605.266,00	1.243.375.710,00	273.872.250,00	11.971.889,87
	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	12.560.132.288,00	0,00
	Utang Pinjaman	0,00	0,00	0,00	475.163.540.000,00	0,00
	Utang Belanja	0,00	0,00	461.443.000,00	10.457.611.291,00	6.624.528.902,68
	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.782.696.536,00	16.359.462.656,00	10.061.311.606,00	53.872.257.559,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Daerah	127.068.826.743,00	1.886.806.792,19	1.176.613.031,59	50.384.238.158,53	6.636.500.792,55
3	**Ekuitas**					
	Ekuitas	1.721.941.303.861,46	1.850.248.052.555,77	1.929.843.740.936,24	2.145.511.004.824,90	2.223.877.559.597,43
	Jumlah ekuitas daerah	1.721.941.303.861,46	1.850.248.052.555,77	1.929.843.740.936,24	2.145.511.004.824,90	2.223.877.559.597,43

* Angka sementara

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur (2024)

1. Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Secara agregat, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada komposisi aset daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah Aset Daerah mengalami peningkatan dari Rp 1.723.211.992.128,89 di tahun 2020 menjadi Rp 2.230.514.060.389,98 di tahun 2024.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Manggarai Timur hingga tahun 2024 adalah Rp 66.365.007.926,00. Angka tersebut cenderung turun apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang bahkan mencapai Rp 503.842.381.585,00. Penurunan drastis ini disebabkan oleh upaya signifikan pemerintah daerah dalam melunasi sebagian besar kewajiban jangka pendek yang ada pada periode sebelumnya.

3. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Kabupaten Manggarai Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Berdasarkan tabel di atas, jumlah Ekuitas Kabupaten Manggarai Timur cenderung mengalami tren peningkatan dari Rp 1.721.941.303.861,46 pada tahun 2020 menjadi Rp 2.223.877.559.597,43 di tahun 2024.

2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Proyeksi keuangan adalah rancangan anggaran terkait pendapatan dan belanja di masa yang akan datang. Proyeksi keuangan Daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program- program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar).

Dalam menentukan proyeksi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur. Adapun proyeksi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2026-2030 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 182 Proyeksi Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2026-2030

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**PENDAPATAN**						
	A. Pendapatan Asli Daerah	41.465.254.859,39	62.518.997.299,00	70.298.084.000,00	80.278.999.000,00	93.614.362.000,00	112.554.777.000,00
	B. Pendapatan Transfer	1.176.550.133.976,00	1.193.603.135.880,00	1.294.754.330.140,00	1.295.496.405.454,10	1.295.806.575.007,29	1.294.700.000.000,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.984.572.592,20	12.512.203.051,00	12.887.569.090,00	13.016.444.780,90	13.146.609.228,71	13.278.075.321,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.231.999.961.427,59	1.268.634.336.230,00	1.377.939.983.230,00	1.388.791.849.235,00	1.402.567.546.236,00	1.420.532.852.321,00
2	**BELANJA**						
	A. Belanja Operasi	758.954.688.587,56	773.789.174.476,00	805.882.234.903,07	808.041.887.799,54	819.565.831.301,32	820.000.000.000,00
	B. Belanja Modal	234.241.680.749,00	465.382.536.618,00	281.546.436.571,93	284.816.675.244,71	281.237.787.201,59	281.606.347.890,19
	C. Belanja Tak Terduga	653.200.277,00	2.500.000.000,00	2.750.000.000,00	3.025.000.000,00	3.327.500.000,00	3.660.250.000,00
	D. Belanja	216.425.825.580,00	226.962.625.136,00	232.761.311.755,00	236.908.286.190,75	241.436.427.733,09	246.031.048.339,81

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Transfer						
	JUMLAH BELANJA	1.210.275.395.193,56	1.468.634.336.230,00	1.322.939.983.230,00	1.332.791.849.235,00	1.345.567.546.236,00	1.351.297.646.230,00
	SURPLUS/ DEFISIT	21.724.566.234,03	-200.000.000.000,00	55.000.000.000,00	56.000.000.000,00	57.000.000.000,00	69.235.206.091,00
3	**PEMBIAYAAN**						
	A. Penerimaan Pembiayaan	94.979.964.388,57	250.000.000.000,00	0	0	0	0
	B. Pengeluaran Pembiayaan	47.516.354.000,00	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	56.000.000.000,00	57.000.000.000,00	69.235.206.091,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.463.610.388,57	200.000.000.000,00	-55.000.000.000,00	56.000.000.000,00	-57.000.000.000,00	69.235.206.091,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)	69.188.176.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun rencana 2026-2030 diproyeksi mengalami kenaikan dari Rp 1.268.634.336.230,00 pada tahun 2026 menjadi Rp 1.420.532.852.321,00 pada tahun 2030. Peningkatan ini terjadi akibat adanya Pendapatan Asli Daerah yang meningkat pada tahun 2026 senilai Rp 62.518.997.299,00 sampai Rp 112.554.777.000,00 pada tahun 2030, dengan asumsi kebijakan pembentukan Badan Pendapatan Daerah akan secara khusus mengelola pendapatan daerah serta melakukan perbaikan dan reformasi tata kelola pendapatan. Kabupaten Manggarai Timur optimis bahwa PAD akan mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dengan meningkatkan kinerja dari komponen penyusun PAD seperti pajak, retribusi, dan sumber-sumber lain. Komponen pajak daerah yang secara proporsi menjadi penyumbang tertinggi nominal pajak diproyeksikan akan naik setiap tahunnya, antara lain: Pajak Reklame, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dengan pajak daerah yang terbatas ini, diperlukan kerja keras untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sumber-sumber yang telah ada serta penerimaan dari piutang pajak.

Selain itu, terdapat optimisme terhadap kenaikan di hampir setiap sub komponen dari retribusi daerah berdasarkan skenario optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan kembali dan restocking aset-aset Pemerintah Daerah seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar. Optimalisasi juga dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melakukan investasi pada aset-aset daerah untuk meningkatkan PAD yang antara lain bersumber dari Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Hasil pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sedikit mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh komponen terbesarnya yakni penerimaan jasa giro dan bunga deposito, sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah Daerah tidak diperbolehkan menyimpan uang yang tidak digunakan terlalu lama, karena akan memengaruhi alokasi DAU dengan pola dinamis. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga berharap kondisi bank daerah menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan penerimaan dari sisi pembagian dividen.

Selanjutnya, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dengan besaran alokasinya sangat dipengaruhi oleh asumsi dan kebijakan APBN. Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa. Dana Perimbangan merupakan komponen utama dari transfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum terdiri atas dana block grant dan spesifik grant serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi Dana DAK menggunakan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer. Komponen Pendapatan Transfer tersebut diproyeksi naik dari Rp 1.193.603.135.880,00 di tahun 2026 hingga mencapai Rp 1.280.464.793.909,00 pada tahun 2030 dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja pencapaian indikator pembangunan daerah maka akan semakin tinggi alokasi transfer pusat ke Manggarai Timur. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang memengaruhi peningkatan komponen ini juga diperkirakan akan mengalami penambahan pada komponen gaji ASN.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga diproyeksikan meningkat dari Rp 12.512.203.051,00 pada tahun 2026 sampai dengan Rp 13.278.075.321,00 di tahun 2030. Peningkatan ini berdasarkan asumsi kinerja

pengelolaan barang milik daerah berupa pemanfaatan, penyewaan dan penjulan barang milik daerah. Melihat bahwa kemandirian fiskal kabupaten Manggarai Timur masih rendah, kedepan perlu upaya upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah selama Tahun 2026–2030, yaitu sebagai berikut:

1) Ektensifikasi pendapatan:
    a) Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
    b) Penguatan pengelolaan dan penambahan jumlah BUMD berdasarkan potensi daerah dalam rangka peningkatan dividen atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
    c) Pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru;
    d) Penjaringan Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak;
    e) Kemudahan pendaftaran wajib pajak.
2) Intensifikasi pendapatan:
    a) Optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah;
    b) Pemutakhiran atau validasi data pajak daerah
    c) Updating database wajib pajak daerah;
    d) Penyesuaian Nilai NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
    e) Penertiban dan pengelolaan wajib pajak galian c;

f) Optimalisasi penerimaan dari piutang pajak daerah;
g) Verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih (khusus data piutang PBB-P2);
h) Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tata kelola, administrasi PAD dan Penguatan kelembagaan, antara lain:

3) Restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah
   a) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengalola pendapatan daerah.
   b) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
   c) Kebutuhan SDM penilai pajak dan juru sita
   d) Modernisasi administrasi perpajakan daerah
   e) Pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah
4) Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak
5) Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, antara lain:Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   a) Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah
   b) Penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan
   c) Penyederhanaan proses bisnis
6) Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas

pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama kurun waktu tahun 2025-2029. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Belanja pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diproyeksikan masih didominasi belanja operasi. Namun demikian, dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah akan difokuskan untuk: 1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD, serta 4)

menunjang program-program yang bersentuhan langsung terkait Penanganan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Manggarai Timur.

Belanja operasi merupakan belanja rutin untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja operasi diproyeksikan meningkat dalam kurun waktu 2026-2030 dari Rp 773.789.174.476,00 menjadi Rp 820.000.000.000,00.

Belanja Modal yang difokuskan untuk pemenuhan belanja infrastruktur dasar pelayanan publik dan diproyeksikan akan tumbuh sejak tahun 2027 hingga 2030. Belanja Modal sendiri diproyeksikan akan berada di angka Rp 465.382.536.618,00 pada 2026. Besaran proyeksi Belanja Modal Tahun 2026 disesuaikan dengan pendanaan terhadap salah satu prioritas bupati dan wakil bupati yakni pembangunan jalan antar kecamatan yang menggunakan dana pinjaman daerah. Sehingga komponen ini nantinya akan diproyeksikan menurun di tahun 2027 menjadi Rp 281.546.436.571,93 hingga Rp 281.606.347.890,19 di tahun 2030. Selain difokuskan pada pemenuhan infrastruktur layanan dasar, komponen ini juga diarahkan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam PRDB Kabupaten Manggarai Timur, sehingga sebagian besar belanja modal diarahkan pada belanja jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal bangunan dan gedung diproyeksikan mengalami kenaikan, namun bangunan gedung di prioritaskan untuk gedung layanan serta gedung yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kelayakan gedung perkantoran. Untuk belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar kenaikan pendapatan.

Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mengantisipasi pendanaaan keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya diproyeksikan meningkat dari Rp 2.500.000.000,00 menjadi Rp 3.660.250.000,00 pada proyeksi tahun 2026-2030 dengan rata-rata pertumbuhan 3 persen setiap tahunnya. Selanjutnya untuk Belanja Transfer

diproyeksikan mengalami pertumbuhan pada tahun rencana 2026-2030 dengan rata-rata 1,82 persen dari Rp 226.962.625.136,00 pada tahun 2026 menjadi Rp 246.031.048.339,81 pada tahun 2030. Belanja transfer ini terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan ke desa.

Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Manggarai Timur dalam kurun waktu 2026-2030 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar untuk pencapaian SPM dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang.
2) Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting secara berkelanjutan.
3) Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya target RPD Kabupaten Manggarai Timur efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen yaitu Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada pada komponen Penerimaan Pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga disi oleh komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah).

Di tahun 2026, Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp 250.000.000.000,00. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat senilai Rp 94.979.964.388,57. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp 50.000.000.000,00 hingga tahun 2030 menjadi Rp 69.235.206.091,00 . Proyeksi Penerimaan Pembiayaan pada hanya mencatat alokasi pinjaman daerah, sedangkan SiLPA tidak diproyeksikan dan Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan untuk penyertaan modal pada BUMD/Perumda, serta pengembalian pokok pinjaman daerah.

4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2026-2030

Perhitungan kerangka pendanaan daerah merupakan suatu hal yang krusial bagi perencanaan baik dalam jangka menengah ataupun jangka pendek. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai sumber daya finansial yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan yang direncanakan. Adapun perhitungan dari kerangka pendanaan ini akan menghasilkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Dengan analisis ini akan didapatkan informasi yang sangat berharga mengenai

sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan keuangannya, apakah akan cukup untuk menutupi seluruh belanja yang direncanakan, atau apakah perlu adanya penyesuaian anggaran untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Tabel 2. 183 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil Daerah				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.268.634.336.230,00	1.387.198.413.090,00	1.410.740.294.780,90	1.437.899.960.228,71	1.470.932.935.321,00
2	Pencairan dana cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	**Total penerimaan (jumlah 1+2+3)**	1.268.634.336.230,00	1.377.939.983.230,00	1.388.791.849.235,00	1.402.567.546.236,00	1.420.532.852.321,00
	Dikurangi					
4	Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.000.751.799.612,00	1.038.643.546.658,07	1.044.950.173.990,29	1.061.002.259.034,41	1.066.031.048.339,81
5	Pengeluaran pembiayaan	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	57.000.000.000,00	69.235.206.091,00
B	**Total pengurang (jumlah (4+5)**	1.050.751.799.612,00	1.093.643.546.658,07	1.044.950.173.990,29	1.118.002.259.034,41	1.135.266.254.430,81
(A-B)	**Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah**	217.882.536.618,00	284.296.436.571,93	343.841.675.244,71	284.565.287.201,59	285.266.597.890,19

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, 2024 (data diolah)

Data di atas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan pada Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah selama periode proyeksi. Pada tahun 2026, kapasitas riil tercatat sebesar Rp 217.882.536.618,00 dan secara bertahap meningkat hingga mencapai Rp 285.266.597.890,19 pada tahun 2030. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah diproyeksikan akan memiliki ruang fiskal yang semakin besar dari tahun ke tahun. Tren positif ini menunjukkan potensi peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dengan kapasitas keuangan yang semakin kuat, Kabupaten Manggarai Timur memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kenaikan kapasitas riil ini kemungkinan besar didorong oleh proyeksi peningkatan pada sisi Pendapatan daerah dan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang efektif. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa proyeksi ini bersifat estimatif dan dipengaruhi oleh berbagai asumsi makro dan kebijakan daerah di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan pengelolaan keuangan yang prudent, menjaga stabilitas pendapatan, serta mengoptimalkan efisiensi belanja agar proyeksi kapasitas riil keuangan daerah ini dapat terealisasi sesuai harapan, bahkan berpotensi untuk melampauinya. Peningkatan kapasitas riil ini membuka peluang strategis bagi Kabupaten Manggarai Timur untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih ambisius dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Uraian atas permasalahan dilakukan berdasar kelompok masalah sesuai dengan proses bisnis level nol sebuah daerah. Berdasarkan data dan informasi yang telah dijabarkan, teridentifikasi 4 (empat) kelompok permasalahan

penting yang dihadapi Kabupaten Manggarai Timur, yaitu permasalahan kesejahteraan ekonomi, permasalahan sumber daya manusia, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup, dan permasalahan tata kelola pemerintahan.

1. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi secara makro dapat diukur melalui kinerja pertumbuhan ekonomi dalam PDRB di daerah. Analisis terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi dalam PDRB sebelumnya telah dilakukan pada Sub Bab laju pertumbuhan ekonomi, hasil dapat ditarik pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi di Manggarai Timur secara rata-rata lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT maupun nasional, namun pada saat pandemi COVID-19 kinerja pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Relatif rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi ini mengirimkan pesan masih rendahnya daya saing ekonomi Manggarai Timur (lihat tabel pertumbuhan ekonomi). Akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah itu, maka secara umum kesejahteraan penduduk Manggarai Timur relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT maupun nasional (lihat tabel pendapatan per kapita). Pendapatan per kapita yang rendah itu jika dilihat dari pertumbuhannya masih relatif baik dibandingkan dengan Provinsi NTT. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur hanya mencapai sekitar 59 persen dari pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitar 18,3 persen dari pendapatan per kapita Nasional.

Rendahnya daya saing daerah dan kesejahteraan ekonomi Manggarai Timur teridentifikasi disebabkan oleh beberapa hal: 1) Sektor pertanian (primer) yang menjadi sumber pendapatan Masyarakat cenderung stagnan/ mandeg. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi tertinggi sepanjang tahun dan cenderung stabil di kisaran 44-46 persen, nilai meningkat dari Rp. 862,44 Miliar (2020) menjadi Rp. 999,43 Miliar (2024) dan

sektor ini masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap sektor primer dan jumlah ini jauh lebih besar daripada sektor-sektor sekunder dan tersier dengan pertumbuhan yang stagnan, 2) Sektor sekunder tidak berkembang akibat dari hilirisasi produk pertanian yang sangat lambat, 3) Perkembangan sektor tersier yang lambat akibat dari lambatnya pertumbuhan di sektor primer dan sekunder. Berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing dan kesejahteraan masyarakat itu disebabkan oleh berbagai faktor. Tabel 2.180 menarasikan analisis permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2. 184 Permasalahan Makro Kesejahteraan Ekonomi Manggarai Timur

Masalah Inti	Masalah	Urusan
Relatif rendahnya Daya Saing dan kesejahteraan ekonomi Manggarai Timur	Sektor pertanian (primer) yang menjadi sumber pendapatan Masyarakat cenderung stagnan/ mandeg	Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, Perkebunan) Kelautan dan Perikanan Ketahanan pangan DPMD
	Sektor Sekunder tidak bertumbuh dan daya saing investasi yang masih rendah	Perindustrian Koperasi UMKM Penanaman Modal
	Perkembangan sektor tersier yang lambat akibat dari lambatnya pertumbuhan di sektor primer dan sekunder	Perdagangan Pariwisata

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Beberapa masalah yang diidentifikasi menyebabkan relatif rendahnya daya saing dan kesejahteraan ekonomi Manggarai Timur adalah sebagai berikut.

a. Sektor pertanian (primer) yang menjadi sumber pendapatan masyarakat cenderung stagnan/mandeg

Kabupaten Manggarai Timur masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai komoditas utama perekonomian masyarakat yang mana sektor ini cenderung stagnan dan tidak menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, angka pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan meningkat akan tetapi cenderung stagnan. Pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 1,39 persen kemudian meningkat hingga tahun 2023 sebesar 4,50 persen, namun pada tahun 2024 turun secara signifikan menyentuh angka 1,70 persen . Sementara itu, sektor-sektor lainnya seperti penyediaan akomodasi, makan dan minum mampu bertumbuh 11,43 persen pada tahun 2024 dan sektor perdagangan pada tahun 2022 mampu bertumbuh 6,04 persen namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,49 persen. Beberapa urusan menjadi penyebab dari mandegnya sektor pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 185 Analisis Permasalahan Sektor Primer

Masalah	Akar masalah	Serabut Masalah	Urusan
Sektor pertanian (primer) yang menjadi sumber pendapatan Masyarakat cenderung stagnan/ mandeg	Tingkat kesejahteraan petani rendah	Pola pertanian masih tradisional/ subsisten (Taman Surga)	Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, Perkebunan)
		Manggarai Timur belum mandiri dalam ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	
		Penyuluh/ pendamping di sektor pertanian kurang profesional/ inovatif/ kreatif	
		Masih sering terjadi bencana pertanian, baik berupa hama penyakit maupun bencana akibat perubahan iklim	
		Rendahnya produktivitas ternak	
		Rendahnya kemampuan untuk pengendalian penyakit hewan	
		Kurangnya pengendalian terhadap penyakit ternak serta adanya ancaman penyakit hewan menular strategis di zoonosis	
	Kesejahteraan nelayan dan	Produksi perikanan tangkap tinggi, namun harga ikan rendah	Perikanan

Masalah	Akar masalah	Serabut Masalah	Urusan
	pembudidaya ikan masih rendah	Pengelolaan perikanan budidaya belum maksimal	
		Tingkat konsumsi ikan relatif rendah akibat dari daya beli masyarakat yang rendah	
	Terbatasnya ketersediaan dan cadangan yang berkualitas dan terjangkau	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan sudah cukup baik namun terancam oleh pengelolaan pasca panen yang kurang baik, akibatnya masih cukup banyak kebutuhan pangan didatangkan dari luar daerah	Ketahanan Pangan
		Tingkat Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat masih rendah	
		Masih terdapat desa yang mengalami rawan pangan	
		Masih ditemukan pangan tidak aman yang bersumber dari residu pestisida	
	Tingkat kemandirian dan ketahanan desa masih rendah	Kualitas penataan desa belum baik	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kerjasama desa belum efektif	
		Kualitas pembinaan terhadap desa masih kurang baik	
		Pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa belum baik	
		Kondisi sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa belum memadai	
		Upaya pengawasan dan pendampingan terhadap program ekonomi desa belum maksimal	
		Pengurusan Administrasi desa yang masih banyak belum tepat waktu	

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Berikut akar masalah sektor pertanian (primer) yang menjadi sumber pendapatan masyarakat cenderung stagnan/mandeg di Kabupaten Manggarai Timur yang teridentifikasi sebagai berikut.

Pertama, Tingkat kesejahteraan petani dan peternak relatif rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani dan Peternak di Manggarai Timur disebabkan oleh beberapa serabut masalah seperti: Manggarai Timur masih

menghadapi kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai dan mandiri. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya peningkatan sarana seperti pembangunan irigasi di beberapa kecamatan (misalnya di Rana Mese), ketersediaan alat dan mesin pertanian masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Hal ini menghambat optimalisasi produksi pertanian dan efisiensi usaha tani.

Selain itu, penyebab terjadinya masalah rendahnya kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Manggarai Timur ialah penyuluh dan pendamping di sektor pertanian di Manggarai Timur dinilai kurang profesional, inovatif, dan kreatif dalam mendampingi petani. Hal ini terlihat dari masih dominannya pola pertanian tradisional dan subsisten (seperti sistem "Taman Surga"), serta kurangnya adopsi teknologi pertanian modern. Pendampingan yang kurang optimal menyebabkan petani sulit meningkatkan produktivitas dan mengatasi tantangan produksi.

Faktor penyebab masalah juga berasal dari kondisi lingkungan yang mana di Manggarai Timur masih sering mengalami bencana pertanian, baik berupa serangan hama dan penyakit tanaman maupun dampak perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen. Ketidakstabilan iklim dan kurangnya sistem pengendalian hama dan penyakit yang efektif menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan produksi pertanian. Sebagian besar petani di Manggarai Timur masih menerapkan pola pertanian tradisional dan subsisten, yang dikenal dengan istilah "Taman Surga". Pola ini cenderung kurang produktif dan kurang berorientasi pasar, sehingga pendapatan petani masih rendah dan ketahanan pangan belum optimal.

Sementara itu, pada sektor peternakan, rendahnya kesejahteraan peternak di Kabupaten Manggarai Timur disebabkan oleh masih lemahnya kemampuan pengendalian penyakit hewan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas ternak dan meningkatnya resiko penyebaran penyakit hewan menular strategis, termasuk zoonosis penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Beberapa kasus kematian manusia akibat

penyakit ini telah tercatat secara kualitatif, namun hingga kini belum tersedia data kuantitatif yang terstruktur karena belum dilakukan pendataan secara kolektif oleh pemerintah daerah.

Permasalahan ini menuntut adanya penguatan sistem pengawasan kesehatan hewan, pelaksanaan program vaksinasi yang lebih intensif, serta peningkatan edukasi kepada para peternak. Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah telah membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan dan Pengembangan Ternak serta menyediakan tenaga teknis pendamping, produktivitas ternak di daerah ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas peternak serta penerapan teknologi budidaya ternak yang lebih efektif dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan hasil dan kualitas produksi ternak di Kabupaten Manggarai Timur.

Kedua, Kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, tercatat jumlah nelayan penuh di Kabupaten Manggarai Timur lebih banyak daripada pembudidaya ikan. Jumlah nelayan di Kabupaten Manggarai Timur baik nelayan penuh maupun nelayan sambilan mencapai 15.667 orang. Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil dan menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia (Nelayan) di sektor perikanan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun secara geografis Manggarai Timur memiliki keunggulan karena diapit oleh dua perairan besar, yaitu Laut Flores dan Laut Sawu, serta didukung oleh keberadaan sungai, danau, dan garis pantai di pesisir utara dan selatan, kenyataannya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan juga masih tergolong rendah, menandakan bahwa potensi perikanan yang dimiliki daerah ini belum sepenuhnya dikembangkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh produksi perikanan tangkap tinggi namun harga ikan rendah, pengelolaan perikanan budidaya belum

maksimal, tingkat konsumsi ikan relatif rendah akibat daya beli masyarakat yang rendah.

Ketiga, Terbatasnya ketersediaan dan cadangan yang berkualitas dan terjangkau Pada dasarnya produksi pangan di Manggarai Timur cukup tinggi namun demikian produksi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Hal ini dipicu oleh pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, tingkat diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat masih rendah, masih terdapat desa yang mengalami rawan pangan, masih ditemukan pangan tidak aman yang bersumber dari residu pestisida.

Keempat, Tingkat kemandirian dan ketahanan desa masih rendah. Tingkat kemandirian dan ketahanan desa di Kabupaten Manggarai Timur masih relatif rendah, hal ini bisa dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025 hanya sebesar 0,6. Meskipun Desa sangat tertinggal sudah tidak ada namun desa tertinggal masih ada 19 Desa angka dan hingga saat ini belum ada desa mandiri di Manggarai Timur. Adapun penyebab dari masalah ini diantaranya Kualitas Penataan Desa Belum Baik, Kerjasama Desa Belum Efektif, Kualitas Pembinaan terhadap Desa Masih Kurang Baik, Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Belum Baik, Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Belum Memadai, Upaya Pengawasan dan Pendampingan terhadap Program Ekonomi Desa Belum Maksimal, Pengurusan Administrasi Desa Masih Banyak yang Belum Tepat Waktu.

b. Sektor sekunder tidak bertumbuh dan daya saing investasi rendah

Secara umum, sektor sekunder di Kabupaten Manggarai Timur tidak bertumbuh dan daya saing investasi daerah masih rendah. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor sekunder yakni industri pengolahan nilai distribusinya terhadap PDRB hanya 0,57 persen pada tahun 2024 dan laju pertumbuhan sebesar 4,59 persen (Badan Pusat

Statistik, 2022). Lambatnya kinerja sektor sekunder disebabkan oleh berbagai permasalahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 186 Analisis Permasalahan Sektor Sekunder

Masalah	Akar masalah	Serabut Masalah	Urusan
Sektor sekunder tidak bertumbuh dan dayang saing investasi rendah	Hilirisasi sektor pertanian masih rendah	Modal untuk pengadaan peralatan mesin untuk industri pertanian masih terbatas, akibat dari belum adanya perencanaan pengembangan industri	Perindustrian
		Hilirisasi yang sudah terjadi (kopi) belum menghasilkan nilai tambah yang luas bagi masyarakat	
	Kemampuan UMKM untuk mengembangan produk olahan masih terbatas akibat dari lemahnya kelembagaan ekonomi lokal	Belum ada perencanaan usaha bersama akibat dari belum formalnya kelembagaan ekonomi lokal	Koperasi UMKM
		Koperasi dibentuk karena ada perintah, bukan karena kesadaran	
		Pemberdayaan UMKM masih lemah	
	Minat investasi di Manggarai Timur (untuk berbagai sektor) masih rendah KP	RUPM sudah ada tapi tidak cukup itu saja untuk kepastian hukum	Setda
		Adanya penolakan dari Masyarakat (pelaksanaan)	Penanaman Modal
		Ketersediaan data dan informasi investasi yang terbatas	Penanaman Modal
		Belum ada rencana detail Tata Ruang (RDTR)	Tata Ruang
		Promosi Investasi yang Masih Terbatas dan Belum Optimal	Penanaman Modal
		Minimnya Tenaga Kerja Terampil dan Kompeten	Ketenagakerjaan

Masalah	Akar masalah	Serabut Masalah	Urusan
		Kawasan Konservasi yang Menjadi Hambatan Investasi.	Kehutanan
		Infrastruktur yang Belum Memadai	PU

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Pertama, Hilirisasi sektor pertanian masih rendah dan daya saing investasi daerah masih rendah hilirisasi sektor pertanian yang masih rendah di Manggarai Timur mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar hasil pertanian di daerah ini masih dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan belum berkembangnya industri pengolahan pertanian di tingkat lokal, baik karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya teknologi pascapanen, maupun rendahnya akses petani terhadap pelatihan dan pembiayaan. Akibatnya, petani hanya memperoleh nilai jual yang minim, sementara potensi peningkatan nilai tambah dari produk olahan belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya tingkat hilirisasi ini turut memperkuat ketergantungan petani pada harga pasar primer yang fluktuatif, dan menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat pertanian di Manggarai Timur. Terdapat dua penyebab utama yang mengakibatkan Hilirisasi sektor pertanian masih rendah, diantaranya modal terbatas dan belum ada Perencanaan Pengembangan Industri UMKM di Manggarai Timur menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal untuk pengadaan peralatan dan mesin industri pertanian. Hilirisasi Kopi yang sudah mulai berkembang, juga belum memberikan nilai tambah yang luas bagi masyarakat.

Kedua, Kemampuan UMKM untuk mengembangan produk olahan masih terbatas akibat dari lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Salah satu penyebab sektor sekunder tidak berkembang adalah karena UMKM atau Industri Kecil menengah belum mampu untuk mengembangkan produk

olahan dari hasil sektor primer. Selama ini hanya dijual produk mentahannya saja sehingga nilai tambah produk terjadi di daerah lain yang mumpuni untuk pengolahan. Padahal jika masyarakat mampu mengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan akan meningkatkan pendapatan mereka. Keterbatasan kemampuan mengembangkan produk olahan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum ada perencanaan usaha bersama akibat kelembagaan ekonomi lokal yang belum formal, koperasi dibentuk karena perintah, bukan kesadaran, pemberdayaan UMKM masih lemah. Pemberdayaan UMKM Masih Lemah Pemberdayaan UMKM di Manggarai Timur masih terbatas, yang tercermin dari sedikitnya UMKM yang berhasil naik kelas atau berkembang secara signifikan.

Ketiga, Minat investasi di Manggarai Timur (untuk berbagai sektor) masih rendah. Selain sektor sekunder tidak bertumbuh, daya saing dan investasi di Kabupaten Manggarai timur juga masih sangat rendah, secara umum hampir seluruh NTT memiliki potensi sumber daya alam yang sama sehingga menimbulkan persaingan daerah. Rendahnya daya saing investasi di Manggarai Timur menggambarkan kondisi di mana daerah ini kurang menarik bagi investor, baik lokal maupun asing akibat sejumlah kendala struktural dan kebijakan. Akibatnya, aliran modal, teknologi, dan pengetahuan baru yang biasanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak hadir secara signifikan, sehingga potensinya untuk mempercepat pembangunan dan diversifikasi ekonomi belum tergarap optimal. Rendahnya daya saing dan investasi daerah teridentifikasi disebabkan oleh beberapa point. Pertama, Manggarai Timur sudah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), namun RUPM belumlah cukup untuk menjadi landasan bagi pengembangan investasi. kedua, adanya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan investasi. Ketersediaan data dan informasi investasi yang terbatas. Belum ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Promosi Investasi yang masih terbatas dan belum optimal. Minimnya tenaga kerja terampil dan kompeten. Kawasan konservasi yang terkadang menjadi hambatan investasi.

Infrastruktur di Manggarai Timur, seperti jalan, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya, masih belum memadai untuk mendukung aktivitas investasi secara optimal. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional dan risiko investasi, sehingga menurunkan minat investor.

c. Perkembangan sektor tersier yang lambat akibat dari lambatnya pertumbuhan di sektor primer dan sekunder

Perkembangan sektor tersier (sektor jasa) yang lambat di suatu daerah seringkali disebabkan oleh pertumbuhan yang lambat di sektor primer (sektor pengolahan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan) serta sektor sekunder (sektor industri dan manufaktur).

Sektor tersier sangat bergantung pada aktivitas ekonomi di sektor primer dan sekunder karena jasa yang disediakan di sektor ini, seperti perdagangan, transportasi, keuangan, dan layanan lainnya, biasanya berfungsi untuk mendukung dan melayani produksi serta distribusi barang dari kedua sektor tersebut.

Jika sektor primer dan sekunder tumbuh lambat, maka produksi barang dan kebutuhan jasa pendukung juga terbatas, sehingga permintaan terhadap jasa di sektor tersier menjadi rendah. Akibatnya, perkembangan sektor tersier menjadi terhambat karena tidak adanya dorongan yang kuat dari sektor-sektor lain untuk memperluas layanan dan infrastruktur jasa. Singkatnya, lambatnya pertumbuhan di sektor primer dan sekunder menyebabkan sektor tersier tidak berkembang optimal karena keterkaitan dan ketergantungan antar sektor ekonomi tersebut.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor dijelaskan bahwa sektor-sektor yang tergolong dalam sektor tersier ada sebanyak 9 dari total 17 sektor mampu menyumbangkan 31,39 persen dari total PDRB tahun 2024. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa

pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, real estate serta jasa-jasa lainnya. Adapun hal yang menyebabkan sektor tersier belum mampu menarik perekonomian lokal dapat dilihat pada Tabel 2.187.

Tabel 2. 187 Analisis Permasalahan Sektor Tersier

Masalah	Akar masalah	Serabut Masalah	Urusan
Perkembangan sektor tersier yang lambat akibat dari lambatnya pertumbuhan sektor primer dan sekunder	Pariwisata Manggarai Timur belum memberikan multiplier effect/ sektor pariwisata belum menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal	Baru 3 destinasi wisata yang sudah terfasilitasi, namun penataan dan pengelolaan objek wisata belum professional	Pariwisata
		Belum terbentuk SDM pariwisata (pendamping maupun pelaku usaha pariwisata dan Masyarakat) yang profesional	
		Pemasaran dan promosi yang belum jelas penawarannya (branding)	
		Rendahnya pengembangan kekayaan kebudayaan (benda maupun tak benda) maupun alam untuk pengembangan pariwisata	
	Kualitas dan standar produk yang dihasilkan masih rendah sehingga mempengaruhi kepercayaan konsumen	Kurangnya minat dari pelaku usaha perdagangan untuk mengurus perizinan	Perdagangan
		Sarana dan prasarana perdagangan penuh dengan masalah	
		Stabilitas harga barang, baik kebutuhan pokok dan lainnya sangat fluktuatif namun data yang dirilis menunjukkan harga yang rendah	

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Pertama, Pariwisata Manggarai Timur belum memberikan multiplier effect atau sektor pariwisata belum menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal. Kinerja pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur masih perlu ditingkatkan. Jumlah kunjungan wisata masih rendah dan tidak stabil. Lama

kunjungan wisata juga masih singkat. Jumlah destinasi wisata masih sedikit dan tidak variatif. Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola objek wisata baru mulai meningkat pada beberapa tahun terakhir. Terlihat dalam data bahwa jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dalam tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisata sebanyak 14.895 orang, kemudian meningkat menjadi 15.613 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisata menurun menjadi 14.318 orang, kemudian sedikit turun lagi menjadi 14.160 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisata kembali naik menjadi 14.972 orang. Selama dua tahun terakhir kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan, yakni 10.590 pada tahun 2023 dan 6.753 pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan munculnya beberapa destinasi baru di sekitar wilayah Borong yang jumlah kunjungannya belum terdata dengan baik.

Selanjutnya, lama kunjungan wisata di Kabupaten Manggarai Timur hanya tersedia untuk tahun 2021 dan 2022. Data ini menunjukkan rata-rata berapa hari wisatawan menginap di kabupaten ini. Pada tahun 2021, lama kunjungan wisata adalah dua hari, yang artinya setiap wisatawan menginap selama dua hari di kabupaten ini. Pada tahun 2022 hingga 2024, lama kunjungan wisata juga dua hari. Selain itu terdapat beberapa masalah yang menjadi penyebab pariwisata Manggarai Timur belum memberikan *multiplier effect*/sektor pariwisata belum menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal di antaranya terbatasnya fasilitasi dan pengelolaan destinasi wisata; pemasaran dan promosi yang belum terintegrasi dan jelas; Pemasaran dan promosi produk wisata di Manggarai Timur belum memiliki branding yang jelas dan terintegrasi, SDM Pariwisata yang belum profesional, rendahnya pengembangan kekayaan kebudayaan dan alam untuk pariwisata, pengembangan kekayaan budaya (baik benda maupun tak benda) dan sumber daya alam sebagai daya tarik utama pariwisata masih rendah.

Kedua, Kualitas dan standar produk yang dihasilkan masih rendah sehingga memengaruhi kepercayaan konsumen. Kualitas dan standar produk yang dihasilkan di Manggarai Timur masih rendah—baik dari segi mutu fisik, kemasan, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen. Akibatnya, permintaan terhadap produk lokal melemah dan margin keuntungan petani serta pelaku usaha primer menurun, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan sektor tersier seperti perdagangan, logistik, dan jasa pemasaran di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa penyebab dari kualitas dan standar produk yang dihasilkan masih rendah sehingga memengaruhi kepercayaan konsumen yaitu kurangnya minat pelaku usaha mengurus perizinan, sarana dan prasarana perdagangan di Manggarai Timur mengalami berbagai kendala serius, fluktuasi dan ketidakstabilan harga barang.

2. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup masyarakat merupakan elemen krusial dalam pembangunan sosial suatu wilayah, dengan penekanan pada upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dapat menjadi obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan manusia tercermin dari tercapainya kesejahteraan penduduk yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta terwujudnya kesetaraan gender. Ide pembangunan manusia holistik merupakan pokok pikiran dengan fokus membangun mutu kehidupan manusia, baik secara jasmani, rohani maupun mentalnya. Lebih dari itu, sudah dinyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan perekonomian. Pembangunan fisik dan mental, serta potensi-potensi yang ada pada diri manusia berarti meningkatkan kapasitas dasar

penduduk, sehingga meningkatkan peluang untuk ikut serta dalam upaya yang berkesinambungan.

Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Timur diidentifikasi dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini telah dijadikan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) karena IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia (BPS, 2020). Pada tahun 2024, capaian IPM Kabupaten Manggarai Timur berada pada kategori sedang (berada pada kisaran nilai 60 >IPM<70) yakni sebesar 66.07. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun Nasional. Data selama lima tahun ke belakang menunjukkan IPM Kabupaten Manggarai Timur selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan nasional. Meskipun demikian, dari sisi percepatan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi NTT dan nasional, walaupun rata-rata hanya sebesar sebesar 1,31 persen per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembangunan manusia yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur masih rendah, kondisi inilah yang dapat disimpulkan menjadi permasalahan inti sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Timur. Secara makro, rendahnya kualitas pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa masalah utama, yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah, kualitas hidup masyarakat masih rendah, dan masih ada kesenjangan pembangunan manusia antar gender. Terdapat 9 (sembilan) urusan yang terlibat dalam menangani permasalahan kualitas pembangunan manusia. Identifikasi atas permasalahan makro pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Manggarai Timur dituangkan dalam Tabel 2.188.

Tabel 2. 188 Analisis Permasalahan Makro Kualitas Pembangunan Manusia

Masalah Inti	Masalah	Urusan
Kualitas Pembangunan	1. Kualitas Pendidikan masih rendah	Pendidikan, Perpustakaan,

Masalah Inti	Masalah	Urusan
Manusia masih rendah		Kebudayaan
	2. Derajat Kesehatan Masyarakat rendah	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3. Kualitas Hidup Masyarakat masih rendah	Sosial, Tenaga Kerja, Kepemudaan dan Olahraga
	4. Masih ada kesenjangan Pembangunan Manusia antargender	Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Penjelasan dari setiap penyebab dari rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Timur dijelaskan sebagai berikut.

a. Kualitas pendidikan Kabupaten Manggarai Timur masih rendah

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Timur secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang masih rendah. Pendidikan menjadi penyokong peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sisi pengetahuan dan keterampilan. Permasalahan pendidikan tercermin dari lamanya penduduk dalam menyelesaikan pendidikan dan harapan penduduk untuk bersekolah. Pada tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Manggarai Timur hanya berada pada rentang peserta didik menempuh pendidikan maksimal berkisar antara 7-8 tahun yakni sebesar 7,96. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Manggarai Timur tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan kewajiban program pendidikan selama 12 tahun, walaupun Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024 telah mencapai 12,66 atau setara pada tingkat pendidikan SMA/D1. Selain itu, data RLS dan HLS Kabupaten Manggarai Timur selama 5 tahun kebelakang selalu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT dan

Nasional. Analisis permasalahan dari rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur secara lengkap tersaji pada Tabel 2.189.

Tabel 2. 189 Analisis Permasalahan Kualitas Pendidikan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas Pendidikan masih rendah	Tingkat intelektualitas anak usia sekolah rendah	Partisipasi Anak Usia Sekolah rendah	Pendidikan
		Implementasi kurikulum muatan lokal pendidikan dasar masih rendah	Pendidikan
		Mutu dan distribusi pendidik dan tenaga Pendidikan rendah	Pendidikan
		Kualitas dan distribusi institusi pendidikan masih rendah	Pendidikan
		Pelestarian Bahasa dan sastra yang rendah	Pendidikan
	Tingkat literasi masyarakat yang rendah	Layanan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan rendah	Perpustakaan
		Kualitas perpustakaan dan pustakawan rendah	Perpustakaan
	Tingkat berkebudayaan belum lestari	Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan masih rendah	Kebudayaan
		Peran serta Masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional masih rendah	Kebudayaan
		Warisan budaya yang dilestarikan masih rendah	Kebudayaan

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut.

Pertama, Tingkat intelektualitas anak usia sekolah yang masih di bawah rata-rata nasional, ditunjukkan oleh Tingkat numerasi/literasi SD/SMP pada tahun 2024 yang masih rendah dimana literasi pada tingkat SD sebesar 54,89

dan literasi tingkat SMP sebesar 42,7. Masih rendahnya Tingkat numerasi/ literasi SD/SMP di Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh masih rendahnya partisipasi anak usia sekolah, implementasi kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan, dan pelestarian bahasa dan sastra. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses tumbuh kembang dan stimulasi kognitif anak sejak usia dini, serta kualitas proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Kedua, Rendahnya literasi masyarakat, dapat dilihat dari indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2024 yang masih rendah, hanya mencapai 0,104. IPLM mengukur upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Hal ini dapat menggambarkan rendahnya kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif di kalangan masyarakat menjadi hambatan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Pembangunan literasi masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Manggarai Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu layanan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan rendah dan kualitas perpustakaan dan pustakawan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) rendah. Kedua faktor ini berdampak langsung pada rendahnya akses dan minat baca masyarakat, sehingga memperlambat kemajuan budaya literasi secara menyeluruh di wilayah ini.

Ketiga, Pelestarian budaya lokal seperti tenun ikat dan bahasa daerah belum terintegrasi dalam sistem pendidikan formal, ini menunjukkan bahwa tingkat berkebudayaan di Manggarai Timur masih menghadapi tantangan serius dalam hal kelestarian dan keberlanjutan. Permasalahan ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di tingkat Kabupaten Manggarai Timur, namun data tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, untuk isu permasalahan tingkat berkebudayaan belum lestari akan diukur melalui

indikator proksi yang relevan dan terukur yaitu persentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan yang baru disusun di Kabupaten Manggarai Timur. Isu ini menjadi krusial mengingat budaya adalah fondasi identitas, perekat sosial, dan potensi ekonomi yang signifikan. Kurangnya pelestarian dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal dapat memengaruhi pembentukan karakter dan identitas diri, yang dapat berdampak pada kualitas SDM secara holistik. Hal ini dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, dan warisan budaya yang dilestarikan masih rendah.

b. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur masih rendah

Kualitas kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan gambaran kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu. Semakin sehat kondisi masyarakat maka akan semakin baik dalam mendukung proses pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemampuan dan daya saing guna memperoleh kualitas hidup yang bernilai, perlu pula dibangun kemampuan kesehatan yang baik. Dalam menentukan kedudukan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah tertentu, aspek umur panjang dan hidup sehat dilihat melalui indikator Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Semakin tinggi angka harapan hidup saat lahir di suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kesehatan di negara tersebut. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat sejak tahun 2020-2024 dan telah melewati UHH Provinsi NTT dan Nasional. Dimana UHH pada tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Timur berada pada usia 72,98 tahun, sedangkan Nasional berkisar pada usia 72,39 tahun. Meskipun UHH Kabupaten Manggarai Timur telah melampaui Provinsi NTT dan nasional, masih ditemukan masalah dalam kualitas kesehatan masyarakat. Analisis permasalahan dari masih rendahnya derajat kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur tersaji pada Tabel 2.190.

Tabel 2. 190 Analisis Permasalahan Derajat Kesehatan Masyarakat Manggarai Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Derajat Kesehatan Masyarakat rendah	Kualitas kesehatan keluarga rendah	Kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat rendah	Kesehatan
		Mutu dan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan masih rendah	Kesehatan
		Kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman rendah	Kesehatan
		Kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masih rendah	Kesehatan
	Belum terwujudnya keluarga berkualitas	Pengendalian pertambahan jumlah penduduk masih rendah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB masih rendah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) rendah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Adapun beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut.

Pertama, Kualitas kesehatan keluarga yang rendah, ditandai oleh masih rendahnya indeks keluarga sehat di Kabupaten Manggarai Timur. Indeks keluarga sehat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, mutu dan distribusi tenaga kesehatan, kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan minuman, serta kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Hal ini menyoroti pentingnya

peningkatan pemahaman dan praktik hidup sehat di tingkat keluarga, termasuk gizi, sanitasi, dan pencegahan penyakit.

Kedua, Belum terwujudnya keluarga berkualitas yang dapat dilihat dari indeks pembangunan keluarga (ibangga). Konsep keluarga berkualitas mencakup aspek kesehatan reproduksi, pendidikan anak, ekonomi keluarga yang stabil, serta ketahanan keluarga secara sosial dan psikologis. Pembangunan keluarga berkualitas dipengaruhi oleh pengendalian pertambahan jumlah penduduk, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS). Belum optimalnya aspek-aspek ini berkontribusi pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

c. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Manggarai Timur tidak merata

Aspek kesejahteraan dan produktivitas masyarakat juga menjadi perhatian dalam konteks rendahnya kualitas pembangunan manusia. Kesejahteraan penduduk adalah tingkat kehidupan yang berkualitas, dimana baik individu maupun rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Ketika kebutuhan ekonomi dan sosial tidak dapat dipenuhi, kesejahteraan tidak tercapai sepenuhnya. Salah satu petunjuk kurangnya kesejahteraan masyarakat adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengeluaran per kapita di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur masih jauh lebih besar daripada angka Provinsi Nusa Tenggara Timur meskipun setiap tahunnya terjadi penurunan yaitu sebesar 24,9 persen pada tahun 2024. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Manggarai Timur juga masih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana pengeluaran per kapita masyarakat hanya sebesar 6,561 pada tahun 2024. Tingginya persentase penduduk miskin dan rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur mencerminkan ketidakmampuan sebagian besar penduduk untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka. Analisis permasalahan dari kualitas hidup masyarakat masih rendah di Kabupaten Manggarai Timur tersaji pada Tabel 2.191.

Tabel 2. 191 Analisis Permasalahan Kualitas Hidup Masyarakat Manggarai Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas hidup masyarakat masih rendah	Kesejahteraan sosial yang inklusi masih rendah	Pemberdayaan sosial yang masih rendah	Sosial
		Rehabilitasi sosial yang masih rendah	Sosial
		Tingkat perlindungan dan jaminan sosial yang rendah	Sosial
		Tingkat perlindungan korban bencana yang rendah	Sosial
	Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja masih rendah	Informasi tenaga kerja belum diperbaharui	Tenaga Kerja
		Produktivitas tenaga kerja masih rendah	Tenaga Kerja
		Penempatan Tenaga Kerja masih rendah	Tenaga Kerja
		Perlindungan terhadap tenaga kerja masih rendah	Tenaga Kerja
	Peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga masih rendah	Daya saing kepemudaan masih rendah	Pemuda dan Olahraga
		Pembudayaan dan prestasi olahraga masih rendah	Pemuda dan Olahraga
		Kualitas kepramukaan masih rendah	Pemuda dan Olahraga

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Berikut akar masalah kualitas hidup masyarakat Kabupaten Manggarai Timur belum merata yang teridentifikasi sebagai berikut.

Pertama, Kesejahteraan sosial yang inklusif belum tercapai, ini ditunjukkan oleh Persentase keluarga miskin yang tergraduasi dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua kelompok masyarakat

dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata, termasuk kelompok rentan dan marginal. Belum tercapainya kesejahteraan sosial yang inklusif di Kabupaten Manggarai diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhinya, diantaranya pemberdayaan sosial masih rendah, rehabilitasi sosial yang masih rendah, tingkat perlindungan dan jaminan sosial yang rendah, dan tingkat perlindungan korban bencana rendah.

Kedua, Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur yang rendah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 79,29 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,63 pada tahun 2024. Hal ini diidentifikasi karena pembaharuan informasi tenaga kerja belum optimal, produktivitas tenaga kerja masih rendah, penempatan tenaga kerja masih rendah, dan perlindungan terhadap tenaga kerja masih rendah. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketiga, Prestasi olahraga dan pembangunan pemuda di Kabupaten Manggarai Timur masih minim yang ditunjukkan oleh persentase pemuda yang berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan. Ini mengindikasikan bahwa kurangnya optimalisasi potensi pemuda sebagai agen perubahan dan kurangnya dukungan terhadap pengembangan bakat di bidang olahraga menjadi indikasi belum maksimalnya kontribusi generasi muda terhadap pembangunan daerah. Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga dapat diidentifikasi karena masih rendahnya daya saing kepemudaan, pembudayaan dan prestasi olah raga masih rendah, serta kualitas kepramukaan masih rendah.

d. Kesenjangan pembangunan manusia antargender dan perlindungan anak

Ketidaksetaraan dan kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi dimensi penting dalam permasalahan SDM di Kabupaten Manggarai Timur. Pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan mensyaratkan tidak adanya kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Di Kabupaten Manggarai Timur, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak telah dilakukan, namun masih menghadapi tantangan yang tercermin dari indikator-indikator kunci, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Skor Kabupaten Layak Anak (KLA). Pembangunan yang responsif terhadap gender adalah upaya pembangunan yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berfokus pada mengukur ketimpangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara kedua jenis kelamin. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 masih berada di bawah angka Provinsi Nusa Tenggara Timur namun di atas angka Nasional, yaitu sebesar 91,97 persen. Situasi ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya terlibat dalam ranah politik dan kesempatan bagi perempuan di wilayah tersebut untuk menjadi tenaga profesional masih terbatas. Sedangkan perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan manusia. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) menunjukkan komitmen dan capaian daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tren skor KLA Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan positif dari skor 60 pada tahun 2020, melonjak ke skor 563,4 tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya keras dan keberhasilan program-program perlindungan anak. Namun demikian, kasus kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan eksploitasi (ekonomi, penelantaran) terhadap anak masih mungkin terjadi dan memerlukan penanganan

berkelanjutan. Secara garis besar, peningkatan IPG akan berkontribusi pada peningkatan IPM secara keseluruhan dan mewujudkan keadilan sosial. Sementara itu, penguatan perlindungan anak adalah investasi pada generasi masa depan, memastikan mereka tumbuh kembang secara optimal dan menjadi SDM yang berkualitas. Strategi yang terintegrasi dan responsif gender akan menjadi kunci untuk mengatasi akar dan serabut masalah ini secara holistik. Analisis permasalahan dari masih ada kesenjangan pembangunan manusia antargender dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Timur tersaji pada Tabel 2.192.

Tabel 2. 192 Analisis Permasalahan Kesenjangan Pembangunan Manusia Antargender

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Masih ada kesenjangan Pembangunan Manusia antargender dan antargenerasi (pemenuhan hak anak masih rendah)	Kesetaraan gender dan perlindungan anak masih rendah	Kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat pemanfaatan data gender dan anak masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan masih rendah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Beberapa akar masalah masih adanya kesenjangan antargender di Kabupaten Manggarai Timur teridentifikasi sebagai berikut.

Kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Timur masih rendah yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IDG digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perempuan terlibat dan berperan dalam bidang ekonomi dan politik (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018), dimana IDG Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni sekitar 53,16 persen. IPA digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan bagaimana sistem perlindungan anak berfungsi secara holistik. Namun, Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki perhitungan resmi untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA). Hal ini berarti Pemerintah Daerah belum memiliki gambaran komprehensif tentang capaian di seluruh klaster hak anak (hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus). Data yang tersedia adalah terdapat 14 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa kesadaran orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak, pola asuh positif, dan bahaya kekerasan masih rendah. Angka ini bisa menjadi permasalahan serius, dengan banyak kasus lain yang belum terungkap.

Rendahnya kesetaraan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak masih rendah, tingkat pemanfaatan data gender dan anak masih rendah, jaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif masih rendah, serta tingkat pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan masih rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya

tantangan dalam mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, serta belum optimalnya upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

3. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan di setiap daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek kewilayahan. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan di dalam suatu ruang atau wilayah yang menjadi wadah dari berbagai aktivitas masyarakat. Ruang atau kewilayahan tersebut mencakup berbagai aspek, diantaranya adalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai prasarana pendukung kegiatan masyarakat, sedangkan lingkungan hidup menentukan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Keduanya menjadi unsur pendukung utama dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.

Permasalahan yang berkaitan dengan aspek infrastruktur, kewilayahan, dan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Timur memiliki implikasi langsung terhadap proses dan hasil pembangunan di wilayah administrasinya. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai hal tersebut, Tabel 2.193di bawah ini menyajikan analisis mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan pada aspek infrastruktur dan lingkungan hidup.

Tabel 2. 193 Analisis Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah Masih Rendah	Kualitas Aksesibilitas Infrastruktur Masih Rendah	Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas yang berkualitas masih rendah	Urusan Perhubungan
		Masih rendahnya Kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau.	

Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Akses Perumahan dan Permukiman Berkualitas Masih Rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kualitas Ekologi Daerah Fluktuatif dan Cenderung Menurun	Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung Terus Mengalami Penurunan.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Belum Maksimal	Urusan Lingkungan Hidup
		Masih Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan	
		Penanganan bencana pada saat tanggap darurat belum dilakukan secara cepat dan terkoordinasi	

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Dari analisis data yang disajikan pada Tabel 2.189, terungkap adanya dua masalah utama yang menonjol dalam aspek infrastruktur kewilayahan dan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Timur.

Masalah inti pertama adalah kualitas pembangunan infrastruktur daerah masih rendah. Meskipun setiap kecamatan memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda, namun idealnya setiap wilayah harus mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas dan infrastruktur berkualitas. Kesenjangan pembangunan ini dapat menimbulkan disparitas ekonomi dan ketidaksetaraan peluang bagi masyarakat di berbagai kecamatan. Oleh karena itu, pembangunan yang merata merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Manggarai Timur.

Masalah inti kedua adalah terkait dengan kualitas lingkungan hidup, kondisi ekologi daerah fluktuatif dan cenderung menurun. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, tekanan terhadap lingkungan meningkat. Kualitas udara dan air yang semula baik kini mulai terancam oleh polusi dan kontaminasi. Pembangunan yang tidak diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut

membutuhkan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut.

Meskipun telah disimplifikasi menjadi dua poin utama, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup memiliki lapisan kompleksitas dan nuansa yang berbeda. Untuk memahami keseluruhan gambaran dan dampak yang ditimbulkan, maka penting untuk mengetahui setiap detail dan substansi dari permasalahan tersebut, mulai dari penyebab utama, manifestasi nyata di lapangan, hingga dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Dengan memahami aspek-aspek mendalam dari setiap masalah, kita dapat merancang solusi yang lebih tepat dan efektif untuk mengatasinya. Dalam penjabaran berikut, akan menggali lebih dalam mengenai detail dari setiap masalah yang telah diidentifikasi.

a. Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah

Kualitas aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur masih tergolong rendah, yang berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses layanan dasar dan menghambat konektivitas antar wilayah. Alasan rendahnya kualitas aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas beberapa akar permasalahan, yaitu;

Tabel 2. 194 Analisis Permasalahan Kualitas Aksesibilitas Infrastruktur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas aksesibilitas infrastruktur masih rendah	Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas yang berkualitas masih rendah	Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman masih rendah	Urusan Pekerjaan Umum (Bina marga dan SDA (Sumber daya Air))
		Kualitas irigasi yang masih rendah	
		Kualitas drainase perkotaan yang masih rendah	
	Masih rendahnya Kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Kualitas Layanan Transportasi Darat Masih Rendah	Urusan Perhubungan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
	Akses Perumahan dan Permukiman Berkualitas Masih Rendah	Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Masih Rendah	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kawasan Permukiman Kumuh Masih Tinggi	
		Penyediaan PSU Permukiman masih terbatas	
		Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Masih Rendah	
		Layanan Persampahan Masih Rendah	
		Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Masih Rendah	

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Pertama, akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas yang berkualitas masih rendah. Akar masalah ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan drainase belum mampu memberikan kenyamanan dan keamanan yang memadai bagi masyarakat. Kualitas infrastruktur ini berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, produktivitas ekonomi lokal, serta ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Minimnya pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan turut memperbesar kesenjangan akses antarwilayah.

Kedua, rendahnya kualitas layanan transportasi darat yang aman, nyaman, dan terjangkau. Transportasi merupakan penghubung vital antara pusat-pusat pertumbuhan, permukiman penduduk, dan layanan dasar seperti pendidikan serta kesehatan. Namun, layanan ini masih belum merata dan berkualitas, sehingga memperbesar hambatan mobilitas sosial-ekonomi

masyarakat. Lemahnya intervensi kebijakan dan keterbatasan angkutan umum yang memadai memperparah persoalan ini.

Ketiga adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang berkualitas. Serabut masalah yang muncul dari akar ini meliputi tingginya jumlah kawasan permukiman kumuh, rendahnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman, serta masih minimnya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau relokasi akibat program pemerintah. Selain itu, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum, pengelolaan air limbah, dan sistem persampahan menjadi indikator penting lemahnya sistem permukiman yang sehat dan layak huni. Masalah ini berimplikasi pada penurunan kualitas hidup dan kerentanan sosial-ekologis masyarakat, terutama di kawasan padat dan rawan bencana.

b. Kualitas lingkungan hidup cenderung terus mengalami penurunan

Di Kabupaten Manggarai Timur, kualitas lingkungan hidup yang ideal, yang ditandai oleh kualitas udara dan air yang baik, sedang menghadapi ancaman serius akibat pertambahan jumlah penduduk. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 77,24 menjadi 79,02. kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 79,66, namun kualitas lingkungan hidup Kabupaten Manggarai kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 73,23 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 76,51. Terjadinya fluktuasi pada kualitas lingkungan hidup dapat dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang signifikan sehingga memberikan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur lingkungan. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan dan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur di masa depan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, kualitas air dan udara

di Kabupaten Manggarai Timur menjadi terancam, khususnya jika tidak disertai dengan upaya pencegahan dan penanganan yang memadai.

Tabel 2. 195 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup Manggarai Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung Menurun	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Belum Maksimal	Penanganan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Masih Rendah	Urusan Lingkungan Hidup
		Rendahnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	
		Kurangnya Peran Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah	
		Kurangnya Peran Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah	
	Masih Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan	Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Masih Rendah	Urusan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Tanah Kosong Masih Rendah	Urusan Pertanahan
		Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Masih Rendah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Masih rendahnya ketahanan daerah terhadap bencana	Penanganan bencana pada saat tanggap darurat belum dilakukan secara cepat dan terkoordinasi	BPBD

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Berikut merupakan akar masalah yang teridentifikasi dalam masalah kualitas lingkungan hidup.

Pertama, Pengendalian pencemaran lingkungan belum maksimal. Berdasarkan data Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun menunjukkan adanya kenaikan, nilai tetap stabil di angka 70 sebagai nilai tertinggi. Akan tetapi pada tahun 2023, kualitas air mengalami penurunan menjadi 50, dan pada tahun 2024 nilai kualitas air meningkat menjadi 61,11. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sembilan titik pantau memiliki status mutu air yang sedang. Namun, dengan bobot indeks yang ditetapkan, Kabupaten Manggarai Timur memiliki nilai Indeks Kualitas Air sebesar 61,11,

yang berarti berada pada batasan memenuhi baku mutu. Sementara itu, kualitas udara di Kabupaten Manggarai Timur juga mengalami peningkatan seiring waktu. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan pada tahun 2020, IKU berada di angka 88,3. Angka ini terus meningkat menjadi 90,1 pada tahun 2021 dan 91,7 pada tahun 2022, 93,75 pada tahun 2023 dan 91,07 pada tahun 2024. Penurunan kualitas udara menandakan bahwa udara di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dari segi kualitasnya, sehingga perlu diawasi untuk memastikan lingkungan tetap terjaga dan bebas dari potensi pencemaran. Tanpa tindakan preventif dan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi dapat memberikan tekanan lebih besar pada sumber daya air dan udara, sehingga kualitasnya dapat terancam di masa mendatang.

Kedua, Masih rendahnya kualitas tutupan lahan. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah seringkali membawa dampak terhadap kualitas tutupan lahan yang semakin terancam sebagai penyebab kedua. Melalui peningkatan permintaan akan lahan untuk berbagai kebutuhan, seperti permukiman, industri, pertanian, dan lainnya maka bukaan lahan juga akan meningkat. Hal ini bisa mengakibatkan alih fungsi lahan, yang pada gilirannya mengancam kualitas tutupan lahan, termasuk hutan, lahan hijau, dan lahan pertanian. Data IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) untuk Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa ada peningkatan, meskipun relatif kecil, dari 73 pada tahun 2020 meningkat menjadi 74 di tahun 2021, dan kemudian stagnan di tahun 2022. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 75,19. Pada tahun 2024, nilai kualitas tutupan lahan meningkat menjadi 76,51. Meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi upaya-upaya tertentu tetap perlu diterapkan untuk dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas tutupan lahan, mengingat ancaman terhadap tutupan lahan tetap ada dan mungkin terus meningkat seiring waktu. Sebab, ancaman terhadap kualitas tutupan lahan tidak hanya memengaruhi

keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas udara dan air.

Ketiga, masih rendahnya ketahanan daerah terhadap bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana, terdapat tren penurunan resiko. Namun demikian, tingkat resikonya masih tinggi, dan upaya penanganan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat, belum konsisten. Serabut masalah utamanya adalah masih rendahnya kecepatan dan efektivitas dalam penanganan tanggap darurat bencana, seperti dalam penyediaan logistik, penyelamatan, dan koordinasi lintas sektor saat bencana terjadi. Hasil diskusi juga mencatat perlunya penguatan deteksi dini terhadap risiko bencana, agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur masih berada dalam tahap penguatan awal, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang mulai tersedia pada tahun 2023 (kategori CC, atau Cukup). Meskipun terjadi perbaikan, capaian ini menandakan bahwa birokrasi daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural hal ini dapat terlihat dalam hal akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, efektivitas pemerintah, Ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut berikut adalah penjabaran permasalahan dari tabel berikut:

Tabel 2. 196 Analisis Permasalahan Tata kelola Pemerintahan

Inti Masalah	Masalah	Urusan
Tata kelola Pemerintahan masih belum baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Belum maksimal	Bapperida Inspektorat
	Akuntabilitas Keuangan Baik, namun masih ada catatan Pengelolaan Aset serta Pengelolaan Pendapatan masih belum baik	Badan Keuangan Badan Pendapatan Pertanahan

Inti Masalah	Masalah	Urusan
	Kualitas Pelayanan Publik belum maksimal	Dukcapil PTSP Kesehatan Kecamatan
	Efektivitas pemerintah belum berjalan secara maksimal	Penelitian dan Pengembangan Kominfo Sekretariat Daerah Kepegawaian Sekretariat Dewan Persandian Statistik Kearsipan Transmigrasi
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat belum maksimal	Satpol PP Kesbangpol BPBD Damkar

Sumber: Analisis Data Bab II dan Hasil DKT, 2025

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dalam tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan multidimensional, mencakup kelemahan dalam perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik birokrasi daerah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan ke depan, maka setiap inti masalah akan dijabarkan secara lebih mendalam dalam lima bagian utama berikut.

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan belum maksimal

Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya optimal, sebagaimana tercermin dari capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Hasil ini menunjukkan tidak adanya lompatan perbaikan signifikan dalam perencanaan, pengukuran, dan

pelaporan kinerja instansi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat penggerak birokrasi yang berorientasi hasil. Berikut analisis permasalahan secara rinci.

Tabel 2. 197 Analisis Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan belum maksimal	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah belum maksimal	Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah masih rendah	Bapperida
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah masih rendah	
	Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan masih rendah	Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi masih rendah	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Akuntabilitas kinerja pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur masih menunjukkan kelemahan struktural, yang secara umum bersumber dari dua akar masalah utama: rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya terlihat dari capaian kuantitatif seperti nilai SAKIP, tetapi juga diperkuat oleh hasil diskusi lintas perangkat daerah yang mengidentifikasi sejumlah kendala teknis dan kelembagaan.

Akar masalah pertama, yaitu kualitas perencanaan pengendalian pembangunan yang belum optimal, tercermin dari nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran yang masih berada pada kategori cukup. Salah satu indikator kunci dalam serabut masalah pertama adalah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, seperti antara

RPJMD dan RKPD. Meskipun persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sangat tinggi tetapi terjadinya fluktuatif sehingga konsistensi diperlukan. Selain itu, keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah juga belum maksimal, menunjukkan lemahnya sinkronisasi lintas dokumen perencanaan internal OPD.

Serabut masalah kedua dari akar ini adalah rendahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, terutama pada keselarasan antara RKPD dan Renja serta RKPD dengan APBD. Walaupun data menunjukkan persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD tetap tinggi, hal ini belum mencerminkan keterpaduan substansi perencanaan dan pelaksanaan. Hasil diskusi mengungkapkan beberapa faktor penyebab, seperti perencanaan yang belum sistematis akibat perubahan kebijakan, indikator kinerja yang belum sesuai, serta ketidaksesuaian antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, ketiadaan manajemen risiko di tingkat pemerintah daerah, belum terlaksananya rencana tindak pengendalian risiko perangkat daerah, dan ketidaktertiban dalam penyusunan risk register menjadi bukti nyata lemahnya pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan daerah.

Akar masalah kedua adalah rendahnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terlihat dari nilai SAKIP untuk komponen evaluasi dan pelaporan yang stagnan. Serabut masalah pertama dalam aspek ini adalah belum maksimalnya penyelenggaraan pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan lemahnya siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam manajemen kinerja pemerintah daerah. Masalah ini semakin diperparah oleh belum optimalnya sistem pelaporan yang masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi, sehingga menyulitkan proses analisis, integrasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi secara cepat.

Serabut masalah kedua menyangkut rendahnya kualitas pendampingan dan asistensi oleh Inspektorat, yang tercermin dari maturitas SPIP yang hanya meningkat sedikit. Kendala lainnya adalah minimnya diklat bagi auditor dan

Pejabat Penilai P2PD, serta belum optimalnya pelaksanaan kendali mutu pengawasan, yang menyebabkan fungsi pengawasan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan.

b. Akuntabilitas keuangan baik, namun masih ada catatan pengelolaan aset serta pengelolaan pendapatan masih belum baik

Akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih belum maksimal meskipun secara formal telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyusunan laporan, namun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas akuntabilitas keuangan yang substansial. Hal ini ditunjukkan dengan masih lemahnya pengelolaan keuangan dan aset daerah, tindak lanjut temuan yang belum seratus persen serta pemanfaatan aset yang belum optimal dalam mendukung pelayanan publik dan efisiensi anggaran. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah, yang terlihat dari tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dibandingkan kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut analisis permasalahan secara rinci:

Tabel 2. 198 Analisis Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Akuntabilitas Keuangan Baik, Namun Masih Ada Catatan Pengelolaan Aset serta Pengelolaan Pendapatan Masih Belum Baik	Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Belum Maksimal Dan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Masih Rendah	Pengelolaan Pendapatan Daerah Masih Rendah	Badan Pendapatan
		Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Baik	Badan Keuangan
		Pengelolaan Barang Milik Daerah Masih Rendah	Badan Tata Kelola Aset

Sumber: Hasil DKT, 2025

Pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan yang menandakan belum maksimalnya akuntabilitas fiskal dan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif rendah dan fluktuatif. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan menggambarkan tingginya ketergantungan Kabupaten terhadap dana transfer pusat dan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Serabut masalah pertama yang memperkuat akar persoalan ini adalah masih rendahnya upaya pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini tercermin dari data pertumbuhan PAD yang masih fluktuatif. Fluktuasi ekstrim tersebut menandakan bahwa pengelolaan dan perencanaan pendapatan daerah masih belum stabil dan berkelanjutan.

Serabut masalah kedua berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi ini adalah persentase tindak lanjut temuan keuangan, yang meskipun sempat tinggi namun kembali turun pada tahun 2023. Hasil diskusi lintas perangkat daerah mengungkapkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut temuan sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti pelaku kerugian atau pihak ketiga yang sudah tidak aktif dan sulit ditelusuri, belum optimalnya pelaksanaan TPTGR, kurangnya kooperatif penanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan, serta pengawasan melekat pada masing-masing OPD yang belum berjalan efektif. Di samping itu, penatausahaan dokumen dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan juga belum dilaksanakan dengan baik, yang menyebabkan banyak temuan tidak segera ditindaklanjuti secara administratif maupun hukum.

Serabut masalah ketiga menyoroti pengelolaan barang milik daerah yang masih rendah. Data penambahan nilai aset tetap memang menunjukkan tren peningkatan tiap tahun. Namun, pertumbuhan ini belum dibarengi dengan

kepastian nilai dan legalitas aset yang memadai, mengingat masih banyak aset yang belum memiliki sertifikat dan belum tertata secara administratif.

c. Kualitas pelayanan publik belum maksimal

Sebagaimana tercermin dari fluktuasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang ada peningkatan namun belum mencapai kategori yang sangat baik. Hal serupa juga terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mengalami fluktuatif. Berdasarkan analisis akar masalah, terdapat beberapa sektor pelayanan yang masih menjadi perhatian utama.

Tabel 2. 199 Analisis Permasalahan Kualitas Pelayanan Manggarai Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Kualitas Pelayanan Publik belum maksimal	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan Publik belum maksimal	Layanan kependudukan belum merata dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat	Dukcapil
		Layanan catatan sipil masih menghadapi kendala dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan masih rendah	
	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perijinan belum maksimal	Pelayanan perizinan belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam mendukung kemudahan berusaha	PTSP
	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum maksimal	Kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan masih belum memadai, terutama di wilayah terpencil	Kesehatan
	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik belum maksimal	Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan masih terbatas	Kecamatan
		Kapasitas sumber daya manusia di kecamatan masih perlu ditingkatkan	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Akar masalah pertama berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan yang belum memuaskan. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menurun. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dukcapil pernah mengalami kenaikan tetapi terjadi penurunan drastis dalam persepsi publik terhadap kualitas layanan. Indeks Pelayanan Publik Dukcapil juga stagnasi. Adapun dari Persentase OPD/ Lembaga yang melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan masih rendah. Akar masalah kedua menyasar pada pelayanan perizinan, di mana efektivitas dan efisiensi proses pemberian izin kepada pelaku usaha masih belum sesuai harapan. Belum semua pelaku usaha memperoleh izin sesuai ketentuan, menandakan adanya hambatan prosedural yang memperlambat pelayanan, dan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan ini.

Akar masalah ketiga adalah kualitas layanan kesehatan, terutama terkait sarana, prasarana, dan mutu pelayanan yang belum memadai. Fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi masih terbatas, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan dan mempengaruhi indeks kepuasan layanan sektor kesehatan. Akar masalah keempat terdapat pada pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan, yang juga belum optimal. Salah satu serabut masalahnya adalah terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan desa serta rendahnya kapasitas staf kecamatan dalam menyelesaikan administrasi kepegawaian. Hal ini berdampak pada lambatnya pelayanan administratif dasar yang dibutuhkan masyarakat secara langsung.

Hasil diskusi antar pemangku kepentingan mengungkap sejumlah faktor penyebab utama permasalahan ini, antara lain: belum semua unit pelayanan publik melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara rutin, rendahnya kualitas sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah SDM, dan waktu penyelesaian layanan yang masih terlalu lama. Selain itu, inovasi dalam

pelayanan publik juga masih rendah, sehingga upaya perbaikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

d. Efektivitas pemerintah belum berjalan secara maksimal

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur belum berjalan secara optimal, sebagaimana tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang baru menunjukkan peningkatan. Rendahnya efektivitas ini merupakan hasil dari kombinasi sejumlah akar masalah struktural yang saling berkaitan dan memperlemah kinerja birokrasi secara menyeluruh. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 2. 200 Analisis Permasalahan Efektivitas Pemerintahan Manggarai Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Efektivitas pemerintah belum berjalan secara maksimal	Kapabilitas Inovasi Daerah masih rendah	Penelitian dan Pengembangan Daerah belum maksimal	Penelitian dan Pengembangan
		Riset dan Inovasi Daerah belum terlaksana dengan baik	
	transformasi pelayanan publik berbasis digital belum maksimal	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum baik	Kominfo
		Pengelolaan aplikasi informatika masih rendah	
	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien belum maksimal	Penataan Organisasi belum baik	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah belum baik	
		Pelaksanaan kesejahteraan rakyat belum baik	
		Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum belum maksimal	
		Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan belum maksimal	
		Pelaksanaan Kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa masih kurang	
		Pelaksanaan Kebijakan administrasi Pembangunan belum maksimal	
	Profesionalitas ASN masih belum maksimal	Kepegawaian Daerah belum efektif	Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan ASN belum maksimal	Pengembangan Sumber Daya Manusia belum maksimal	Pendidikan dan Pelatihan

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum maksimal	Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum secara maksimal	Sekretariat Dewan
	Keamanan informasi belum maksimal	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi belum memadai	Persandian
	layanan statistik yang belum akurat dan belum dapat diandalkan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral belum maksimal	Statistik
	Tata kelola arsip belum maksimal	Pengelolaan Arsip masih rendah	Kearsipan
	Kawasan Transmigrasi masih minim	Perencanaan kawasan belum maksimal	Transmigrasi
		Pembangunan kawasan transmigrasi belum maksimal	

Sumber: Hasil DKT, 2025

Akar masalah pertama adalah rendahnya kapabilitas inovasi daerah. Indeks Kapabilitas Inovasi meningkat, namun nilai tersebut masih menunjukkan kapasitas yang sangat terbatas. Serabut masalah pertama dalam aspek ini adalah penelitian dan pengembangan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tercermin dari belum semua kebijakan daerah yang disusun berbasis hasil riset, disebabkan oleh rendahnya koordinasi pendataan riset dan rendahnya persepsi serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap kelitbangan. Serabut masalah kedua adalah riset dan Inovasi, menunjukkan stagnasi dalam pengadopsian inovasi oleh pemerintah daerah. Hasil diskusi juga mencatat rendahnya apresiasi dan insentif terhadap inovasi, yang berdampak pada minimnya inisiatif kebijakan baru yang responsif dan berbasis pengembangan teknologi atau data.

Akar masalah kedua adalah transformasi layanan publik berbasis digital yang belum maksimal. Meskipun nilai SPBE meningkat, masih terdapat hambatan struktural seperti belum tersusunnya arsitektur SPBE, belum dilaksanakannya audit TIK, dan keterbatasan layanan publik yang telah terdigitalisasi. Serabut masalah pertama dalam aspek ini adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum baik. Komunikasi antar

perangkat daerah masih didominasi oleh dokumentasi manual dan penyajian informasi belum sepenuhnya transparan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Kominfo juga belum mencerminkan pelayanan yang terbuka dan responsif. Serabut masalah kedua adalah pengelolaan aplikasi informatika yang masih rendah. Kurangnya integrasi dan interoperabilitas sistem antar-OPD menyebabkan proses layanan digital berjalan lambat dan tidak efisien. Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa sistem pendanaan untuk pengembangan SPBE masih terpusat dan kurang fleksibel untuk mendukung transformasi digital di tingkat perangkat daerah.

Akar masalah ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien belum maksimal. Nilai LPPD cenderung stagnan, mencerminkan stagnasi reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Serabut masalah pertama dalam aspek ini adalah penataan organisasi yang belum tepat fungsi. Banyak struktur organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan riil pelayanan publik, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi kerja. Serabut masalah kedua adalah pelaksanaan dan otonomi daerah yang belum berjalan optimal. Masih terdapat kerja sama daerah yang tidak efektif dan belum mampu memperkuat kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Serabut masalah ketiga adalah pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang belum maksimal ditandai dengan capaian IKU kesejahteraan rakyat yang rendah dan tidak merata. Serabut masalah keempat adalah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum yang belum maksimal. Meskipun indeks reformasi hukum meningkat, pelaksanaan regulasi dan evaluasi produk hukum masih belum berjalan maksimal. Penggunaan JDIH belum optimal, evaluasi terhadap produk hukum belum dilakukan secara konsisten, dan penyajian data terkait perencanaan HAM PD belum berjalan efektif. Serabut masalah kelima adalah pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang belum maksimal. Capaian IKU ekonomi masih rendah dan tidak menunjukkan progres signifikan dalam lima tahun terakhir. Serabut masalah keenam adalah pelaksanaan kebijakan pelayanan pengadaan barang

dan jasa yang belum optimal, tercermin dari rendahnya tingkat kematangan UKPBJ. Serabut masalah ketujuh adalah kebijakan administrasi pembangunan yang belum efektif. Pelaksanaan kebijakan pembangunan masih belum terkoordinasi secara baik dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi dan tindak lanjut yang kuat.

Akar masalah keempat adalah rendahnya profesionalitas ASN. Meskipun Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan, terdapat indikator lain yang menunjukkan lemahnya pengelolaan SDM aparatur secara konsisten. Serabut masalah pertama dalam hal ini adalah pengelolaan pegawai daerah yang masih belum maksimal. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal justru menurun, begitu pula pelatihan struktural yang stagnasi. Persentase pelanggaran pegawai memang menurun, namun tidak dibarengi dengan peningkatan signifikan dalam kompetensi dan sistem merit. Hasil diskusi mendalami bahwa rendahnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh tidak adanya pendekatan pelayanan yang strategis, implementasi regulasi reward dan punishment yang tidak berjalan akibat sistem penilaian yang masih berbasis administratif, serta minimnya partisipasi aktif ASN dalam mengembangkan diri. Selain itu, NSPK manajemen ASN dan indeks sistem merit belum terinternalisasi dalam budaya kerja birokrasi di daerah.

Akar masalah kelima adalah Pendidikan dan Pelatihan ASN belum maksimal hal ini terlihat di serabut masalah pengembangan sumber daya manusia masih rendah terlihat di persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi masih rendah dan persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi teknis juga masih rendah. Akar masalah keenam adalah belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini tercermin dari tingkat ketepatan waktu kerja dewan dan indeks kepuasan pelayanan terhadap anggota DPRD yang masih rendah. Serabut masalah yang teridentifikasi adalah belum adanya sistem dukungan kerja yang efektif dan

terstruktur untuk memfasilitasi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD secara maksimal.

Akar masalah ketujuh adalah belum maksimalnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Meskipun SPBE menunjukkan tren kenaikan dalam aspek umum, namun dari sisi keamanan, kinerjanya menurun. Serabut masalah yang muncul adalah keamanan siber dan sandi komunikasi antar perangkat daerah yang melemah sangat signifikan. Persentase penggunaan sandi turun. Ini menandakan belum adanya sistem keamanan digital yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, kebijakan, maupun kesadaran pengguna.

Akar masalah kedelapan menyangkut belum optimalnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang digunakan sebagai indikator menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral belum menjadi praktik umum di perangkat daerah. Serabut masalah utama adalah belum terbangunnya sistem koordinasi, integrasi, dan pemanfaatan data statistik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan publik.

Akar masalah kesembilan adalah lemahnya tata kelola arsip daerah. Data menunjukkan bahwa hanya sedikit perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Serabut masalah ini menyoroti bahwa arsip dinamis dan statis belum dikelola dengan baik, mengakibatkan sulitnya pelacakan dokumen, lemahnya pengawasan internal, serta ketidaksiapan dalam menjawab kebutuhan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan. Akar masalah kesepuluh adalah masih minimnya kawasan transmigrasi yang ada ini terbukti dengan kawasan yang ingin dikembangkan belum berjalan. Serabut masalah ini terlihat dari perencanaan kawasan transmigrasi belum maksimal dan juga serabut masalah kedua hasil dari perencanaan yang belum matang terjadinya pembangunan kawasan transmigrasi yang belum dilaksanakan.

e. Ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat belum stabil

Ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya terwujud, meskipun upaya penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban terus dilakukan. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus-kasus kriminalitas, konflik sosial, dan kejadian kebencanaan yang belum tertangani secara optimal. Terdapat empat akar masalah utama yang menjadi penghambat dalam pencapaian kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tangguh terhadap bencana.

Tabel 2. 201 Analisis Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Manggarai Timur

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	Urusan
Ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat belum stabil	ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat belum maksimal	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih rendah	Satpol PP
	kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM belum maksimal	Penanganan konflik sosial belum maksimal dalam mencegah eskalasi dan dampak lanjutan	Kesbangpol
	Upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran belum optimal	Upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran belum optimal	Damkar

Sumber: Hasil DKT, 2025

Akar masalah pertama adalah belum maksimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih menjadi tantangan utama. Hal ini tampak dari serabut masalah berupa penegakan Perda yang belum optimal. Penegakan Perda memang tinggi namun, hasil diskusi menunjukkan bahwa koordinasi antara OPD penghasil Perda dan Satpol PP belum berjalan maksimal, sosialisasi dan diseminasi Perda kepada masyarakat masih rendah, dan evaluasi atas pelaksanaan Perda belum dilakukan secara sistematis. Kecenderungan masyarakat yang mudah terprovokasi juga turut memperlemah efektivitas regulasi daerah tersebut.

Akar masalah kedua adalah kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM yang belum maksimal. Salah

satu indikatornya adalah penyelesaian konflik sosial yang belum tuntas secara menyeluruh. Persentase konflik sosial yang diselesaikan masih rendah, dan beberapa konflik, terutama yang berkaitan dengan persoalan lahan, telah berlangsung lama tanpa solusi yang holistik. Hasil diskusi menyoroti bahwa identifikasi dini potensi konflik masih rendah, pendekatan penyelesaian konflik belum menyentuh akar persoalan, dan faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama konflik sosial. Ketidakakuratan dalam penanganan konflik bahkan dapat menimbulkan konflik serupa di kemudian hari, yang menunjukkan perlunya pendekatan multi-sektor dan partisipatif.

Akar masalah ketiga adalah pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta kejadian non-kebakaran yang belum berjalan maksimal. Meskipun tersedia sistem respon cepat, hasil di lapangan menunjukkan bahwa upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat masih lemah. Belum semua perangkat daerah memiliki protokol atau simulasi kebencanaan non-alam seperti kebakaran permukiman atau kejadian akibat kelalaian. Serabut masalah utamanya adalah rendahnya kesiapsiagaan dan kecepatan dalam merespons insiden kebakaran dan kejadian darurat lainnya, baik dari sisi SDM, logistik, maupun sistem komando tanggap darurat.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Terdapat dua kondisi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan dalam menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Timur ke depan, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal (Witcher, 2020). Berdasarkan hasil diskusi dan analisis diperoleh isu-isu seperti tersaji di Tabel 2.198.

Tabel 2. 202 Isu Strategis Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Manggarai Timur
			Global	Nasional	Regional		
• Sumber daya alam yang melimpah (Potensi Pertanian, Perikanan dan Peternakan) • Potensi pariwisata alam dan budaya yang tinggi	• Relatif rendahnya Daya Saing dan kesejahteraan ekonomi Manggarai Timur • Kualitas Pembangunan Manusia masih rendah • Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah masih rendah • Kualitas Ekologi Daerah Fluktuatif dan	• Tingginya Angka Kemiskinan • Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Wilayah • Ancaman Bencana Alam • Degradasi Lingkungan • Masih rendahnya Akses Pelayanan Dasar Pendidikan Masyarakat • Masih rendahnya Akses	• Bonus Demografi Global • Geopolitik dan geoekonomi • Perkembangan Teknologi • *Sustainable Development Goals (SDGs)* • Urbanisasi Dunia • Konstelasi perdagangan global • Tata Kelola Keuangan Global • Pertumbuhan kelas menengah • Persaingan Sumber Daya	**Peluang:** • Pendapatan Per Kapita Nasional tumbuh pesat • Bonus Demografi • Daya Saing Sumber Daya Manusia Membaik • Pesat Pembangunan Infrastruktur • Kepemimpinana dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat • Intensitas Gas Rumah Kaca	• Adanya Arah Pembangunan Provinsi yang mendorong kemandirian lokal • Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2019-2039	• Lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal • Ketergantungan pada produk impor dan rendahnya kualitas produk lokal	• Misi 2 Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif • Misi 4 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan, dengan Memperkuat Desa sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Manggarai Timur
			Global	Nasional	Regional		
	Cenderung Menurun	Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat	Alam • Perubahan Iklim • Pemanfaatan Luar Angkasa	(GRK) Menurun • Kebijakan Pusat Regulasi Satu Data dan SPBE **Ancaman:** • Produktivitas Rendah • IPTEKIN dan Riset Lemah • Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah • Pembangunan Belum Berkelanjutan • Integrasi Domestik Terbatas	• Penetapan enam Proyek Strategis Nasional di NTT tahun 2021 • Adanya potensi sumber daya lokal yang beragam dan kaya di NTT • Adanya konflik masyarakat dengan perusahaan air minum terkait hak pengelolaan	• Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Masyarakat secara Berkelanjutan • Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Manggarai Timur
			Global	Nasional	Regional		
	• Tata kelola Pemerintahan masih belum baik			serta Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa • Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah • Demokratisasi Belum Optimal	sumber daya air	• Belum meratanya infrastruktur kewilayahan dan kualitas • lingkungan hidup yang berkelanjutan • Belum mantapnya tata kelola pemerintahan	• Misi 3 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan yang Merata di Berbagai Sektor untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan • Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif

1. Isu Strategis Internal

Isu strategis internal Kabupaten Manggarai Timur dirumuskan sebagai keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang karena mempunyai dampak yang signifikan bagi Kabupaten Manggarai Timur. Beberapa isu strategis daerah yang dikategorikan sebagai kekuatan/potensi dan kelemahan untuk pembangunan Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2025-2029. Beberapa isu strategis daerah yang diidentifikasi secara partisipatif dan dianggap dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Manggarai Timur adalah:

a. Sumber daya alam yang melimpah

Kabupaten Manggarai Timur memiliki kekuatan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Manggarai Timur tersedia di seluruh daratan maupun lautan. Di wilayah daratan sebagian besar wilayah Manggarai Timur memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur pun berbasis pertanian, yang mana Kabupaten Manggarai Timur menargetkan petani sebagai roda untuk menggerakkan perekonomian daerah. Salah satu komoditas perkebunan terbanyak di Kabupaten Manggarai Timur ialah kopi yang dapat telah dikenal memiliki cita rasa khas dan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan ekspor. Selain itu, sektor pertanian pangan seperti padi, jagung, dan ubi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Selain pertanian dan perkebunan, Kabupaten Manggarai Timur menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan berfungsi sebagai penyedia air serta penyangga ekosistem. Kabupaten ini juga memiliki potensi tambang mineral, seperti mangan dan batu kapur yang dapat digunakan untuk mendorong investasi dan pendapatan daerah. Kekayaan

sumber daya alam di wilayah perairan khususnya area pesisir juga menjadi potensi besar untuk perikanan tangkap dan budidaya.

b. Potensi pariwisata alam dan budaya yang tinggi

Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki keunggulan dari segi budaya dan alam yang dapat digunakan untuk pengembangan potensi pariwisata. Kabupaten Manggarai Timur memiliki keindahan alam yang eksotis, dikombinasikan dengan kekayaan tradisi budaya yang masih hidup dan lestari, menjadikan Manggarai Timur sebagai destinasi potensial dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Salah satu pariwisata yang sudah dimiliki Kabupaten Manggarai Timur ialah Desa Adat Gunung di Kecamatan Kota Komba yang memperkenalkan keindahan alam disertai dengan kegiatan menarik seperti menenun, keliling desa, hingga mengikuti prosesi adat. Selain itu terdapat pula tempat wisata Danau Rana Mese di Kecamatan Rana Mese yang terletak di tengah hutan lindung. Terdapat pula Desa Wisata Langga Sai yang terletak di Kecamatan Elar Selatan dengan daya tarik wisata kerajinan tangan yang unik, dan berbagai desa wisata lainnya dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur. Kekuatan destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Manggarai Timur ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya Manggarai Timur yang saling terhubung dan saling menguatkan. Jika dikembangkan dengan pembangunan yang lebih baik dan mencoba pendekatan berbasis komunitas dan konservasi, kawasan-kawasan ini berpotensi besar menjadi destinasi wisata unggulan di Flores. Tidak hanya itu, Kabupaten Manggarai Timur pun dapat menjadi destinasi wisata yang semakin menarik bagi wisatawan lokal dan internasional.

Beberapa isu strategis daerah yang dikategorikan sebagai kelemahan untuk pembangunan Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2025-2029 berdasarkan diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

a. Lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal

Kabupaten Manggarai Timur menawarkan sejumlah potensi internal yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu kekuatan utama yang dimiliki adalah adanya Rencana Induk Pengembangan Potensi Desa Wisata. Rencana ini memberikan landasan bagi pengembangan sektor pariwisata yang dapat menjadi daya tarik bagi ekonomi lokal. Selain itu, upaya pengembangan komoditas, sektor pangan, perkebunan, dan peternakan menjadi pijakan penting. Adanya strategi aksi yang jelas dalam pengembangan sektor-sektor ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang sangat kaya di wilayah ini. Pengiriman ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi antarpulau seperti Sulawesi dan Sumba menjadi indikator vital potensi ekspor yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dukungan yang kuat terhadap sektor pertanian dan perikanan juga menjadi pendorong utama. Potensi sumber daya alam yang melimpah memberikan peluang besar dalam pengembangan sektor ini, memberikan kesempatan bagi petani dan nelayan setempat untuk meningkatkan hasil produksi dan akses pasar. Penguatan produk lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis lainnya. Memperkuat eksistensi produk lokal dengan teknologi modern dapat membuka peluang lebih luas dalam memasarkan produk lokal ke tingkat yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, keberhasilan ekonomi internal Kabupaten Manggarai Timur sangat tergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur yang mendukung, dan penguatan inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dengan mengintegrasikan strategi pengembangan sektor-sektor potensial ini, Kabupaten Manggarai Timur berpotensi menjadi pusat ekonomi yang dinamis di wilayah tersebut.

Meskipun memiliki potensi yang kuat, Kabupaten Manggarai Timur dihadapkan pada sejumlah kendala internal yang menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi. Salah satu kelemahan krusial adalah belum tersedianya regulasi yang kuat terkait ketahanan pangan. Dalam konteks

pertanian dan perikanan yang menjadi potensi utama, keberlangsungan pasokan pangan yang stabil menjadi hal yang krusial. Dibutuhkan regulasi yang jelas dan terstruktur untuk mengamankan ketahanan pangan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mampu mengakomodasi tingkat permintaan yang lebih luas. Kondisi topografi lingkungan yang sulit juga menjadi tantangan serius. Wilayah yang memiliki kultur yang rumit dan sulit dapat menjadi hambatan dalam infrastruktur transportasi dan distribusi. Hal ini bisa memperlambat aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, menghambat distribusi hasil pertanian, dan memperumit akses terhadap sumber daya alam yang berlimpah. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman juga menjadi kelemahan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pemukiman, lahan pertanian yang seharusnya produktif sering kali dialihfungsikan. Ini menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian yang dapat mengurangi potensi produksi dan menyulitkan pemerataan distribusi hasil pertanian. Mengatasi ketiga masalah tersebut memerlukan serangkaian langkah strategis baik dari regulasi yang jelas dan kuat, pengembangan infrastruktur yang lebih efisien, dan pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemukiman dan pelestarian lahan pertanian menjadi solusi penting dalam menjaga kesinambungan ekonomi lokal.

b. Ketergantungan pada produk impor dan rendahnya kualitas produk lokal

Dengan meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas, produk-produk luar daerah dan luar negeri dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif mudah masuk ke pasar lokal. Akibatnya, produk-produk lokal cenderung terpinggirkan dan sulit bersaing. Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan.

Selain itu, ketergantungan pada impor barang dan jasa juga menjadi ancaman bagi perekonomian Kabupaten Manggarai Timur. Impor yang tinggi menyebabkan uang keluar dari daerah tersebut dan berdampak negatif pada neraca perdagangan. Jika upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor tidak dilakukan, maka perekonomian Kabupaten Manggarai Timur akan terus bergantung pada pasokan luar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat sektor produksi dan mengembangkan sumber daya yang ada, termasuk mendorong pertumbuhan industri lokal.

Selanjutnya, rendahnya produktivitas menjadi masalah besar yang harus diatasi. Produktivitas yang rendah mengurangi daya saing dan efisiensi produksi di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat dalam meningkatkan keterampilan mereka, serta kurangnya modal dan akses terhadap teknologi yang lebih baik. Dalam meningkatkan produktivitas, dukungan dari pemerintah dan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat.

Selain itu, rendahnya inovasi dan kualitas produk lokal menjadi kendala yang harus segera diatasi. Inovasi dan peningkatan kualitas produk lokal dapat membuat produk tersebut memiliki keunikan dan daya saing di pasar. Namun, kurangnya dukungan dalam hal riset dan pengembangan serta penggunaan teknologi yang terbatas menghambat perkembangan inovasi dan kualitas produk lokal di Kabupaten Manggarai Timur. Penting bagi pemerintah setempat untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk lokal melalui pengembangan infrastruktur, pelatihan, dan dukungan keuangan.

c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kabupaten Manggarai Timur memiliki sejumlah kekuatan internal yang menjadi pondasi kuat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Komitmen tinggi dari pemerintah daerah dalam pembangunan sektor-sektor

kunci seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kesetaraan gender menjadi pilar utama. Pendidikan merupakan prioritas yang ditekankan oleh pemerintah daerah, dengan upaya nyata untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai seperti puskesmas, pustu, polindes, dan poskesdes menunjukkan komitmen yang nyata dalam memperhatikan aspek kesehatan masyarakat. Adanya infrastruktur kesehatan yang merata di wilayah ini memungkinkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh penduduk. Tingginya angkatan kerja di wilayah ini juga merupakan kekuatan utama. Ketersediaan tenaga kerja yang siap produktif mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang bagi peningkatan kesejahteraan. Komitmen kepala daerah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu juga menjadi landasan kuat dalam menjaga aspek kesehatan sosial. Ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan.

Meskipun menunjukkan kekuatan dalam beberapa aspek, Kabupaten Manggarai Timur juga dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal yang memengaruhi potensi pengembangan sumber daya manusia. Terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu kelemahan utama. Kurangnya jumlah dan kualitas pendidik berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ini memengaruhi upaya meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman tentang gaya hidup sehat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi masalah lainnya. Keterbatasan akses informasi dan kurangnya kampanye yang menyeluruh tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi terhambat.

Selain itu, rendahnya keahlian, keterampilan, dan pendidikan tenaga kerja yang terserap menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi. Pasokan tenaga kerja yang tidak memadai secara kualitas dan kuantitas dapat

memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Rendahnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda juga menjadi kelemahan lainnya. Ketidaksetaraan gender dan kurangnya investasi dalam pembangunan pemuda bisa menghambat potensi pertumbuhan yang holistik dan berkelanjutan. Terakhir, adanya budaya patrilineal yang masih kuat juga dapat menjadi kendala dalam pengembangan. Budaya ini seringkali membatasi akses dan kesempatan bagi individu-individu dari latar belakang yang kurang terwakili untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan serangkaian langkah strategis. Investasi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, kampanye dan edukasi yang lebih aktif tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta program pelatihan dan peningkatan keahlian tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

d. Belum mantapnya tata kelola pemerintahan

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Manggarai Timur dalam tata kelola pemerintahannya yakni organisasi pemerintahannya telah diatur dengan baik, dan kelembagaan yang sangat baik menandakan kemajuan yang telah dicapai. Segala proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga keuangan dan akuntansi pelaporan telah diadaptasi ke dalam sistem digital, membawa penerapan ekosistem keuangan elektronik ke dalam praktik. Langkah maju ini terlihat dalam penerapan masterplan smart city, yang telah diterapkan dalam berbagai aplikasi umum dan khusus untuk kebutuhan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan publik dan mengoptimalkan efisiensi administrasi pemerintahan. Selain itu, dukungan dan keterlibatan lembaga adat, tokoh agama, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban adalah faktor penting yang memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayah ini. Kolaborasi dengan

pihak-pihak ini membawa dampak positif dalam menjaga stabilitas dan kohesivitas sosial di kabupaten tersebut.

Meskipun menunjukkan kekuatan dalam tata kelola pemerintahannya, Kabupaten Manggarai Timur juga dihadapkan pada sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Rendahnya pengawasan di level perangkat daerah dan pemerintah daerah menjadi salah satu masalah utama. Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang kuat dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat mereduksi efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Keterbatasan dalam penerapan sistem reward and punishment juga menjadi masalah serius. Insentif yang tidak jelas dan hukuman yang minim dalam tata kelola pemerintahan dapat menghambat motivasi dan akuntabilitas pegawai, mengganggu proses pengambilan keputusan, serta mengurangi efisiensi administrasi. Selain itu, integrasi data yang belum dilakukan juga menjadi hambatan. Data yang tidak terintegrasi secara baik dapat mengganggu koordinasi dan kolaborasi antar instansi, menghambat upaya untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keuangan daerah juga menjadi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan daerah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan aset, retribusi daerah, dan penerimaan pajak daerah yang rendah juga menjadi kelemahan yang harus diperhatikan. Peningkatan pemanfaatan aset publik dan pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat keberlanjutan keuangan daerah. Terakhir, integrasi yang belum baik dari aplikasi umum dan khusus di tingkat pemerintah daerah hingga level desa memperlambat efisiensi administrasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Untuk mengatasi kelemahan ini, perlu adanya langkah-langkah strategis.

Penguatan pengawasan, sistem reward and punishment yang jelas, serta integrasi data yang lebih baik perlu diutamakan. Edukasi masyarakat mengenai keuangan daerah juga penting untuk menciptakan partisipasi yang lebih aktif dari mereka dalam proses tata kelola pemerintahan.

e. Belum meratanya infrastruktur kewilayahan dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sejak awal dikembangkan dari Kabupaten Manggarai, kawasan Manggarai Timur diidentifikasi sebagai wilayah yang membutuhkan pembangunan yang signifikan. Proses pemekaran pada tahun 2008 membawa tantangan tersendiri karena wilayah ini harus membangun infrastruktur dasar dan sistem penunjang lainnya dari dasar. Infrastruktur merupakan salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan ini. Faktor geografis dan kewilayahan yang rumit menciptakan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur yang memadai. Jaringan transportasi yang baik sangat penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan menjangkau seluruh masyarakat, namun hal ini seringkali sulit dilakukan di tengah topografi yang sulit.

Selain itu, aspek kewilayahan seperti aksesibilitas, konektivitas, dan distribusi sumber daya sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah yang merata menjadi kunci utama dalam menjaga kesetaraan dan keterjangkauan layanan bagi seluruh penduduk. Kondisi lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perlindungan terhadap lingkungan. Kawasan ini memiliki kekayaan alam yang besar, tetapi pemanfaatan yang berlebihan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dapat mengancam keberlangsungan ekosistem serta kesejahteraan jangka panjang.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi pembangunan yang terencana dan terpadu. Investasi dalam pembangunan infrastruktur

dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sarana kesehatan menjadi prioritas utama. Pembangunan ini harus memperhatikan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah-wilayah terpencil juga perlu menjadi fokus utama. Inisiatif untuk meningkatkan akses transportasi dan distribusi sumber daya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari setiap langkah pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan terhadap ekosistem alam, dan edukasi masyarakat akan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur, kewilayahan, dan perlindungan lingkungan hidup, Kabupaten Manggarai Timur dapat mengatasi tantangan internalnya dan mengarahkan wilayah ini menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh penduduknya.

Lebih lanjut, isu strategis daerah juga dapat diperoleh dari dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, dijelaskan sebagai berikut:

1) Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan persentasi penduduk miskin mencapai dari 26,49 persen menjadi 26,52 persen. Kemudian pada

tahun 2021 persentasi penduduk miskin mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 25,06%. Penurunan kemiskinan yang ada Kabupaten Manggarai cukup baik namun angka ini masih sangat jauh dari target angka kemiskinan secara nasional. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 25,06 persen di tahun 2023 masih berada di atas persentase penduduk miskin Nasional sebesar 9,36 persen dan target nasional sebesar 6-7 persen. Hal ini menunjukkan belum optimalnya upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur sehingga perlu dijadikan isu strategis yang nantinya akan diprioritaskan dalam penyusunan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029.

2) Belum optimalnya pengembangan ekonomi wilayah

Sebagaimana umumnya perekonomian wilayah lain di Indonesia, perekonomian Kabupaten Manggarai Timur pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Perekonomian Kabupaten Manggarai Timur memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor Pertanian. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Manggarai Timur masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Manggarai Timur dari tahun 2019 - 2023. Pada tahun 2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT (982,78 Milyar Rupiah), kemudian diikuti oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi (310,36 Milyar Rupiah); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (303,8 Milyar Rupiah). Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar nilai PDRB di Manggarai Timur, kategori ini mencakup subkategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri dari golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan,

dan jasa pertanian dan perburuan; sub kategori usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah sehingga aspek pengembangan ekonomi daerah yang rendah perlu dijadikan isu strategis yang nantinya akan diprioritaskan dalam penyusunan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029.

3) Ancaman bencana alam

Berdasarkan data InaRISK Terdapat 10 jenis bencana yang diidentifikasi rawan di Kabupaten Manggarai Timur meliputi bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Tanah Longsor dan Tsunami. Jenis bencana yang ada ini terdiri dari klasifikasi rawan sedang, rendah hingga tinggi. Kondisi rawan bencana alam yang berada pada kategori tinggi meliputi: abrasi (10,31 ha); banjir (40.324,25 ha); banjir bandang (5.060,03 ha); gempa bumi (36.280,57 ha); kebakaran hutan dan lahan (51.155,22 ha); kekeringan (82.601,58 ha); tanah longsor (100.844,61 ha); tsunami (22.958,86 ha). Terjadinya bencana dapat menimbulkan kerusakan bagi infrastruktur sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Kabupaten Manggarai Timur memiliki nilai indeks 156,93 berada pada kategori tinggi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena

itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Dengan target nasional yang diberikan yaitu 118,6 tentunya menjadikan upaya penanggulangan bencana harus lebih dioptimalkan di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menekan angka kerugian baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

4) Degradasi lingkungan

Degradasi memiliki makna penurunan, kemerosotan, maupun kemunduran. Jadi, degradasi lingkungan adalah kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Menurunnya fungsi komponen-komponen lingkungan tersebut ditengarai oleh banyak hal di antaranya pengambilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berlebih. Faktor penyebab degradasi lingkungan terjadi dapat dibedakan dalam 2 hal yakni faktor manusia dan faktor alam itu sendiri. Banyak hal yang dapat dilakukan manusia yang berdampak pada degradasi lingkungan. Setiap kegiatan manusia yang tidak memikirkan dampak keberlanjutannya tentu akan menimbun dampak negatif yang makin membesar. Degredasi lingkungan hidup dapat dilihat dari kondisi lahan kritis yang ada. Lahan kritis adalah lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya telah atau sedang mengalami proses kerusakan. Munculnya lahan ini sebagian besar disebabkan oleh degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses dimana kondisi lingkungan fisik yang berubah akibat kegiatan manusia ketika melakukan pengolahan lahan. Aktivitas tersebut menjadi penyebab kondisi lahan berubah dan merusak kesehatan lahan.

Dampak kerusakan hutan oleh pembakaran, perambahan, dan illegal logging adalah penyebab terbentuknya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, lahan kritis di Kabupaten Manggarai Timur terbagi dalam beberapa kategori yaitu agak kritis seluas 30.357,26 Ha, kritis seluas 74.504,36 Ha, sangat kritis seluas 96.839,01 Ha dan berpotensi kritis seluas 36.648,17 Ha.

5) Masih rendahnya akses pelayanan dasar pendidikan masyarakat

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur mencakup SD, SMP dan SMA/SMK. Fasilitas pendidikan jenjang Sekolah Dasar tersebar merata hampir di semua kecamatan. Kecamatan dengan jumlah Sekolah Dasar tertinggi berada pada Kecamatan Kota Komba sebanyak 63 unit SD. Untuk fasilitas pendidikan menengah pertama memiliki total 148 unit dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Kota Komba sebanyak 27 unit. Fasilitas pendidikan tingkat atas memiliki total jumlah 62 unit dengan jumlah SMA tertinggi di Kecamatan Kota Komba sebanyak 12 unit. Sarana pendidikan tersebar di berbagai kecamatan namun belum mampu melayani secara optimal kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan yang ada.

6) Masih rendahnya akses pelayanan dasar kesehatan masyarakat

Selain pendidikan akses terhadap pelayanan kesehatan juga sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di suatu wilayah. Jika dilihat dari angka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia yang ada di Kabupaten Manggarai Timur masih berada pada angka 51,72 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh indikator-indikator kesehatan yang belum mencapai target di Kabupaten Manggarai Timur seperti pelayanan fasilitas Kesehatan dan jumlah tenaga Kesehatan yang mengisi fasilitas tersebut. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, posyandu dan

apotek. Rumah sakit hanya terdapat di dua (2) Kecamatan yakni Kecamatan Borong dan Kecamatan Congkar masing-masing sebanyak 1 unit. Puskesmas tersebar merata hampir di semua kecamatan, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kota Komba sebanyak 5 unit. Puskesmas Pembantu hanya terdapat di 8 kecamatan dengan total sebanyak 45 unit. Apotek hanya terdapat 5 kecamatan dengan jumlah total sebanyak 11 unit. Posyandu tersebar merata hampir di semua kecamatan dengan jumlah sebanyak 789 unit.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Manggarai Timur ini belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini dikarenakan tidak semua fasilitas kesehatan yang ada didukung oleh tenaga kesehatan yang mumpuni. Di dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana pendukung termasuk tenaga kesehatan yang memadai. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan paramedis di Manggarai Timur hingga tahun 2024 baru mencapai 5,54 persen.

2. Isu Strategis Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang menciptakan peluang dan tantangan bagi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur dalam lima tahun ke depan. Kondisi eksternal dapat memengaruhi perubahan internal Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi eksternal terus berubah dan Kabupaten Manggarai Timur harus memantau dan meninjau strategi secara berkelanjutan untuk mengelola setiap ancaman yang muncul secara efektif dan untuk dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan (Witcher, 2020). Lingkungan eksternal Kabupaten Manggarai Timur meliputi provinsi/ regional, nasional, maupun internasional.

a. Isu Strategis Provinsi/Regional

Isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dirumuskan sebagai kondisi yang harus mendapatkan perhatian karena memiliki dampak yang

signifikan bagi Kabupaten Manggarai Timur khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Beberapa isu strategis provinsi/regional yang dikategorikan sebagai peluang dan ancaman untuk pembangunan Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2025-2045. Beberapa isu strategis provinsi/regional yang dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Manggarai Timur adalah:

1) Adanya Arah Pembangunan Provinsi yang mendorong kemandirian lokal

Arah Pembangunan Provinsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal, efisien dan berkelanjutan di Provinsi NTT. Arah pembangunan ini juga mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar, pemberdayaan, perlindungan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, arah pembangunan ini juga menekankan pentingnya pengembangan industri pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat menggerakkan sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, budaya dan lain-lain.

2) Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2019-2039

Perda ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan ruang di wilayah NTT. Perda ini mengatur tentang zonasi, fungsi, alokasi dan pemanfaatan ruang, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda ini juga mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah NTT yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Perda ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.

3) Penetapan Enam Proyek Strategis Nasional di NTT tahun 2021

Enam Proyek Strategis Nasional di NTT adalah pembangunan Jalan Tol Trans Flores, pembangunan Bandara Internasional Komodo, pembangunan Pelabuhan Tenau, pembangunan Bendungan Napun Gete, pembangunan PLTA Mbay dan pembangunan PLTS Sumba. Proyek-proyek Strategis Nasional ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT. Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mobilitas, aksesibilitas dan produktivitas di wilayah NTT, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri dan energi. Proyek-proyek ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, kesejahteraan, kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal.

4) Adanya potensi sumber daya lokal yang beragam dan kaya di NTT

Hasil pertanian, perikanan dan peternakan di NTT memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi, seperti jagung, kopi, kakao, kelapa, ikan, rumput laut, sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Kerajinan tangan, seni dan budaya di NTT juga memiliki keunikan dan keindahan yang menarik, seperti tenun ikat, ukiran kayu, patung, lukisan, tari, musik, sastra, dan lain-lain. Pariwisata di NTT juga memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti pantai, pulau, gunung, danau, air terjun, gua, hutan, taman nasional, flora, fauna, situs sejarah, budaya, dan lain-lain. Potensi berbasis wilayah ini dapat menjadi peluang kerja sama bagi Kabupaten Manggarai Timur.

Selain menjadi potensi, terdapat beberapa isu strategis regional yang dapat menjadi ancaman bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten Manggarai Timur, yaitu:

1) Adanya konflik masyarakat dengan perusahaan air minum terkait hak pengelolaan sumber daya air

Provinsi NTT memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sumber daya air yang vital. Namun, kemakmuran ini seringkali menjadi sumber konflik antara masyarakat setempat dan perusahaan air minum yang berusaha mengelola sumber daya air tersebut. Salah satu wilayah di NTT yang menghadapi isu strategis ini adalah Kabupaten Manggarai Timur. Artikel ini akan membahas dinamika konflik antara masyarakat dan perusahaan air minum terkait hak pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Konflik yang terjadi di Manggarai Timur berkisar pada hak pengelolaan sumber daya air. Perusahaan air minum sering kali mendapatkan izin pengelolaan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya air di wilayah tersebut. Namun, masyarakat setempat merasa bahwa hak-hak mereka tidak cukup diakui dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air.

Salah satu poin perselisihan utama adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan air minum. Pembangunan infrastruktur, pemindahan air, dan penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan air dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap ekosistem lokal. Masyarakat khawatir bahwa hal ini dapat merusak mata pencaharian tradisional mereka dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, distribusi air bersih yang tidak merata juga menjadi sumber konflik. Beberapa daerah mungkin mendapatkan akses air yang cukup, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan meningkatkan ketegangan sosial.

Konflik antara masyarakat dan perusahaan air minum terkait hak pengelolaan sumber daya air di Provinsi NTT, khususnya di Manggarai Timur, mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan mengadopsi pendekatan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi isu ini. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan keseimbangan yang baik antara pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

2) Tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan, erosi tanah, dan pencemaran laut

Salah satu ancaman bencana alam yang sering terjadi di NTT adalah gempa bumi. Gempa bumi sangat berpotensi merusak infrastruktur, termasuk rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, gempa bumi juga dapat menimbulkan kepanikan serta berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketika terjadi gempa bumi, kegiatan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur terhenti sementara waktu, karena harus fokus pada evakuasi dan pemulihan kondisi pasca-gempa. Selain itu, kerugian materil yang ditimbulkan oleh gempa bumi juga merugikan masyarakat, karena banyaknya harta benda yang hancur.

Ancaman bencana alam lainnya di NTT adalah tsunami. Provinsi ini terletak di Lingkar Pasifik yang dikenal sangat rawan mengalami tsunami akibat aktivitas gempa bumi di dasar laut. Tsunami dapat merusak pesisir pantai, dan menghancurkan pemukiman serta fasilitas umum yang berada di dekat pantai. Dampak yang ditimbulkan oleh tsunami sangat besar, tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Oleh karena itu, pencemaran informasi, evakuasi yang buruk, dan ketidaksiapan dalam mengantisipasi tsunami dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur.

Ancaman selanjutnya adalah aktivitas gunung berapi di NTT. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu dan menyebabkan kerusakan yang besar. Abu vulkanik yang dihasilkan dapat merusak tanaman pertanian dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, aliran lava yang keluar dari gunung berapi dapat menghancurkan pemukiman di sekitarnya. Mengingat Kabupaten Manggarai Timur berada di dekat beberapa gunung berapi, seperti Gunung Inerie dan Gunung Ranaka, maka potensi ancaman gunung berapi harus selalu diwaspadai dan diantisipasi.

Ancaman bencana alam lain yang perlu diperhatikan adalah banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan banjir dan tanah longsor di daerah ini. Banjir dapat menghancurkan rumah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, banjir juga dapat menggenangi lahan pertanian dan merusak hasil panen, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Sementara itu, tanah longsor dapat mengakibatkan kerugian nyawa dan merusak infrastruktur serta pemukiman. Dalam jangka panjang, bencana banjir dan tanah longsor juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur harus melibatkan diri secara aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang tahan gempa dan tsunami, seperti bangunan bertingkat tinggi dan sistem peringatan dini yang efektif. Selain itu, edukasi dan pelatihan tentang tindakan evakuasi dan penanggulangan bencana alam juga perlu ditingkatkan. Sementara itu, masyarakat harus terlibat dalam penghijauan dan pelestarian lingkungan guna mencegah banjir dan tanah longsor. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk memahami risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan juga penting dalam menghadapi ancaman bencana alam.

2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merujuk pada masalah ataupun tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan, stabilitas, dan kepentingan nasional khususnya di Indonesia. Isu strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 terbagi menjadi peluang dan ancaman. Isu strategis nasional yang dapat menjadi peluang, adalah:

1) Pendapatan per kapita nasional tumbuh pesat

Secara mendasar kemajuan ekonomi Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dan berhasil mengatasi berbagai tantangan dari skala

global. Lebih lanjut pendapatan per kapita naik enam kali lipat sejak tahun 2001-2021 dan berhasil menjadi *upper middle income country* pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi pada level 5 - 6 persen dan pulih relatif cepat saat pandemi COVID-19. Tahun 2022 Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita mencapai Rp71,0 juta atau USD4.783,9. Tingkat inflasi juga stabil pada rentang 3±1 persen, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjaga laju inflasi agar tidak melebihi 4 persen dan tidak kurang dari 2 persen. Penetapan target inflasi ini memastikan agar tetap stabil pada rentang tertentu bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan dapat diprediksi.

2) Bonus Demografi

Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, yaitu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Bonus demografi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan dominasi penduduk usia produktif, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang melimpah untuk mendorong inovasi, produktivitas, dan kewirausahaan. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas, bonus demografi dapat menjadi fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Fenomena ini menjadi peluang strategis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pengembangan kualitas SDM. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus ini dapat berubah menjadi beban sosial akibat meningkatnya angka pengangguran dan ketimpangan sosial.

3) Daya saing sumber daya manusia membaik

Peningkatan daya saing SDM Indonesia tercermin dari perbaikan indikator seperti *Human Capital Index* dan *Global Talent Competitiveness Index*. Pemerintah telah memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, memperluas akses pendidikan tinggi, serta mendorong penguasaan teknologi

dan digitalisasi. Meningkatnya daya saing SDM Indonesia menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam rantai pasok global dan menjadi pusat inovasi di kawasan Asia Tenggara. Kesiapan SDM dalam menghadapi disrupsi teknologi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital dan ekonomi kreatif.

4) Pesatnya pembangunan infrastruktur

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami akselerasi signifikan, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan infrastruktur digital. Hal ini bertujuan mendukung konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing nasional. Percepatan pembangunan infrastruktur menghadirkan peluang untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat pertumbuhan sektor industri dan pariwisata. Akses yang lebih baik terhadap transportasi, energi, dan internet juga membuka ruang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya tarik investasi, khususnya di wilayah luar Jawa.

5) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

Indonesia semakin aktif dalam percaturan global melalui partisipasi dalam forum multilateral seperti G20, ASEAN, dan berbagai organisasi internasional. Kepemimpinan diplomatik Indonesia tercermin dari peran strategis dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, keamanan, dan ekonomi inklusif. Meningkatnya pengaruh ini merupakan aset geopolitik yang perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan luar negeri, penguatan diplomasi ekonomi, serta peningkatan kualitas diplomat dan institusi terkait. Meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional membuka peluang untuk memperkuat posisi dalam perundingan global, menarik investasi asing, serta memperluas pasar ekspor. Kepemimpinan dalam isu-isu global seperti

transisi energi, ketahanan pangan, dan perdamaian dunia juga dapat menjadi instrumen *soft power* yang memperkuat branding Indonesia sebagai negara besar yang stabil dan proaktif di tataran global.

6) Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim dengan menurunkan intensitas emisi GRK, sejalan dengan target *Nationally Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement*. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program seperti transisi energi bersih, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan ekonomi hijau. Penurunan emisi ini penting tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai daya tarik investasi hijau dan penguatan posisi Indonesia di forum iklim global. Penurunan emisi GRK tidak hanya mencerminkan komitmen lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pionir dalam ekonomi hijau. Ini termasuk pengembangan energi terbarukan, industri ramah lingkungan, dan perdagangan karbon. Peluang ini dapat menarik investasi hijau, membuka lapangan kerja baru di sektor hijau, serta meningkatkan daya saing ekspor melalui sertifikasi produk yang berkelanjutan.

7) Kebijakan Pusat Regulasi Satu Data dan SPBE

Pemerintah tengah mendorong transformasi digital birokrasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi SPBE memungkinkan integrasi layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Kebijakan Satu Data dan SPBE membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan akuntabel. Hal ini juga menciptakan ekosistem data yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti *(evidence-based policy),* serta mendukung lahirnya inovasi di sektor publik dan swasta.

Selain peluang, terdapat beberapa isu strategis nasional yang dapat menjadi ancaman dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur, seperti:

1) Produktivitas rendah

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan, yang menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Jika tidak segera diatasi, Indonesia akan kesulitan keluar dari jebakan pendapatan menengah dan gagal memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

2) IPTEKIN dan Riset Lemah

Kelemahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) mengancam kemandirian nasional dan memperlebar ketergantungan pada teknologi asing. Minimnya anggaran riset, kolaborasi lemah antara dunia akademik dan industri, serta rendahnya hilirisasi hasil penelitian menyebabkan Indonesia tertinggal dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Tanpa penguatan riset dan inovasi, Indonesia akan sulit bersaing di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital global.

3) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Masih rendahnya penetrasi infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan luar Jawa, serta lemahnya literasi digital masyarakat, menjadi ancaman serius dalam mewujudkan pemerataan transformasi digital. Akses internet yang terbatas, kualitas jaringan yang belum merata, serta minimnya infrastruktur penunjang seperti pusat data dan jaringan serat optik, menyebabkan ketimpangan akses terhadap layanan digital, pendidikan daring, pelayanan publik elektronik, hingga peluang ekonomi berbasis digital. Kondisi

ini berisiko menciptakan *digital divide* yang semakin melebar, memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional yang potensinya sangat besar. Lebih dari sekadar ketersediaan jaringan, rendahnya literasi digital masyarakat di daerah juga memperparah kesenjangan ini. Banyak masyarakat, pelaku UMKM, dan aparatur daerah belum memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi digital secara produktif dan aman. Akibatnya, potensi transformasi digital untuk mendorong efisiensi pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan konektivitas antarwilayah tidak dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan daerah, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital harus menjadi agenda prioritas, khususnya bagi Kabupaten Manggarai Timur.

4) Pembangunan Belum Berkelanjutan

Pembangunan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keberlanjutan masih menjadi tantangan serius di banyak daerah di Indonesia. Model pembangunan yang dominan eksploitatif terhadap sumber daya alam seperti pembukaan lahan secara besar-besaran, eksplorasi tambang tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai, serta alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan industri atau permukiman telah menimbulkan tekanan besar terhadap ekosistem lokal. Di tingkat daerah, dampak dari pembangunan yang tidak berkelanjutan terlihat nyata dalam bentuk meningkatnya bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga kekeringan. Kualitas udara, tanah, dan air semakin menurun, mengancam produktivitas pertanian, perikanan, serta kesehatan masyarakat lokal.

5) Integrasi Domestik Terbatas serta Kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa

Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa merupakan isu struktural yang terus berlanjut dan menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Jawa,

sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur, masih menikmati dominasi dalam hal alokasi anggaran, investasi, akses layanan publik, serta pembangunan fisik. Sementara itu, banyak daerah di luar Jawa yang justru kaya akan sumber daya alam dan potensi lokal masih tertinggal dalam hal akses transportasi, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi. Ini tidak hanya memperlambat pertumbuhan daerah di luar Jawa, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial yang dapat memicu ketidakpuasan masyarakat daerah, memperlemah kohesi nasional, dan menghambat stabilitas sosial-politik jangka panjang.

6) Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Kelemahan dalam sistem hukum, baik dari sisi kepastian hukum maupun penegakan hukum yang tidak konsisten, menjadi hambatan serius bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif. Praktik korupsi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha menggerus kepercayaan publik terhadap negara hukum, dan menjadi ancaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

7) Demokratisasi Belum Optimal

Proses demokratisasi Indonesia menghadapi tantangan serius, seperti menurunnya kualitas kebebasan sipil, polarisasi sosial-politik, dan rendahnya partisipasi politik yang substansial. Demokrasi prosedural belum sepenuhnya dibarengi oleh demokrasi substansial, yang ditandai dengan lemahnya akuntabilitas wakil rakyat dan maraknya politik uang. Jika tidak diperbaiki, demokrasi dapat kehilangan legitimasi dan mengganggu stabilitas politik serta pembangunan jangka panjang maupun menengah.

3. Isu Strategis Internasional

Terdapat isu-isu strategis internasional atau global yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten Manggarai Timur, yaitu:

1) Bonus demografi global

Tren demografi global menjadi faktor kunci yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Penduduk dunia diperkirakan akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang memiliki negara-negara yang berperan dalam perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi daya tarik bagi para investor pada kawasan tersebut. Di samping itu, kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia. Dengan adanya bonus demografi ini, tentunya Indonesia membutuhkan strategi dan dukungan dari masing-masing daerah untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut.

Kabupaten Manggarai Timur memiliki jumlah penduduk 292.037 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 146.977 jiwa (50,33%) dan penduduk perempuan sebesar 145.060 jiwa (49,67%). Bonus demografi global ini seharusnya menjadi peluang bagi Kabupaten Manggarai Timur untuk meningkatkan perekonomian daerah dan peluang masuknya investasi. Namun, isu ini justru menjadi tantangan bagi Kabupaten Manggarai Timur mengingat jumlah penduduk usia produktif/usia kerja dan usia muda masih mendominasi pertumbuhan penduduk sehingga terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap kelompok usia ini. Selain itu, dilihat dari kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai Timur, sektor pertanian masih belum mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan lahan pertanian, rendahnya produktivitas tanaman pangan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap daya tarik terhadap investor di masa mendatang.

2) Geopolitik dan geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini berdampak luas terhadap berbagai sektor

kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan utama dari isu ini adalah meningkatnya persaingan antar negara adidaya yang meluas dan menimbulkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru ini telah memengaruhi konflik di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Krisis di berbagai sektor dapat menjadi ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, sosial, dan ancaman siber berpotensi mengganggu stabilitas geopolitik. Hal ini menyebabkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi secara global. Pada aspek geoekonomi, saat ini sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melihat ketergantungan yang tinggi akan ekspor komoditas. Fenomena ini menjadi peluang bagi Kabupaten Manggarai Timur untuk meningkatkan kapasitas SDM yang memiliki daya saing. Dengan kebijakan yang tepat, Kabupaten Manggarai Timur mampu mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi daerahnya. Selain itu, SDM yang memiliki daya saing yang kuat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Manggarai Timur. Lebih dari itu, tantangan geoekonomi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan diversifikasi komoditas lokal dan mutu produk berstandar internasional sehingga dapat bersaing dengan komoditas global.

3) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi telah berdampak pada disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan ini memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi tersebut perlu ditopang oleh tingkat literasi pola pikir yang baik agar mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang secara maksimal untuk menghindari adanya disrupsi teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi juga berpotensi menggantikan 40 persen dari berbagai pekerjaan yang ada saat ini. Perkembangan teknologi sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Teknologi mampu memberikan

kemudahan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Dengan kata lain, perkembangan teknologi mampu mempermudah akses terhadap pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki potensi untuk menciptakan SDM yang terampil dan berdaya saing. Lebih dari itu, memanfaatkan perkembangan teknologi bagi sektor pariwisata dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya tarik wisata, pemasaran destinasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dari segi ancaman, perkembangan teknologi tidak dapat dimanfaatkan apabila daerah belum memiliki SDM mumpuni justru akan kesulitan dalam mengejar ketertinggalan keahlian dan keterampilan teknologi. Selain itu, isu ini dapat mengancam sektor-sektor lain yang belum tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

4) *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan utama yang dihadapi umat manusia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Dengan 17 tujuan yang saling terkait, SDGs mengajak semua negara, baik maju maupun berkembang, untuk berkolaborasi dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Isu-isu seperti akses pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang merata, serta perlindungan lingkungan menjadi semakin mendesak, terutama di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi dan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam bentuk kebijakan yang inovatif, investasi yang berkelanjutan, serta penguatan kemitraan global. Hanya dengan tindakan kolektif dan keberlanjutan yang terintegrasi, kita dapat mewujudkan visi SDGs dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Indonesia juga turut berkomitmen dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dijabarkan dalam tujuh belas pembangunan RPJPN. Tentu dalam mencapai harapan

nasional, peran daerah juga sangat diperlukan, termasuk Kabupaten Manggarai Timur. Isu SDGs ini juga menjadi perhatian penting bagi rencana pembangunan Kabupaten Manggarai Timur.

5) Urbanisasi dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan pada jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua per tiga penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Di Asia, dalam empat dekade ke depan, 1,7 kali lipat penduduk perkotaan diprediksi akan meningkat. Tekanan penduduk dan pembangunan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik akan memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perkembangan kota yang berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi pada perubahan penggunaan lahan produktif menjadi kawasan pemukiman dan perdagangan. Fenomena urbanisasi ini dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan adanya peningkatan akses terhadap fasilitas dan layanan publik. Urbanisasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa di perkotaan. Selain itu, urbanisasi dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hijau dan konsep smart city. Dari segi ancaman, urbanisasi dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup seperti polusi udara, air, dan tanah yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, perkembangan kota akibat adanya urbanisasi berpotensi menjadi ancaman bagi sektor pertanian karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut dapat menurunkan tingkat produksi dan kontribusi pada sektor pertanian di Kabupaten Manggarai Timur.

6) Konstelasi perdagangan global

Konstelasi perdagangan global telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, geopolitik, dan geoekonomi. Perubahan ini memerlukan kesiapan yang kompetitif dari setiap negara untuk dapat bersaing dalam pasar global. Kemampuan kompetitif tersebut perlu ditopang oleh tingkat kualitas produk, diversifikasi komoditas, dan kerja sama regional yang baik agar mampu memanfaatkan peluang pasar global yang berkembang secara dinamis. Selain itu, konstelasi perdagangan global juga berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan standar kesehatan yang berbeda-beda. Konstelasi perdagangan global sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya pasar global yang luas dan beragam yang dapat menyerap produk-produk lokal dari Kabupaten Manggarai Timur. Produk-produk lokal tersebut antara lain adalah kopi, coklat, madu, dan tenun ikat yang memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri. Selain itu, konstelasi perdagangan global juga dapat meningkatkan kerja sama regional dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste, Australia, dan Malaysia yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Kabupaten Manggarai Timur. Dari segi ancaman, konstelasi perdagangan global dapat menyebabkan persaingan yang ketat dengan produk-produk impor yang memiliki kualitas dan harga yang lebih baik. Selain itu, konstelasi perdagangan global juga dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pasar global yang rentan terhadap fluktuasi dan ketidakpastian.

7) Tata kelola keuangan global

Tata kelola keuangan global merupakan sistem yang mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di tingkat global. Tata kelola keuangan global melibatkan berbagai aktor seperti negara, lembaga keuangan internasional, bank sentral, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tata kelola keuangan global bertujuan untuk menciptakan stabilitas, transparansi, akuntabilitas, dan

inklusivitas dalam sistem keuangan global. Tata kelola keuangan global juga berperan dalam mengatasi berbagai isu keuangan global seperti krisis, utang, pajak, dan pencucian uang. Tata kelola keuangan global sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya akses yang lebih mudah dan murah terhadap sumber pembiayaan dari lembaga keuangan internasional, bank sentral, dan sektor swasta. Sumber pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tata kelola keuangan global juga dapat meningkatkan kapasitas dan kredibilitas Kabupaten Manggarai Timur dalam mengelola keuangan daerah dengan standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan global. Dari segi ancaman, tata kelola keuangan global dapat menyebabkan risiko yang tinggi terhadap stabilitas keuangan daerah akibat adanya gejolak dan ketidakpastian di pasar keuangan global. Selain itu, tata kelola keuangan global juga dapat menyebabkan keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan daerah akibat adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan internasional.

8) Pertumbuhan kelas menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap keseluruhan populasi global. Setiap tahunnya, sekitar 140 juta individu masuk ke dalam status kelas menengah. Pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi. Proporsi kelas menengah yang meningkat pesat semakin mendorong penciptaan jenis dan lapangan kerja baru serta kebutuhan konsumsi yang beragam. Jenis pekerjaan baru ini berhubungan dengan teknologi tinggi serta bersifat fleksibel dan memiliki mobilitas yang tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis dan aktivitas ekonomi. Bagi Kabupaten Manggarai Timur yang didominasi oleh penduduk dengan usia produktif,

pertumbuhan ini menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan penduduk yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan kelas menengah ini sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya permintaan yang tinggi terhadap produk-produk lokal dari Kabupaten Manggarai Timur. Produk-produk lokal tersebut antara lain adalah kopi, coklat, madu, dan tenun ikat yang memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri. Selain itu, pertumbuhan kelas menengah juga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah dengan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Dari segi ancaman, pertumbuhan kelas menengah dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan plastik, energi fosil, dan produk impor yang memiliki jejak karbon yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan kelas menengah juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda.

9) Persaingan sumber daya alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan SDA sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektivitas pengelolaan dan konservasi SDA, pengembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi dan produksi suatu daerah. Persaingan SDA ini sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya potensi SDA yang melimpah dan beragam di Kabupaten Manggarai Timur. Sumber Daya Alam tersebut antara lain adalah air, tanah, hutan, mineral, dan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, persaingan SDA juga dapat

meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan SDA secara efisien dan berkelanjutan. Dari segi ancaman, persaingan SDA dapat menyebabkan konflik dan kerawanan sosial antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta terkait hak dan kewenangan atas SDA. Selain itu, persaingan SDA juga dapat menyebabkan kerusakan dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi dan pencemaran SDA yang tidak bertanggung jawab.

10) Perubahan iklim

The Triple Planetary Crisis yang terdiri dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta hilangnya keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Isu ini mendorong transformasi paradigma pembangunan lama secara *business as usual* menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ekstrem ini berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan. Fenomena ini tentunya menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Manggarai Timur. Perubahan iklim ini secara langsung dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga berpotensi memengaruhi pengembangan SDM unggul di Kabupaten Manggarai Timur. Perubahan iklim ini juga berdampak pada tingkat produktivitas berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur. Sehingga diperlukan solusi dan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Timur. Perubahan iklim ini sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya kesempatan untuk mengembangkan sektor-sektor yang ramah lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim seperti pariwisata, pertanian organik, dan energi

terbarukan. Selain itu, perubahan iklim juga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Dari segi ancaman, perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam yang sering dan intens seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan erosi yang berdampak negatif terhadap infrastruktur, lingkungan, dan masyarakat. Selain itu, perubahan iklim juga dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas SDA seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

11) Pemanfaatan luar angkasa

Pemanfaatan luar angkasa merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat di era globalisasi. Pemanfaatan luar angkasa melibatkan berbagai kegiatan seperti eksplorasi, penelitian, pengembangan, dan komersialisasi sumber daya dan teknologi luar angkasa. Pemanfaatan luar angkasa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan keamanan manusia di bumi. Pemanfaatan luar angkasa juga berperan dalam mengatasi berbagai isu global seperti perubahan iklim, bencana alam, komunikasi, dan navigasi. Pemanfaatan luar angkasa sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi, data, dan layanan yang berasal dari luar angkasa seperti satelit, roket, dan stasiun luar angkasa. Informasi, data, dan layanan tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan mitigasi bencana. Selain itu, pemanfaatan luar angkasa juga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di Kabupaten Manggarai Timur dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi. Dari segi ancaman, pemanfaatan luar angkasa menimbulkan risiko yang tinggi terhadap keamanan dan kedaulatan nasional akibat adanya persaingan dan konflik antarnegara terkait hak dan kewenangan pengelolaan area luar angkasa.

2.1.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik. SPM menjamin hak masyarakat atas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya yang bersifat wajib dan terukur.

Secara keseluruhan, Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan peningkatan signifikan dari capaian rata-rata 60.54% pada tahun 2023 menjadi 88.78% di tahun 2024. Berikut adalah rincian capaian SPM Kabupaten Manggarai Timur antara lain:

1. Pencapaian Tertinggi & Terkonsolidasi
   a) Pekerjaan Umum (91% → 100%) dan Perumahan Rakyat (50% → 100%):

      Mencapai target ideal (100%) pada 2024, menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni.
   b) Sosial (63.37% → 98.93%):

      Lonjakan 35.56% mencerminkan perbaikan layanan perlindungan sosial (bansos, penanganan PMKS, dll).
2. Peningkatan Signifikan
   a) Pendidikan (46.50% → 82.48%):

      Meski sempat terendah di 2023, naik 35.98% pada 2024. Mengindikasikan perbaikan akses sekolah, rasio guru-siswa, atau sarana pendidikan.
   b) Kesehatan (72.56% → 82.13%):

      Kenaikan 9.57% menunjukkan peningkatan layanan puskesmas, cakupan imunisasi, atau penanganan gizi buruk.
3. Bidang Perlu Perhatian Khusus
   a) TRANTIBUMLINMAS (39.80% → 69.13%):

      Meski naik 29.33%, capaian 2024 masih terendah (69.13%). Mengindikasikan tantangan dalam penertiban wilayah, penanggulangan bencana, atau ketertiban umum.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

b. Visi

Visi merupakan dasar dari penentuan program prioritas daerah yang telah direncanakan dan akan dicapai. Visi menjadi suatu tuntunan bagi daerah untuk melakukan pembangunan yang baik dalam beberapa waktu ke depannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur memuat visi pembangunan sebagai dasar pijakan bagi seluruh perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Visi dirumuskan oleh Kepala Daerah terpilih yang disesuaikan dengan kondisi dan harapan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Visi kepala daerah terpilih menjadi dasar utama dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Manggarai Timur ke depan. Dengan berpedoman pada visi tersebut, diharapkan terwujud sinergi antara pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara partisipatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu berikut Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 yaitu:

“Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Penjelasan visi:

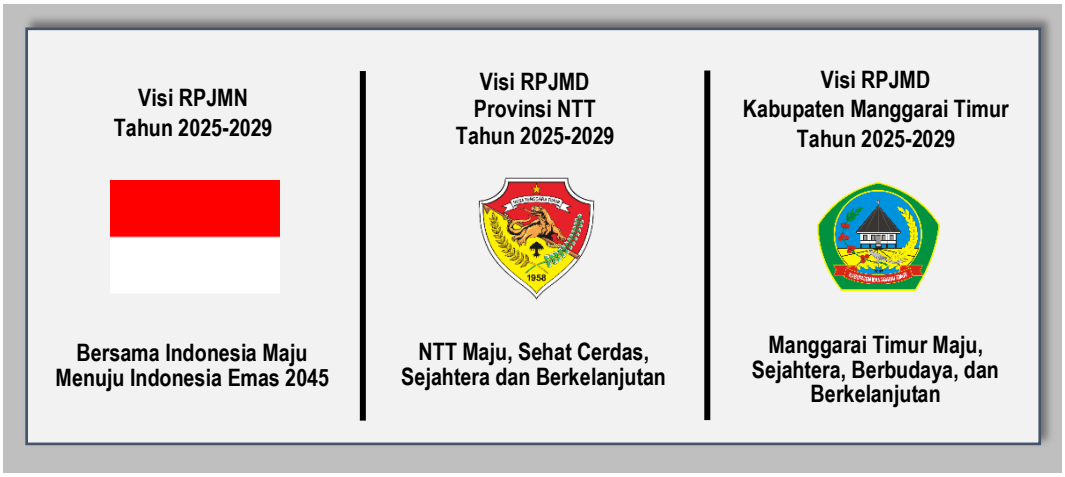
1. Maju. Dalam konteks pembangunan, kata maju mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang. Kata "Maju" identik

dengan dengan kualitas sosial, perkembangan sumber daya manusia, serta kualitas pembangunan ekonomi yang maju dan makmur. Dengan demikian maka Maju dalam visi ini dimaknai sebagai: (1) Kabupaten Manggarai Timur mampu mengembangkan kualitas sosial dan budaya Manggarai Timur yang maju dan berdaya saing, serta tetap berpegang teguh pada nilai- nilai luhur; (2) Manggarai Timur yang mampu menciptakan Sumber Daya yang unggul, adaptif dan berdaya saing; serta (3) Manggarai Timur yang mampu menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang maju, berdampak, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mengembangkan potensi dan keunggulan wilayah untuk peningkatan nilai tambah daerah. Visi Maju menunjukkan komitmen untuk terus bergerak maju, mengikuti tren perkembangan global, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Sejahtera, mencerminkan pembangunan yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan layanan kebutuhan dasar sehingga masyarakat Manggarai Timur yang mampu mengakses dan menikmati kualitas hidup yang tinggi dan stabil. Dalam mewujudkan visi sejahtera, masyarakat Manggarai Timur diberdayakan untuk mampu menguasai sektor- sektor ekonomi produktif dengan mengefektifkan pembangunan sektoral yang berpihak pada pengembangan ekonomi inklusif. Selain itu, masyarakat Manggarai Timur yang sejahtera dibangun dengan menciptakan kemudahan terhadap akses layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kualitas hidup yang baik melalui kerangka peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan layanan kebutuhan dasar ini harus dapat dipastikan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk Manggarai Timur.

3. Berbudaya. Budaya merupakan cerminan harkat dan martabat manusia yang luhur dan otentik, sehingga harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat. Dalam konteks pembangunan, budaya harus selalu dijaga keluhurannya sehingga dapat menjadi penyelaras, pedoman, panduan, serta batasan. Visi berbudaya bermakna: (1) Pembangunan harus mengarah pada artikulasi budaya, sehingga kemajuan yang tercipta tidak menggerus nilai- nilai kebudayaan Manggarai Timur, (2) Budaya merupakan nilai luhur yang harus selalu dijaga dan dilestarikan, serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, dan (3) budaya terinternalisasi dalam kehidupan Masyarakat Manggarai Timur dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah serta dalam rangka menumbuhkan jati diri dan kepribadian masyarakat Manggarai Timur.
4. Berkelanjutan. "Berkelanjutan" dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan komitmen untuk mewujudkan perkembangan yang berkesinambungan, mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kata "Berkelanjutan" dalam visi ini mencerminkan keinginan untuk membangun masa depan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga melindungi dan meninggalkan warisan yang baik untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan diarahkan pada terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari. Dengan memprioritaskan keberlanjutan, Kabupaten Manggarai Timur berusaha membangun masyarakat dan lingkungan yang tangguh, adaptif, dan mampu menanggapi tantangan masa depan dengan bijaksana.

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 telah selaras dengan Visi RPJMN dan Visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 3. 1 Sinkronisasi Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 ingin mencapai pembangunan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi daerah. Hal ini sejalan dengan semangat Provinsi NTT yang ingin mewujudkan pembangunan sejahtera dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan. Semangat visi yang selaras antara Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi NTT ini menjadi fondasi yang selaras untuk mencapai Indonesia Maju dengan menekankan pembangunan inklusif dan lestari untuk masa yang akan datang.

c. Misi

Agar visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 tercapai, maka ditetapkan enam misi sebagai berikut:

1. Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Misi 2 Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

3. Misi 3 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan yang Merata di Berbagai Sektor untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan
4. Misi 4 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan, dengan Memperkuat Desa sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan Masyarakat secara Berkelanjutan
5. Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur juga telah selaras dengan Misi RPJMN (Asta Cita) dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi NTT serta RPJMN

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	**Misi 2** Memperluas Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inkusif, Terjangkau Dan Mudah Diakses (Sehat)	**Asta Cita 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
	Misi 3 Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (Cerdas)	
Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	**Misi 4** Mewujudkan Kesejahteraan Kesetaraan Akses, Kualitas Hidup Berkeadilan Dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Sejahtera)	

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)
Misi 2 Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**Misi 1** Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (Maju) **Misi 5** Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (berkelanjutan)	**Asta Cita 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru **Asta Cita 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Asta Cita 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. **Asta Cita 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan **Asta Cita 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan yang Merata di Berbagai Sektor untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan		
Misi 4 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan, dengan Memperkuat Desa sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan Masyarakat secara Berkelanjutan		

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)
Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif		**Asta Cita 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) **Asta Cita 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Berdasarkan di atas, terlihat bahwa Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 telah sejalan dengan misi pembangunan jangka menengah baik nasional maupun Provinsi NTT. Fokus misi 1 RPJMD Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan pembangunan SDM telah sejalan dengan misi 2, 3, dan 4 RPJMD Provinsi NTT, serta Asta Cita 1, 2, dan 6. Selain itu fokus misi ekonomi dan infrastruktur Kabupaten Manggarai Timur selaras ke dalam satu misi RPJMD Provinsi NTT yaitu misi 1 yang menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan kegiatan perekonomian daerah. Fokus misi untuk ekonomi dan infrastruktur ini telah sejalan pula dengan misi nasional yaitu Asta Cita 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan untuk fokus misi tata kelola (Misi 6) dan misi pembangunan budaya serta perlindungan Perempuan dan Anak (Misi 5) selaras dengan Misi 5 RPJMD Provinsi NTT yang ingin mewujudkan pembangunan berkelanjutan SDM dengan pemenuhan HAM yang bijak. Fokus misi tata kelola dan pembangunan SDM ini juga telah selaras dengan Asta Cita 1, 7, dan 8. Dengan adanya keselarasan misi Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, dan Nasional ini dapat membantu pembangunan yang lebih terintegrasi dan terarah.

Demikian pula Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 juga telah selaras dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Manggarai Timur 2025-2045

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029		**Visi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045**
"Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan"	**SELARAS**	**"Manggarai Timur Sebagai Kawasan Agribisnis yang Maju, Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045"**
Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029		**Misi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045**
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	**SELARAS**	**Misi 1** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur yang Unggul
Misi 2 Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	**SELARAS**	**Misi 2** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Timur yang Berkualitas dan Inklusif
Misi 3 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan yang Merata di Berbagai Sektor untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan	**SELARAS**	**Misi 6** Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata **Misi 7** Menciptakan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Misi 4 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan, dengan Memperkuat Desa sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan Masyarakat secara Berkelanjutan	**SELARAS**	**Misi 2** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Timur yang Berkualitas dan Inklusif
Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	**SELARAS**	**Misi 5** Meningkatkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Inklusif, Adaptif, dan Tangguh

Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029		Visi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045
Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif	**SELARAS**	**Misi 4** Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Demokrasi **Misi 3** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif **Misi 8** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah yang Kolaboratif

Dengan demikian, rencana pembangunan jangka panjang telah diturunkan dengan tepat untuk pembangunan lima tahun ke depan. Fokus misi pembangunan jangka panjang "maju, sejahtera, dan berkelanjutan" masih ditekankan dalam pembangunan jangka menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan daerah Manggarai Timur sangat diharapkan lebih bertransformasi baik aspek SDM, SDA, Ekonomi, Infrastruktur, maupun Tata kelola untuk menjadi daerah yang lebih maju. Dengan selarasnya visi dan dan misi RPJMD dengan RPJPD ini akan mendorong tercapainya kawasan Manggarai Timur Agribisnis untuk mendorong Indonesia Emas 2045. Selain itu, Keselarasan misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dan misi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2045 akan mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan dengan fokus pada pembangunan SDM, ekonomi inklusif, pembangunan yang merata, peningkatan budaya inklusif, serta mewujudkan tata kelola yang lebih berintegritas.

Arah dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk periode 2025–2029 disusun tidak hanya untuk menjamin terwujudnya visi RPJMD dalam jangka menengah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang Tahap I sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun

2025–204. Dalam konteks ini, RPJMD memiliki peran krusial sebagai instrumen perencanaan lima tahunan yang terintegrasi dengan keseluruhan tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, setiap sasaran pembangunan dalam RPJMD harus dirancang secara selaras dengan arah transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang menjadi mandat dalam dokumen RPJPD. Target sasaran visi pada periode RPJMD pertama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Target Sasaran Visi RPJPD tahun 2025-2045 Periode I

Sasaran Visi RPJPD	Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1) Pendapatan Per Kapita Meningkat sebagai Kontribusi terhadap Pendapatan Per Kapita Regional	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	14,67-15,14	16.164	17.039	17.914	18.789	19.664
	Kontribusi PDRB Sektor Primer(%)	45,79	45,54	45,29	45,04	44,79	44,54
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolah-an (%)	0,73	0,88	1,02	1,17	1,32	1,47
2) Pengetasan Kemiskinan dan Ketimpang-an	Tingkat Kemiskin-an (%)	23,85-24,35	23.14-22.64	21.93-21.43	20.72-20.22	19.51-19.01	18.30-17.80
	Rasio Gini (Indeks)	0,268	0,260	0,252	0,244	0,236	0,228
	Kontribusi PDRB Kabupa-ten terhadap Provinsi	2,92	3,03	3,14	3,25	3,36	3,47
	Pertum-buhan Ekonomi (%)	3,65-4,15	4,24	4,34	4,43	4,52	4,61

Sasaran Visi RPJPD	Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3) Daya Saing Daerah Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	2,70	2,75	2,80	2,86	2,91	2,96
4) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pem-bangunan Manusia	67,58	68,72	69,48	70,05	71,18	72,32
5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkung-an Hidup (IKLH)	83,16	83.33	83.50	83.67	83.84	84.01

Selanjutnya, dalam rangka mengarahkan pembangunan daerah secara lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan *Indikator Utama Pembangunan* (IUP) sebagai instrumen strategis untuk mengawal pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD. Penetapan target IUP ini menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan, penyusunan program prioritas, serta pengendalian kinerja pembangunan daerah agar tetap selaras dengan arah pembangunan jangka panjang. Indikator utama pembangunan yang ditetapkan untuk periode pertama RPJMD Tahun 2025–2029 mencakup berbagai aspek pembangunan yang bersifat strategis. Adapun target dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Manggarai Timur untuk periode tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 4 Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Manggarai Timur untuk Periode I RPJMD Tahun 2025-2029

No	Indikator Makro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,5	73,6	74,2	74,8	75,4	76,0
2	Kesehatan Ibu dan Anak :						

No	Indikator Makro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	202	193,1	184,2	175,3	166,4	157,5
	b. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita (%)	40,1	38,39	36,68	34,97	33,26	31,55
3	Penanganan Tuberkulosis:						
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)*	100	100	100	100	100	100
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)*	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional	80,95	81,9	82,8	83,7	84,6	85,5
5	Hasil pembelajaran						
	a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,111	0,121	0,131	0,141	0,151	0,161
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i) Literasi :						
	SD	55,99	56,87	57,75	58,63	59,51	60,39
	SMP	44,05	45,13	46,21	47,29	48,37	49,45
	ii) Numerasi :						
	SD	51,21	52,21	53,21	54,21	55,21	56,21
	SMP	40,73	42,15	43,56	44,98	46,39	47,81
	iii) Iklim Keamanan:						
	SD	75,64	76,28	76,92	77,56	78,2	78,84
	SMP	71,84	72,48	73,12	73,76	74,4	75,04
	iv) Iklim Kebhinekaan :						
	SD	75,36	76,00	76,64	77,28	77,92	78,56
	SMP	74,75	75,39	76,03	76,67	77,31	77,95
	v) Iklim Inklusivitas :						
	SD	58,41	59,37	60,33	61,29	62,25	63,21
	SMP	59,55	60,51	61,47	62,43	63,39	64,35
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.10	8.25	8.60	9.20	9.80	10
	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.9	13.0	13.5	14.0	14.5	15

No	Indikator Makro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	2,55	3,14	3,73	4,31	4,90	5,49
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	30	35,24	40,48	45,72	50,96	56,20
8	Tingkat kemiskinan (%)	23,85-24,35	23.14-22.64	21.93-21.43	20.72-20.22	19.51-19.01	18.30-17.80
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	10,10	12,30	14,50	16,69	18,89	21,09
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,13	0,50	0,88	1,25	1,63	2,00
11	Produktivitas Industri dan Pertanian						
	a) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,73	0,884	1,038	1,192	1,346	1,5
	b) PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	45,79	45,54	45,29	45,04	44,79	44,54
12	Pengembangan Pariwisata						
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)*	0,21	0,44	0,67	0,89	1,12	1,35
	b. Jumlah Tamu Wisatawan (Orang)*	11.098	11.536	11.975	12.413	12.852	13.290
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,008	0,010	0,013	0,015	0,018	0,020
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	0,95	1,03	1,11	1,19	1,27	1,35
	c) Proporsi jumlah Industri Kecil Menengah pada level kabupaten/kota (%)	**0,53**	0,64	0,75	0,87	0,98	1,09

No	Indikator Makro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	d) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,02	1,09	1,16	1,23	1,30	1,37
	e) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	4,93	5,14	5,36	5,57	5,79	6,00
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,60	1,57	1,55	1,52	1,50	1,47
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	77,95	78,26	78,58	78,89	79,21	79,52
17	Indeks Kapabilitas Inovasi	1,12	1,25	1,37	1,50	1,62	1,75
18	*Return on Asset* (ROA) BUMD	0,512	0,65	0,80	0,94	1,08	1,22
19	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:						
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	5,00	6,74	8,48	10,22	11,96	13,70
	b) Kontribusi Seluruh Sektor PDRB di luar Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)	96,94	96,94	96,95	96,95	96,96	96,96
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,27	0,48	0,69	0,91	1,12	1,33
21	Tingkat Inflasi	3,23	3,17	3,11	3,06	3,00	2,94
22	Ratio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,61	39,09	39,58	40,06	40,55	41,03
23	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,08	0,14	0,19	0,25	0,30	0,36
24	Kota maju, Inklusif dan berkelanjutan:						
	a) Proporsi Kontribusi PDRB Kabupten terhadap Provinsi NTT	2,92	3,01	3,10	3,20	3,29	3,38
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	46,4	48,47	50,53	52,60	54,66	56,73
	c) Indeks Desa Membangun	0,65303	0,65785	0,66268	0,66750	0,67233	0,67715
25	Indeks Reformasi Hukum*	36,65	37,97	39,29	40,61	41,93	43,25
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,70	2,764	2,828	2,892	2,956	3,02

No	Indikator Makro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
27	Indeks Pelayanan Publik	2,59	2,65	2,71	2,77	2,83	2,89
28	Survei Penilaian Integritas	65,23	65,85	66,47	67,10	67,72	68,34
29	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	77	77,6	78,2	78,8	79,4	80
30	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) (2023)	59,45	58,21	56,97	55,73	54,49	53,25
31	Indeks Demokrasi	67,70	68,26	68,82	69,38	69,94	70,5
32	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	0,131	0,168	0,204	0,241	0,277	0,314
33	Tingkat Inflasi	3,23	3,17	3,11	3,06	3,00	2,94
34	Pendalaman atau Intermediasi sektor keuangan						
	a) Kontribusi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dalam PDRB	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81	0,89
	b) Total kredit per PDRB (%)	15,22	16,10	16,97	17,85	18,72	19,60
35	Inklusi keungan	79.87	80,50	81,13	81,77	82,40	83,03
36	Indeks Daya Saing Daerah	2,7	2,74	2,79	2,83	2,88	2,92
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	41,00	41,80	42,60	43,40	44,20	45,00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,72	82,29	82,85	83,42	83,98	84,55
39	Indeks Ketahanan keluarga	73,85	74,53	75,21	75,89	76,57	77,25
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**0,566**	0,551	0,536	0,521	0,506	0,491
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	*0,021*	0,028	0,034	0,041	0,047	0,054
42	Kualitas Lingkungan Hidup:						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,16	83,30	83,43	83,57	83,70	83,84

No	Indikator Makro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	b. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	0,20	0,36	0,52	0,68	0,84	1,00
	c. Pengelolaan Sampah						
	-Timbunan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah (ton)	8,59	10,25	11,90	13,56	15,21	16,87
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	23,75	23,80	23,85	23,90	23,95	24,00
43	Ketahanan energi, air, dan pangan						
	a. Ketahanan energi:						
	-Konsumsi Listrik per Kapita	422	429	436	444	451	458
	b. Ketercukupan konsumsi pangan						
	-Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	65,26	63,20	61,14	59,08	57,02	54,96
	c.Ketahanan Air:						
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	0,63	0,82	1,02	1,21	1,40
	-Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	39,13	41,69	44,26	46,82	49,39	51,95
44	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,16	83,30	83,43	83,57	83,70	83,84

Sumber: RPJPD Manggarai Timur 2025-2045

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang diharapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 diarahkan pada perwujudan visi "Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan". Visi ini

mencerminkan cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing, memiliki kualitas hidup tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Visi Kabupaten Manggarai Timur menjadi panduan yang diterjemahkan melalui serangkaian tujuan strategis dan sasaran terukur, memastikan setiap langkah pembangunan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 3. 5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

VISI / MISI	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MANGGARAI TIMUR MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN (MAMA SEBER)	MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur Yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, Adaptif dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	67.58	68.72	69.48	70.05	71.18	72.32	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	41,00	41,80	42,60	43,40	44,20	45,00	
			Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Unggul	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.10	8.25	8.60	9.20	9.80	10	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.9	13.0	13.5	14.0	14.5	15	
			Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat yang Bermutu dan inklusif	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73.0	73.6	74.2	74.8	75.4	76.0	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	36.1	33.8	31.6	29.5	27.6	25.8	
			Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	24.9-24.01	23.14-22.64	21.93-21.43	20.72-20.22	19.51-19.01	18.30-17.80	
				Pengeluaran Perkapita (Rp)	6747000	6937000	7137000	7347000	7567000	7797000	

VISI / MISI	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			yang merata dan berkelanjutan	Indeks Kesejahteraan Sosial	28	30	35	40	45	50	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,63	1,6	1,55	1,5	1,45	1,4	
			Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	41,00	41,80	42,60	43,40	44,20	45,00	
	MISI 2: Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.15	4.24	4.34	4.43	4.52	4.61	
				Tingkat Inflasi (%)	2.40	2.35	2.33	2.3	2.25	2.1	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2.02	2.11	2.19	2.27	2.36	2.40	
			Meningkatnya Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan serta daya saing investasi daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persentase)	4.6	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	
				Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	4.74	4.74	6.35	7.96	9.56	11.17	

VISI / MISI	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya sektor pariwisata dan perdagangan sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal/ekonomi desa	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persentase)	0.33	0.54	0.75	0.96	1.17	1.38	
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdangangan Besar dan Eceran (Persentase)	15.72	17.22	18.72	20.22	21.22	23.22	
	MISI 3: Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan Yang Merata di Berbagai Sektor Untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah		Indeks Pembangunan Infrastruktur (Nilai)	53.3	53.57	60	60.2	60.56	65	
			Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur (Nilai)	51.14	55.23	56.89	58.59	60.35	62.16	
		Meningkatkan Kualitas Ekologi Daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	83.16	83.33	83.50	83.67	83.84	84.01	
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)	146.89	143.95	141.08	138.25	135.49	132.78	

VISI / MISI	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	83.16	83.33	83.50	83.67	83.84	84.01	
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.75	
	MISI 4: Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Serta Pemberantasan Kemiskinan, Dengan Memperkuat Desa Sebagai Basis Penghidupan Dan Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Pada Peningkatan Kesejahteraan dan kemandirian bagi Masyarakat Desa		PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	15.140	16.164	17.039	17.914	18.789	19.664	
				Rasio Gini (Indeks)	0.268	0.260	0.252	0.244	0.236	0.228	
			Terwujudnya Desa Sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Persentase)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	15.140	16.164	17.039	17.914	18.789	19.664	

VISI / MISI	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Secara Berkelanjutan										
	MISI 5: Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya Serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Pembangunan Manusia Antargender dan Antargenerasi		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	91.89	92.08	92.57	93	93.54	94	
				Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) (Skor)	586	609	632	654	677	700	
			Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.584	0.578	0.572	0.566	0.560	0.554	
				Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)	586	609	632	654	677	700	
	MISI 6:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Beritegritas,	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	67.84	74.36	79.83	84.25	87.62	89.94	
			Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai)	62.95	65.58	67.7	69.8	70.0	71.0	

VISI / MISI	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Transparan dan Reponsif		Kinerja Pemerintahan								
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3.88	4.09	4.30	4.51	4.72	4.93	
			Meningkatnya efektivitas Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	67.84	74.36	79.83	84.25	87.62	89.94	
			Meningkatnya Ketertiban Umum, kualitas demokrasi dan stabilitas politik Tingkat Daerah	Indeks Trantibumlinmas (Nilai)	70	75	80	85	90	100	
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	30.00-35.00	40.00-50.00	50.00-60.00	60.00-70.00	70.00-80.00	80.00-100.000	
				Indeks Tata Kelola Demokrasi Lokal (ITKDL)	65,3	69	75	80	85	90	

Capaian sasaran yang telah ditetapkan secara strategis untuk lima tahun ke depan tersebut, diharapkan dapat tercapai guna mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029. Terlebih sasaran RPJMD telah berkaitan dengan kata kunci visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur yaitu Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan (Tabel 3.6). Adanya keterkaitan ini mengarahkan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur karena dengan pemetaan keterkaitan ini dapat menjadi indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 3. 6 Keterkaitan Kata Kunci dalam Visi dengan Sasaran Daerah

Kata Kunci Visi	Sasaran Daerah	Indikator
Maju	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan unggul	• Rata-Rata Lama Sekolah • Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang bermutu dan inklusif	• Usia Harapan Hidup • Prevalensi Stunting
	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	• Indeks Kualitas Infrastruktur
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	• Indeks Pelayanan Publik
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	• Nilai SAKIP
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Keuangan pemerintahan	• Opini BPK
	Meningkatnya efektivitas Pemerintahan	• Indeks Reformasi Birokrasi
Sejahtera	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan	• Tingkat Kemiskinan • Pengeluaran Per Kapita • Indeks Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya sektor pariwisata dan perdagangan sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal/ekonomi desa	• Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi makan minum • Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
	Terwujudnya Desa Sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat	• Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan • PDRB Per Kapita

Kata Kunci Visi	Sasaran Daerah	Indikator
Berbudaya	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Indeks Ketimpangan Gender (IKG) • Skor Kabupaten Layak Anak
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Tantribumlinmas
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	• IKLH • Indeks Ketahan Daerah (IKD)

a. Tujuan

Tujuan adalah rumusan yang lebih spesifik mengenai "apa" yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tujuan ini merupakan jembatan antara visi yang bersifat umum dan sasaran yang lebih operasional. Untuk RPJMD Kabupaten Manggarai Timur periode 2025-2029, tujuan pembangunan daerah akan berfokus pada beberapa pilar utama, yaitu:

1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, Adaptif dan Berbudaya

Pembangunan manusia menjadi fondasi utama dalam mencapai visi Kabupaten Manggarai Timur. Tujuan ini berupaya menjawab permasalahan mendasar terkait kualitas pembangunan manusia yang masih rendah, seperti rendahnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan, kualitas hidup masyarakat, dan kesenjangan pembangunan manusia antar gender. Tujuan ini dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap individu di Kabupaten Manggarai Timur memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang ditopang oleh fondasi kebudayaan yang kokoh. Unggul berarti memiliki kualitas sumber daya

manusia yang kompetitif; merata berarti akses terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali; adaptif berarti mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan serta berbudaya yang berarti upaya membangun, mempertahankan, memanfaatkan dan mengembangkan aspek-aspek kebudayaan lokal sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan bukan sekedar tentang kesenian tradisional semata, tetapi mencakup seluruh sistem nilai, pengetahuan, adat istiadat dan warisan budaya yang hidup dimasyarakat.

2. Meningkatkan daya ekonomi kerakyatan Kabupaten Manggarai Timur

Tujuan "Meningkatkan Daya Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Manggarai Timur" mencerminkan orientasi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penguatan struktur ekonomi lokal. Dalam konteks daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan pedesaan dengan sumber penghidupan utama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan kecil, serta potensi pariwisata dan budaya yang kaya, daya tahan dan daya saing ekonomi rakyat menjadi pondasi penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan daya ekonomi kerakyatan diarahkan pada upaya optimalisasi potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, serta perluasan akses terhadap pasar, infrastruktur, dan teknologi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan produk unggulan daerah yang bernilai tambah, seperti olahan hasil pertanian dan peternakan, produk tenun lokal, hasil perikanan berkelanjutan, serta pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya dan alam yang dikelola oleh komunitas lokal.

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama yang akan diterapkan dalam mewujudkan visi Kabupaten Manggarai Timur. Tujuan

ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan mendasar terkait keterbatasan aksesibilitas, belum meratanya konektivitas antar wilayah, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, serta minimnya infrastruktur penunjang pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai bukan hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga pondasi penting dalam mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan pelayanan pemerintahan. Dengan adanya tujuan ini, dapat memastikan bahwa setiap wilayah di Kabupaten Manggarai Timur, baik pedesaan maupun perkotaan, memiliki akses yang adil terhadap infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Hal ini mencakup infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas antar wilayah, sistem irigasi yang mendukung ketahanan pangan, jaringan air bersih dan sanitasi yang menunjang kesehatan masyarakat, serta infrastruktur digital yang mendorong partisipasi masyarakat dalam era transformasi digital. Andal berarti infrastruktur dibangun dan dikelola dengan kualitas yang baik, tahan terhadap bencana, dan mampu mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka panjang; merata berarti seluruh wilayah, termasuk kawasan tertinggal dan terpencil, memperoleh perhatian dan akses yang setara terhadap infrastruktur; dan berkelanjutan berarti pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, efisiensi energi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

4. Meningkatkan Kualitas Ekologi Daerah

Kualitas ekologi daerah merupakan bagian penting bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Tujuan ini dirumuskan sebagai respons terhadap berbagai tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, seperti degradasi lahan, pencemaran sumber daya alam, penurunan kualitas air dan udara, serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, dengan adanya tujuan ini dapat dipastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur

berlangsung secara harmonis dengan kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan akan menjadi landasan kuat bagi kehidupan masyarakat yang produktif, sehat, dan aman dari risiko bencana alam maupun perubahan iklim. Sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas ekologi diarahkan pada upaya pelestarian kawasan hutan dan daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu, serta penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, penguatan tata kelola lingkungan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem daerah. Sehingga akhirnya dapat mewujudkan lingkungan berkualitas, berkualitas yang berarti lingkungan dikelola secara sistematis, berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal; lestari berarti setiap elemen ekologi dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang; dan tangguh berarti daerah memiliki ketahanan terhadap tekanan lingkungan dan risiko perubahan iklim.

5. Meningkatkan kapasitas desa menuju pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan bagi masyarakat desa Tujuan "Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju pada Peningkatan untuk Kemandirian Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur" menegaskan arah pembangunan yang bertumpu pada penguatan kapasitas desa sebagai unit terdepan pembangunan daerah. Dalam konteks wilayah Manggarai Timur yang mayoritas penduduknya tinggal dan beraktivitas di wilayah pedesaan, desa menjadi pusat utama aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat desa berarti memperkuat fondasi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Peningkatan kapasitas desa meliputi berbagai aspek, mulai dari kapasitas pemerintahan desa dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, hingga kemampuan masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi, sosial, dan

lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan pembangunan berbasis kebutuhan dan kekuatan lokalnya sendiri.

Melalui pendekatan "desa membangun", Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendorong adanya penguatan kelembagaan desa yang mampu mendukung pengelolaan sumber daya lokal secara produktif dan inklusif. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta integrasi program lintas sektor ke dalam sistem pembangunan desa menjadi bagian penting dari upaya pencapaian tujuan ini.

Kemandirian masyarakat akan dicapai ketika desa mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan warganya melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal, baik dalam bidang ekonomi, layanan dasar, maupun ketahanan sosial-budaya dan lingkungan. Tujuan ini juga sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan, di mana desa dipandang sebagai entitas hidup yang harus dijaga keseimbangannya antara pembangunan fisik, sosial, dan ekologis.

6. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Pembangunan Manusia Antargender dan Antargenerasi

Tujuan ini merefleksikan komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender dan usia, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan menikmati hasil pembangunan. Upaya ini diarahkan agar tidak ada kelompok yang tertinggal, serta setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah. Pembangunan tidak hanya harus mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berkeadilan, meniadakan diskriminasi, dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Frasa "antargender" menekankan

penghapusan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai dimensi pembangunan, sementara "antargenerasi" menegaskan keberlanjutan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga menjamin hak dan kesejahteraan generasi mendatang, khususnya anak-anak.

Tujuan ini memerlukan pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, termasuk pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan, penghapusan praktik diskriminatif, serta pemberian perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Melalui tujuan ini juga pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hingga partisipasi dalam kehidupan sosial. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan kualitas layanan, serta pelibatan anak dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas

Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Timur menjadi landasan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang lebih sistematis dan berbasis hasil. Di sisi lain, reformasi ini juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dengan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib administrasi, dan responsif terhadap hasil audit. Pemerintahan yang efektif dibangun melalui penyederhanaan proses birokrasi, penguatan koordinasi antar perangkat

daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Selanjutnya, stabilitas dan ketentraman masyarakat menjadi bagian integral dari tata kelola yang baik, dengan menekankan pada pembinaan ideologi, kerukunan sosial, serta sistem kewaspadaan dini terhadap potensi konflik maupun bencana. Pada akhirnya, reformasi birokrasi ditujukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran yang lebih konkret, terukur, dan memiliki batas waktu dari setiap tujuan. Sasaran memberikan target yang jelas untuk dicapai dalam periode RPJMD dan menjadi dasar untuk pengukuran kinerja.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, sasaran yang akan ditetapkan meliputi:

1. Tujuan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, dan Adaptif

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, Dan Adaptif, ditetapkan tiga sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 1.1 *Meningkatkan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Unggul*

Sasaran ini menyoroti urgensi peningkatan kualitas pendidikan dari hulu ke hilir, serta memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup upaya peningkatan harapan lama sekolah (HLS) yang telah menunjukkan tren positif dari 11,99 tahun di 2020 menjadi 12,66 tahun di 2024, dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang juga mengalami peningkatan dari 7,08 tahun di 2020 menjadi 7,96 tahun di 2024. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar setara dengan provinsi dan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mengatasi permasalahan inti kualitas pendidikan yang masih rendah, seperti rendahnya intelektualitas anak usia

sekolah dan tingkat literasi masyarakat. Program-program akan difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana yang memadai, pengembangan kurikulum yang relevan, serta peningkatan literasi dan numerasi masyarakat.

Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Bermutu dan Inklusif

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap warga Kabupaten Manggarai Timur memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis. Berdasarkan data usia harapan hidup (UHH), meskipun menunjukkan tren positif dari 68,04 tahun di 2020 menjadi 72,98 tahun 2024, masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat. Tantangan tersebut meliputi masih tingginya angka kematian Ibu dan Bayi, tingginya angka stunting dan gizi buruk anak, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan. Sasaran ini akan mengatasi permasalahan inti derajat kesehatan masyarakat yang rendah, termasuk kualitas kesehatan keluarga yang rendah dan belum terwujudnya keluarga berkualitas. Upaya akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan gizi masyarakat, serta penguatan sistem rujukan.

Sasaran 1.3 Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan kemiskinan menjadi 24,9 persen pada tahun 2024 merupakan capaian positif, namun pengeluaran per kapita daerah masih tergolong rendah hanya 6,561 ribu. Sasaran ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan inti kualitas hidup masyarakat yang masih rendah, termasuk kesejahteraan sosial yang belum inklusif, kesempatan dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, serta

peran pemuda dalam pembangunan yang belum optimal. Strategi akan mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem yang terfokus, peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pemberdayaan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan.

2. **Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif**

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Kabupaten Manggarai Timur, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 2.1 Meningkatnya Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan serta Daya Saing Investasi Daerah

Sasaran ini berfokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui proses hilirisasi, yaitu pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan secara lebih modern dan terintegrasi. Upaya hilirisasi memungkinkan petani dan nelayan tidak hanya menjual hasil mentah, tetapi mengembangkan produk olahan bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar regional, nasional, bahkan internasional. Dengan meningkatnya hilirisasi, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja lokal, berkembangnya UMKM, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Strategi ini juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi harga komoditas primer serta membuka peluang inovasi produk berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna.

Selain itu sasaran ini juga berupaya untuk meningkatkan Daya saing investasi daerah yang menjadi kunci dalam menarik masuknya modal dan teknologi dari luar ke dalam daerah. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup penyederhanaan perizinan, penguatan infrastruktur dasar dan penunjang investasi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berorientasi pada pembangunan

lokal. Dengan meningkatnya investasi, akan tercipta efek berganda berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi strategis seperti industri pengolahan, jasa pariwisata, perdagangan, dan logistik. Namun demikian, investasi yang masuk juga harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas dan adil.

Sasaran 2.2 Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Perdagangan sebagai Motor Penggerak Pengembangan Ekonomi Lokal/Ekonomi Desa

Manggarai Timur memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis alam, budaya, dan kearifan lokal. Sasaran ini menekankan pentingnya menjadikan pariwisata dan perdagangan sebagai sektor unggulan baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal secara cepat dan inklusif. Pengembangan destinasi wisata di desa-desa, pelatihan masyarakat sebagai pelaku wisata, dan penguatan ekonomi kreatif yang menyertainya akan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. Di sisi lain, penguatan sektor perdagangan, termasuk sistem distribusi, pasar rakyat, dan digitalisasi pemasaran akan mempercepat perputaran ekonomi dan memperkuat konektivitas produk desa dengan pasar luar. Kolaborasi antara pariwisata dan perdagangan akan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dinamis dan berbasis potensi lokal.

3. Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan Pembangunan Infrastruktur Daerah, ditetapkan satu sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 3.1 Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur

Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya perluasan dan pemerataan akses infrastruktur sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat di

seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Aksesibilitas infrastruktur yang memadai memungkinkan mobilitas barang dan orang yang lebih efisien, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memperkuat konektivitas desa-kota dalam mendukung pembangunan yang inklusif. Capaian Indeks Kualitas Infrastruktur menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020–2023, yakni dari angka 29,70 pada tahun 2020 menjadi 48,64 pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 menjadi 49,65. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tantangan dalam hal pemeliharaan, keberlanjutan pembiayaan, dan keterpaduan antar sektor perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur akan difokuskan pada pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, jembatan, sistem irigasi, air bersih, serta penyediaan infrastruktur layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan teknologi serta pendekatan berbasis wilayah untuk menjamin interkoneksi antar-kawasan, khususnya wilayah terpencil dan tertinggal. Oleh karena itu, sasaran ini menjadi landasan strategis dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Ekologi Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan meningkatan Kualitas Ekologi Daerah, ditetapkan satu sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Resiliensi Terhadap Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sasaran ini mencerminkan pentingnya perbaikan kondisi lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan ketahan daerah terhadap perubahan iklim di Kabupaten Manggarai Timur. Kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat, mendukung ketahanan terhadap bencana, serta

memastikan keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Saat ini, berbagai tekanan terhadap lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, Perubahan iklim serta pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya upaya yang lebih konsisten dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, dan penguatan kapasitas adaptasi terhadap risiko iklim.

5. Tujuan Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Pada Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Bagi Masyarakat Desa

Untuk dapat mencapai tujuan Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Pada Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat Desa, ditetapkan satu sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 5.1 Terwujudnya Desa sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur

Merujuk pada data kontribusi sektor Pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB, sektor ini hampir menyumbang setengah dari PDRB yaitu kontribusinya pada tahun 2020 hingga 2024 berada pada angka 44-46 persen. Namun angka yang besar ini belum mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten manggarai Timur. Sasaran ini menekankan untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian. Jika pertanian dapat dimajukan secara sistematis dan berkelanjutan, maka desa-desa akan tumbuh sebagai pusat-pusat ekonomi baru yang mandiri dan produktif. Sasaran daerah "Terwujudnya Desa Sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur" menggambarkan arah pembangunan yang menjadikan desa sebagai aktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, desa tidak hanya dipandang sebagai lokasi

pembangunan, tetapi sebagai kekuatan strategis yang menopang struktur ekonomi, sosial, dan budaya daerah.

Desa sebagai tulang punggung berarti bahwa kemajuan desa akan langsung berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa menjadi hal yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam membangun dari bawah (bottom-up), dengan memperkuat peran serta dan kemandirian masyarakat desa dalam merancang, melaksanakan, serta mengelola program pembangunan.

Melalui sasaran ini, pembangunan desa diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial yang menjadi identitas masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan desa juga diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat kelembagaan ekonomi seperti koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha masyarakat.

Keberhasilan mewujudkan sasaran ini akan mendorong terciptanya desa-desa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tangguh secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kemandirian desa bukan hanya tentang kemampuan finansial, tetapi juga tentang kapasitas untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan menempatkan desa sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat fondasi pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian visi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan kearifan budaya.

6. Tujuan Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Pembangunan Manusia Antargender dan Antargenerasi

Untuk dapat mencapai tujuan Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Pembangunan Manusia antargender dan antargenerasi, ditetapkan satu sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 6.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran ini menegaskan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua, tanpa memandang gender, serta memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak. Hal ini penting mengingat masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antargender dan rendahnya kesetaraan gender serta perlindungan anak. Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Manggarai Timur sebesar 91,97 tahun 2024 di atas angka IPG Nasional, namun masih dibawah angka IPG provinsi. Upaya akan difokuskan pada pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program daerah, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan lembaga perlindungan anak.

Sasaran ini juga secara spesifik berfokus pada dimensi "antargenerasi", dengan prioritas pada kelompok anak-anak. Anak-anak adalah masa depan pembangunan, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta mereka terlindungi dari segala bentuk bahaya adalah investasi kunci. Fokus "Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak" adalah investasi jangka panjang pada generasi masa depan, yang akan menjadi fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Timur. Sasaran ini secara langsung menanggapi tantangan yang ada, seperti belum adanya perhitungan IPA resmi yang menghambat pengukuran capaian perlindungan anak secara komprehensif, serta adanya 14 kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani pada tahun 2024.

Peningkatan skor Kabupaten Layak Anak (KLA) yang signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya progres, namun sasaran ini menegaskan perlunya percepatan dan penguatan agar Kabupaten Manggarai Timur mampu menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung bagi seluruh anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan menjadi bagian dari indikator kunci dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

7. Tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas

Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas, ditetapkan lima sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 7.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran ini ditetapkan sebagai respons strategis terhadap berbagai permasalahan mendasar yang selama ini menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur. Sasaran ini diarahkan untuk menjawab tantangan rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal. Permasalahan-permasalahan tersebut tampak dari ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, lemahnya keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD, serta minimnya integrasi antara RKPD dan APBD dalam hal substansi. Di sisi lain, sistem pengawasan yang belum terdigitalisasi, tindak lanjut hasil evaluasi yang belum maksimal, dan kapasitas Inspektorat yang masih terbatas menyebabkan siklus manajemen kinerja belum berjalan efektif. Melalui sasaran ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan yang sistematis, mendorong penguatan manajemen risiko, serta membangun budaya kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil. Dengan

demikian, pencapaian sasaran ini menjadi kunci untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Sasaran 7.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun secara formal pemerintah daerah telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut, capaian ini belum sepenuhnya merefleksikan kualitas akuntabilitas keuangan yang substansial dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang mendasari penetapan sasaran ini antara lain adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah akibat masih dominannya ketergantungan pada transfer pusat, serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PAD masih belum konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh fluktuasi pertumbuhan PAD dan belum maksimalnya penggalian potensi pendapatan daerah. Selain itu, tata kelola penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan juga menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan lemahnya pelaksanaan TPTGR. Pengelolaan aset pun belum berjalan optimal, mengingat masih banyak aset yang belum bersertifikat atau tertata dengan baik, sehingga tidak sepenuhnya mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik. Melalui sasaran ini, pemerintah daerah berupaya mendorong reformasi fiskal yang lebih nyata, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset agar dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola keuangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Sasaran 7.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ditetapkan sebagai respon atas berbagai persoalan pelayanan dasar yang belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini tercermin dari fluktuasi capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang meningkat, namun belum mencapai kategori "sangat baik". Demikian pula dengan Kepuasan Masyarakat yang belum mencapai optimal. Sejumlah masalah yang mendasari kondisi ini mencakup layanan administrasi kependudukan yang belum merata dan menurun drastis dalam persepsi masyarakat, terbukti dari penurunan kepemilikan dokumen sipil serta pelayanan perizinan juga belum efektif mendukung iklim kemudahan berusaha, dengan masih adanya hambatan prosedural yang memperlambat pelayanan. Di sektor kesehatan, terbatasnya fasilitas dan mutu layanan, terutama di daerah terpencil, masih menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pelayanan di tingkat kecamatan pun belum optimal, akibat keterbatasan sarana prasarana serta kapasitas SDM yang belum memadai, yang berdampak langsung pada lambatnya penyelesaian administrasi dasar masyarakat. Di samping itu, minimnya inovasi layanan, tidak konsistennya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan menjadi faktor penghambat yang memperkuat rendahnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini menjadi penting untuk memastikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta inovasi yang berkelanjutan.

Sasaran 7.4 Meningkatnya Efektivitas Pemerintahan

Sasaran ini disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural dan fungsional yang secara nyata masih membatasi kinerja pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun terdapat perbaikan seperti kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi, capaian tersebut belum mencerminkan

pemerintahan yang efektif dan efisien secara menyeluruh. Sasaran ini diarahkan untuk menjawab masalah utama yang saling terkait. Pertama, rendahnya kapabilitas inovasi daerah yang terlihat dari minimnya pemanfaatan hasil litbang dan rendahnya penerapan kebijakan inovatif Kedua, transformasi pelayanan publik berbasis digital belum maksimal, meskipun nilai SPBE meningkat, masih dihadapkan pada kendala arsitektur sistem, keterbatasan integrasi aplikasi, dan rendahnya indeks kepuasan layanan komunikasi publik. Ketiga, tata kelola pemerintahan belum berjalan optimal, tercermin dari stagnasi nilai LPPD dan tumpang tindih struktur organisasi serta lemahnya koordinasi antar fungsi kebijakan. Keempat, profesionalisme ASN masih menjadi tantangan, dengan menurunnya persentase pelatihan ASN dan belum berfungsinya sistem merit secara menyeluruh. Kelima, dukungan terhadap fungsi DPRD belum maksimal akibat lemahnya sistem kerja pendukung legislatif. Keenam, keamanan informasi pemerintah daerah belum terjaga, tercermin dari nihilnya penggunaan sandi komunikasi. Ketujuh, penyelenggaraan statistik sektoral belum terintegrasi dengan baik sehingga menghambat pengambilan kebijakan berbasis data. Dan kedelapan, tata kelola arsip masih lemah. Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini menjadi sangat krusial untuk memperkuat efektivitas pemerintahan melalui reformasi kelembagaan, akselerasi transformasi digital, serta penguatan budaya kerja birokrasi yang responsif, kolaboratif, dan berbasis data.

Sasaran 7.5 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Sasaran ini dirancang sebagai upaya strategis untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tangguh di Kabupaten Manggarai Timur. Permasalahan ketentraman dan ketertiban belum dapat diatasi secara menyeluruh, sebagaimana tercermin dari masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, belum optimalnya penanganan konflik sosial, serta lemahnya respon terhadap bencana dan kebakaran. Upaya

penegakan Perda memang telah mencapai persentase tinggi secara administratif namun belum didukung oleh koordinasi lintas OPD yang efektif, sosialisasi yang massif, maupun evaluasi pelaksanaan regulasi secara berkala. Di sisi lain, meskipun Risiko Bencana mengalami penurunan, status risiko masih tergolong tinggi dan penanganan tanggap darurat masih belum cepat dan terkoordinasi. Penanganan konflik sosial pun masih belum menyentuh akar persoalan, terutama dalam kasus-kasus lahan dan konflik berbasis ekonomi dan adat, yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan berbasis hak asasi manusia. Sementara itu, dalam aspek penanggulangan kebakaran, masih ditemui kelemahan dalam kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, hingga respon insiden yang belum memadai secara sistem, SDM, maupun logistik. Oleh karena itu, sasaran ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum yang partisipatif, sistem kebencanaan yang responsif, serta pendekatan kolaboratif dalam membangun tatanan masyarakat yang aman, harmonis, dan tangguh terhadap krisis.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan berikut merupakan panduan yang digunakan dalam penentuan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

3.2.1 Strategi Daerah

Adapun rincian strategi masing-masing misi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur Yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Strategi pada Misi 1 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Strategi Pembangunan Misi 1 Berdasarkan Sasaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur Yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, Adaptif dan Berbudaya	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Unggul	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan yang Kolaboratif dan Sinergis Antar Multi Pemangku Kepentingan 2. Penguatan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal 3. Mendorong Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital untuk Pendidikan dan Pelestarian Budaya 4. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pengelolaan Kebudayaan Berskala Global Berbasis Nilai Lokal 5. Penguatan Pendidikan Non-Formal dan Kesetaraan yang Merata
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat yang Bermutu dan inklusif	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Dasar Hingga Spesialis yang Terjangkau 2. Peningkatan Penanganan Gizi dan Kesehatan Masyarakat Melalui Kerjasama Lintas Sektoral dan Berbasis Sumber Daya Lokal 3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kesehatan 4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi Promosi Kesehatan Masyarakat yang Merata 5. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Lokal 6. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Terpadu dan Inklusif Berbasis Sistem Informasi
	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat yang	1. Membangun Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Kelompok Rentan,

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
	merata dan berkelanjutan	berkebutuhan khusus dan Pelayanan Sosial Dasar yang Adil dan Merata 2. Penyiapan Tenaga Kerja yang Adaptif, Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Pendapatan yang Layak Melalui Rencana Tenaga Kerja yang Komprehensif 3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Literasi Keuangan, dan UMKM Berbasis Potensi Lokal 4. Sistem Perlindungan Pekerja dan Pencegahan TPPO Terhadap Pekerja Rentan 5. Merencanakan Lapangan Kerja Alternatif Untuk Menghadapi Bencana 6. Menyediakan Dukungan Inklusi Sosial dan Rehabilitasi Bagi Kelompok dengan Kebutuhan Khusus yang Produktif
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1. Penguatan kelembagaan dan regulasi melalui dukungan alokasi anggaran dan penyusunan dokumen strategis pemajuan kebudayaan 2. Pemetaan, pelestarian dan pemajuan budaya melalui dokumentasi dan digitalisasi arsip budaya, pembinaan dan pelatihan sanggar seni mandiri di kecamatan 3. Pengembangan ekonomi berbasis budaya melalui pariwisata budaya dan ekonomi kreatif 4. Pendidikan dan sosialisasi budaya melalui integrasi materi budaya (bahasa daerah, kearifan lokal dan lain-lain) disekolah dan pelatihan guru pengajar budaya 5. Tata kelola ruang budaya melalui penetapan kawasan cagar budaya dan revitalisasasi ruang publik berbasis budaya serta regulasi pemdirian bangunan bernuansa lokal di kawasan strategis 6. Kolaborasi multi pihak

Dalam upaya mewujudkan Visi “Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan,” serta mencapai tujuan Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, dan Adaptif, peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi pilar

fundamental. Berdasarkan analisis, strategi pembangunan daerah dalam sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia akan difokuskan pada beberapa aspek. Penjelasan secara rinci terkait strategi pada Misi 1 untuk mewujudkan tujuan Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, dan Adaptif, berdasarkan sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 1.1 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Unggul, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan yang Kolaboratif dan Sinergis Antar Multi Pemangku Kepentingan

   Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di Manggarai Timur memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemerataan ini. Strategi yang akan diterapkan meliputi, (1) Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta terkait pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan partisipasi sekolah di jenjang PAUD, untuk memastikan fondasi pendidikan yang kuat sejak dini; (2) Memfasilitasi dan mendorong akses beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta, bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Ini akan dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak pemberi beasiswa; (3) Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengatasi kekurangan guru dan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan kesetaraan. Kolaborasi ini juga akan fokus pada peningkatan akses dan fasilitas pendidikan formal dan non-formal di seluruh wilayah; (4) Mengembangkan dan mengimplementasikan program guru keliling, khususnya untuk daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan guru. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan komunitas penggiat pendidikan untuk memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar; (5) Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dokter. Hal ini dapat mencakup

program telemedicine atau kemitraan dengan institusi pendidikan kedokteran untuk memfasilitasi akses bagi putra-putri daerah; (6) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui kerja sama yang lebih erat antara NGO/LSM dengan satuan-satuan pendidikan di Manggarai Timur.

2) Penguatan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Strategi yang akan dijalankan yaitu (1) Menerapkan kurikulum muatan lokal pada seluruh jenjang pendidikan dasar. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya Manggarai Timur, serta memperkuat identitas lokal pada generasi muda; (2) Mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif di jenjang PAUD. Metode ini akan disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini untuk merangsang minat belajar dan pengembangan kognitif; (3) Mengembangkan inovasi pembelajaran yang memfasilitasi guru untuk menciptakan metode pengajaran baru, termasuk pemanfaatan teknologi dan pendekatan interaktif yang relevan dengan konteks lokal.

3) Mendorong Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital untuk Pendidikan dan Pelestarian Budaya.
Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital sebagai sarana fundamental dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menjadi media efektif untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Strategi yang akan dijalankan meliputi: (1) Mendokumentasikan dan mempromosikan budaya lokal melalui media digital sebagai langkah untuk menangkal pengaruh globalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokal, dan warisan budaya Manggarai Timur dapat dikenal lebih luas dan menjadi kebanggaan generasi muda;

(2) Memanfaatkan teknologi dan mengembangkan modul digital berbasis budaya lokal untuk melestarikan budaya, dapat berupa aplikasi interaktif, e-book bergambar, game edukasi, atau video dokumenter yang menceritakan cerita rakyat, tarian tradisional, alat musik, atau praktik adat istiadat, sehingga pelestarian budaya tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pendidikan yang menarik dan relevan bagi siswa; (3) Memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pelestarian budaya dalam rangka meningkatkan minat generasi muda dan regenerasi budaya lokal, agar budaya lokal lebih mudah diakses, relevan, dan "keren" di mata kaum muda, sehingga memicu rasa ingin tahu, kebanggaan, dan pada akhirnya mendorong partisipasi mereka dalam melestarikan serta mengembangkan budaya tersebut; (4) Memanfaatkan teknologi digital untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. Hal ini akan membantu mengatasi keterbatasan fasilitas fisik, memperluas akses terhadap sumber belajar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan; (5) Menyusun metode pembelajaran hybrid yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembelajaran jarak jauh berbasis digital. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas belajar, pemanfaatan sumber daya digital secara optimal, serta adaptasi terhadap kondisi yang tidak memungkinkan pembelajaran konvensional sepenuhnya, sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan pendidikan di masa depan yang semakin mengandalkan teknologi.

4) Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pengelolaan Kebudayaan Berskala Global Berbasis Nilai Lokal

Strategi ini bertujuan untuk membangun sistem yang terstruktur dan berkelanjutan dalam mengelola kekayaan budaya Manggarai Timur, dari tingkat lokal hingga promosi global, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Strategi ini menyadari bahwa pelestarian

budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan sinergi kelembagaan, dukungan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat serta generasi muda. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Melembagakan budaya lokal untuk melestarikan kebudayaan berbasis desa dan mempromosikannya pada tingkat global; (2) Membangun kolaborasi multisektor vertikal maupun horizontal dalam pengembangan dan dokumentasi budaya dan kearifan lokal dengan melibatkan SDM kebudayaan yang ada di setiap desa untuk dilibatkan secara aktif dalam proses pengembangan dan dokumentasi budaya dan kearifan lokal, memastikan bahwa data dan praktik budaya terekam dengan akurat dan otentik; (3) Menyusun kegiatan peningkatan dan pengembangan kebudayaan dengan menjalin Kerjasama multisektoral dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya lokal dari generasi ke generasi. Tujuannya adalah untuk menjaga relevansi budaya di tengah dinamika zaman, melestarikannya melalui transmisi pengetahuan dan praktik dari generasi tua ke generasi muda, serta memastikan keberlanjutan warisan budaya Manggarai Timur. (4) Membangun tata kelola lembaga kebudayaan (program pelestarian kebudayaan berkelanjutan) yang terstruktur dan berkelanjutan dengan dukungan regulasi/peraturan yang sah. Dengan tata kelola yang kuat, program pelestarian dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan. (5) Meningkatkan kegiatan pendidikan budaya secara offline dengan bekerja sama SDM lokal di bidang kebudayaan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kebudayaan, memastikan transfer ilmu dan pengalaman yang otentik; (6) Membentuk lembaga kebudayaan yang terstruktur dalam rangka pendokumentasian dan pelestarian budaya lokal, sebagai langkah konkret dari penguatan kelembagaan.

5) Penguatan Pendidikan Non-Formal dan Kesetaraan yang Merata

Strategi ini fokus untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal atau membutuhkan keterampilan khusus, memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terbatas pada bangku sekolah, tetapi juga dapat diakses melalui jalur non-formal dan kesetaraan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Strategi yang akan dijalankan adalah (1) Mengembangkan pendidikan non formal yang berbasis pada keterampilan praktis, untuk menciptakan program pendidikan non-formal yang langsung relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal. Seperti konsep "sekolah alam" atau pelatihan berbasis komunitas, peserta didik dapat memperoleh keterampilan praktis yang dapat segera diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk meningkatkan mata pencaharian; (2) Mengembangkan sistem pendidikan kesetaraan yang mandiri dan berkelanjutan dengan mengembangkan modul cetak dan memanfaatkan teknologi.

Sasaran 1.2 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat yang Bermutu dan inklusif, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Dasar Hingga Spesialis yang Terjangkau

   Strategi ini fokus untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan, mulai dari tingkat dasar hingga spesialis. Strategi yang akan diterapkan meliputi, (1) Membuat program "Dokter Spesialis Keliling" untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara berkala di seluruh daerah Kabupaten Manggarai Timur dan untuk menempatkan dokter umum/spesialis secara rotasi di Puskesmas dan Rumah Sakit, menjangkau area-area terpencil; (2) Menyusun dan mengusulkan kebutuhan dokter umum/spesialis melalui program Nusantara Sehat dan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) untuk

mengisi kekurangan tenaga medis; (3) Mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan dan menangani kesehatan masyarakat dengan pendekatan "sistem jemput bola," di mana pelayanan kesehatan aktif mendekati masyarakat; (4) Memanfaatkan jaringan dan komunikasi yang bisa dijangkau untuk membangun komunikasi antar fasilitas kesehatan, bahkan sampai ke daerah yang sulit dijangkau, guna mempercepat rujukan dan koordinasi layanan.

2) Peningkatan Penanganan Gizi dan Kesehatan Masyarakat Melalui Kerjasama Lintas Sektoral dan Berbasis Sumber Daya Lokal

   Strategi ini berfokus pada penanganan masalah gizi, khususnya stunting, dan kesehatan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan potensi lokal. Strategi yang akan diterapkan adalah (1) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan dengan organisasi non-pemerintah (NGO)/LSM untuk menyelenggarakan posko terpadu penanganan stunting; (2) Melaksanakan kolaborasi lintas sektoral untuk penanganan stunting yang menyasar ibu hamil KEK, yang merupakan kelompok berisiko tinggi; (3) Mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan melalui program peningkatan kesehatan ibu dan anak, yang merupakan salah satu upaya kunci dalam penanganan gizi; (4) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral untuk penanganan kesehatan masyarakat melalui pos gizi keliling yang memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai bahan baku pangan bergizi.

3) Penguatan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kesehatan

   Strategi ini berfokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar yang esensial untuk kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses. Strategi ini mengakui bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang

memadai dan ketersediaan fasilitas penunjang yang hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Membangun kolaborasi dengan NGO/LSM untuk ketersediaan obat/ vaksin ke seluruh daerah manggarai timur, terutama daerah dengan akses yang sulit. Diharapkan distribusi obat-obatan esensial dan vaksin dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata, menjamin bahwa masyarakat di seluruh pelosok Manggarai Timur mendapatkan akses terhadap kebutuhan medis dasar; (2) Menjalin kerja sama lintas sektoral dan NGO/LSM untuk pembangunan sarana air bersih dan MCK yang merupakan fondasi utama kesehatan masyarakat; (3) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan seluruh layanan kesehatan dan akses jaringan internet di Manggarai Timur, guna mendukung sistem informasi kesehatan, komunikasi antar fasilitas, dan penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat; (4) Menjalin kerjasama lintas sektoral untuk pembangunan infrastruktur dasar (sumur, MCK, jalan, dll.) di daerah yang belum memadai, yang akan secara langsung berdampak pada peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi Promosi Kesehatan Masyarakat yang Merata

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui edukasi dan promosi yang merata. Strategi yang akan dijalankan, yaitu (1) Memanfaatkan jaringan dan komunikasi yang bisa dijangkau untuk menyampaikan edukasi promosi kesehatan kepada masyarakat hingga daerah yang sulit dijangkau; (2) Menyelenggarakan sosialisasi kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat Manggarai Timur di seluruh daerah secara merata dan memastikan pesan kesehatan sampai ke setiap individu.

5) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan Lokal

Strategi ini fokus pada peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Strategi yang akan diterapkan adalah (1) Menyelenggarakan pelatihan atau on the job training bagi tenaga kesehatan lokal (bidan desa, mantri, dll.) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka; (2) Mendorong dan meningkatkan peluang/kesempatan peningkatan kompetensi SDM kesehatan, khususnya psikiater, untuk mengatasi masalah kesehatan mental; (3) Membangun kolaborasi dengan LSM/NGO untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan dasar kesehatan berbasis praktik, memperkuat kemampuan praktis tenaga kesehatan.

6) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Terpadu dan Inklusif Berbasis Sistem Informasi

Strategi ini bertujuan untuk mentransformasi sistem pelayanan kesehatan di Manggarai Timur menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai tulang punggung. Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi, manajemen data, dan kemampuan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Meningkatkan layanan kesehatan untuk pengentasan penyakit menular dan tidak menular, sebagai upaya komprehensif dalam mengendalikan dan mengurangi prevalensi penyakit, baik yang menular (seperti TBC, Malaria, atau penyakit berbasis vektor lainnya) maupun yang tidak menular (seperti Diabetes Melitus dan hipertensi); (2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk peningkatan layanan dan penanganan kesehatan masyarakat, yang menciptakan program-program terpadu yang mengatasi masalah kesehatan secara holistik, misalnya melalui penyediaan air bersih dan

sanitasi layak, peningkatan gizi, atau edukasi kesehatan di sekolah; (3) Memanfaatkan jaringan dan komunikasi yang bisa dijangkau untuk membangun komunikasi antar fasilitas kesehatan sampai ke daerah yang sulit dijangkau, untuk memastikan bahwa informasi kesehatan dan rujukan pasien dapat berjalan lancar tanpa hambatan geografis.

Sasaran 1.3 Meningkatnya standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan, sasaran ini memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Membangun Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Kelompok Rentan dan Pelayanan Sosial Dasar yang Adil dan Merata

   Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai dan akses terhadap pelayanan sosial dasar secara adil dan merata. Strategi yang akan diterapkan meliputi, (1) Memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi pekerja informal. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan finansial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja; (2) Mengoptimalkan layanan sosial dan kesehatan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan bahwa pelayanan dasar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata dan berkualitas; (3) Menyusun regulasi daerah tentang perlindungan sosial sebagai langkah penguatan kapasitas lembaga lokal. Regulasi ini juga akan berfungsi untuk mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi para pekerja, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan lainnya seperti lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas jaminan masyarakat dengan memperluas cakupan kepesertaan dan peningkatan manfaat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja.

2) Penyiapan Tenaga Kerja yang Adaptif, Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Pendapatan yang Layak Melalui Rencana Tenaga Kerja yang Komprehensif

Strategi ini berfokus pada pengembangan kualitas angkatan kerja, peningkatan kesempatan kerja, dan memastikan pendapatan yang layak bagi masyarakat, melalui perencanaan tenaga kerja yang terpadu dan adaptif. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jobfair (bursa kerja) dengan menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan-perusahaan di luar daerah. Hal ini bertujuan untuk memperluas peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur di sektor formal yang lebih luas; (2) Mengembangkan program peningkatan keterampilan yang berbasis pada permintaan pasar melalui pelatihan keterampilan, dengan fokus pada sektor jasa. Pendekatan ini akan memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal; (3) Menyediakan pelatihan manajemen keuangan dasar dan kewirausahaan sebagai bagian dari pendampingan keuangan dan pengembangan usaha mikro. Pelatihan ini juga dapat diintegrasikan sebagai penambahan kurikulum di Balai Latihan Kerja (BLK), membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usaha mandiri.

3) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Literasi Keuangan, dan UMKM Berbasis Potensi Lokal

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas ekonomi. Strategi yang akan diterapkan meliputi, (1) Mendorong pengembangan usaha mikro berbasis hasil Sumber Daya Alam (SDA) lokal melalui fasilitasi akses permodalan dan pendampingan bisnis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (2) Mengembangkan program pelatihan kewirausahaan, pendampingan

bisnis, dan fasilitasi pemasaran produk untuk mendorong kewirausahaan muda, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan alternatif pekerjaan; (3) Meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan sosial secara efektif, sebagai langkah preventif terhadap pekerjaan ilegal atau bekerja di luar daerah yang berisiko.

4) Sistem Perlindungan Pekerja dan Pencegahan TPPO Terhadap Pekerja Rentan

   Strategi ini fokus pada perlindungan tenaga kerja, khususnya pekerja rentan, dari berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan perdagangan orang. Strategi yang akan dijalankan adalah (1) Membentuk posko pengaduan sebagai langkah konkret untuk mengatasi TPPO dan menyediakan pendampingan bagi para korban; (2) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait ketenagakerjaan. Ini bertujuan untuk mencegah praktik perekrutan ilegal dan menegakkan aturan upah minimum, sehingga pekerja mendapatkan hak-haknya secara adil.

5) Merencanakan Lapangan Kerja Alternatif Untuk Menghadapi Bencana

   Strategi ini mengakui pentingnya kesiapsiagaan dan adaptasi pasar kerja terhadap kondisi darurat seperti bencana. Strategi yang akan dilakukan, yaitu Menciptakan lapangan kerja dalam konteks penanganan darurat sebagai tim reaksi cepat bencana melalui pelatihan tanggap bencana yang bersertifikasi kompetensi. Hal ini tidak hanya menciptakan pekerjaan tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

6) Menyediakan Dukungan Inklusi Sosial dan Rehabilitasi Bagi Kelompok dengan Kebutuhan Khusus yang Produktif

Strategi ini menekankan pentingnya inklusi dan pemberdayaan bagi individu dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Strategi yang akan dijalankan adalah (1) Mengembangkan program pelatihan untuk keterampilan rehabilitasi bekerjasama dengan Balai EFATA atau lembaga terkait lainnya, untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas kelompok ini; (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jobfair dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan industri, baik yang terkait dengan keterampilan digital maupun tradisional.

Misi 2: Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Strategi pada Misi 2 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Strategi Pembangunan Misi 2 Berdasarkan Sasaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 2: Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan serta daya saing investasi daerah	1. Penguatan Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam Unggulan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal 2. Penguatan Branding dan Digitalisasi Produk Unggulan Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar Internasional 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi lokal melalui integrasi kelembagaan ekonomi (koperasi, BUMDes, pelaku usaha) dalam rantai nilai untuk pengembangan hilirisasi berbasis kawasan dan komoditas unggulan 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing sektor pertanian-perikanan melalui diversifikasi produk berbasis keanekaragaman budaya dan agroekologi

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		5. Peningkatan Ketahanan Petani melalui Asuransi Usaha Tani dan Kemitraan Keuangan Berkelanjutan 6. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM dan UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing 7. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Pengembangan Industri Pengolahan Berkelanjutan 8. Penguatan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Investasi dan Perekonomian 9. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Kearifan Lokal 10. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Keterampilan dan Kolaborasi untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam dan Kreativitas 11. Membangun dan memperkuat kerangka regulasi yang mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan pertanian yang sinergis 12. Penguatan Citra Investasi dan Promosi Berbasis Kearifan Lokal 13. Membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan (investasi hijau) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal 14. Meningkatkan daya saing produk lokal dengan fokus pada peningkatan kualitas, pengawasan yang ketat, dan konsolidasi usaha pertanian-peternakan melalui pengembangan klaster ekonomi lokal 15. Membangun sistem informasi investasi daerah yang berbasis data dan promosi digital untuk mendukung kolaborasi antar desa dan pelaku ekonomi lokal
	Meningkatnya sektor pariwisata dan perdagangan sebagai motor penggerak	1. Pengembangan produk dan Destinasi Wisata Berbasis Budaya, Alam, dan Komunitas Secara Terpadu

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
	pengembangan ekonomi lokal/ekonomi desa	2. Penguatan branding dan promosi pariwisata berbasis digital dan kemitraan 3. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Terintegrasi untuk Perdagangan dan Pariwisata 4. Penguatan UMKM, Hilirisasi Komoditas Lokal, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Daerah 5. Membangun dan memperkuat sistem sertifikasi, standarisasi, serta jaminan mutu produk lokal berbasis digital dan kolaboratif lintas sektor 6. Transformasi Kelembagaan dan Penguatan Ekosistem Investasi Terpadu untuk Sektor Pariwisata dan Perdagangan 7. Penguatan Ketahanan Destinasi melalui Edukasi, Regulasi, dan Manajemen Risiko Berbasis Komunitas 8. Peningkatan akses terhadap manfaat wisata dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik 9. Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dapat dikelola oleh koperasi seperti pertanian, perikanan, kerajinan dan pariwisata 10. Mendorong koperasi untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan regional

Penjelasan secara rinci strategi pada Misi 2 berdasarkan sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan serta daya saing investasi daerah, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

a) Meningkatnya hilirisasi produk pertanian dan Daya Saing Investasi Daerah

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran peningkatan hilirisasi produk pertanian dan Daya Saing Investasi Daerah dikelompokkan

menjadi beberapa kelompok strategi, dimana dalam pengelompokan terdapat beberapa strategi yang akan dijalankan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran peningkatan hilirisasi produk pertanian.

b) Penguatan Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam Unggulan untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal

Strategi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi di tingkat lokal melalui pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam unggulan secara berkelanjutan, guna memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Mendorong industrialisasi lokal berbasis sumber daya alam unggulan untuk mencegah deindustrialisasi dini dan menjaga pertumbuhan sektor riil; Mendorong penguatan industri pengolahan produk pertanian berbasis komoditas unggulan lokal (kopi, porang, bawang merah, cengkeh, jagung) melalui dukungan teknologi dan kemitraan dengan LSM/perguruan tinggi; Pengembangan sentra hilirisasi produk pertanian di kawasan strategis (dekat pelabuhan, jalan negara, dan pusat produksi) untuk mendorong efisiensi distribusi; Pengembangan sarana prasarana hilirisasi berbasis kebutuhan (industri rumah tangga, cold storage, pengemasan, digitalisasi) untuk memperkuat ketahanan produk lokal dari tekanan pasar luar; Pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal (porang, kopi, bawang merah, cengkeh, jagung) melalui hilirisasi terpadu sesuai dengan arah RPJPN dan program prioritas provinsi; Revitalisasi dan perluasan infrastruktur hilirisasi (sentra IKM, rumah produksi, sarana pengemasan, penyimpanan, digitalisasi perdagangan) melalui program strategis nasional dan provinsi; Pemanfaatan momentum penguatan ketahanan pangan nasional dan program pangan hewani untuk mendorong industrialisasi berbasis komoditas lokal; Pemanfaatan pelabuhan dan posisi strategis Manggarai

Timur untuk mempercepat distribusi produk hilir guna mengantisipasi perubahan kebijakan pusat dan fluktuasi pasar.

c) Penguatan Branding dan Digitalisasi Produk Unggulan Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar Internasional

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas, daya saing, dan aksesibilitas produk lokal di pasar nasional dan internasional melalui strategi branding yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga produk unggulan daerah memiliki posisi kompetitif yang berkelanjutan. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Memperkuat branding dan sertifikasi produk unggulan lokal (kopi, bawang merah, porang, cengkeh) untuk meningkatkan daya saing terhadap produk impor dan pesaing daerah lain; Mendorong digitalisasi UMKM dan wirausaha lokal dalam pemasaran produk hilir melalui platform e-commerce lokal untuk menghadapi persaingan dengan produk luar; Promosi produk hilir unggulan (kopi, porang, olahan bawang merah, dan lainnya) ke pasar internasional melalui koneksi Labuan Bajo dan branding Manggarai Timur sebagai pusat agrindustri berkelanjutan; Penguatan literasi kewirausahaan dan investasi melalui inkubasi usaha serta dukungan promosi produk daerah untuk mengakses pasar lokal hingga internasional (Labuan Bajo dan sekitarnya).

d) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal melalui Integrasi Kelembagaan Ekonomi (Koperasi, BUMDes, Pelaku Usaha) dalam Rantai Nilai untuk Pengembangan Hilirisasi Berbasis Kawasan dan Komoditas Unggulan

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing melalui penguatan sinergi antar kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan rantai nilai komoditas unggulan berbasis kawasan, dari hulu ke hilir, sehingga mampu meningkatkan

efisiensi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Mengintegrasikan kelembagaan ekonomi lokal (koperasi, BUMDes, pelaku usaha) dalam rantai nilai agar petani tidak bergantung pada tengkulak dan memiliki kontrol harga jual; Mendorong sinergi antara BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan usaha hilirisasi berbasis kawasan dan komoditas unggulan; Menjadikan wirausaha pertanian dan industri pengolahan yang telah berhasil sebagai role model dan pelatih untuk replikasi hilirisasi di berbagai kecamatan; Penguatan ekosistem kelembagaan hilirisasi (koordinasi antara dinas teknis, BUMDes, koperasi, pelaku usaha) untuk menghindari pola pengelolaan mikro dan ketergantungan bantuan; Reformulasi pendekatan pemberdayaan masyarakat dari model karitatif (Memberikan bantuan sosial) menjadi model pemberdayaan partisipatif yang berkelanjutan dan berbasis komunitas; Revitalisasi peran pendamping dan fasilitator ekonomi lokal untuk memastikan efektivitas program hilirisasi dan ketepatan sasaran bantuan; Reformasi pendekatan intervensi pemerintah dari "business as usual" ke arah pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi dan teknologi pertanian.

e) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Sektor Pertanian melalui Diversifikasi Produk Berbasis Keanekaragaman Budaya dan Agroekologi

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi risiko ekonomi akibat ketergantungan pada satu komoditas dan meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian dengan mengembangkan diversifikasi produk yang berbasis pada kearifan lokal dan keanekaragaman hayati, guna mendorong ketahanan dan keberlanjutan ekonomi petani. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Diversifikasi produk pertanian berbasis keanekaragaman budaya dan agroekologi untuk mengurangi risiko dari perubahan iklim dan bencana

alam; Pemanfaatan potensi budaya dan sumber daya alam sebagai daya tarik untuk pengembangan agrowisata dan produk kreatif berbasis pertanian; Penyusunan roadmap pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas musiman dan memperkuat posisi terhadap persaingan antar daerah.

f) Peningkatan Ketahanan Petani melalui Asuransi Usaha Tani dan Kemitraan Keuangan Berkelanjutan

Strategi ini bertujuan untuk melindungi petani dari risiko gagal panen dan fluktuasi iklim serta memperkuat akses terhadap layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan, melalui penerapan skema asuransi usaha tani dan kemitraan pembiayaan yang mendukung usaha tani jangka panjang. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan:Mendorong Asuransi Usaha Tani untuk membantu petani dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam kegiatan pertanian, terutama risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau perubahan iklim; Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memutus rantai ketergantungan pinjaman dengan tengkulak.

g) Strategi Pengembangan Kapasitas SDM dan UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku UMKM dalam aspek teknis, manajerial, dan kewirausahaan agar mampu berinovasi, beradaptasi dengan teknologi, dan bersaing di pasar terbuka baik nasional maupun global. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku UMKM melalui pelatihan teknis, kewirausahaan, dan literasi digital secara masif untuk menghadapi persaingan e-commerce dan produk impor; Pemanfaatan dukungan perguruan tinggi dan LSM untuk peningkatan kapasitas petani dan

pelaku UMKM dalam pengolahan, pengemasan, pemasaran, dan manajemen usaha.

h) Peningkatan Daya Saing Investasi dan Pengembangan Industri Pengolahan Berkelanjutan

Strategi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan iklim investasi yang kompetitif serta pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal . Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui pembentukan klaster produksi dan hilirisasi; Mendorong pembangunan industri pengolahan (hilirisasi) untuk menghadapi ancaman deindustrialisasi dan ketidakstabilan ekonomi; Optimalisasi pelayanan perizinan dan kepastian regulasi investasi dengan memanfaatkan keberadaan MOL dan posisi geografis strategis; Menyederhanakan proses perizinan investasi dan pembayaran Pajak melalui penguatan sistem MOL; Revitalisasi sektor primer melalui insentif kebijakan dan teknologi pascapanen untuk mendorong hilirisasi dan memenuhi standar pasar.

i) Penguatan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Investasi dan Perekonomian

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas ekonomi antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang yang mendukung kelancaran investasi, distribusi produk lokal, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Meningkatkan daya saing investasi dengan memperkuat infrastruktur logistik (pelabuhan, jalan negara), memanfaatkan posisi strategis Manggarai Timur; Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur strategis melalui proyek nasional dengan

pembangunan jalan dan pasar modern dalam Proyek Strategis Nasional Kawasan NTT.

j) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Kearifan Lokal

Strategi ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat kelembagaan lokal (seperti koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha) serta mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi pengembangan ekonomi daerah. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Menyederhanakan proses perizinan investasi dan pembayaran Pajak melalui penguatan sistem MOL dan mendukung kelembagaan ekonomi lokal; Membangun citra investasi berbasis kearifan lokal untuk menarik investor di sektor agroindustri dan agrowisata; Menggandeng perguruan tinggi dan LSM untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal dan menyusun model investasi berkelanjutan berbasis inovasi teknologi; Menjadikan budaya dan ternak lokal sebagai bagian dari paket investasi dan pariwisata untuk menarik investor di sektor budaya dan event tradisional; Mengembangkan ekosistem usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui kerja sama dengan kampus/LSM.

k) Meningkatkan Kualitas SDM melalui Peningkatan Keterampilan dan Kolaborasi untuk Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam dan Kreativitas

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal dengan pelatihan berbasis potensi wilayah dan kolaborasi multi pihak, sehingga mampu mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang mengandalkan kreativitas dan sumber daya lokal. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Meningkatkan keterampilan SDM lokal di sektor industri, pertanian, kuliner, dan pariwisata melalui pelatihan vokasi;

Mengembangkan ekosistem usaha mikro dan ekonomi kreatif melalui kerja sama dengan kampus/LSM; Mendorong konsolidasi usaha pertanian-peternakan antar desa dalam bentuk klaster ekonomi lokal.

l) Membangun dan Memperkuat Kerangka Regulasi yang Mendukung Keberlanjutan Sektor Pariwisata dan Pertanian yang Sinergis
Strategi ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum dan kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, dan memperkuat sinergi antara pariwisata dan pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Menyusun RTRW dan regulasi investasi sektor pariwisata & pertanian dengan memperhatikan keberlanjutan; Mendorong konsolidasi usaha pertanian-peternakan antar desa dalam bentuk klaster ekonomi lokal; Penyusunan regulasi investasi berbasis kearifan lokal dan lingkungan untuk mengurangi konflik antara kepentingan investasi dan konservasi lingkungan; Penguatan sinergi kelembagaan dan sistem informasi investasi daerah; Pembentukan forum kolaboratif lintas desa dan pelaku ekonomi lokal.

m) Penguatan Citra Investasi dan Promosi Berbasis Kearifan Lokal
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan membangun citra positif daerah yang unik dan berbasis nilai-nilai lokal, melalui strategi promosi kreatif yang mencerminkan identitas dan potensi khas Manggarai Timur. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Membangun citra investasi berbasis kearifan lokal seperti kopi khas Manggarai Timur, ternak budaya, dan kegiatan adat melalui promosi terpadu; Mengembangkan platform promosi berbasis teknologi dan penyediaan database potensi investasi Manggarai Timur.

n) Membangun Ekosistem Investasi yang Berkelanjutan (Investasi Hijau) dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem investasi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berorientasi jangka panjang dengan memanfaatkan potensi lokal secara bijak, serta melibatkan komunitas dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Menarik investor yang peduli lingkungan melalui pemanfaatan hutan untuk produksi madu, pengelolaan perikanan lestari, serta pengembangan pertanian organik; Menjadikan budaya dan ternak lokal sebagai bagian dari paket investasi dan pariwisata untuk menarik investor di sektor budaya dan event tradisional.

o) Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal dengan Fokus pada Peningkatan Kualitas, Pengawasan yang Ketat, dan Konsolidasi Usaha Pertanian-Peternakan melalui Pengembangan Klaster Ekonomi Lokal

Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai tambah produk lokal melalui peningkatan mutu, penguatan sistem pengawasan, dan integrasi usaha petani-peternak ke dalam klaster ekonomi yang produktif dan kompetitif. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Peningkatan kualitas dan pengawasan produk untuk menghadapi perdagangan bebas; Mendorong konsolidasi usaha pertanian-peternakan antar desa dalam bentuk klaster ekonomi lokal.

p) Membangun Sistem Informasi Investasi Daerah yang Berbasis Data dan Promosi Digital untuk Mendukung Kolaborasi Antar Desa dan Pelaku Ekonomi Lokal

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan koordinasi investasi melalui pengembangan sistem informasi berbasis data digital yang mendukung promosi potensi wilayah dan memperkuat sinergi antar pelaku ekonomi lokal. Kelompok strategi ini terdiri dari

beberapa strategi yang akan dijalankan: Penguatan sinergi kelembagaan dan sistem informasi investasi daerah; Prioritisasi pembangunan infrastruktur dasar penunjang ekonomi lokal dengan membangun unit koordinasi investasi berbasis data dan promosi digital; Pembentukan forum kolaboratif lintas desa dan pelaku ekonomi lokal.

Sasaran 2. Meningkatnya sektor pariwisata dan perdagangan sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal/ekonomi desa, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

a) Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata Berbasis Budaya, Alam, dan Komunitas Secara Terpadu

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui pengembangan atraksi pariwisata yang memadukan potensi budaya, alam, dan peran aktif komunitas lokal, sehingga memberikan pengalaman otentik bagi wisatawan serta manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Pengembangan paket wisata terpadu berbasis budaya, alam, dan konservasi, Pengembangan wisata tematik: Tari Vera, Rugu, konservasi, sejarah, Peningkatan identitas pariwisata melalui narasi budaya lokal, Pengembangan wisata berbasis komunitas, Perlindungan lingkungan dan budaya melalui ekowisata komunitas, Membangun narasi baru wisata berbasis budaya dan gaya hidup modern.

b) Penguatan Branding dan Promosi Pariwisata Berbasis Digital dan Kemitraan

Strategi ini bertujuan untuk Meningkatkan daya tarik dan jangkauan pemasaran destinasi wisata melalui strategi promosi digital yang kreatif dan kolaboratif dengan mitra lokal, nasional, maupun internasional, sehingga wisata Manggarai Timur dikenal secara luas dan kompetitif di pasar global. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang

akan dijalankan: Penguatan branding dan promosi destinasi wisata, Sistem informasi digital untuk promosi pariwisata dan perdagangan, Digital marketing UMKM dan petani, Kerja sama dengan agen travel Labuan Bajo.

c) Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Terintegrasi untuk Perdagangan dan Pariwisata

Strategi ini bertujuan untuk Mendukung konektivitas antar wilayah dan kemudahan logistik pariwisata serta perdagangan melalui pembangunan dan integrasi infrastruktur strategis (jalan, transportasi, jaringan komunikasi), sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Penguatan UMKM dan pelaku usaha wisata/perdagangan, Hilirisasi komoditas lokal sebagai atraksi dan penguatan ekonomi desa, Hilirisasi komoditas melalui pelatihan dan pasar modern, Promosi dan kemitraan perdagangan.

d) Penguatan UMKM, Hilirisasi Komoditas Lokal, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan industri kreatif, dan hilirisasi produk unggulan berbasis sumber daya lokal, sehingga menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, dan memperkuat identitas ekonomi daerah. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Sistem sertifikasi dan mutu produk lokal, Pengawasan, sertifikasi, dan promosi berbasis standar, Sistem informasi produk dan jaminan mutu digital, Kerjasama sertifikasi lintas sektor.

e) Membangun dan Memperkuat Sistem Sertifikasi, Standarisasi, serta Jaminan Mutu Produk Lokal Berbasis Digital dan Kolaboratif Lintas Sektor

Strategi ini bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional dengan sistem sertifikasi dan standarisasi berbasis teknologi serta sinergi antar lembaga, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk daerah. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Sistem sertifikasi dan mutu produk lokal, Pengawasan, sertifikasi, dan promosi berbasis standar, Sistem informasi produk dan jaminan mutu digital, Kerjasama sertifikasi lintas sektor.

f) Transformasi Kelembagaan dan Penguatan Ekosistem Investasi Terpadu untuk Sektor Pariwisata dan Perdagangan

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif melalui perbaikan tata kelola, reformasi kelembagaan, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan secara inklusif dan berkelanjutan. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Transformasi kelembagaan Pokdarwis dan pendampingan, Reformulasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor, Kerja sama dan investasi sektor pariwisata, Investasi perdagangan pasar modern.

g) Penguatan Ketahanan Destinasi melalui Edukasi, Regulasi, dan Manajemen Risiko Berbasis Komunitas

Strategi ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan destinasi wisata dari tekanan lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan penguatan kapasitas masyarakat, pengaturan tata ruang, serta sistem mitigasi risiko berbasis lokal dan partisipatif. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Edukasi konservasi wisata berbasis komunitas, Sistem manajemen risiko dan keamanan wisata, Regulasi perlindungan destinasi dan SOP mitigasi iklim, Mitigasi bencana di kawasan wisata.

h) Peningkatan Akses terhadap Manfaat Wisata dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik

Strategi ini bertujuan untuk memastikan manfaat sektor pariwisata dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat melalui strategi pemberdayaan komunitas lokal dan penyelesaian konflik lahan atau sosial yang berpotensi menghambat pengembangan destinasi secara harmonis. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Strategi yang akan dijalankan yaitu Pemberdayaan desa di destinasi terganggu konflik lahan.

Misi 3 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan yang Merata di Berbagai Sektor untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan

Tabel 3. 9 Strategi Pembangunan Misi 3 Berdasarkan Sasaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan Yang Merata di Berbagai Sektor Untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	1. Penguatan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah melalui kolaborasi multi sektor dan insentif investor. 2. Optimalisasi peran CSR dan kemitraan swasta untuk pengembangan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan perbaikan dan modernisasi layanan transportasi yang integratif 4. Penguatan tata kelola transportasi dan pendanaan yang kolaboratif 5. Penguatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan teknis pengelolaan kawasan, infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan rumah layak huni 6. Pengembangan permukiman aman dan nyaman, ramah iklim, yang adaptif dan kolaboratif

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		7. Penguatan pengelolaan akses air minum bersih melalui pembentukan **BUMD Air Minum** 8. Peningkatan akses sanitasi layak yang terintegrasi 9. Efisiensi pembangunan infrastruktur dasar dengan pemanfaatan material lokal 10. Sinergitas lintas Aktor dan berbasis komunitas dalam pengembangan kawasan yang ramah lansia dan anak. 11. Mendorong inovasi sosial dan perubahan gaya hidup masyarakat yang partisipatif untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas Ekologi Daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Harmonisasi kebijakan lintas level, penerapan regulasi yang konsisten, dan perencanaan lingkungan yang terintegrasi 2. Mendorong ekonomi sirkular lokal dalam pengelolaan sampah berkelanjutan melalui koperasi, subsidi pusat, dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat kolaborasi multipihak dan partisipasi komunitas dalam perlindungan lingkungan 4. Restorasi, konservasi, dan pemulihan infrastruktur lingkungan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi 5. Penguatan infrastruktur dan teknologi monitoring lingkungan dengan optimalisasi laboratorium, fasilitas pemantauan, dan integrasi data lingkungan 6. Integrasi perencanaan dan penganggaran untuk perkuat sektor lingkungan 7. Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan meliputi konservasi air, pengendalian banjir dan pencegahan pencemaran air

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan Meningkatkan kualitas ekologi daerah, berikut penjelasan terkait strategi dalam masing-masing sasaran daerah.

Sasaran 3.1. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur, sasaran ini terdiri atas sepuluh strategi pembangunan sebagai berikut.

1) Penguatan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah melalui kolaborasi multi sektor dan insentif investor

   Strategi ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan aksesibilitas wilayah secara merata dan berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif dan insentif investasi. Strategi yang akan diterapkan dengan cara: (1) Meningkatkan kolaborasi vertikal antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta kolaborasi antar kabupaten yang memiliki potensi wisata premium, guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan antar wilayah; (2) Menyusun kebijakan daerah yang mampu menarik minat investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah dengan topografi sulit dan keterjangkauan rendah, melalui pemberian insentif dan kemudahan berusaha; (3) Mendorong pembangunan tembok penahan tanah (TPT) pada ruas-ruas jalan rawan longsor, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk pemberdayaan dan penguatan tanggung jawab sosial; (4) Mengoptimalkan pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung penyediaan transportasi publik, perlengkapan jalan, serta peningkatan aksesibilitas jalan, khususnya di daerah yang belum terlayani secara memadai oleh anggaran pemerintah.

2) Optimalisasi peran CSR dan kemitraan swasta untuk pengembangan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik melalui pelibatan aktif sektor swasta, khususnya dalam skema kemitraan dan pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Strategi yang akan diterapkan meliputi: (1) Mendorong CSR perusahaan untuk peningkatan infrastruktur dan sarana transportasi umum publik; dan (2) Memanfaatkan CSR perusahaan swasta (perusahaan) untuk peningkatan jumlah transportasi publik dan fasilitas perlengkapan jalan serta aksesibilitas jalan.

3) Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan perbaikan dan modernisasi layanan transportasi yang integratif

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi di Kabupaten Manggarai Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan integratif yang mencakup moda darat dan laut. Strategi yang akan diterapkan meliputi; (1) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang sudah dimiliki saat ini, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, keterjangkauan, maupun efisiensi operasional, agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal; (2) Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut, melalui perbaikan dan pembangunan dermaga yang representatif dan aman bagi penumpang maupun logistik.

4) Penguatan tata kelola transportasi dan pendanaan yang kolaboratif

   Strategi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor transportasi yang transparan, efisien, dan berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Strategi yang akan diterapkan meliputi; Meningkatkan kolaborasi stakeholders, termasuk pelaku usaha transportasi, lembaga pengawas, dan otoritas

perpajakan, guna mendorong peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak pengusaha angkutan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pendanaan daerah melalui sektor transportasi, tetapi juga untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib secara administratif dan legalitas usaha.

5) Penguatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan teknis pengelolaan kawasan, infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan rumah layak huni.

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, mekanisme pendanaan, serta perencanaan teknis dalam upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan. Strategi yang akan diterapkan meliputi; (1) Meningkatkan pemanfaatan kebijakan Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah layak huni sebagai langkah konkret dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh serta menyediakan hunian bagi korban bencana; (2) Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan yang telah tersedia untuk memperkuat mitigasi terhadap potensi migrasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, melalui penataan kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang; (3) Menyusun peta zona risiko bencana dan sistem drainase kawasan secara terintegrasi guna mengurangi risiko bencana, khususnya di wilayah pemukiman yang rawan longsor dan banjir; (4) Mengoptimalkan Dana Desa dan pemanfaatan CSR sebagai sumber alternatif pendanaan lokal untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman; (5) Mensinergikan program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menutupi kekurangan pendanaan daerah untuk pembangunan permukiman layak huni; (6) Meningkatkan keterlibatan pengembang perumahan dalam penyediaan infrastruktur dasar,

khususnya pembangunan sistem drainase yang layak dan ramah lingkungan pada kawasan permukiman baru.

6) Pengembangan permukiman aman dan nyaman, ramah iklim, yang adaptif dan kolaboratif

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang aman dari bencana, nyaman untuk ditinggali, serta adaptif terhadap perubahan iklim melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya. Strategi yang akan diterapkan meliputi; (1) Meningkatkan pemanfaatan kebijakan Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah layak huni sebagai upaya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, khususnya bagi korban bencana; (2) Kebijakan desa membangun rumah 10 unit per tahun dapat diarahkan untuk membangun permukiman tahan bencana di lokasi aman, untuk mengurangi risiko bencana alam yang tinggi; (3) Meningkatkan pembangunan rumah yang tahan terhadap bencana dan hemat energi untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni serta menghadapi tantangan iklim ekstrim; (4) Mengintensifkan edukasi publik melalui sosialisasi kesiapsiagaan bencana dan relokasi sukarela guna mengatasi resistensi terhadap relokasi serta memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman bencana; (5) Meningkatkan peran serta NGO dan sektor swasta dalam membangun rumah layak huni di kawasan rawan bencana (6) Memanfaatkan potensi ketersediaan lahan untuk relokasi dan pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih aman dari ancaman bencana alam dan dapat diarahkan untuk mengurangi tekanan akibat migrasi ke pusat pertumbuhan; (7) Peningkatan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, khusus daerah perkotaan untuk mata pencaharian non pertanian.

7) Penguatan pengelolaan akses air minum bersih dan sanitasi layak yang terintegrasi

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan air minum bersih dan sanitasi layak secara terpadu dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kolaborasi pendanaan, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Strategi yang akan diterapkan meliputi: (1) Mendorong kolaborasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penanganan air minum bersih dan sanitasi layak, yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan 10 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) per tahun per desa menggunakan dana desa; (2) membentuk BUMD/perumda pengelolaan air minum dan mendorong integrasi layanan air minum untuk menjawab tantangan pengelolaan yang masih terbatas serta menurunnya produksi air baku; (3) Memanfaatkan sumber mata air yang melimpah melalui penerapan teknologi yang sesuai untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air baku; (4) Memanfaatkan dana alokasi pusat serta keterlibatan NGO atau pihak swasta dalam mengatasi rendahnya akses sanitasi layak dan keterbatasan akses air minum bersih, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis sulit;(5) Mengoptimalkan peran NGO dalam pembangunan air bersih untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber mata air yang terbatas melalui pendekatan teknologi tepat guna; (6) Meningkatkan keterlibatan NGO dan pihak swasta dalam meningkatkan pengelolaan air minum bersih serta menangani keterbatasan pengelolaan air limbah domestik; (7) Mendorong pemanfaatan alokasi dana pusat secara terpadu untuk mendukung pembangunan permukiman, khususnya di wilayah dengan topografi sulit, agar pengelolaan air dan sanitasi menjadi bagian dari perencanaan kawasan secara menyeluruh; (8) Optimalisasi penggunaan sumber daya air dengan teknologi (penghematan air).

8) Efisiensi pembangunan infrastruktur dasar dengan pemanfaatan material lokal

Strategi ini difokuskan untuk mendorong efisiensi pembangunan infrastruktur dasar melalui optimalisasi sumber daya lokal, kolaborasi multipihak, dan adaptasi terhadap keterbatasan fiskal. Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan meliputi: (1) Meningkatkan pemanfaatan material lokal dan sumber mata air yang melimpah dengan melibatkan kolaborasi antara masyarakat, NGO, dan pemerintah dalam pembangunan perumahan yang efektif dan efisien; (2) Mengoptimalkan ketersediaan material lokal sebagai upaya menekan biaya pembangunan rumah, khususnya di tengah kondisi fiskal yang mengalami penurunan, agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan; (3) Memanfaatkan peran NGO dalam penggunaan material lokal untuk mengatasi keterbatasan bahan baku dan minimnya lokasi galian C yang memiliki izin resmi, sehingga tetap mendukung kelangsungan pembangunan; (4) Mengembangkan kemitraan antara lembaga pemerintah dan NGO untuk menjawab tantangan keterbatasan layanan infrastruktur dasar, terutama yang disebabkan oleh penurunan kebijakan fiskal dan tekanan migrasi penduduk ke wilayah tertentu.

9) Sinergitas lintas Aktor dan berbasis komunitas dalam pengembangan kawasan yang ramah lansia dan anak

Strategi ini diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan permukiman yang ramah bagi lansia dan anak, melalui kolaborasi lintas aktor dan pendekatan berbasis komunitas, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan nilai-nilai lokal. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Optimalisasi budaya gotong royong sebagai modal sosial dalam mendukung upaya pemulihan pasca bencana dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim; (2) Mendorong pemanfaatan lahan kosong yang strategis sebagai lokasi relokasi dan pembangunan hunian yang mendukung pola hidup slow

living, yang lebih ramah terhadap kelompok rentan seperti lansia dan anak; (3) Peningkatan kerja sama dengan pengembang perumahan yang telah tersedia untuk mengatasi keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta melakukan penataan kawasan permukiman agar sesuai dengan peruntukannya; (4) Mendorong pembangunan rumah adat dengan pendekatan tradisional serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan fasilitas publik, guna memperkuat identitas lokal sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih tenang dan sehat; (5) Memanfaatkan pendanaan pusat untuk meningkatkan layanan persampahan sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang layak huni, aman, dan bersih bagi seluruh kelompok usia; (6) Meningkatkan Penanganan, Pengelolaan dan sarana Prasarana Persampahan dengan Memanfaatkan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dalam mendukung perencanaan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan.

10) Mendorong inovasi sosial dan perubahan gaya hidup masyarakat yang partisipatif untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan

Strategi ini diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan inovatif yang berbasis sosial budaya lokal. Penerapan strategi ini mencakup: (1) Meningkatkan pembangunan rumah adat secara tradisional dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas publik, sebagai upaya mendukung gaya hidup slow living yang lebih selaras dengan lingkungan dan nilai-nilai lokal; (2) Mendorong penguatan kerja sama dengan NGO yang telah aktif dalam penanganan stunting dan memperluas edukasi publik tentang pentingnya sanitasi layak dan akses air bersih; dan (3) Meningkatkan edukasi publik melalui sosialisasi kesiapsiagaan bencana dan relokasi sukarela sebagai bagian dari

adaptasi terhadap risiko lingkungan, sekaligus menurunkan resistensi masyarakat terhadap program relokasi di kawasan rawan bencana.

Sasaran 3.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, sasaran ini terdiri atas tujuh strategi sebagai berikut.

1) Harmonisasi kebijakan lintas level, penerapan regulasi yang konsisten, dan perencanaan lingkungan yang terintegrasi

   Strategi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan, penguatan regulasi, serta perencanaan yang berbasis data dan risiko lingkungan. Strategi ini akan diterapkan melalui beberapa pendekatan, yaitu: (1) optimalisasi pelaksanaan dokumen RPPLH dan regulasi daerah maupun kebijakan pusat yang semakin ketat dalam pengendalian emisi, pengelolaan limbah, pengolahan sampah, serta perlindungan hutan dalam rangka mendorong sinkronisasi kebijakan lintas level untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif; (2) pemanfaatan dokumen RPPLH dan regulasi terkait sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim; (3) optimalisasi regulasi nasional tentang UKL-UPL-SPPL bagi pengawasan kegiatan usaha; (4) penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran transportasi material galian C; (5) Menyusun regulasi sanitasi layak sebagai tindak lanjut kebijakan kementerian guna memperkuat kerangka hukum pengelolaan lingkungan; (6) Mengintegrasikan pemetaan daerah rawan polusi dan risiko kecelakaan akibat galian C dalam rencana pengelolaan lingkungan jangka menengah untuk kualitas lingkungan yang baik; (7) Meningkatkan akses dan kualitas sistem irigasi.

2) Mendorong ekonomi sirkular lokal dalam pengelolaan sampah berkelanjutan melalui koperasi, subsidi pusat, dan pemberdayaan masyarakat

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi sirkular di tingkat lokal melalui penguatan kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan pusat, serta pemberdayaan komunitas. Pendekatan ini diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, yaitu; (1) Mendukung komitmen pimpinan dalam membentuk koperasi pengelola sampah dan ketersediaan mesin pencacah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan sarana dari pusat, sehingga mempercepat implementasi ekonomi sirkular di tingkat lokal; (2) Mendorong program pengelolaan sampah berbasis komunitas lokal untuk atasi kekurangan personil; (3) Meningkatkan akses bantuan sarpras dari kementrian (truk sampah, alat pencacah, dan pembangunan kantor DLH melalui skema dana pusat yang tersedia untuk daerah; (4) Meningkatkan program edukasi dan partisipasi berbasis masyarakat terhadap risiko bencana dan pencemaran lingkungan; (5) Pemberdayaan kelompok pengelola sampah untuk menangani limbah dari sektor pariwisata; (6) Mendukung komitmen pimpinan dalam membentuk koperasi pengelola sampah dan ketersediaan mesin pencacah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan sarana dari pusat, sehingga mempercepat implementasi ekonomi sirkular di tingkat lokal; (7) Mengembangkan pelatihan cepat tanggap darurat bencana dan pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kekurangan SDM dan dampak perubahan iklim.

3) Memperkuat kolaborasi multipihak dan partisipasi komunitas dalam perlindungan lingkungan

Strategi dibentuk untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan, perubahan iklim,

dan keterbatasan sumber daya. Adapun langkah strategis penerapannya dilakukan sebagai berikut; (1) Meningkatkan kegiatan pembinaan lingkungan yang dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan NGO seperti bambu lestari atau astra indonesia dalam bentuk edukasi masyarakat melalui penyuluhan dan pengelolaan partisipatif; (2) Meningkatkan kolaborasi dengan NGO atau LSM untuk melakukan penyuluhan, pelatihan masyarakat, serta peningkatan kompetensi aparatur lingkungan hidup melalui penerapan strategi mitigasi dampak bencana dan perubahan iklim yang spesifik sesuai karakteristik lokal; (3) Meningkatkan program edukasi dan partisipasi berbasis masyarakat untuk menguatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan pencemaran lingkungan; (4) mendorong kerja sama lintas sektor dalam penyediaan sarana pengelolaan sampah dan pemantauan lingkungan di tengah keterbatasan anggaran; (5) mengembangkan pelatihan cepat tanggap darurat bencana dan pengelolaan lingkungan untuk mengatasi kekurangan SDM dan dampak perubahan iklim; (6) memanfaatkan kemitraan strategis untuk menyusun kebijakan sanitasi layak dan mendorong penguatan regulasi daerah dalam pengelolaan lingkungan rawan bencana; (7) Optimalisasi (kualitas dan distribusi) pemanfaatan informasi cuaca dan iklim dalam merumuskan aksi adaptasi mitigasi untuk seluruh mata pencaharian terutama memiliki tingkat sensitivitas tinggi (pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan).

4) Restorasi, konservasi, dan pemulihan infrastruktur lingkungan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi

Strategi ini dibentuk untuk memperkuat ketahanan ekologi melalui partisipasi masyarakat dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan global. Pendekatan ini diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, yaitu; (1) Meningkatkan kegiatan restorasi dan pembersihan sungai oleh masyarakat dengan memanfaatkan tren global yang semakin peduli

terhadap isu lingkungan hidup, serta memperkuat kampanye pelestarian lingkungan di tingkat lokal sebagai bagian dari gerakan kolektif; dan (2) Mendorong kegiatan restorasi dan penanaman kembali pada wilayah-wilayah rentan banjir dan longsor sebagai langkah mitigasi bencana, sekaligus memperbaiki fungsi ekologis kawasan tersebut; (3) Memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis aksi merespon peringatan dini (AMPD) yang inklusif.

5) Penguatan infrastruktur dan teknologi monitoring lingkungan dengan optimalisasi laboratorium, fasilitas pemantauan, dan integrasi data lingkungan

   Strategi diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan secara lebih responsif dan akurat. Penerapan strategi ini mencakup; (1) meningkatkan monitoring kualitas udara dan edukasi emisi di jalur lalu lintas padat; (2) mengoptimalkan penggunaan fasilitas eksisting (seperti laboratorium) sebagai pusat koordinasi darurat dan monitoring kualitas lingkungan; (3) memanfaatkan kemitraan strategis untuk menyusun kebijakan sanitasi layak dan mendorong penguatan regulasi daerah dalam pengelolaan lingkungan rawan bencana; (4) memanfaatkan ketersediaan regulasi daerah dipadukan dengan permen LHK dan PP terbaru dari pemerintah pusat untuk mempertegas sanksi bagi pelanggaran lingkungan, sekaligus memberikan insentif bagi pelaku usaha yang taat aturan.

6) Integrasi perencanaan dan penganggaran untuk perkuat sektor lingkungan

   Strategi ini bertujuan memastikan keberlanjutan program lingkungan yang berorientasi pada mitigasi bencana dan pengelolaan sanitasi yang layak, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Penerapan strategi ini mencakup; (1) memanfaatkan kemitraan strategis untuk menyusun kebijakan sanitasi

layak dan mendorong penguatan regulasi daerah dalam pengelolaan lingkungan rawan bencana; dan (2) optimalisasi penggunaan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RPJPD provinsi) sebagai dasar penguatan usulan anggaran untuk sektor lingkungan hidup.

Misi 4 Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Serta Pemberantasan Kemiskinan, Dengan Memperkuat Desa Sebagai Basis Penghidupan Dan Kehidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan

Strategi pada Misi 4 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Strategi Pembangunan Misi 4 Berdasarkan Sasaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 4: Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Serta Pemberantasan Kemiskinan, Dengan Memperkuat Desa Sebagai Basis Penghidupan Dan Kehidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan		
Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Pada Peningkatan Kesejahteraan dan kemandirian bagi Masyarakat Desa	Terwujudnya Desa Sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat	1. Peningkatan Ketangguhan Iklim dan ketahanan ekosistem dengan Transformasi Pertanian Berkelanjutan 2. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani melalui Kemitraan Inklusif, Pendampingan Adaptif, dan Transformasi Kelembagaan Berbasis Lokal 3. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Produksi Terintegrasi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pertanian. 4. Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Berbasis Kawasan untuk Nilai Tambah Ekonomi Lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa. 5. Transformasi Digital Pertanian/Peternakan Terintegrasi untuk Pemantauan Sumber Daya, Layanan Usaha, dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
		6. Penguatan Identitas Wilayah dan Daya Saing Komoditas Melalui Branding Agroekologi Budaya dan Ekowisata Terintegrasi 7. Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Terpadu dan Penegakan Hukum Lingkungan untuk Keamanan Pangan dan Biosekuriti 8. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Perikanan dan Kehutanan Berkelanjutan melalui Pendekatan Kawasan dan Teknologi 9. Penguatan Tata Kelola Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal untuk Pelestarian SDA dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga 10. Pembangunan Ekosistem Pertanian yang Terintegrasi melalui Kebijakan Fiskal Pro-Pertanian dan Sinergi Lintas Sektor

Penjelasan secara rinci strategi pada Misi 4 berdasarkan sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 4.1 Terwujudnya Desa Sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat.

Terwujudnya Desa Sebagai Tulang punggung Peningkatan Kesejahteraan Untuk Kemandirian Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar adalah petani dan basis kehidupan yang bergantung dengan sektor primer. Oleh karena itu strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah berbasis peningkatan Sektor primer. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok strategi, dimana dalam pengelompokan terdapat beberapa strategi yaitu:

1) Peningkatan Ketangguhan Iklim dan ketahanan ekosistem dengan Transformasi Pertanian Berkelanjutan

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pertanian dan pengelolaan sumber daya alam agar mampu menghadapi tekanan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalakan: Mengembangkan sistem pertanian berbasis agroforestry dan pertanian tahan iklim; Meningkatkan kapasitas petani dan peternak dalam mengelola risiko bencana iklim; Penataan ruang berbasis kawasan lindung dan produksi untuk mencegah pembalakan liar dan degradasi lingkungan; Meningkatkan kapasitas SDM pertanian dan peternakan melalui pelatihan terpadu berbasis lokal dan adaptif terhadap iklim ekstrim; Mendorong transformasi pertanian tradisional menuju pertanian berbasis teknologi sederhana dan ramah lingkungan; Melakukan pengendalian ketat terhadap praktik perusakan sumber daya (illegal fishing, pembalakan liar, overfishing) melalui kolaborasi dengan masyarakat dan penegak hukum.

2) Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Masyarakat serta kelembagaan petani melalui Kemitraan Inklusif, Pendampingan Adaptif, dan Transformasi Kelembagaan Berbasis Lokal

Strategi ini bertujuan untuk Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani serta memperkuat kelembagaan lokal agar mampu mengelola risiko perubahan iklim, mengakses pasar, dan beradaptasi secara berkelanjutan dalam tata kelola usaha tani. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Menyediakan pelatihan dan pendampingan kelompok tani/koperasi untuk memenuhi standar global; Inkubasi wirausaha muda tani dengan bekerjasama dengan universitas dan LSM; Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM untuk pelatihan petani/peternak, pelatihan teknis berbasis teknologi; Peningkatan kapasitas petugas lapangan dan tenaga kesehatan secara berkala; Reformasi pendampingan (Tidak hanya diberikan pelatihan akan tetapi

diberdayakan melalui koperasi dan Bumdes); Penguatan dan revitalisasi kelembagaan petani dan peternak untuk memperkuat daya tawar dan mitigasi terhadap monopoli serta penetrasi pasar bebas; Meningkatkan kapasitas SDM pertanian dan peternakan melalui pelatihan terpadu berbasis lokal dan adaptif terhadap iklim ekstrim.

3) Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Produksi Terintegrasi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pertanian-Perikanan

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap infrastruktur dasar dan sarana produksi yang memadai untuk memperkuat produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk lokal di pasar. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Kolaborasi pemerintah daerah dan pusat untuk rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perikanan (jalan tani, irigasi, *cold storage*); Membangun infrastruktur dasar sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal; Revitalisasi pengelolaan pasca panen; Penguatan sarana dan prasarana panen dan pasca panen (*Cold Storage*, pasar, terpadu); Mendorong pembangunan RPH dan RTH yang sesuai standar; Fasilitasi akses petani pada sarana produksi melalui skema selektif koperasi untuk mendominasi perusahaan besar (pengadaan sarana produksi) melalui BUMDES dan koperasi petani.

4) Pengembangan Klaster Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Berbasis Kawasan untuk Nilai Tambah Ekonomi Lokal

   Strategi ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan secara terintegrasi agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok lokal. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Membangun cluster produksi dan hilirisasi komoditas unggulan seperti porang, kopi, coklat dan ternak

(Sapi, Kambing, Babi) dengan sistem terintegrasi; Pengembangan industri kecil hasil pengolahan peternakan dan pertanian; Membuat percontohan praktek pertanian modern (demonstration plot); Pengembangan budidaya porang skala kawasan berbasis kelompok tani.

5) Transformasi Digital Pertanian/Peternakan Terintegrasi untuk Pemantauan Sumber Daya, Layanan Usaha, dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan lahan, pemasaran, pembiayaan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Penerapan teknologi berbasis komunitas untuk pemantauan SDA (*drone sensor*); Mengembangkan *dashboard* monitoring peternakan/pertanian daerah berbasis data; Digitalisasi kelembagaan ekonomi lokal (Koperasi, BUMDes) untuk penguatan rantai pasok dan akses pasar; Mendorong digitalisasi penyuluhan dan pendampingan pertanian dan peternakan (*E-learning mobile app*); Pelayanan terpadu untuk perizinan usaha, pertanian, peternakan berbasis digital.

6) Penguatan Identitas Wilayah dan Daya Saing Komoditas Melalui Branding Agroekologi Budaya dan Ekowisata Terintegrasi

   Strategi ini bertujuan untuk membangun citra dan keunggulan kompetitif produk lokal berbasis agroekologi, kearifan budaya, dan potensi ekowisata agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Promosi dan positioning branding manggarai timur sebagai kawasan agroekologi berbasis budaya; Penyusunan regulasi daerah berbasis kearifan lokal untuk melindungi komoditas unggulan dan petani kecil; Advokasi otonomi khusus dalam kebijakan pangan dan pertanian melalui forum pertanian lintas provinsi; Dukungan Branding dan akses pasar

ekspor produk lokal via Labuan Bajo; Integrasi agrowisata, ekowisata, kuliner lokal dalam program pengembangan berbasis kawasan.

7) Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Terpadu dan Penegakan Hukum Lingkungan untuk Keamanan Pangan dan Biosekuriti

   Strategi ini bertujuan untuk menjamin kesehatan hewan ternak dan keberlanjutan ekosistem melalui sistem pengawasan terpadu serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dan mengancam ketahanan pangan. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Integrasi sanitasi dan biosecurity dalam budidaya peternakan untuk mencegah Zoonosis dan penyakit menular hewan strategis; Penguatan sistem pengawasan, biosekuriti, dan pemenuhan fasilitas kesehatan hewan; Pembentukan satgas pengendalian penyakit ternak dan puskeswan; Meningkatkan sinergitas antar instansi untuk penegakan hukum lingkungan.

8) Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Perikanan dan Kehutanan Berkelanjutan melalui Pendekatan Kawasan dan Teknologi

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan dan kehutanan terhadap ekonomi daerah secara berkelanjutan dengan pendekatan teknologi, konservasi, dan optimalisasi kawasan produktif. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Pengembangan budidaya perikanan air tawar dan laut berbasis kawasan; Pelatihan teknologi tangkap dan budidaya perikanan berbasis ekonomi lokal; Membentuk balai benih ikan untuk pengembangan pembenihan ikan; Peningkatan UMKM berbasis kehutanan (mebel, olahan kayu, dan bambu) dengan pendekatan legalitas dan berkelanjutan.

9) Penguatan Tata Kelola Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal untuk Pelestarian SDA dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Strategi ini bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan usaha ekonomi keluarga melalui mekanisme tata kelola partisipatif yang berbasis nilai-nilai budaya lokal. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Penguatan kelembagaan pengawasan desa dan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan laut; Revitalisasi budaya ternak sebagai bagian dari penguatan ekonomi rumah tangga

10) Pembangunan Ekosistem Pertanian yang Terintegrasi melalui Kebijakan Fiskal Pro-Pertanian dan Sinergi Lintas Sektor

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pembangunan pertanian yang inklusif dan konsisten melalui dukungan fiskal, insentif kebijakan, serta kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat secara menyeluruh. Kelompok strategi ini terdiri dari beberapa strategi yang akan dijalankan: Menetapkan kebijakan fiskal daerah yang pro pertanian; Mendorong sinergi OPD teknis lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pertanian.

Misi 5 Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk mencapai arah kebijakan Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan mengimplementasikan serangkaian strategi yang terintegrasi dan berkesinambungan. Strategi dirancang untuk mengatasi tantangan yang ada, memanfaatkan potensi lokal, dan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai luhur serta terciptanya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Strategi pada Misi 5 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3. 11 Strategi Pembangunan Misi 5 Berdasarkan Sasaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya Serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan anak		
Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Pembangunan Manusia Antargender dan Antargenerasi	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, Perdagangan Manusia, dan Penipuan yang Terintegrasi 2. Penguatan Kapasitas, Keterampilan, dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Melalui Dukungan yang Komprehensif untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Perempuan 3. Penguatan Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dengan Mendorong Keterlibatan Perempuan Dalam Politik, Pengambilan Keputusan, dan Ruang Publik di Segala Sektor 4. Menanamkan Perspektif Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 5. Meningkatkan Sinergi Antar Aktor untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Kelompok Rentan Melalui Pola Kolaborasi dan Kemitraan

Berikut adalah penjelasan rinci terkait strategi untuk mewujudkan tujuan Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, dan Adaptif, melalui dua sasaran utama, yaitu:

Sasaran 5.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Sasaran utama di atas memiliki beberapa strategi dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, Perdagangan Manusia, dan Penipuan yang Terintegrasi

   Strategi ini berfokus pada peningkatan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk ancaman. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Pembangunan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif; (2) Meningkatkan sinergi antarlembaga pemerintah untuk mengembangkan program pra-keberangkatan bagi calon Tenaga Kerja Wanita (TKW); (3) Optimalisasi implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan fokus pada pencegahan tindak perdagangan perempuan serta kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak; (4) Mengoptimalkan peran forum anak sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan, serta modus penipuan yang menyasar anak dan remaja; (5) Kampanye edukasi berkelanjutan bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, mencegah kekerasan, dan mendorong partisipasi aktif dalam berbagai bidang; (6) Mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran daerah berbasis gender untuk mendukung program-program perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.

2) Penguatan Kapasitas, Keterampilan, dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Melalui Dukungan yang Komprehensif untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Perempuan

Strategi ini bertujuan untuk membekali perempuan dengan kemampuan yang diperlukan agar mereka dapat berperan aktif dalam ekonomi dan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi. Strategi ini menyadari bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mengurangi kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan (pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha) melalui kerja sama dengan NGO, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk menjadi mandiri secara ekonomi; (2) Menyelenggarakan pelatihan dan

sosialisasi tentang literasi keuangan dan pendidikan bagi perempuan melalui kerja sama dengan NGO untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi dan pendidikan keuangan. Kemandirian ekonomi tidak hanya membutuhkan keterampilan usaha, tetapi juga pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan; (3) Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan dengan meningkatkan keterampilan dan akses terhadap pekerjaan yang layak bagi perempuan, untuk meningkatkan daya saing perempuan di pasar kerja dan memperluas kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; (4) Menyusun program peningkatan pengetahuan dan pendidikan perempuan untuk mengurangi risiko eksploitasi dan penipuan. Dengan pengetahuan yang memadai, perempuan diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan melindungi diri dari potensi bahaya.

3) Penguatan Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dengan Mendorong Keterlibatan Perempuan Dalam Politik, Pengambilan Keputusan, dan Ruang Publik di Segala Sektor

   Strategi ini fokus pada peningkatan peran dan representasi perempuan dalam berbagai arena publik dan pengambilan keputusan. Strategi yang akan dijalankan meliputi, (1) Menyusun program peningkatan pengetahuan dan pendidikan politik bagi perempuan untuk mendorong partisipasi mereka dalam politik; (2) Menyelenggarakan program-program peningkatan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi perempuan (melalui pelatihan, mentoring, dan kampanye kesadaran) untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di segala sektor.

4) Menanamkan Perspektif Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

   Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu gender terintegrasi secara sistematis dalam seluruh siklus perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah. Strategi yang akan dilakukan yaitu (1) Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan dan program pembangunan daerah untuk memastikan responsivitas gender; (2) Mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran daerah berbasis gender untuk perencanaan pembangunan yang inklusif, termasuk dukungan program perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perdagangan manusia, penanganan kasus kekerasan terhadap TKW, dan penanggulangan kekerasan seksual; (3) Memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

5) Meningkatkan Sinergi Antar Aktor untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Kelompok Rentan Melalui Pola Kolaborasi dan Kemitraan

   Strategi ini bertujuan untuk membangun ekosistem yang kolaboratif dan inklusif dalam mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi kelompok rentan. Strategi yang akan diterapkan adalah (1) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pertukaran informasi dan dukungan kegiatan lainnya; (2) Memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak melalui sinergi antara pemerintah dan forum anak; (3) Menyelenggarakan kampanye kesadaran publik tentang kesetaraan gender melalui kolaborasi dengan NGO, untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan dan dampak positifnya.

Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif

Strategi pada Misi 6 dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Strategi Pembangunan Misi 6 Berdasarkan Sasaran Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif		
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan	1. Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Daerah 2. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan Kepatuhan dan Aksesibilitas Pembayaran Pajak oleh Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Responsif 2. 3. Meningkatkan Efisiensi dan Integrasi Pelayanan Perizinan Daerah 4. Meningkatkan Peran Media dan Komunikasi dalam Mendukung Pelayanan Publik
	Meningkatnya Efektivitas Pemerintahan	1. Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan yang Inklusif dan Terintegrasi 2. Meningkatkan Inovasi Daerah untuk Mendorong Efisiensi dan efektivitas Pelayanan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Responsif, dan Partisipatif 4. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 5. Meningkatkan Sistem Penghargaan dan Insentif bagi ASN Berkinerja Tinggi dan Berinovasi 6. Meningkatkan Keamanan Informasi Melalui Penguatan Sistem Persandian dan Keamanan Siber 7. Meningkatkan Kualitas Data Melalui Penyelenggaraan Statistik sektoral

Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Ketertiban Hukum di Masyarakat 3. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola Situasi Krisis dan Risiko Daerah 4. Meningkatkan Peran Media dan Komunikasi dalam Mendukung Pelayanan Publik

Sumber: Hasil DKT, 2025

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas, maka penjelasan strategi pada masing sasaran daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran 6.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah melalui sistem perencanaan dan pengawasan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis tata ruang. Strategi yang akan diterapkan meliputi: (1) Meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan Smart City sebagai kerangka kerja bersama untuk pembangunan yang terkoordinasi dan berbasis teknologi; (2) Memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, guna meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program pembangunan; (3) Melakukan reformulasi terhadap pelayanan perizinan dan penataan ruang agar lebih responsif, transparan, dan mendukung kemudahan investasi serta kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

2) Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Strategi ini bertujuan untuk memastikan terciptanya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Meningkatkan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah; (2) Meningkatkan pengendalian internal pemerintah melalui mekanisme evaluasi rutin guna mengidentifikasi risiko dan perbaikan tata kelola; dan (3) Memperkuat fungsi pengawasan internal yang terintegrasi dan transparan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh lini birokrasi.

Sasaran 6.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Meningkatkan penerimaan pajak dan optimalisasi aset publik melalui mekanisme insentif berbasis kinerja; (2) Memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi potensi pendapatan baru serta meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD); (3) Mengoptimalkan penggunaan data PAD untuk mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah; (4) Meningkatkan kapasitas fiskal dengan menggali potensi ekonomi lokal serta sumber-sumber pendapatan lainnya; dan (5) Mengintegrasikan pengelolaan PAD ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem *Smart City* guna menciptakan tata kelola pendapatan yang transparan, modern, dan terintegrasi.

2) Meningkatkan Tata Kelola dan Kelembagaan Pengelolaan Aset dan Retribusi Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan retribusi daerah melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Penguatan kapasitas fiskal daerah dalam optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara produktif dan bernilai tambah; (2) Penguatan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah agar lebih responsif, akuntabel, dan profesional; (3) Pembangunan objek retribusi daerah guna memperluas basis penerimaan asli daerah; dan (4) Pembentukan kelembagaan yang khusus menangani retribusi daerah untuk memastikan pelaksanaan pungutan yang tepat sasaran dan sesuai regulasi.

3) Meningkatkan Kepatuhan dan Aksesibilitas Pembayaran Pajak oleh Masyarakat

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah secara mudah, cepat, dan transparan. Strategi ini akan diterapkan melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dengan membangun sistem pembayaran pajak yang terintegrasi, sehingga mampu mempermudah akses pembayaran, memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendapatan daerah, serta mendorong peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Sasaran 6.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Responsif

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan inovatif guna memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang. Strategi ini akan diterapkan melalui:

(1) Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk menciptakan solusi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat; (2) Peningkatan mutu pelayanan melalui kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan; (3) Peningkatan transparansi dan kepastian waktu pelayanan dengan memanfaatkan media informasi seperti papan pengumuman, situs web resmi, dan notifikasi digital; (4) Penyediaan layanan publik yang berbasis budaya lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan peningkatan aksesibilitas; serta (5) Peningkatan sarana, prasarana, dan kualitas layanan di Mall Pelayanan Publik guna mewujudkan layanan yang terintegrasi, nyaman, dan efisien bagi masyarakat.

2) Meningkatkan Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan

Strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses pelayanan publik yang adil, inklusif, dan bermartabat. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kelompok rentan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah serta meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan empatik; (2) Pembangunan forum komunikasi pelayanan publik yang melibatkan kelompok rentan sebagai ruang dialog dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan pelayanan; dan (3) Pengembangan model kolaboratif Mall Pelayanan Publik yang partisipatif, guna menjamin kemudahan akses dan kualitas layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Meningkatkan Efisiensi dan Integrasi Pelayanan Perizinan Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi pelayanan perizinan daerah guna mendorong iklim investasi yang sehat dan pelayanan publik yang lebih mudah diakses. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Penyederhanaan proses perizinan untuk

mendukung kemudahan berbisnis dan investasi dengan memanfaatkan platform digital yang transparan dan akuntabel; (2) Penguatan pelayanan perizinan yang terintegrasi hingga ke level desa agar lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; (3) Pembangunan sistem perizinan non-usaha yang terintegrasi dari kabupaten hingga desa guna mendukung pelayanan lintas sektor yang efisien; serta (4) Penguatan edukasi dan sosialisasi terkait pelayanan perizinan yang berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan.

4) Meningkatkan Peran Media dan Komunikasi dalam Mendukung Pelayanan Publik

   Strategi ini bertujuan untuk memperkuat peran media dan komunikasi sebagai sarana pendukung dalam penyampaian informasi pelayanan publik yang efektif, transparan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Strategi ini akan diterapkan melalui peningkatan peran media milik pemerintah dalam menyebarluaskan informasi layanan serta menjalin kemitraan strategis dengan insan pers untuk menciptakan ekosistem komunikasi publik yang inklusif, objektif, dan mendukung partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.

Sasaran 6.4 Meningkatnya Efektivitas Pemerintahan, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan yang Inklusif dan Terintegrasi

   Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang inklusif, efisien, dan terintegrasi hingga ke seluruh level pemerintahan. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung pelayanan publik yang lebih responsif; (2) Percepatan digitalisasi pemerintahan melalui

penguatan infrastruktur SPBE dan pengembangan Mall Pelayanan Publik berbasis TIK; (3) Penyederhanaan birokrasi dan implementasi *e-Government* yang memungkinkan proses layanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel; (4) Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasi implementasi SPBE di berbagai sektor pelayanan; dan (5) Penguatan integrasi aplikasi pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke desa guna menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang kolaboratif dan terpadu.

2) Meningkatkan Inovasi Daerah untuk Mendorong Efisiensi dan efektivitas Pelayanan

   Strategi ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penguatan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Peningkatan inovasi daerah yang berorientasi pada pengembangan kapasitas fiskal dan perluasan sumber penerimaan daerah; (2) Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih responsif, adaptif, dan berdaya saing; (3) Pembentukan pusat inovasi daerah yang didukung dengan program, pendanaan, serta pendampingan untuk mendorong lahirnya startup lokal; (4) Pemberian penghargaan (*reward*) kepada aparatur yang berhasil menciptakan inovasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi; serta (5) Promosi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendanai proyek inovasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Responsif, dan Partisipatif

   Strategi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Peningkatan partisipasi

stakeholders dalam pengambilan kebijakan daerah melalui forum diskusi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) Peningkatan pengelolaan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; (3) Pembentukan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) sebagai upaya menjaga keberlanjutan pengetahuan dan praktik baik dalam pemerintahan; (4) Pembangunan ruang diskusi formal dan informal lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi ketidakpastian regulasi; serta (5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola melalui integrasi data lintas OPD agar mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur.

4) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adaptif, dan berintegritas. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui program beasiswa dan pelatihan bersertifikasi; (3) Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN dengan penerapan promosi berbasis kinerja dan objektivitas; (4) Pengembangan kompetensi dan kuantitas ASN melalui evaluasi berkala serta skema insentif berbasis kinerja; dan (5) Peningkatan profesionalitas ASN melalui pengelolaan manajemen ASN yang konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

5) Meningkatkan Sistem Penghargaan dan Insentif bagi ASN Berkinerja Tinggi dan Berinovasi

   Strategi ini bertujuan untuk membangun budaya kerja aparatur yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada hasil melalui sistem

penghargaan dan insentif yang adil dan transparan. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Pemberian *reward* kepada aparatur yang berhasil menciptakan inovasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi terhadap perbaikan layanan publik; (2) Penerapan sistem insentif dan penghargaan bagi ASN yang menunjukkan disiplin tinggi dan prestasi kerja secara konsisten; serta (3) Mendorong peningkatan kapasitas ASN melalui kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga guna mendukung pengembangan kompetensi dan jenjang karier yang lebih profesional.

6) Meningkatkan Keamanan Informasi Melalui Penguatan Sistem Persandian dan Keamanan Siber

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dan ketahanan digital pemerintah daerah melalui penguatan sistem persandian dan keamanan siber yang andal dan adaptif. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Penguatan sistem keamanan siber dan persandian di lingkungan pemerintahan guna melindungi data dan informasi dari ancaman digital; (2) Pelaksanaan mekanisme audit keamanan sistem digital secara berkala untuk mendeteksi kerentanan dan memastikan standar keamanan terpenuhi; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber melalui pelatihan dan sertifikasi teknis; (4) Penguatan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pembentukan tim reaksi cepat untuk penanganan insiden siber; dan (5) Pengembangan kerangka kerja keamanan siber yang terintegrasi dengan kebijakan audit rutin sebagai dasar pengambilan keputusan dan pencegahan risiko keamanan digital.

7) Meningkatkan Kualitas Data Melalui Penyelenggaraan Statistik sektoral

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, konsistensi, dan integritas data dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Meningkatkan kualitas pengolahan data statistik sektoral agar sesuai

dengan standar nasional statistik dan dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan pembangunan; dan (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) statistik guna menjamin ketersediaan data yang valid, terbarukan, dan relevan dengan kebutuhan kebijakan daerah.

Sasaran 6.5 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat, memiliki beberapa strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dan ketahanan digital pemerintah daerah melalui penguatan sistem persandian dan keamanan siber yang andal dan adaptif. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Penguatan sistem keamanan siber dan persandian di lingkungan pemerintahan guna melindungi data dan informasi dari ancaman digital; (2) Pelaksanaan mekanisme audit keamanan sistem digital secara berkala untuk mendeteksi kerentanan dan memastikan standar keamanan terpenuhi; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber melalui pelatihan dan sertifikasi teknis; (4) Penguatan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pembentukan tim reaksi cepat untuk penanganan insiden siber; dan (5) Pengembangan kerangka kerja keamanan siber yang terintegrasi dengan kebijakan audit rutin sebagai dasar pengambilan keputusan dan pencegahan risiko keamanan digital.

2) Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Ketertiban Hukum di Masyarakat

   Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang stabil dan tertib hukum melalui pendekatan kolaboratif, humanis, dan berbasis keadilan. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjamin kepastian hukum serta mendorong kesadaran hukum dan peran aktif masyarakat;

(2) Penguatan pendekatan sosial dan partisipatif dalam penyelesaian sengketa, termasuk melalui pelibatan budaya lokal dan hukum adat; serta (3) Upaya menghindari kriminalisasi warga dalam konflik agraria dan penegakan hukum secara tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah, guna memastikan perlindungan hak masyarakat secara adil dan bermartabat.

3) Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola Situasi Krisis dan Risiko Daerah

   Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas respons Pemerintah Daerah dalam menghadapi situasi krisis dan risiko daerah secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Strategi ini akan diterapkan melalui: (1) Penguatan infrastruktur modern yang mendukung penanganan keadaan darurat secara efektif; (2) Peningkatan jaringan komunikasi tanggap darurat yang terintegrasi hingga ke level desa untuk memastikan koordinasi cepat di lapangan; (3) Pembentukan forum pemangku kepentingan lokal guna memperkuat sinergi dalam respons bencana atau krisis; (4) Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi risiko secara real-time; dan (5) Penyusunan dan pembaruan protokol penanganan keadaan darurat secara berkala agar adaptif terhadap berbagai jenis ancaman dan kondisi lokal.

4) Meningkatkan Kesiapan Operasional Pemerintah Daerah dalam Menanggapi Ancaman dan Gangguan Layanan Publik

   Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap layanan publik, guna menjamin keselamatan masyarakat dan kontinuitas pelayanan. Strategi ini akan diterapkan melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan kompetensi personel pemadam kebakaran dan non-kebakaran agar mampu merespons situasi darurat secara cepat, tepat, dan profesional.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan menjadi suatu haluan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Arah kebijakan ditetapkan di masing-masing misi sebagai implementasi konkrit rencana pembangunan yang akan memandu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan menengah dilakukan dalam periode lima tahun yang setiap tahunnya memiliki satu fokus arah kebijakan pembangunan di setiap sektor. Arah kebijakan setiap tahunnya berbeda dan memiliki prioritas berbeda, namun tetap saling terkait dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan digambarkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Tahapan Pembangunan RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	Periode III (2028)	Periode IV (2029)	Periode V (2030)
Penguatan Fondasi Inklusif dan Responsif	Konsolidasi Tata Kelola dan Integrasi Sosial	Peningkatan Daya Saing dan Ekosistem Inovatif	Transformasi Digital dan Inklusivitas Layanan	Peningkatan Daya Saing Global

Untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah, dibutuhkan tahapan pembangunan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Setiap tahapan pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi awal, tantangan, serta potensi unggulan daerah. Dalam lima tahun ke depan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada proses bertahap mulai dari penguatan fondasi, konsolidasi tata kelola, peningkatan daya saing, transformasi digital, hingga pematangan hasil pembangunan. Pendekatan ini dilakukan secara holistik dan terpadu untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan penjelasan tahapan pembangunan daerah dari tahun pertama hingga tahun kelima.

Pada tahun pertama, pembangunan daerah diarahkan untuk meletakkan fondasi yang kuat melalui penguatan pembangunan manusia yang inklusif, sehat, dan berkeadilan. Pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berbasis kearifan lokal menjadi landasan utama. Di sisi ekonomi, prioritas diberikan pada sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, infrastruktur, dan kelembagaan melalui strategi peningkatan produktivitas dan regulasi strategis. Selain itu, penguatan sistem pangan, perlindungan kelompok rentan, serta konsolidasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif menjadi bagian dari kerangka awal pembangunan. Memasuki tahun kedua, arah kebijakan difokuskan pada konsolidasi dan penguatan tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi antar sektor dan wilayah. Fokus utama mencakup peningkatan daya saing manusia melalui inklusi sosial, pemanfaatan teknologi, dan penerapan prinsip keadilan sosial. Penguatan tata kelola kelembagaan, integrasi ekonomi daerah, serta koordinasi antarpemangku kepentingan mulai diperkuat. Upaya ini didukung oleh pembangunan infrastruktur cerdas dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penopang pertumbuhan.

Pada tahun ketiga, pembangunan diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kolaborasi digital. Tahapan ini menekankan konsolidasi kualitas SDM dan transformasi ekonomi daerah yang adaptif terhadap perubahan. Ekosistem investasi dan kolaborasi lintas sektor diperkuat, seiring dengan pembangunan infrastruktur hijau, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Sinergi antarsektor dan antarwilayah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun keempat, pembangunan memasuki tahap transformasi struktural melalui pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Integrasi nilai lokal dengan kemajuan digital dilakukan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta menjamin aksesibilitas dan kesetaraan. Wilayah pinggiran dan kelompok rentan menjadi sasaran utama

dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Transformasi kelembagaan juga terus didorong melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas ASN, dan tata kelola data yang terpadu. Tahun kelima merupakan fase pematangan dan konsolidasi akhir dari seluruh rangkaian pembangunan sebelumnya. Fokus diarahkan pada penguatan daya saing global dengan mengandalkan SDM unggul, inovasi, dan keberlanjutan potensi lokal. Optimalisasi tata kelola berbasis digital dan efisiensi investasi menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan yang kompetitif. Di tahap ini, pembangunan ditujukan untuk memperkuat kelembagaan daerah yang adaptif, meningkatkan partisipasi publik, serta menyiapkan fondasi yang kokoh menuju visi pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah, arah kebijakan disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, tantangan sektoral, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang setiap tahunnya. Meskipun fokus dan penekanan kebijakan dapat berbeda antar tahun, seluruh arah kebijakan dirancang secara terpadu dan konsisten agar mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian, arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029 menjadi dasar strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan tahunan yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029, arah kebijakan dirumuskan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahunan, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. 14 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Manggarai Timur Tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur Yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Inklusif, Sehat, dan Berkeadilan Melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Kearifan Lokal 2. Memperkuat Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing Sosial dan Budaya Melalui Inklusi, Teknologi, dan Keadilan Sosial 3. Konsolidasi Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Manusia yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan 4. Integrasi Nilai Lokal dan Transformasi Digital untuk Pembangunan Manusia yang Tangguh, Berdaya Saing, dan Setara 5. Pemantapan Pembangunan Manusia yang Inklusif, Tangguh, dan Responsif terhadap Tantangan Global	
2	Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi daerah, pariwisata, dan kearifan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif	1. Penguatan Fondasi Ekonomi Lokal dan Ketahanan Sektor Prioritas melalui Transformasi Ekosistem Pertanian, Infrastruktur Strategis, dan Regulasi Kelembagaan 2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Ekonomi Daerah melalui Integrasi Infrastruktur, Komunitas, dan Kearifan Lokal 3. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk serta Destinasi Ekonomi Daerah melalui Hilirisasi, Sertifikasi, dan Kolaborasi Digital 4. Transformasi Ekosistem Ekonomi Daerah melalui Penguatan Wilayah Unggulan, Klasterisasi Industri, dan Investasi Inklusif 5. Akselerasi Ekonomi Lokal Berbasis Digital dan Inklusivitas Sosial melalui Transformasi Lembaga, Promosi Investasi, dan Peningkatan Daya Saing Global	
3	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan Yang Merata di Berbagai Sektor Untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan	1. Memperkuat Fondasi Pembangunan Berkelanjutan melalui Integrasi Infrastruktur, Permukiman, dan Lingkungan Hidup berbasis Kolaborasi dan Inovasi Pembiayaan 2. Konsolidasi Infrastruktur Cerdas dan Permukiman Berkeadilan berbasis Teknologi dan Ekosistem Lingkungan yang Tangguh 3. Memperkuat Kemitraan dan Ekosistem Inklusif untuk Infrastruktur, Permukiman,	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		dan Lingkungan yang Adaptif dan Berkelanjutan 4. Transformasi Inklusif Infrastruktur, Permukiman, dan Lingkungan Berkelanjutan melalui Inovasi, Digitalisasi, dan Pemberdayaan Lokal, dan ekonomi sirkular. 5. Pemantapan Tata Kelola dan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Kolaborasi Multisektor dan Optimalisasi Potensi Lokal 6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui pembentukan BuMD/Perumda	
4	Memperkuat Desa Membangun Menuju Desa sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan Masyarakat secara Berkelanjutan serta Menjadikan Desa sebagai Entitas yang Mandiri	1. Membangun Sistem Pertanian dan Peternakan yang Tangguh, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing melalui Transformasi Ekosistem Produksi, Penguatan Kelembagaan Petani, serta Keamanan Pangan dan Biosekuriti 2. Penguatan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Lokal melalui Transformasi Kelembagaan, Tata Kelola Komunitas, dan Ekosistem Pertanian Terintegrasi Berbasis Sinergi Multisektor 3. Penguatan Daya Saing dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kawasan dan Teknologi Berkelanjutan 4. Penguatan Daya Saing Wilayah dan Komoditas Unggulan melalui Pengembangan Infrastruktur Produksi dan Branding Agroekologi Berbasis Budaya dan Ekowisata Terintegrasi 5. Percepatan Transformasi Digital Terintegrasi untuk Optimalisasi Sumber Daya Pertanian dan Peternakan, Layanan Usaha, serta Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal	
5	Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya Serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	6. Penguatan Kesetaran Gender dan Perempuan Melalui Sinergi Antar Aktor untuk Pembangunan Berkelanjutan, serta memastikan penerapan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 7. Penguatan Pemberdayaan, Perlindungan, dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah 8. Peningkatan Perlindungan, Partisipasi, dan Sinergi Gender untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		9. Penguatan Perlindungan, Kepemimpinan Perempuan, dan Kolaborasi untuk Kesetaraan Gender 10. Penguatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang Berkelanjutan dari Kekerasan, Eksploitasi, Perdagangan Manusia, dan Penipuan	
6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif	11. Meningkatkan Perencanaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Transparan dan Responsif 12. Mendorong Digitalisasi dan Memperkuat Keuangan serta Kinerja Pemerintahan 13. Meningkatkan Kepatuhan fiskal daerah, Inovasi Pelayanan, dan Profesionalitas ASN 14. Memperkuat Insentif ASN, Perizinan Terintegrasi, dan Layanan yang Inklusif dan Responsif 15. Memperkuat Pemerintahan Digital yang Aman dan Mendorong Partisipasi Publik	

Sumber: FDG. 2025

Secara spesifik penjelasan arah kebijakan setiap misi dijelaskan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Manggarai Timur yang maju, berkualitas dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Misi 1 RPJMD. Arah Kebijakan Misi 1 dirumuskan secara dinamis, menunjukkan evolusi prioritas dan pendekatan setiap tahunnya untuk memastikan adaptasi terhadap tantangan dan peluang yang berkembang. Arah kebijakan ini dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama pembangunan manusia dan akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya:

Tabel 3. 15 Arah Kebijakan Misi 1

Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Inklusif, Sehat, dan Berkeadilan melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Kearifan Lokal	Memperkuat Pembangunan manusia yang berdaya Saing Sosial dan Budaya Melalui Inklusi, Teknologi, dan Keadilan Sosial	Konsolidasi Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Manusia yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan	Integrasi Nilai Lokal dan Transformasi Digital untuk Pembangunan Manusia yang Tangguh, Berdaya Saing, dan Setara	Pemantapan Pembangunan Manusia yang Inklusif, Tangguh, dan Responsif terhadap Tantangan Global

Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025): Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Inklusif, Sehat, dan Berkeadilan melalui Kolaborasi, Inovasi, dan Kearifan Lokal

Pada tahun pertama, yaitu tahun 2025, implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, arah kebijakan difokuskan pada peletakan fondasi yang kuat untuk pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, sehat, dan

berkeadilan. Tahun pertama akan menjadi momentum krusial untuk memulai transformasi fundamental melalui pendekatan yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan kearifan lokal.

Arah kebijakan pada tahun 2025 difokuskan pada upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, inovasi teknologi, dan kolaborasi multi-stakeholder. Kabupaten Manggarai Timur sebagai bagian integral dari Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan dan peluang unik dalam pembangunan manusia. Dengan kekayaan budaya lokal yang autentik, potensi sumber daya alam yang melimpah, dan semangat gotong royong masyarakat yang kuat, kabupaten ini memiliki modal sosial yang besar untuk mewujudkan transformasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Arah kebijakan tahun pertama ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi existing, proyeksi kebutuhan masa depan, serta komitmen terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target pembangunan nasional. Pendekatan inklusif menjadi prinsip utama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan, khususnya kelompok rentan dan marjinal. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut, Arah kebijakan pada tahun pertama dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama pembangunan manusia:

- Fondasi Transformasi Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan melalui Kolaborasi, Kearifan Lokal, dan Penguatan Layanan Alternatif;
- Penguatan Sistem Kesehatan Berbasis Komunitas dan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; dan
- Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Adaptif Melalui Perlindungan Sosial, Penguatan Tenaga Kerja, dan Dukungan Rehabilitasi yang Merata.

Arah kebijakan pada tahap pertama atau tahun 2025 akan menjadi landasan strategis bagi seluruh upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Timur, dengan menitikberatkan pada kolaborasi,

inovasi, dan pemanfaatan potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, sehat, dan berkeadilan.

Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2026): Memperkuat Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing Sosial dan Budaya Melalui Inklusi, Teknologi, dan Keadilan Sosial

Memasuki tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, yakni tahun 2026, arah kebijakan akan bergeser dari peletakan fondasi menuju penguatan pembangunan manusia yang berdaya saing sosial dan budaya. Fokus utama di tahun ini adalah memperdalam integrasi inklusi, teknologi, dan keadilan sosial sebagai pilar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat identitas budaya daerah.

Arah kebijakan pada tahun ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan manusia yang berkualitas. Pembangunan manusia yang berdaya saing sosial dan budaya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang adil dan setara. Implementasi arah kebijakan memperkuat pembangunan manusia yang berdaya saing sosial dan budaya melalui inklusi, teknologi, dan keadilan sosial memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Sasaran-sasaran yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya:

- Penguatan Sistem Pendidikan Berbasis Kolaborasi, Kearifan Lokal, dan Inovasi Digital untuk Mendukung Pemerataan dan Pelestarian Budaya;
- Penguatan Sistem Kesehatan Berbasis Komunitas dan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan;
- Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Tenaga Kerja, dan Inklusi Sosial yang Berkelanjutan; dan
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Perempuan Melalui Sinergi Antar Aktor untuk Pembangunan Berkelanjutan, serta Memastikan Penerapan

Perspektif Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan tahap kedua akan menjadi fase penting dalam memantapkan pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada penguatan kapasitas, inklusi, dan pemanfaatan teknologi, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan kebudayaan daerah.

Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2027): Konsolidasi Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Manusia yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan

Pada tahun ketiga implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, yaitu tahun 2027, arah kebijakan akan memasuki fase konsolidasi. Fokus utama di tahun ini adalah memperkuat kualitas dan daya saing pembangunan manusia secara menyeluruh, dengan memastikan bahwa setiap upaya dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah peletakan fondasi di tahun pertama dan penguatan di tahun kedua, tahun ketiga akan menjadi momentum untuk memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai dan menyiapkan langkah strategis menuju capaian jangka panjang.

Arah kebijakan pada tahun ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Timur melalui berbagai strategi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pembangunan manusia yang inklusif berarti memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks Kabupaten Manggarai Timur, hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Beberapa sasaran yang diterapkan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu:

- Konsolidasi Kualitas Pendidikan yang Inklusif, Kontekstual, dan Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi untuk Mendukung Daya Saing Daerah dan Pelestarian Budaya;

- Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui Pendekatan Terpadu, Inklusif, dan Kolaboratif; dan
- Penguatan Ketahanan Sosial, Ekonomi Masyarakat, dan Pemberdayaan Kelompok Rentan melalui Pendekatan Inklusif.

Arah kebijakan tahap ketiga ini akan menjadi tahap kunci dalam mengkonsolidasi dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Timur, dengan tujuan akhir mencapai masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan memiliki daya saing berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV (Tahun 2028): Integrasi Nilai Lokal dan Transformasi Digital untuk Pembangunan Manusia yang Tangguh, Berdaya Saing, dan Setara

Memasuki tahun keempat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, yakni tahun 2028, arah kebijakan akan bergeser pada integrasi nilai lokal dan transformasi digital untuk pembangunan manusia yang tangguh, berdaya saing, dan setara. Setelah melalui fase fondasi, penguatan, dan konsolidasi, tahun ini akan menjadi titik puncak dalam menyelaraskan identitas budaya daerah dengan kemajuan teknologi, guna menciptakan sumber daya manusia yang adaptif dan kompetitif di era global.

Integrasi nilai lokal diwujudkan dengan mengarusutamakan budaya, tradisi, dan kearifan masyarakat Manggarai Timur dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Nilai-nilai ini menjadi landasan etis dan sosial untuk memperkuat karakter, solidaritas, serta ketahanan sosial masyarakat. Pada saat yang sama, transformasi digital dipercepat guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Penerapan transformasi digital juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan teknologi untuk inovasi dan pengembangan sektor-sektor strategis. Berikut adalah sasaran utama arah kebijakan pada tahun keempat:

- Konsolidasi Pendidikan Inklusif dan Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Nilai Lokal Menuju Daya Saing Global Melalui Transformasi Digital dan Kemitraan Berkelanjutan;
- Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat Melalui Pendekatan Kolaboratif, Pemberdayaan Lokal, dan Digitalisasi Layanan;
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan Perlindungan Pekerja Rentan yang Berkelanjutan; dan
- Peningkatan Perlindungan, Partisipasi, dan Sinergi Gender untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan.

Arah kebijakan tahap keempat akan menjadi penanda penting dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur, di mana nilai-nilai lokal dan kemajuan digital bersatu untuk membentuk pembangunan manusia yang tangguh, berdaya saing, dan setara, sebagai langkah menuju visi daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap V (Tahun 2029): Pemantapan Pembangunan Manusia yang Inklusif, Tangguh, dan Responsif terhadap Tantangan Global

Memasuki tahun 2029 dan terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, arah kebijakan akan berfokus pada pemantapan pembangunan manusia yang inklusif, tangguh, dan responsif terhadap tantangan global. Fase ini merupakan puncak dari seluruh upaya yang telah dilakukan sejak tahun pertama, bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan manusia di Manggarai Timur telah mencapai tingkat kematangan yang siap menghadapi dinamika dan tantangan di masa depan.

Pada tahun ini menjadi fase konsolidasi dan penguatan seluruh capaian pembangunan, dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, serta masyarakat Kabupaten Manggarai Timur siap menghadapi dinamika dan persaingan di tingkat nasional maupun global. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa sasaran utama yang diterapkan meliputi:

- Penguatan Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kolaborasi, Teknologi, dan Pendidikan Nonformal untuk Mencapai Kesetaraan dan Daya Saing Global;
- Akselerasi Pemerataan dan Transformasi Pelayanan Kesehatan Menuju Sistem Kesehatan yang Inklusif, Responsif, dan Berbasis Teknologi Kesehatan;
- Konsolidasi Pembangunan Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Kesejahteraan Berkelanjutan; dan
- Penguatan Perlindungan, Kepemimpinan Perempuan, dan Kolaborasi untuk Kesetaraan Gender.

Secara keseluruhan, arah kebijakan tahap kelima akan menjadi penutup RPJMD Kabupaten Manggarai Timur dengan fokus pada pemantapan seluruh capaian pembangunan manusia. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Manggarai Timur menjadi lebih inklusif, tangguh, dan mampu beradaptasi serta merespons berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun global, menuju visi daerah yang maju dan berkelanjutan.

2. Arah Kebijakan Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi daerah, pariwisata, dan kearifan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 dirancang sebagai peta jalan pembangunan yang berjenjang, terdiri dari lima periode fokus yang saling menguatkan. Setiap periode memiliki strategi spesifik yang secara kumulatif bertujuan untuk mencapai visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif. Selain itu setiap periode juga memiliki fokus spesifik yang menjadi fondasi bagi periode berikutnya, mengarahkan pembangunan menuju peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pengembangan ekonomi berfokus pada poin utama, yaitu:

Tabel 3. 16 Arah Kebijakan Misi 2

Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
Penguatan Fondasi Ekonomi Lokal dan Ketahanan Sektor Prioritas melalui Transformasi Ekosistem Pertanian, Infrastruktur Strategis, dan Regulasi Kelembagaan	Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Ekonomi Daerah melalui Integrasi Infrastruktur, Komunitas, dan Kearifan Lokal	Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk serta Destinasi Ekonomi Daerah melalui Hilirisasi, Sertifikasi, dan Kolaborasi Digital	Transformasi Ekosistem Ekonomi Daerah melalui Penguatan Wilayah Unggulan, Klasterisasi Industri, dan Investasi Inklusif	Akselerasi Ekonomi Lokal Berbasis Digital dan Inklusivitas Sosial melalui Transformasi Lembaga, Promosi Investasi, dan Peningkatan Daya Saing Global

Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025): Penguatan Fondasi Ekonomi Lokal dan Ketahanan Sektor Prioritas melalui Transformasi Ekosistem Pertanian, Infrastruktur Strategis, dan Regulasi Kelembagaan

Pada tahap awal ini, fokus utamanya adalah membangun landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor-sektor yang menjadi andalan. Transformasi ekosistem pertanian menjadi prioritas, yang berarti akan ada upaya modernisasi, peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi tepat guna, dan diversifikasi produk pertanian. Ini mencakup peningkatan kualitas benih, perbaikan sistem irigasi, serta pengenalan praktik pertanian berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung sektor pertanian dan konektivitas daerah akan digencarkan. Ini bisa berupa pembangunan dan perbaikan jalan desa dan kabupaten untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, serta pengembangan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan atau unit pengolahan sederhana. Terakhir, penguatan regulasi kelembagaan bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi, misalnya melalui penyederhanaan perizinan usaha di sektor pertanian atau penguatan peran kelompok tani.

Periode ini secara langsung berorientasi pada peningkatan kapasitas dan produktivitas sektor pertanian agar benar-benar menjadi penopang utama ekonomi masyarakat desa. Dengan regulasi kelembagaan yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai, diharapkan akan menarik lebih banyak investasi di sektor pertanian dan sektor pendukung lainnya.

Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2026): Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Ekonomi Daerah melalui Integrasi Infrastruktur, Komunitas, dan Kearifan Lokal

Setelah pondasi infrastruktur dan regulasi terbentuk, periode kedua bergeser pada penguatan tata kelola dan kelembagaan ekonomi yang lebih partisipatif. Ini dilakukan melalui integrasi infrastruktur yang telah dibangun dengan kebutuhan dan potensi komunitas lokal, serta selaras dengan kearifan lokal. Artinya, pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan infrastruktur secara optimal. Penguatan tata kelola ekonomi daerah akan melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi. Contohnya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kuat dan mandiri, serta fasilitasi kemitraan antara petani dengan pasar yang lebih luas.

Dengan tata kelola yang lebih baik dan pelibatan komunitas, potensi pertanian lokal dapat dikelola lebih efektif, menguatkan perannya sebagai tulang punggung ekonomi. Selain itu tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Manggarai Timur.

Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2027): Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk serta Destinasi Ekonomi Daerah melalui Hilirisasi, Sertifikasi, dan Kolaborasi Digital

Memasuki periode ketiga, fokusnya adalah meningkatkan nilai jual produk dan daya tarik destinasi ekonomi daerah. Hilirisasi menjadi kunci, yaitu proses pengolahan hasil pertanian atau komoditas lainnya menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, dari biji kopi menjadi kopi sangrai atau bubuk, atau dari hasil laut menjadi produk olahan. Sertifikasi penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan standar produk agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Sementara itu, kolaborasi digital akan dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar, mempromosikan destinasi wisata secara efektif, dan memfasilitasi transaksi ekonomi yang lebih efisien melalui platform digital.

Meningkatnya hilirisasi produk pertanian adalah tujuan inti dari periode ini, di mana produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah tetapi diolah untuk meningkatkan nilainya. Selain itu Kolaborasi digital dan promosi destinasi secara spesifik akan mendorong sektor pariwisata dan perdagangan sebagai pendorong ekonomi baru.

Arah Kebijakan Tahap IV (Tahun 2028): Transformasi Ekosistem Ekonomi Daerah melalui Penguatan Wilayah Unggulan, Klasterisasi Industri, dan Investasi Inklusif

Periode keempat menandai transformasi struktural dalam ekosistem ekonomi. Ini dilakukan dengan penguatan wilayah unggulan, yaitu fokus pada pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi spesifik yang belum optimal, misalnya pengembangan sentra produksi kopi atau sentra perikanan. Klasterisasi industri akan mendorong pengembangan industri-industri yang saling terkait dalam satu wilayah geografis untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan daya saing bersama. Terakhir, investasi inklusif akan didorong, yaitu investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi

masyarakat lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan.

Klasterisasi industri dan penguatan wilayah unggulan dapat memfasilitasi hilirisasi produk pertanian secara lebih terstruktur dan efisien. Dengan adanya wilayah unggulan dan klaster industri, Manggarai Timur menjadi lebih menarik bagi investor karena potensi pertumbuhan yang jelas dan terorganisir.

Arah Kebijakan Tahap V (Tahun 2029): Akselerasi Ekonomi Lokal Berbasis Digital dan Inklusivitas Sosial melalui Transformasi Lembaga, Promosi Investasi, dan Peningkatan Daya Saing Global

Periode terakhir ini adalah tentang akselerasi pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan potensi digital dan memastikan inklusivitas. Akselerasi ekonomi lokal berbasis digital berarti pemanfaatan teknologi digital secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan e-commerce untuk produk UMKM, layanan keuangan digital, dan inovasi berbasis teknologi lainnya. Inklusivitas sosial tetap menjadi perhatian utama, memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Transformasi lembaga akan terus dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, kebutuhan pasar, dan dinamika global. Terakhir, promosi investasi yang agresif dan peningkatan daya saing global akan menjadi fokus untuk menarik lebih banyak modal, teknologi, dan menjadikan produk serta destinasi Manggarai Timur dikenal di kancah internasional.

Digitalisasi dapat mempercepat proses pemasaran dan distribusi produk hilirisasi, menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian promosi investasi dan daya saing global akan secara langsung mendorong pertumbuhan pariwisata dan perdagangan. Transformasi lembaga dan promosi investasi yang agresif adalah strategi kunci untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing investasi daerah.

3. Arah Kebijakan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan yang Merata di Berbagai Sektor Untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur periode 2025–2029 menetapkan arah pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan kolaboratif, pemanfaatan teknologi inovatif, serta pelestarian nilai-nilai lokal, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas permukiman, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Arah kebijakan infrastruktur dan lingkungan hidup disusun secara adaptif dari tahun ke tahun, mencerminkan respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan Infrastruktur dan lingkungan hidup berfokus pada poin utama, yaitu:

Tabel 3. 17 Arah Kebijakan Misi 3

Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
Memperkuat Fondasi Pembangunan Berkelanjutan melalui Integrasi Infrastruktur, Permukiman, dan Lingkungan Hidup berbasis Kolaborasi dan Inovasi pengelolaan dan Pembiayaan	Konsolidasi Infrastruktur Cerdas dan Permukiman Berkeadilan berbasis Teknologi dan Ekosistem Lingkungan yang Tangguh	Memperkuat Kemitraan dan Ekosistem Inklusif untuk Infrastruktur, Permukiman, dan Lingkungan yang Adaptif dan Berkelanjutan	Transformasi Inklusif Infrastruktur, Permukiman, dan Lingkungan Berkelanjutan melalui Inovasi, Digitalisasi, dan Pemberdayaan Lokal, dan ekonomi sirkular.	Pemantapan Tata Kelola dan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Kolaborasi Multisektor dan Optimalisasi Potensi Lokal

Arah Kebijakan Periode I (Tahap 2025):

Tahun pertama Implementasi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, arah kebijakan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup berfokus

pada memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan melalui integrasi sistem infrastruktur, permukiman, dan pengelolaan lingkungan yang responsif terhadap tantangan zaman. Tahun pertama ini menjadi momen strategis untuk membangun sistem dasar yang inklusif dan tangguh, dengan menekankan kolaborasi lintas sektor, inovasi dalam pembiayaan, serta pemanfaatan potensi lokal dan kearifan wilayah.

Kebijakan tahun pertama dirancang untuk mewujudkan tata kelola infrastruktur dan lingkungan yang adaptif dan partisipatif, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kabupaten Manggarai Timur sebagai bagian dari kawasan timur Indonesia memiliki karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan budaya lokal yang khas. Hal ini menjadi kekuatan dalam membangun sistem infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berakar pada konteks lokal dan mendukung keberlanjutan ekologis.

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan dinamika pembangunan ke depan, arah kebijakan pada tahun pertama difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu; Pertama, memperkuat sistem transportasi dan infrastruktur dasar yang modern dan berkelanjutan melalui tata kelola terpadu, kolaborasi pendanaan, dan optimalisasi perencanaan yang berbasis potensi lokal; Kedua, mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui sinergi multipihak dan partisipasi aktif masyarakat guna menjaga keseimbangan ekologi serta memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2026):

Penerapan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 memasuki tahun kedua difokuskan pada fase konsolidasi untuk memperkuat pondasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Tahun ini menjadi momentum penting dalam mendorong integrasi dan optimalisasi pelayanan infrastruktur melalui pendekatan cerdas, berkeadilan, dan berbasis ekosistem

lingkungan yang tangguh. Konsolidasi dilakukan melalui penguatan sinergi antar sektor, pembentukan BUMD/Perumda, pemanfaatan teknologi, dan penguatan tata kelola berbasis data. Pemerintah daerah mendorong integrasi lintas sektor dan pemanfaatan inovasi digital dalam tata kelola infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan mobilitas, pertumbuhan wilayah, serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan, konsolidasi infrastruktur dan lingkungan dilakukan melalui kemitraan yang inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Arah kebijakan tahun kedua difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu; Pertama, Memantapkan infrastruktur wilayah, layanan transportasi yang modern dan berkelanjutan, serta tata kelola permukiman melalui sinergi multi sektor, investasi, teknologi, dan perencanaan terpadu guna mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, dan penyediaan rumah layak huni secara berkeadilan; Kedua, Meningkatkan keberlanjutan lingkungan melalui restorasi dan konservasi infrastruktur berbasis komunitas, dengan pemanfaatan teknologi monitoring dan integrasi data lingkungan yang kuat, guna memperkuat kapasitas pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara efektif dan berbasis data.

Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2027):

Pada tahun ketiga, penerapan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2029 difokuskan pada memperkuat kemitraan dan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun ini menandai pergeseran menuju model pembangunan yang lebih kolaboratif, dengan menekankan peran strategis sektor swasta, komunitas, dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung infrastruktur, permukiman, dan pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah.

Kemitraan lintas sektor dan tata kelola yang terintegrasi menjadi pondasi utama untuk memperluas cakupan pelayanan publik, memperkuat adaptasi iklim dalam sistem permukiman, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Di sisi lain, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi semakin diutamakan dalam pengelolaan lingkungan, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis. sasaran arah kebijakan tahun ketiga terdiri atas; Pertama, Mendorong kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta melalui optimalisasi pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan skema pendanaan kolaboratif untuk memperkuat tata kelola transportasi, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penyediaan layanan publik dan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui integrasi pengelolaan air, sanitasi, dan kebijakan lintas pemerintahan; Kedua, Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan bank sampah, pemanfaatan subsidi pusat, serta integrasi teknologi dan infrastruktur monitoring lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV (Tahun 2028):

Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029, arah kebijakan difokuskan pada percepatan transformasi inklusif di sektor infrastruktur, permukiman, dan lingkungan hidup. Transformasi ini diarahkan untuk memperkuat sistem yang berkelanjutan melalui pemanfaatan inovasi, digitalisasi, serta pemberdayaan potensi lokal dan ekonomi sirkular. Tahun ini menjadi titik balik strategis dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya merespons kebutuhan jangka pendek tetapi juga membentuk fondasi jangka panjang yang tangguh, adaptif, dan inklusif.

Pemerintah daerah mendorong penerapan teknologi dan integrasi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, memperluas akses

layanan dasar, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat lokal dan pelibatan pelaku ekonomi berbasis komunitas menjadi instrumen utama dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, tekanan ekologis, dan ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar. Adapun sasaran tahun keempat, yaitu; pertama, Mewujudkan infrastruktur dan transportasi yang tangguh, modern, dan inklusif serta memantapkan permukiman berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui percepatan investasi, transformasi digital, penyediaan layanan dasar terpadu, dan penguatan kolaborasi multipihak guna meningkatkan daya saing wilayah dan kualitas hidup masyarakat; kedua, Mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dan konservasi lingkungan yang berbasis pada ekonomi sirkular lokal, dengan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung restorasi, konservasi, dan pemulihan infrastruktur lingkungan secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap V (Tahun 2029):

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029 menjadi fase pemantapan dalam mewujudkan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada penguatan tata kelola, efisiensi pembangunan, dan optimalisasi potensi lokal sebagai bagian dari upaya mengonsolidasikan capaian pembangunan yang telah dirintis sejak tahun pertama. Pendekatan kolaboratif lintas sektor tetap menjadi landasan utama, dengan mengedepankan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan serta sinergi antarlembaga.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan sistem pembangunan infrastruktur yang terencana, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan. Pada saat yang

sama, aspek keberlanjutan lingkungan diperkuat melalui strategi pengelolaan berbasis data dan teknologi, serta pelibatan komunitas dalam perlindungan dan pemantauan kualitas lingkungan. Dengan demikian, tahun kelima bukan hanya menjadi akhir dari siklus perencanaan jangka menengah, tetapi juga menjadi dasar transisi menuju pembangunan jangka panjang yang inklusif. Arah kebijakan tahun kelima difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu: Pertama, Memantapkan transportasi modern dan berkelanjutan serta mendorong infrastruktur dasar yang efisien dan berbasis potensi lokal, melalui tata kelola yang kuat, kemitraan multipihak, dan perencanaan lingkungan terpadu guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi layanan, dan kualitas pelayanan publik; Kedua, Memperkuat perlindungan lingkungan melalui kolaborasi multipihak dan pemberdayaan komunitas, serta mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi monitoring lingkungan untuk pengelolaan berbasis data yang efektif dan berkelanjutan.

4. Arah Kebijakan Memperkuat Desa Membangun Menuju Desa sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan Masyarakat secara Berkelanjutan serta Menjadikan Desa sebagai Entitas yang Mandiri

Misi "Memperkuat desa membangun menuju desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan Masyarakat secara berkelanjutan serta menjadikan desa sebagai entitas yang mandiri" dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 adalah fondasi yang ambisius untuk pembangunan desa yang holistik dan berkesinambungan. Arah kebijakan yang terbagi dalam lima periode menunjukkan sebuah roadmap yang progresif, bergerak dari penguatan sektor dasar menuju transformasi digital dan daya saing yang lebih tinggi.

Arah kebijakan ini menggambarkan evolusi pembangunan desa yang terencana dan bertahap, dimulai dari penguatan fundamental pertanian dan peternakan, kemudian merambah pada penguatan ekonomi lokal yang lebih

luas, peningkatan nilai tambah, branding wilayah, hingga puncaknya pada adopsi teknologi digital untuk optimasi seluruh sektor.

Tabel 3. 18 Arah Kebijakan Misi 4

Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
Membangun Sistem Pertanian dan Peternakan yang Tangguh, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing melalui Transformasi Ekosistem Produksi, Penguatan Kelembagaan Petani, serta Keamanan Pangan dan Biosekuriti	Penguatan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Lokal melalui Transformasi Kelembagaan, Tata Kelola Komunitas, dan Ekosistem Pertanian Terintegrasi Berbasis Sinergi Multisektor	Penguatan Daya Saing dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kawasan dan Teknologi Berkelanjutan	Penguatan Daya Saing Wilayah dan Komoditas Unggulan melalui Pengembangan Infrastruktur Produksi dan Branding Agroekologi Berbasis Budaya dan Ekowisata Terintegrasi	Percepatan Transformasi Digital Terintegrasi untuk Optimalisasi Sumber Daya Pertanian dan Peternakan, Layanan Usaha, serta Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal

Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025):

Periode awal ini berfokus pada penguatan fundamental pertanian dan peternakan. Ini adalah langkah yang sangat strategis mengingat Manggarai Timur dikenal sebagai wilayah agraris. Fokus pada "sistem pertanian dan peternakan yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing" menunjukkan komitmen untuk tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kemampuan bersaing di pasar. Transformasi ekosistem produksi kemungkinan besar melibatkan penerapan praktik pertanian modern, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan diversifikasi komoditas. Penguatan kelembagaan petani, seperti kelompok tani atau koperasi, sangat krusial untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Sementara itu, "keamanan pangan dan biosekuriti" adalah jaminan dasar untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap ancaman hama penyakit. Singkatnya, periode ini adalah tentang membangun landasan produksi yang kokoh dan aman.

Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2026):

Setelah fondasi produksi kuat, Periode II bergeser pada penguatan kemandirian dan ketahanan ekonomi lokal. Ini adalah tahap di mana desa tidak hanya memproduksi, tetapi juga mulai mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonominya sendiri. "Transformasi kelembagaan" bisa berarti penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau lembaga ekonomi desa lainnya agar lebih profesional dan adaptif. "Tata kelola komunitas" menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi desa. Konsep "ekosistem pertanian terintegrasi berbasis sinergi multisektor" menunjukkan pendekatan holistik, di mana pertanian tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sektor lain seperti pengolahan hasil, pariwisata, atau bahkan energi terbarukan di tingkat lokal. Pada periode ini, desa mulai berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.

Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2027):

Periode III menandai langkah maju dalam daya saing dan penciptaan nilai tambah. Tidak cukup hanya memproduksi, tetapi juga mengolah dan memasarkan produk dengan nilai lebih tinggi. "Pembangunan infrastruktur terintegrasi" adalah kunci di sini, meliputi jalan usaha tani, irigasi, fasilitas pasca panen, hingga sentra pengolahan produk. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi. "Pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan dan teknologi berkelanjutan" menunjukkan pemikiran strategis untuk mengidentifikasi komoditas atau potensi unggulan di setiap kawasan desa, lalu mengembangkannya dengan teknologi yang ramah lingkungan. Ini berarti produk desa tidak hanya melimpah, tetapi juga berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Arah Kebijakan Tahap IV (Tahun 2028):

Pada Periode IV, fokus bergeser pada penguatan daya saing wilayah dan komoditas unggulan melalui *branding* dan ekowisata terintegrasi. Setelah produk memiliki nilai tambah, langkah selanjutnya adalah menciptakan identitas dan daya tarik. "Pengembangan infrastruktur produksi" akan terus ditingkatkan untuk mendukung volume dan kualitas. Namun, yang paling signifikan adalah "branding agroekologi berbasis budaya dan ekowisata terintegrasi". Ini berarti Manggarai Timur akan mempromosikan produk-produknya tidak hanya berdasarkan kualitas, tetapi juga cerita di baliknya, yaitu praktik pertanian yang ramah lingkungan (agroekologi) dan kearifan lokal yang melekat. Integrasi dengan ekowisata akan menciptakan pengalaman holistik bagi pengunjung dan membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat desa. Pada tahap ini, desa-desa Manggarai Timur mulai dikenal luas karena keunikan produk dan keindahan alamnya.

Arah Kebijakan Tahap V (Tahun 2029):

Puncak dari arah kebijakan ini adalah Periode V, yaitu percepatan transformasi digital terintegrasi. Ini adalah langkah adaptif terhadap era revolusi industri 4.0. yaitu "Optimalisasi sumber daya pertanian dan peternakan" akan dilakukan melalui teknologi informasi, misalnya smart farming, pemantauan lahan menggunakan drone, atau manajemen stok ternak berbasis data. "Layanan usaha" akan dipercepat dan dipermudah melalui platform digital, seperti e-commerce untuk pemasaran produk atau aplikasi untuk akses informasi pertanian. Pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk "peningkatan daya saing ekonomi lokal" secara menyeluruh. Periode ini menggambarkan desa-desa Manggarai Timur yang modern, efisien, dan terhubung secara digital, mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

5. Arah Kebijakan Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur periode 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang dilandasi budaya serta penguatan

peran perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan misi kelima RPJMD. Arah kebijakan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk membangun masyarakat yang berkarakter, beridentitas, dan berkeadilan, di mana nilai-nilai budaya menjadi fondasi utama pembangunan, serta perempuan dan anak mendapatkan perlindungan penuh dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkembang. Arah kebijakan ini akan menjadi landasan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan misi kelima dibagi berdasarkan sasaran-sasaran utama dan akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya.

Tabel 3. 19 Arah Kebijakan Misi 5

Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
Penguatan Kesetaran Gender dan Perempuan Melalui Sinergi Antar Aktor untuk Pembangunan Berkelanjutan, serta memastikan penerapan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Penguatan Pemberdayaan, Perlindungan, dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Peningkatan Perlindungan, Partisipasi, dan Sinergi Gender untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan	Penguatan Perlindungan, Kepemimpinan Perempuan, dan Kolaborasi untuk Kesetaraan Gender	Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berkelanjutan dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan penipuan

Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025): Penguatan Kesetaraan Gender dan Perempuan Melalui Sinergi Antar Aktor untuk Pembangunan Berkelanjutan, serta Memastikan Penerapan Perspektif Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029, yaitu tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan meletakkan fondasi kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Fokus utama

pada tahap I ini adalah membangun sinergi yang kokoh antar berbagai pemangku kepentingan (multi-aktor) dan memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara sistematis dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Melalui fondasi yang kuat di tahap I ini, Kabupaten Manggarai Timur akan memiliki kerangka kerja yang solid dan kolaborasi yang sinergis untuk mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender dan memberdayakan perempuan di tahun-tahun berikutnya.

Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2026): Penguatan Pemberdayaan, Perlindungan, dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Setelah meletakkan fondasi sinergi antar aktor dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2026 fokus Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan bergeser pada penguatan konkret dalam pemberdayaan, perlindungan dan peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan daerah. Periode ini akan menjadi tahapan implementasi yang lebih intensif dari kebijakan dan program yang telah berperspektif gender.

Tahap II pada tahun 2026 akan menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menerjemahkan kebijakan kesetaraan gender menjadi program aksi yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan perempuan, meningkatkan daya mereka, dan memastikan mereka menjadi subjek aktif dalam pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2027): Peningkatan Perlindungan, Partisipasi, dan Sinergi Gender untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan memperdalam dan memperluas upaya yang telah dibangun di periode sebelumnya. Fokus pada tahun 2027 adalah mengintegrasikan secara lebih kuat perlindungan, partisipasi, dan sinergi

gender untuk tidak hanya memberdayakan perempuan, tetapi juga secara khusus menjangkau dan melindungi kelompok rentan lainnya. Periode ini menekankan pada pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik.

Tahap III akan menandai langkah maju Kabupaten Manggarai Timur dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif, di mana tidak ada seorang pun tertinggal, dan setiap warga negara, terutama perempuan dan kelompok rentan, memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan.

Arah Kebijakan Tahap IV (Tahun 2028): Penguatan Perlindungan, Kepemimpinan Perempuan, dan Kolaborasi untuk Kesetaraan Gender

Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan memasuki fase penguatan dan penegasan. Fokus pada tahun 2028 adalah memantapkan sistem perlindungan yang telah terbangun, mendorong kepemimpinan perempuan di berbagai tingkatan, serta memperluas dan mendalamkan kolaborasi lintas sektor dan multi-aktor untuk mencapai kesetaraan gender yang hakiki. Ini adalah fase di mana dampak nyata dari kebijakan dan program sebelumnya mulai terlihat dan diperkuat.
Tahap IV pada tahun 2028 akan menjadi momentum bagi Kabupaten Manggarai Timur untuk menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan, dengan perempuan yang berdaya, terlindungi, dan menjadi pemimpin yang berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Arah Kebijakan Tahap V (Tahun 2029): Penguatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang Berkelanjutan dari Kekerasan, Eksploitasi, Perdagangan Manusia, dan Penipuan

Memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2025-2029, yakni tahun 2029, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan memfokuskan upaya pada pemantapan dan keberlanjutan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan

manusia, dan penipuan. Periode ini adalah puncak dari seluruh upaya yang telah dilakukan, dengan tujuan membangun masyarakat yang benar-benar aman, responsif, dan memberdayakan, sehingga perempuan dan anak dapat hidup bebas dari rasa takut dan mencapai potensi penuh mereka.

Pada tahap terakhir ini, Kabupaten Manggarai Timur diharapkan akan mencapai kondisi di mana perempuan dan anak tidak hanya terlindungi, tetapi juga merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan penuh untuk berkontribusi pada pembangunan daerah, sebagai wujud nyata dari visi Manggarai Timur yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

6. Arah Kebijakan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif

Dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Transparan dan Responsif. Arah kebijakan ini disusun secara bertahap dan berkelanjutan selama periode RPJMD 2025–2029. Arah kebijakan ini juga menjadi panduan strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan digitalisasi, tuntutan efisiensi pelayanan publik, serta kebutuhan akan birokrasi yang berintegritas, transparan dan responsif. Berikut ini adalah tabel arah kebijakan pembangunan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menurut periode pelaksanaan:

Tabel 3. 20 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 6

Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Periode V
Meningkatkan Perencanaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Responsif	Mendorong Digitalisasi dan Memperkuat Keuangan serta Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan Kepatuhan fiskal daerah, Inovasi Pelayanan, dan Profesionalitas ASN	Memperkuat Insentif ASN, Perizinan Terintegrasi, dan Layanan yang Inklusif dan Responsif	Memperkuat Pemerintahan Digital yang Aman dan Mendorong Partisipasi Publik

Arah kebijakan yang tercantum dalam Tabel 3.X tersebut disusun secara bertahap sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Setiap periode memiliki fokus strategis yang saling melengkapi dan memperkuat, sehingga membentuk kesinambungan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan responsif. Penjabaran arah kebijakan berdasarkan masing-masing periode disampaikan dalam uraian berikut.

Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025): Meningkatkan Perencanaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan dan Responsif

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029, arah kebijakan diarahkan pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan responsif. Tata kelola yang baik menjadi landasan penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjamin kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Arah kebijakan ini difokuskan untuk memperbaiki proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang lebih sinkron, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan tantangan koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, serta keterbatasan sistem informasi, Kabupaten Manggarai Timur memerlukan pendekatan strategis yang holistik dan berbasis hasil.

Sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif dan tata kelola digital yang inklusif, arah kebijakan tahun pertama ini ditekankan pada upaya strategi berikut:

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah, agar setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan selaras dengan arah strategis nasional dan kebutuhan daerah;
- Meningkatkan Tata Kelola dan Kelembagaan Pengelolaan Aset dan Retribusi Daerah, guna memastikan efisiensi, transparansi, dan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Responsif, dan Partisipatif, sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga pemerintah;
- Meningkatkan Kualitas Data melalui Penyelenggaraan Statistik Sektoral, untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Arah kebijakan ini menjadi kerangka awal dalam mendorong reformasi birokrasi di level lokal dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan melayani.

Arah Kebijakan Tahap II (Tahun 2026): Mendorong Digitalisasi dan Memperkuat Keuangan serta Kinerja Pemerintahan

Dalam tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029, arah kebijakan diarahkan pada percepatan transformasi digital dan penguatan kapasitas fiskal serta tata kelola kinerja pemerintahan yang adaptif dan responsif. Digitalisasi diposisikan sebagai enabler utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, serta mampu menjawab tantangan dinamis di era disrupsi dan krisis multidimensi.

Penguatan ini tidak hanya menyasar aspek teknologi, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, sistem pengawasan, serta kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi berbagai risiko. Strategi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pemerintah daerah tetap tangguh dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi. Arah kebijakan tahun kedua ini difokuskan pada beberapa strategi berikut:

- Meningkatkan Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan, untuk mempercepat efisiensi kerja birokrasi dan mempermudah akses layanan publik secara daring;
- Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, sebagai upaya memastikan akuntabilitas dan hasil pembangunan yang terukur;

- Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, guna memperluas ruang fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan;
- Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Ketertiban Hukum di Masyarakat, sebagai prasyarat berlangsungnya pemerintahan dan pembangunan yang aman;
- Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola Situasi Krisis dan Risiko Daerah, untuk memperkuat daya lenting institusi terhadap bencana dan disrupsi;
- Meningkatkan Kesiapan Operasional Pemerintah Daerah dalam Menanggapi Ancaman dan Gangguan Layanan Publik, guna menjaga kontinuitas pelayanan;
- Meningkatkan Peran Media dan Komunikasi dalam Mendukung Pelayanan Publik, sebagai kanal untuk memperluas informasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan yang cerdas, tangguh, dan proaktif dalam melayani masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap III (Tahun 2027): Meningkatkan Kepatuhan Fiskal Daerah, Inovasi Pelayanan, dan Profesionalitas ASN

Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029, arah kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas layanan publik yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan fiskal daerah, profesionalitas ASN, serta penguatan inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik. Tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan birokrasi mampu menjadi motor penggerak pelayanan yang responsif, adil, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Strategi yang ditempuh tidak hanya menekankan pada peningkatan penerimaan asli daerah, tetapi juga memperkuat kultur inovatif di lingkungan pemerintahan dan membangun konektivitas yang kuat antara pemerintah dan

masyarakat. Partisipasi warga, terutama kelompok rentan, menjadi aspek penting dalam arah kebijakan ini. Arah kebijakan tahun ketiga dirinci ke dalam beberapa strategi, yaitu:

- Meningkatkan Kepatuhan dan Aksesibilitas Pembayaran Pajak oleh Masyarakat, guna memperluas basis penerimaan daerah dan menciptakan kesadaran fiskal publik yang berkeadilan;
- Meningkatkan Inovasi Daerah untuk Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan, sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan lokal dan peningkatan kualitas pelayanan;
- Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan menekankan pada peningkatan kompetensi, etika pelayanan, dan akuntabilitas kinerja;
- Meningkatkan Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan, melalui pendekatan kolaboratif yang mendorong keterlibatan warga dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan;
- Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang Responsif, untuk menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berbasis teknologi;
- Meningkatkan Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan, agar tidak ada warga yang tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan.

Dengan pendekatan ini, Kabupaten Manggarai Timur diharapkan dapat memperkuat pondasi pelayanan publik yang lebih manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Arah Kebijakan Tahap IV (Tahun 2028): Memperkuat Insentif ASN, Perizinan Terintegrasi, dan Layanan yang Inklusif dan Responsif

Memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029, arah kebijakan difokuskan pada penguatan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) berkinerja tinggi serta peningkatan efisiensi

pelayanan publik melalui integrasi sistem perizinan yang adaptif dan responsif. Tahun ini diarahkan sebagai fase konsolidasi kinerja pemerintahan yang menekankan penghargaan terhadap prestasi ASN dan penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan perizinan.

Tantangan dalam tata kelola pemerintahan menuntut pemerintah daerah untuk membangun mekanisme penghargaan yang adil dan berbasis kinerja. Di saat yang sama, kebutuhan akan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan terintegrasi menjadi salah satu penentu utama iklim investasi dan pelayanan publik yang inklusif. Arah kebijakan ini dirumuskan ke dalam dua strategi:

- Meningkatkan Sistem Penghargaan dan Insentif bagi ASN Berkinerja Tinggi, untuk mendorong budaya kerja berbasis prestasi, meningkatkan motivasi, dan memperkuat profesionalitas birokrasi daerah;
- Meningkatkan Efisiensi dan Integrasi Pelayanan Perizinan Daerah, melalui digitalisasi layanan, pemangkasan proses birokrasi, dan perluasan jangkauan layanan hingga ke tingkat lokal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas kinerja ASN serta percepatan layanan publik yang selaras dengan prinsip inklusivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Arah Kebijakan Tahap V (Tahun 2029): Memperkuat Pemerintahan Digital yang Aman dan Mendorong Partisipasi Publik

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025–2029 difokuskan pada penguatan sistem pemerintahan digital yang aman, inklusif, dan terpercaya sebagai penutup dari siklus perencanaan lima tahunan. Pengembangan pemerintahan digital yang aman bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perlindungan data, integritas sistem, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital.

Dalam era disrupsi dan kompleksitas tata kelola modern, keberhasilan digitalisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh keamanan sistem dan

keterlibatan publik yang aktif. Oleh karena itu, pada fase ini pemerintah daerah menekankan pembangunan sistem digital yang tangguh terhadap ancaman siber dan sekaligus inklusif terhadap kelompok rentan. Fokus arah kebijakan ini meliputi:

- Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan yang Inklusif dan Terintegrasi, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan merasakan manfaat digitalisasi layanan pemerintah secara adil dan merata;
- Meningkatkan Keamanan Digital dan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Pemerintahan, dengan memperkuat sistem perlindungan data, mengedukasi masyarakat terkait literasi digital, serta membangun sistem pengaduan dan partisipasi daring yang responsif.

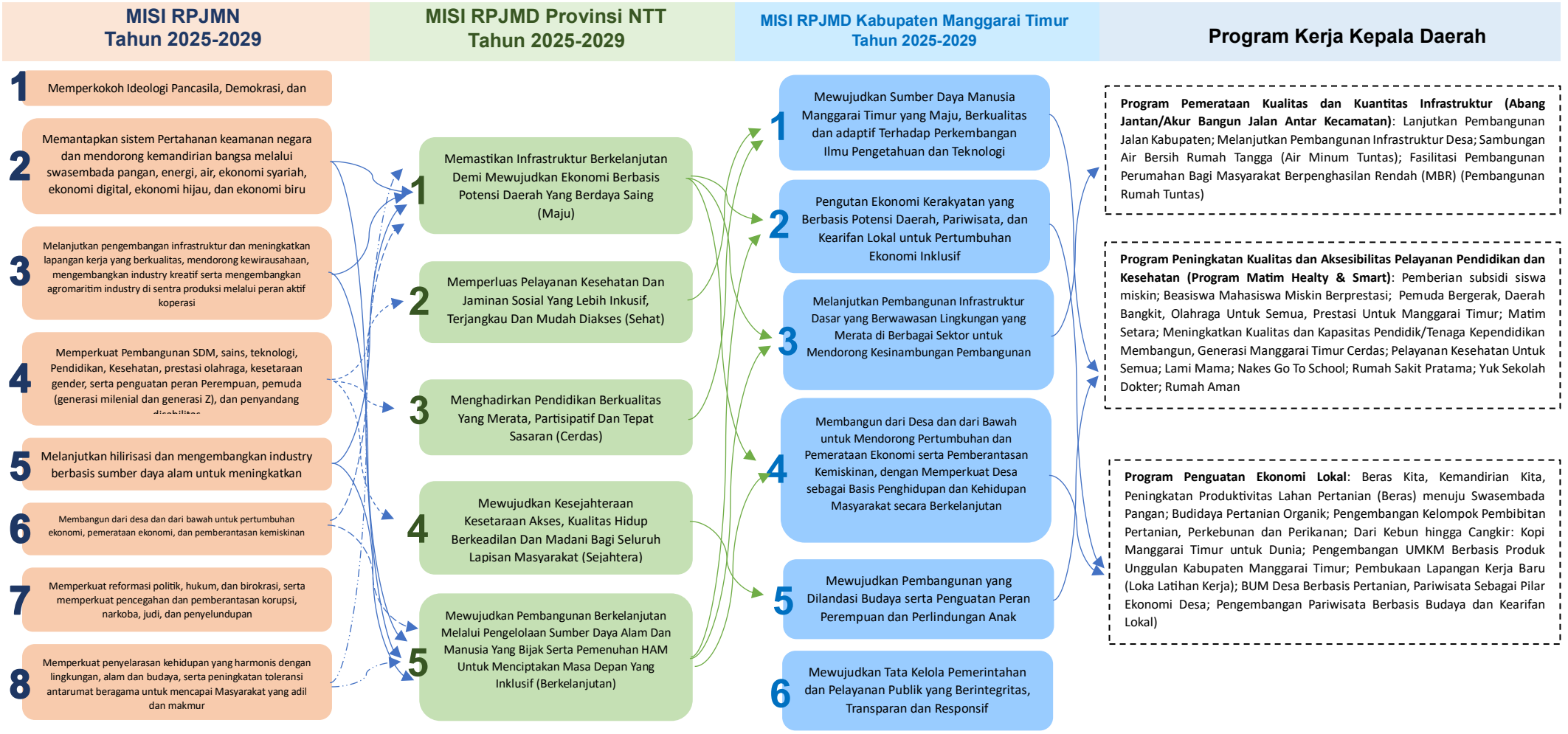
Dengan arah kebijakan ini, Kabupaten Manggarai Timur diharapkan mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan, aman, dan berbasis kepercayaan, sebagai pondasi menuju tata kelola masa depan yang lebih terbuka dan adaptif.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program kerja unggulan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai bentuk konkret dari implementasi visi "Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan" (MAMA SEBER). Kepala Daerah merumuskan sejumlah program kerja strategis sebagai implementasi nyata dari arah pembangunan yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai fondasi pembangunan. Melalui penguatan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dan kearifan lokal, program kerja ini menjadi instrumen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang

terpadu dan berkeadilan. Program-program ini disusun secara sinergis dan selaras dengan misi pembangunan nasional (RPJMN) dan misi Pemerintah Provinsi NTT, guna memastikan adanya kesinambungan arah pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pemetaan keterkaitan antarmisi dan program kerja unggulan, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, pembangunan desa dari bawah, perlindungan sosial, hingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan pendekatan tersebut, program kerja unggulan ini diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Adapun pemetaan program kerja unggulan Kepala Daerah dalam mendukung visi MAMA SEBER disajikan sebagai berikut.

Gambar 3. 2 Program Kerja Unggulan Kepala Daerah



Dalam upaya mewujudkan Visi "Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan", Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan mengimplementasikan serangkaian program prioritas daerah selama periode 2025-2029. Program prioritas daerah Kabupaten Manggarai Timur periode 2025-2029 berfokus pada pembangunan yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama meliputi peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Program-program ini akan menjadi landasan utama bagi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk menjawab permasalahan krusial dan memastikan pemerataan akses, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Arah pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025–2029 difokuskan pada dua poros utama, yakni: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Fokus ini dirumuskan berdasarkan hasil kajian dan analisis berbasis data, termasuk pemetaan program prioritas pembangunan, hasil analisis prioritas pembangunan yang disusun melalui metode penilaian pakar berbasis pendekatan multi-kriteria, serta kajian Produk Unggulan Daerah (PUD).

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang paling mendesak meliputi: rendahnya kualitas infrastruktur dasar (terutama jalan, irigasi, dan transportasi antarwilayah), stagnasi sektor pertanian, belum optimalnya layanan air bersih dan sanitasi, minimnya diversifikasi pangan, serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat terbatasnya tenaga medis, layanan dasar, dan sarana-prasarana kesehatan. Temuan ini menguatkan simpul masalah strategis yang dihadapi daerah, yakni: rendahnya kualitas SDM dan tingginya tingkat kemiskinan sebagai akibat dari keterbatasan akses layanan dasar serta rendahnya produktivitas ekonomi lokal.

Persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, ketimpangan antarwilayah, serta lemahnya dukungan terhadap sektor unggulan daerah membentuk siklus permasalahan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, intervensi pembangunan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk memutus siklus tersebut melalui program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pembangunan infrastruktur diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai *enabler*—penopang utama untuk mewujudkan dua tujuan besar pembangunan daerah: peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan energi diarahkan untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, menurunkan prevalensi stunting dan penyakit berbasis lingkungan, serta mendukung efisiensi biaya distribusi komoditas pertanian dan produk UMKM.

Selaras dengan itu, hasil kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) menetapkan bahwa arah pengembangan ekonomi difokuskan pada sektor-sektor berbasis potensi lokal, khususnya sektor pertanian terutama sub-subsektor tanaman pangan dan perkebunan, serta subsektor hortikultura dan peternakan lokal. Pengembangan sektor-sektor tersebut memerlukan dukungan lintas sektor yang terintegrasi, mencakup: infrastruktur fisik dan digital seperti jalan produksi, irigasi, listrik, dan jaringan internet desa; dukungan ekonomi melalui industri pengolahan, distribusi, agrowisata, serta akses pembiayaan dan asuransi usaha tani; penguatan SDM melalui pendidikan vokasi dan layanan kesehatan dasar; serta tata kelola yang akuntabel melalui SPBE dan perencanaan partisipatif untuk memastikan efektivitas pelayanan publik pertanian di tingkat lokal.

Dengan demikian, sasaran program prioritas diarahkan dengan kerangka berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil;

2. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan dan UMKM berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas infrastruktur dasar

Dalam mendukung ketiga hal tersebut, langkah-langkah yang menjadi sasaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian diarahkan melalui:

a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas dan konektivitas antarwilayah;
b. Mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat;
c. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis keluarga;
d. Mengembangkan ekosistem inovasi daerah yang mendukung hilirisasi produk unggulan dan penciptaan lapangan kerja.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini mengalami kesenjangan layanan dasar. Upaya ini akan didukung oleh sejumlah langkah strategis, antara lain:

a) peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, dan sistem transportasi lokal yang membuka aksesibilitas serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
b) penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif agar penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dapat dikelola secara adaptif dan akuntabel;
c) penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis keluarga, termasuk melalui peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak yang secara signifikan berdampak terhadap penurunan stunting dan penyakit berbasis lingkungan; serta

d) pengembangan ekosistem inovasi daerah yang mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk sistem informasi gizi keluarga dan deteksi dini masalah tumbuh kembang anak.

Kedua, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan dan UMKM berbasis potensi lokal, khususnya di subsektor pertanian—terutama sub-subsektor tanaman pangan dan perkebunan, serta subsektor hortikultura dan peternakan lokal. Fokus pengembangan UMKM diarahkan pada UMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi daya saing di pasar lokal maupun regional. Untuk mendorong keberhasilan transformasi ekonomi ini, langkah-langkah strategis yang akan ditempuh meliputi:

a) peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi pedesaan, seperti akses jalan produksi, irigasi pertanian, sentra pascapanen, pasar lokal, dan fasilitas penyimpanan yang mendukung efisiensi produksi dan distribusi komoditas unggulan;
b) penguatan tata kelola sektor ekonomi, termasuk penyederhanaan perizinan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, serta penguatan kemitraan antara pelaku UMKM dan jejaring pasar serta pembentukan BUMD/perumda;
c) pengurangan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan akses pembiayaan inklusif, termasuk fasilitasi program kewirausahaan produktif dan intervensi ekonomi yang terhubung dengan upaya perbaikan gizi keluarga dalam rangka penanggulangan stunting melalui penguatan pendapatan rumah tangga miskin; serta
d) pengembangan ekosistem inovasi ekonomi lokal yang mendorong hilirisasi hasil pertanian dan peternakan, adopsi teknologi pengolahan berbasis kearifan lokal, dan penciptaan lapangan kerja baru melalui inkubasi usaha, pelatihan vokasional, dan transformasi digital UMKM.

Strategi ini dikembangkan secara kolaboratif berdasarkan prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Program prioritas dalam RPJMD ini diharapkan menjadi instrumen transformasi pembangunan daerah menuju pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tabel 3. 21 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
MANGGARAI TIMUR MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN (MAMA SEBER) - Mewujudkan Sumber Daya Manusia Manggarai Timur Yang Maju, Berkualitas dan Adaptif Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Daerah, Pariwisata, dan Kearifan Lokal Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan Yang Merata di Berbagai	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul, Merata, Adaptif dan Berbudaya			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	PROGRAM MATIM HEALTY & SMART	r		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)				
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Unggul		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))				
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)		Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pendidik/tenaga Kependidikan Membangun, Generasi Manggarai Timur Cerdas	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)			2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
Sektor Untuk Mendorong Kesinambungan Pembangunan - Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Serta Pemberantasan Kemiskinan, Dengan Memperkuat Desa Sebagai Basis Penghidupan Dan Kehidupan Masyarakat Secara Berkelanjutan - Mewujudkan Pembangunan yang Dilandasi Budaya Serta Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Beritegritas,			dan tenaga pendidikan					
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)		Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pendidik/tenaga Kependidikan Membangun, Generasi Manggarai Timur Cerdas	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Siswa Anak Pendidikan Dasar (%)		a. Pemberian subsidi siswa miskin (Bantuan seragam sekolah dan Penyediaan alat tulis dan perlengkapan belajar) b. Beasiswa Mahasiswa Miskin Bepretasi	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Angka Partisipasi Murni Anak Usia Pendidikan Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partispasi Siswa Anak Disabilitas Pendidikan Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni PAUD (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
Transparan dan Reponsif				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		MATIM SETARA		
		Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)				
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)			2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangka (Persentase)			2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda			2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				yang Ditetapkan (Persentase)				
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)			1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat yang Bermutu dan inklusif		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))				
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)				
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	PROGRAM MATIM HEALTY & SMART	Pelayanan Kesehatan Untuk Semua	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				tangga di seluruh kabupaten (%)				
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (%)			1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)		Program “Lami Mama” (LAMI: Lindungi, Awasi, Mitigasi, Intervensi)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10 - 21 Tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Neonatal (Kasus)		Program “Lami Mama” (LAMI: Lindungi, Awasi, Mitigasi, Intervensi)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Depresi Pada Penduduk Usia â‰¥ 15 Tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Kesehatan Nasional (SIKN) (%)				
				Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Urusan Kesehatan (%)		Program “Lami Mama” (LAMI: Lindungi, Awasi, Mitigasi, Intervensi)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)		Nakes Go To School (Program ini memberikan kesempatan kepada nakes berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 /D4 dengan program tugas belajar. Setiap tahun akan diberi kuota 5 orang per tahun)Beasiswa KedokteranPemberian besasiswa kuliah S1 kedokteran khusus putera-puteri daerah Manggarai Timur dimulai dari semester 3 sampai semester 8 dan MoU dengan Pihak Universitas Negeri, Target jumlah beasiswa disesuaikan dengan jumlah Faskes yang ada di Manggarai Timur.	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Rasio dokter per 1000 Penduduk (Rasio)			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai Standar (%)			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Contraceptive (mCPR) (Persentase)				
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)			2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Nilai)			2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Meningkatnya standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan		Tingkat kemiskinan (%) (%)				
				Pengeluaran Perkapita (Rp)				
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Pesentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/ PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Persentase)			2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)		Pemuda Bergerak, Daerah Bangkit, Olah Raga Untuk Semua, Prestasi Untuk Manggarai Timur	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)			2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase luas kawasan kumuh kabupaten di bawah 10 ha yang ditangani (%)			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10 - 21 Tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Jumlah Kematian Neonatal (Kasus)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Depresi Pada Penduduk Usia â‰¥ 15 Tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
							PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Urusan Kesehatan (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Rumah Warga negara dalam dan diluar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Siswa Anak Pendidikan Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni Anak Usia Pendidikan Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partispasi Siswa Anak Disabilitas Pendidikan Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dasar (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni PAUD (%)			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (Persentase)			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (Persentase)			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana (Persentase)			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga (Persentase)			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)			2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	Pembukaan Lapangan Kerja Baru (Loka Latihan Kerja)	1.Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan kerja berbasis keterampilan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja lokal, nasional, dan internasional, Minimal 100 peserta pelatihan diluluskan setiap tahun;2.Menyediakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri utama, potensi lokal, dan perkembangan teknologi, 80% lulusan LLK terserap ke lapangan kerja dalam waktu 6 bulan;3.Menyediakan pelatihan digital untuk menghadapi era industri 4.0 dan ekonomi	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
						digital;4.Menghubungkan lulusan LLK langsung dengan lapangan kerja melalui kemitraan dengan perusahaan dan program magang.		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)			2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (Persentase)			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)			2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase lanjut usia terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Persentase gelandangan dan pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)			2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif			Pertumbuhan Ekonomi (%)				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)				
				Tingkat Inflasi ((%))				
		Meningkatnya Hilirisasi Produk Pertanian dan Perikanan serta daya saing investasi daerah		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)				
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persentase)				
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	Pengembangan UMKM Berbasis Produk Unggulan Kabupaten Manggarai Timur	Meningkatkan peran Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UKMK) dalam perekonomian daerah dan nasional. UKMK tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.Kaum perempuan dan generasi muda (Milenial dan Gen Z) memiliki potensi besar dalam pengembangan UKMK. Perempuan sering menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, sementara	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
						generasi Milenial dan Gen Z dikenal dengan kreativitas, adaptasi teknologi, dan jiwa wirausaha mereka. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, modal, dan pelatihan kewirausahaan menghambat optimalisasi potensi mereka dalam UKMK		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (Persentase)			2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan				2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)			2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri (%)			3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Meningkatnya sektor pariwisata dan perdagangan sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal/ekonomi desa		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdangangan Besar dan Eceran (Persentase)				
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persentase)				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	BULE LOKAL : Budaya , minat khUsus, aLam dan pEtualangan berbasis kearifal Lokal. Melanjutkan program desa wisata dengan mengembangkan pariwisata berbasis karakter potensi dan keunikan budaya lokal yang didukung dengan pengembangan produk ekonomi kreatif. Dalam menciptakan kemandirian, peran masyarakat lokal dan kelompok sadar wisata akan ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan. Langkah Konkrit: 1.Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah 2.Peningkatan Kualitas SDM 3.Penguatan Produk dan Daya Tarik Wisata Budaya 4.Promosi dan Pemasaran 5.Meningkatkan infrastruktur pendukung pada destinasi pariwisata unggulan 6.Meningkatkan Manajemen Tata Kelola Desa Wisata 7.Penyelenggaraan event pariwisata budaya 8. Kolaborasi dan Kemitraan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)			3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi ()			3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)			3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)			3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pelaku usaha	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang di			3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			yang berorientasi ekspor	Kabupaten (Persentase)				
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)			3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)			3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah			Indeks Pembangunan Infrastruktur (Nilai)				
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur (Nilai)	Program Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur			
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	ABANG JANTAN/ AKUR BANGUN JALAN ANTAR KECAMATAN	Melanjutkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan penghubung antar Kecamatan, desa ke kecamatan, dan dari kecamatan ke ibukota Kabupaten, akses jalan menuju fasilitas pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah), dan konektivitas ke pusat- pusat pertumbuhan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
						ekonomi baru, diantaranya : 1 Program Abang Jantan bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar kecamatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kesejahteraan Masyarakat; 2 Mengalokasikan anggaran daerah secara bertahap untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan; 3.Meningkatkan panjang jalan dalam kondisi baik secara bertahap dengan target tahunan yang terukur; 4.Melakukan pemeliharaan rutin pada jalan yang sudah dalam kondisi baik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut; 5.2030: 80% dari total panjang jalan dalam kondisi baik. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa Pembangunan Jalan di Desa berfokus pada peningkatan status jalan (bukan pembukaan jalan baru)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			pengelolaan air limbah	Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)			PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	Sambungan Air Bersih Rumah Tangga (Air Minum Tuntas)	Hingga tahun 2023 Data sambungan rumah (SR) existing sebesar 39,94%, Target Pembangunan Sambungan Air Mimum Bersih Rumah Tangga 2025-2029 mencapai 85- an persen dimana petakan kebijakan anggaran untuk penangananan dimana 70% bersumber dari APBD dan 15% bersumber dari Dana Desa, setiap Desa wajib melakukan pemetaan Geo-Listrik untuk mendeteksi sumber air tanah. Pembentukan BUMD Air Minum	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase luas kawasan kumuh kabupaten di bawah 10 ha yang ditangani (%)			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Km)	Borong Mobilitas Cerdas (BMC)	Program untuk menciptakan sistem transportasi darat yang terintegrasi, efisien, dan terjangkau di Kota Borong, mencakup trayek angkutan umum, terminal, dan halte modern.	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)			2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukannya (%)			1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Kualitas Rumah Warga negara dalam dan diluar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Fasilitasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpengahilan Rendah (MBR) (Pembangunan Rumah Tuntas)	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)1.Bangun skema pembiyaan 3 Lembaga, khusus untuk Perumahan (Pembiayaan dari Kementerian, Kabupaten dan Dana Desa);2.Pembangunan Rumah Layak Huni, dikhususkan untuk Masyarakat Miskin3.Buat	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
						rancang bangun untuk desain Rumah Layak Huni Tipe 45m2		
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabuapten yang dilayani jaringan irigasi (Persentase)			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (Persentase)			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (%)			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)			1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
	Meningkatkan Kualitas Ekologi Daerah			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)				
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)				
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)				
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)				
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP				2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)			2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)			2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati				2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persentase)			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup				2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)			2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Tanah yang Dikonsolidasi (%)			2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Pada Peningkatan Kesejahteraan dan			PDRB Perkapita (Juta Rupiah)				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
	kemandirian bagi Masyarakat Desa							
				Rasio Gini (Indeks)				
		Terwujudnya Desa Sebagai Tulang Punggung Peningkatan Kesejahteraan untuk Kemandirian Masyarakat		PDRB Perkapita (Juta Rupiah)				
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Persentase)				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B ()	Budidaya Pertanian Organik	Budidaya pertanian organic : Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 1.Luas lahan pertanian organik meningkat sebesar 10% dalam lima tahun, dari total luas lahan produksi 2.Produk organik dari Manggarai Timur memiliki sertifikasi resmi dan dikenal di pasar lokal maupun nasional; 3.Jumlah petani yang beralih ke sistem pertanian organik meningkat; 4.Pendapatan petani meningkat melalui akses pasar yang lebih baik untuk produk organic.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	Beras Kita, Kemandirian Kita, Peningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Beras) menuju Swasembada Pangan	1.Peningkatan Produktivitas Pertanian Beras, dengan peningkatkan hasil panen padi melalui pemanfaatan teknologi pertanian, penyediaan benih unggul, dan pelatihan petani, dengan target peningkatan produktivitas padi hingga 8 ton/hektar; 2.Meningkatkan akses air untuk persawahan melalui pengelolaan dan perbaikan sistem irigasi, 100% sawah irigasi mendapatkan suplai air memadai; 3.Memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi padi dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian, menetapkan regulasi untuk mencegah konversi lahan produktif menjadi kawasan non-pertanian, Penambahan 1000 hektare lahan produktif untuk sawah 4.Menjamin harga gabah yang menguntungkan bagi petani dan mempermudah akses pasar hasil panen, arga gabah tetap stabil dan menguntungkan petani (di atas HPP nasional); 5.Kredit Usaha Tani (KUT): Memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah untuk petani kecil;	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

						6.Membangun infrastruktur pendukung yang menunjang distribusi hasil panen dan akses ke lahan pertanian, dengan Perbaikan Jalan Pertanian, Pembangunan Gudang dan Penggilingan Beras Modern, 100% area pertanian memiliki akses jalan memadai; 7.Memberikan edukasi kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, dengan Sekolah Lapang Petani, Menambah jumlah penyuluh pertanian yang berkualitas untuk mendampingi petani di lapangan; 8.Edukasi Ketahanan Pangan: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya swasembada pangan untuk daerah; 9.Pembangunan Lumbung Pangan Daerah.		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (Persentase)			2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan				2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan ()	Pengembangan Kelompok Pembibitan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pembibitan pertanian melalui pemberdayaan kelompok-kelompok pembibit di Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung kemandirian pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong kesejahteraan petani.1.Kelompok pembibitan bibit unggul Padi dan Jagung Berkualitas;2.Kelompok pembibitan bibit unggul Kopi dan Kakao Berkualitas;3.Pembangunan	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
						Balai Benih Ikan;4.Kelompok pembibitan bawang.		
				Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi ()			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Bum Desa Berbasis Pertanian, Pariwisata Sebagai Pilar Ekonomi Desa	Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi pertanian yang sangat besar, termasuk di sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Namun, pengelolaan hasil pertanian masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses pasar yang terbatas, rendahnya teknologi pengolahan, dan kurangnya kelembagaan ekonomi yang mendukung. Untuk itu, pemerintah kabupaten perlu memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berbasis pertanian sebagai pilar utama penggerak ekonomi desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah dari sektor pertanian.	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
						-Mengoptimalkan potensi pertanian sebagai pilar utama ekonomi desa. -Memperkuat peran BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis usaha agribisnis. -Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui diversifikasi produk dan pengolahan pasca-panen. -Mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha berbasis sumber daya lokal. -Membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)			2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)			2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Pembangunan Manusia Antargender dan Antargenerasi			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)				
				Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) (Skor)				
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Nilai)				
				Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)				
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	Rumah Aman	Pembangunan Rumah Aman Tingkat Kabupaten untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Rumah Aman	Pembangunan Rumah Aman Tingkat Kabupaten untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai)				
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (Persentase)			4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)			6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)			5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)			5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)			5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan (BPK, Inspektorat Provinsi dan Inpektorat Kabupaten) (Persentase)			6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini)				
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)			5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)			5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai			5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Aset Tetap (Persentase)				
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)			5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)			5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10 - 21 Tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Neonatal (Kasus)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Prevalensi Depresi Pada Penduduk Usia â‰¥ 15 Tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 tahun (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pemenuhan Capaian Kebutuhan Dasar SPM Urusan Kesehatan (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
				1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)			2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)			2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)			2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)			2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya efektivitas Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)				
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap			2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			komunikasi publik pemerintah daerah	akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)				
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)			5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)			5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)			2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)			4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks SPBE Domain Tata Kelola (Nilai)			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)			5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)			5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)			5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)			2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Nilai)			4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)			2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)				
				Indeks Trantibumlinmas (Nilai)				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS			KETERANGAN
					PROGRAM PRIORITAS	PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS	Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik ()			8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif ()			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)			1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)			1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun. Keberhasilan pencapaian Visi "Manggarai Timur Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan" serta misi Kepala Daerah terpilih sangat bergantung pada sinergi, efektivitas program, dan kinerja optimal dari setiap Perangkat Daerah.

Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah saat ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terpisah. Permasalahan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan ekstrem, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya nilai tambah komoditas lokal bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan *Cross-Cutting* Program, yaitu strategi kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyasar isu-isu pembangunan yang kompleks dan menuntut keterpaduan intervensi.

Cross-cutting program berperan sebagai instrumen kebijakan yang memungkinkan sinkronisasi antara berbagai perangkat daerah, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola, hingga inovasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat dampak langsung terhadap masyarakat karena dirancang berbasis kebutuhan riil dan data empirik.

Tabel 4. 1 Cross Cutting Program Prioritas Daerah

No	Program Prioritas	Permasalahan	Program Prioritas Pendukung	Fungsi Layanan	Peran Utama
1	Meningkatkan kualitas SDM malalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil	Peningkatan kualitas SDM tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, dibutuhkan program lintas yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial secara menyeluruh, terutama di daerah terpencil.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas dan konektivitas antarwilayah	Pekerjaan Umum	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi
				Perhubungan	Konektivitas transportasi antarkecamatan dan ke pusat ekonomi
				Bagian Ekonomi dan Pembanguanan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Penyediaan listrik perdesaan dan energi alternatif
				Komunikasi dan Informatika	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Digital
				Perumahan & Permukiman	Penyediaan rumah layak huni dan fasilitas lingkungan
				Lingkungan Hidup	Pengawasan dampak lingkungan pembangunan infrastruktur
				Perencanaan Pembangunan	Menyusun peta wilayah prioritas pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu
			Mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan e-government dan pelayanan digital
				Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Penguatan kompetensi ASN dan sistem merit
				Inspektorat	Pengawasan internal dan pengendalian integritas aparatur
				Dukcapil dan Layanan Dasar	Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi

No	Program Prioritas	Permasalahan	Program Prioritas Pendukung	Fungsi Layanan	Peran Utama
				Sekretariat Daerah	Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
				Perencanaan Pembangunan	Monitoring dan evaluasi partisipasi publik dan efektivitas tata kelola daerah
			Menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis keluarga	Kesehatan	Layanan gizi, ibu hamil, balita, dan kampanye pencegahan stunting
				Sosial	Perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk keluarga miskin Tata Kelola data penduduk miskin
				Pendidikan	Pendidikan anak usia dini, akses sekolah bagi anak dari keluarga miskin
				Ketahanan Pangan	Bantuan pangan bergizi dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga
				Pekerjaan Umum	Akses air bersih dan sanitasi yang layak
				Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pendampingan keluarga dan pemberdayaan ekonomi mikro di desa
				Perlindungan Anak & Perempuan	Perlindungan kelompok rentan dari kekerasan dan eksploitasi anak
				Perencanaan Pembangunan	Integrasi data keluarga miskin dan pemantauan kemajuan target lintas sektor
			Mengembangkan ekosistem inovasi daerah yang mendukung hilirisasi produk	Pertanian & Perikanan	Produksi komoditas unggulan dan penyediaan bahan baku
				Industri & Perdagangan	Hilirisasi produk, standardisasi, dan pengemasan produk lokal

No	Program Prioritas	Permasalahan	Program Prioritas Pendukung	Fungsi Layanan	Peran Utama
			unggulan dan penciptaan lapangan kerja	UMKM & Koperasi	Pengembangan usaha mikro dan akses pembiayaan
				Tenaga Kerja & Pelatihan	Pelatihan vokasional, sertifikasi, dan penyaluran kerja
				Komunikasi dan Informatika	Digitalisasi rantai pasok dan promosi online produk lokal
				Riset, Inovasi, Teknologi	Pengembangan teknologi tepat guna dan model bisnis inovatif
				Perencanaan Pembangunan	Penyiapan roadmap inovasi daerah dan sinergi antar pemangku kepentingan
2	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan dan UMKM berbasis potensi lokal	Ketahanan ekonomi masyarakat dibangun melalui diversifikasi usaha, peningkatan kapasitas UMKM, hilirisasi produk lokal, dan perluasan akses pasar. Ini memerlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari produksi hingga promosi dan pembiayaan.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung produktivitas dan konektivitas antarwilayah	Pekerjaan Umum & Infrastruktur	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi
				Perhubungan	Konektivitas transportasi antarkecamatan dan ke pusat ekonomi
				Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Fasilitasi Penyediaan listrik perdesaan dan energi alternatif
				Komunikasi dan Informatika	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Digital
				Perumahan & Permukiman	Penyediaan rumah layak huni dan fasilitas lingkungan
				Lingkungan Hidup	Pengawasan dampak lingkungan pembangunan infrastruktur
				Perencanaan Pembangunan	Menyusun peta wilayah prioritas pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu
			Mendorong tata kelola	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan e-government dan pelayanan digital

No	Program Prioritas	Permasalahan	Program Prioritas Pendukung	Fungsi Layanan	Peran Utama
			pemerintahan yang responsif, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat	Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Penguatan kompetensi ASN dan sistem merit
				Inspektorat	Pengawasan internal dan pengendalian integritas aparatur
				Dukcapil dan Layanan Dasar	Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi
				Sekretariat Daerah	Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
				Perencanaan Pembangunan	Monitoring dan evaluasi partisipasi publik dan efektivitas tata kelola daerah
			Menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting melalui pendekatan terintegrasi dan berbasis keluarga	Kesehatan	Layanan gizi, ibu hamil, balita, dan kampanye pencegahan stunting
				Sosial	Perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk keluarga miskin
				Pendidikan	Pendidikan anak usia dini, akses sekolah bagi anak dari keluarga miskin
				Ketahanan Pangan	Bantuan pangan bergizi dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga
				Pekerjaan Umum	Akses air bersih dan sanitasi yang layak
				Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pendampingan keluarga dan pemberdayaan ekonomi mikro di desa
				Perlindungan Anak & Perempuan	Perlindungan kelompok rentan dari kekerasan dan eksploitasi anak

No	Program Prioritas	Permasalahan	Program Prioritas Pendukung	Fungsi Layanan	Peran Utama
				Perencanaan Pembangunan	Integrasi data keluarga miskin dan pemantauan kemajuan target lintas sektor
			Mengembangkan ekosistem inovasi daerah yang mendukung hilirisasi produk unggulan dan penciptaan lapangan kerja	Pertanian & Perikanan	Produksi komoditas unggulan dan penyediaan bahan baku
				Industri & Perdagangan	Hilirisasi produk, standardisasi, dan pengemasan produk lokal
				UMKM & Koperasi	Pengembangan usaha mikro dan akses pembiayaan
				Tenaga Kerja & Pelatihan	Pelatihan vokasional, sertifikasi, dan penyaluran kerja
				Komunikasi dan Informatika	Digitalisasi rantai pasok dan promosi online produk lokal
				Riset, Inovasi, Teknologi	Pengembangan teknologi tepat guna dan model bisnis inovatif
				Perencanaan Pembangunan	Penyiapan roadmap inovasi daerah dan sinergi antar pemangku kepentingan

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah akan diorientasikan pada pencapaian target-target spesifik yang tercantum dalam arah kebijakan setiap tahunnya. Adapun program tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten Manggarai Timur. Program perangkat daerah tersebut juga telah disertai dengan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Detail program perangkat daerah dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dan sumber pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					419.560.000.000,00		419.680.000.000,00		419.790.000.000,00		419.900.000.000,00		420.000.000.000,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					321.500.000.000,00		321.500.000.000,00		321.500.000.000,00		321.500.000.000,00		321.500.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	321.500.000.000,00	100	321.500.000.000,00	100	321.500.000.000,00	100	321.500.000.000,00	100	321.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					97.500.000.000,00		97.600.000.000,00		97.700.000.000,00		97.800.000.000,00		97.900.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dasar (%)	0	60	65	97.500.000.000,00	70	97.600.000.000,00	75	97.700.000.000,00	80	97.800.000.000,00	85	97.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	0	60	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	88,78	89,00	89,08		89,38		89,68		89,98		90,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni PAUD (%)	27,49	29,51	35,51		37,53		39,55		41,58		43,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka Partisipasi Siswa Anak Pendidikan Dasar (%)	99,23	99,34	99,47		99,58		99,67		99,89		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Siswa Anak Disabilitas Pendidikan Dasar (%)	0	60	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	0	8,0	8,48		9,24		10,01		10,77		11,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	80	100	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,74	0,70	0,69	200.000.000,00	0,64	200.000.000,00	0,59	200.000.000,00	0,54	200.000.000,00	0,49	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	9,52	10,52	11,52		12,52		13,52		14,52		17,52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN					50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERIZINAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	40	50	60	130.000.000,00	70	130.000.000,00	80	130.000.000,00	90	130.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					385.559.680.230,00		390.333.462.230,00		396.456.228.230,00		404.385.825.230,00		406.485.825.230,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					173.100.565.230,00		177.733.462.230,00		183.756.228.230,00		191.585.825.230,00		193.585.825.230,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	133.100.565.230,00	100	137.733.462.230,00	100	143.756.228.230,00	100	151.585.825.230,00	100	153.585.825.230,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	40.000.000.000,00	100	40.000.000.000,00	100	40.000.000.000,00	100	40.000.000.000,00	100	40.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	33	35	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					201.300.000.000,00		201.400.000.000,00		201.500.000.000,00		201.600.000.000,00		201.700.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	32,85	80	85	189.300.000.000,00	90	189.400.000.000,00	93	189.500.000.000,00	95	189.600.000.000,00	98	189.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (%)	206	50	45		40		35		30		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	62	60	55		50		45		40		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Neonatal (Kasus)	56	50	45		40		35		30		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Capaian Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	35,8	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	46,59	48,30	60,23		64,24		67,05		69,89		72,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri (%)	74,3	75	77		79		81		83		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Merokok Pada Penduduk Usia 10 - 21 Tahun (%)	0	16	15		14		13		12		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	0	60	60		65		70		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Depresi Pada Penduduk Usia â‰¥ 15 Tahun (%)	0	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 tahun (%)	0	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	38,8	38,7	37,3		35,9		34,4		33,1		31,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	80	83	86		89		92		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	0.29:1000	0.39:1000	0.52:1000		0.65:1000		0.69:1000		0.73:1000		0.77:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Capaian Pemenuhan SPM Kesehatan pada Rumah Sakit (Persentase)	100	100	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	0.3:1000	0.3:1000	0.4:1000		0.5:1000		0.6:1000		0.7:1000		0.8:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					10.150.000.000,00		10.150.000.000,00		10.150.000.000,00		10.150.000.000,00		10.150.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	50	55	60	10.000.000.000,00	65	10.000.000.000,00	70	10.000.000.000,00	75	10.000.000.000,00	80	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai Standar (%)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio dokter per 1000 Penduduk (Rasio)	0:0	0.15:1000	0.18:1000		0.19:1000		0.20:1000		0.21:1000		0.22:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	0:0	4.13:1000	5.10:1000		6.02:1000		6.92:1000		7.78:1000		8.6:1000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan kapasitas SDMK di Rumah Sakit	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memenuhi standar di Fasilitas Kesehatan (Persentase)	70	80	85	150.000.000,00	90	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					586.115.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (%)	0	76	82	586.115.000,00	89	600.000.000,00	93	600.000.000,00	95	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					423.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	15	15	19	423.000.000,00	21	450.000.000,00	23	450.000.000,00	25	450.000.000,00	27	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	18	25	35		45		55		65		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					246.867.636.000,00		92.917.636.000,00		94.627.636.000,00		96.347.636.000,00		98.167.636.000,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	100	12.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Capaian Kinerja BLUD SPAM (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.200.000.000,00		5.400.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabuapten yang dilayani jaringan irigasi (Persentase)	41,22	42,46	43,28	5.000.000.000,00	44,58	5.000.000.000,00	45,92	5.100.000.000,00	47,29	5.200.000.000,00	48,71	5.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (Persentase)	21,50	20,67	22,58		23,25		23,95		24,67		25,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	25,83	26,64	27,12		27,94		28,77		29,64		30,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	di WS Kewenangan Kabupaten (%)													
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	71,03	73,16	75,36	15.000.000.000,00	77,62	10.000.000.000,00	79,94	10.000.000.000,00	82,34	10.000.000.000,00	84,81	10.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.000.000.000,00		7.500.000.000,00		8.000.000.000,00		8.500.000.000,00		9.000.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	0	0,20	0,36	7.000.000.000,00	0,52	7.500.000.000,00	0,68	8.000.000.000,00	0,84	8.500.000.000,00	1,00	9.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SISTEM DRAINASE														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	40,27	41,73	42,28	500.000.000,00	43,55	500.000.000,00	44,86	500.000.000,00	46,20	500.000.000,00	47,59	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					100.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	160.000.000,00	100	180.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase penerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					206.367.636.000,00		57.367.636.000,00		58.367.636.000,00		59.367.636.000,00		60.367.636.000,00	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	41,00	42,23	45,61	206.367.636.000,00	46,98	57.367.636.000,00	48,39	58.367.636.000,00	49,84	59.367.636.000,00	51,33	60.367.636.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompentensi (%)	30	35	40		45		50		55		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					700.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukannya (%)	0	88,00	90,00	700.000.000,00	91,80	200.000.000,00	93,63	300.000.000,00	95,51	400.000.000,00	97,42	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.950.000.000,00		6.150.000.000,00		6.650.000.000,00		7.150.000.000,00		7.150.000.000,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)	34,15	100	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase luas kawasan kumuh kabupaten di bawah 10 ha yang ditangani (%)	0	35	40	200.000.000,00	45	300.000.000,00	50	300.000.000,00	55	300.000.000,00	60	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Rumah Warga negara dalam dan diluar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0	0,2	0,4	200.000.000,00	0,6	200.000.000,00	0,8	200.000.000,00	1,0	200.000.000,00	1,2	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	0	0,5	1,0	4.000.000.000,00	1,5	5.000.000.000,00	2,0	5.500.000.000,00	2,5	6.000.000.000,00	3,0	6.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					7.697.100.000,00		7.888.000.000,00		7.966.000.005,00		8.044.000.000,00		8.087.000.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.500.000.000,00		6.600.000.000,00		6.600.000.000,00		6.600.000.000,00		6.600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	4.700.000.000,00	100	4.800.000.000,00	100	4.800.000.000,00	100	4.800.000.000,00	100	4.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	1.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					180.000.000,00		208.000.000,00		226.000.005,00		244.000.000,00		262.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	97,67	100	100	80.000.000,00	100	88.000.000,00	100	96.000.000,00	100	104.000.000,00	100	112.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kapasitas PPNS	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindunga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														n Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	10	20	40.000.000,00	40	50.000.000,00	60	55.000.005,00	80	60.000.000,00	100	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					687.100.000,00		690.000.000,00		695.000.000,00		700.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	117.100.000,00	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					330.000.000,00		390.000.000,00		445.000.000,00		500.000.000,00		515.000.000,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	330.000.000,00	100	390.000.000,00	100	445.000.000,00	100	500.000.000,00	100	515.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.470.485.000,00		3.640.000.000,00		3.808.000.000,00		3.925.000.000,00		4.092.000.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.520.485.000,00		2.530.000.000,00		2.540.000.000,00		2.550.000.000,00		2.560.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.520.485.000,00	100	2.530.000.000,00	100	2.540.000.000,00	100	2.550.000.000,00	100	2.560.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (Persentase)	75	100	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (Persentase)	71,42	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan	71,42	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	korban bencana (Persentase)													
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					10.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	100	22.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)	79,11	100	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	600.000.000,00	100	650.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase gelandangan dan pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase lanjut usia terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)	84,86	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial (Persentase)	72,03	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	24,9	24,01	22,64	150.000.000,00	21,43	200.000.000,00	20,22	250.000.000,00	19,01	300.000.000,00	17,80	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	23	23,5	24		24,5		25		25,5		26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang	100	100	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
sosial korban bencana	terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)													Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.480.000.000,00		2.560.000.000,00		2.600.000.000,00		2.640.000.000,00		2.680.000.000,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.840.000.000,00		1.860.000.000,00		1.880.000.000,00		1.900.000.000,00		1.920.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.840.000.000,00	100	1.860.000.000,00	100	1.880.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	65	75	80	50.000.000,00	85	50.000.000,00	90	50.000.000,00	95	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					500.000.000,00		550.000.000,00		560.000.000,00		570.000.000,00		580.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0,04	0,06	0,07	500.000.000,00	0,10	550.000.000,00	0,13	560.000.000,00	0,17	570.000.000,00	0,20	580.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	38,11	40	45	50.000.000,00	50	55.000.000,00	55	60.000.000,00	60	65.000.000,00	65	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	14,56	15,17	15,78	40.000.000,00	16,39	45.000.000,00	17,00	50.000.000,00	17,61	55.000.000,00	18,22	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak Hak Pekerja dan Dialog Sosial (*)	208	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Pesentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/ PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Persentase)	10,32	10,35	10,38		12,02		13,66		15,30		16,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN					4.157.819.000,00		4.161.819.000,00		4.174.819.000,00		4.185.819.000,00		4.204.819.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.202.819.000,00		3.202.819.000,00		3.202.819.000,00		3.202.819.000,00		3.202.819.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	3.202.819.000,00	100	3.202.819.000,00	100	3.202.819.000,00	100	3.202.819.000,00	100	3.202.819.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,5	0,58	1	50.000.000,00	1,2	60.000.000,00	1,4	65.000.000,00	1,8	70.000.000,00	2	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Persentase)	0	20	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					403.000.000,00		408.000.000,00		410.000.000,00		412.000.000,00		415.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	40	60	80	403.000.000,00	100	408.000.000,00	100	410.000.000,00	100	412.000.000,00	100	415.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	70	72	37.000.000,00	75	38.000.000,00	77	39.000.000,00	79	40.000.000,00	80	42.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					30.000.000,00		32.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	30	50	60	30.000.000,00	70	32.000.000,00	80	36.000.000,00	90	38.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM					240.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	50	60	65	240.000.000,00	70	225.000.000,00	75	225.000.000,00	80	225.000.000,00	85	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					195.000.000,00		196.000.000,00		197.000.000,00		198.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	195.000.000,00	100	196.000.000,00	100	197.000.000,00	100	198.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.730.000.000,00		3.100.000.000,00		2.790.000.000,00		2.830.000.000,00		2.860.000.000,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.460.000.000,00		2.470.000.000,00		2.480.000.000,00		2.490.000.000,00		2.500.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.460.000.000,00	100	2.470.000.000,00	100	2.480.000.000,00	100	2.490.000.000,00	100	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK					20.000.000,00		350.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0,01	8,2	8,2	20.000.000,00	16,5	350.000.000,00	24,7	30.000.000,00	32,9	40.000.000,00	41,2	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	62,28	63	64	150.000.000,00	65	160.000.000,00	66	170.000.000,00	67	180.000.000,00	68	190.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					50.000.000,00		70.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	21	20	19	50.000.000,00	18	70.000.000,00	17	60.000.000,00	16	70.000.000,00	15	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN					2.923.566.000,00		2.925.566.000,00		2.927.566.000,00		2.929.566.000,00		2.931.566.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG PERTANAHAN														
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.635.600.000,00		2.637.600.000,00		2.639.600.000,00		2.641.600.000,00		2.643.600.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.635.600.000,00	100	2.637.600.000,00	100	2.639.600.000,00	100	2.641.600.000,00	100	2.643.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Presentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifkat yang dilakukan melalui mediasi (Persentase)	50	55	60	100.000.000,00	70	100.000.000,00	80	100.000.000,00	90	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					187.966.000,00		187.966.000,00		187.966.000,00		187.966.000,00		187.966.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Presentase luas tanah yang terkonsolidasi (Persentase)	5,18	5,25	5,34	187.966.000,00	5,50	187.966.000,00	5,66	187.966.000,00	5,83	187.966.000,00	6,01	187.966.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.308.000.000,00		1.379.000.000,00		1.435.000.000,00		1.476.000.000,00		1.501.000.000,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN					100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	140.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,11	76,25	76,45	150.000.000,00	76,65	150.000.000,00	76,85	150.000.000,00	77,05	150.000.000,00	77,51	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	91,70	89,84	90,04		90,24		90,44		90,64		90,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	20	20	20	80.000.000,00	23	90.000.000,00	27	100.000.000,00	30	100.000.000,00	33	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN					60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penanganan Limbah B3 (Persentase)	77,00	77,50	78,00	60.000.000,00	78,50	60.000.000,00	79,00	65.000.000,00	79,50	65.000.000,00	80,00	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan (%)	0	100	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH														Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (Persentase)	0	65,5	66,0	25.000.000,00	66,5	25.000.000,00	67,0	25.000.000,00	67,5	25.000.000,00	68,0	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					6.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	6.000.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Meningkatnya fasilitasi penyelesaiaan pengaduan sengkat/kasus lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (Persentase)	0	100	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					820.000.000,00		850.000.000,00		870.000.000,00		890.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	43,00	44,74	820.000.000,00	45,64	850.000.000,00	46,55	870.000.000,00	47,48	890.000.000,00	48,43	900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.608.500.000,00		2.651.600.000,00		2.678.700.000,00		2.715.800.000,00		2.743.900.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.163.000.000,00		2.183.000.000,00		2.203.000.000,00		2.223.000.000,00		2.243.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.163.000.000,00	100	2.183.000.000,00	100	2.203.000.000,00	100	2.223.000.000,00	100	2.243.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					325.000.000,00		330.000.000,00		335.000.000,00		340.000.000,00		345.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	1	1	1	325.000.000,00	1,5	330.000.000,00	2	335.000.000,00	2,5	340.000.000,00	3	345.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	36,06	36,50	37		37,50		38		38,50		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Kelurga (Persentase)	100	90	95		95,50		96		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Kependudukan Digital (KTP-EL) (Persentase)	98,70	95,50	96		96,50		97		97,50		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					100.000.000,00		118.000.000,00		120.000.000,00		132.000.000,00		135.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	118.000.000,00	100	120.000.000,00	100	132.000.000,00	100	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	41,18	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Akta Kelahiran usia 0 s.d. 17 tahun yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	90,46	95,50	96		96,50		97		97,50		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persentase)	64,10	66,50	67		67,50		68		68,50		69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					10.500.000,00		10.600.000,00		10.700.000,00		10.800.000,00		10.900.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	40	40	40	10.500.000,00	40,50	10.600.000,00	50	10.700.000,00	60	10.800.000,00	70	10.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.051.000.000,00		3.175.000.000,00		3.305.000.000,00		3.405.000.000,00		3.495.000.000,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.010.000.000,00		2.050.000.000,00		2.100.000.000,00		2.140.000.000,00		2.150.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.010.000.000,00	100	2.050.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.140.000.000,00	100	2.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	175.000.000,00	100	180.000.000,00	100	185.000.000,00	100	190.000.000,00	100	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa (Persentase)	23,27	33,64	44,025	50.000.000,00	57,861	55.000.000,00	71,698	60.000.000,00	85,534	65.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM					200.000.000,00		220.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	260.000.000,00	100	280.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					616.000.000,00		670.000.000,00		700.000.000,00		730.000.000,00		780.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	616.000.000,00	100	670.000.000,00	100	700.000.000,00	100	730.000.000,00	100	780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	14,11	15,00	16,00		17,00		17,50		18,00		18,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					4.926.200.000,00		4.938.000.000,00		4.959.000.000,00		4.980.000.000,00		5.010.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					230.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	-3.5-3.1	3.0-2.8	2.7-2.5	230.000.000,00	2.4-2.2	240.000.000,00	2.0-1.8	260.000.000,00	1.8-1.6	280.000.000,00	1.6-1.5	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Nilai)	2,86	2,85	2,85		2,85		2,85		2,84		2,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.197.000.000,00		3.198.000.000,00		3.199.000.000,00		3.200.000.000,00		3.210.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	80,01	80,10	80,20	3.197.000.000,00	80,30	3.198.000.000,00	80,40	3.199.000.000,00	80,50	3.200.000.000,00	80,60	3.210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	0	10	15		20		25		30		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	6,0	5,0	4,5		4,4		4,3		4,2		4,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.499.200.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	100	100	100	1.499.200.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.526.850.000,00		2.528.000.000,00		2.530.000.000,00		2.550.000.000,00		2.560.000.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.926.850.000,00		1.928.000.000,00		1.930.000.000,00		1.950.000.000,00		1.960.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.926.850.000,00	100	1.928.000.000,00	100	1.930.000.000,00	100	1.950.000.000,00	100	1.960.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten (%)	0	37,24	39,48	400.000.000,00	41,45	400.000.000,00	43,52	400.000.000,00	45,69	400.000.000,00	47,97	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kelengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	48,08	48,08	51,36	200.000.000,00	53,92	200.000.000,00	56,61	200.000.000,00	59,44	200.000.000,00	62,41	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2.200.000.000,00		2.250.000.000,00		2.295.000.000,00		2.360.000.000,00		2.395.000.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.800.000.000,00		1.820.000.000,00		1.850.000.000,00		1.900.000.000,00		1.920.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	1.820.000.000,00	100	1.850.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	1.920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	50	70	100.000.000,00	75	120.000.000,00	80	130.000.000,00	85	140.000.000,00	90	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					300.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00		325.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks SPBE Domain Tata Kelola (Nilai)	1,7	1,8	1,87	300.000.000,00	2,06	310.000.000,00	2,26	315.000.000,00	2,48	320.000.000,00	2,52	325.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.140.000.000,00		3.263.000.000,00		3.365.000.000,00		3.437.000.000,00		3.499.000.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.400.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00		2.500.000.000,00		2.520.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.400.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.460.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.520.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase usaha simpan pinjam yang memiliki ijin (%)	21	17,00	17,72	5.000.000,00	21,72	8.000.000,00	24,72	10.000.000,00	27,72	12.000.000,00	30,72	14.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	38,24	34,72	38,72	10.000.000,00	42,72	15.000.000,00	50,72	20.000.000,00	58,72	25.000.000,00	68,72	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	52,00	34,72	38,72	10.000.000,00	42,72	15.000.000,00	50,72	20.000.000,00	58,72	25.000.000,00	68,72	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	19,80	19,80	200.000.000,00	39,60	250.000.000,00	59,41	250.000.000,00	79,21	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi (%)	52,00	27,72	27,72	10.000.000,00	28,72	15.000.000,00	29,72	15.000.000,00	30,72	15.000.000,00	31,73	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					500.000.000,00		530.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	26,54	31,46	36,37	500.000.000,00	39,44	530.000.000,00	42,50	580.000.000,00	45,56	600.000.000,00	48,62	630.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0,02	0,02	5.000.000,00	0,03	10.000.000,00	0,05	10.000.000,00	0,07	10.000.000,00	0,08	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN					2.204.000.000,00		2.246.000.000,00		2.268.000.000,00		2.290.000.000,00		2.312.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG PENANAMAN MODAL														
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.940.000.000,00		1.950.000.000,00		1.960.000.000,00		1.970.000.000,00		1.980.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.940.000.000,00	100	1.950.000.000,00	100	1.960.000.000,00	100	1.970.000.000,00	100	1.980.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Nilai Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA dan PMDN) (Milyar Rupiah)	85	86	87	24.000.000,00	90	26.000.000,00	94	28.000.000,00	99	30.000.000,00	105	32.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	45	50	60	10.000.000,00	70	15.000.000,00	80	15.000.000,00	90	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	100	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3.158.000.000,00		3.280.000.000,00		3.410.000.000,00		3.560.000.000,00		3.720.000.000,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		2.500.000.000,00		2.600.000.000,00		2.700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.300.000.000,00	100	2.400.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.600.000.000,00	100	2.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,15	0,18	0,20	80.000.000,00	0,25	90.000.000,00	0,30	100.000.000,00	0,35	120.000.000,00	0,40	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					598.000.000,00		600.000.000,00		610.000.000,00		620.000.000,00		640.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga (Persentase)	50	60	70	598.000.000,00	80	600.000.000,00	90	610.000.000,00	100	620.000.000,00	100	640.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	70	72	75	180.000.000,00	78	190.000.000,00	80	200.000.000,00	85	220.000.000,00	90	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN					75.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG STATISTIK														
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					75.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,63	2,69	2,71	75.000.000,00	2,82	80.000.000,00	2,85	90.000.000,00	3,10	100.000.000,00	3,23	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	5	10	50.000.000,00	15	50.000.000,00	20	50.000.000,00	25	50.000.000,00	30	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					310.000.000,00		320.000.000,00		323.000.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan (%)	80	30	30	250.000.000,00	50	250.000.000,00	70	250.000.000,00	90	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					30.000.000,00		35.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	55	60	64	30.000.000,00	73	35.000.000,00	82	38.000.000,00	91	40.000.000,00	100	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	30	30	40	30.000.000,00	50	35.000.000,00	60	35.000.000,00	70	35.000.000,00	80	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.726.630.000,00		2.738.000.000,00		2.750.000.000,00		2.774.000.000,00		2.788.000.000,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					1.800.000.000,00		1.810.000.000,00		1.820.000.000,00		1.840.000.000,00		1.850.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	1.810.000.000,00	100	1.820.000.000,00	100	1.840.000.000,00	100	1.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					876.630.000,00		878.000.000,00		880.000.000,00		884.000.000,00		888.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	0,82	0,83	0,84	876.630.000,00	0,85	878.000.000,00	0,86	880.000.000,00	0,87	884.000.000,00	0,88	888.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	20	50.000.000,00	26	50.000.000,00	30	50.000.000,00	36	50.000.000,00	40	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					132.500.000,00		142.500.000,00		147.500.000,00		147.500.000,00		147.500.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					105.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	46,88	57,50	105.000.000,00	68,13	110.000.000,00	78,75	110.000.000,00	89,38	110.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN					10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENYELAMATAN ARSIP														
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	4,17	8,33	10.000.000,00	12,50	15.000.000,00	16,67	20.000.000,00	20,83	20.000.000,00	25	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	58,33	66,67	17.500.000,00	75,00	17.500.000,00	83,00	17.500.000,00	92,00	17.500.000,00	100	17.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					660.000.000,00		735.000.000,00		818.000.000,00		890.000.000,00		964.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.598,8	4.600	4.650	450.000.000,00	4.700	500.000.000,00	4.750	550.000.000,00	4.800	600.000.000,00	4.850	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	50	50	55	100.000.000,00	60	120.000.000,00	65	150.000.000,00	70	170.000.000,00	75	190.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Ijin Yang Diterbitkan (%)	0	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					70.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		84.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	20,01	21	22	70.000.000,00	23	75.000.000,00	24	78.000.000,00	25	80.000.000,00	26	84.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.206.000.000,00		3.291.000.000,00		3.380.000.000,00		3.450.000.000,00		3.540.000.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.476.000.000,00		2.476.000.000,00		2.480.000.000,00		2.480.000.000,00		2.480.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.476.000.000,00	100	2.476.000.000,00	100	2.480.000.000,00	100	2.480.000.000,00	100	2.480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK					500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik (Aduan)	1,72	1,72	1,72	500.000.000,00	2,59	550.000.000,00	2,59	600.000.000,00	3,45	650.000.000,00	3,45	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Jangkauan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	10	10	150.000.000,00	10	170.000.000,00	10	190.000.000,00	10	200.000.000,00	10	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mendaftar dalam proses pengurusan hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (Persentase)	0	1,9	1,9	50.000.000,00	3,7	55.000.000,00	5,6	60.000.000,00	7,4	65.000.000,00	9,3	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan	0	10	19	30.000.000,00	37	40.000.000,00	56	50.000.000,00	74	55.000.000,00	93	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tervalidasi (Persentase)													
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					19.393.300.000,00		19.599.000.000,00		19.722.000.000,00		19.799.000.006,00		20.024.000.000,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.800.000.000,00		12.880.000.000,00		12.960.000.000,00		13.000.000.000,00		13.070.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	10.200.000.000,00	100	10.240.000.000,00	100	10.280.000.000,00	100	10.300.000.000,00	100	10.320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.600.000.000,00	100	2.640.000.000,00	100	2.680.000.000,00	100	2.700.000.000,00	100	2.750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.093.000.000,00		1.101.000.000,00		1.112.000.000,00		1.143.000.000,00		1.194.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	22,07	23,78	25,50	853.000.000,00	28,90	860.000.000,00	32,30	870.000.000,00	35,70	900.000.000,00	39,10	950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	-38,28	-32,41	-26,54		-14,88		-3,18		8,52		20,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman	12,22	15,00	19,32		24,42		30,52		36,62		42,72		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pangan (Persentase)													Bidang Pertanian
	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi Sawah) (%)	4,5	4,8	5,2		5,9		6,6		7,3		8,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	5,45	7,73	10,00	240.000.000,00	15,00	241.000.000,00	20,00	242.000.000,00	25,00	243.000.000,00	30,00	244.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pertumbuhan Populasi Komoditas Peternakan (%)	-3,65	1,38	5		7,5		10,00		12,5		15,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pertumbuhan Populasi Komoditas Peternakan (%)	-3,65	1,38	5		7,5		10		12,5		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.900.000.000,00		3.980.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.006,00		4.100.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	15.438,33	15.664,02	15.889,70	3.800.000.000,00	16.321,27	3.880.000.000,00	16.752,84	3.900.000.000,00	17.184,41	3.900.000.006,00	17.615,98	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi baik (%)	1	10	20	100.000.000,00	40	100.000.000,00	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN					170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-73	-74	-75	170.000.000,00	-75	170.000.000,00	-80	170.000.000,00	-85	170.000.000,00	-95	170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	21	21,5	22,5		25,0		27,5		30,0		32,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					286.000.000,00		288.000.000,00		290.000.000,00		296.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	286.000.000,00	100	288.000.000,00	100	290.000.000,00	100	296.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Pelaku Usaha Pertanian yang memiliki izin (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha peternakan	Persentase Pelaku usaha pertanian yang memiliki ijin (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.124.300.000,00		1.160.000.000,00		1.170.000.000,00		1.170.000.000,00		1.170.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	0	4	5	1.054.300.000,00	6	1.090.000.000,00	7	1.100.000.000,00	8	1.100.000.000,00	9	1.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	0	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibentuk menjadi kelembagaan ekonomi tani (%)	0	0	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM peyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	0	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					530.000.000,00		556.000.000,00		582.000.000,00		603.000.000,00		624.000.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Usaha Perdagangan yang memili izin (Persentase)	26,54	31,46	36,37	5.000.000,00	39,44	6.000.000,00	42,50	7.000.000,00	45,56	8.000.000,00	48,62	9.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					240.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana perdagangan yang berfungsi dengan baik (Persentase)	23,08	26,92	30,77	240.000.000,00	38,46	245.000.000,00	46,15	250.000.000,00	58,85	255.000.000,00	61,54	260.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pertumbuhan Harga sembako (%)	2	1-3	1-3	20.000.000,00	1-3	25.000.000,00	1-3	30.000.000,00	1-3	35.000.000,00	1-3	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang di Kabupaten (Persentase)	3	3	3	240.000.000,00	3	250.000.000,00	3	260.000.000,00	3	270.000.000,00	3	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN					5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri (%)	33,33	44,44	55,56	5.000.000,00	66,67	10.000.000,00	77,78	15.000.000,00	88,89	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					477.000.000,00		481.000.000,00		486.000.000,00		494.000.000,00		499.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					466.000.000,00		470.000.000,00		475.000.000,00		480.000.000,00		485.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Nilai Omset Usaha Industri (Juta Rupiah)	830.250.000	855.250.000	880.250.000	466.000.000,00	940.250.000	470.000.000,00	1.010.250.000	475.000.000,00	1.090.250.000	480.000.000,00	1.180.250.000	485.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase usaha industri yang memiliki izin (Persentase)	5,19	5,19	6,01	5.000.000,00	6,83	5.000.000,00	7,65	5.000.000,00	8,47	8.000.000,00	9,29	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Ketersediaan data dan inforomasi industri yang lengkap dan	0	100	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terkini (Persentase)													
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Luasan Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dengan SK Menteri (*)	0	38.199,73	38.199,73	80.000.000,00	38.199,73	80.000.000,00	38.199,73	80.000.000,00	38.199,73	80.000.000,00	38.199,73	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					17.470.000.000,00		17.525.000.000,00		17.567.000.000,00		17.603.000.000,00		17.645.000.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.320.000.000,00		15.355.000.000,00		15.385.000.000,00		15.410.000.000,00		15.440.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan sekretariat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	14.860.000.000,00	100	14.870.000.000,00	100	14.880.000.000,00	100	14.890.000.000,00	100	14.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (Persentase)	35	47	58	90.000.000,00	69	90.000.000,00	80	90.000.000,00	91	90.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Nilai)	39,25	41,2	43,5	120.000.000,00	43,5	130.000.000,00	45,0	140.000.000,00	45,0	145.000.000,00	45,0	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	Persentase Pelaksanaan Protokol dan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	215.000.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah (Indeks)	79	80	81	50.000.000,00	82	55.000.000,00	83	60.000.000,00	84	65.000.000,00	85	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.450.000.000,00		1.460.000.000,00		1.462.000.000,00		1.463.000.000,00		1.465.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah	Persentase Ketersediaan Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Persentase)	86,36	87,12	87,88	200.000.000,00	89,39	210.000.000,00	90,91	212.000.000,00	91,67	213.000.000,00	92,42	215.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (Persentase)	90	93	95	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang dihasilkan (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kerja sama daerah	Persentase kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti (Persentase)	0	0	75	700.000.000,00	80	700.000.000,00	85	700.000.000,00	90	700.000.000,00	95	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					700.000.000,00		710.000.000,00		720.000.000,00		730.000.000,00		740.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Persentase)	5	5	6	500.000.000,00	7	510.000.000,00	7	520.000.000,00	7	530.000.000,00	8	540.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administari pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					20.800.000.000,00		20.840.000.000,00		20.880.000.000,00		20.920.000.000,00		20.960.000.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.000.000.000,00		18.000.000.000,00		18.000.000.000,00		18.000.000.000,00		18.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	18.000.000.000,00	100	18.000.000.000,00	100	18.000.000.000,00	100	18.000.000.000,00	100	18.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					2.800.000.000,00		2.840.000.000,00		2.880.000.000,00		2.920.000.000,00		2.960.000.000,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	1.400.000.000,00	100	1.420.000.000,00	100	1.440.000.000,00	100	1.460.000.000,00	100	1.480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	1.400.000.000,00	100	1.420.000.000,00	100	1.440.000.000,00	100	1.460.000.000,00	100	1.480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					4.461.000.000,00		4.545.000.000,00		4.628.000.000,00		4.710.000.000,00		4.795.000.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.100.000.000,00		3.120.000.000,00		3.140.000.000,00		3.160.000.000,00		3.180.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	3.100.000.000,00	100	3.120.000.000,00	100	3.140.000.000,00	100	3.160.000.000,00	100	3.180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					761.000.000,00		765.000.000,00		768.000.000,00		770.000.000,00		775.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	761.000.000,00	100	765.000.000,00	100	768.000.000,00	100	770.000.000,00	100	775.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	80	85	90		95		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					600.000.000,00		660.000.000,00		720.000.000,00		780.000.000,00		840.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	240.000.000,00	100	260.000.000,00	100	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	240.000.000,00	100	260.000.000,00	100	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	100	240.000.000,00	100	260.000.000,00	100	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02 - KEUANGAN					248.451.500.000,00		248.686.000.000,00		248.825.000.000,00		248.984.000.000,00		249.123.500.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.700.000.000,00		31.720.000.000,00		31.740.000.000,00		31.760.000.000,00		31.780.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	28.200.000.000,00	100	28.220.000.000,00	100	28.240.000.000,00	100	28.260.000.000,00	100	28.280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					216.201.500.000,00		216.354.000.000,00		216.396.000.000,00		216.458.000.000,00		216.500.500.000,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40	1.200.000.000,00	40	1.250.000.000,00	40	1.270.000.000,00	40	1.280.000.000,00	40	1.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5,26	4,9	4,9	214.578.000.000,00	4,54	214.680.000.000,00	4,18	214.700.000.000,00	3,82	214.750.000.000,00	3,46	214.770.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	91,86	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	423.500.000,00	100	424.000.000,00	100	426.000.000,00	100	428.000.000,00	100	430.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					270.000.000,00		272.000.000,00		274.000.000,00		276.000.000,00		278.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	20	20	20	270.000.000,00	20	272.000.000,00	20	274.000.000,00	20	276.000.000,00	20	278.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					280.000.000,00		340.000.000,00		415.000.000,00		490.000.000,00		565.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Kapatuhan Wajib Pajak Daerah (Persentase)	84,66	100	100	120.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (Persentase)	-20,75	0	8,52		9,57		9,93		10,31		10,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Menigkatnya kontribusi Pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan daerah serta penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Indeks)	80,01	0	82	60.000.000,00	83	70.000.000,00	84	75.000.000,00	85	80.000.000,00	86	85.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pajak Daerah terhadap total realisasi PAD (Persentase)	36,32	0	43,27		41,87		40,01		37,55		34,29		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Bidang Keuangan
Meningkatnya Kepatuhan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Deviasi Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Persentase)	-0,4	0	0	100.000.000,00	0	120.000.000,00	0	140.000.000,00	0	160.000.000,00	0	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					4.140.000.000,00		3.803.000.000,00		3.835.000.000,00		3.857.000.000,00		3.879.000.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.600.000.000,00		2.650.000.000,00		2.670.000.000,00		2.680.000.000,00		2.690.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	2.600.000.000,00	100	2.650.000.000,00	100	2.670.000.000,00	100	2.680.000.000,00	100	2.690.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.540.000.000,00		1.153.000.000,00		1.165.000.000,00		1.177.000.000,00		1.189.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	65,44	65	70	600.000.000,00	75	610.000.000,00	80	620.000.000,00	85	630.000.000,00	90	640.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	190.000.000,00	100	193.000.000,00	100	195.000.000,00	100	197.000.000,00	100	199.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	74,49	75	76	700.000.000,00	77	300.000.000,00	78	300.000.000,00	79	300.000.000,00	80	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	0	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	0	15	20	400.000.000,00	25	400.000.000,00	30	400.000.000,00	35	400.000.000,00	40	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	25	30	150.000.000,00	35	150.000.000,00	40	150.000.000,00	50	150.000.000,00	60	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					810.000.000,00		875.000.000,00		920.000.000,00		965.000.000,00		1.010.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					400.000.000,00		460.000.000,00		500.000.000,00		530.000.000,00		570.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	40	45	50	100.000.000,00	60	150.000.000,00	65	180.000.000,00	70	200.000.000,00	80	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Menimngkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	60	65	70	50.000.000,00	75	60.000.000,00	80	70.000.000,00	85	80.000.000,00	90	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					410.000.000,00		415.000.000,00		420.000.000,00		435.000.000,00		440.000.000,00	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	50	60	70	60.000.000,00	80	60.000.000,00	90	60.000.000,00	95	60.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	50	60	70	50.000.000,00	80	50.000.000,00	85	50.000.000,00	90	50.000.000,00	95	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					6.096.000.000,00		6.155.000.000,00		6.226.000.000,00		6.288.000.000,00		6.360.000.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.780.000.000,00		4.785.000.000,00		4.786.000.000,00		4.788.000.000,00		4.790.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	4.780.000.000,00	100	4.785.000.000,00	100	4.786.000.000,00	100	4.788.000.000,00	100	4.790.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.130.000.000,00		1.170.000.000,00		1.190.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (%)	100	100	100	1.130.000.000,00	100	1.170.000.000,00	100	1.190.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK (%)	84,41	85	85,50		86		86,50		87		87,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inpektorat Kabupaten (%)	65	66	67		68		69		70,50		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Provinsi (%)	94,42	94,45	94,50		94,55		95		95,50		95,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					186.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) (Level)	3	3	3	186.000.000,00	3	200.000.000,00	3	250.000.000,00	4	300.000.000,00	4	320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) (Level)	2,82	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN					28.496.570.000,00		28.566.400.000,00		28.611.400.000,00		29.556.400.000,00		29.600.900.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.005.500.000,00		23.015.500.000,00		23.020.500.000,00		23.925.500.000,00		23.940.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	23.005.500.000,00	100	23.015.500.000,00	100	23.020.500.000,00	100	23.925.500.000,00	100	23.940.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					540.000.000,00		545.000.000,00		550.000.000,00		555.000.000,00		560.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100	100	100	540.000.000,00	100	545.000.000,00	100	550.000.000,00	100	555.000.000,00	100	560.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pelayanan Publik (Persentase)													
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		2,84		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.900.000.000,00		3.940.000.000,00		3.960.000.000,00		3.980.000.000,00		3.990.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di Desa dan Keluarahan	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100	3.900.000.000,00	100	3.940.000.000,00	100	3.960.000.000,00	100	3.980.000.000,00	100	3.990.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					230.400.000,00		235.400.000,00		240.400.000,00		245.400.000,00		250.400.000,00	
Meningkatnya Keamanan dan Ketertibangn Umum	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100	230.400.000,00	100	235.400.000,00	100	240.400.000,00	100	245.400.000,00	100	250.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Umum (Persentase)													
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pelaksanaan Keterntranman Dan Ketertiban Umum (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					370.170.000,00		375.000.000,00		380.000.000,00		385.000.000,00		390.000.000,00	
Meningkatnya kinerja penylenggaraan	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100	100	100	370.170.000,00	100	375.000.000,00	100	380.000.000,00	100	385.000.000,00	100	390.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
urusan pemerintahan umum	Pemerintahan Umum. (Persentase)													Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					450.500.000,00		455.500.000,00		460.500.000,00		465.500.000,00		470.500.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan pengaawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100	450.500.000,00	100	455.500.000,00	100	460.500.000,00	100	465.500.000,00	100	470.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pembinaan Desa. (Persentase)													Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan Desa. (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.200.000.000,00		4.255.000.000,00		4.285.000.000,00		4.310.000.000,00		4.333.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.500.000.000,00		1.530.000.000,00		1.540.000.000,00		1.545.000.000,00		1.548.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja administrasi penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000,00	100	1.530.000.000,00	100	1.540.000.000,00	100	1.545.000.000,00	100	1.548.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					800.000.000,00		810.000.000,00		815.000.000,00		820.000.000,00		825.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	PRESENTASE PELAKSANAAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)	100	100	100	800.000.000,00	100	810.000.000,00	100	815.000.000,00	100	820.000.000,00	100	825.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					650.000.000,00		660.000.000,00		670.000.000,00		680.000.000,00		690.000.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARPOL YANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN	100	100	100	650.000.000,00	100	660.000.000,00	100	670.000.000,00	100	680.000.000,00	100	690.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (%)													
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	CAKUPAN ORMAS YANG DIBINA KATEGORI AKTIV (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					800.000.000,00		805.000.000,00		810.000.000,00		815.000.000,00		820.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	800.000.000,00	100	805.000.000,00	100	810.000.000,00	100	815.000.000,00	100	820.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	PERSENTASE KONFLI SOSIAL YANG DITANGANI (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.468.634.336.230,00		1.322.939.983.230,00		1.332.791.849.235,00		1.345.567.546.236,00		1.351.297.646.230,00	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) mampu mencapai sasaran, tujuan, dan visi pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD periode 2025-2029, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi instrumen utama untuk memantau kemajuan, mengevaluasi capaian, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di seluruh Perangkat Daerah (PD).

Kinerja Perangkat Daerah akan diukur secara sistematis untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam pencapaian target RPJMD periode 2025-2029. Penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui serangkaian indikator kinerja yang terintegrasi dari tingkat makro hingga mikro yang mencerminkan capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Disamping itu, setiap PD memiliki indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART), yang selaras dengan tugas dan fungsi pokoknya serta berkontribusi langsung pada pencapaian pembangunan daerah.

Dengan program Perangkat Daerah yang terarah dan sistem pengukuran kinerja yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berkomitmen untuk mewujudkan visi daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD (IKU)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 bukan sekadar daftar program dan kegiatan, tetapi juga sebuah komitmen untuk mencapai perubahan nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan arah

pembangunan berjalan sesuai rencana, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilengkapi dengan target keberhasilan yang jelas dan indikator yang terukur. Ini ibarat kompas dan peta yang memandu perjalanan pembangunan daerah.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran adalah ukuran konkret yang menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan telah memberikan dampak positif. Ini bukanlah angka semata, melainkan cerminan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemajuan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Setiap tujuan besar pembangunan, seperti peningkatan daya ekonomi kerakyatan atau penguatan kualitas sumber daya manusia, akan dipecah menjadi sasaran-sasaran yang lebih spesifik. Kemudian, untuk setiap sasaran ini, akan ditetapkan indikator kinerja utama (IKU). Indikator ini yang akan menjadi alat ukur untuk melihat kemajuan. Dengan adanya target yang jelas dan terukur, masyarakat dapat turut memantau dan mengawasi jalannya pembangunan. Ini mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029, setiap detail target keberhasilan ini akan dijabarkan secara rinci, termasuk baseline (kondisi awal), target tahunan, hingga target akhir di tahun 2030. Proses ini melibatkan data yang valid, analisis yang mendalam, dan diskusi multipihak untuk memastikan target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART).

Dengan demikian, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah jantung dari perencanaan pembangunan yang efektif. Hal ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk membawa Manggarai Timur menuju Manggarai Timur yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan (Mama Seber), dengan kemampuan untuk mengukur setiap langkah perjalanan menuju keberhasilan tersebut.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	16,164	17,039	17,914	18,789	19,664	
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	53,57	60	60,2	60,56	65	
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,72	69,48	70,05	71,18	72,32	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,24	4,34	4,43	4,52	4,61	
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	83,33	83,50	83,67	83,84	84,01	
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,08	92,57	93	93,54	94	
7.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	41,80	42,60	43,40	44,20	45,00	
8.	Rasio Gini	Indeks	0,260	0,252	0,244	0,236	0,228	
9.	Tingkat Inflasi	(%)	2,35	2,33	2,3	2,25	2,1	
10.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	143,95	141,08	138,25	135,49	132,78	
11.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,11	2,19	2,27	2,36	2,40	
12.	Indeks Tata Kelola Demokrasi Lokal (ITKDL)	Indeks	69,0	75,0	80,0	85,0	90,0	
13.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Nilai	55,23	56,89	58,59	60,35	62,16	
14.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	65,58	67,7	69,8	70,0	71,0	
15.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	
16.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
17.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Persentase	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
18.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,578	0,572	0,566	0,560	0,554	
19.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,09	4,30	4,51	4,72	4,93	
20.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,6	74,2	74,8	75,4	76,0	
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25	8,6	9,2	9,8	10	
22.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persentase	0,54	0,75	0,96	1,17	1,38	
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,36	79,83	84,25	87,62	89,94	
24.	Tingkat kemiskinan (%)	%	23.14-22.64	21.93-21.43	20.72-20.22	19.51-19.01	18.30-17.80	
25.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,0	13,5	14,0	14,5	15	
26.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	33,8	31,6	29,5	27,6	25,8	
27.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	
28.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdangangan Besar dan Eceran	Persentase	17,22	18,72	20,22	21,22	23,22	
29.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	40.00-50.00	50.00-60.00	60.00-70.00	70.00-80.00	80.00-100.000	
30.	Pengeluaran Perkapita	Rp	6.937.000	7.137.000	7.347.000	7.567.000	7.797.000	
31.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	4,74	6,35	7,96	9,56	11,17	
32.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	30	35	40	45	50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
33.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,55	1,5	1,45	1,4	1,4	
34.	Skor Kabupaten Layak Anak	Skor	609	632	654	677	700	

Sumber: RPJMD Mangarai Timur 2025-2029

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, target penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan optimal demi melayani masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Ini adalah panduan konkret yang menunjukkan bagaimana kualitas tata kelola pemerintahan akan ditingkatkan selama lima tahun ke depan.

Target penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, hingga akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara (ASN). Setiap target ini dirumuskan dengan cermat, lengkap dengan indikator kinerja yang terukur dan capaian yang diharapkan pada setiap tahunnya hingga akhir periode RPJMD.

Dengan menetapkan target yang jelas untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2025-2029 tidak hanya merumuskan apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana kualitas tata kelola pemerintahan akan ditingkatkan secara progresif. Ini adalah peta jalan untuk mewujudkan birokrasi yang modern, responsif, dan melayani, yang pada akhirnya akan menjadi tulang punggung bagi keberhasilan seluruh program pembangunan daerah.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Manggarai Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	77,95	83,16	83,33	83,50	83,67	83,84	84,01	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	149,89	146,89	143,95	141,08	138,25	135,49	132,78	
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	66,92	66,92	67	67,2	67,4	67,6	67,8	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	0	43,00	44,74	45,64	46,55	47,48	48,43	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	4,15	4,24	4,34	4,43	4,52	4,61	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,07	67,58	68,72	69,48	70,05	71,18	72,32	
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,51	91,89	92,08	92,57	93	93,54	94	
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	0	41,00	41,80	42,60	43,40	44,20	45,00	
5	Rasio Gini	Indeks	0,27	0,268	0,260	0,252	0,244	0,236	0,228	
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,96	8,1	8,25	8,6	9,2	9,8	10	
7	Tingkat kemiskinan (%)	%	25.35-24.9	24.9-24.01	23.14-22.64	21.93-21.43	20.72-20.22	19.51-19.01	18.30-17.80	
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,590	0,584	0,578	0,572	0,566	0,560	0,554	
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,98	73,0	73,6	74,2	74,8	75,4	76,0	
10	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	0	15,140	16,164	17,039	17,914	18,789	19,664	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,66	12,9	13,0	13,5	14,0	14,5	15	
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	38,8	36,1	33,8	31,6	29,5	27,6	25,8	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,63	1,6	1,55	1,5	1,45	1,4	1,4	
14	Skor Kabupaten Layak Anak	Skor	563	586	609	632	654	677	700	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	0,104	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	
16	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	59.4:59.4	61.5:61.5	62.5:62.5	63.9:63.9	65.2:65.2	66.5:66.5	67.7:67.7	
17	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	46,79	49,69	52,59	55,49	58,39	61,29	64,19	
18	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,82	55,32	56,82	58,32	59,82	61,32	62,82	
19	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	50,82	53,32	55,82	58,32	60,82	63,32	65,82	
20	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,20	58,30	59,40	60,50	61,60	62,70	63,80	
21	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	62,28	63	64	65	66	67	68	
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	14,56	15,17	15,78	16,39	17,00	17,61	18,22	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	45,4	53,3	53,57	60	60,2	60,56	65	
2	Tingkat Inflasi	(%)	2,45	2,40	2,35	2,33	2,3	2,25	2,1	
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persentase	4,59	4,6	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	
4	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persentase	0,12	0,33	0,54	0,75	0,96	1,17	1,38	
5	Indeks Kualitas Infrastruktur	Nilai	49,65	51,14	55,23	56,89	58,59	60,35	62,16	
6	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	0	0	4,74	6,35	7,96	9,56	11,17	
7	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdangangan Besar dan Eceran	Persentase	14,22	15,72	17,22	18,72	20,22	21,22	23,22	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,29	79,7	80	80,3	80,6	81	81,3	
9	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6548	0,6582	0,6616	0,6664	0,6697	0,6731	0,6764	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase	0	1,72	1,72	2,59	2,59	3,45	3,45	
11	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang di Kabupaten	Persentase	3	3	3	3	3	3	3	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,82	3,88	4,09	4,30	4,51	4,72	4,93	
2	Indeks Tata Kelola Demokrasi Lokal (ITKDL)	Indeks	65,3	65,3	69,0	75,0	80,0	85,0	90,0	
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	30.00-35.00	40.00-50.00	50.00-60.00	60.00-70.00	70.00-80.00	80.00-100.000	
4	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Nilai	1	1,1	1,21	1,33	1,46	1,53	1,61	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97,67	100	100	100	100	100	100	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Angka Partispasi Siswa Anak Disabilitas Pendidikan Dasar	%	0	60	65	70	75	80	85	
2	Angka Partisipasi Siswa Anak Pendidikan Dasar	%	99,23	99,34	99,47	99,58	99,67	99,89	100	
3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	0	60	65	70	75	80	85	
4	Angka Partisipasi Murni Anak Usia Pendidikan Dasar	%	88,78	89,00	89,08	89,38	89,68	89,98	90,28	
5	Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dasar	%	0	60	65	70	75	80	85	
6	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0	8,0	8,48	9,24	10,01	10,77	11,53	
7	Angka Partisipasi Murni PAUD	%	27,49	29,51	35,51	37,53	39,55	41,58	43,62	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	10	6	5	4	3	2	2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0.3:1000	0.3:1000	0.4:1000	0.5:1000	0.6:1000	0.7:1000	0.8:1000	
3	Persentase Capaian Pemenuhan SPM Kesehatan pada Rumah Sakit	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	%	206	50	45	40	35	30	25	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persentase	21,50	20,67	22,58	23,25	23,95	24,67	25,41	
3	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	0	0,20	0,36	0,52	0,68	0,84	1,00	
4	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	%	25,83	26,64	27,12	27,94	28,77	29,64	30,53	
5	Persentase tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompentensi	%	30	35	40	45	50	55	60	
6	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	71,03	73,16	75,36	77,62	79,94	82,34	84,81	
7	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabuapten yang dilayani jaringan irigasi	Persentase	41,22	42,46	43,28	44,58	45,92	47,29	48,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase penerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	41,00	42,23	45,61	46,98	48,39	49,84	51,33	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	
3	persentase luas kawasan kumuh kabupaten di bawah 10 ha yang ditangani	%	0	35	40	45	50	55	60	
4	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	34,15	100	100	100	100	100	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase	24,9	24,01	22,64	21,43	20,22	19,01	17,80	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana	Persentase	71,42	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase gelandangan dan pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Persentase	79,11	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase lanjut usia terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Persentase	84,86	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Persentase	72,03	100	100	100	100	100	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	65	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	38,11	40	45	50	55	60	65	
3	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	0,04	0,06	0,07	0,10	0,13	0,17	0,20	
4	Pesentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/ PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Persentase	10,32	10,35	10,38	12,02	13,66	15,30	16,94	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	53,16	53,41	53,66	53,91	54,16	54,41	54,66	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	0,5	0,58	1	1,2	1,4	1,8	2	
3	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	40	60	80	100	100	100	100	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	21	20	19	18	17	16	15	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	0,01	8,2	8,2	16,5	24,7	32,9	41,2	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Presentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifkat yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	50	55	60	70	80	90	100	
2	Presentase luas tanah yang terkonsolidasi	Persentase	5,18	5,25	5,34	5,50	5,66	5,83	6,01	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	0	100	100	100	100	100	100	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase	64,10	66,50	67	67,50	68	68,50	69	
2	1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	1	1	1	1,5	2	2,5	3	
4	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akta Kelahiran usia 0 s.d. 17 tahun yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	90,46	95,50	96	96,50	97	97,50	98	
6	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	41,18	100	100	100	100	100	100	
7	2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	36,06	36,50	37	37,50	38	38,50	40	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	14,11	15,00	16,00	17,00	17,50	18,00	18,50	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persentase	23,27	33,64	44,025	57,861	71,698	85,534	100	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	-3.5-3.1	3.0-2.8	2.7-2.5	2.4-2.2	2.0-1.8	1.8-1.6	1.6-1.5	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	80,01	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	80,60	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	50.49:0	37.51:0	39.48:0	41.45:0	43.52:0	45.69:0	47.97:0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	48,08	48,08	51,36	53,92	56,61	59,44	62,41	
AP	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	45	50	60	70	80	90	100	
AQ	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,63	2,69	2,71	2,82	2,85	3,10	3,23	
AR	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0	5	10	15	20	25	30	
AS	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan	%	80	30	30	50	70	90	100	
AT	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	
AU	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	0	30	35	40	45	50	55	
AV	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.598,8	4.600	4.650	4.700	4.750	4.800	4.850	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	50	50	55	60	65	70	75	
AW	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	12,22	15,00	19,32	24,42	30,52	36,62	42,72	
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	22,07	23,78	25,50	28,90	32,30	35,70	39,10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-38,28	-32,41	-26,54	-14,88	-3,18	8,52	20,22	
4	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	21	21,5	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	
AX	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase Ketersediaan data dan inforomasi industri yang lengkap dan terkini	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
AY	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Persentase	5	5	6	7	7	7	8	
AZ	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
BA	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase Pajak Daerah terhadap total realisasi PAD	Persentase	36,32	0	43,27	41,87	40,01	37,55	34,29	
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	20	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	30	30	30	30	30	30	30	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	40	40	40	40	40	40	40	
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	91,86	100	100	100	100	100	100	
BB	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	40	45	50	60	65	70	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	50	60	70	80	90	95	100	
BC	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	Level	3	3	3	3	3	4	4	
2	MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	Level	2,82	3	3	3	3	3	3	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK	%	84,41	85	85,50	86	86,50	87	87,50	
BD	**7.01 - KECAMATAN**									
1	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	2,84	100	
7	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah terpilih yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta mempertimbangkan kondisi objektif daerah, tantangan global, dan aspirasi masyarakat.

RPJMD menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya lokal, serta kekayaan wilayah yang dimiliki. Sejumlah isu strategis, seperti peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, penguatan ketahanan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi fokus utama pembangunan lima tahun ke depan. Akhirnya, RPJMD ini diharapkan menjadi instrumen utama yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, mengarahkan investasi publik secara tepat sasaran, dan membawa kemajuan nyata bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

